



Bupati Pekalongan
Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025

tentang

RPJMD 2025 - 2029

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**



**BAPPERIDA
Kabupaten Pekalongan
2025**



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memberikan arah dalam pencapaian cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pekalongan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan penetapan rencana jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (2) Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari:
 - a. visi, misi, dan program Bupati; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RTRW, RPJMD kabupaten sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : gambaran umum Daerah;
 - c. bab III : visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV : program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. bab V : penutup.

- (2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. terjadinya bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBA, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680517 198903 1 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH: (4-129/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM.

RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran lima tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045, dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Terpilih Masa Bhakti Tahun 2025-2029, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah. RPJMD Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2029, dan akan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RPJMD merupakan perspektif masa depan Daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi yaitu “Kabupaten Pekalongan Yang Maju, Adil, dan Sejahtera”, dimana pernyataan visi tersebut dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara materiel dan spiritual masyarakat Kabupaten Pekalongan menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik materiel dan spiritual atau jasmani dan rohani, sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan paling lambat 6 (bulan) setelah Bupati terpilih dilantik. Dengan demikian agar pelaksanaan pembangunan daerah segera terlaksana sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Terpilih Periode Tahun 2025-2029, maka RPJMD Tahun 2025-2029 harus segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. LATAR BELAKANG	I-1
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-2
C. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA.....	I-4
D. MAKSUD DAN TUJUAN	I-5
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	II-1
A. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
a. Posisi dan Peran Strategis Daerah	
1). Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-1
2). Letak dan Kondisi Geografis.....	II-2
3). Topografi.....	II-3
4). Geologi.....	II-4
5). Hidrologi.....	II-7
6). Klimatologi	II-13
7). Penggunaan lahan	II-14
b. Potensi Sumber Daya Alam.....	II-16
1). Rencana Pola Ruang	II-17
2). Rencana Struktur Ruang Wilayah	II-29
c. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-39
1). Daya Dukung Lingkungan.....	II-39
2). Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-48
d. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan.....	II-50
1). Indeks Ketahanan Pangan (IKP).....	II-50
2). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	II-52
3). Konsumsi Listrik Per Kapita	II-52
4). Persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	II-53
e. Lingkungan Hidup Berkualitas	II-53
1). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	II-53
2). Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	II-54
3). Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	II-55
f. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-57
1). Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	II-57
2). Indeks Risiko Bencana (IRB)	II-59
3). Indeks Ketahanan Daerah (IKD).....	II-60
g. Demografi	II-61
1). Jumlah Penduduk	II-61
2). Kepadatan Penduduk	II-62
3). Proyeksi dan Analisis Penduduk 2025-2030	II-63



2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-64
a. Aspek Kesejahteraan Ekonomi	II-64
1). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-64
2). Pertumbuhan Ekonomi	II-67
3). Pengeluaran Perkapita disesuaikan	II-68
4). Tingkat Kemiskinan	II-69
5). Kemiskinan Ekstrem	II-76
6). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-76
7). Rasio Gini	II-78
8). Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	II-79
9). Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-80
b. Kesehatan untuk Semua	II-83
1). Umur Harapan Hidup (UHH)	II-83
2). Indeks Keluarga Sehat	II-84
3). Angka Kematian Ibu (AKI)	II-85
4). Angka Kematian Bayi (AKB)	II-87
5). Kondisi Gizi	II-87
6). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	II-88
c. Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-90
1). Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	II-90
2). Harapan Lama Sekolah	II-92
3). Angka Partisipasi Sekolah 5 - 6 tahun	II-93
4). Angka Partisipasi Sekolah (APS)	II-94
5). Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	II-95
6). Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)	II-96
d. Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-97
1). Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	II-97
2). Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	II-97
e. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-98
1). Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	II-98
2). Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	II-98
f. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	II-99
1). Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-99
2). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-102
3). Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	II-104
4). Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	II-106
3. Aspek Daya Saing Daerah	II-107
a. Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-107
1). Angka Beban Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	II-107
b. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	II-109
1). Kapabilitas Inovasi	II-109
2). PDRB Per Kapita	II-110
3). Rasio PDRB Industri Pengolahan	II-111
4). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	II-111
5). Rasio Kewirausahaan Daerah	II-112
6). Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	II-112
7). Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja	II-113



8) . Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	II-114
c. Penerapan Ekonomi Hijau	II-117
d. Transformasi Digital	II-118
1). Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	II-118
e. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-118
1). Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB).....	II-118
2). Ekspor Barang dan Jasa	II-119
f. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-119
1). Persentase Desa Mandiri	II-119
2). Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	II-121
3). Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota.....	II-122
4). Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota.....	II-124
5). Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	II-124
g Stabilitas Ekonomi Makro.....	II-125
1). <i>Return on Aset (ROA)</i> BUMD	II-125
2). Disparitas Harga.....	II-126
3). Tingkat Inflasi.....	II-127
4). Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB.....	II-128
5). Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	II-129
6). Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB.....	II-130
4. Aspek Pelayanan Umum	II-132
a. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	II-132
1). Indeks Reformasi Birokrasi	II-132
2). Indeks Reformasi Hukum	II-132
3). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	II-133
4). Indeks Pelayanan Publik	II-134
5). Indeks Integritas Nasional.....	II-135
b. Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.....	II-135
1). Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	II-135
a). Pendidikan.....	II-135
b). Kesehatan.....	II-139
c). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-145
d). Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	II-150
e). Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ...	II-152
f). Sosial	II-155
2). Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-158
a). Tenaga Kerja.....	II-158
b). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-159
c). Pangan.....	II-160
d). Pertanahan.....	II-162
e). Lingkungan Hidup	II-163
f). Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-163
g). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-165
h). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-167
i). Perhubungan.....	II-167
j). Komunikasi dan Informatika	II-168
k). Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-169
l). Penanaman Modal.....	II-170
m). Kepemudaan dan Olahraga	II-171



n). Statistik	II-171
o). Persandian	II-173
p). Kebudayaan	II-174
q). Perpustakaan	II-176
r). Kearsipan	II-178
3). Urusan Pilihan.....	II-179
a). Kelautan dan Perikanan.....	II-179
b). Pariwisata	II-181
c). Pertanian	II-181
d). Perdagangan.....	II-183
e). Perindustrian.....	II-184
f). Transmigrasi	II-186
4). Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-187
a). Perencanaan.....	II-187
b). Keuangan	II-188
c). Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	II-189
d). Penelitian dan Pengembangan	II-191
e). Sekretariat Daerah	II-192
f). Sekretariat DPRD	II-193
5). Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	II-194
a). Inspektorat.....	II-194
6). Urusan Kewilayahan	II-195
a). Kecamatan.....	II-195
7). Urusan Pemerintahan Umum	II-196
a). Kesatuan Bangsa dan Politik	II-196
B. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	II-198
1. Gambaran Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2020-2024.....	II-198
a. Pendapatan Daerah 2020-2024.....	II-198
b. Belanja Daerah Tahun 2020-2024.....	II-201
c. Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024	II-203
d. Neraca Daerah Tahun 2020-2024	II-206
2. Arah Kebijakan dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2029	II-211
a. Analisis Belanja Tahun 2020-2024	II-211
b. Analisis Pembiayaan Tahun 2020-2024	II-212
c. Proyeksi Keuangan Daerah 2026-2030	II-213
C. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	II-217
1. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-217
2. Isu Strategis Daerah.....	II-226
 BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	 III-1
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	III-1
1. Visi, Misi dan Sasaran RPJMN 2025-2029	III-1
a. Visi RPJMN 2025-2029	III-1
b. Misi RPJMN 2025-2029	III-2
c. 17 Program Prioritas RPJMN 2025-2029	III-3
d. 8 Program Hasil Terbaik Cepat (<i>Quick Wins</i>)	III-3
e. Sasaran Utama Pembangunan Nasional	III-3
f. Program Strategis Nasional (PSN).....	III-5
g. Sasaran dan Tema Kewilayahan	III-5



2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	III-6
a. Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029	III-6
b. Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029	III-6
c. Tujuan dan Sasaran RPJMD Jawa Tengah 2025-2029	III-8
3. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029	III-10
a. Visi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029	III-10
b. Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029	III-15
c. Keterkaitan Visi Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	III-22
4. Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029	III-24
B. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-37
1. Strategi	III-37
2. Tahapan dan Arah Kebijakan Pembangunan	III-56
a. Kebijakan Prioritas Tahun 2026	III-57
b. Kebijakan Prioritas Tahun 2027	III-58
c. Kebijakan Prioritas Tahun 2028	III-60
d. Kebijakan Prioritas Tahun 2029	III-62
e. Kebijakan Prioritas Tahun 2030	III-64
3. Program Pembangunan Daerah	III-95
a. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan	III-95
b. Integrasi Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	III-105
4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	III-123
a. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	III-123
b. Arah Kebijakan WP Petanglong	III-125
c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Pekalongan	III-131
d. Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Pekalongan	III-132
e. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Pekalongan berdasarkan RPJMN 2025-2029	III-137
 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH	 IV-1
A. PROGRAM PERANGKAT DAERAH	IV-2
B. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-35
1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-35
2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV-37

BAB V PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pembagian Administrasi di Wilayah Kabupaten Pekalongan	II-1
Tabel 2.2.	Topografi Menurut Kecamatan Kabupaten Pekalongan.....	II-3
Tabel 2.3.	Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan.....	II-6
Tabel 2.4.	Sungai dan Anak Sungai di Kabupaten Pekalongan	II-7
Tabel 2.5.	Daerah Irigasi di Kabupaten Pekalongan	II-10
Tabel 2.6.	Nama Lumbung/ Embung Di Kabupaten Pekalongan	II-10
Tabel 2.7.	Data Kondisi Sumber Mata Air Kabupaten Pekalongan	II-11
Tabel 2.8.	Hari dan Curah Hujan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023.....	II-13
Tabel 2.9.	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2023	II-14
Tabel 2.10.	Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2017- 2023.....	II-15
Tabel 2.11.	Klasifikasi Kemampuan Lahan Kabupaten Pekalongan.....	II-40
Tabel 2.12.	Produksi Padi Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023	II-42
Tabel 2.13.	Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2024.....	II-42
Tabel 2.14.	Ketersediaan Air Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.....	II-43
Tabel 2.15.	Kebutuhan Air Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.....	II-45
Tabel 2.16.	Sebaran Luasan Daya Dukung Air per Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2022	II-46
Tabel 2.17.	Status Daya Dukung Air di Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.....	II-47
Tabel 2.18.	Indeks Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 ..	II-51
Tabel 2.19.	Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024..	II-52
Tabel 2.20.	Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-53
Tabel 2.21.	Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 - 2024	II-55
Tabel 2.22.	Persentase Pengelolaan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 - 2024.....	II-56
Tabel 2.23.	Sampah Yang Masuk TPA Bojonglarang Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 - 2024.....	II-56
Tabel 2.24.	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 - 2024	II-57
Tabel 2.25.	Upaya Pembangunan Rendah Karbon di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021	II-58
Tabel 2.26.	Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-60
Tabel 2.27.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2.28.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-62
Tabel 2.29.	Proyeksi Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030.....	II-63
Tabel 2.30.	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-65
Tabel 2.31.	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 .	II-65
Tabel 2.32.	Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-66



Tabel 2.33.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-67
Tabel 2.34.	Kemiskinan Ekstrem Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2024	II-76
Tabel 2.35.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2.36.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-80
Tabel 2.37.	Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-83
Tabel 2.38.	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-85
Tabel 2.39.	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-85
Tabel 2.40.	Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) Menurut Wilayah di Kabupaten Pekalongan tahun 2024	II-86
Tabel 2.41.	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-87
Tabel 2.42.	Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-88
Tabel 2.43.	Prevalensi Stunting Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-89
Tabel 2.44.	Jumlah PAUD bentuk pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kabupaten Pekalongan Tahun 2024	II-93
Tabel 2.45.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024..	II-94
Tabel 2.46.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024..	II-95
Tabel 2.47.	Indeks Literasi Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-96
Tabel 2.48.	Indeks Numerasi Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-96
Tabel 2.49.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-97
Tabel 2.50.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-98
Tabel 2.51.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-102
Tabel 2.52.	Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-105
Tabel 2.53.	Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024..	II-105
Tabel 2.54.	Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	II-106
Tabel 2.55.	Angka Beban Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-107
Tabel 2.56.	Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024	II-108
Tabel 2.57.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-113
Tabel 2.58.	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Pekalongan Agustus 2022–Agustus 2024.....	II-113



Tabel 2.59.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-119
Tabel 2.60.	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-120
Tabel 2.61.	Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan Tahun 2024	II-120
Tabel 2.62.	Panjang Jalan Kabupaten Pekalongan berdasarkan Kewenangan Tahun 2020-2024.....	II-122
Tabel 2.63.	Persentase Jalan Mantap Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.64.	<i>Return on Aset (ROA)</i> BUMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-126
Tabel 2.65.	Disparitas Harga Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-126
Tabel 2.66.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-128
Tabel 2.67.	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-130
Tabel 2.68.	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-131
Tabel 2.69.	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023 ...	II-132
Tabel 2.70.	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-132
Tabel 2.71.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-132
Tabel 2.72.	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-134
Tabel 2.73.	APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-136
Tabel 2.74.	APM Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-137
Tabel 2.75.	Target dan Capaian Jumlah ATS yang dikembalikan ke Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-138
Tabel 2.76.	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-139
Tabel 2.77.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-140
Tabel 2.78.	<i>Incidence Rate (IR)</i> DBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-141
Tabel 2.79.	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-143
Tabel 2.80.	Rasio Dokter per satuan penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-143
Tabel 2.81.	Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-144
Tabel 2.82.	Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2.83.	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024	II-145
Tabel 2.84.	Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-146
Tabel 2.85.	Kondisi Jalan berdasarkan Jenis Permukaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-147
Tabel 2.86.	Jenis Jembatan berdasarkan Konstruksinya Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-147
Tabel 2.87.	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-148
Tabel 2.88.	Capaian Layanan Bidang Irigasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-148
Tabel 2.89.	Kondisi Drainase Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-149



Tabel 2.90.	Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-149
Tabel 2.91.	Capaian Kinerja Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-150
Tabel 2.92.	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-150
Tabel 2.93.	Rekapitulasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-151
Tabel 2.94.	Capaian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-151
Tabel 2.95.	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-152
Tabel 2.96.	Penyelesaian Pelanggaran Perda Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-152
Tabel 2.97.	Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-153
Tabel 2.98.	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-153
Tabel 2.99.	Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.100.	Jumlah Unjuk Rasa Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.101.	Kinerja Sub-Urusan Kebakaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-154
Tabel 2.102.	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024.....	II-155
Tabel 2.103.	Perkembangan Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-156
Tabel 2.104.	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024	II-157
Tabel 2.105.	Perkembangan Pelayanan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-158
Tabel 2.106.	Perkembangan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-160
Tabel 2.107.	Capaian Pelayanan Urusan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-161
Tabel 2.108.	Jumlah Lumbung Pangan di Kabupaten Pekalongan dan Tahun Pendiariannya.....	II-162
Tabel 2.109.	Capaian Pelayanan Urusan Pertanahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-163
Tabel 2.110.	Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-163
Tabel 2.111.	Perkembangan Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-164
Tabel 2.112.	Peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024.....	II-166
Tabel 2.113.	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-166
Tabel 2.114.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-166
Tabel 2.115.	Perkembangan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-167



Tabel 2.116.	Perkembangan Pelayanan Perhubungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-168
Tabel 2.117.	Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-169
Tabel 2.118.	Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-170
Tabel 2.119.	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-170
Tabel 2.120.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-171
Tabel 2.121.	Predikat Indeks Satu Data Indonesia	II-172
Tabel 2.122.	Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.....	II-173
Tabel 2.123.	Nilai Indeks Aspek Kabupaten Pekalongan Tahun 2023	II-173
Tabel 2.124.	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-174
Tabel 2.125.	Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023	II-175
Tabel 2.126.	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-177
Tabel 2.127.	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-178
Tabel 2.128.	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-178
Tabel 2.129.	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-179
Tabel 2.130.	Perkembangan Perikanan Budidaya Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-180
Tabel 2.131.	Perkembangan Perikanan Tangkap Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-180
Tabel 2.132.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-181
Tabel 2.133.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-182
Tabel 2.134.	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-183
Tabel 2.135.	Indikator Capaian Pelayanan Urusan Perindustrian Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-185
Tabel 2.136.	Jumlah Usaha Industri Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-185
Tabel 2.137.	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-186
Tabel 2.138.	Indikator Capaian Pelayanan Urusan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-187
Tabel 2.139.	Capaian Kinerja Fungsi Perencanaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-188
Tabel 2.140.	Capaian Kinerja Fungsi Keuangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-189
Tabel 2.141.	Nominatif Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Pekalongan Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2024	II-189



Tabel 2.142.	Nominatif Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2024	II-190
Tabel 2.143.	Capaian Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-191
Tabel 2.144.	Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-191
Tabel 2.145.	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-192
Tabel 2.146.	Capaian Kinerja Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-193
Tabel 2.147.	Capaian Kinerja Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-194
Tabel 2.148.	Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-195
Tabel 2.149.	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 (Rp. 000).....	II-198
Tabel 2.150.	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 (Rp. 000).....	II-201
Tabel 2.151.	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 Rp. (000)	II-204
Tabel 2.152.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024	II-205
Tabel 2.153.	Rasio Likuiditas Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.....	II-206
Tabel 2.154.	Rasio Solvabilitas Kabupaten Pekalongan Tahun 2024	II-207
Tabel 2.155.	Neraca Kabupaten Pekalongan 2020-2024 (Rp.)	II-208
Tabel 2.156.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 Rp. (000)	II-211
Tabel 2.157.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023 (Rp.000)	II-212
Tabel 2.158.	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Secara Prioritas Utama Kabupaten Pekalongan Tahun 2024-2029 (Rp.000).....	II-212
Tabel 2.159.	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023 (Rp.000).....	II-213
Tabel 2.160.	Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 (Rp.000)	II-213
Tabel 2.161.	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030 (Rp.000)	II-214
Tabel 2.162.	Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030.....	II-226
Tabel 2.163.	Analisis Isu Strategis Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029.....	II-227
Tabel 3.1.	Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang	III-23
Tabel 3.2.	Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 - 2029	III-24
Tabel 3.3.	Sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025-2029	III-27
Tabel 3.4.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029	III-28
Tabel 3.5.	Strategi untuk Mewujudkan Sasaran 1: Meningkatnya SDM Kabupaten Pekalongan yang Unggul dan Inklusif.....	III-37



Tabel 3.6.	Strategi Pembangunan Sasaran 2 : Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap resiko bencana	III-41
Tabel 3.7.	Strategi Pembangunan Sasaran 3 : Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan	III-44
Tabel 3.8.	Strategi Pembangunan Sasaran 4 : Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik	III-51
Tabel 3.9.	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Sektoral.....	III-67
Tabel 3.10.	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029...	III-97
Tabel 3.11.	Integrasi Program Prioritas Provinsi dalam Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan	III-106
Tabel 3.12.	Integrasi 35 Program Delegasi Provinsi ke dalam Arah Kebijakan Pembangunan	III-120
Tabel 3.13.	Target Kinerja Makro WP Petanglong	III-129
Tabel 4.1.	Program Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029	IV-20
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030.....	IV-36
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030.....	IV-38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Pekalongan Periode 2025-2030	I-1
Gambar 1.2.	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I-5
Gambar 2.1.	Peta Kabupaten Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah	II-1
Gambar 2.2.	Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan.....	II-3
Gambar 2.3.	Peta Topografi Kabupaten Pekalongan	II-4
Gambar 2.4.	Peta Struktur Geologi Kabupaten Pekalongan	II-6
Gambar 2.5.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan	II-7
Gambar 2.6.	Peta Hidrologi Kabupaten Pekalongan	II-13
Gambar 2.7.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan	II-15
Gambar 2.8.	Arah Pengembangan WP Petanglong	II-17
Gambar 2.9.	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pekalongan.....	II-18
Gambar 2.10.	Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Pekalongan	II-20
Gambar 2.11.	Peta Rawan Bencana Kabupaten Pekalongan.....	II-21
Gambar 2.12.	Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Pekalongan.....	II-24
Gambar 2.13.	Peta Wilayah Pertambangan Kabupaten Pekalongan.....	II-26
Gambar 2.14.	Peta Rencana Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Pekalongan.....	II-27
Gambar 2.15.	Peta Lokasi Pariwisata Kabupaten Pekalongan	II-28
Gambar 2.16.	Peta Lokasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Pekalongan.....	II-29
Gambar 2.17.	Skema Proses Daya Dukung Lingkungan Hidup.....	II-39
Gambar 2.18.	Grafik Persentase Luas Kemampuan Lahan per Zona Kelas Kabupaten Pekalongan.....	II-41
Gambar 2.19.	Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Pekalongan	II-41
Gambar 2.20.	Peta Ketersediaan Air Kabupaten Pekalongan	II-44
Gambar 2.21.	Peta Kebutuhan Air Kabupaten Pekalongan	II-46
Gambar 2.22.	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Pekalongan	II-48
Gambar 2.23.	Grafik Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-49
Gambar 2.24.	Grafik Perkembangan Nilai IKU Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-50
Gambar 2.25.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023	II-52
Gambar 2.26.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-54
Gambar 2.27.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-55
Gambar 2.28.	Perkembangan Emisi GRK Per Sektor di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 - 2023	II-59
Gambar 2.29.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Pekalongan Tahun 2020 - 2024...	II-61
Gambar 2.30.	Piramida Penduduk Kabupaten Pekalongan, 2025 dan 2030.....	II-64
Gambar 2.31.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-68
Gambar 2.32.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024 ...	II-68
Gambar 2.33.	Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-69



Gambar 2.34.	Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024...	II-69
Gambar 2.35.	Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-70
Gambar 2.36.	Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020- 2024.....	II-71
Gambar 2.37.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-71
Gambar 2.38.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024.....	II-72
Gambar 2.39.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-73
Gambar 2.40.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024.....	II-73
Gambar 2.41.	Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-74
Gambar 2.42.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024.....	II-75
Gambar 2.43.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024	II-75
Gambar 2.44.	TPT Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-77
Gambar 2.45.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-77
Gambar 2.46.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024 .	II-78
Gambar 2.47.	Rasio Gini Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-79
Gambar 2.48.	Sumber Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-80
Gambar 2.49.	IPM Kabupaten/Kota tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah.....	II-81
Gambar 2.50.	Rata-rata Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-81
Gambar 2.51.	IPM Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-82
Gambar 2.52.	IPM Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024.....	II-82
Gambar 2.53.	Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-83
Gambar 2.54.	Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024 ...	II-84
Gambar 2.55.	Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024	II-85
Gambar 2.56.	Jumlah Kasus Kematian Bayi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-87
Gambar 2.57.	Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024	II-88
Gambar 2.58.	Jumlah Kasus Stunting Balita s.d. 59 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember 2024	II-89
Gambar 2.59.	Prevalensi Stunting Balita s.d 59 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember 2024	II-89
Gambar 2.60.	Prevalensi Stunting Kabupaten Pekalongan 2020-2024	II-90



Gambar 2.61.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-91
Gambar 2.62.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024.....	II-91
Gambar 2.63.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-92
Gambar 2.64.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024 ...	II-92
Gambar 2.65.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD usia 5-6 tahun Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-94
Gambar 2.66.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-99
Gambar 2.67.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024	II-100
Gambar 2.68.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2020-2024.....	II-100
Gambar 2.69.	Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin. Kabupaten Pekalongan 2020-2024	II-101
Gambar 2.70.	Umur Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2020-2024.....	II-101
Gambar 2.71.	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan 2020-2024	II-102
Gambar 2.72.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-103
Gambar 2.73.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024	II-103
Gambar 2.74.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II-104
Gambar 2.75.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2024	II-107
Gambar 2.76.	<i>Dependency Ratio</i> Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-108
Gambar 2.77.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2024	II-109
Gambar 2.78.	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-110
Gambar 2.79.	PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2024.....	II-110
Gambar 2.80.	Rasio PDRB Industri Pengolahan ADHB dan ADHK Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-111
Gambar 2.81.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ADHB dan ADHK Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-112
Gambar 2.82.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-114
Gambar 2.83.	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Agustus 2022 – Agustus 2024 (ribu orang)	II-115
Gambar 2.84.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Agustus 2024 (persen)	II-116
Gambar 2.85.	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2022 - Agustus 2024 (ribu orang)	II-116



Gambar 2.86.	Banyaknya Infrastruktur Energi Baru Terbarukan Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 (PLTM Desa Bantar Kulon, Kec. Lebak Barang).....	II-117
Gambar 2.87.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-118
Gambar 2.88.	Nilai Ekspor Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-119
Gambar 2.89.	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-120
Gambar 2.90.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-121
Gambar 2.91.	Persentase Jalan Mantap Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-123
Gambar 2.92.	Jaringan Jalan Tol Trans Jawa di Wilayah Kabupaten Pekalongan.....	II-123
Gambar 2.93.	Exit Tol Bojong Kabupaten Pekalongan Pekalongan	II-123
Gambar 2.94.	Return on Aset (ROA) BUMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-126
Gambar 2.95.	Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan,Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-128
Gambar 2.96.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-129
Gambar 2.97.	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-130
Gambar 2.98.	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-131
Gambar 2.99.	Indeks SPBE Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-134
Gambar 2.100.	Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024	II-135
Gambar 2.101.	Jumlah Penemuan Kasus TBC Kabupaten Pekalongan Tahun 2024	II-140
Gambar 2.102.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-141
Gambar 2.103.	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (<i>Succes Rate/SR</i>) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Provinsi Jateng	II-141
Gambar 2.104.	<i>Incidence Rate (IR)</i> DBD Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-142
Gambar 2.105.	<i>Case Fatality Rate Demam Berdarah Dengue (CFR DBD)</i> Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-142
Gambar 2.106.	<i>Case Fatality Rate Demam Berdarah Dengue (CFR DBD)</i> Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	II-142
Gambar 2.107.	Persentase Jalan Mantap Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-146
Gambar 2.108.	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024.....	II-147
Gambar 2.109.	Peluncuran Kartu Disabilitas dan Aplikasi Sosial Peduli Tahun 2022	II-156
Gambar 2.110.	Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-159
Gambar 2.111.	Klasifikasi Status Desa	II-165
Gambar 2.112.	Struktur Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI	II-172
Gambar 2.113.	Hasil Penilaian Evaluasi SDI Kab. Pekalongan Tahun 2023	II-173



Gambar 2.114.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-196
Gambar 2.115.	Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024	II-200
Gambar 2.116.	Rasio Belanja Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Tahun 2020-2024 (persen)	II-203
Gambar 2.117.	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Terhadap Total Belanja Tahun 2020-2024 (persen)	II-203
Gambar 3.1.	Asta Cita RPJMN 2025-2029	III-2
Gambar 3.2.	Pemetaan Asta Cita ke dalam Penyelenggaraan Urusan	III-2
Gambar 3.3.	8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins)	III-3
Gambar 3.4.	Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2029	III-5
Gambar 3.5.	Tema Pembangunan Wilayah Pulau/Kepulauan RPJMN 2025-2029	III-5
Gambar 3.6.	Keterkaitan Visi dan Pokok Visi, Misi, dan Fokus Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029	III-7
Gambar 3.7.	Logframe Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029	III-8
Gambar 3.8.	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029	III-10
Gambar 3.9.	Indikator Visi Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029.....	III-15
Gambar 3.10.	Pembagian Generasi.....	III-16
Gambar 3.11.	Keterkaitan Visi dan Pokok Visi, Misi, dan Fokus Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029	III-22
Gambar 3.12.	Logframe Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 - 2029	III-25
Gambar 3.13.	Cascading Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 - 2029	III-26
Gambar 3.14.	Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2026-2030.....	III-57
Gambar 3.15.	Arahan Kebijakan WP Petanglong.....	III-130
Gambar 3.16.	Konsep Pola Ruang WP Petanglong	III-135
Gambar 3.17.	Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan 2024	III-136
Gambar 3.18.	Kawasan Risiko Bencana Kabupaten Pekalongan	III-136
Gambar 3.19.	Konsep Pola Ruang Kabupaten Pekalongan.....	III-137

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Pekalongan dan Wakil Bupati Pekalongan pada tanggal 18 Februari 2025 sebagai hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada tanggal 27 November 2024. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang.

Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Hari Kamis, 20 Februari 2025, telah dilaksanakan Pelantikan Serentak 961 Kepala Daerah yang pertama kali di Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto di Istana Negara termasuk **Dr. Hj. Fadia Arafiq, SE., MM** dan **H. Sukirman, S.S., M.S** yang resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan untuk **periode 2025-2030**.



Gambar 1.1. Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Pekalongan Periode 2025-2030

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 **paling lambat 6 (enam) bulan** setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah **tahap pertama** pada periode RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah “**Kabupaten Pekalongan Yang Maju, Adil dan Sejahtera**”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan **5 (lima) Misi** yaitu: 1) Memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan; 2) Menuntaskan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas; 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing; 4) Memperkuat ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5) Menguatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani.



Dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada **Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029** yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6634);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 122);
22. Peraturan Presiden No 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

C. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten dengan arah kebijakan serta serta prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kabupaten Pekalongan.

RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Selain itu dalam penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan:

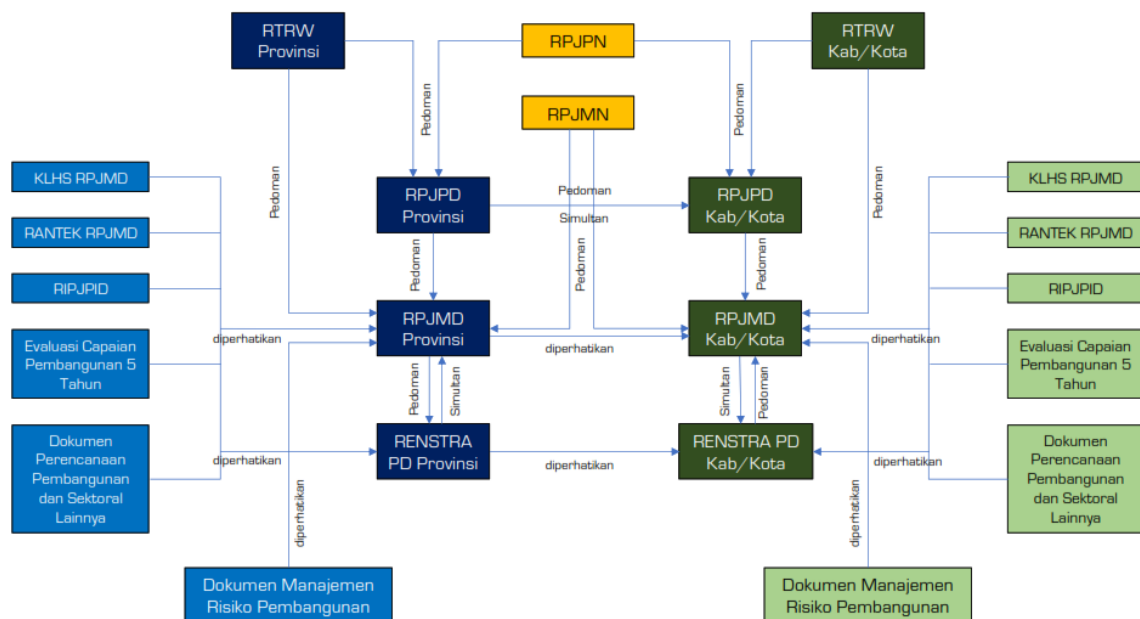
1. Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2020-2024, terutama pada tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, meliputi substansi isu strategis, dan arah kebijakan;



3. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik tematik, integratif, serta spasial.

RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 yang disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk Menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 1.2. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD periode tahun 2025-2029.



2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 ini adalah:

- Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 2025-2029;
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota yang berbatasan;
- Menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pekalongan yang tertuang dalam Renstra PD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029;
- Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis dari beberapa subbab antara lain **subbab gambaran umum kondisi daerah** yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum, **subbab gambaran keuangan daerah** yang memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029 dan **subbab permasalahan dan isu strategis** yang memuat permasalahan pembangunan daerah serta isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis dari beberapa subbab antara lain **subbab visi, misi, tujuan dan sasaran** yang memuat visi dan misi serta tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; **subbab strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah** yang memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 serta program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis dari beberapa subbab antara lain **subbab program perangkat daerah** yang memuat daftar program perangkat daerah Tahun 2025-2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah serta indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah Tahun 2025-2030; **subbab kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah** yang memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2030 melalui **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun



2025-2030 melalui **Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)**.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

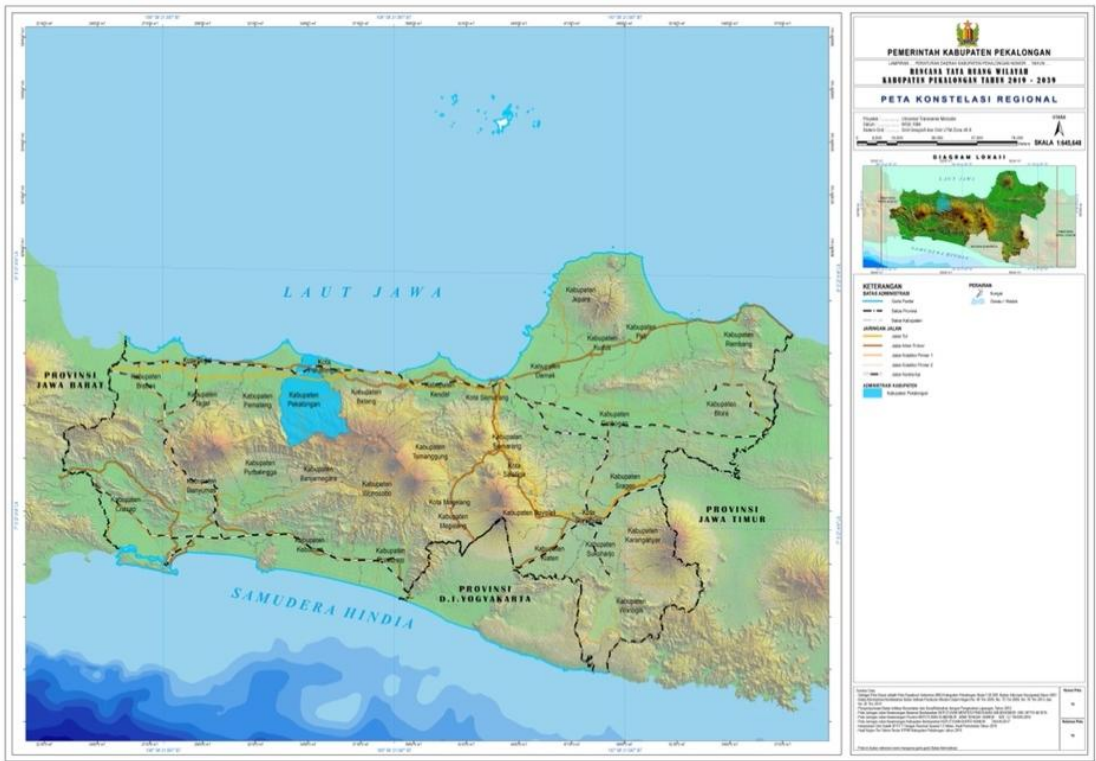
A. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1). Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah pantura bagian barat, memanjang ke arah selatan dengan Kota Kajan sebagai ibukota pusat pemerintahan. Posisi Kabupaten Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1. Peta Kabupaten Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah

Luas wilayah Kabupaten Pekalongan seluas 89.304 hektar (RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040). Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 kecamatan dan 285 desa/kelurahan. Dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 11 desa yang merupakan desa pesisir dan 274 desa/kelurahan bukan termasuk desa pesisir.

Tabel 2.1.
Pembagian Administrasi di Wilayah Kabupaten Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa	Kelurahan	Dusun	RW	RT
1	Kandangserang	60,55	14	-	68	60	153
2	Paninggaran	92,99	15	-	65	66	202
3	Lebakbarang	58,20	11	-	35	33	85
4	Petungkriyono	73,58	9	-	40	40	91



No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa	Kelurahan	Dusun	RW	RT
5	Talun	58,57	10	-	67	31	144
6	Doro	68,45	14	-	48	62	212
7	Karanganyar	63,48	15	-	67	75	203
8	Kajen	75,15	24	1	96	119	321
9	Kesesi	68,52	23	-	65	121	380
10	Sragi	32,40	16	1	75	154	402
11	Siwalan	25,91	13	-	60	97	272
12	Bojong	40,06	22	-	74	92	288
13	Wonopringgo	18,80	14	-	43	44	140
14	Kedungwuni	22,94	16	3	69	135	409
15	Karangdadap	20,99	11	-	56	69	174
16	Buaran	9,54	7	3	26	82	237
17	Tirto	17,39	16	-	41	64	251
18	Wiradesa	12,71	11	5	30	91	297
19	Wonokerto	15,90	11	-	33	66	205
Jumlah		836,13	272	13	1.058	1.501	1.501

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2024

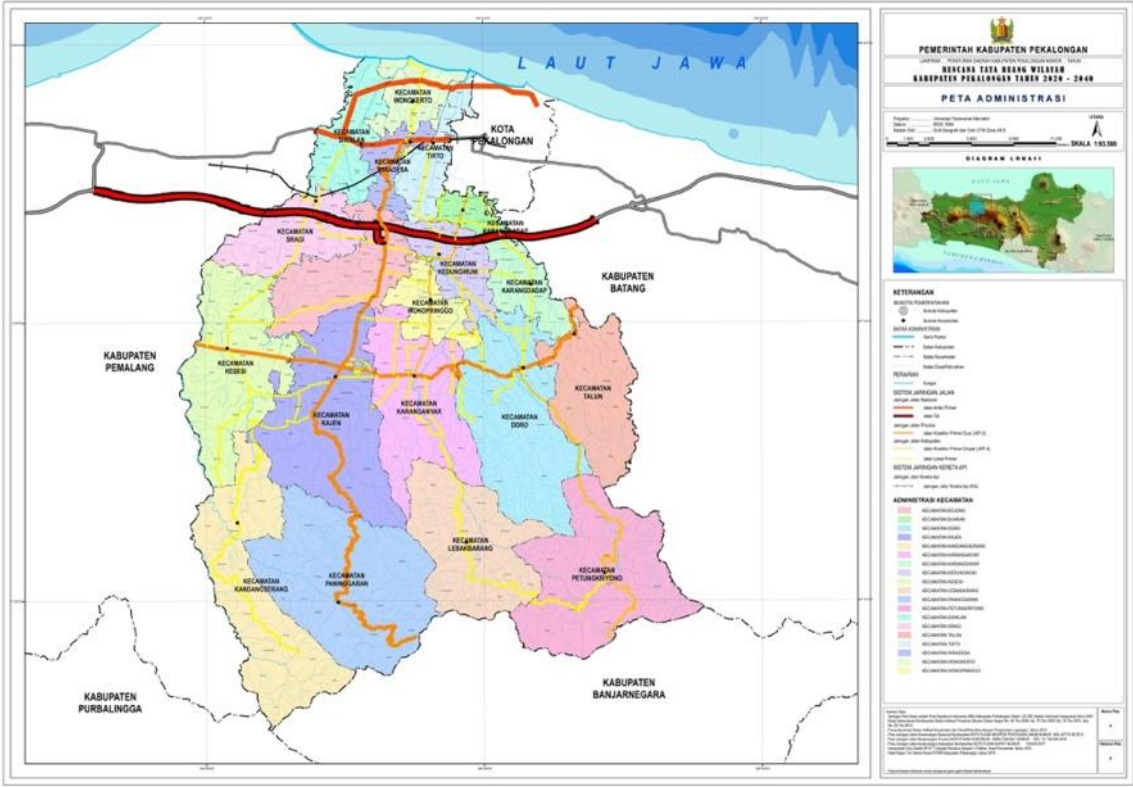
Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 272 desa, 13 kelurahan, 1.058 dusun, 1.501 RW, dan 4.466 RT. Kecamatan Kajen dan Kecamatan Kesesi dengan jumlah desa terbanyak yaitu masing-masing sebanyak 24 desa dan 23 desa. Untuk kelurahan hanya terdapat di Kecamatan Kajen, Sragi, Kedungwuni, Buaran, dan Wiradesa, dengan jumlah kelurahan terbanyak terdapat di Kecamatan Wiradesa sebanyak 5 kelurahan. Jumlah dusun terbanyak terdapat di Kecamatan Kajen sebanyak 96 dusun. Jumlah RW terbanyak terdapat di Kecamatan Sragi sebanyak 154 RW sedangkan untuk RT dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Kedungwunisebanyak 409 RT.

2). Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Pekalongan mempunyai bentuk yang memanjang dari utara ke selatan. Di bagian utara termasuk wilayah pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa. Secara astronomis letak Kabupaten ini berada di antara 6° - 7° 23' Lintang Selatan dan antara 109° - 109° 78' Bujur Timur. Karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa maka dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 6 desa pantai. Kabupaten Pekalongan memiliki batas administrasi meliputi :

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Pekalongan;
- Sebelah Timur : Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga;
- Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang.

Adapun peta administrasi Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan

3). Topografi

Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, terdapat 66 desa/kelurahan (23,16%) yang terdapat di dataran tinggi dan sebanyak 208 desa/kelurahan (72,98%) berada di dataran rendah serta 11 desa/kelurahan (3,86%) pada dataran pantai Kelerengan lahan di wilayah Kabupaten Pekalongan cukup bervariasi.

Secara umum rona kelerengan di Pekalongan merupakan pegunungan dibagian selatan yang melandai ke arah utara (pantai). Keragaman kelerengan di Kabupaten Pekalongan Bervariasi mulai dari 0- 2 % yang meliputi bagian utara sampai dengan bagian tengah Kabupaten Pekalongan, 0-15 % bagian tengah Pekalongan (Kecamatan Doro dan Talun), 15-40% yang meliputi bagian selatan Kecamatan Talun, Doro, sebagian Kecamatan Kandangserang dan Paningggaran serta kelerengan lebih dari 40 % yang meliputi sebagian besar Kecamatan Lebakbarang, Petungkriyono, bagian utara dan selatan Kecamatan Paningggaran, bagian barat Kecamatan Kajen dan bagian selatan Kecamatan Kandangserang.

Adapun tabel ketinggian wilayah per kecamatan dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.
Topografi Menurut Kecamatan Kabupaten Pekalongan

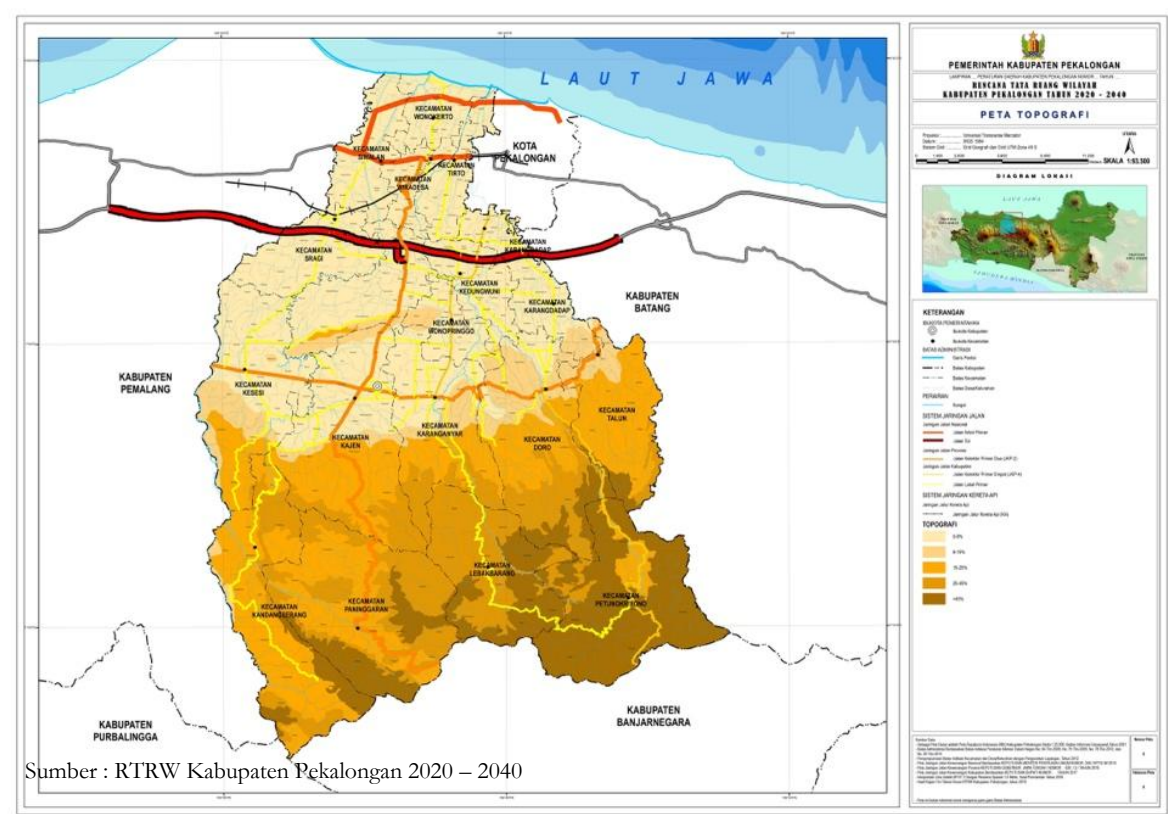
No.	Kecamatan	Tinggi dari Permukaan Laut (m)	Kecamatan			Desa/ Kelurahan		
			Pantai	Rendah	Tinggi	Pantai	Rendah	Tinggi
1.	Kandangserang	276	-	-	1	-	-	14
2.	Paningggaran	850	-	-	1	-	-	15
3.	Lebakbarang	691	-	-	1	-	-	11
4.	Petungkriyono	1.294	-	-	1	-	-	9
5.	Talun	300	-	-	1	-	6	4
6.	Doro	381	-	-	1	-	8	6



No.	Kecamatan	Tinggi dari Permukaan Laut (m)	Kecamatan			Desa/ Kelurahan		
			Pantai	Rendah	Tinggi	Pantai	Rendah	Tinggi
7.	Karanganyar	70	-	1	-	-	13	2
8.	Kajen	60	-	1	-	-	20	5
9.	Kesesi	40	-	1	-	-	23	-
10.	Sragi	9	-	1	-	3	17	-
11.	Siwalan	9	-	1	-	-	10	-
12.	Bojong	50	-	1	-	-	22	-
13.	Wonopringgo	20	-	1	-	-	14	-
14.	Kedungwuni	11	-	1	-	-	19	-
15.	Karangdadap	11	-	1	-	-	11	-
16.	Buaran	8	-	1	-	-	10	-
17.	Tirto	4	-	1	-	2	14	-
18.	Wiradesa	4	-	1	-	-	16	-
19.	Wonokerto	4	-	1	-	6	5	-
	Jumlah	-	-	13	6	11	208	66

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2024

Sedangkan peta topografi Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Pekalongan

4). Geologi

Struktur Geologi Kabupaten Pekalongan terdiri dari :

a). Daerah Endapan *Aluvial*

- (1). Aluvium, yang terletak pada ketinggian 0 - 25 m dpl. Daerah meliputi Kecamatan Sragi, Wiradesa, Tirto, Buaran, Kedungwuni, Doro, Wonopringgo, Karanganyar, Kajen, Kesesi dan Bojong dengan luas keseluruhan 25.138,9516 Ha atau sebesar 30,23 % dari luas keseluruhan. Kawasan ini cukup sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian namun harus didukung oleh pengairan atau irigasi yang memadai. Untuk mendukung potensi pertanian yang ada di kawasan ini maka kecamatan-kecamatan tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan.



- (2). Aluvium Facies Gunung Api, terlelak pada ketinggian antara 25 - 500 dpl. Struktur geologi ini meliputi daerah - daerah di Kecamatan Petungkriyono, Talun, Kandangserang, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni; luas cakupan wilayahnya seluas 12.970,6250 Ha atau sekitar 14,45 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Daerah ini merupakan lahan dengan kualitas yang baik bagi pengembangan pertanian karena memiliki sifat menyerap dan menampung air. Namun perlu diperhatikan dalam pengembangannya nanti tetap harus memperhatikan kelayakan lahannya.

b). Daerah Hasil Gunung Api Kwarter Tua

Daerah ini terletak pada daerah dengan ketinggian sekitar 500 meter dpl atau lebih. Struktur geologi ini terdapat di Kecamatan Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono, Talun, Doro, Karanganyar, Kajen, Kesesi, dan Karanganyar; dengan luas cakupan wilayahnya sebesar 17.681,250 Ha atau sekitar 19,70 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Umumnya bersifat kurang subur, dengan kondisi topografi relatif kasar dimana pelapukan dari daerah ini mudah terbawa oleh hanyutan sungai yang melintasi kawasan tersebut yang berdampak pada penurunan tingkat kesuburan lahan. Karena sifatnya tersebut maka pengembangan di daerah ini diprioritaskan pada pengembangan kegiatan yang mengarah pada perlindungan tanah serta mengurangi dan mencegah kekritisian lahan dengan pengembangan kawasan lindung, hutan produksi terbatas atau hutan rakyat.

c). Daerah Miosen Facies Sedimen

Terdapat pada daerah dengan ketinggian lebih dari 500 m atau-pun lebih dari 1000 m dpl. Pada umumnya merupakan daerah dengan potensi kehutanan dengan total luasan mencapai 18.850,000 Ha atau sekitar 20,26 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Terletak di Kecamatan Kesesi, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono, Karanganyar, Kajen dan sebagian kecil Kecamatan Kesesi. Untuk mendukung potensi tersebut maka pengembangan diarahkan pada pengembangan kegiatan perkebunan, hutan tanaman keras, hutan produksi dan hutan rakyat.

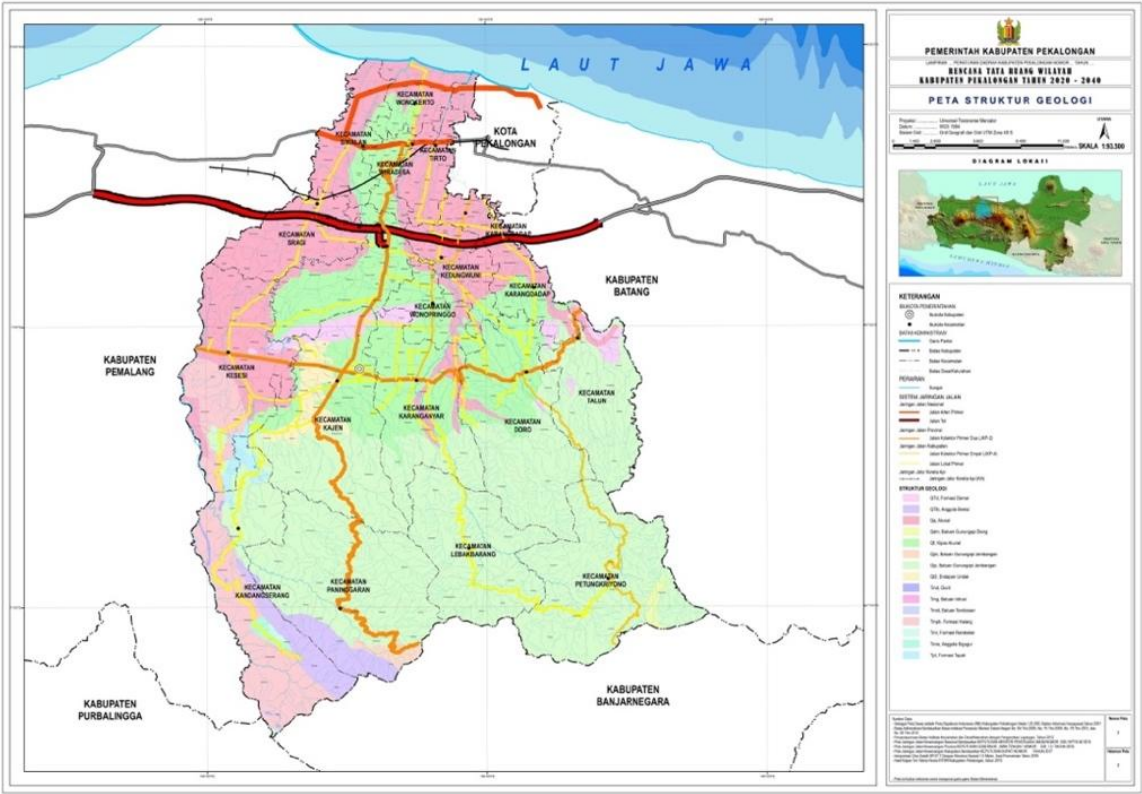
d). Daerah geologi lain

- (1). Daerah Hasil Gunung Api
Terdapat di Kecamatan Kesesi, Paninggaran dengan luas keseluruhan mencapai 6.555,8333 Ha atau 7,30% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.
- (2). Daerah Hasil Gunung Api tak teruraikan
Pada umumnya daerah ini berupa batuan breksi, lava, lapili dan tupa. Umumnya batuan tersebut membentuk bukit-bukit tinggi yang tertutup dan berwarna abu-abu tua sampai coklat dan kuning kemerahan. Jenis lahan ini mencakup wilayah-wilayah di kecamatan Kandangserang, Paninggaran, Talun, Doro, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni.
- (3). Daerah Pra Tertier Sedimen
Terdapat di Kecamatan Petungkriyono dengan luasan sekotat 2.020 Ha atau sekitar 2,25 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.
- (4). Daerah Pliosen Facies Sedimen
Terdapat di kecamatan kesesi dan Kajen dengan luasan sekitar 572 Ha atau 0,64 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.
- (5). Daerah Oligosen
Terdapat di Kecamatan Kandangserang dan Paninggaran dengan luasan sekitar 262,500 Ha atau sekitar 0,29% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.



- (6). Daerah Granit
Terdapat di Kecamatan Kesesi dengan luasan sekitar 150 ha atau sekitar 0,13 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

Kondisi geologi lingkungan di Kabupaten Pekalongan secara umum dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.4. Peta Struktur Geologi Kabupaten Pekalongan

Sebaran jenis tanah di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan

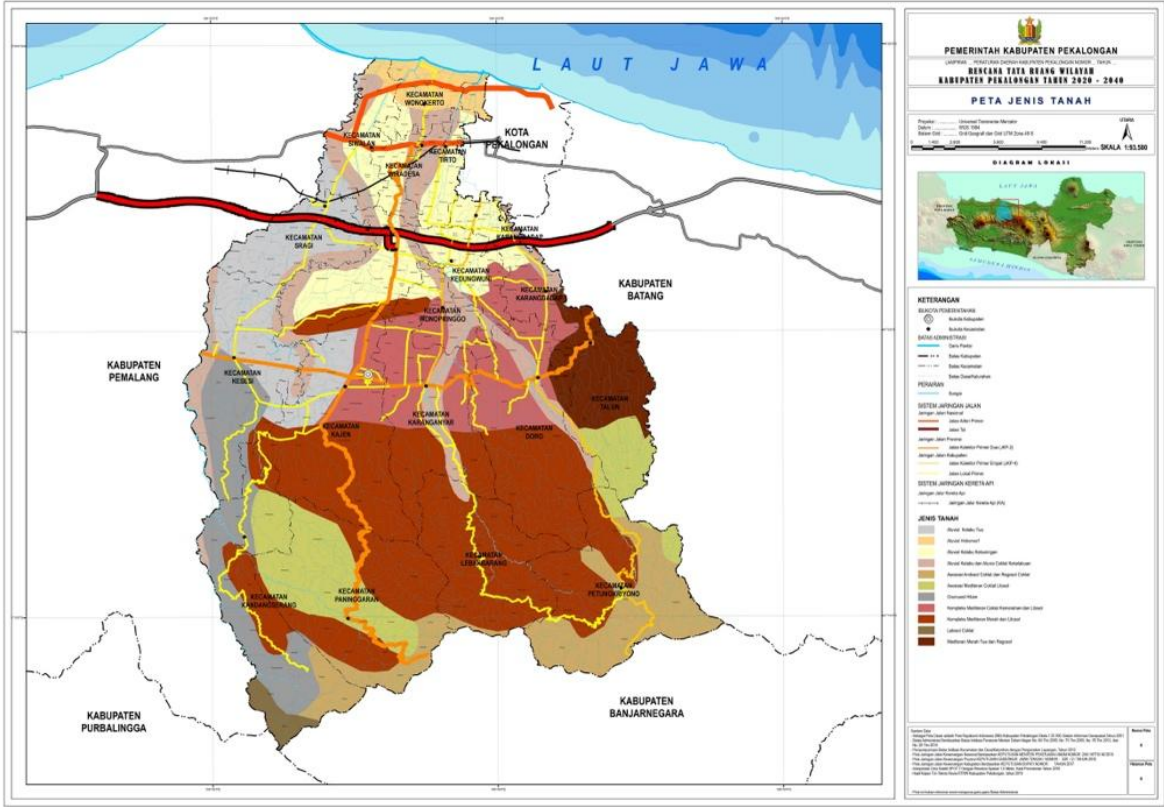
No.	Jenis Tanah	Kecamatan
1	latosol coklat	Kec. Paninggaran, Kandangserang, Doro
2	aluvial kelabu tua	Kec. Sragi dan Kedungwuni
3	kompleks gromosol mediteran	Kec. Kandangserang
4	latosol coklat	Kec. Paninggaran, Doro, Karanganyar, Kajen, Kesesi, Bojong, Wonopringgo, Kedungwuni
5	alluvial kelabu	Kec. Sragi, Kajen, Kesesi, Bojong, Buaran, Tirto, Wiradesa
6	alluvial coklat	Kec. Sragi, Bojong, Wonopringgi, Kedungwuni, Buaran, Tirto
7	alluvial hidromorf	Kec. Sragi, Wiradesa, Tirto
8	kompleks latosol merah kekuning-kuningan dan latosol coklat kemerahan	Kec. Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono



No.	Jenis Tanah	Kecamatan
9	andosol coklat	Kec. Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2024

Adapun peta jenis tanah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan

5). Hidrologi

a). Air Permukaan

Keadaan hidrologi ditunjukkan oleh keberadaan sungai, mata air,dan waduk yang terdapat di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan secara hidrologi terbagi ke dalam 4 Daerah Aliran Sungai, yaitu DAS Kupang, DAS Sekarang, DAS Sragi dan DAS Genteng. Keempat daerah aliran sungai ini merupakan daerah aliran sungai utama yang mencakup beberapa aliran sungai yang ada di Kabupaten Pekalongan yang kesemuanya bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai dan anak sungai yang terdapat di Kabupaten Pekalongan, antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4.
Sungai dan Anak Sungai di Kabupaten Pekalongan

No	Nama Sungai/ Anak Sungai	Luas Dta (Km)	Panjang (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Keterangan
A	Sungai Sengkarang	189	63.35	Petungkriyono, Lebakbarang, Karanganyar, Wonopringgo, Kedungwuni, Bojong, Wiradesa, Tirto, Wonokerto	
1	Sungai Banteng	4.30	3.30	Petungkriyono	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No	Nama Sungai/ Anak Sungai	Luas Dta (Km)	Panjang (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Keterangan
2	Sungai Pakis	6.47	4.50	Petungkriyono	
3	Sungai Totogan	3.00	3.10	Petungkriyono	
4	Sungai Sawangan	5.70	3.50	Petungkriyono	
5	Sungai Kedondong	27.39	5.00	Lebakbarang	
a.	Sungai Kumenyep	14.81	7.5	Petungkriyono Dan Lebakbarang	
b	Sungai Sedo 1	3.55	4.20	Lebakbarang	
6	Sungai Pundutan	1.25	0.05	Lebakbarang	
7	Sungai Wisnu	5.85	8.40	Lebakbarang, Karanganyar	
a	Sungai Mendolo	4.15	3.5	Lebakbarang	
8	Sungai Blimbing	48.43	12.40	Karanganyar, Doro	
a	Sungai Klame	5.80	2.40	Doro	
b	Sungai Sorosido	9.25	11.30	Doro	
c	Sungai Sarak	3.05	4.10	Doro	
d	Sungai Anget	4.35	3.60	Doro	
e	Sungai Sintarol	2.20	3.10	Doro	
f	Sungai Manggis	5.70	3.55	Karanganyar	
9	Sungai Grugak	8.45	8.15	Doro	
10	Sungai Welo	49.52	27.00	Petungkriyono, Doro, Kedungwuni	
11	Sungai Kaliagung	0.00	3.10	Karanganyar, Wonopringgo	
B	Sungai Meduri	14.82	8.00	Tirto	
1	Sungai Ngalian	5.10	5.80	Tirto, Buaran	
2	Sungai Bremit	10.96	9.00	Tirto	
3	Sungai Pucung/ Buntu	3.60	4.20	Tirto	
C	Sungai Mrican	11.20	12.00	Wiradesa, Wonokerto	
D	Sungai Pecakaran	2.50	3.75	Wonokerto	
E	Sungai Pegantungan (Sungai Pekuncen)	3.00	3.98	Wiradesa, Wonokerto	
F	Sungai Kupang	15.76	6.90	Petungkriyono, Talun, Karangdadap, Buaran	
1	Sungai Mangunan	3.90	3.40	Petungkriyono	
2	Sungai Sumilir	10.12	8.70	Talun	
a	Sungai Jolotigo	4.05	3.10	Talun	
3	Sungai Wengker	4.35	5.70	Talun	
4	Sungai Gandu	13.19	9.15	Talun, Karangdadap	
a	Sungai Mijen (A)	2.15	2.85	Talun	
b	Sungai Wanglu	7.15	6.80	Talun	
c	Sungai Winong – Sono	2.75	7.10	Talun	
5	Sungai Kaliwage	3.70	4.20	Doro, Talun, Karangdadap	
a	Sungai Bendo	7.40	6.20	Doro, Talun, Karangdadap	
6	Sungai Tengah	6.15	6.75	Doro, Karangdadap	
a	Sungai Langu	1.10	3.15	Karangdadap	
7	Sungai Worowari	5.70	5.50	Kedungdadap	
a	Sungai Dalem	2.60	3.40	Karangdadap	
8	Sungai Kawung	2.45	3.50	Kedungwuni, Karangdadap, Buaran	
a	Sungai Kemloko	2.45	3.64		
9	Sungai Gawe	-	4.50	Kedungwuni, Buaran	
G	Sungai Paingan- Sragi	241.45	59.09	Paninggaran, Kajen, Kandangserang, Kesesi,	
1	Sungai Joho	1.85	3.00	Paninggaran	
2	Sungai Penembangan	12.42	6.50	Paninggaran	
3	Sungai Kesur	4.05	3.20	Kadangserang	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No	Nama Sungai/ Anak Sungai	Luas Dta (Km)	Panjang (Km)	Kecamatan yang Dilalui	Keterangan
4	Sungai Lambur (Tawing Atas)	8.02	2.11	Kandangserang, Kesesi	
5	Sungai Tawing (Bawah)	8.02	4.00	Kesesi	
6	Sungai Berem	8.84	2.75	Kajen, Kesesi	
a	Sungai Pengging	2.38	3.00	Kajen	
b	Sungai Gowok	2.50	3.00	Kajen	
c	Sungai Karang	7.17	4.80	Kajen	
7	Sungai Luwuk – Kajen – Sukoyoso – Gutomo	29.09	14.21	Karanganyar, Kajen	
a	Sungai Godeg	3.79	3.64	Karanganyar, Kajen	
b	Sungai Nyamok	2.53	3.40	Karanganyar, Kajen	
c	Sungai Wedari	2.30	3.50	Karanganyar,	
d	Sungai Siwedus	5.46	3.10	Kajen	
e	Sungai Kajongan	16.45	11.64	Kajen	
8	Sungai Ponjo – Sapon - Gejlik	4.27	7.38	Kajen	
9	Sungai Gosek	13.27	9.88	Kesesi	
10	Sungai Boro- Sempor	10.50	10.32	Karanganyar, Bojong	
a	Sungai Kemuning	1.64	3.90	Bojong	
b	Sungai Lamaran	2.52	2.90	Bojong	
c	Sungai Bojong – Menjangan- Gendoran	10.96	9.36	Bojong, Karanganyar,	
11	Sungai Winong	19.80	9.80	Kesesi, Sragi	
12	Sungai Tumbal - Silumping	9.89	6.50	Sragi, Siwalan	
13	Sungai Kapidodo / Kangkung	7.15	6.11	Siwalan	
14	Sungai Ampel	6.74	6.50	Siwalan, Wonokerto	
15	Sungai Tratebang	6.30	4.50	Wonokerto	
H	Sungai Genteng – Layanan	127.35	19.25	Paninggaran, Kadangserang, Kesesi	Sungai Layangan Merupakan Sungai Lintas Batas Yang Sebagian Sungainya Berada Di Wilayah Kab. Pekalongan dan Sebagian Lagi di Wilayah Kab, Pemalang
1	Sungai Mindi	4.30	4.20	Paninggaran	
2	Sungai Sodong/Lumeneng	0.90	3.15	Paninggaran	
3	Sungai Tanduran Perwuni	7.50	3.45	Paninggaran	
4	Sungai Jengkol	4.05	4.30	Paninggaran	
5	Sungai Siori – Plumbon	1.00	3.80	Paninggaran	
6	Sungai Asahan	4.70	6.40	Kandangserang	
G	Sungai Keruh	50.56	12.15	Kandangserang	

Sumber DPU TARU Kabupaten Pekalongan Tahun 2024



Sumber air di Kabupaten Pekalongan selain berasal dari sungai juga berasal dari beberapa daerah irigasi serta wadung/ embung/ lumbung air yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sumber daya air permukaan tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian. Dari sumber air tersebut, terbagi dalam 4 daerah irigasi, yaitu:

- (1) Daerah Irigasi Rancah;
- (2) Daerah Irigasi Longsong;
- (3) Daerah Irigasi Watesan; dan
- (4) Daerah Irigasi Ontobogo.

Tabel 2.5.
Daerah Irigasi di Kabupaten Pekalongan

No	Nama/Lokasi	Koordinat	Debit Air (l/dt)	Konservasi
1	D.I Rancah	07°07'18,9" LS	40	Irigasi dan Keperluan Rumah Tangga
	Desa Kandangserang	109°31'20,3" BT		
	Kec. Kandangserang			
2	D.I Longsong	07°07'7,6" LS	60	Irigasi dan Keperluan Rumah Tangga
	Desa Kandangserang	109°31'11,9" BT		
	Kec. Kandangserang			
3	D.I Watesan	07°07'3,6" LS	85	Irigasi dan Keperluan Rumah Tangga
	Desa Kandangserang	109°31'3,1" BT		
	Kec. Kandangserang			
4	D.I Ontobogo	07°04'26,1" LS	85	Irigasi dan Air Bersih (PAM)
	Desa Kandangserang	109°31'10,3" BT		
	Kec. Kandangserang			

Sumber : DPU TARU Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

Sebagai salah satu strategi dalam upaya konservasi sumber daya air yang ditujukan untuk meningkatkan, memulihkan dan mempertahankan daya dukung, daya tampung, dan fungsi daerah aliran sungai untuk menjamin ketersediaan air guna memenuhi kebutuhan yang berkelanjutan dilakukan melalui upaya pemeliharaan berbagai sumber daya air yaitu kawasan danau, waduk, rawa, situ/embung dan mata air sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam upaya peningkatan pemeliharaan sumber air, salah satu strategi dalam pengawetan air yaitu dengan pembangunan waduk atau embung.

Tabel 2.6.
Nama Lumbung/ Embung Di Kabupaten Pekalongan

No.	Nama/Lokasi	Luas Lahan	Pengelola
1	Lumbung Air Kampirutan Desa Kesesi Kec. Kesesi	± 2.00 Ha	BBWS Wilayah Pamali Comal
2	Lumbung air Kulu Desa Kulu Kec. Karanganyar	± 1,20 Ha	BBWS Wilayah Pamali Comal
3	Embung Tracas	± 1.50 Ha	DKPP Kab. Pekalongan

Sumber : DPU TARU Kabupaten Pekalongan Tahun 2024



b). Air Bawah Tanah

Air tanah yang terdapat di Kabupaten Pekalongan meliputi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal dapat diketahui keberadaannya melalui sumur-sumur penduduk sebagai pengguna utama, sedang air tanah dalam diidentifikasi melalui sumur-sumur artesis yang umumnya dimiliki oleh pengguna sektor industri.

Berdasarkan hasil penelitian dari Direktorat Geologi Bandung, potensi air tanah di Kabupaten Pekalongan adalah sebesar 475.757.000 m3 yang terdiri dari :

- a) Potensi air tanah dangkal diperkirakan dengan 57.082 sumur penduduk = 57.082x4.051 m3 = 231.239.182m3.
- b) Potensi air tanah dalam = 244.517.818 m3.

Tabel 2.7.
Data Kondisi Sumber Mata Air Kabupaten Pekalongan

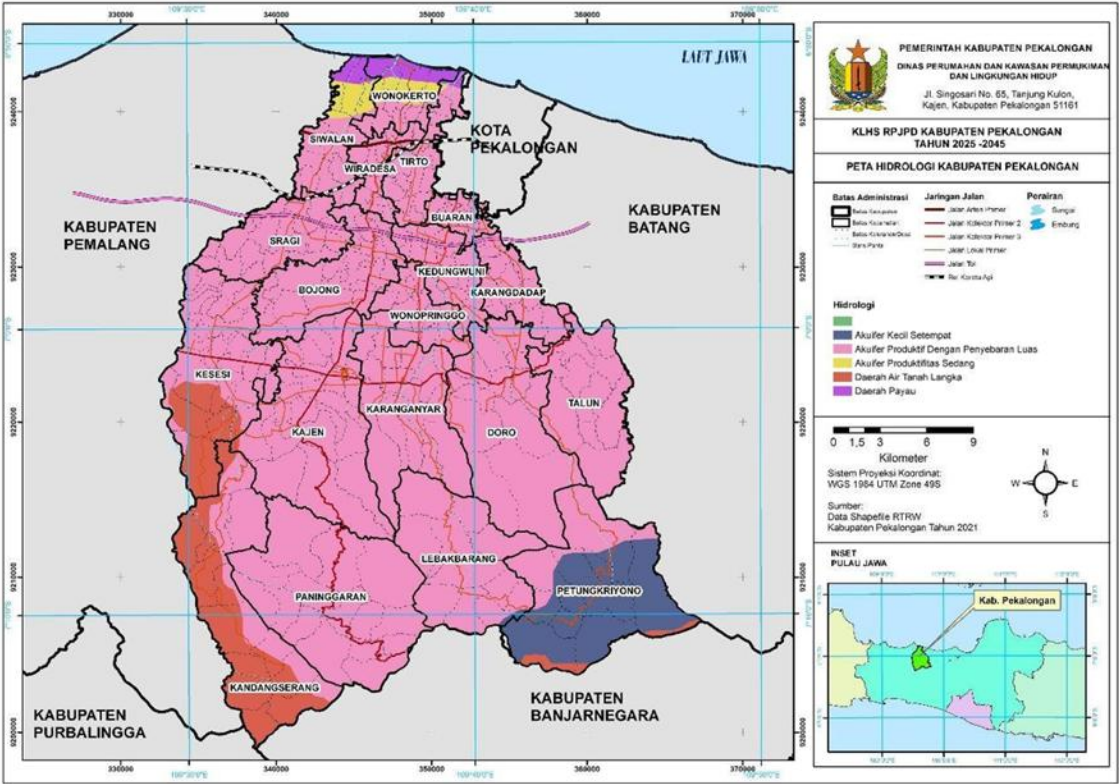
No	Nama	Debit	Mengairi	Lokasi Mata Air	
		(Vol/Waktu)	Lahan (Ha)	Desa	Kecamatan
1	Wedang atas	30.00	11.00	Tajur	Kandangserang
2	Wedang Bawah	22.00	25.00	Tajur	Kandangserang
3	Rancah	40.00	30.00	Kandangserang	Kandangserang
4	Longsong	60.00	80.00	Kandangserang	Kandangserang
5	Watesan	85.00	100.00	Kandangserang	Kandangserang
6	Simende	-	125.00	Kandangserang	Kandangserang
7	Krobokan	-	55.00	Kandangserang	Kandangserang
8	Poh	25.00	33.00	Kandangserang	Kandangserang
9	Sumurup I	80.00	70.00	Kandangserang	Kandangserang
10	Sumurup II	40.00	-	Kandangserang	Kandangserang
11	Bubakan	50.00	-	Kandangserang	Kandangserang
12	Seruni (Winong)	30.50	6.00	Kandangserang	Kandangserang
13	Rancah I	-	110.00	Paninggaran	Paninggaran
14	Rancah II	-	25.00	Kaliombo	Paninggaran
15	Plumbon	-	60.00	Winduaji	Paninggaran
16	Bandingan	-	10.00	Bandingan	Paninggaran
17	Wangan Sabrang	-	98.00	Werdi	Paninggaran
18	Kepoh	-	38.00	Tanggerang	Paninggaran
19	Mejarum	30.00	35.00	Windurojo	Kesesi
20	Gersali	23.00	19.00	Windurojo	Kesesi
21	Sibendo	-	12.00	Gandarum	Kajen
22	Sidudo	-	40.00	Paninggaran	Paninggaran
23	Sinongko	-	52.00	Garungwioro	Kandangserang
24	Gondang	-	20.00	Mendolo	Lebakbarang
25	Suro	-	10.00	Gutomo	Karanganyar
26	Bandot	-	15.00	Yosorejo	Petungkriyono
27	Curug Gempong	-	13.00	Lebakbarang	Lebakbarang
28	Pupu/Pupah	-	110.00	Garungwioro	Kandangserang
29	Sidondang	-	63.00	Timbangsari	Lebakbarang
30	Garung	-	15.00	Garungwioro	Kandangserang
31	Klepu	-	13.00	Garungwioro	Kandangserang
32	Guci	-	25.00	Kutorembet	Lebakbarang
33	Pedawang	33.30	-	Pedawang	Karanganyar
34	Paseh/Beluk/Soga	23.00	-	Gutomo	Karanganyar



No	Nama	Debit	Mengairi	Lokasi Mata Air	
		(Vol/Waktu)	Lahan (Ha)	Desa	Kecamatan
35	Ontobogo	40.00	10.00	Gutomo	Karanganyar
36	Gemistri	-	50.00	Sukoharjo	Kandangserang
37	Rowo Bantar	-	23.00	Tlogohendro	Petungkriyono
38	Gondang/ Glidigan	-	37.00	Tlogohendro	Petungkriyono
39	Tlogohendro	-	17.00	Tlogohendro	Petungkriyono
40	Mangunan	-	23.00	Tlogohendro	Petungkriyono
41	Simego	-	15.00	Simego	Petungkriyono
42	Rogojujo	-	20.00	Kasimpar	Petungkriyono
43	Sidoharjo	-	17.00	Sidoharjo	Doro
44	Pungangan	-	35.00	Pungangan	Doro
45	Rogoselo	-	10.00	Rogoselo	Doro
46	Bliugorejo	-	35.00	Bligorejo	Doro
47	Kutosari	-	15.00	Kutosari	Doro
48	Kalirejo	-	35.00	Kalirejo	Talun
49	Banjarsari	-	36.00	Banjarsari	Talun
50	Kecapi	-	23.00	Krompeng	Talun
51	talun	-	63.00	Batursari	Talun
52	Picis	-	48.00	Sengare	Talun
53	Sengare	-	92.00	Misoyi	Talun
54	Donowangun	-	90.00	-	Talun
55	Besuki	-	50.00	Paninggaran	Paninggaran
56	Gunung Damar	-	-	Bubak	Kandangserang
57	Banyu Mudal	80.00	440.00	Brengkolang	Kajen
58	Sido Sukmo	60.00	227.00	Dk. Sidosukmo Ds.Gutomo	Karanganyar
59	Sendang	30.00	-	Wangandowo	Bojong
60	Sumur watu	30.00	-	Sumur Jbl Bogo	Bojong
61	Pancuran	50.00	-	Kalipancur	Bojong
62	Santen	20.00	-	Kalipancur	Bojong
63	Grugak	30.00	29.00	Kalipancur	Bojong
	Jumlah Total		2,758.00 Ha		

Sumber : DPU TARU Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

Selain air permukaan seperti sungai, embung, dan mata air, Kabupaten Pekalongan memiliki cadangan air tanah yang berada di kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Pekalongan-Pemalang yang terdapat di Kecamatan Petungkriyono, Kandangserang, Talun, Doro, Kajen, Karanganyar dan Kesesi. CAT tersebut termasuk dalam kategori CAT Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.6. Peta Hidrologi Kabupaten Pekalongan

6). Klimatologi

Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, maka kondisi tersebut mempengaruhi kondisi iklim. Wilayah bagian utara yang didominasi oleh daerah dataran rendah dan berdekatan dengan Laut Jawa, maka kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih panas. Sedangkan wilayah bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi, kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih sejuk

Iklim Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Pada tahun 2023 rata-rata curah hujan 2.241 mm dengan jumlah hari hujan adalah 135 hari. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Tapak Menjangan sebesar 3.855 mm dengan hari hujan sebesar 160. Adapun hari hujan dan curah hujan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8.
Hari dan Curah Hujan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Hari Hujan	Curah Hujan
1	Kandangserang	-	-
2	Paninggaran	-	-
3	Lebakbarang	-	-
4	Petungkriyono	-	-
5	Talun	-	-
6	Doro	-	-
	• Tapak Menjangan	160	3.855
	• Kutosari	148	3.061
7	Karanganyar	-	-
	• Karang Sari	145	2.674
	• Karanggondang	140	3.439



No	Kecamatan	Hari Hujan	Curah Hujan
8	Kajen	151	315
9	Kesesi	-	-
	• Gembiro	130	2.312
	• Ponolawen	147	2.239
	• Brondong	182	2.531
10	Sragi		
	• Sumub Kidul	108	155
	• Sragi	100	2.055
11	Siwalan	-	-
12	Bojong	103	2.197
13	Wonopringgo	-	-
14	Kedungwuni	-	-
15	Karangdadap	-	-
16	Buaran	-	-
17	Tirto	-	-
18	Wiradesa	103	2.062
19	Wonokerto	-	-
	Tahun 2023	135	2.241
	2022	175	3.124
	2021	174	3.736
	2020	149	737
	2019	108	1.928

Sumber : DPU TARU Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

7). Penggunaan lahan

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pekalongan tahun 2023 adalah hutan sekitar 34 % dari total wilayah. Penggunaan lahan terbesar kedua setelah hutan adalah sawah yaitu sebesar 25.002,81 ha (28%). Lebih lengkapnya mengenai luasan masing-masing penggunaan lahan di Kabupaten Pekalongan dapat diuraikan seperti tabel berikut.

Tabel 2.9.
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

No	PENGUNAAN LAHAN	LUAS (HA
1	Kebun Campuran	15.280,34
2	Sawah dengan padi terus menerus	25.002,81
3	Ladang/Tegalan	628,35
4	Sawah dengan padi diselingi tanaman lain	5.909,23
5	Bangunan Industri	184,90
6	Permukiman	11.071,85
7	Hamparan Pasir Pantai	42,44
8	Hutan Lindung	1888,95
9	Hutan produksi terbatas	26.721,99
10	Hutan produksi tetap	1.195,52
11	Tambak ikan/udang	2.215,57
12	Sungai	639,93

Sumber : DPU Taru Kabupaten Pekalongan, 2023

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu tahun 2017 - 2023 terjadi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Pekalongan. Penurunan luas lahan terjadi pada lahan sawah, ladang/tegalan dan sungai. Penurunan terbesar ada pada penggunaan lahan ladang/tegalan yaitu menurun sekitar 86% dari luas 4.630,42 ha pada tahun 2017 menjadi sebesar 628,35

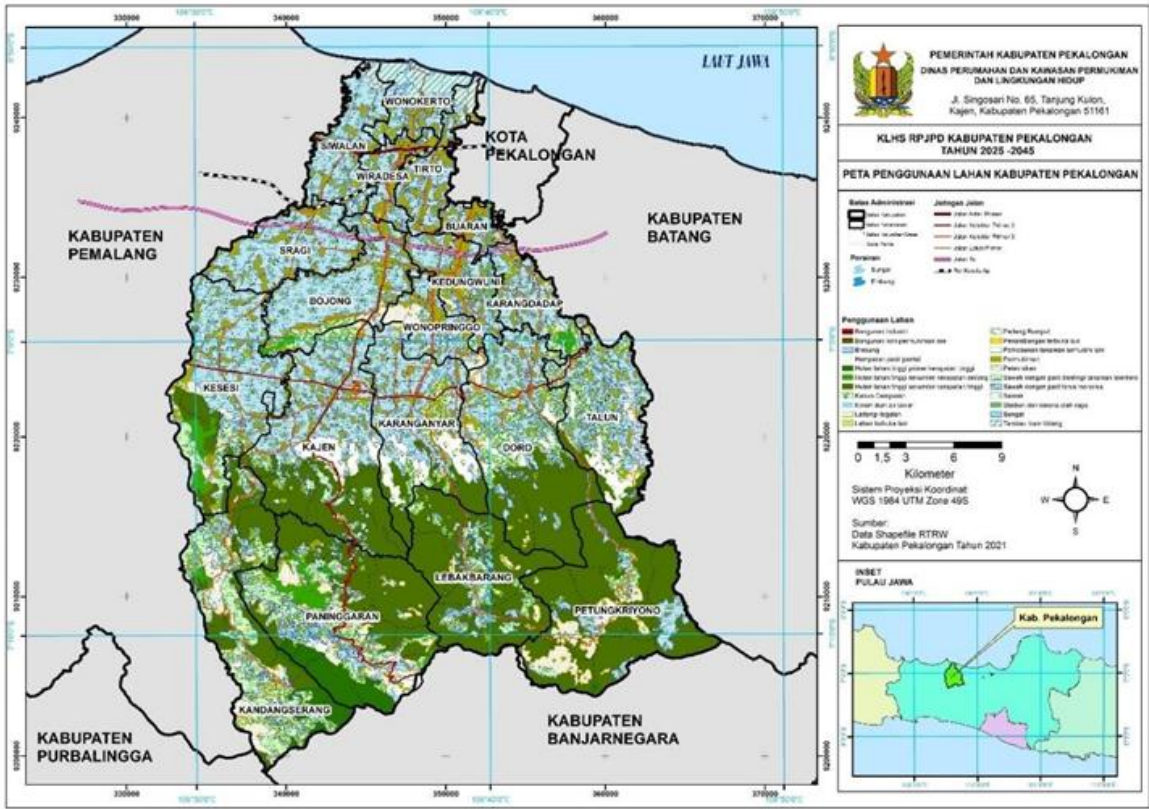


hapada tahun 2023. Sedangkan untuk peningkatan luas penggunaan lahan, peningkatan terbesar pada penggunaan lahan hamparan pasir yaitu meningkat lebih dari 4 kali lipat. (dari luas 7,86 ha pada tahun 2017 meningkat menjadi 42,44 ha pada tahun 2023). Peningkatan penggunaan lahan juga terjadi pada penggunaan lahan permukiman dan industri, dengan peningkatan sebesar 6% untuk permukiman (dari luas 10.441,73 ha pada tahun 2017 menjadi 11.071,85 ha pada tahun 2023) dan sebesar 93% untuk industri (dari luas 95,87 ha pada tahun 2017 menjadi 184,90 hapada tahun 2023).

Secara rinci perubahan luas masing - masing penggunaan lahan di Kabupaten Pekalongan yang terjadi dalam kurun waktu 2017 - 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.10.
Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2017- 2023

No.	Penggunaan Lahan	2017	2023	Perubahan	%
1	Kebun campuran	8.944,01	15.280,34	6.336,33	71,00%
2	Sawah dengan padi terus menerus	26.817,25	25.002,81	-1.814,44	-7,00%
3	Ladang / tegalan	4.630,42	628,35	-4.002,07	-86,00%
4	Sawah dng padi diselingi tanaman lain	5.007,92	5.909,23	901,31	18,00%
5	Bangunan industri	95,87	184,90	89,03	93,00%
6	Permukiman	10.441,73	11.071,85	630,12	6,00%
7	Hamparan pasir pantai	7,86	42,44	34,58	440,00%
8	Hutan lindung	1.888,95	1.888,95	0,00	0,00%
9	Hutan produksi terbatas	25.033,73	26.721,99	1.688,26	7,00%
10	Hutan produksi tetap	1.194,54	1.195,52	0,98	0,00%
11	Tambak ikan/udang	1.333,66	2.215,57	881,91	66,00%
12	Sungai	851,12	639,93	-211,19	-25,00%



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.7. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan



b. Potensi Sumber Daya Alam

Wilayah Pengembangan (WP) Petanglong yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan, terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah di antaranya perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, penyediaan akomodasi, pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi, dan real estate. Kawasan strategis yang berada di WP Petanglong yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang (KSP), dan kawasan perkotaan Petanglong (KSP).

Keterkaitan Kabupaten Pekalongan dengan kabupaten/kota lain antara lain interaksi yang cukup kuat terutama terjadi dengan Kota Pekalongan yang dihubungkan dengan jalur pantura dan Jalan Kedungwuni-Buaran-Kota Pekalongan. Sedangkan dengan Kabupaten Batang dan Pemalang selain dihubungkan dengan jalur pantura juga dihubungkan dengan jalur tengah Batang-Kajen-Pemalang. Interaksi antara Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Batang akan meningkatkan aktivitas sepanjang jalur tersebut untuk Kabupaten Pekalongan terutama terjadi di Kecamatan Talun, Doro, Karanganyar, Kajen dan Kesesi. Perkembangan jalur ini diharapkan mampu mendukung pemerataan perkembangan di Kabupaten Pekalongan terutama di wilayah tengah dan selatan. Sedangkan untuk Kabupaten Banjarnegara di wilayah selatan, interaksi yang terjadi lebih mengarah pada aktivitas wisata, sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Wisata Dieng. Berdasarkan kondisi tersebut Jalur Pekalongan-Banjarnegara dapat dikembangkan sebagai pintu masuk menuju Kawasan Wisata Dieng. Dengan pengembangan ini diharapkan dapat memacu aktivitas wisata di Kabupaten Pekalongan.

Dalam mendukung perkembangan kerjasama antar kawasan tersebut maka pengembangan kegiatan transportasi yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Pengembangan jaringan jalan, berupa: pembangunan jalan lingkar Pemalang-Pekalongan (Lingkar utara Petanglong);
- 2) Pengembangan sistem terminal regional sebagai titik transit pergerakan manusia di Propinsi Jawa Tengah berupa pemantapan fungsi terminal pada jalur regional Pantura. Dalam hal ini untuk Kabupaten Pekalongan pengembangannya di arahkan di Kecamatan Wiradesa.

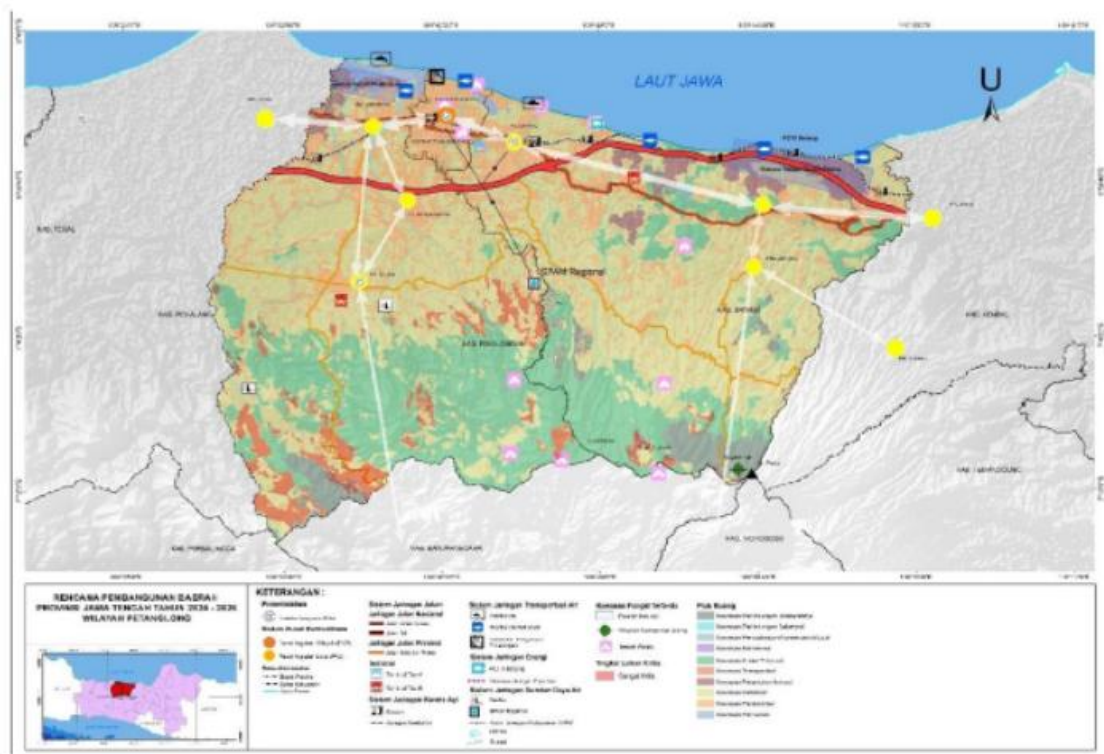
Sedangkan tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan dirumuskan sebagai pedoman dalam mengarahkan rencana pengembangannya. Berdasarkan kondisi dan permasalahan, tujuan dari pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

- 1) mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah terutama perhubungan dan prasarana wilayah;
- 2) menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan, dengan membuka wilayah yang secara geografis relatif terisolir dibandingkan dengan wilayah lainnya;
- 3) menjaga dan melestarikan lingkungan dengan pemantapan kawasan yang berfungsi lindung dan pengarahannya pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya;
- 4) mengembangkan perekonomian berbasis potensi ekonomi lokal dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi wilayah;



- 5) mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan, didukung oleh pengembangan pertanian dan perikanan/kelautan yang mantap;
- 6) mengembangkan sistem prasarana wilayah terpadu, sehingga tercipta suatu susunan interrelasi dan interkoneksi jaringan masing-masing komponen prasarana dan sarana wilayah; dan
- 7) pengembangan kawasan-kawasan khusus yang perlu mendapat perhatian/ seperti kawasan yang perlu dikendalikan perkembangannya, maupun kawasan yang perlu dipacu perkembangannya.

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan kabupaten/kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain peningkatan aksesibilitas Pelabuhan Pengumpan Regional Batang (eksisting) dan peningkatan ruas jalan Bawang-Dieng. Arah pengembangan wilayah untuk WP Petanglong dapat dilihat pada gambar berikut.

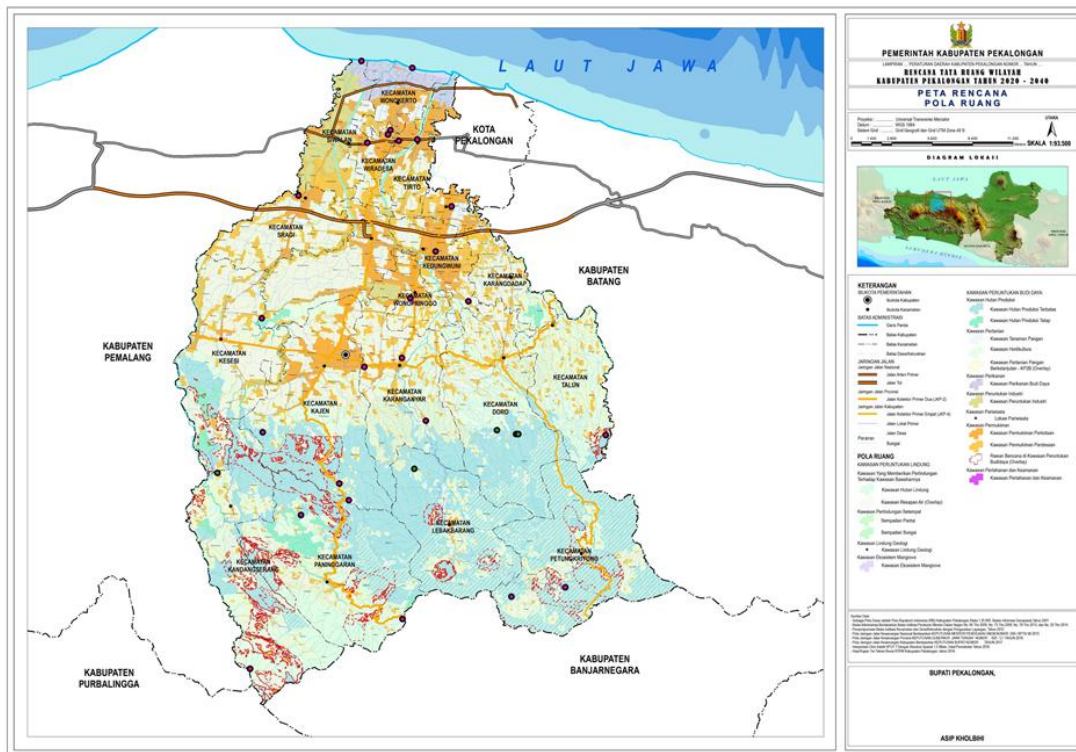


Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.8. Arah Pengembangan WP Petanglong

1). Rencana Pola Ruang

Selanjutnya dapat dijelaskan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 mengenai Rencana Pola Ruang sesuai gambar dan penjelasan berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.9. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pekalongan

a). Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung meliputi :

(1). Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:

(a). Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung. Kawasan hutan lindung dengan luas 1.899,96 hektar berada di:

- (1). Kecamatan Kandangserang;
- (2). Kecamatan Paninggaran; dan
- (3). Kecamatan Petungkriyono

(b). Kawasan resapan air

Kawasan resapan air berupa kawasan yang memiliki kelerengn diatas 45% dengan luas kurang lebih 13.923 hektar. Kawasan resapan air berada di:

- (1). Kecamatan Doru;
- (2). Kecamatan Kajen;
- (3). Kecamatan Kandangserang;
- (4). Kecamatan Lebakbarang;
- (5). Kecamatan Paninggaran;
- (6). Kecamatan Petungkriyono; dan
- (7). Kecamatan Talun

(2). Kawasan Perlindungan Setempat

(a). Sempadan pantai

Sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sempadan pantai dengan luas kurang lebih 70 hektar berada di :

- (1). Kecamatan Siwalan;
- (2). Kecamatan Tirto;
- (3). Kecamatan Wonokerto.



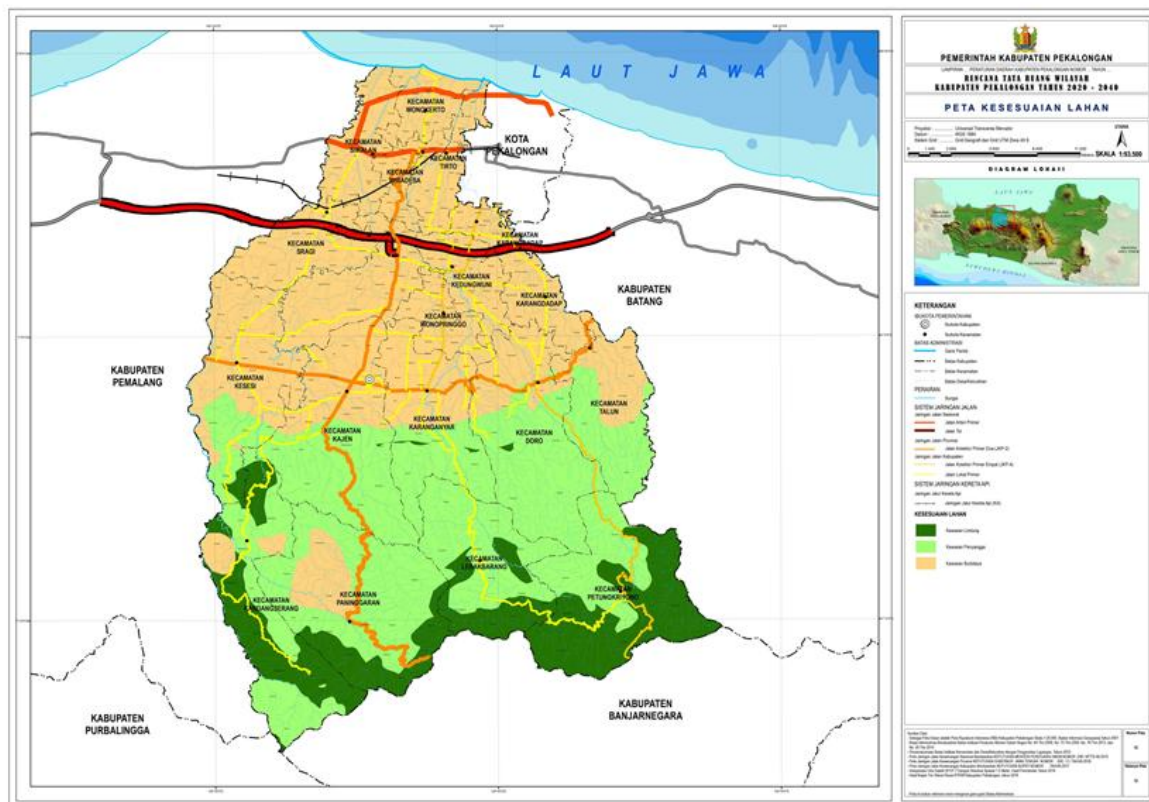
(b). Sempadan sungai

Sempadan sungai dengan luas kurang lebih 1.226 hektar meliputi :

- (1). Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- (2). Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- (3). Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- (4). Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan; dan
- (5). Sungai yang terpengaruh pasang air laut

Sempadan sungai meliputi :

- (1). Sungai Sragi beserta anak sungainya meliputi :
 - Sungai Boro;
 - Sungai Camprang/Menjangan;
 - Sungai Genteng.
 - Sungai Gosek;
 - Sungai Gutomo, Sukoyoso, Kajen/Luwuk;
 - Sungai Layangan;
 - Sungai Paingan;
 - Sungai Siwedus;
 - Sungai Tengah; dan
 - Sungai Winong.
- (2). Sungai Sengkarang (Pencongan) beserta anak sungainya meliputi :
 - Sungai Blimbing;
 - Sungai Dondong;
 - Sungai Gubangan;
 - Sungai Jangkar;
 - Sungai Jurang Garung;
 - Sungai Kemuning / Wisnu;
 - Sungai Kumenyeb;
 - Sungai Meduri;
 - Sungai Mendolo;
 - Sungai Mrican.
 - Sungai Ngalian;
 - Sungai Parangan;
 - Sungai Pucung;
 - Sungai Punduran;
 - Sungai Sengkarang Atas Kanan (Sungai Banteng);
 - Sungai Sengkarang Atas Kiri (Sungai Pakis);
 - Sungai Tanjung;
 - Sungai Wadas; dan
 - Sungai Welo.
- (3). Sungai Kupang (Pekalongan) beserta anak sungainya meliputi :
 - Sungai Gawe; dan
 - Sungai Sumilir.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.10. Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Pekalongan

(c). Kawasan sekitar danau atau waduk

Kawasan sekitar danau atau waduk meliputi :

(1). Sempadan waduk;

Sempadan waduk ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian waduk dan bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk paling sedikit 100 meter diukur dari tepi saat pasang tertinggi ke arah darat.

(2). Sempadan embung; dan

(3). Sempadan fasilitas penanggulangan banjir dan rob

Sempadan embung dan fasilitas penanggulangan banjir dan rob sesuai peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan rekomendasi konstruksi.

(3). Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi yaitu berupa kawasan keunikan proses geologi meliputi Kecamatan Doro, Kecamatan Lebakbarang dan Kecamatan Kandangserang.

(4). Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Pekalongan meliputi:

(a) Kawasan rawan banjir dan genangan, meliputi :

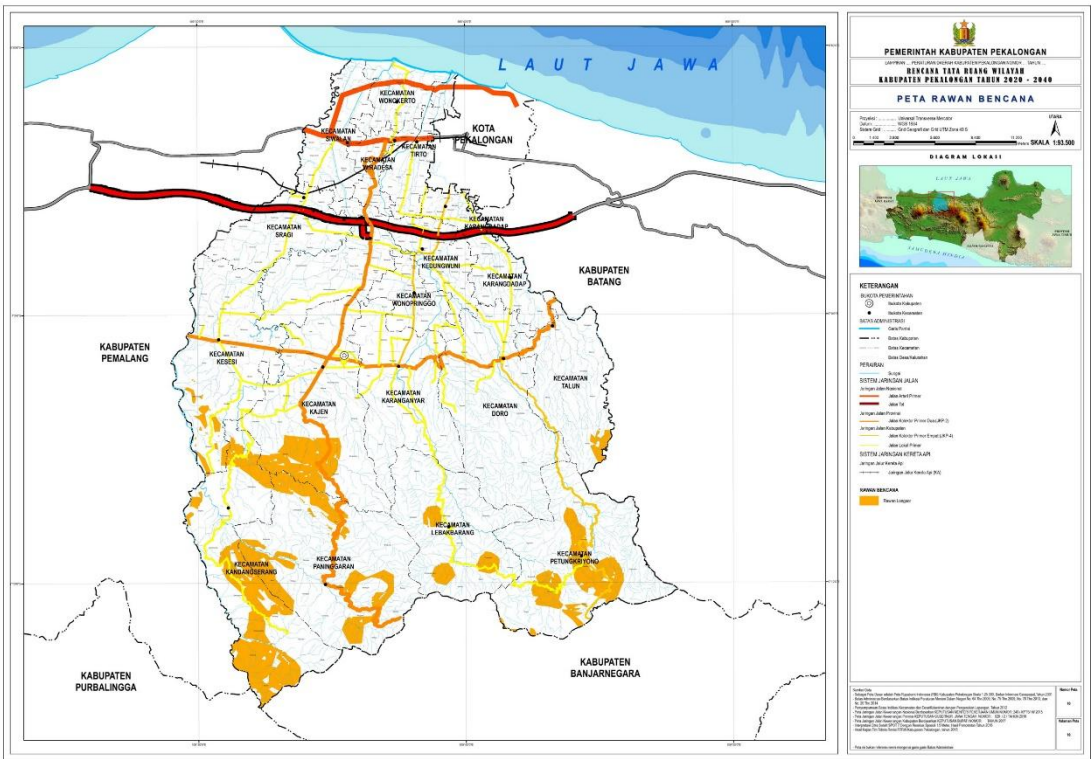
- (1). Kecamatan Bojong;
- (2). Kecamatan Buaran;
- (3). Kecamatan Kajan;
- (4). Kecamatan Karanganyar;
- (5). Kecamatan Karangdadap;
- (6). Kecamatan Kedungwuni;
- (7). Kecamatan Kesesi;
- (8). Kecamatan Siwalan;
- (9). Kecamatan Sragi;



- (10). Kecamatan Tirto;
- (11). Kecamatan Wiradesa;
- (12). Kecamatan Wonokerto; dan
- (13). Kecamatan Wonopringgo.
- (b) **Kawasan rawan tanah longsor**; meliputi :
 - (1). **Rawan longsor perbukitan**, meliputi :
 - Kecamatan Doro;
 - Kecamatan Kajen;
 - Kecamatan Karangayar;
 - Kecamatan Kandangserang;
 - Kecamatan Kesesi;
 - Kecamatan Labakbarang;
 - Kecamatan Paninggaran;
 - Kecamatan Petungkriyono; dan
 - Kecamatan Talun.
 - (2). **Rawan longsor sungai**, meliputi:
 - Kecamatan Karangayar;
 - Kecamatan Kedungwuni;
 - Kecamatan Kesesi;
 - Kecamatan Sragi; dan
 - Kecamatan Wonopringgo
- (c) **Kawasan rawan bencana lainnya**

Kawasan rawan bencana lainnya berupa bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun peta rawan bencana Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.11. Peta Rawan Bencana Kabupaten Pekalongan



(5). Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya dapat berupa benda, struktur, bangunan atau kawasan yang akan ditetapkan Bupati.

(6). Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove dengan luas kurang lebih 66 hektar meliputi:

(a). Kawasan muara sungai (estuari), meliputi :

- (1). Kecamatan Siwalan;
- (2). Kecamatan Tirta; dan
- (3). Kecamatan Wonokerto.

(b). Kawasan pantai berhutan mangrove. meliputi :

- (1). Kecamatan Siwalan;
- (2). Kecamatan Tirta; dan
- (3). Kecamatan Wonokerto

b). Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya meliputi :

(1). Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi dengan luas $\pm 26.264,72$ hektar meliputi:

(a). Kawasan hutan produksi terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 25.065,82 hektar meliputi :

- (1). Kecamatan Doro;
- (2). Kecamatan Kajen;
- (3). Kecamatan Kandangserang;
- (4). Kecamatan Karanganyar;
- (5). Kecamatan Kesesi;
- (6). Kecamatan Lebakbarang;
- (7). Kecamatan Panninggaran;
- (8). Kecamatan Petungkriyono; dan
- (9). Kecamatan Talun

(b). Kawasan hutan produksi tetap

Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 1.198,9 hektar meliputi:

- (1). Kecamatan Bojong;
- (2). Kecamatan Kandangserang;
- (3). Kecamatan Karangdadap;
- (4). Kecamatan Kesesi;
- (5). Kecamatan Lebakbarang;
- (6). Kecamatan Panninggaran; dan
- (7). Kecamatan Talun.

(2). Kawasan pertanian, meliputi :

(a). Kawasan tanaman pangan

Kawasan tanaman pangan dengan luas ± 23.404 hektar meliputi :

- (1). Kecamatan Bojong;
- (2). Kecamatan Buaran;
- (3). Kecamatan Doro;
- (4). Kecamatan Kajen;
- (5). Kecamatan Kandangserang;
- (6). Kecamatan Karanganyar;
- (7). Kecamatan Karangdadap;
- (8). Kecamatan Kedungwuni;
- (9). Kecamatan Kesesi;



- (10). Kecamatan Lebakbarang;
- (11). Kecamatan Paninggaran;
- (12). Kecamatan Petungkriyono;
- (13). Kecamatan Petungkriyono;
- (14). Kecamatan Siwalan;
- (15). Kecamatan Sragi;
- (16). Kecamatan Talun;
- (17). Kecamatan Tirto;
- (18). Kecamatan Wiradesa;
- (19). Kecamatan Wonokerto; dan
- (20). Kecamatan Wonopringgo.

(b). Kawasan hortikultura

Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 17.249 hektar meliputi :

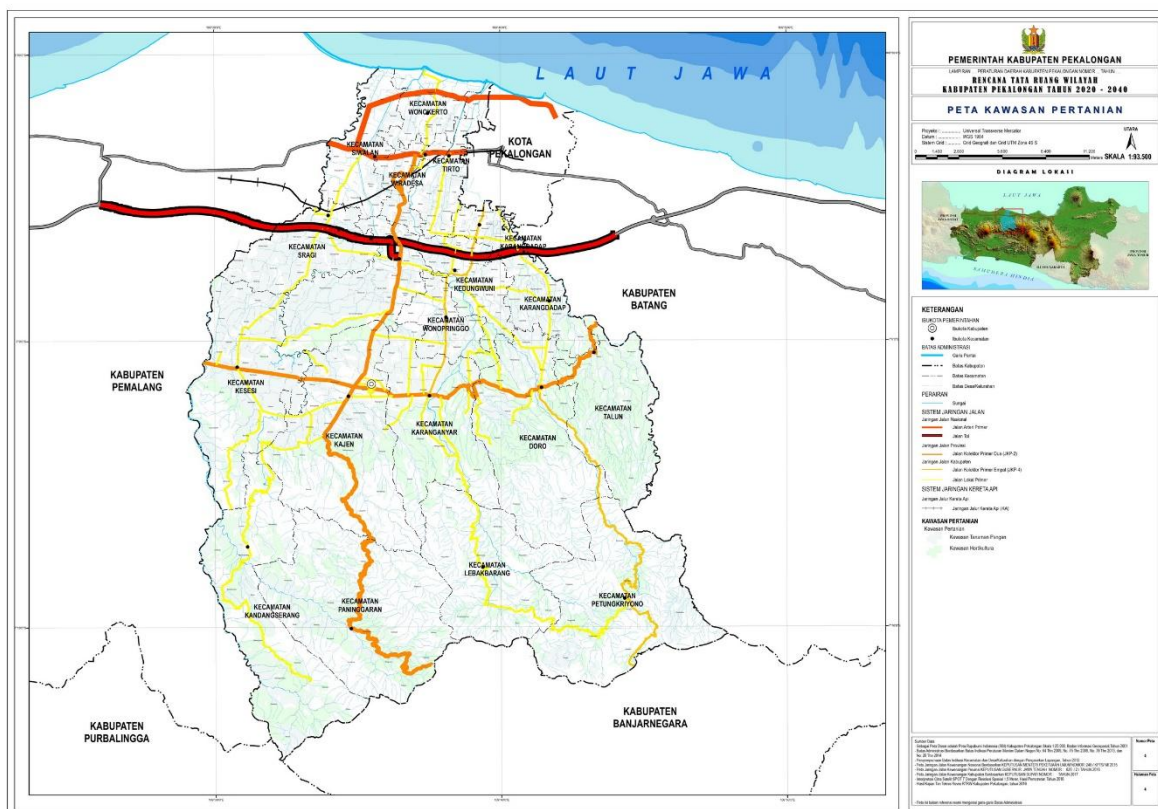
- (1). Kecamatan Bojong;
- (2). Kecamatan Buaran;
- (3). Kecamatan Doro;
- (4). Kecamatan Kajen;
- (5). Kecamatan Kandangserang;
- (6). Kecamatan Karanganyar;
- (7). Kecamatan Karangdadap;
- (8). Kecamatan Kedungwuni;
- (9). Kecamatan Kesesi;
- (10). Kecamatan Lebakbarang;
- (11). Kecamatan Paninggaran;
- (12). Kecamatan Petungkriyono;
- (13). Kecamatan Sragi;
- (14). Kecamatan Talun;
- (15). Kecamatan Tirto;
- (16). Kecamatan Wonokerto; dan
- (17). Kecamatan Wonopringgo.

(c). Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan $\pm$ 22.211 hektar meliputi:

- (1). Lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 19.719 hektar; dan
- (2). Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 2.492 hektar.

Selengkapnya peta kawasan pertanian Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.12. Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Pekalongan

(3). Kawasan perikanan

Kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budidaya yang meliputi :

(a). Budidaya tambak

Budidaya tambak dengan luas ± 1.120 hektar meliputi:

- (1). Kecamatan Siwalan;
- (2). Kecamatan Tirto; dan
- (3). Kecamatan Wonokerto

(b). Budidaya air tawar

Budidaya air tawar meliputi seluruh wilayah kecamatan.

(c). Fasilitas perikanan tangkap, meliputi :

- (1). Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai beserta sarana pelelangan ikan di Kecamatan Wonokerto;
- (2). Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pendaratan Ikan beserta sarana pelelangan ikan di Kecamatan Wonokerto; dan
- (3). Peningkatan sarana dan prasarana pendaratan kapal dan/atau perahu serta sarana dan prasarana TPI berada di Kecamatan Wonokerto.

(d). Pengembangan pengolahan perikanan, meliputi:

- (1). Kecamatan Karangdadap;
- (2). Kecamatan Kedungwuni;
- (3). Kecamatan Siwalan;
- (4). Kecamatan Sragi;
- (5). Kecamatan Tirto;
- (6). Kecamatan Wonokerto; dan
- (7). Kecamatan lainnya.



(4). Kawasan pertambangan dan energi

(a). Kawasan pertambangan, meliputi :

(1). Kawasan pertambangan mineral logam

Kawasan pertambangan mineral logam meliputi wilayah usaha pertambangan yang berada di :

- Kecamatan Doro;
- Kecamatan Kandangserang;
- Kecamatan Karanganyar;
- Kecamatan Lebakbarang;
- Kecamatan Paninggaran;
- Kecamatan Petungkriyono;
- Kecamatan Siwalan;
- Kecamatan Talun;
- Kecamatan Tirto; dan
- Kecamatan Wonokerto.

(2). Kawasan pertambangan mineral bukan logam atau batuan

Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi wilayah usaha pertambangan yang berada di :

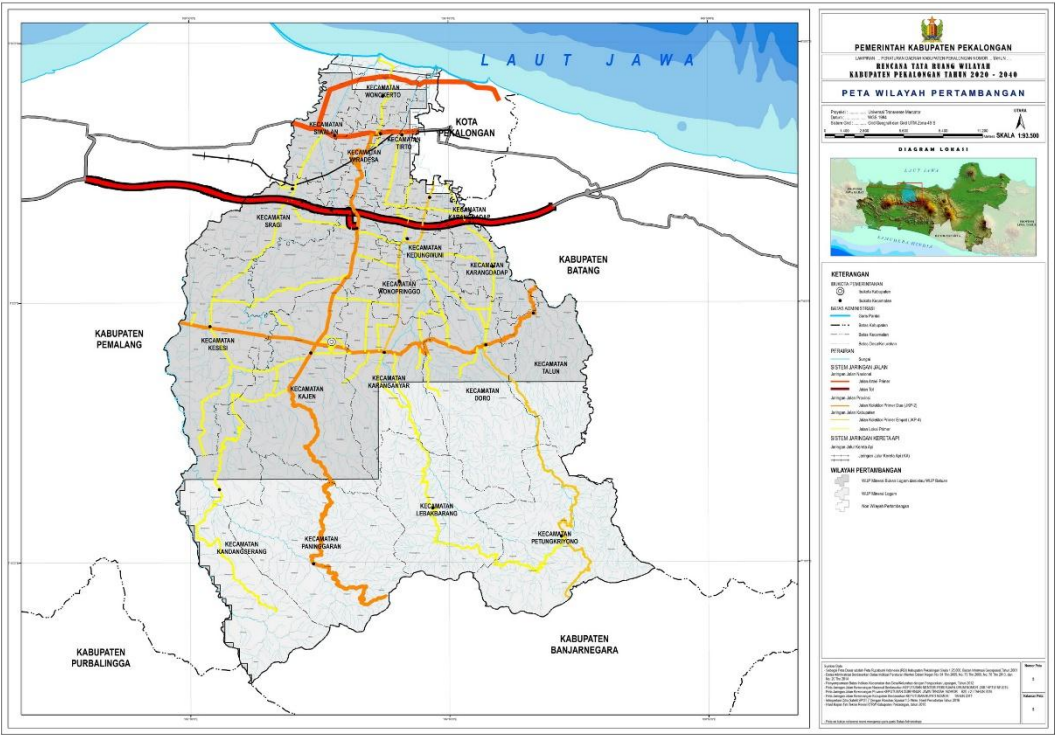
- Kecamatan Bojong;
- Kecamatan Buaran;
- Kecamatan Doro;
- Kecamatan Kajen;
- Kecamatan Kandangserang;
- Kecamatan Karanganyar;
- Kecamatan Karangdadap;
- Kecamatan Kedungwuni;
- Kecamatan Kesesi;
- Kecamatan Paninggaran;
- Kecamatan Siwalan;
- Kecamatan Sragi;
- Kecamatan Talun;
- Kecamatan Tirto;
- Kecamatan Wiradesa;
- Kecamatan Wonokerto; dan
- Kecamatan Wonopringgo.

(b). Kawasan panas bumi

Kawasan panas bumi berupa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dataran Tinggi Dieng, yang meliputi :

- (a) Kecamatan Lebakbarang; dan
- (b) Kecamatan Petungkriyono.

Selengkapnya peta wilayah pertambangan Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.13. Peta Wilayah Pertambangan Kabupaten Pekalongan

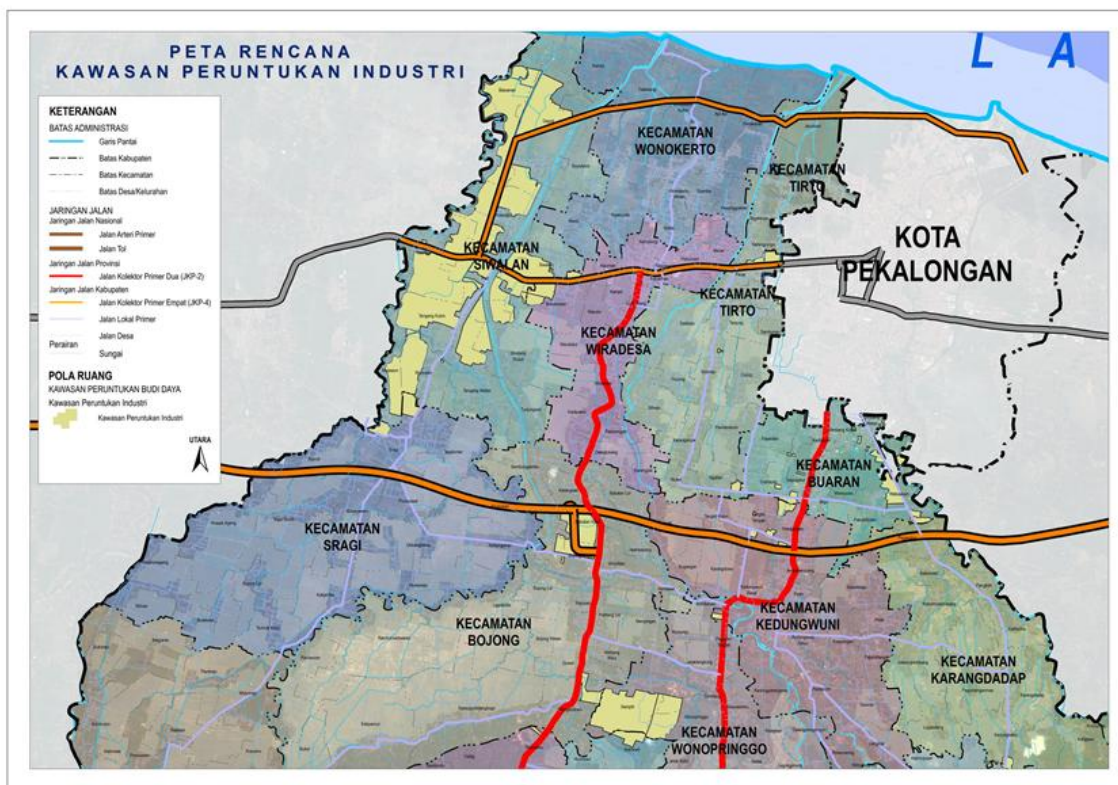
(5). Kawasan peruntukan industri

Rencana kawasan peruntukan industri dengan luas ± 1.533 hektar berada di :

- (1) Kecamatan Bojong;
- (2) Kecamatan Buaran;
- (3) Kecamatan Doro;
- (4) Kecamatan Kajen;
- (5) Kecamatan Karanganyar;
- (6) Kecamatan Karangdadap;
- (7) Kecamatan Kedungwuni;
- (8) Kecamatan Paninggaran;
- (9) Kecamatan Siwalan;
- (10) Kecamatan Sragi;
- (11) Kecamatan Tirto;
- (12) Kecamatan Wiradesa;
- (13) Kecamatan Wonokerto; dan
- (14) Kecamatan Wonopringgo.

Pengembangan kawasan industri berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perusahaan industri besar dan perusahaan industri menengah wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri. Perusahaan industri kecil dan/atau mikro dapat berlokasi diluar kawasan peruntukan industri atau kawasan industri dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Sentra industri kecil menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus berlokasi di kawasan peruntukan industri.

Selengkapnya peta rencana peruntukkan industri Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.14. Peta Rencana Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Pekalongan

(6). Kawasan pariwisata, meliputi :

(a). Pariwisata alam, meliputi :

- (1). Curug Bidadari Desa Jolotigo Kecamatan Talun;
- (2). Curug Cinde Lebakbarang;
- (3). Curug Siwatang – Lambanggalun di Kecamatan Paninggaran;
- (4). Destinasi wisata Kalipahingan di Kecamatan Paninggaran;
- (5). Kabalong (Karanggondang, Limbangan dan Lolong) Karanganyar;
- (6). Kandangserang (Watu Ireng, Lambur, Kandangserang, Tajur);
- (7). Kawasan wisata Linggoasri;
- (8). Kawasan wisata Petungkriyono;
- (9). Kebun teh di Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran;
- (10). Pantai Depok di Desa Depok Kecamatan Siwalan;
- (11). Pantai Kisik di Kecamatan Wonokerto;
- (12). Watubahan di Desa Lemah Abang Kecamatan Doro;
- (13). Wisata Air Sigesing Desa Watugajah Kecamatan Kesesi;
- (14). Wisata air sungai Pencongan; dan
- (15). Obyek Wisata Alam lainnya.

(b). Pariwisata budaya

Pariwisata Budaya meliputi wisata kesenian, batik Pekalongan dan budaya lokal Kabupaten Pekalongan yang tersebar diseluruh wilayah daerah.

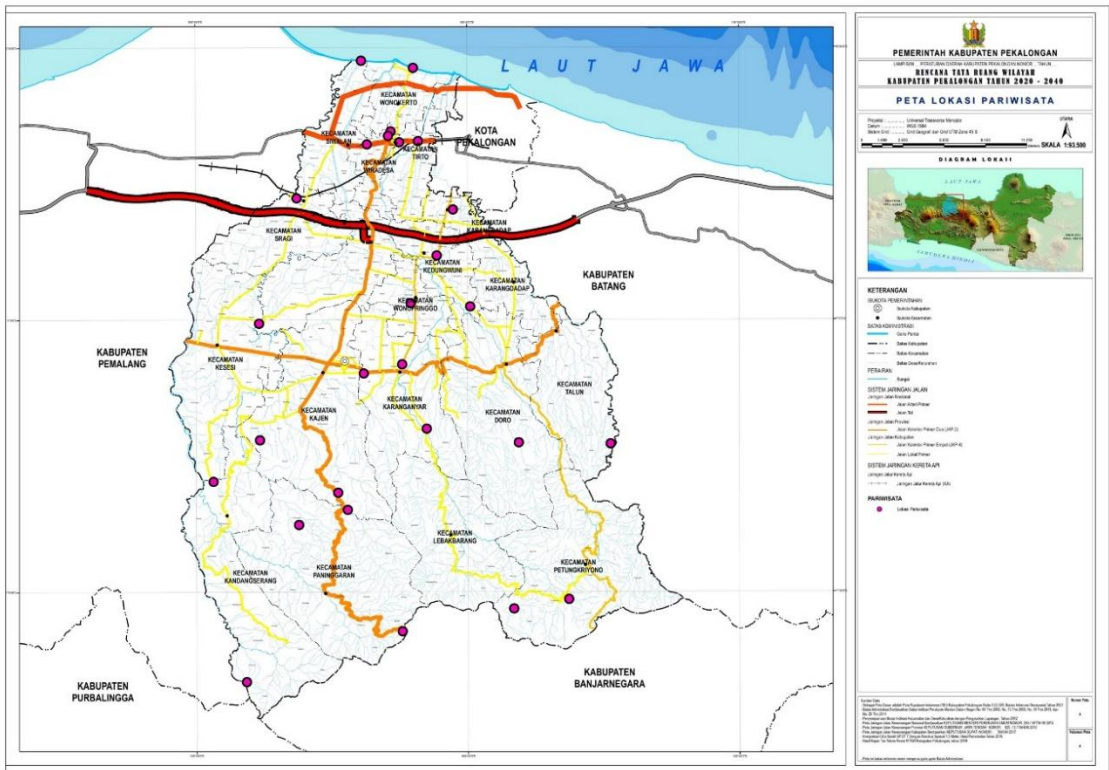
(c). Pariwisata buatan, meliputi :

- (1). International Batik Centre (IBC) di Kecamatan Wiradesa;
- (2). Kampung Batik di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa;
- (3). Kolam renang Banyu Biru di Kecamatan Wiradesa;
- (4). Kolam renang Kulu Asri di Kecamatan Karanganyar;
- (5). Kolam renang Langkap Indah di Kecamatan Kedungwuni;
- (6). Kolam renang Prima Graha Wisata di Kecamatan Karanganyar;
- (7). Pabrik Gula di Kecamatan Sragi;



- (8). Pasar Grosir Pantura di Kecamatan Wiradesa;
- (9). Sentra Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Pakumbulan di Kecamatan Buaran;
- (10). Sentra bordir di Kecamatan Kedungwuni;
- (11). Sentra Kerajinan tempurung kelapa di Kecamatan Wonopringgo; dan
- (12). Wisata buatan lainnya.

Selengkapnya peta lokasi pariwisata Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.15. Peta Lokasi Pariwisata Kabupaten Pekalongan

(7). Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman dengan luas ± 15.403 hektar meliputi :

(a). Kawasan permukiman perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan dengan luas ± 7.194 hektar meliputi :

- (1). Permukiman Perkotaan Kecamatan Bojong;
- (2). Permukiman Perkotaan Kecamatan Buaran;
- (3). Permukiman Perkotaan Kecamatan Doro;
- (4). Permukiman Perkotaan Kecamatan Kajen;
- (5). Permukiman Perkotaan Kecamatan Kandangserang;
- (6). Permukiman Perkotaan Kecamatan Karanganyar;
- (7). Permukiman Perkotaan Kecamatan Karangdadap;
- (8). Permukiman Perkotaan Kecamatan Kedungwuni;
- (9). Permukiman Perkotaan Kecamatan Kesesi;
- (10). Permukiman Perkotaan Kecamatan Lebakbarang;
- (11). Permukiman Perkotaan Kecamatan Paninggaran;
- (12). Permukiman Perkotaan Kecamatan Petungkriyono;
- (13). Permukiman Perkotaan Kecamatan Siwalan;
- (14). Permukiman Perkotaan Kecamatan Sragi;
- (15). Permukiman Perkotaan Kecamatan Talun;
- (16). Permukiman Perkotaan Kecamatan Tirto;



- (17). Permukiman Perkotaan Kecamatan Wiradesa;
- (18). Permukiman Perkotaan Kecamatan Wonokerto; dan
- (19). Permukiman Perkotaan Kecamatan Wonopringgo.

(b). Kawasan permukiman perdesaan

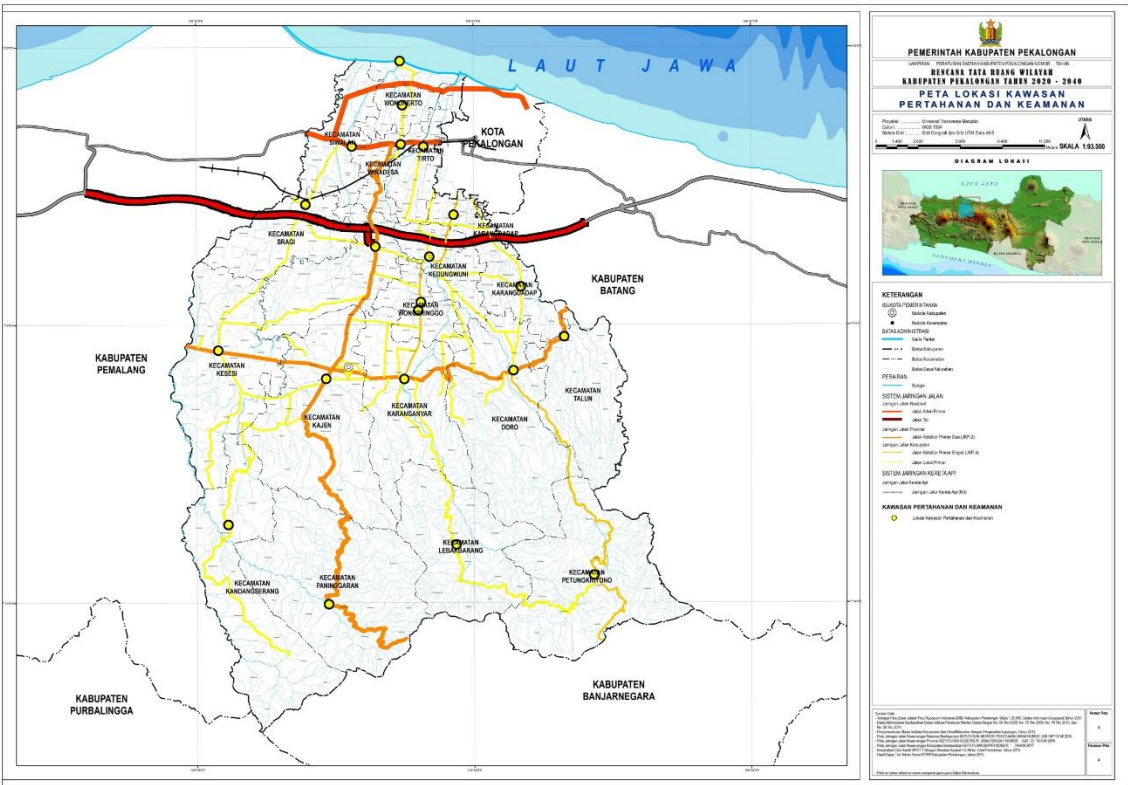
Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 8.209 hektar berada di seluruh wilayah daerah diluar kawasan permukiman perkotaan.

(8). Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dengan luas ± 15 hektar meliputi :

- (1) Kantor militer yang meliputi:
 - (a) Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) Kabupaten Pekalongan;
 - (b) Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan; dan
 - (c) Pos Angkatan Laut di Kecamatan Wonokerto.
- (2) Kesatuan militer berupa Batalyon Infanteri 407 Padmakusuma Kompi Senapan C di Kecamatan Wonopringgo.

Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan lebih lanjut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat dilihat pada gambar berikut



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Gambar 2.16. Peta Lokasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Pekalongan

2). Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pekalongan, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040, meliputi :

a). Sistem Perkotaan

Sistem pekotaan berupa rencana sistem pusat pelayanan, meliputi :

(1). Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi

- (a). Kawasan Perkotaan Kajen;
- (b). Kawasan Perkotaan Wiradesa; dan
- (c). Kawasan Perkotaan Kedungwuni.



(2). Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi :

- (a). Kawasan Perkotaan Kecamatan Doro;
- (b). Kawasan Perkotaan Kecamatan Kesesi;
- (c). Kawasan Perkotaan Kecamatan Paninggaran;
- (d). Kawasan Perkotaan Kecamatan Petungkriyono; dan
- (e). Kawasan Perkotaan Kecamatan Sragi

(3). Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), meliputi :

- (a). Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang;
- (b). Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap;
- (c). Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang; dan
- (d). Desa Kalirejo Kecamatan Talun.

b). Sistem Jaringan Prasarana

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana meliputi:

(1). Sistem Jaringan Transportasi, meliputi :

(a). Sistem Jaringan Transportasi Darat, meliputi :

(1). Sistem Jaringan Jalan, meliputi :

(a). Jaringan jalan nasional

(1). Jalan arteri primer, meliputi :

- (a). Ruas batas Kota Pemalang - batas Kota Pekalongan yang melewati wilayah daerah berada di:
 - (1). Kecamatan Siwalan;
 - (2). Kecamatan Wiradesa; dan
 - (3). Kecamatan Tirta.
- (b). Jalan lingkaran Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan (PETANGLONG) berada di:
 - (1). Kecamatan Siwalan;
 - (2). Kecamatan Wonokerto; dan
 - (3). Kecamatan Tirta

(2). Jalan tol, meliputi :

- (a). ruas jalan tol Pemalang – Batang yang melewati wilayah Daerah berada di:
 - (1). Kecamatan Sragi;
 - (2). Kecamatan Bojong;
 - (3). Kecamatan Kedungwuni;
 - (4). Kecamatan Buaran; dan
 - (5). Kecamatan Karangdadap.
- (b). Rencana jalan keluar dan masuk ruas jalan tol ruas jalan tol Pemalang – Batang berada di Kecamatan Bojong.

(b). Jaringan jalan provinsi

Jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer 2 (JKP 2) meliputi:

- (1). Wiradesa - Kalibening/ Bts. Kab. Banjarnegara;
- (2). Kesesi/ Batas Kab Pemalang - Kebonagung; dan
- (3). Kebonagung – Wonotunggal/ Batas Kab. Batang

(c). Jaringan jalan kabupaten

Jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan yang ditetapkan oleh Bupati.

(d). Jalan desa

Jalan desa berupa rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh wilayah kecamatan.



(e). Jalan khusus

Jalan khusus berupa pengembangan jalan dan fasilitasnya dari dan menuju:

- (1). kawasan industri;
- (2). kawasan pertambangan;
- (3). kawasan wisata; dan
- (4). kawasan lainnya

(f). Terminal penumpang, meliputi :

- (1). Terminal tipe B berada di Kecamatan Kajen;
- (2). Terminal tipe C berada di Kecamatan Wiradesa;
- (3). Terminal tipe C berada di Kecamatan Kedungwuni;
- (4). Terminal tipe C berada di Kecamatan Doro;
- (5). Terminal tipe C berada di Kecamatan Kesesi;
- (6). Terminal tipe C berada di Kecamatan Sragi;
- (7). Terminal tipe C berada di Kecamatan Karanganyar;
- (8). Terminal tipe C berada di Kecamatan Lebakbarang;
- (9). Terminal tipe C berada di Kecamatan Petungkriyono;
- (10). Terminal tipe C berada di Kecamatan Kandangserang; dan
- (11). Terminal tipe C berada di Kecamatan Paninggaran.

(g). Terminal barang

Terminal barang berupa pembangunan dan peningkatan prasarana bongkar muat barang berada di :

- (1). Kecamatan Siwalan;
- (2). Kecamatan Sragi; dan
- (3). Kecamatan Wiradesa

(h). Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal

Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal berupa pengembangan angkutan bus perkotaan yang menghubungkan Kajen – Wiradesa – Pekalongan dan Kajen – Kedungwuni – Pekalongan (Kawasan Petanglong).

(2). Sistem jaringan kereta api, meliputi :

(a). jaringan jalur kereta api; meliputi :

(1). Jaringan jalur kereta api umum, meliputi :

(a). Jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi :

- jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya;
- jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya;
- kereta api regional Semarang – Tegal – Brebes; dan
- peningkatan kecepatan kereta api koridor Jakarta – Surabaya.

(b). Jaringan jalur kereta api perkotaan

Jaringan jalur kereta api perkotaan berupa jalur Petanglong yang menghubungkan Pekalongan – Kedungwuni – Kajen dan/atau Pekalongan – Wiradesa– Kajen sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

(2). Jaringan jalur kereta api khusus

Jaringan jalur kereta api khusus dari dan menuju :

- (a). kawasan industri;
- (b). kawasan wisata; dan
- (c). kawasan lainnya.



(b). Stasiun kereta api, meliputi :

(1). Stasiun penumpang

Stasiun penumpang berupa Stasiun Sragi di Kecamatan Sragi.

(2). Stasiun barang

Stasiun barang sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

(b). Sistem Jaringan Transportasi Laut, meliputi :

(1). Pelabuhan umum

Pelabuhan umum berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kecamatan Wonokerto.

(2). Pelabuhan khusus/ terminal khusus

Pelabuhan khusus/terminal khusus dilaksanakan sesuai hasil studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3). Pelabuhan perikanan

Pelabuhan perikanan berada di Kecamatan Wonokerto meliputi :

(a). Pelabuhan Perikanan Jambean; dan

(b). Pelabuhan Perikanan Wonokerto.

(4). Alur pelayaran

Alur pelayaran berupa alur-pelayaran keluar masuk pelabuhan yang berada di Kecamatan Wonokerto.

(c). Sistem Jaringan Transportasi Udara, meliputi :

(1). Rencana pembangunan dan pengembangan landasan helikopter (*helipad*) sesuai kebutuhan di kawasan perkotaan;

(2). Rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan; dan

(3). Rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara lainnya sesuai perkembangan teknologi berdasarkan hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

(2). Sistem Jaringan Energi, meliputi :

(a). Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa rencana sistem jaringan prasarana pipa gas. Rencana sistem jaringan prasarana pipa gas merupakan pengembangan jaringan pipa gas Cirebon – Semarang– Bangkalan oleh Pemerintah yang melalui Kecamatan Siwalan dan/atau Kecamatan Sragi – Kecamatan Wiradesa –Kecamatan Tirto.

(b). Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi :

(1). Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi :

(a). Pengembangan energi mikrohidro dan minihidro berada di :

(1). Kecamatan Doro;

(2). Kecamatan Kajen;

(3). Kecamatan Kandangserang;

(4). Kecamatan Karanganyar;

(5). Kecamatan Kesesi;

(6). Kecamatan Lebakbarang;

(7). Kecamatan Paninggaran;

(8). Kecamatan Petungkriyono;

(9). Kecamatan Talun; dan Kecamatan lain yang memenuhi syarat berdasarkan hasil studi kelayakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (b). Pengembangan energi surya di seluruh wilayah daerah;
 - (c). Pengembangan energi angin di seluruh wilayah daerah; dan
 - (d). Rencana pengembangan energi alternatif dengan pemanfaatan sumber daya terbarukan diseluruh wilayah daerah.
- (2). Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya,** meliputi :
- (a) jaringan transmisi tenaga listrik,** meliputi :
 - (1). jaringan SUTET,** melalui:
 - (a). Kecamatan Sragi – Kecamatan Bojong – Kecamatan Kedungwuni – Kecamatan Buaran – Kecamatan Karangdadap; dan
 - (b). Kecamatan Kesesi – Kecamatan Sragi – Kecamatan Bojong – Kecamatan Wonopringgo – Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Karangdadap.
 - (2). Jaringan SUTT** melalui Kecamatan Sragi – Kecamatan Siwalan – Kecamatan Wiradesa – Kecamatan Tirta.
 - (b) Jaringan distribusi tenaga listrik** meliputi :
 - (1) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) di seluruh daerah; dan
 - (2) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) di seluruh daerah.
 - (c) Rencana gardu induk** berada di Kecamatan Siwalan dan/atau kecamatan lain sesuai hasil studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (d) Rencana pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) daya cepat/fast charging** di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di seluruh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Sistem Jaringan Telekomunikasi,** meliputi :
- (a). Jaringan tetap,** meliputi :
 - (1). Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel telekomunikasi
Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel telekomunikasi direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.
 - (2). Pembangunan saluran kabel telekomunikasi.
Pembangunan saluran kabel telekomunikasi direncanakan diseluruh wilayah daerah. Pembangunan kabel telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b). Jaringan bergerak,** meliputi :
 - (1). Jaringan bergerak seluler,** meliputi :
 - (a) pengembangan cakupan dan kualitas layanan dilakukan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan
 - (b) pembangunan menara telekomunikasi (menara BTS) mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2). Jaringan bergerak satelit** berupa pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum.
- (4). Sistem Jaringan Sumber Daya Air,** meliputi :
- (a). Sumber air**
Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air WS Pemali-Comal. Rencana pengembangan



sistem jaringan sumber daya air disinkronkan dengan pola dan rencana PSDA WS Pemali-Comal. Sumber air meliputi :

(1). Sumber air permukaan, meliputi :

(a). Sungai;

Sungai pada wilayah sungai meliputi :

- (1). DAS Comal;
- (2). DAS Kupang;
- (3). DAS Sengkarang;
- (4). DAS Sragi Baru; dan
- (5). DAS Sragi Lama

(b). Mata air, berada di

- (1). Kecamatan Bojong;
- (2). Kecamatan Doro;
- (3). Kecamatan Kajen;
- (4). Kecamatan Kandangserang;
- (5). Kecamatan Karanganyar;
- (6). Kecamatan Kesesi;
- (7). Kecamatan Lebakbarang;
- (8). Kecamatan Paninggaran;
- (9). Kecamatan Petungkriyono; dan
- (10). Kecamatan Talun

(c). Tampungan air alami, dan

(d). Tampungan air buatan, meliputi :

(1) Tampungan air buatan berupa embung, meliputi :

- (a). Embung Bangunadi di Kecamatan Doro;
- (b). Embung Benteng-Sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan;
- (c). Embung Brondong di Kecamatan Kesesi;
- (d). Embung Buangan Buntu di Kecamatan Kesesi;
- (e). Embung Jogoloyo di Kecamatan Talun;
- (f). Embung Kalijoyo di Kecamatan Kajen;
- (g). Embung Karangmoncol di Kecamatan Kesesi;
- (h). Embung Karangmulyo di Kecamatan Kesesi;
- (i). Embung Kulu di Kecamatan Karanganyar;
- (j). Embung Limbangan di Kecamatan Karanganyar;
- (k). Embung Pamutih di Kecamatan Kajen;
- (l). Embung Pododadi di Kecamatan Karanganyar;
- (m). Embung Semampir di Kecamatan Kesesi;
- (n). Embung Siangkreng di Kecamatan Karanganyar;
- (o). Embung Sikedok di Kecamatan Talun;
- (p). Embung Sudikampir di Kecamatan Karanganyar;
- (q). Embung Sumilir di Kecamatan Talun;
- (r). Embung Wangandowo di Kecamatan Bojong; dan
- (s). Embung Wisnu di Kecamatan Karanganyar.

(2) Tampungan air buatan berupa waduk berupa rencana pembangunan waduk di :

- (1) Kecamatan Kandangserang,
- (2) Kecamatan Paninggaran,
- (3) Kecamatan Lebakbarang,
- (4) Kecamatan Petungkriyono,
- (5) Kecamatan Doro,
- (6) Kecamatan Talun,



- (7) Kecamatan Kajen; dan
- (8) Kecamatan Kesesi sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan

(2). Sumber air tanah pada cekungan air tanah (CAT)

Sumber air tanah pada cekungan air tanah (CAT) berupa Cekungan Air Tanah Pekalongan – Pemalang.

(b). Prasarana sumber daya air, meliputi :

(a) Sistem jaringan irigasi, meliputi :

(1) Sistem Jaringan Irigasi Primer, yang meliputi :

(a) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di :

- (1) Daerah Irigasi Kaliwadas;
- (2) Daerah Irigasi Pesantren Kletak;
- (3) Daerah Irigasi Kupang Krompeng; dan
- (4) Daerah Irigasi Sragi.

(b) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:

- (1) Daerah Irigasi Asem Siketek/Kesetu;
- (2) Daerah Irigasi Padurekso;
- (3) Daerah Irigasi Sudikampir; dan
- (4) Daerah Irigasi Tapak Menjangan.

(c) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi 339 daerah irigasi.

(2) Sistem Jaringan Irigasi Sekunder dan Tersier berada di seluruh wilayah daerah

(b) sistem jaringan pengendalian banjir, berupa : sistem pengendalian daya rusak air meliputi :

- (1) Pembangunan tanggul dan long storage di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Tirto;
- (2) Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
- (3) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir;
- (4) Pengendalian Banjir Sistem Sungai Kupang Kabupaten Pekalongan;
- (5) Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sragi Lama dan Sragi Baru Kabupaten Pekalongan;
- (6) Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan; dan
- (7) Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob Kabupaten Pekalongan.

(c) Jaringan air baku untuk air bersih, meliputi :

- (1) Pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air, meliputi:
 - (a) Kecamatan Bojong;
 - (b) Kecamatan Doro;
 - (c) Kecamatan Kajen;
 - (d) Kecamatan Kandangserang;
 - (e) Kecamatan Karanganyar;
 - (f) Kecamatan Kesesi;
 - (g) Kecamatan Lebakbarang;
 - (h) Kecamatan Paninggaran;
 - (i) Kecamatan Petungkriyono; dan
 - (j) Kecamatan Talun.



- (2) Pengendalian penggunaan air tanah dalam meliputi :
 - (a) Kecamatan Bojong;
 - (b) Kecamatan Buaran;
 - (c) Kecamatan Kedungwuni;
 - (d) Kecamatan Siwalan;
 - (e) Kecamatan Sragi;
 - (f) Kecamatan Tirto;
 - (g) Kecamatan Wiradesa;
 - (h) Kecamatan Wonokerto; dan
 - (i) Kecamatan Wonopringgo.
- (3) Pengawetan air melalui pengembangan fasilitas resapan air meliputi:
 - (a) Kecamatan Bojong;
 - (b) Kecamatan Doro;
 - (c) Kecamatan Kajen;
 - (d) Kecamatan Kandangserang;
 - (e) Kecamatan Karanganyar;
 - (f) Kecamatan Karangdadap;
 - (g) Kecamatan Kesesi;
 - (h) Kecamatan Lebakbarang;
 - (i) Kecamatan Paninggaran;
 - (j) Kecamatan Petungkriyono; dan
 - (k) Kecamatan Talun.
- (4) Pemanfaatan air hujan melalui teknologi pemanenan air hujan (*rainharvesting*) di seluruh wilayah Daerah

(d) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna

Jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan pada wilayah yang rawan air bersih di seluruh wilayah daerah.

(5). Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, meliputi :

(a). Sistem penyediaan air minum, meliputi :

(1). Jaringan perpipaan, meliputi :

- (a). pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum, meliputi :
 - Penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR) berada diseluruh kecamatan;
 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong; dan
 - Penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan di seluruh wilayah.
- (b). Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum
Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum berupa pembangunan fasilitas pengolahnya beserta kelengkapan pendukungnya.

(2). Bukan jaringan perpipaan

Bukan jaringan perpipaan dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi :

- (a). Penggalian atau pemanfaatan air permukaan;
- (b). Pengeboran air tanah secara terkendali dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan; dan
- (c). Pengolahan air payau di wilayah sekitar pantai.



(b). Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi :

- (1). Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah industri; Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah industri berupa pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk industri besar, menengah dan kecil.
- (2). Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perkotaan, meliputi :
 - Pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja di wilayah Daerah sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan
- (3). Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perdesaan, meliputi :
 - Peningkatan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan pemanfaatan hasil pengolahannya bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik; dan
 - Pengembangan sistem pengolahan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- (4). Pengelolaan barang bekas, meliputi :
 - Pengaturan kegiatan pengumpulan dan pemilahan barang bekas yang berada di kawasan permukiman;
 - Pembinaan kepada masyarakat pelaku usaha pengumpulan dan pemilahan barang bekas; dan
 - Pengawasan kegiatan pengumpulan dan pemilahan barang bekas.

(c). Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) berupa pembangunan TPS limbah B3 diseluruh wilayah sesuai studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d). Sistem jaringan persampahan, meliputi :

(1). Rencana lokasi TPA, meliputi :

- (a). Pembangunan dan pengembangan TPA dan/atau TPA Regional berada di :
 - Kecamatan Karangdadap; dan/atau
 - Lokasi lainnya yang berada di wilayah Daerah yang memenuhi syarat secara teknis maupun non teknis berdasarkan studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan;
- (b). Pengelolaan sampah di lokasi TPA dan/atau TPA Regional diarahkan menggunakan pendekatan *sanitary landfill*.

(2). Rencana lokasi TPS

Rencana lokasi TPS dan/atau TPST Regional di seluruh wilayah daerah dengan sistem pengelolaan TPS 3R.

(3). Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga; dan

Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui pendekatan *reduce, reuse, dan recycle* (3R).

(4). Rencana pengelolaan sampah perdesaan

Rencana pengelolaan sampah perdesaan melalui pengelolaan swadaya masyarakat.



(e). Sistem Jaringan Drainase, meliputi :

- (1). Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Daerah khususnya pada kawasan permukiman padat dan kumuh, serta kawasan sekitar pasar tradisional;
- (2). Pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan meliputi:
 - (a). ruas jalan arteri;
 - (b). ruas jalan kolektor;
 - (c). ruas jalan lokal; dan
 - (d). ruas jalan lingkungan.
- (3). Peningkatan saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier di seluruh Kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
- (4). Normalisasi saluran sungai sebagai saluran akhir yang meliputi sungai diseluruh wilayah Daerah.
- (5). Pembangunan fasilitas resapan dan/atau kolam retensi di kawasan yang sulit dialirkan ke saluran drainase meliputi :
 - (a). Kecamatan Buaran;
 - (b). Kecamatan Kedungwuni;
 - (c). Kecamatan Siwalan;
 - (d). Kecamatan Sragi;
 - (e). Kecamatan Tirto;
 - (f). Kecamatan Wiradesa; dan
 - (g). Kecamatan Wonokerto.

(f). Sistem Evakuasi Bencana, meliputi :

(1). Jalur Evakuasi, meliputi :

- (a). Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa pada lokasi yang lebih tinggi berada di :
 - (1). Kecamatan Bojong;
 - (2). Kecamatan Buaran;
 - (3). Kecamatan Kajen;
 - (4). Kecamatan Karangdadap;
 - (5). Kecamatan Kedungwuni;
 - (6). Kecamatan Kesesi;
 - (7). Kecamatan Siwalan;
 - (8). Kecamatan Sragi;
 - (9). Kecamatan Tirto;
 - (10). Kecamatan Wiradesa; dan
 - (11). Kecamatan Wonokerto.
- (b). Pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi berada di :
 - (1). Kecamatan Doro;
 - (2). Kecamatan Kajen;
 - (3). Kecamatan Kandangserang;
 - (4). Kecamatan Karanganyar;
 - (5). Kecamatan Lebakbarang;
 - (6). Kecamatan Paninggaran;
 - (7). Kecamatan Petungkriyono; dan
 - (8). Kecamatan Talun.
- (c). Pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi berupa pengembangan jalan desa yang berada di kawasan yang memiliki pantai berada di:
 - (1). Kecamatan Siwalan;



- (2). Kecamatan Tirta; dan
- (3). Kecamatan Wonokerto.

(2). Ruang Evakuasi

Ruang evakuasi berada di seluruh kecamatan yang meliputi :

- (a). lapangan;
- (b). stadion;
- (c). taman publik;
- (d). bangunan rumah;
- (e). bangunan kantor pemerintah;
- (f). bangunan fasilitas sosial;
- (g). bangunan fasilitas umum; dan
- (h). ruang/bangunan lainnya.

(3). Lahan relokasi, meliputi :

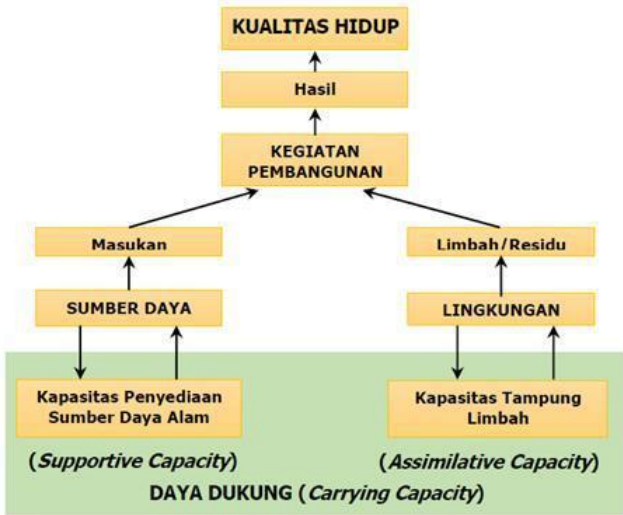
Lahan relokasi dilakukan apabila lokasi bencana tidak dapat lagi dimanfaatkan. Penetapan lahan relokasi dilakukan oleh Bupati dengan pertimbangan meliputi:

- (a). Bukan merupakan kawasan lindung;
- (b). Bukan bagian dari kawasan yang rawan terhadap bencana; dan
- (c). Memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dipindahkan.

c. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1). Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 komponen, yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Telaah daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah.



Gambar 2.17. Skema Proses Daya Dukung Lingkungan Hidup

Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang. Hasil penentuan daya dukung lingkungan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, penerapan rencana tata ruang harus



memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah.

Tahapan penentuan daya dukung dan daya tampung diawali dengan tumpang susun peta rona lingkungan hidup. Kompleksitas dari rona lingkungan disederhanakan berdasarkan karakteristik yang sama (analog), sehingga menghasilkan peta satuan lahan dengan metode kuantitatif empiris maka diketahui kelas daya dukung lingkungan. Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air yang dituangkan dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air dan tanah.

a). Kemampuan Lahan

(1). Klasifikasi Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan. Pengelompokan kemampuan lahan dilakukan untuk membantu dalam penggunaan dan interpretasi peta tanah. Kemampuan lahan sangat berkaitan dengan tingkat bahaya kerusakan dan hambatan dalam mengelola lahan.

(2). Kemampuan Lahan dalam Tingkat Kelas

Lahan diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kelas, yang ditandai dengan huruf romawi I sampai dengan VIII. Dua kelas pertama (kelas I dan kelas II) merupakan lahan yang cocok untuk penggunaan pertanian dan 2 (dua) kelas terakhir (kelas VII dan kelas VIII) merupakan lahan yang harus dilindungi atau untuk fungsi konservasi. Kelas III sampai dengan kelas VI dapat dipertimbangkan untuk berbagai pemanfaatan lainnya. Meskipun demikian, lahan kelas III dan kelas IV masih dapat digunakan untuk pertanian.

Tabel 2.11.
Klasifikasi Kemampuan Lahan Kabupaten Pekalongan

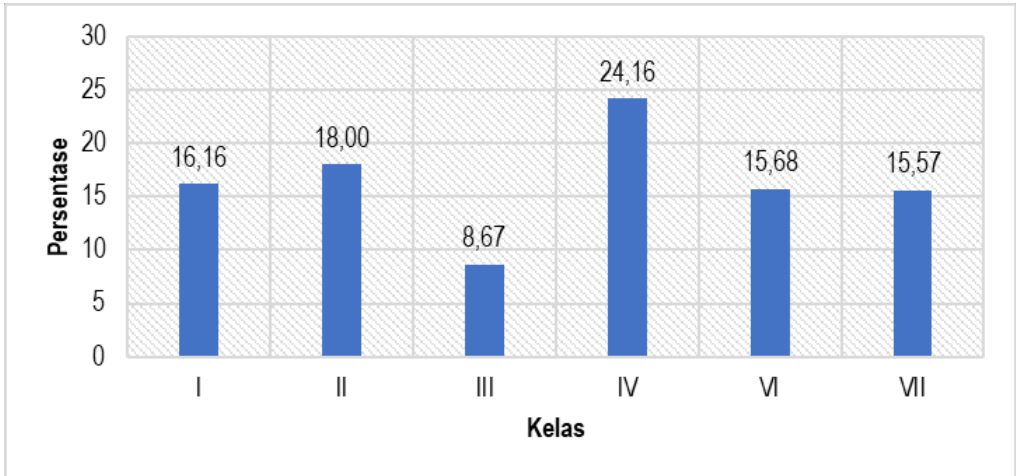
NO	FAKTOR PENGHAMBAT/PEMBATAS	KELAS KEMAMPUAN LAHAN							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Tekstur Tanah								
	a. Lapisan atas (40cm)	t2/t3	t1/t4	t1/t4	(*)	(*)	(*)	(*)	t5
	b. Lapisan bawah	t2/t3	t1/t4	t1/t4	(*)	(*)	(*)	(*)	t5
2	Lereng Permukaan (%)	I0	I3	I2	I3	(*)	I4	I5	I6
3	Keadaan Erosi	e0	e1	e1	e2	(*)	e3	e4	(*)
4	Banjir	o0	o1	o2	o3	o4	(*)	(*)	(*)
	Kelas	III, IV, & VIII							
		Kelas Zona		Sub Kelas Penghambat					
		I		t,d,o,e					
		II		t,d,e,o					
		III		t,l,d,e,o					
		IV		t,l,d,e,o					
		VIII		t,l					
	Potensi Kemampuan Lahan	Sangat Tinggi Untuk Kelas Zona I/II							

Sumber: Permen LH No. 17 Tahun 2009

Dari hasil klasifikasi terhadap kemampuan lahan, terhadap data-data yang tersedia di Kabupaten Pekalongan dalam bentuk peta kemudian diolah dengan metode *superimposed* peta, sehingga mendapatkan peta kemampuan lahan di Kabupaten Pekalongan. Hasil analisis



kemampuan lahan di Kabupaten Pekalongan dapat diketahui bahwa kelas kemampuan lahan yang ada termasuk didalam kelas kemampuan lahan kelas zona I, II, III, IV, VI dan VII.



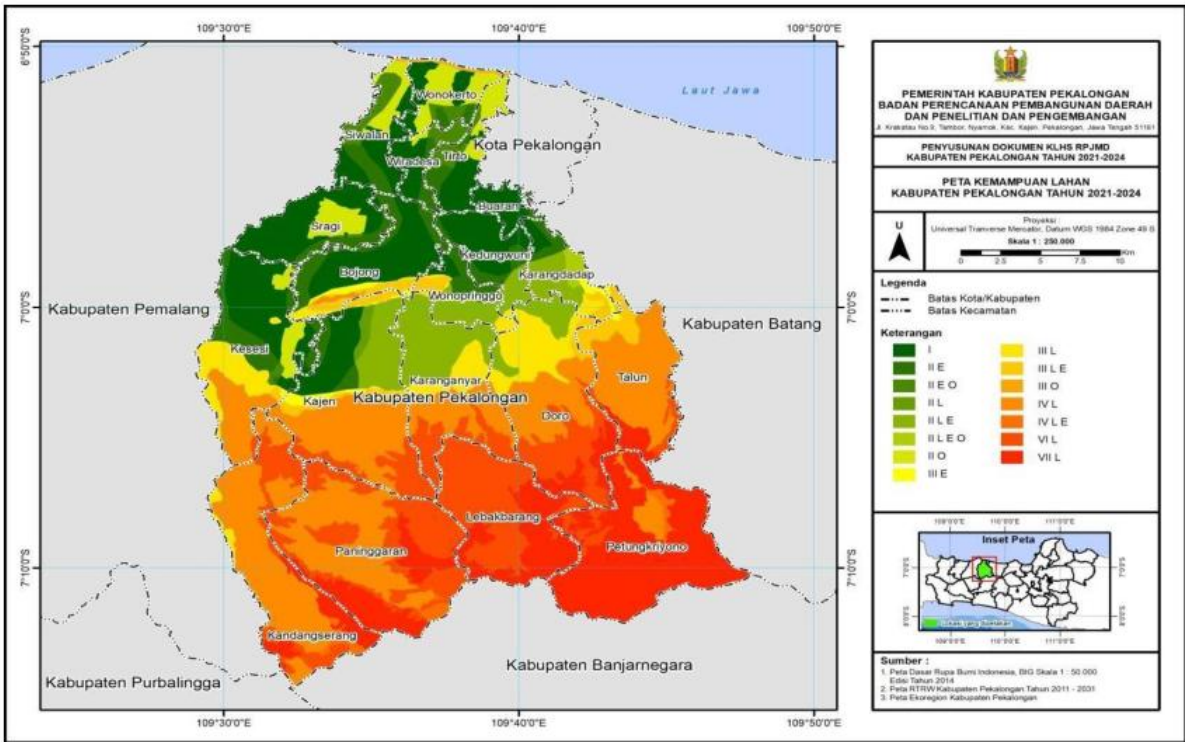
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025-2029

Gambar 2.18. Grafik Persentase Luas Kemampuan Lahan per Zona Kelas Kabupaten Pekalongan

Indeks kemampuan lahan Kabupaten Pekalongan dikutip dari buku Teknik Analisis Regional (Mutaali, 2015) mempunyai rumus sebagai berikut :

$$IKL = \frac{LWk\ 1 - 4}{LWk\ 5 - 8} = \frac{59849,67}{27916,51}$$

Indeks kemampuan lahan Kabupaten Pekalongan sebesar **2,14**. Indeks tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki **Kelas Potensi Lahan Sangat Tinggi** dimana kemampuan mengembangkan potensi lahannya lebih optimal khususnya untuk berbagai ragam kawasan budidaya dengan tetap terjaganya keseimbangan lingkungan.



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025-2029

Gambar 2.19. Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Pekalongan



b). Daya Dukung Pangan

Kabupaten Pekalongan belum memiliki perhitungan daya dukung pangan berbasis spasial, sehingga untuk mengasumsikan kondisi daya dukung pangan menggunakan perhitungan daya dukung lahan pertanian. Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian adalah kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi beras guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk hidup sejahtera atau mencapai kondisi swasembada beras.

Daya Dukung Pangan yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras, yaitu Indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDLp), adalah sebagai berikut :

Indeks Daya Dukung Lahan Untuk Pangan (DDLp) =
$$\frac{\text{Jumlah Produksi Beras Per tahun}}{\text{Jumlah Konsumsi Beras Per tahun}}$$

Hasil Perhitungan dianalisis dengan kategori sebagai berikut :

- DDLp < 1 : daya dukung lahan pertanian terlampaui atau buruk;*
- DDLp 1 - 3 : daya dukung lahan pertanian bersyarat atau sedan;*
- DDLp >3 : daya dukung lahan pertanian baik.*

Produksi padi di Kabupaten Pekalongan dalam kurun 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2020 produksi padi di Kabupaten Pekalongan 231.476 ton menurun menjadi 225.028 ton pada tahun 2021. Kemudian mulai tahun 2021 menurun sampai dengan tahun 2024 dimana produksi padi menjadi 205.959 ton pada tahun 2024. Sebagian besar produksi padi yang ada di Kabupaten Pekalongan adalah padi sawah.

Tabel 2.12.
Produksi Padi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	TAHUN	PRODUKSI (TON)	PRODUKTIVITAS (KW/HA)
1	2020	231.476	53,02
2	2021	225.028	53,42
3	2022	216.948	51,92
4	2023	216.455	52,91
5	2024	205.959	53,29

Sumber : DKPP Kab. Pekalongan, 2025

Konsumsi beras dihitung berdasarkan hasil prognosa terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 124 kg/orang/tahun. Sehingga dalam asumsi konsumsi beras untuk perhitungan daya dukung lahan untuk pangan Kabupaten Pekalongan adalah 124 kg/perkapita/pertahun. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka indeks daya dukung lahan pertanian (pangan) tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.13.
Perhitungan Daya Dukung Pangan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi padi (ton)	216.948	216.455	205.959
2	Jumlah penduduk	986.455	1.007.384	1.019.006
3	Ketersediaan beras (ton)	136.112,98	129.163	373.056
4	Kebutuhan (Ton)	122.320	89.456	71.162
5	DDLp	1,11	1,44	1,43

Sumber : DKPP Kab. Pekalongan, 2025



Dari hasil perhitungan daya dukung lahan pertanian yang ada di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 yaitu 1,43 yang berarti daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Pekalongan dalam kategori Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian **bersyarat atau sedang**.

c). **Daya Dukung Air**

Berdasarkan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung (D3TLH) Air Kabupaten Pekalongan yang disusun pada tahun 2022, perhitungan ketersediaan air dan kebutuhan air di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

(1). **Ketersediaan Air**

Data ketersediaan air beserta peta Wilayah Aliran Sungai digunakan untuk menentukan ketersediaan air dalam satu provinsi atau kabupaten/kota. Sebaran ketersediaan air akan dilakukan dengan sistem grid dan menggunakan peta kinerja jasa lingkungan hidup. Hasil perhitungan total ketersediaan air pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan sebagaimana berikut.

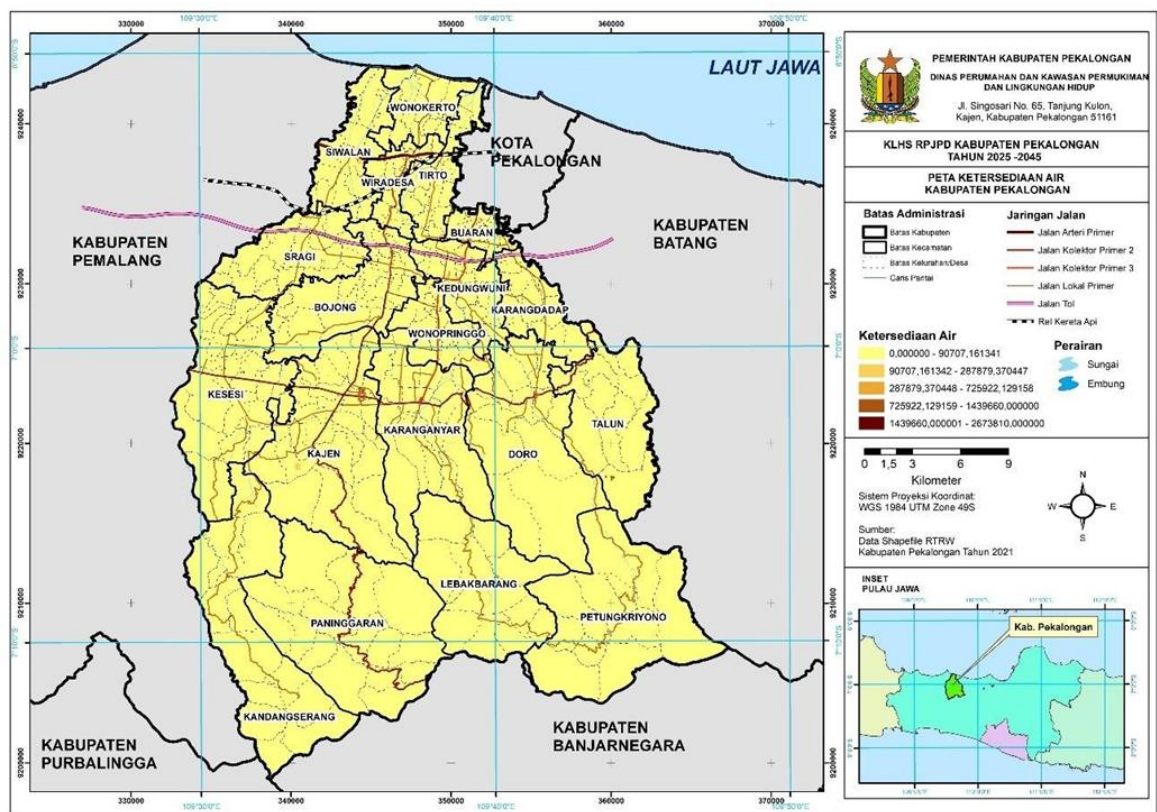
Tabel 2.14.
Ketersediaan Air Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	TOTAL KETERSEDIAAN AIR (M3/TAHUN/HA)
1	Kecamatan Bojong	24.180.542,93
2	Kecamatan Buaran	42.194.455,49
3	Kecamatan Doro	33.299.592,09
4	Kecamatan Kajen	81.873.359,56
5	Kecamatan Kandangserang	51.816.830,08
6	Kecamatan Karanganyar	165.585.648,87
7	Kecamatan Karangdadap	23.187.796,08
8	Kecamatan Kedungwuni	88.569.915,24
9	Kecamatan Kesesi	62.555.617,53
10	Kecamatan Lebakbarang	15.528.271,53
11	Kecamatan Paninggaran	67.163.952,11
12	Kecamatan Petungkriyono	24.104.269,49
13	Kecamatan Siwalan	100.587.493,47
14	Kecamatan Sragi	16.269.157,01
15	Kecamatan Talun	138.293.119,38
16	Kecamatan Tirto	40.992.751,13
17	Kecamatan Wiradesa	58.921.782,98
18	Kecamatan Wonokerto	51.610.524,32
19	Kecamatan Wonopringgo	208.775.023,87
	Grand Total	1.295.510.103,15

Sumber : Dokumen D3TLH Air Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukan bahwa total ketersediaan air di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 1.295.510.103,15 m3, dengan ketersediaan yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Wonopringgo sebanyak 208.775.023,87 m3. Sedangkan wilayah

yang memiliki ketersediaan paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain adalah di Kecamatan Lebakbarang sebanyak 15.528.271,53 m3. Wilayah dengan ketersediaan air tinggi diharapkan juga dapat menopang wilayah sekitar terdekat yang memiliki ketersediaan air rendah atau kurang.



Sumber : DPU TARU Kabupaten Pekalongan 2023

Gambar 2.20. Peta Ketersediaan Air Kabupaten Pekalongan

(2). Kebutuhan Air

Data kebutuhan air terdiri dari dua: (1) kebutuhan domestik/rumah tangga; dan (2) kebutuhan lahan. Kebutuhan domestik ditentukan dengan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air per kapita.

(1) Kebutuhan Air Rumah Tangga

Kebutuhan air rumah tangga dihitung dengan basis jumlah penduduk. Konsep yang diterapkan adalah membuat distribusi penduduk tiap grid dengan mempertimbangkan faktor penutupan lahan. Pertimbangan distribusinya didasarkan pada pembobotan tiap tipe penutupan lahan. Beberapa referensi menyatakan bahwa wilayah pemukiman atau perkampungan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan demikian nilai bobot pada tipe penutupan lahan pun tinggi. Asumsinya, kemudahan akses sangat mempengaruhi letak suatu perkampungan atau pemukiman. Oleh karenanya, nilai pembobotan pada jalan untuk pendistribusian jumlah penduduk juga tinggi.

Berdasarkan perhitungan, menunjukan bahwa total kebutuhan air rumah tangga di Kabupaten Pekalongan mencapai 9.087.690,24 m³, kebutuhan paling tinggi pada wilayah Kecamatan Kesesi dengan total sebesar 1.002.395,52 m³. Sedangkan wilayah yang memiliki kebutuhan air rumahtangga terendah terdapat pada wilayah Kecamatan Lebakbarang sebesar 177.266,88 m³.

(2) Kebutuhan Air Lahan

Penggunaan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan dihitung dengan pendekatan penghitungan luasan penutupan lahan yang terdiri dari : Sawah, Perkebunan/kebun, Tegalan/pertanian lahan kering dan Tambak/perikanan air tawar. Tipe penutupan lahan yang dihitung kebutuhan airnya mengacu pada kelas penutupan lahan skala 1:50.000 atau 1:25.000



sebagaimana termuat dalam Lampiran C SNI 7645:2010 dan hanya kelas penutupan lahan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (produksi).

Berdasarkan perhitungan, menunjukan bahwa total kebutuhan air lahan di Kabupaten Pekalongan sebesar 402.079.975,64 m3. Kebutuhan paling tinggi pada wilayah Kecamatan Kesesi dengan total sebesar 42,471,414.73 m3. Sedangkan wilayah yang memiliki kebutuhan air lahan terendah terdapat pada wilayah Kecamatan Buaran sebesar 4,582,347.69 m3.

(3) Kebutuhan Air Total

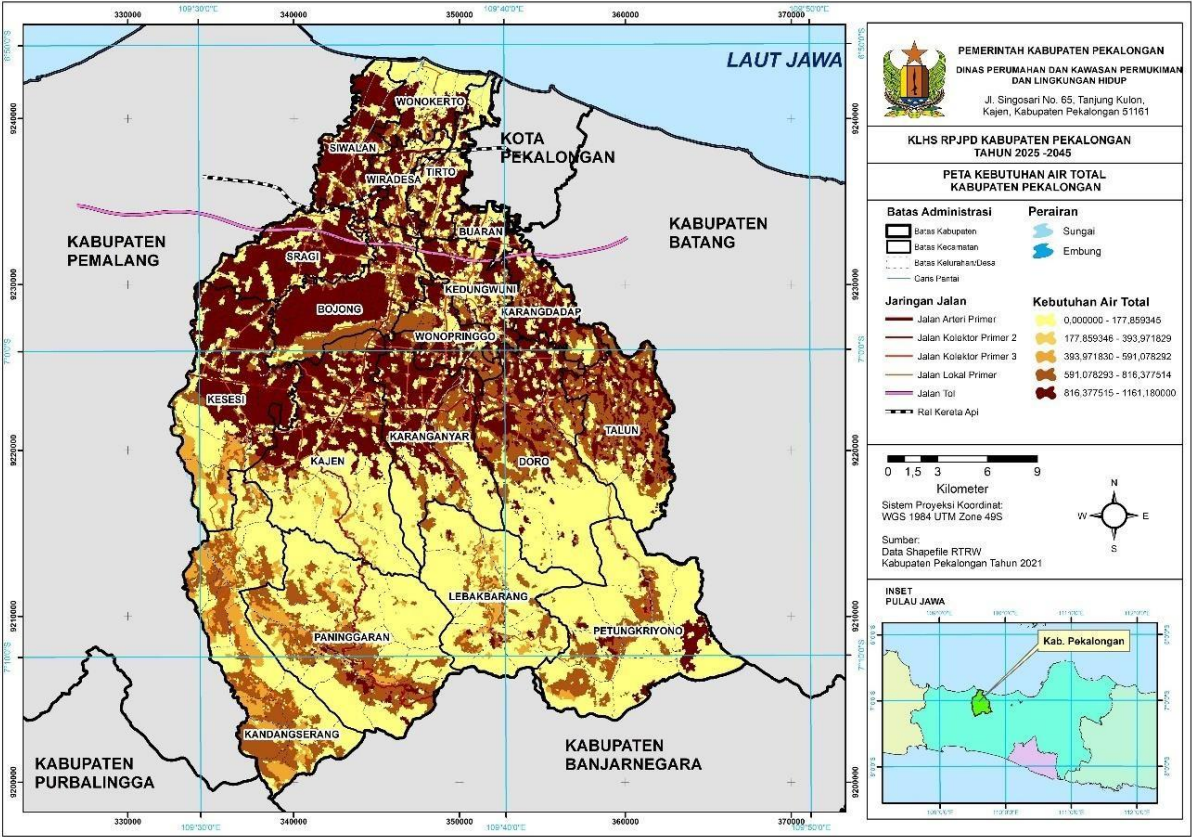
Kebutuhan air total merupakan penjumlahan dari kebutuhan air rumah tangga dengan kebutuhan air lahan di Kabupaten Pekalongan. Total kebutuhan air di Kabupaten Pekalongan tahun 2022 mencapai 411.167.665,88 m3. Secara lengkap perhitungan kebutuhan air dapat diuraikan seperti tabel berikut.

Tabel 2.15.
Kebutuhan Air Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

No	Kecamatan	Kebutuhan Air Rumah Tangga (M3/Tahun/Ha)	Kebutuhan Air Lahan (M3/Tahun/Ha)	Total Kebutuhan Air (M3/Tahun/Ha)
1	Bojong	722.761,92	3.501.418,38	34.224.180,30
2	Buaran	212.215,68	4.582.347,69	4.794.563,37
3	Doro	570.075,84	33.940.537,17	34.510.613,01
4	Kajen	815.261,76	34.889.007,90	35.704.269,66
5	Kandangserang	605.612,16	28.891.567,58	29.497.179,74
6	Karanganyar	639.221,76	31.390.273,86	32.029.495,62
7	Karangdadap	343.535,04	15.356.574,95	15.700.109,99
8	Kedungwuni	432.457,92	14.451.253,56	14.883.711,48
9	Kesesi	1.002.395,52	42.471.414,73	43.473.810,25
10	Lebakbarang	177.266,88	8.154.788,91	8.332.055,79
11	Paninggaran	466.948,80	25.214.147,55	25.681.096,35
12	Petungkriyono	337.711,68	15.896.028,42	16.233.740,10
13	Siwalan	481.403,52	20.591.942,14	21.073.345,66
14	Sragi	662.567,04	25.862.254,48	26.524.821,52
15	Talun	442.912,32	29.057.879,40	29.500.791,72
16	Tirto	352.512,00	9.535.547,63	9.888.059,63
17	Wiradesa	269.809,92	7.849.779,30	8.119.589,22
18	Wonokerto	196.862,40	7.345.535,40	7.542.397,80
19	Wonopringgo	356.158,08	13.097.676,60	13.453.834,68
	Total	9.087.690,24	402.079.975,65	411.167.665,89

Sumber : Dokumen D3TLH Air Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Berdasarkan data tabel diatas, menunjukan bahwa total kebutuhan air total yang paling tinggi pada wilayah Kecamatan Kesesi dengan total sebesar 43,473,810.25 m3. Sedangkan wilayah yang memiliki kebutuhan air total terendah terdapat pada wilayah Kecamatan Lebakbarang sebesar 4,794,563.37 m3. Secara spasial kebutuhan air total dapat dilihat pada gambar peta Kebutuhan air.



Sumber : DPU TARU Kabupaten Pekalongan 2023

Gambar 2.21. Peta Kebutuhan Air Kabupaten Pekalongan

(3). Status Daya Dukung Air

Selisih ketersediaan dan kebutuhan air tiap grid untuk menentukan status Daya Dukung Air. Kondisi status Daya Dukung Air terlampaui merupakan kondisi dimana kebutuhan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan airnya. Kondisi ini ditandai dengan hasil pengurangan ketersediaan terhadap kebutuhan air bernilai nol atau negatif (-), begitupun sebaliknya. Penjelasan mengenai sebaran status Daya Dukung Air di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16.
Sebaran Luasan Daya Dukung Air per Kecamatan
di Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

No	Administrasi	Luasan (Ha)		
		Defisit	Surplus	Total
1	Kecamatan Bojong	3.229,18	1.079,05	4.308,24
2	Kecamatan Buaran	389,78	523,10	912,88
3	Kecamatan Doro	3.448,66	4.359,06	7.807,71
4	Kecamatan Kajen	3.315,88	5.184,19	8.500,07
5	Kecamatan Kandangserang	1.748,59	5.983,58	7.732,16
6	Kecamatan Karanganyar	3.005,07	2.954,76	5.959,83
7	Kecamatan Karangdadap	1.484,60	689,57	2.174,17
8	Kecamatan Kedungwuni	1.365,03	1.019,88	2.384,91
9	Kecamatan Kesesi	3.784,59	3.003,24	6.787,83
10	Kecamatan Lebakbarang	701,23	5.521,89	6.223,11
11	Kecamatan Paninggaran	1.679,08	8.037,29	9.716,37
12	Kecamatan Petungkriyono	930,11	7.448,97	8.379,08
13	Kecamatan Siwalan	1.941,38	859,65	2.801,03



No	Administrasi	Luasan (Ha)		
		Defisit	Surplus	Total
14	Kecamatan Sragi	2.490,88	949,31	3.440,19
15	Kecamatan Talun	2.886,34	1.935,36	4.821,70
16	Kecamatan Tirto	888,07	1.132,00	2.020,06
17	Kecamatan Wiradesa	702,67	674,64	1.377,31
18	Kecamatan Wonokerto	692,92	1.298,11	1.991,03
19	Kecamatan Wonopringgo	983,65	950,03	1.933,67
Total		35.667,70	53.603,68	89.271,38

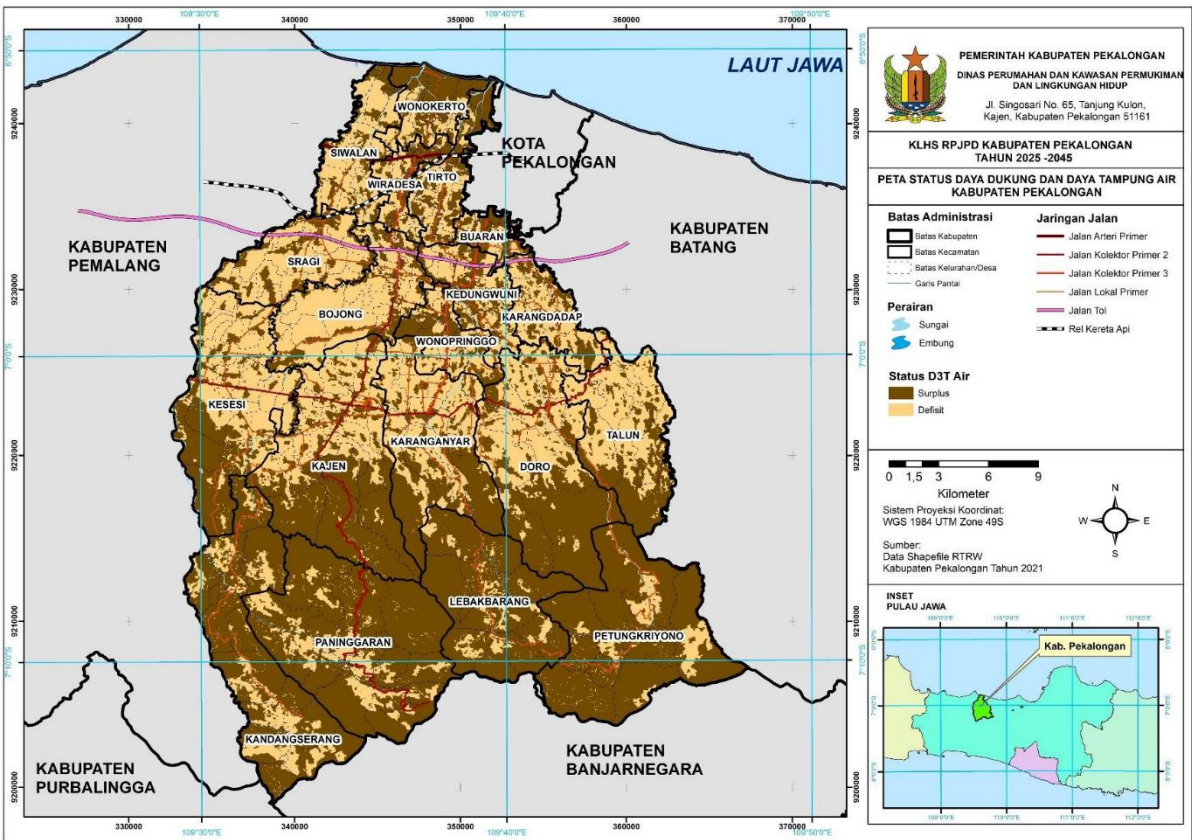
Sumber : Dokumen D3TLH Air Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Tabel 2.17.
Status Daya Dukung Air
di Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

No	Kecamatan	Daya Dukung dan Daya Tampung Air (m3/tahun/ha)	Status
1	Kecamatan Bojong	(10.037.711,95)	Defisit
2	Kecamatan Buaran	37.447.168,82	Surplus
3	Kecamatan Doro	(1.180.947,75)	Defisit
4	Kecamatan Kajen	46.201.353,98	Surplus
1	Kecamatan Bojong	(10.037.711,95)	Defisit
5	Kecamatan Kandangserang	22.200.625,67	Surplus
6	Kecamatan Karanganyar	133.626.359,59	Surplus
7	Kecamatan Karangdadap	7.401.754,23	Surplus
8	Kecamatan Kedungwuni	73.531.415,10	Surplus
9	Kecamatan Kesesi	19.030.147,65	Surplus
10	Kecamatan Lebakbarang	7.106.177,01	Surplus
11	Kecamatan Paninggaran	41.584.973,30	Surplus
12	Kecamatan Petungkriyono	8.039.898,22	Surplus
13	Kecamatan Siwalan	79.533.598,34	Surplus
14	Kecamatan Sragi	(10.324.973,70)	Defisit
15	Kecamatan Talun	108.659.645,80	Surplus
16	Kecamatan Tirto	31.141.258,00	Surplus
17	Kecamatan Wiradesa	50.717.418,62	Surplus
18	Kecamatan Wonokerto	44.154.408,98	Surplus
19	Kecamatan Wonopringgo	195.344.019,49	Surplus
Total		884.176.589,38	Surplus

Sumber : Dokumen D3TLH Air Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Berdasarkan perhitungan diatas maka status Daya Dukung Air Kabupaten Pekalongan tahun 2022 masih dalam kondisi **Surplus**, dengan nilai Daya Dukung Air sebesar 884.176.589,38 m3. Meskipun terdapat kondisi defisit di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Bojong, Doro dan Sragi. Sebaran status daya dukung air secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.22. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Pekalongan

2). Daya Tampung Lingkungan Hidup

a). Pencemaran Air

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas air sungai secara berkala. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan terhadap beberapa sungai yang potensial tercemar oleh aktivitas sekitarnya. Pada tahun 2024 dilakukan pemantauan terhadap 5 sungai yaitu (1)Sungai Kupang, (2)Sungai Sengkarang, (3)Sungai Sragi, (4)Sungai Silempeng dan (5)Sungai Meduri. Jumlah titik sampel adalah 12 titik meliputi 2 titik di Sungai Kupang, 3 titik di Sungai Sengkarang, 3 titik di Sungai Sragi, 2 titik di Sungai Silempeng dan 2 titik di Sungai Meduri. Pengujian Sungai Kupang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, sedangkan hasil pengujian Sungai Sengkarang, Sungai Sragi, Sungai Silempeng dan Sungai Meduri diperoleh dari swapantau usaha/ kegiatan di wilayah Kabupaten Pekalongan.

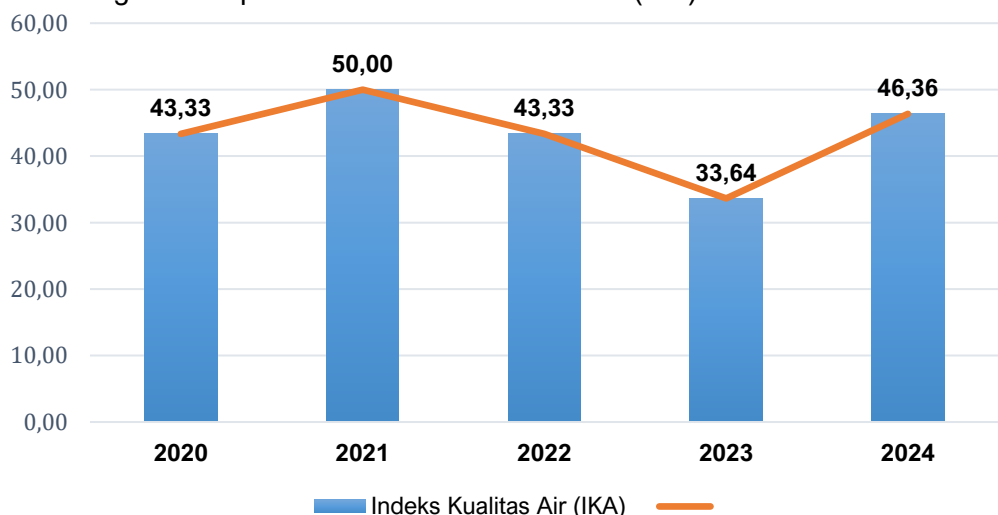
Parameter kualitas air yang digunakan dalam penentuan status mutu air yaitu TSS, DO, BOD, COD, NO2, NO3, dan Fecal Coliform. Data dari hasil pemantauan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Kualitas TSS melebihi ambang batas baku mutu disemua titik sampel. Kandungan TSS karena banyaknya limpasan air hujan yang mengandung lumpur atau tanah akibat erosi tinggi dari wilayah hulu masuk ke sungai tersebut. Kandungan TSS tertinggi didapati di Sungai Meduri yaitu sebesar 109 mg/liter.
- Dari hasil pengujian terhadap kandungan DO, pada semua titik sample tidak memenuhi baku mutu
- Kualitas BOD yang melebihi ambang batas baku mutu ada di 11 titik pantau/ sampling, dengan hasil kandungan tertinggi BOD sebesar 88 mg/L. Sedangkan untuk 1 titik di Sungai Kupang masih memenuhi baku mutu.



- Kualitas BOD yang melebihi ambang batas baku mutu ada di 10 titik pantau, dengan hasil kandungan tertinggi COD sebesar 138,75 mg/L, sedangkan 2 titik Sungai Kupang masih memenuhi baku mutu
- Kandungan Fecal Coliform melebihi ambang baku pada semua titik sungai yang dilakukan. Kandungan tertinggi ada di Sungai Sengkarang yaitu sebesar 46.000/1000 ml.

Hasil analisis status mutu air sungai di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024, dapat diketahui bahwa dari 17 lokasi yang diambil sebagai sampel uji kualitas air terdapat 5 lokasi dengan kondisi cemar berat, 5 lokasi cemar sedang dan 7 lokasi cemar ringan. Hasil ini digunakan sebagai dasar penentuan Indeks Kualitas Air (IKA).



Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan, 2025

**Gambar 2.23. Grafik Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 – 2024**

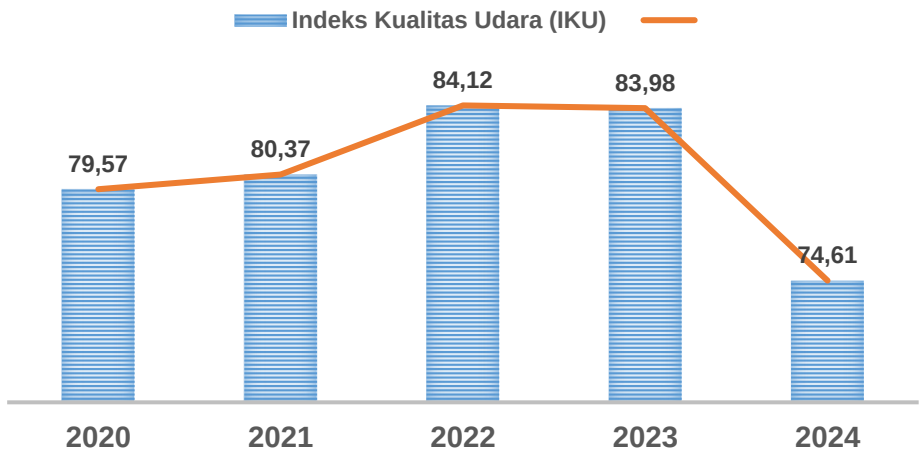
b). Pencemaran Udara

Pengendalian kualitas udara penting dilakukan untuk memelihara kualitas udara agar tetap baik untuk mendukung kehidupan, salah satu wujud pengendalian kualitas udara yaitu pemantauan kualitas udara untuk mengetahui kondisi atau pencemaran udara pada waktu tertentu. Metode pengujian menggunakan metode passive sampler, terdapat 4 titik lokasi pengujian yaitu Kawasan Permukiman, Kawasan Perkantoran, Kawasan Industri, dan Kawasan Transportasi. Hasil pengujian kualitas udara ambien Kabupaten Pekalongan tahun 2022 sebagai berikut :

- Hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan bahwa konsentrasi SO₂ di semua titik pengambilan sampel masih jauh dibawah baku mutu.
Konsentrasi SO₂ tertinggi 12,31 µg/Nm³ didapati di titik pengujian kawasan industri saat pengujian kedua, sedangkan di kawasan perkantoran, industri dan permukiman konsentrasi SO₂ <13 µg/Nm³ di semua pengujian
- Hasil pengujian kualitas udara ambien parameter NO₂ (µg/Nm³) menunjukkan bahwa di semua titik pengambilan sampel konsentrasi NO₂ masih dibawah 316 µg/ Nm³, artinya masih memenuhi baku mutu,
Konsentrasi NO₂ berada pada kisaran 9,87 - 20,35 µg/ Nm³. Konsentrasi NO₂ tertinggi terdapat pada udara ambien kawasan transportasi dalam pengambilan sampel yang pertama.



Berdasarkan hasil pemantauan terhadap parameter NO₂ dan SO₂, kemudian dilakukan perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU merupakan indikator pengelolaan kualitas udara di suatu wilayah. Hasil IKU Kabupaten Pekalongan tahun 2024 sebesar 74,61 (kategori sedang). Perkembangan IKU Kabupaten Pekalongan cenderung meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.24. Grafik Perkembangan Nilai IKU Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 -2024

c). Limbah

Penghasil limbah di Kabupaten Pekalongan berasal dari kegiatan industri tekstil, fasilitas pelayanan kesehatan pabrik gula, perkebunan teh, perkebunan karet dan PLTM. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan LingkunganHidup Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2022, jumlah limbah cair dan padat dari sumber pencemaran yang tidak bergerak (15 sumber pencemaran), diketahui bahwa volume air limbah tertinggi berasal dari industri tekstil dengan jumlah 258,175 m³/hari. Jumlah limbah B3 padat tertinggi juga berasal dari pabrik tekstil yaitu 1.895,01 ton/tahun. Untuk jumlah limbah B3 cair tertinggi juga berasal dari pabrik tekstil yaitu 0,018 m³/tahun.

d. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain :

1). Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan.



Hasil perhitungan IKP berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (kab/kota). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota). IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah (kabupaten/kota) dikelompokkan ke dalam enam kelompok, yaitu *Prioritas 1 (Sangat Rentan)*, *Prioritas 2 (Rentan)*, *Prioritas 3 (Agak Rentan)*, *Prioritas 4 (Agak Tahan)*, *Prioritas 5 (Tahan)*, *Prioritas 6 (Sangat Tahan)*. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 yang bersumber dari Badan Pangan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Indeks Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemanfaatan dan
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan	IKP	Kelompok IKP
1	2020	85,69	81,46	71,78	78,86	6
2	2021	84,00	80,98	74,59	79,33	6
3	2022	83,45	81,23	77,46	80,39	6
4	2023	80,25	84,01	81,32	81,81	6
5	2024	-	-	-	80,65	6

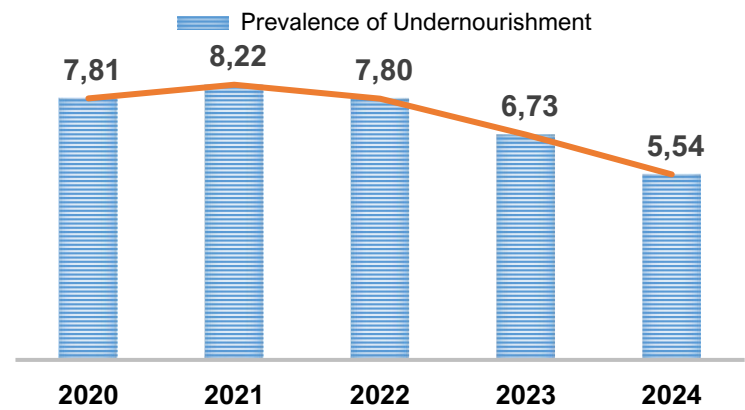
Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

Skor IKP Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan dari 78,86 di Tahun 2020 menjadi 80,65 di Tahun 2024 dengan Indeks Ketahanan Pangan tinggi. Peningkatan skor IKP memerlukan sinergitas lintas sektor dari pusat dan daerah serta kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta/BUMN, organisasi kemasyarakatan bidang pangan dan pertanian, para petani diperlukan dalam pembangunan sistem pangan berkelanjutan. Fokus dan pendalaman pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dan gizi diperlukan dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan guna pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan tujuan 2 (Tanpa Kelaparan).

2). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Berdasarkan BPS, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka PoU dihasilkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS setiap tahun. PoU mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 berdasarkan data BPs dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS; 2024

Gambar 2.25. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Hasil Susenas 2020 - 2024 menunjukkan prevalensi ketidacukupan pangan di Kabupaten Pekalongan memiliki kecenderungan turun dari 7,81 persen pada tahun 2020 menjadi 5,54 persen pada tahun 2024. Artinya hingga tahun 2024, masih terdapat 5,54 persen penduduk yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

3). Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita adalah rata-rata jumlah energi listrik yang digunakan oleh setiap orang dalam suatu wilayah atau negara dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Angka ini dihitung dengan membagi total konsumsi listrik dengan jumlah penduduk. Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Pekalongan tahun 2024 sebesar **0,57 mwh/jiwa** dengan jumlah konsumsi Listrik sebesar 582.369 Mwh dengan jumlah penduduk sebesar 1.019.006 jiwa Capain ini sedikit lebih besar dari tahun 2023 sebesar **0,55 mwh/jiwa** dengan jumlah konsumsi Listrik sebesar 549.649 Mwh dengan jumlah penduduk sebesar 1.007.384 jiwa.

Tabel 2.19.
Konsumsi Listrik Perkapita
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsumsi Listrik per Kapita (Jumlah Konsumsi Listrik/Jumlah Penduduk)	0,50	0,54	0,56	0,55	0,57
	- Konsumsi Listrik (MWh)	488.861	528.986	553.907	549.649	582.369
	- Jumlah Penduduk (jiwa)	968.821	983.356	995.495	1.007.384	1.019.006

Sumber : PLN UP3 Pekalongan; 2025

4). Persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan;
- b) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (on premises);
- c) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan
- d) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.



Cakupan akses air minum jaringan perpipaan pada tahun 2024 sebesar 58,00 persen. Dalam rangka pengelolaan air minum yang berkelanjutan maka dilakukan pendampingan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelola layanan air minum di Kabupaten Pekalongan dengan kondisi pengelolaannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20.
Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Kondisi SPAM Perkotaan PDAM					
1	Aman	N/A	N/A	N/A	N/A	58,00
2	Jaringan Perpipaan	N/A	N/A	N/A	N/A	58,00
3.	Kapasitas Produksi (Lps)	N/A	N/A	N/A	N/A	299,19
4.	Idle Capacity (Lps)	N/A	N/A	N/A	N/A	47,81
5.	Status Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	Sehat
	Jaringan Perpipaan Non PDAM (Pamsimas)					
1.	Jumlah Sambungan Rumah	N/A	N/A	N/A	N/A	8.857
2.	Jumlah SPAM Fungsi Sebagian	N/A	N/A	N/A	N/A	0
3.	Jumlah SPAM Tidak Sebagian	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

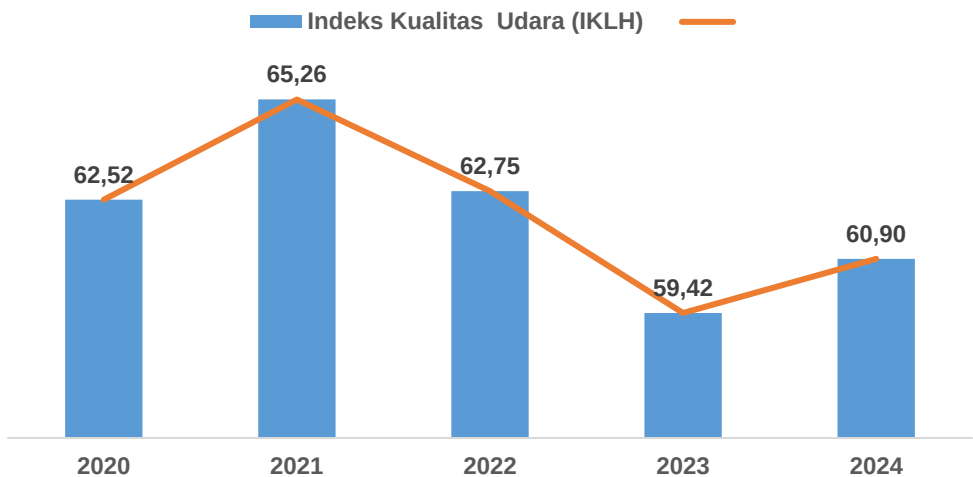
e. Lingkungan Hidup Berkualitas

Menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat dijelaskan dengan indikator sebagai berikut :

1). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks ini biasanya melibatkan beberapa parameter atau faktor yang memperngaruhi kualitas lingkungan hidup, seperti kualitas udara, air tanah, hutan dan lainnya.

Perkembangan IKLH Kabupaten Pekalongan cenderung fluktuatif, tahun 2020 nilai IKLH sebesar 62,52. Kemudian mulai tahun 2021, terjadi perubahan metode perhitungan. Capaian IKLH pada tahun 2021 sebesar 65,26 menurun menjadi 62,75 (kategori sedang) pada tahun 2022, turun sebesar 59,42 dan kemudian naik sebesar 60,90 di Tahun 2024. Perkembangan capaian IKLH dari tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.26. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa IKLH cenderung menurun di Tahun 2022-2024 disebabkan karena adanya **Penurunan Indeks Tutupan Lahan/Hutan** dimana terdapat perubahan luas wilayah Kabupaten Pekalongan dalam Perda RTRW Nomor 3/2020, yang semula sebesar 836,13 km² menjadi 893,04 km², dengan penambahan luas wilayah sebesar 60 km², sedangkan luas hutan berkurang, sehingga luas wilayah kabupaten (sbg faktor pembagiannya) bertambah mengakibatkan indeks tutupan lahan nilainya turun.

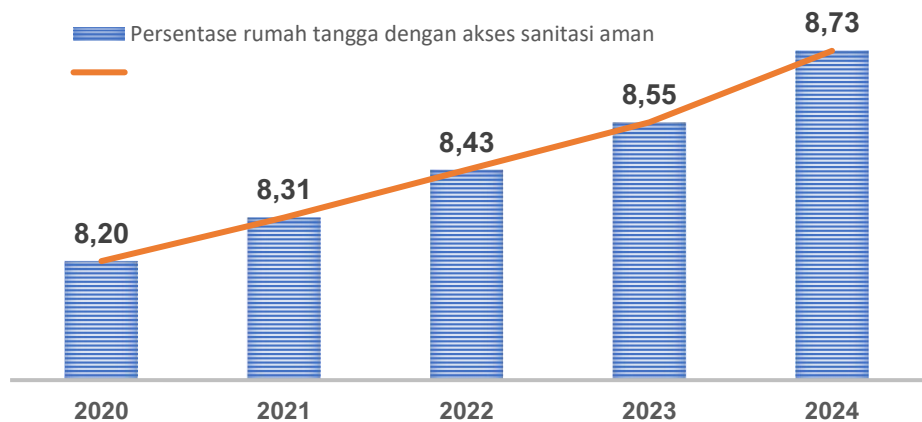
2). Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Formulasi Perhitungan : **PSA = ((JRTST+JR TIPLT) : JR TS) x 100%**

- PSA** : Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman
- JRTST** : Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T
- JR TIPLT** : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)
- JR TS** : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 berdasarkan data BPS dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : DPU TARU; 2025

**Gambar 2.27. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024**

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman dari data DPU TARU Kabupaten Pekalongan memiliki kecenderungan naik dari 8,20 persen pada tahun 2020 menjadi 8,73 persen pada tahun 2024.

3). Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari Kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Kabupaten/Kota.

Jumlah timbulan sampah setiap tahun akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, peningkatan jumlah timbulan sampah dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2020 - 2024, sebesar 15.676,87 ton (10,66%) dengan rata - rata pertahun sebesar 3.919,22 ton (2,66%). Jumlah timbulan sampah tahun 2024 mencapai sebesar 147.079,06 ton. Perkembangan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun dapat dijelaskan seperti tabel berikut.

Tabel 2.21.
Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 - 2024

TAHUN	TIMBULAN SAMPAH (TON)
2020	131.402,19
2021	141.447,87
2022	142.569,58
2023	144.022,43
2024	147.079,06

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan; <https://sipsn.kemenvlh.go.id>, 2025



Pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2020-2024 juga belum berjalan dengan optimal, dilihat dari penanganan sampah sekitar 30-36 persen setiap tahun, sehingga rata-rata sampah yang tidak dikelola berkisar 50-60 persen setiap tahunnya. Perkembangan pengelolaan sampah selama tahun 2020-2024 dapat diuraikan seperti tabel berikut.

Tabel 2.22.
Persentase Pengelolaan Sampah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penanganan (%)	36,55	36,00	35,84	32,95	33,50
Pengurangan (%)	9,46	9,63	10,76	6,45	6,55
Sampah tidak dikelola (%)	53,99	54,37	53,40	60,61	59,94

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan; <https://sipsn.kemenlh.go.id>, 2025

Cakupan layanan persampahan di Kabupaten Pekalongan sudah melayani 16 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada. 3 (tiga) kecamatan yang belum terlayani persampahan oleh DinperkimLH Kabupaten Pekalongan adalah Kecamatan Petungkriyono, Lebakbarang dan Kandangserang. Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana pengolahan sampah.

Sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Pekalongan berupa Transfer Depo sebanyak 2 unit yaitu di Pekuncen dan Pasar Kedungwuni. Sedangkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berlokasi di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen yaitu TPA Bojonglarang dengan luas areal 4,54 Ha dengan kapasitas 150 m3 yang dikelola dengan sistem semi *control landfill*. Kondisi TPA saat ini sudah overload, jumlah sampah yang terangkut ke TPA Bojonglarang mencapai 135 ton/hari pada tahun 2024. Data sampah yang masuk TPA dalam 5 tahun terakhir (2020 – 2024) cenderung fluktuatif, seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.23.
Sampah Yang Masuk TPA Bojonglarang
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 - 2024

TAHUN	SAMPAH YANG MASUK TPA (TON/TH)
2020	48.031,79
2021	50.917,50
2022	51.100,00
2023	47.450,00
2024	49.275,00

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan; <https://sipsn.kemenlh.go.id>, 2025

Kegiatan pengolahan sampah yang berkembang saat ini di Kabupaten Pekalongan antara lain:

a). Bank Sampah

Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2017 memiliki bank sampah induk yaitu Sahabat Bumi, dengan jumlah sampah yang dikelola sebesar 4.943 kg/bulan dan melayani seluruh wilayah di kabupaten pekalongan. Sedangkan bank sampah aktif ada sejumlah 22 unit bank sampah dengan jumlah yang paling banyak ada di kecamatan kajen yaitu sejumlah 7 unit bank sampah.



b). **TPST/TPS 3R**

TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Sedangkan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Prinsip TPST dan TPS 3R adalah penggunaan ulang dan pendaurulangan sampah untuk diolah menjadi barang yang mempunyai nilai tambah. TPST/TPS 3R yang ada di kabupaten pekalongan sebanyak 25 unit yang tersebar di kecamatan yang aktif sebanyak 15 unit.

c). **Rumah Rongsok**

Rumah rongsok merupakan pengepul atau penampung sampah yang masih mempunyai nilai jual yang dimiliki oleh individu. Rumah rongsok yang terdata oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan tersebar di 10 wilayah kecamatan sejumlah 13 unit lapak rongsok

Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukan perkembangan fluktuaktif tahun 2021 sebesar 3,43 persen meningkat menjadi 4,01 persen di tahun 2022, namun di tahun 2023 menurun menjadi 3,79 persen.

Tabel 2.24.
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 - 2024

TAHUN	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
2020	N/A
2021	3,43
2022	4,01
2023	3,79
2024	N/A

Sumber : <https://sipsn.kemennlh.go.id>, 2025

f. **Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**

Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim atau Ketahanan Iklim merupakan tindakan antisipasi yang terencana ataupun spontan untuk mengurangi nilai potensi kerugian akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim. Dalam pelaksanaan Pembangunan Berketahanan Iklim di 5 (lima) sektor prioritas dengan pendekatan aksi melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, maupun tata kelola dan pendanaan dipertimbangkan dengan memperhatikan aspek inklusivitas (kesetaraan gender, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya), dan memperhatikan kelestarian ekosistem. Fungsi pengaturan iklim secara keruangan berarti menjaga wilayah-wilayah yang memiliki fungsi besar dalam penyimpanan karbon yaitu sistem penggunaan lahan hutan. Terjaganya kelestarian hutan dengan kerapatan tinggi berarti mengurangi GRK dan menjaga kualitas iklim lokal.

1). **Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif**

Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan kementerian teknis lainnya telah menyusun mekanisme pemantauan kegiatan penanganan perubahan iklim. Dimulai pada tahun 2012, proses yang dilakukan secara kontinyu, transparan dan partisipatif ini melahirkan sebuah



portal Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) yang bernama **Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA)**. AKSARA diresmikan pada tahun 2019 sebagai portal terintegrasi yang membantu Pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen penurunan emisi GRK sebesar 29% di tahun 2030.

AKSARA merupakan platform untuk mencatat pelaksanaan rendah karbon (PRK) dan ketahanan iklim (PBI) secara transparan, akurat, komprehensif, konsisten, dan terintegrasi. AKSARA bertujuan untuk: (1) Menyediakan data dan informasi yang akurat, transparan, dan partisipatif tentang aksi LCDI di Indonesia, (2) Menyediakan sistem untuk mengumpulkan dan melaporkan pencapaian aksi LCDI kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan rendah karbon di Indonesia, (3) Mendukung kredibilitas dan transparansi pelaporan pencapaian penurunan emisi rumah kaca dan pembangunan rendah karbon di Indonesia kepada masyarakat internasional; dan (4) Menyediakan data terkini untuk proses evaluasi dan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon yang lebih baik di masa depan.

Setiap kabupaten/kota melakukan pelaporan terkait upaya yang sudah dilakukan dalam rangka penurunan emisi GRK melalui kegiatan pembangunan rendah karbon. Berdasarkan data yang sudah dilaporkan melalui aplikasi AKSARA, Kabupaten Pekalongan baru melakukan pelaporan pada tahun 2021 dari sektor energi dan limbah, sehingga belum dapat diketahui seberapa jauh upaya secara total yang sudah dilakukan dalam rangka mengurangi emisi GRK di Kabupaten Pekalongan. Berikut ini adalah upaya pembangunan rendah karbon yang sudah dilakukan pada tahun 2021 dari sektor energi dan limbah.

Tabel 2.25.
Upaya Pembangunan Rendah Karbon
di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021

SEKTOR MITIGASI	SUB-SEKTOR MITIGASI	KATEGORI	POTENSI PENURUNAN EMISI (TON CO2)	PELAKSANA KEGIATAN
Energi	Transportasi	Peremajaan Armada Angkutan Umum	12960	Dinas Perhubungan
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Pendukung	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Pendukung	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	4,59	Unit BSU PAKUMBULAN BERSERI
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	3,39	Unit BSU RESIK MULYA
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	4,99	Unit BSU BERKAH MULYA
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	2,40	Unit BSU BLOK E
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	7,99	Unit BSU KREASI SEJAHTERA
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	-	Unit BSU SIDO RESIK
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	-	Unit BSU JALIN SETIA
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	5,99	Unit BSU CAPING GUNUNG

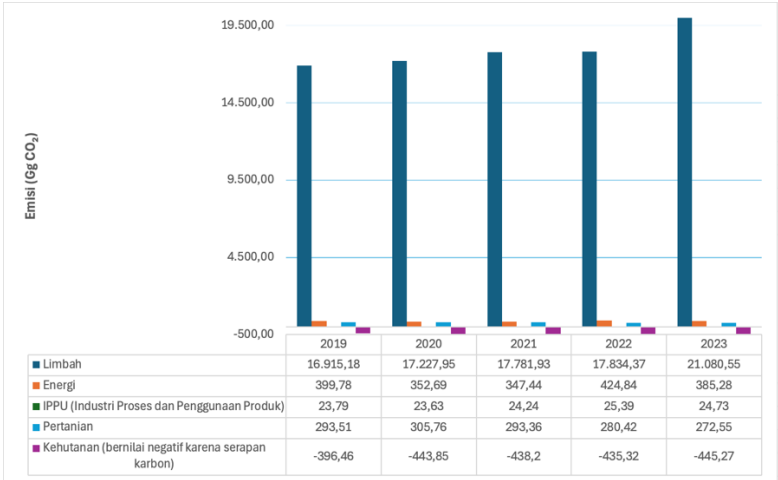


SEKTOR MITIGASI	SUB-SEKTOR MITIGASI	KATEGORI	POTENSI PENURUNAN EMISI (TON CO ₂)	PELAKSANA KEGIATAN
Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	34,94	Unit BSU GEJLIG APIK

Sumber : AKSARA, PPRK/Bappenas; 2021

Selama periode 2019 hingga 2023, total emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, total emisi tercatat sebesar 17.235,80 Gg CO₂ dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 21.317,84 Gg CO₂ pada tahun 2023. Sektor limbah secara konsisten menjadi penyumbang terbesar emisi GRK, dengan peningkatan yang stabil dari 16.915,18 Gg CO₂ pada tahun 2019 menjadi 21.080,55 Gg CO₂ pada tahun 2023. Lonjakan emisi dari sektor ini pada tahun 2023 mencapai lebih dari 3.000 Gg CO₂. Sementara itu, sektor energi mengalami fluktuasi, sempat menurun pada tahun 2020 dan 2021 akibat dampak pandemi COVID-19, namun kembali meningkat di tahun 2022 sebelum kembali menurun pada 2023 menjadi 385,28 Gg CO₂.

Pada sektor kehutanan terus memberikan kontribusi sebagai penyerap emisi karbon dengan nilai negatif, yang menunjukkan peningkatan tutupan vegetasi. Pada tahun 2023, sektor kehutanan menyerap karbon sebesar -445,27 Gg CO₂, tertinggi selama lima tahun terakhir.



Sumber : <https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1>

Gambar 2.28. Perkembangan Emisi GRK Per Sektor di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 - 2023

2). Indeks Risiko Bencana (IRB)

IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Pembagian kelas risiko berdasarkan angka:

- 1. IRB < 13 adalah **rendah**
- 2. IRB 13 - 144 adalah **sedang**
- 3. IRB > 144 adalah **tinggi**



Berdasarkan Surat BNPB No. B-009/BNPB/PERB/SS.01.01/01/2023 perihal Metode Perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), agar pemerintah daerah melalui BPBD berfokus pada peningkatan kapasitas yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang berdasarkan 7 prioritas, yaitu:

- a) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
- b) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- c) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- d) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- e) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- f) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- g) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Tabel 2.26.
Indeks Resiko Bencana (IRB)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	172,56	160,19	168,52	149,83	131.25
2.	Kelas Resiko	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi

Sumber : InaRisk BNPB, 2025

Kabupaten Pekalongan memiliki indeks risiko tinggi dengan nilai indeks 149,83 di Tahun 2023 dengan ancaman bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana.

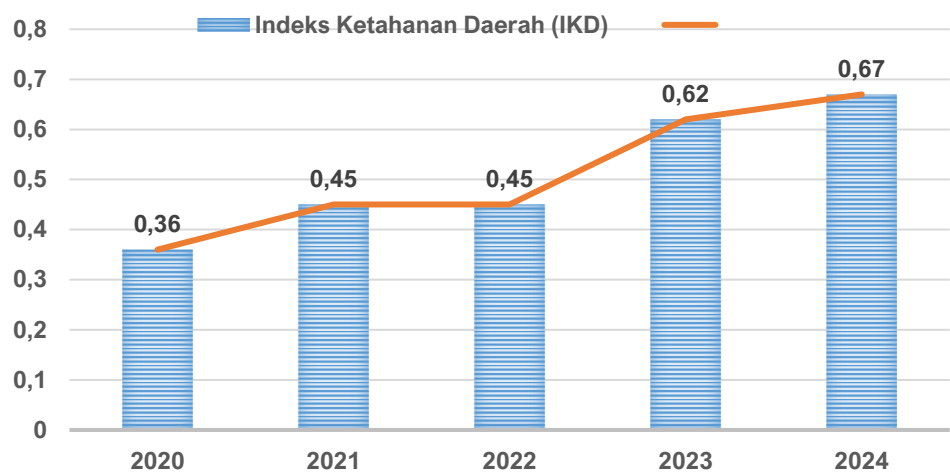
3). Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bapperida di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Penilaian IKD dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*) terkait daftar isian (kuesioner) yang isi jawabannya disepakati bersama oleh *multistakeholders* yang disesuaikan dengan jenis dan karakter ancaman bencana di wilayah tersebut. Hasil penilaian IKD kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan IRBI.



Hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPBD Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.29. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Pekalongan Tahun 2020 - 2024

IKD didapatkan dari isian kuesioner/daftar pertanyaan dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter IKD sendiri terdapat 7 Prioritas dan 71 Indikator. Setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci, sehingga total ada 284 pertanyaan kunci. Setiap pertanyaan kunci wajib disertakan bukti verifikasi (*evidence*) seperti salinan peraturan, dokumentasi kegiatan, daftar hadir, dokumen anggaran, dan lain-lain.

Berdasarkan penilaian ketahanan secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten Pekalongan dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks Ketahanan Daerah **0,67** di Tahun 2024 dan nilai ini menunjukkan Tingkat Kapasitas Daerah Sedang.. Capaian ini adalah suatu keberhasilan bagi Kabupaten Pekalongan dalam rangka progres penurunan IRBI Daerah dan sebab apabila dibandingkan dengan nilai IKD tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya telah ada upaya dari multi-stakeholders yang konsen, positif dan masif dalam pengendalian dan pengurangan risiko bencana di daerah.

g. Demografi

1). Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2024 sebanyak **1.019.006 jiwa** terdiri dari laki-laki **511.671 jiwa (50,80%)** dan perempuan **501.322 jiwa (49,20%)** dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar **1,15** . Dilihat dari rasio jenis kelamin sebesar **103,30**, jumlah penduduk tahun 2024 lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 seperti dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.27.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Laju Pertumbuhan 2020-2024 (%)
1.	Kandangserang	18.676	18.493	37.169	0,86
2.	Paninggaran	22.931	22.015	44.946	1,69
3.	Lebakbarang	5.779	5.783	11.562	0,87



4.	Petungkriono	6.928	6.707	13.635	0,74
5.	Talun	16.816	15.965	32.781	1,56
6.	Doro	24.818	23.701	48.519	1,66
7.	Karanganyar	25.015	24.038	49.053	2,01
8.	Kajen	40.264	39.123	79.387	1,97
9.	Kesesi	38.375	37.391	75.766	1,26
10.	Sragi	33.538	33.455	66.993	0,46
11.	Siwalan	21.612	21.177	42.789	0,68
12.	Bojong	40.571	38.971	79.542	1,47
13.	Wonopringgo	25.336	24.782	50.118	1,15
14.	Kedungwuni	53.169	51.158	104.327	0,75
15.	Karangdadap	22.965	21.525	44.490	1,78
16.	Buaran	24.645	23.958	48.603	0,71
17.	Tirto	40.016	38.316	78.332	1,08
18.	Wiradesa	32.501	31.768	64.269	0,73
19.	Wonokerto	23.729	22.996	46.725	0,23
JUMLAH 2024		517.684	501.322	1.019.006	1,15
2023		511.671	495.713	1.007.384	1,19
2022		500.355	486.100	986.455	1,23
2021		495.409	481.095	976.504	2,01
2020		491.607	477.214	968.821	6,29

Sumber : BPS Kab. Pekalongan Tahun 2025

2). **Kepadatan Penduduk**

Penyebaran penduduk Kabupaten Pekalongan belum begitu merata. Hal ini terlihat dari angka kepadatan penduduk antar kecamatan yang berbeda cukup signifikan. Angka kepadatan penduduk di dapat dari perbandingan antara jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayahnya. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan mencapai 1.218,72 jiwa/km2. Jika dilihat per kecamatan, ada dua kecamatan dengan tingkat kepadatan yang rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya (dibawah 200 jiwa/ km2), yakni Lebakbarang dan Petungkriyono. Sebaliknya, ada empat kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduknya sudah mencapai diatas 4.000 jiwa/ km2 yaitu Kedungwuni, Buaran, Wiradesa, dan Tirto. Kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.28.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (km²)	Kepadatan penduduk
1.	Kandangserang	37.169	60,55	613,86
2.	Paninggaran	44.946	92,99	483,34
3.	Lebakbarang	11.562	58,20	198,66
4.	Petungkriono	13.635	73,58	185,31
5.	Talun	32.781	58,57	559,69
6.	Doro	48.519	68,45	708,82
7.	Karanganyar	49.053	63,48	772,73
8.	Kajen	79.387	75,15	1.056,38
9.	Kesesi	75.766	68,52	1.105,75
10.	Sragi	66.993	32,40	2.067,69
11.	Siwalan	42.789	25,91	1.651,45
12.	Bojong	79.542	40,06	1.985,57
13.	Wonopringgo	50.118	18,80	2.665,85
14.	Kedungwuni	104.327	22,94	4.547,82
15.	Karangdadap	44.490	20,99	2.119,58
16.	Buaran	48.603	9,54	5.094,65



No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (km ²)	Kepadatan penduduk
17.	Tirto	78.332	17,39	4.504,43
18.	Wiradesa	64.269	12,71	5.056,57
19.	Wonokerto	46.725	15,91	2.936,83
JUMLAH 2024		1.019.006	836.13	1.218,72
2023		1.007.384	836.13	1.204,82
2022		986.455	836.13	1.179,79
2021		976.504	836.13	1.167,89
2020		968.821	836.13	1.158,70

Sumber : BPS Kab. Pekalongan Tahun 2025

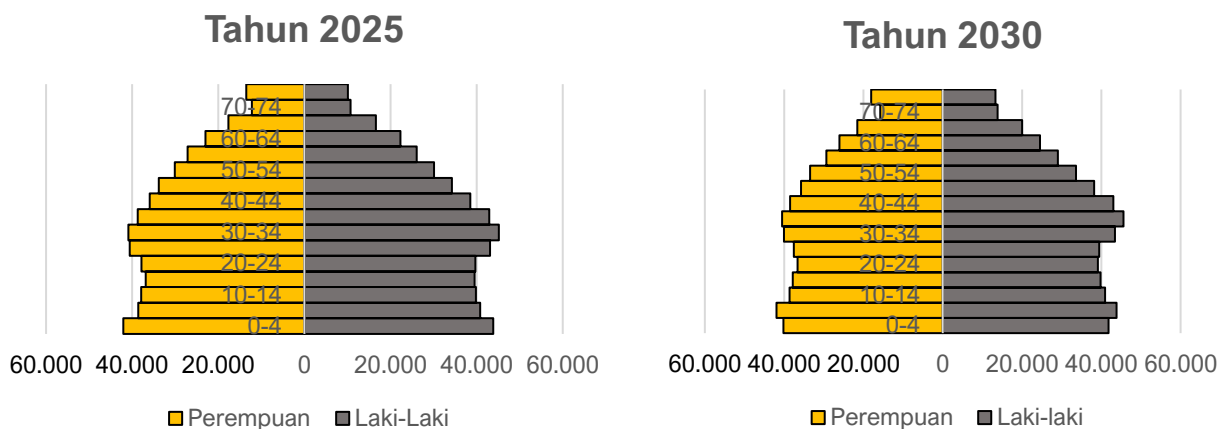
3). Proyeksi dan Analisis Penduduk 2025-2030

Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2020 sebesar 968,82 ribu orang dan meingkat sebesar 1.02 juta orang di Tahun 2024. Jumlah penduduk diproyeksikan mencapai **1,03 juta orang** pada tahun 2025 dan **1,08 juta orang** pada tahun 2030. Perkembangan proyeksi penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.29.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030

No	Uraian	2020	2025	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Laki-Laki (000)	492,76	523,53	549,77
2.	Perempuan (000)	478,23	506,82	531,82
3.	Total (000)	970,99	1.030,34	1.081,59
4.	Sex Ratio (%)	103,04	103,30	103,38
5.	Komposisi Umur (%)			
	0–14	24,06	23,58	22,87
	15–64	69,48	68,57	67,65
	65+	6,46	7,84	9,48
6.	Dependency Ratio (%)	43,92	45,83	47,82
7.	FERTILITAS			
	Total Fertility Rate (TFR)	2,25	2,17	2,10
8.	MORTALITAS			
	Infant Mortality Rate (IMR)	15,54	12,26	10,25

Sumber : data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk



Sumber : BPS, Bapperida Kabupaten Pekalongan;2025

Gambar 2.30. Piramida Penduduk Kabupaten Pekalongan, 2025 dan 2030

Proyeksi penduduk Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan jumlah penduduk umur 60 tahun ke atas (lanjut usia) di Kabupaten Pekalongan dalam periode 2020–2030. Proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas pada 2020 sebesar 6,46 persen. Proyeksi proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas menjadi 9,48 persen pada tahun 2030. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Kabupaten Pekalongan yang sudah mendekati 10 persen dari total penduduk.

Selanjutnya dari hasil proyeksi memperlihatkan adanya tren penurunan komposisi pada penduduk umur 0–14 tahun dari 24,06 persen pada tahun 2020 menjadi 22,87 persen pada tahun 2030. Sedangkan komposisi Penduduk umur 15-64 tahun yang merupakan penduduk usia produktif diproyeksikan akan menurun dari 69,48 persen di tahun 2020 akan menurun menjadi 67,65 persen dari jumlah total penduduk di tahun 2030.

Rasio ketergantungan pada tahun 2020 adalah sebesar 43,92. Rasio ketergantungan ini meningkat menjadi 45,83 di tahun 2025. Kemudian, rasio ketergantungan ini terus meningkat sebesar 47,82 pada tahun 2030. Hal tersebut menunjukkan terdapat 48 penduduk usia nonproduktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

1). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.30.
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.878.724,67	4.050.243,50	4.205.638,06	4.495.994,42	4.830.921,87
B	Pertambangan & Penggalian	990.308,79	1.021.324,51	1.018.506,90	1.070.449,19	1.145.449,80
C	Industri pengolahan	7.010.931,99	7.439.647,01	7.988.775,85	8.475.219,23	8.963.752,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	33.645,34	34.719,65	35.994,83	38.509,74	41.752,02
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	8.522,81	8.996,35	9.430,59	9.809,56	10.446,62
F	Konstruksi	1.546.617,98	1.716.109,14	1.906.567,75	2.186.812,60	2.375.450,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.059.501,22	3.276.465,86	3.575.981,52	3.878.095,40	4.053.675,53
H	Transportasi dan Pergudangan	450.822,99	471.413,03	774.727,93	893.600,19	946.903,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.197.711,76	1.283.038,48	1.474.338,51	1.668.740,07	1.902.280,98
J	Informasi dan Komunikasi	588.205,40	613.984,04	629.984,98	693.292,24	764.027,98
K	Jasa keuangan dan Asuransi	568.637,08	606.044,51	640.890,15	683.804,40	709.094,19
L	Real Estate	307.621,10	314.175,88	327.427,99	354.913,12	383.653,97
M,N	Jasa Perusahaan	76.339,30	78.984,32	85.034,01	93.571,83	104.219,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	722.214,45	699.040,41	729.493,67	779.678,07	878.223,87
P	Jasa Pendidikan	1.509.296,68	1.545.123,28	1.614.878,26	1.754.136,80	1.975.686,66
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	363.879,98	370.017,38	387.013,70	423.246,29	463.947,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	490.208,96	500.972,91	557.904,23	611.815,28	674.074,81
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		22.803.190,50	24.030.300,26	25.962.588,93	28.111.688,43	30.223.561,01

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2025 *) angka sementara **)Angka sangat sementara

Dari tabel diatas, struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 dengan sektor industri pengolahan memiliki peranan paling dominan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pekalongan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 sebesar 30,22 trilyun **lebih tinggi** dari Tahun 2023 sebesar Rp 28,11 trilyun dengan sumbangan sektor terbesar dari industri pengolahan sebesar Rp 8,96 trilyun (29,66 persen), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 4,83 trilyun (15,98 persen), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 4,05 trilyun (13,41 persen) dan sektor konstruksi sebesar Rp 2,38 trilyun (7,86 persen).

Selanjutnya nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31.
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Sektor	2020	2021	2022*	2023**	2024
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.415.676,92	2.475.649,88	2.494.737,03	2.559.193,41	2.614.619,90
B	Pertambangan & Penggalian	607.289,51	619.617,49	605.614,13	618.158,18	655.090,28
C	Industri pengolahan	4.948.693,19	5.134.118,70	5.344.704,61	5.489.185,15	5.651.870,29
D	Pengadaan Listrik & Gas	29.770,85	30.882,92	31.844,10	33.510,29	35.900,40
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	7.610,70	7.951,66	8.143,30	8.357,72	8.503,80
F	Konstruksi	1.072.809,20	1.151.633,62	1.200.117,40	1.336.398,81	1.444.816,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.391.408,72	2.525.055,66	2.671.363,30	2.813.373,72	2.889.386,18
H	Transportasi dan Pergudangan	365.315,70	374.165,52	582.663,81	621.814,74	649.399,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	889.405,96	934.326,56	1.054.817,94	1.180.112,78	1.319.310,29
J	Informasi dan Komunikasi	608.707,47	635.003,63	649.862,71	716.743,13	789.389,24
K	Jasa keuangan dan Asuransi	389.211,30	396.304,81	398.465,76	411.861,90	421.525,50
L	Real Estate	252.244,64	255.448,15	262.702,88	281.794,68	303.266,93
M,N	Jasa Perusahaan	51.598,10	52.841,61	55.066,24	58.333,89	63.989,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	493.818,97	482.411,75	492.735,36	517.287,52	573.902,57



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No	Sektor	2020	2021	2022*	2023**	2024
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
P	Jasa Pendidikan	885.186,15	894.392,09	931.509,36	992.234,95	1.086.208,50
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	260.337,18	262.003,34	270.361,25	288.101,44	310.522,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	378.427,21	383.258,27	408.706,62	434.351,45	465.361,41
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		16.047.511,77	16.615.065,66	17.463.415,80	18.360.813,76	19.283.063,76

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2025 *) angka sementara **)Angka sangat sementara

Dari tabel diatas, Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan tahun 2024 sebesar Rp 19,28 trilyun lebih tinggi dari Tahun 2023 sebesar Rp 18,361 trilyun dengan sumbangan sektor terbesar dari sektor industri pengolahan sebesar Rp 5,65 trilyun (29,31 persen), kemudian sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 2,89 trilyun (14,98 persen), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 2,61 trilyun (13,56 persen), dan sektor konstruksi sebesar Rp 1,44 trilyun (7,49 persen).

Adapun Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.32.
Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Sektor	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17,01	15,05	16,85	14,90	16,20	14,29	15,99	13,94	15,98	13,56
B	Pertambangan & Penggalian	4,34	3,78	4,25	3,73	3,92	3,47	3,81	3,37	3,79	3,40
C	Industri pengolahan	30,75	30,84	30,96	30,90	30,77	30,61	30,15	29,90	29,66	29,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,19	0,14	0,19	0,14	0,18	0,14	0,18	0,14	0,19
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,03	0,05	0,03	0,04
F	Konstruksi	6,78	6,69	7,14	6,93	7,34	6,87	7,78	7,28	7,86	7,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,42	14,90	13,63	15,20	13,77	15,30	13,80	15,32	13,41	14,98
H	Transportasi dan Pergudangan	1,98	2,28	1,96	2,25	2,98	3,34	3,18	3,39	3,13	3,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,25	5,54	5,34	5,62	5,68	6,04	5,94	6,43	6,29	6,84
J	Informasi dan Komunikasi	2,58	3,79	2,56	3,82	2,43	3,72	2,47	3,90	2,53	4,09
K	Jasa keuangan dan Asuransi	2,49	2,43	2,52	2,39	2,47	2,28	2,43	2,24	2,35	2,19
L	Real Estate	1,35	1,57	1,31	1,54	1,26	1,50	1,26	1,53	1,27	1,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,32	0,33	0,32	0,34	0,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,17	3,08	2,91	2,90	2,81	2,82	2,77	2,82	2,91	2,98
P	Jasa Pendidikan	6,62	5,52	6,43	5,38	6,22	5,33	6,24	5,40	6,54	5,63
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,60	1,62	1,54	1,58	1,49	1,55	1,51	1,57	1,54	1,61
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,15	2,36	2,08	2,31	2,15	2,34	2,18	2,37	2,23	2,41
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2025 *) Angka sementara **)Angka sangat sementara

Dari tabel diatas, perkembangan kontribusi sektor PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 yang terbesar dihasilkan oleh sektor industri pengolahan sebesar 29,66 persen, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,98 persen, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,41 persen dan sektor konstruksi sebesar 7,86 persen.

Sedangkan perkembangan kontribusi sektor PDRB atas Dasar Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 yang terbesar dihasilkan oleh sektor industri pengolahan sebesar 29,31 persen, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,98 persen, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,56 persen, dan sektor konstruksi sebesar 7,49 persen.



2). Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global mulai dari potensi pelambatan ekonomi, peningkatan tensi geopolitik, risiko inflasi, hingga perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tetap tumbuh sebesar **5,02 persen**. Selengkapnya pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

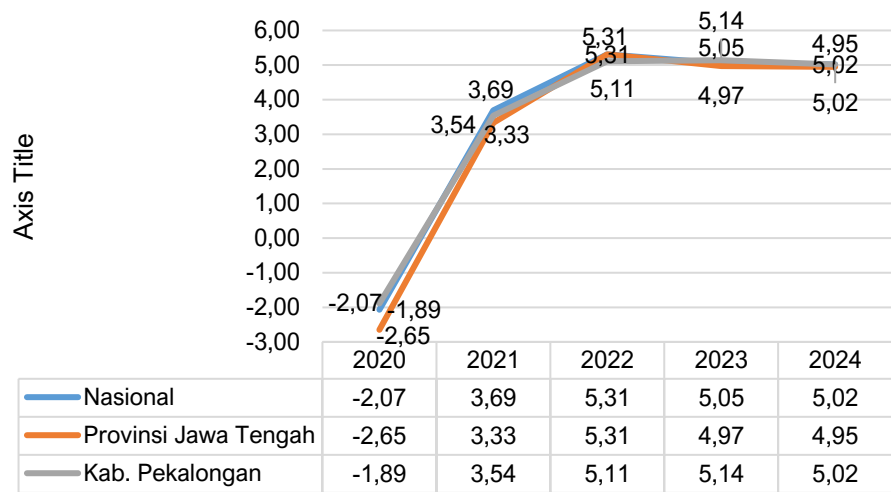
Tabel 2.33.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 - 2024

No	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian. Kehutanan dan Perikanan	1,04	2,48	0,77	2,58	2,17
B	Pertambangan & Penggalian	-2,62	2,03	-2,26	2,07	5,97
C	Industri pengolahan	-3,91	3,75	4,10	2,70	2,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,17	3,74	3,11	5,23	7,13
E	Pengadaan Air. Pengolahan Sampah. Limbah dan Daur ulang	2,76	4,48	2,41	2,63	1,75
F	Konstruksi	-3,13	7,35	4,21	11,36	8,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,05	5,59	5,79	5,33	2,70
H	Transportasi dan Pergudangan	-21,32	2,42	55,72	6,72	4,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,26	5,05	12,90	11,88	11,80
J	Informasi dan Komunikasi	16,02	4,32	2,34	10,29	10,14
K	Jasa keuangan dan Asuransi	1,35	1,82	0,55	3,36	2,35
L	Real Estate	0,52	1,27	2,84	7,27	7,62
M.N	Jasa Perusahaan	-2,03	2,41	4,21	5,93	9,70
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,12	-2,31	2,14	4,98	10,94
P	Jasa Pendidikan	-2,19	1,04	4,15	6,52	9,47
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,35	0,64	3,19	6,56	7,78
R.S.T.U	Jasa lainnya	-1,49	1,28	6,64	6,27	7,14
Pertumbuhan Ekonomi		-1,89	3,54	5,11	5,14	5,02

Sumber : BPS Kab. Pekalongan. 2025

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan terus mengalami peningkatan. Selama tahun 2024 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar **5,02 persen**, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar **5,14 persen**. Capaian positif pertumbuhan ekonomi nasional selama 2024 ditopang dengan penguatan kinerja sejumlah komponen pada sektor lapangan usaha. Tercatat, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib masing-masing mampu tumbuh sebesar 11,80 persen dan 10,94 persen dan menjadi kontributor pertumbuhan tertinggi yang disusul sektor Informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 10,14 persen yang menjadi kontributor terbesar ketiga.

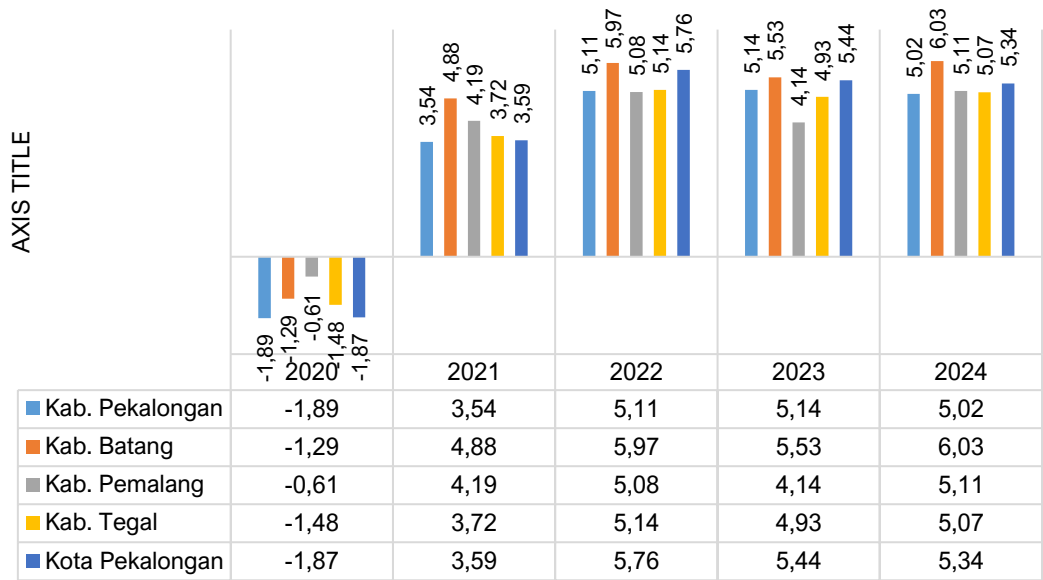
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar 5,02 persen lebih besar dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,95 persen dan sama dengan nasional sebesar 5,02 persen. Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2020-2024

Gambar 2.31. Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Kemudian capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



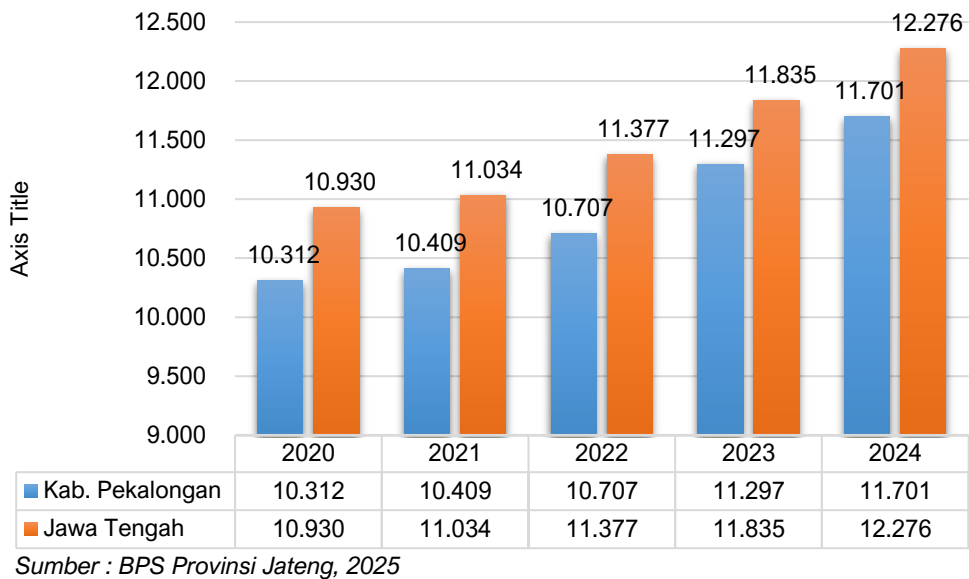
Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2025

Gambar 2.32. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar 5,02 persen, lebih rendah dibandingkan 4 (empat) kabupaten/kota sekitar antara lain Kabupaten Batang (6,03%), Kabupaten Pemalang (5,11%), Kabupaten Tegal (5,07%) dan Kota Pekalongan (5,34%)

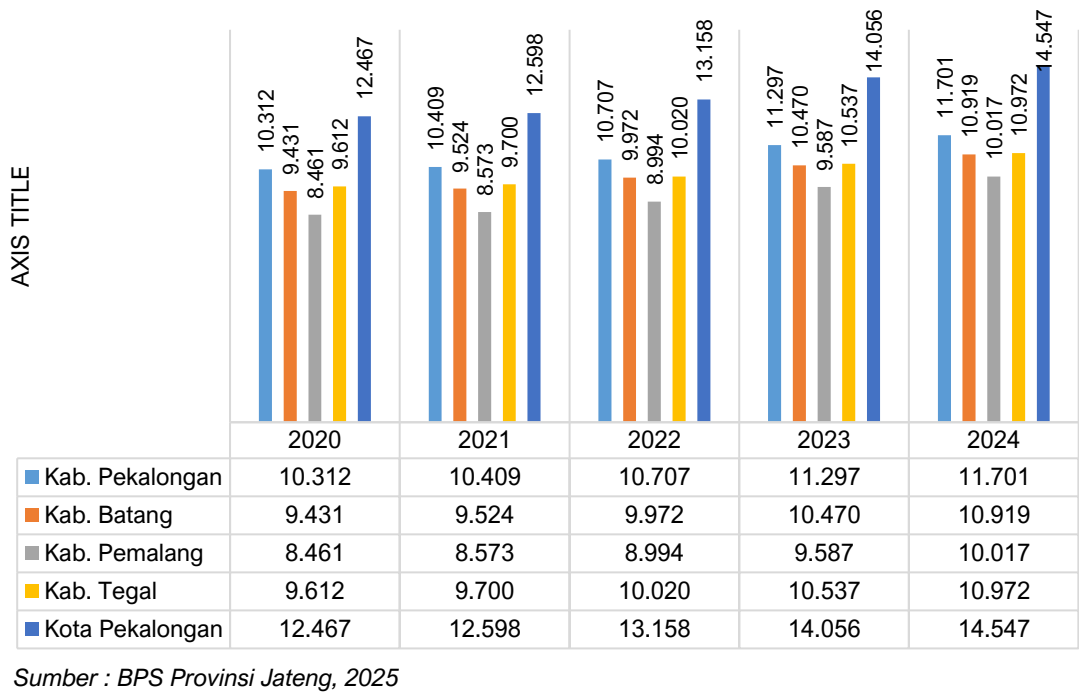
3). Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Pekalongan naik dari Rp. 11.297.000,00,- di tahun 2023 menjadi Rp. 11.701.000,00 di tahun 2024. Capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Pekalongan dari 2020-2024 secara umum di bawah pencapaian Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran perkapita di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat, namun peningkatan daya beli rumah tangga masih di bawah Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan pengeluaran perkapita (disesuaikan) Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 dapat dilihat gambar berikut.



**Gambar 2.33. Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten
Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

Pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.34. Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan
Dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020- 2024**

Dari tabel dan gambar diatas, pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Pekalongan tahun 2024 sebesar Rp. 11.701.000,- lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar Rp. 10.919.000,-, Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 10.017.000,-, Kabupaten Tegal sebesar Rp. 10.972.000,- dan dan lebih rendah dibandingkan Kota Pekalongan sebesar Rp. 14.547.000,-.

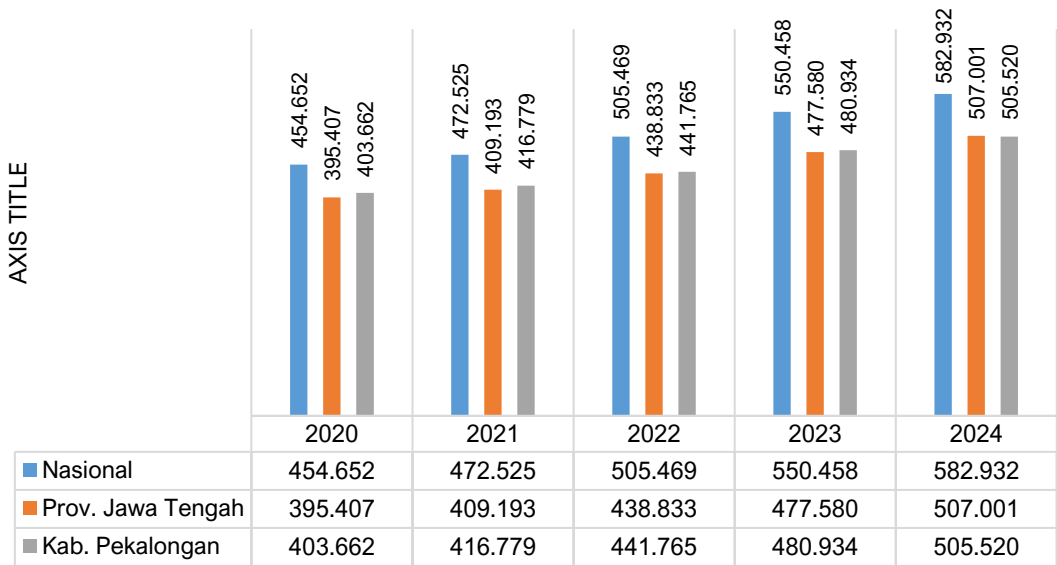
4). **Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya.



1) Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 480.934 per kapita per bulan berada di atas GK Provinsi sebesar Rp. 477.580 per kapita per bulan dan di bawah GK Nasional sebesar Rp. 550.458 per kapita per bulan. Tahun 2024 Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Pekalongan meningkat menjadi Rp. 505.520 per kapita per bulan berada di bawah GK Provinsi sebesar Rp. 507.001 per kapita per bulan dan Nasional sebesar Rp. 582.932 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat gambar berikut.

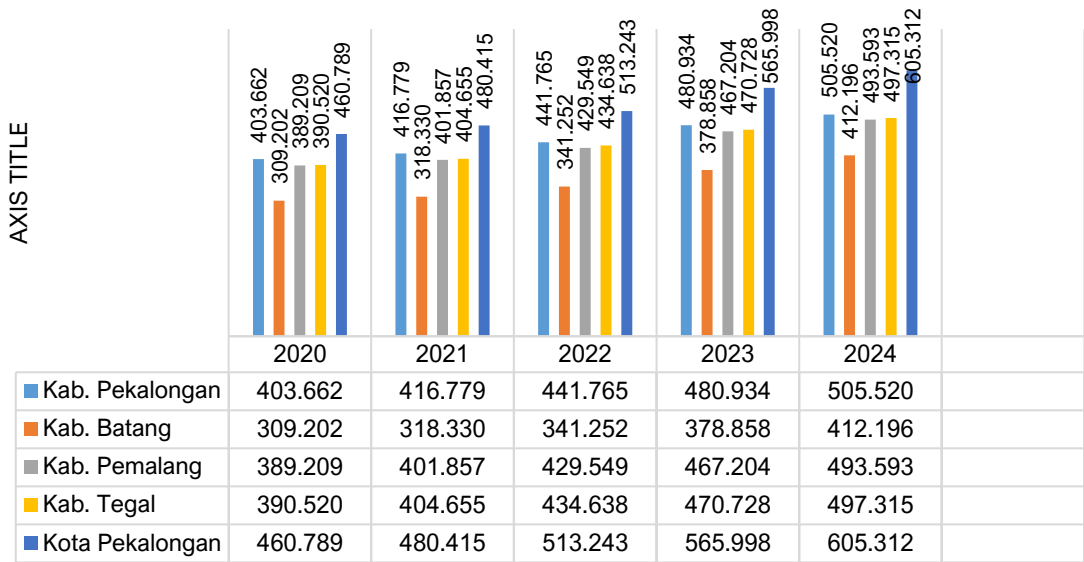


Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2020-2024

Gambar 2.35. Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Dari gambar diatas, garis kemiskinan di Kabupaten Pekalongan 2020-2024 selalu naik setiap tahun. Hal ini terjadi karena trend akan kebutuhan setiap saat berubah. Tabel di atas juga bisa diartikan bahwa besarnya konsumsi perkapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2024 maksimal sebesar Rp. 507.520,00 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan Kabupaten Pekalongan tahun 2024 sebesar Rp. 505.520,- per kapita per bulan lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp. 507.001 per kapita per bulan. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan dalam mencukupi kebutuhannya lebih rendah dibandingkan di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kelompok Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang tergolong memiliki Garis Kemiskinan Sedang. Garis kemiskinan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

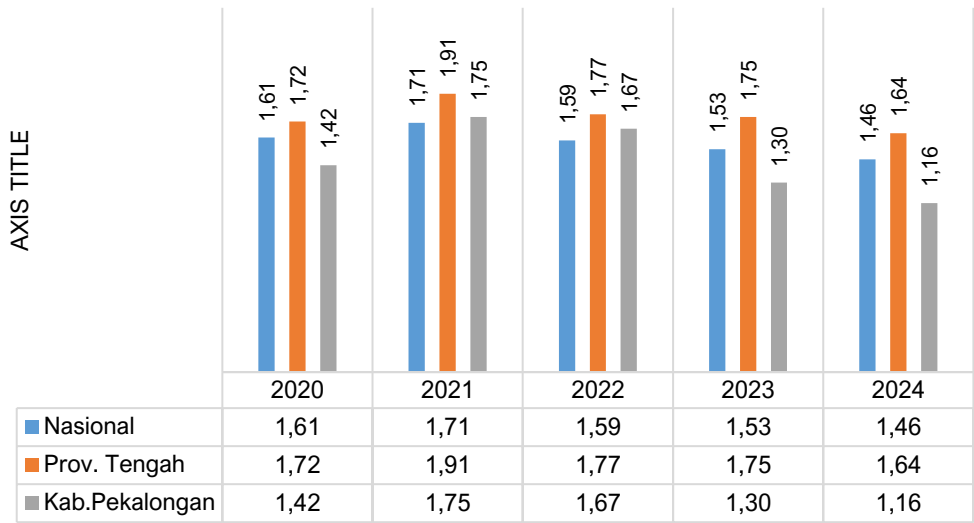


Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2024

Gambar 2.36. Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020- 2024

2) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 adalah 1,16 lebih rendah dibandingkan angka provinsi Jawa Tengah sebesar 1,64 dan Nasional sebesar 1,46. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



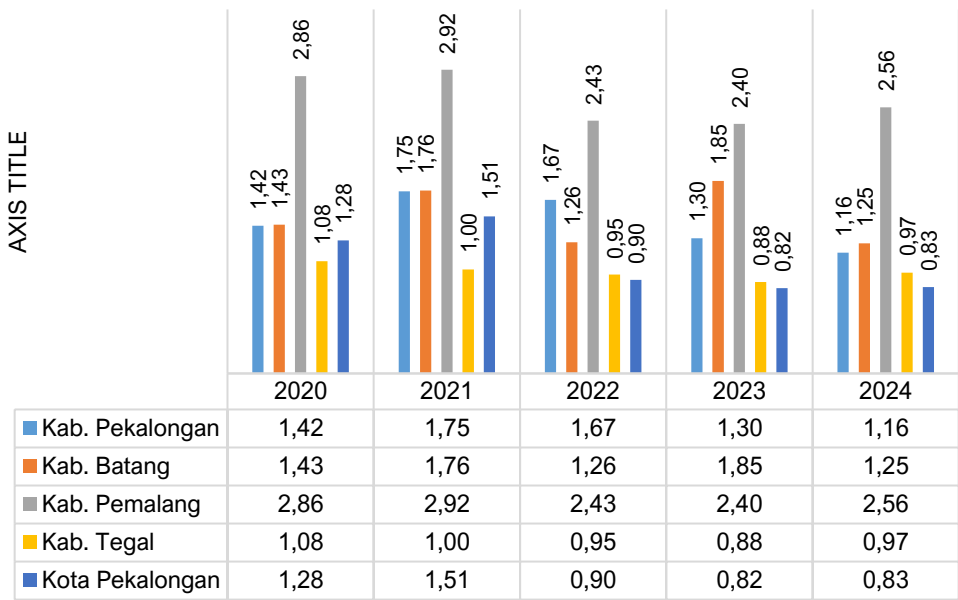
Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2020-2024

Gambar 2.37. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Pada periode Maret 2020 - Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan mengalami fluktuasi. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) walaupun naik dari 1,17 persen pada tahun 2019 menjadi 1,16 persen pada tahun 2024 tetapi secara kurva mengalami penurunan. Rata-rata capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2019-2024 Kabupaten Pekalongan masih di bawah (lebih baik) dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kabupaten/kota dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) **Rendah**. Indeks



Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2020-2024

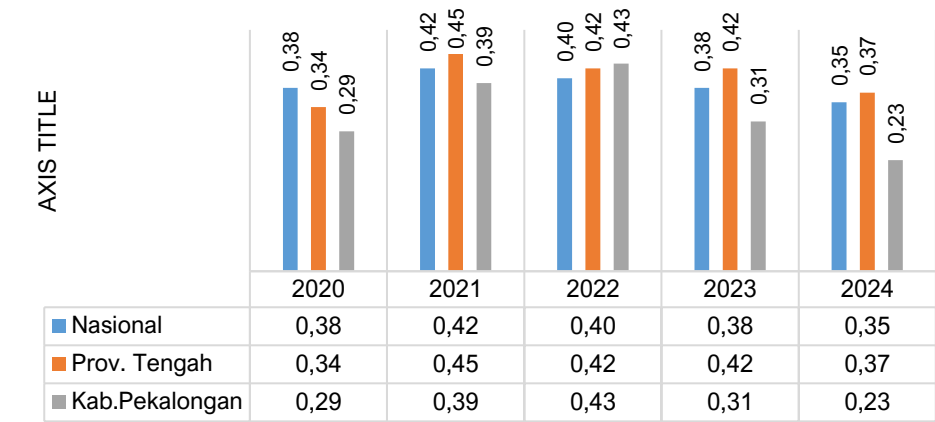
Gambar 2.38. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024

Dari gambar diatas, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar 1,16 lebih tinggi dari Kabupaten Tegal sebesar 0,97 dan Kota Pekalongan sebesar 0,83. Sedangkan capaian P1 Kabupaten Pekalongan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 1,25 dan Kabupaten Pemalang sebesar 2,56. P1 Kabupaten Pekalongan lebih rendah atau lebih baik karena masyarakat di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan kesejahteraan dan pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan apabila dibandingkan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang.

3) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) akan menilai sejauh mana gap atau perbedaan konsumsi antar penduduk miskin. Semaikin besar Angka P1 dan P2 maka semakin butuh upaya keras dalam pengentasan kemiskinan.

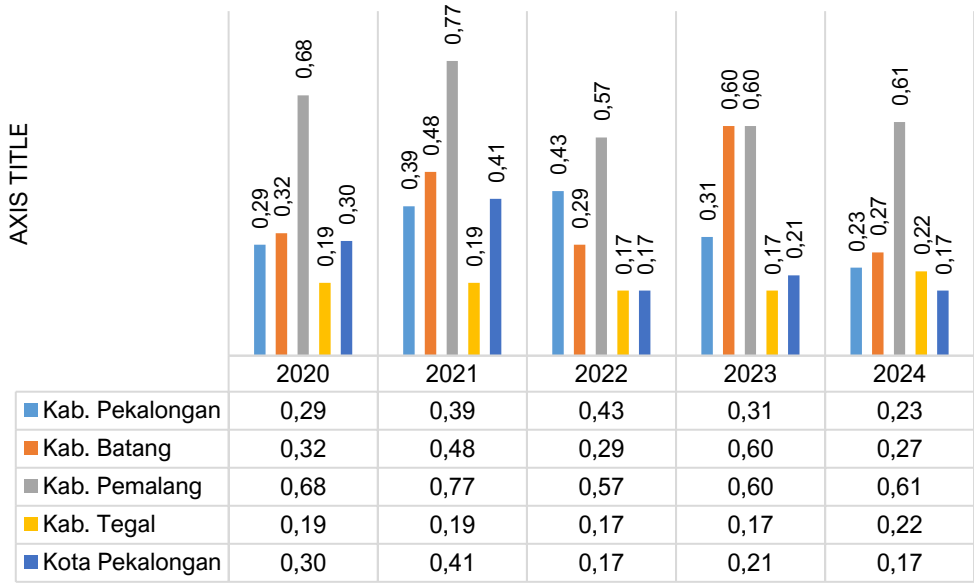
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan tahun 2024 adalah 0,23, lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,37 dan Nasional sebesar 0,35. Selengkapnya dapat dijelaskan pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2020-2024

Gambar 2.39. Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Dari tabel dan gambar diatas, Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan turun dari 0,29 pada tahun 2020 menjadi 0,23 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin semakin menurun. Capaian Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) Tahun 2019-2023 Kabupaten Pekalongan secara umum masih di bawah (lebih baik) dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kabupaten/kota yang memiliki Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) Rendah. Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2020-2024

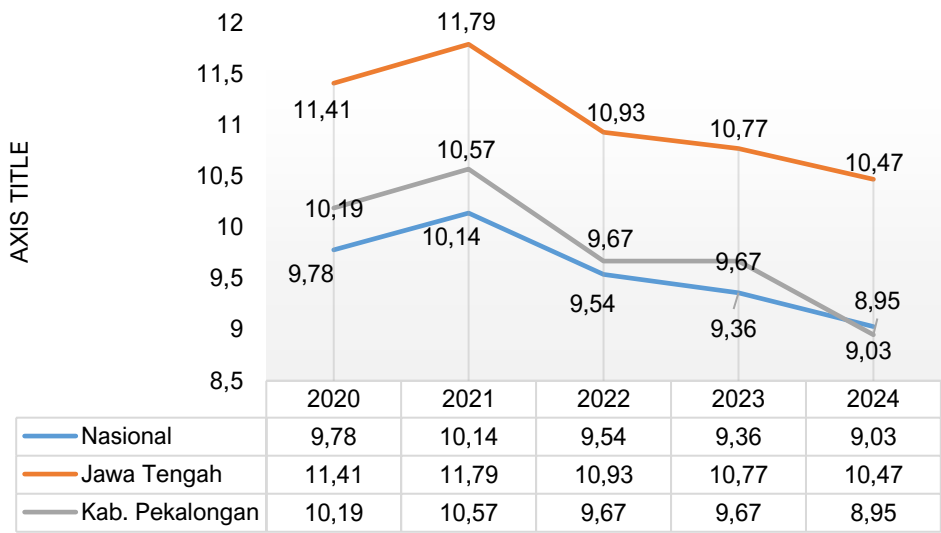
Gambar 2.40. Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024

Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar 0,23 lebih tinggi dari Kabupaten Tegal sebesar 0,22 dan Kota Pekalongan sebesar 0,17. Sedangkan capaian P2 Kabupaten Pekalongan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang 0,27 dan Kabupaten Pemalang sebesar 0,61 Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan lebih rendah atau lebih baik disebabkan masyarakat di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan kesejahteraan dan pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan apabila dibandingkan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang.



4) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada Tahun 2020 dan tahun 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi Ketika ada pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 tercatat sebesar **8,95 persen** menurun dibandingkan Tahun 2023. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan nasional (9,03 persen) dan di bawah Provinsi Jawa Tengah (10,47 persen). Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



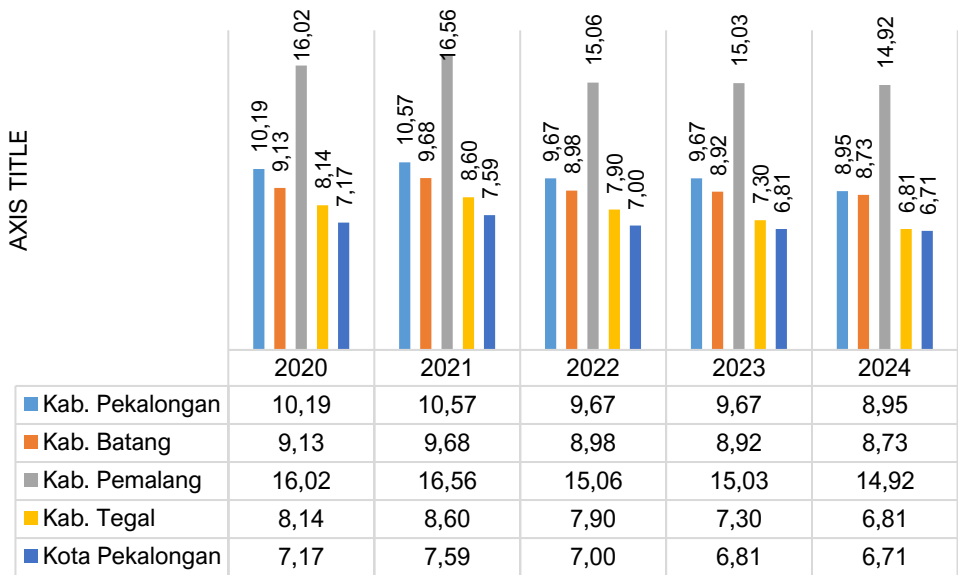
Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2020-2024

Gambar 2.41. Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada Tahun 2020 dan tahun 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi Ketika ada pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,95 persen menurun dibandingkan Tahun 2023. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan nasional (9,03 persen) dan di bawah Provinsi Jawa Tengah (10,47 persen).

Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Keberhasilan Kabupaten Pekalongan mempertahankan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional mencerminkan kapasitas tata kelola pembangunan daerah yang adaptif dan responsif terhadap tantangan. Meskipun sempat mengalami lonjakan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021, pemulihan ekonomi pasca pandemi berjalan cukup baik.

Selanjutnya Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



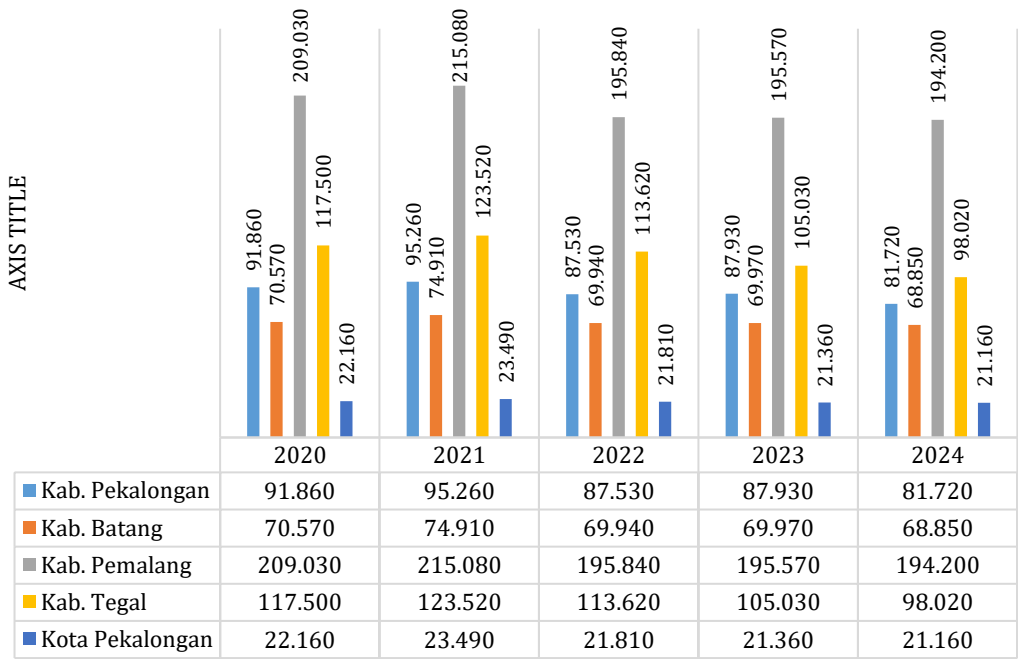
Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2020-2024

Gambar 2.42. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan tahun 2024 sebesar 8,95 persen lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pemalang sebesar 14,92 persen dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 8,73 persen, Kabupaten Tegal sebesar 6,81 persen dan Kota Pekalongan sebesar 6,71 persen.

5) Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pekalongan tahun 2024 sebesar 881.720 orang lebih rendah dari Kabupaten Pemalang sebesar 194.200 jiwa dan Kabupaten Tegal sebesar 98.200 jiwa dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 68.850 jiwa dan Kota Pekalongan sebesar 21.3160 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2020-2024

Gambar 2.43. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024



5). Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketika individu hidup dengan pendapatan di bawah ambang batas minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Menurut definisi Bank Dunia, kemiskinan ekstrem terjadi ketika seseorang hidup dengan kurang dari US\$2,15 per hari (berdasarkan nilai paritas daya beli tahun 2017).

Mendasarkan **Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**, penghapusan miskin ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 yaitu: Tanpa Kemiskinan di *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Selanjutnya untuk mendorong percepatan dan upaya berkelanjutan mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia, disampaikan hasil perhitungan estimasi angka kemiskinan ekstrem tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023. Perhitungan tersebut dihasilkan melalui analisis komprehensif yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pengelola Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Satgas Pengelola Data P3KE), di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kemiskinan ekstrem Kabupaten Pekalongan tahun 2024 berada di bawah nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan juga menurun dibandingkan dengan dari tahun 2023 sebesar 1,19 persen menjadi 0,51 persen di Tahun 2024 atau turun 0,68 persen poin.. Kemiskiman Ekstrem Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34.
Kemiskinan Ekstrem Nasional,
Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2024

No	Wilayah	Kemiskinan Ekstrem			
		2021	2022	2023	2024
1	Kab. Pekalongan	2,27	2,07	1,19	0,51
2	Jawa Tengah	2,28	1,97	1,11	0,89
3	Nasional	2,14	2,04	1,12	0,83

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2021-2024

Kabupaten Pekalongan di tahun 2022 merupakan salah satu fokus di Jawa Tengah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan lokasi fokus prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang telah terbit dalam **Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 465/508** Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pekalongan. Lokasi fokus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan sejumlah 25 Desa terbagi di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kajen, Kandangserang, Kesesi, Paninggaran, dan Kecamatan Wonokerto.

6). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar 3,30 persen menunjukkan sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya namun capaian ini **di bawah** capaian provinsi dan nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

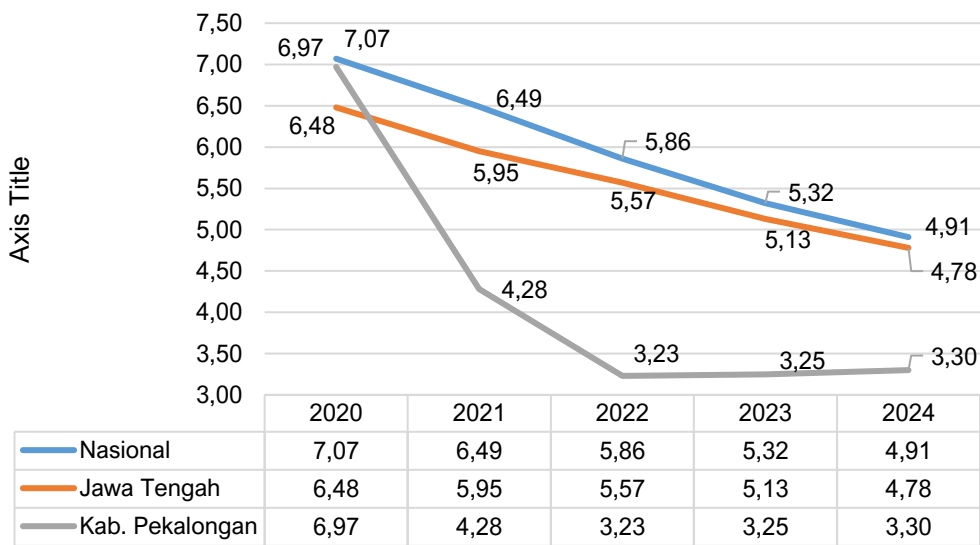


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.44. TPT Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Kenaikan TPT Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar 3,30 persen atau **naik sebesar 0,05 persen** dibandingkan Tahun 2023 sebesar 3,25 persen disebabkan antara lain tutupnya 2 (dua) pabrik tekstil besar di Kabupaten Pekalongan Hal ini seiring lesunya industri tekstil, tergerus kinerja ekspor yang menurun, sementara impor ke pasar domestik membeludak. Penurunan kinerja ekspor disebabkan sejumlah faktor, mulai dari kondisi permintaan pasar global yang kurang baik, persaingan yang semakin ketat dengan China, hingga konflik geopolitik di Timur Tengah.

Masalah pengangguran dapat terjadi karena banyaknya lowongan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja. Selain itu, ketidaksesuaian antara kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh para tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan atau industri juga menjadi salah satu pemicu terjadinya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Agustus; 2020-2024

Gambar 2.45. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

TPT di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar 3,30 persen berarti bahwa dari 100 orang Angkatan Kerja, terdapat sekitar 3 sampai dengan 4 orang yang menganggur. Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih banyak dari pada TPT perempuan, yaitu TPT laki-laki



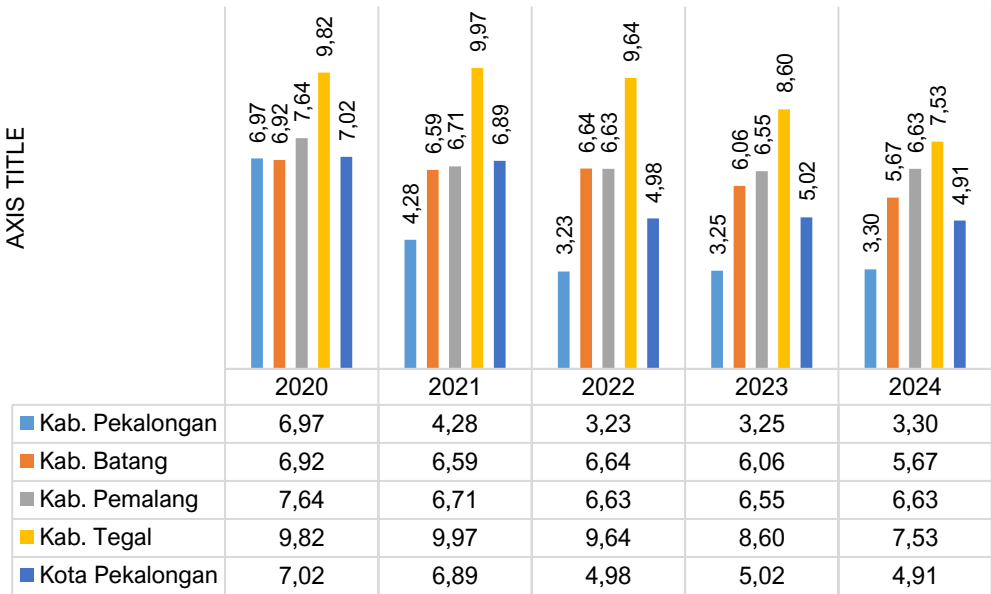
sebesar 3,55 persen sedangkan TPT perempuan hanya sebesar 2,78 persen. Angka tersebut berarti bahwa dari 100 orang Angkatan Kerja laki-laki terdapat sekitar 3-4 orang yang menganggur, sedangkan dari 100 orang Angkatan Kerja perempuan ada kira kira 2 sampai dengan 3 orang yang menganggur. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	TPT	6,97	4,28	3,23	3,25	3,30
2.	TPT Laki-Laki	8,10	4,03	3,95	3,55	3,95
3.	TPT Perempuan	5,35	4,63	2,21	2,78	2,49

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Agustus; 2020-2024

Selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Data Agustus; 2020-2024

Gambar 2.46. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota
Sekitar Tahun 2020-2024

Dari tabel dan gambar diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 sebesar 3,30 persen lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 5,67 persen, Kabupaten Pemalang sebesar 6,63 persen, Kabupaten Tegal sebesar 7,53 persen dan Kota Pekalongan sebesar 4,91 persen.

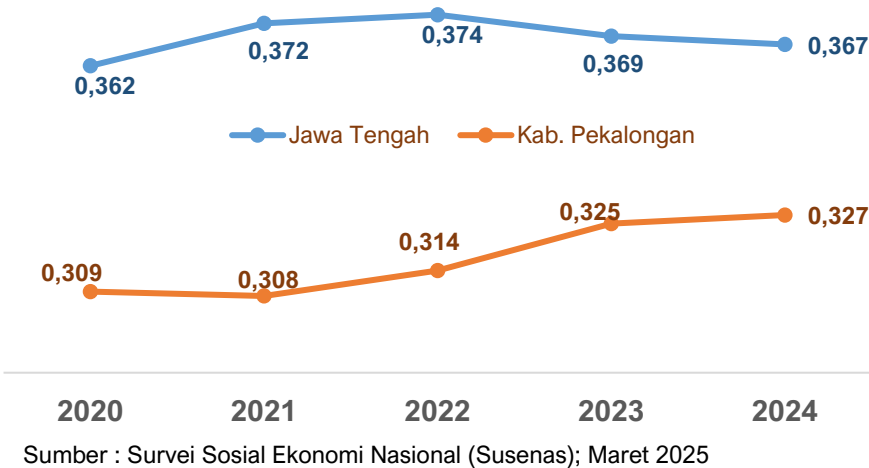
7). Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Kegunaan Rasio Gini ini untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Bila Rasio Gini = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila Rasio Gini = 1, ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh salah satu atau satu kelompok saja dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan kata lain, Rasio Gini



diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Provinsi Jawa Tengah, Rasio Gini Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.



Gambar 2.47. Rasio Gini Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Rasio Gini Kabupaten Pekalongan rata-rata di bawah provinsi Jawa Tengah. koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, jika B=0 koefisien gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Pekalongan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata capaian di Provinsi Jawa Tengah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian daerah memberikan dampak positif pada perbaikan perekonomian dan mengurangi ketimpangan antar wilayah di tahun 2023 menjadi 0,325

8). Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40 persen penduduk berpendapatan rendah; 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20 persen berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut.

- 1) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan **ketimpangan pendapatan tinggi**.
- 2) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan **ketimpangan pendapatan sedang/menengah**.
- 3) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan **ketimpangan pendapatan rendah**.



Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.36.
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

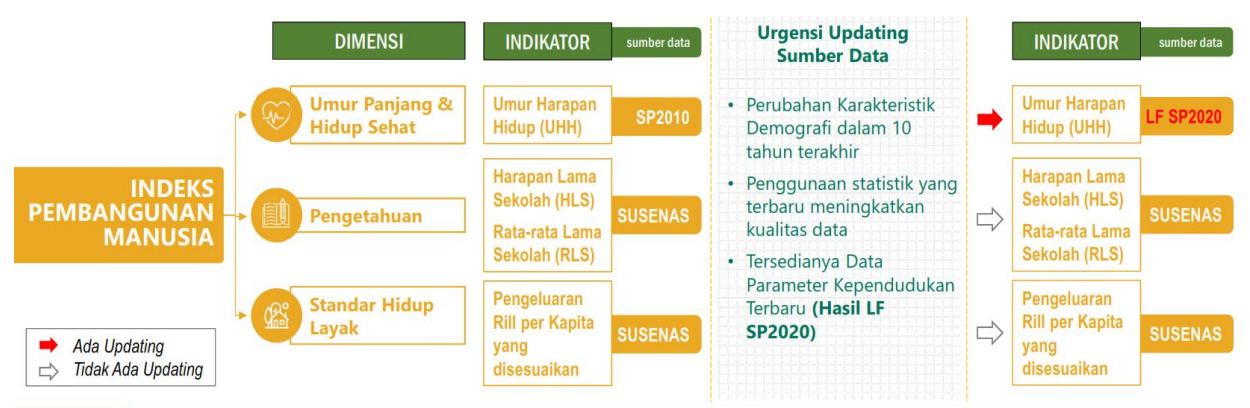
Tahun	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia		
	20% pendapatan tinggi	40% pendapatan menengah	40% pendapatan bawah
2020	39,98	38,36	21,66
2021	39,69	38,98	21,33
2022	40,42	38,54	21,04
2023	41,56	37,73	20,71
2024	41,36	38,22	20,43

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah; 2025; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan, bahwa 40 persen penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 ternyata sudah menerima 20,43 persen dari total pendapatan. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 20,71 persen. Walaupun terjadi penurunan, situasinya masih menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Pekalongan menggambarkan ketimpangan rendah atau tingkat pemerataan yang tinggi dan menunjukkan makin merata.

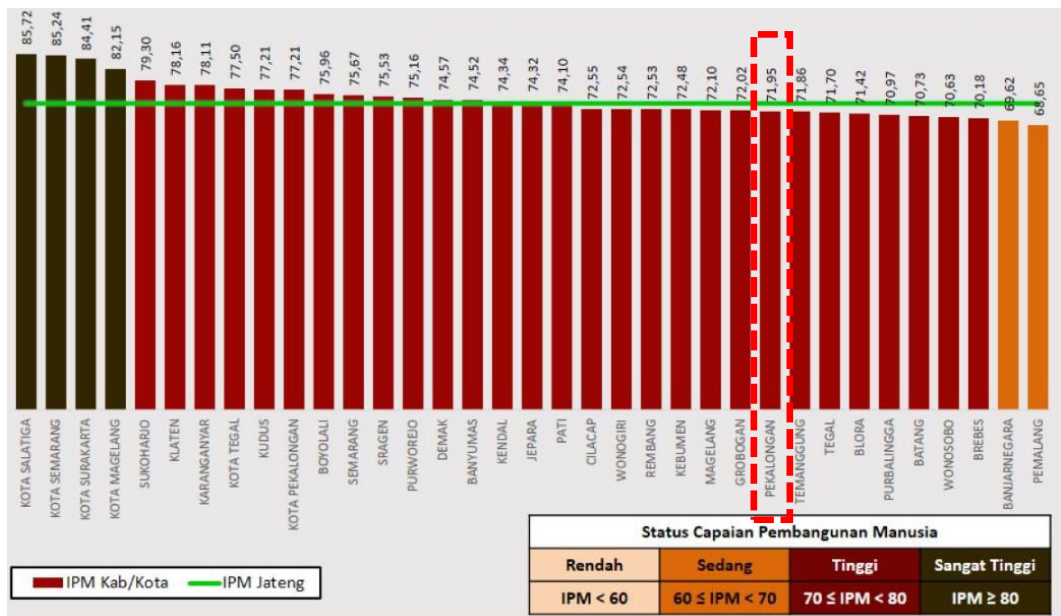
9). Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), direpresentasikan dalam 3 dimensi yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.48. Sumber Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

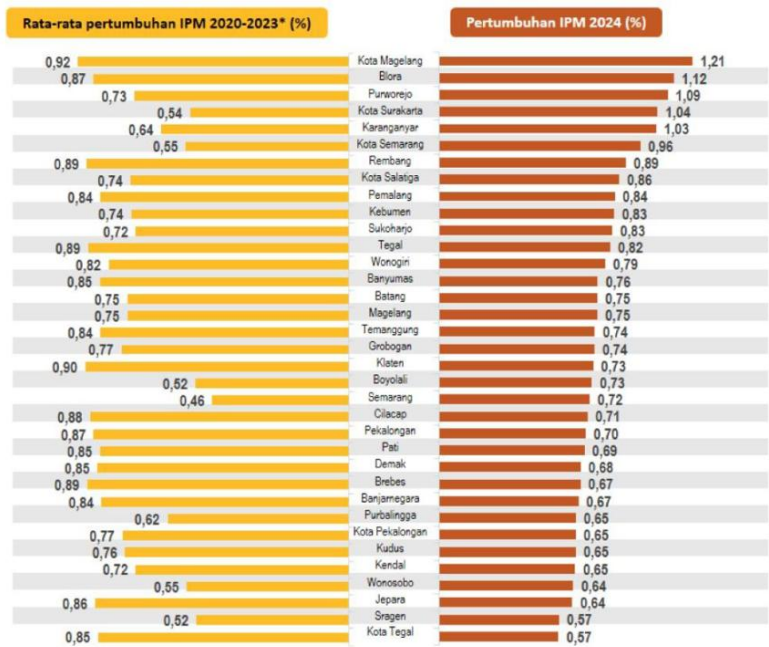
Capaian IPM di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Magelang mencapai status pembangunan manusia “**Sangat Tinggi**”. Sedangkan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pemalang mencapai status pembangunan manusia “**Sedang**”. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.49. IPM Kabupaten/Kota tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah

Dari gambar di atas, IPM Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 mencapai 71,95, meningkat 0,55 *point* dibandingkan tahun 2023. Selama periode 2021-2024 IPM Kabupaten Pekalongan menunjukkan kemajuan yang besar, telah berstatus “TINGGI” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) selama 4 (empat) tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2023 sebesar 0,87 persen dan rata-rata pertumbuhan IPM di Tahun 2024 sebesar 0,70 persen. Kondisi Pertumbuhan IPM menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan IPM tertinggi dicapai oleh Kota Magelang dengan angka 1,21 persen, sedangkan pertumbuhan terendah tercatat di Kota Tegal sebesar 0,57 persen. Sedangkan pada tahun 2024, 14 kabupaten/kota mengalami pertumbuhan IPM yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama periode 2020-2023 antara lain : Sragen, Wonosobo, Purbalingga, Kab. Semarang, Boyolali, Sukoharjo, Kebumen, Kota Salatiga, Kota Semarang, Karanganyar, Surakarta, Purworejo, Blora dan Kota Magelang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

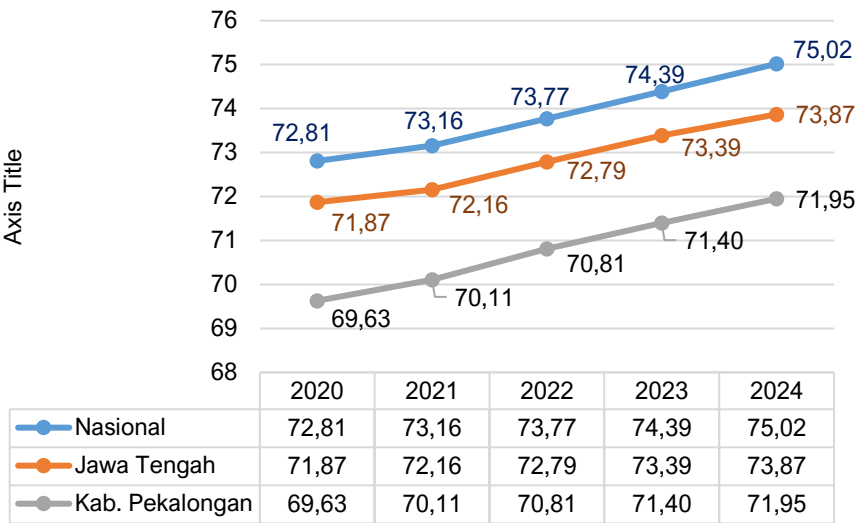


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.50. Rata-rata Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024



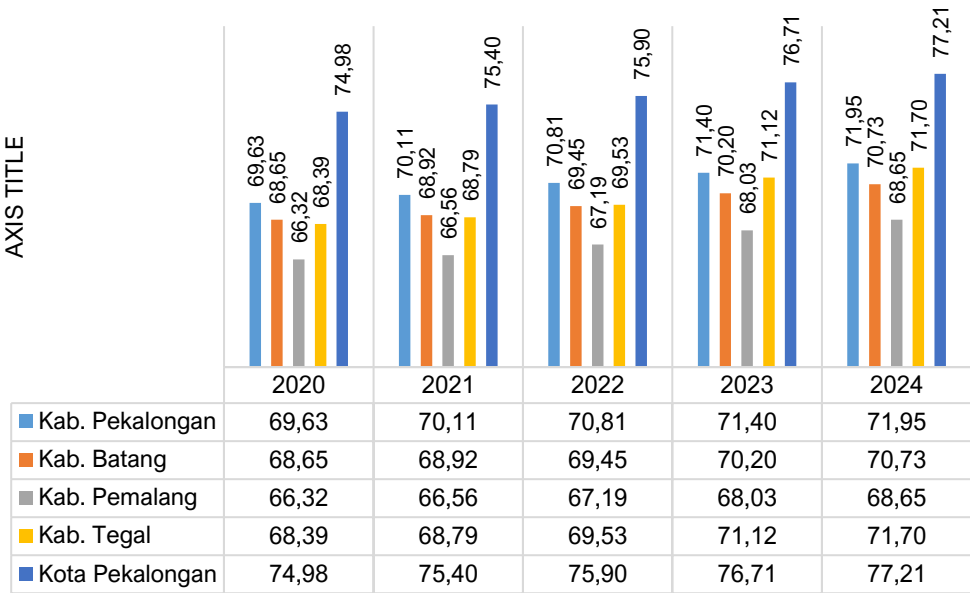
Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Perkembangan IPM Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2025

Gambar 2.51. IPM Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Secara umum capaian IPM Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 masih di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selanjutnya IPM Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2025

Gambar 2.52. IPM Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024

Dari gambar tabel dan gambar diatas, IPM Kabupaten Pekalongan pada 2024 sebesar 71,95 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 70,73 persen, Kabupaten Pemalang sebesar 68,65 persen dan Kabupaten Tegal sebesar 71,70 persen dan lebih rendah dibandingkan dengan Kota Pekalongan sebesar 77,21 persen. Adapun komponen pembentuk IPM secara lengkap yang meliputi meliputi Umur Harapan Hidup (UHH); pendidikan diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); serta dimensi pengeluaran diukur dengan pengeluaran per kapita dapat dijabarkan dalam tabel berikut.



Tabel 2.37.
Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Tahun	Umur Harapan Hidup/UHH (th)	Harapan Lama Sekolah/HLS (th)	Rata-rata Lama Sekolah/RLS (th)	Pengeluaran Perkapita disesuaikan (ribu Rp)	IPM
2020	73,69	12,41	6,91	10.312	69,63
2021	73,74	12,42	7,17	10.409	70,11
2022	73,80	12,43	7,46	10.707	70,81
2023	73,99	12,44	7,47	11.297	71,40
2024	74,25	12,46	7,48	11.701	71,95

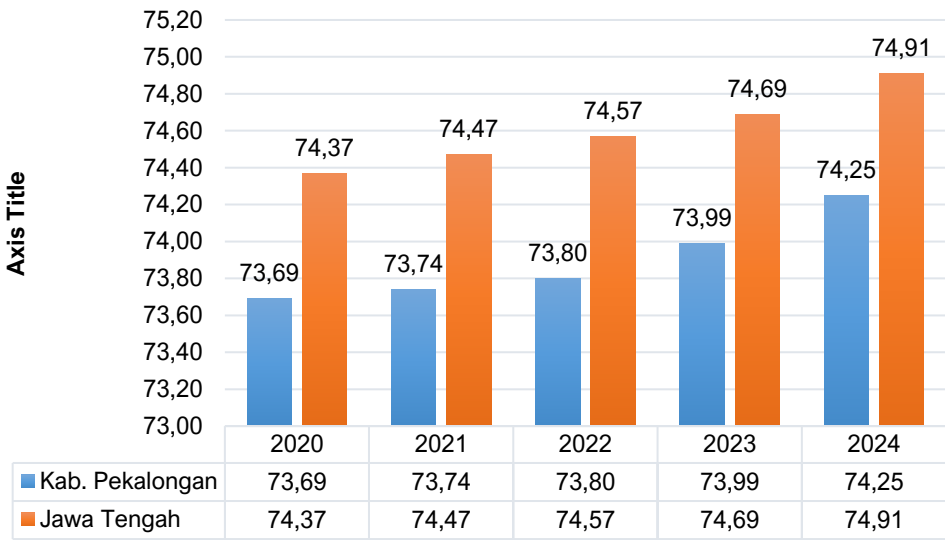
Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2025

b. Kesehatan untuk Semua

Kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan diantaranya

1). Umur Harapan Hidup (UHH)

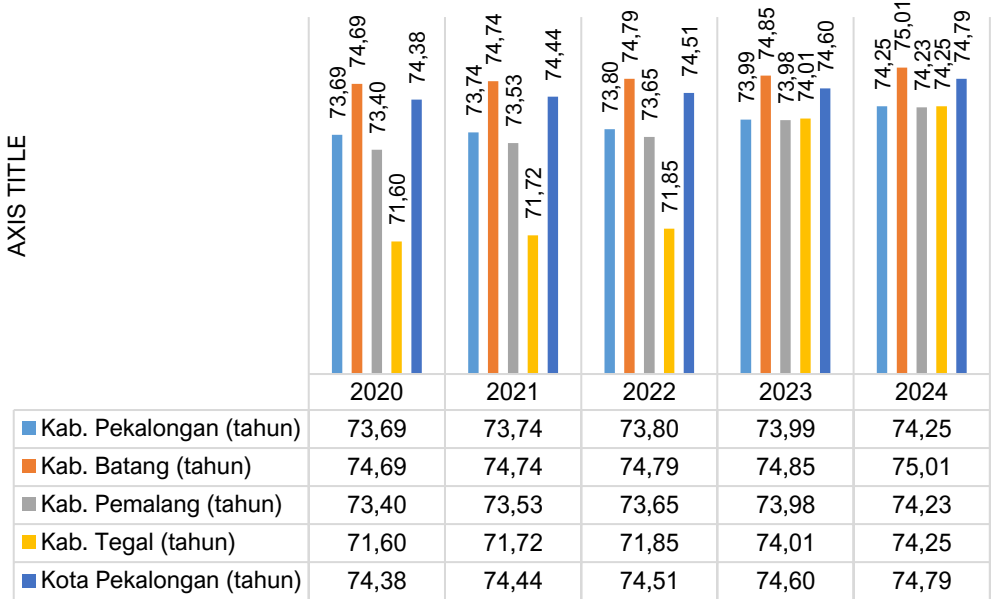
Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pekalongan secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata umur harapan hidup yang semakin panjang. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2025

Gambar 2.53. Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten
Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dari 73,99 tahun di tahun 2023 menjadi sebesar 74,25 tahun di Tahun 2024. Namun angka tersebut masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,91 tahun. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2025

**Gambar 2.54. Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten
Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar
Tahun 2020-2024**

Dari tabel dan gambar diatas, Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan pada 2024 sebesar 74,25 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Pemalang sebesar 74,23 tahun, sama dengan Kabupaten Tegal sebesar 74,25 tahun dan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 75,01 tahun dan Kota Pekalongan sebesar 74,79 tahun.

2). Indeks Keluarga Sehat

KS adalah Indeks Keluarga Sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila $IKS > 0,800$; 2) Keluarga Pra Sehat, bila $IKS = 0,500 - 0,800$; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila $IKS < 0,500$.

Pendataan keluarga dilakukan terhadap seluruh keluarga dalam wilayah kerja Puskesmas dengan menggunakan formulir pengumpulan data untuk Profil kesehatan keluarga (prokesga). Prokesga berisi data di tingkat keluarga dan data dari semua individu anggota keluarga tersebut (sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga). Data yang dicatat minimal data dari 12 indikator tersebut di atas. Sesuai kondisi daerah, Prokesga dapat dikembangkan sehingga mencakup indikator-indikator lain yang dianggap penting di daerah tersebut. Dengan demikian, data yang dicatat bisa relatif lengkap sesuai kebutuhan daerah.

Indikator keluarga Sehat meliputi :

- 1) Keluarga mengikuti program KB;
- 2) Persalinan di Fasilitas Kesehatan;
- 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
- 4) Bayi mendapat ASI eksklusif;
- 5) Pertumbuhan Balita dipantau;
- 6) Penderita TB paru berobat sesuai standar;
- 7) Penderita hipertensi berobat teratur;
- 8) Penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati;
- 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
- 10) Keluarga sudah menjadi anggota JKN;
- 11) Keluarga mempunyai sarana air bersih;



12) Keluarga menggunakan jamban sehat.

Berdasarkan Nilai IKS Tahun 2024, Kabupaten Pekalongan termasuk kabupaten kota tidak sehat dengan IKS sebesar 0,320. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.38.
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pekalongan
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No.	No Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Pekalongan	0,14	0,14	0,15	0,173	0,320
2.	Provinsi Jawa Tengah	0,19	0,198	0,25	0,287	-

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan, DINKES Prov. Jawa Tengah, 2024

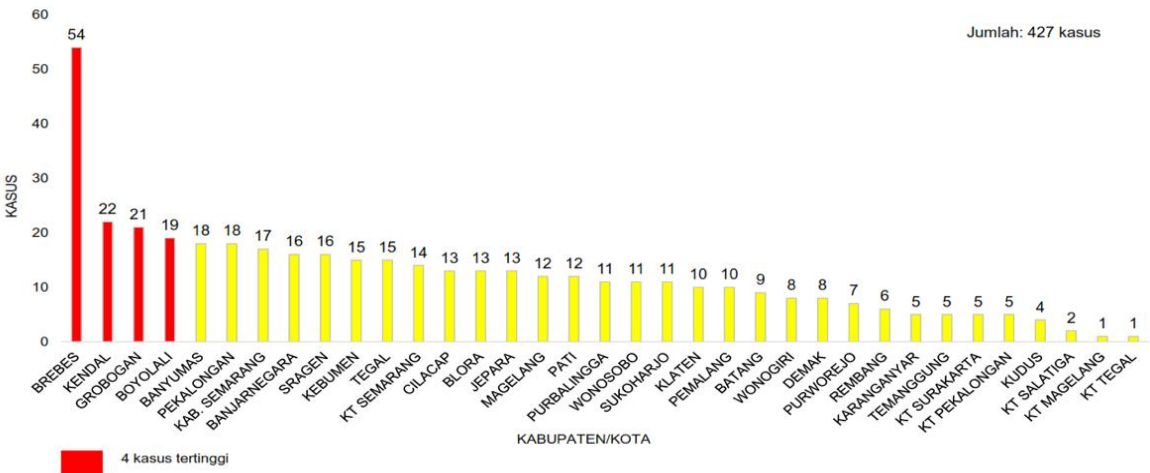
3). Angka Kematian Ibu (AKI)

Salah satu agenda utama SDGs adalah menurunkan angka kematian ibu dan kematian Balita. Pemeriksaan antenatal yang berkualitas dan teratur selama kehamilan akan menentukan status kesehatan ibu hamil dan bayi yang dilahirkan. Hingga saat ini, Angka Kematian Ibu (AKI) masih di kisaran 152,25 per 100.000 Kelahiran Hidup, belum mencapai target yang ditentukan yaitu 183 per 100.000 KH di tahun 2024. Demikian juga bayi dan balita yang masih harus kita selamatkan dari kematian. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.39.
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kab. Pekalongan	66,43 (11 kasus)	172,78 (27 kasus)	143.33 (21 kasus)	247 (34 kasus)	152,25 (18 kasus)
2.	Jawa Tengah	98,60 (530 kasus)	199 (1.011 kasus)	84,60 (485 kasus)	76,15 (438 kasus)	74,73 (427 kasus)

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Prov. Jateng, 2024



Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Prov. Jateng, 2025

Gambar 2.55. Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah
Tahun 2024



Dari tabel dan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa, Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan dari 247 per 100.000 kelahiran hidup (34 kasus) pada tahun 2023 menjadi 160 per 100.000 kelahiran hidup (18 kasus) pada tahun 2024.. Capaian ini termasuk tertinggi **6 (enam) besar** di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Jumlah Kasus Kematian Ibu Menurut Wilayah Puskesmas di Kabupaten Pekalongan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2.40.
Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) Menurut Wilayah Puskesmas di Kabupaten Pekalongan tahun 2024

No	PUSKESMAS	Jumlah Kasus AKI
1	Kandangserang	-
2	Paninggaran	-
3	Lebakbarang	-
4	Petungkriyono	-
5	Talun	1
6	Doro I	-
7	Doro II	-
8	Karanganyar	2
9	Kajen I	-
10	Kajen II	-
11	Kesesi I	-
12	Kesesi II	-
13	Sragi I	-
14	Sragi II	1
15	Siwalan	-
16	Bojong 1	1
17	Bojong II	-
18	Wonopringgo	-
19	Kedungwuni I	4
20	Kedungwuni II	-
21	Karangdadap	1
22	Buaran	1
23	Tirto I	2
24	Tirto II	1
25	Wiradesa	2
26	Wonokerto 1	2
TOTAL		18

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan; 2025

Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pekalongan termasuk daerah yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Penyebab kematian ibu antara lain oleh Preeklampsia Berat (PEB) 8 kasus, perdarahan 5 kasus dan lain-lain 6 kasus. Upaya penurunan AKI di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, adanya Program Puskesmas Mampu Persalinan di setiap Puskesmas dan peran lintas sektoral dan Gerakan Masyarakat Selamatkan Ibu dan Anak (GEMA SETIA) di seluruh kecamatan. Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas seperti pelayanan kesehatan ibu hamil serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di setiap puskesmas.



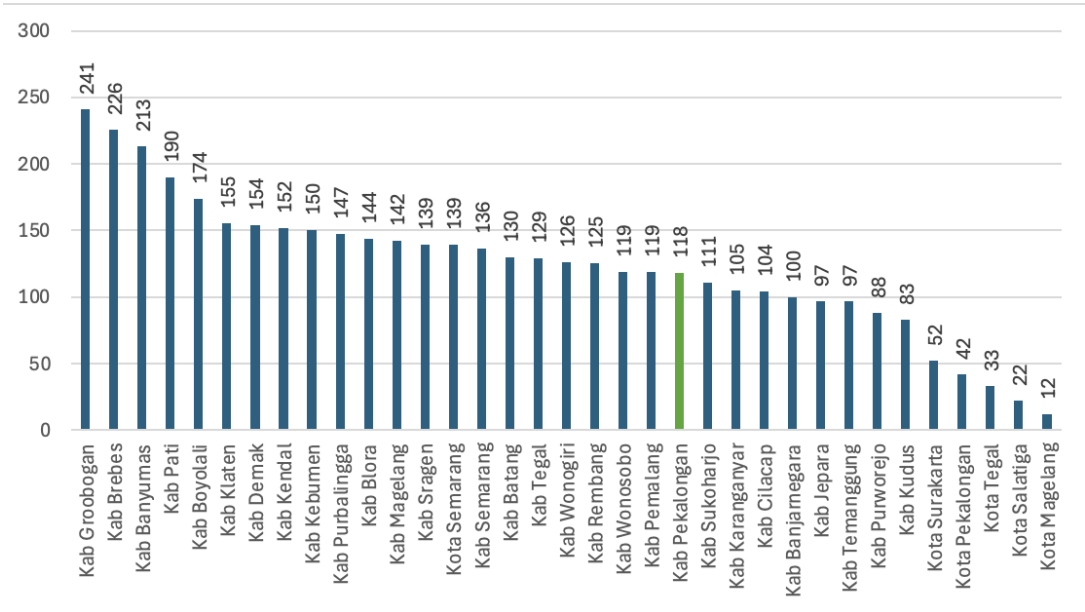
4). Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) juga merupakan indikator makro dalam pembangunan kesehatan. AKB dihitung pada bayi baru lahir sampai umur 12 bulan. AKB Kabupaten Pekalongan dari tahun 2020-2024 fluktuatif tetapi cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2024 AKB kabupaten Pekalongan sebesar **9,38 (129 kasus)**. Selengkapnya data Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.41.
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kab. Pekalongan	7,40 (123 kasus)	6,98 (109 kasus)	7,17 (105 kasus)	9,38 (129 kasus)	14,07 (118 kasus)
2.	Jawa Tengah	7,79 (4.189 kss)	7,87 (3.997 kss)	7,02 (4.024 kss)	8,02 (4.612 kss)	7,57 (4.326 kss)

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Prov. Jateng, 2025



Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Prov. Jateng, 2025

Gambar 2.56. Jumlah Kasus Kematian Bayi Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2024

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan penyebab utama tingginya kematian bayi di Kabupaten Pekalongan antara lain Asfeksia, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), dan kelainan congenital. Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mencapai target yaitu dengan cara pembinaan puskesmas mampu bersalin oleh dokter spesialis anak, peningkatan kapasitas petugas dalam pencegahan dan penanganan Berat badan lahir rendah (BBLR), pemeriksaan ibu hamil resti di tiap kecamatan, pendidikan kesehatan reproduksi remaja di sekolah.

5). Kondisi Gizi

Pendataan gizi buruk di Kabupaten Pekalongan berdasarkan pada 2 (dua) kategori yaitu kategori pertama dengan membandingkan berat badan dengan umur (BB/U) dan kategori kedua adalah membandingkan berat badan dengan tinggi badan (BB/TB). Pemeriksaan pertama dilakukan di Posyandu dengan membandingkan berat badan dengan umur melalui

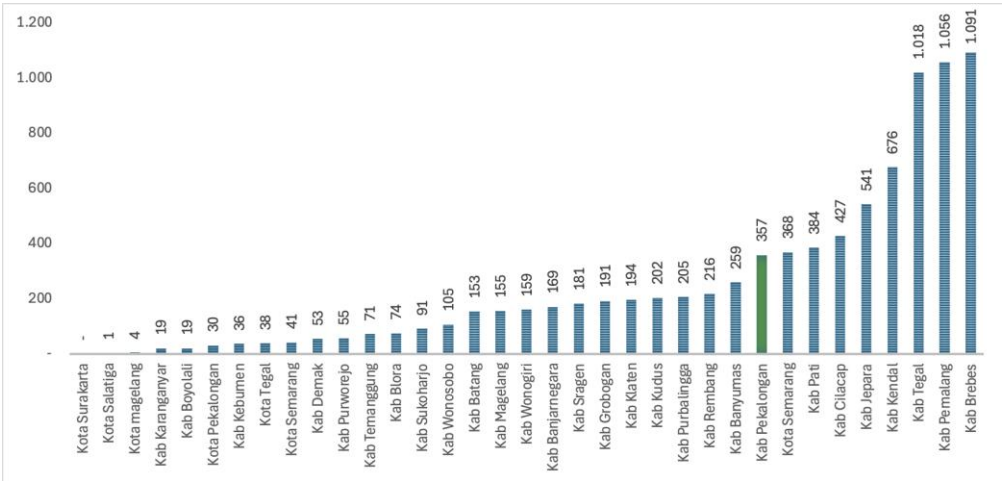


kegiatan penimbangan, jika ditemukan balita yang berada di bawah garis merah (BGM) atau dua kali tidak naik (2T), maka dilakukan konfirmasi status gizi dengan menggunakan indikator berat badan menurut tinggi badan. Secara rinci Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.42.
Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kab. Pekalongan	Kasus	37	36	36	98	357
2.	Jawa Tengah	Kasus	1.421	1.868	2.999	2.794	8.639

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Jateng, 2023



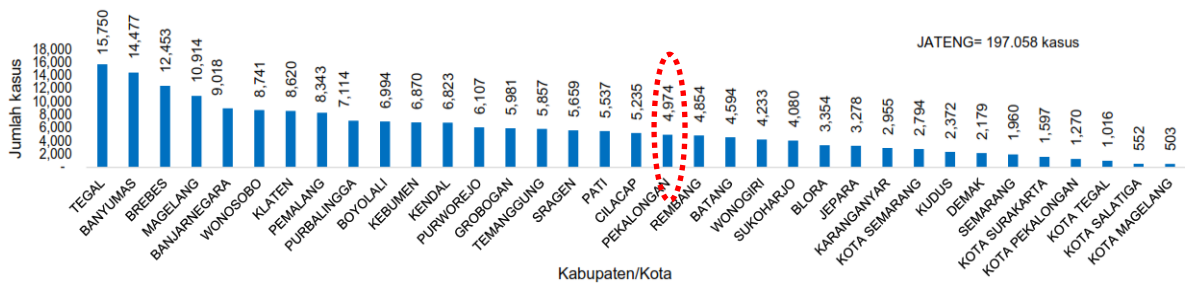
Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Jateng, 2025

Gambar 2.57. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024

Dari tabel dan gambar di atas, capaian jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2024 sebesar 357 kasus naik dari Tahun 2023 sebesar 98 kasus. Masih tinginya kemiskinan, fasilitas kesehatan yang terbebani, rantai pasokan makanan yang terganggu dan kurangnya pendapatan merupakan faktor penyebab kasus gizi buruk di Kabupaten Pekalongan. Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih yang mengakibatkan kemampuan masyarakat mengakses asupan makanan syarat gizi masih rendah serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih sehat.

6). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

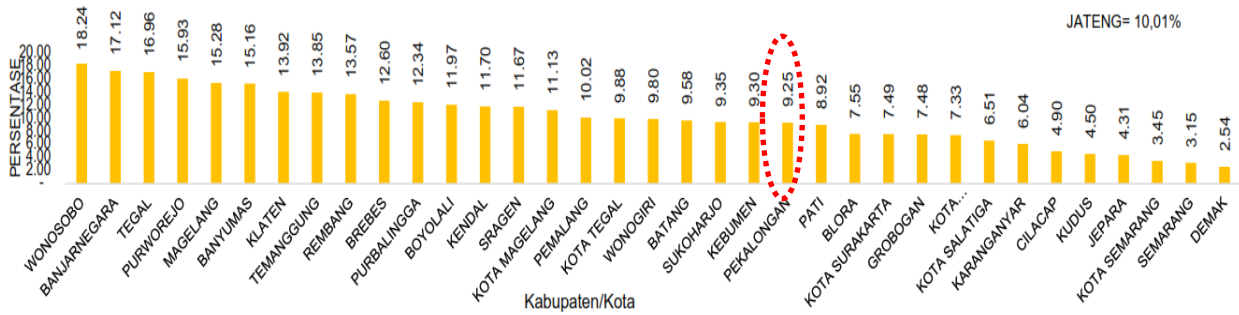
Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Jumlah Kasus Stunting Balita s.d. 59 Bulan Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebanyak 4.974 kasus. Jumlah Kasus Stunting Balita s.d. 59 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Jateng, 2025

Gambar 2.58. Jumlah Kasus Stunting Balita s.d. 59 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember 2024

Perkembangan stunting di Kabupaten Pekalongan mengacu pada Data Dinas Kesehatan dan terus dilaksanakan integrasi dengan data Aplikasi **Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGM)**, prevalensi stunting di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 ada pada angka 9,25 persen atau turun 2,05 point dibandingkan Tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: ePPGBM bulan Desember 2024 diunduh 29 Januari 2025

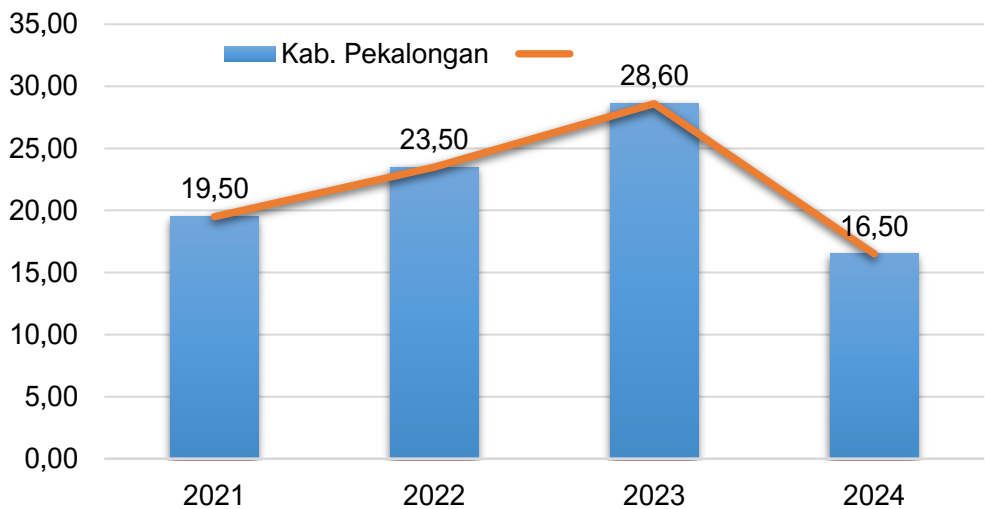
Gambar 2.59. Prevalensi Stunting Balita s.d 59 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember 2024

Sedangkan Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan bahwa pada tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Pekalongan turun sebanyak 9,10% poin dibanding tahun 2023 atau sebesar 19,50 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.43.
Prevalensi Stunting Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No.	Wilayah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Pekalongan						
	ePPGM	%	15,81	13,56	11,04	11,30	9,25
	Data SSGI	%	-	19,50	23,50	28,60	19,50
2	Jawa Tengah						
	ePPGM	%	14,50	12,80	11,90	9,79	10,01
	Data SSGI	%	-	20,90	20,80	20,70	17,10

Sumber : ePPGM dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2025



Sumber : Survey Status Gizi Indonesia (SSGI); 2024

Gambar 2.60. Prevalensi Stunting Kabupaten Pekalongan 2021-2024

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memiliki Kebijakan dalam penurunan kasus stunting yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Pekalongan. Dalam Peraturan Bupati tersebut telah ditetapkan sasaran dan kegiatan intervensi yang perlu dilakukan dalam penurunan kasus stunting serta pelibatan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam penurunan kasus stunting.

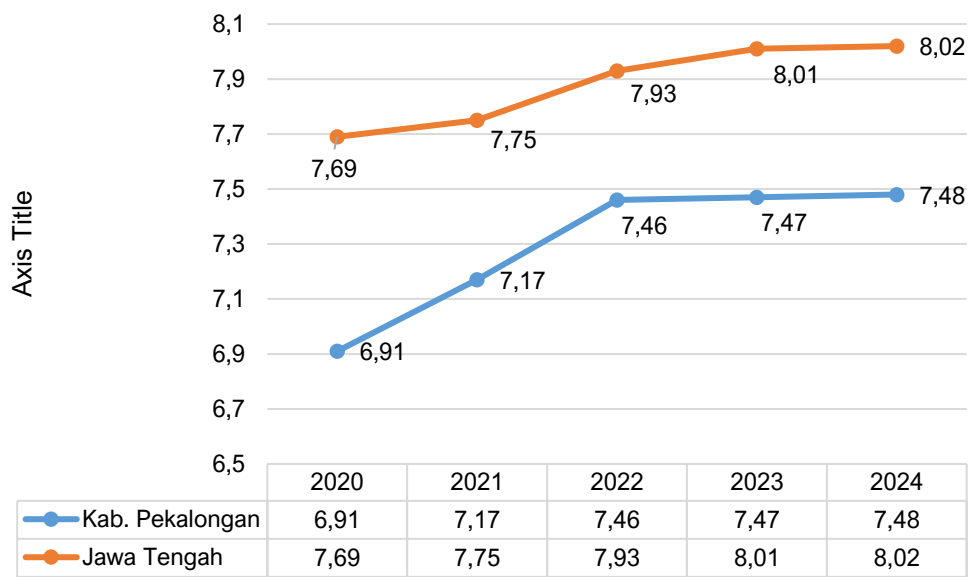
Guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui OPD terkait telah melaksanakan berbagai program penurunan stunting seperti pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri yang Anemia serta Ibu Hamil selama 90 hari, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal, pemberian susu protein tinggi, pelatihan kelas Ibu Hamil (bumil), sosialisasi isi piringku, Pembentukan dan pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga (TPK), Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, Pengelolaan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), Perbaikan Sanitasi Lingkungan dan lain sebagainya.

c. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Kondisi pendidikan masyarakat berperan cukup penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1). Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

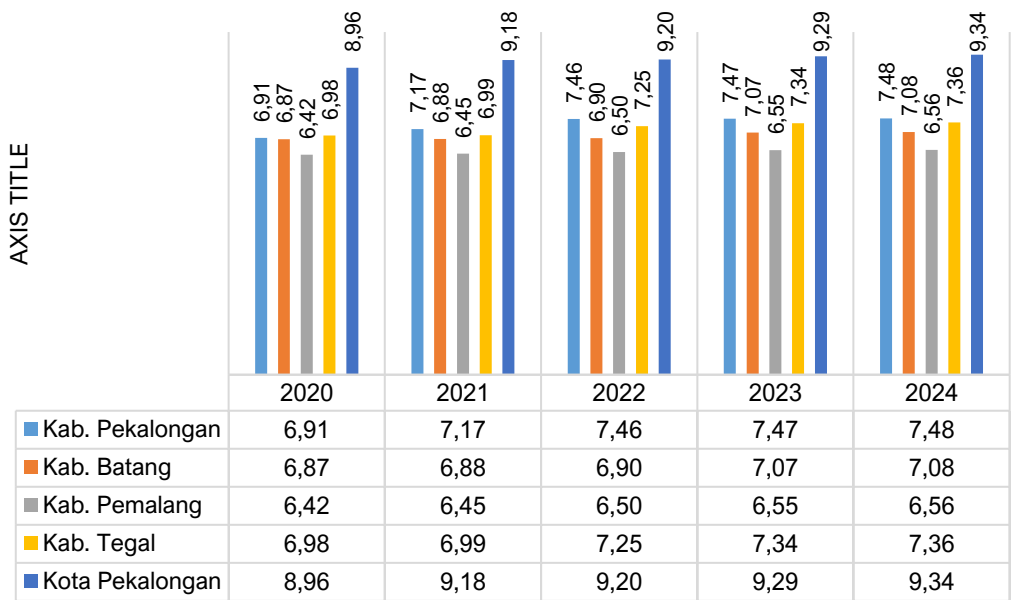
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2025

Gambar 2.61. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pekalongan meningkat dari 7,47 tahun di Tahun 2023 menjadi 7,48 tahun di Tahun 2024. Namun demikian rata-rata capaian RLS Kabupaten Pekalongan masih lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,01 tahun. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2025

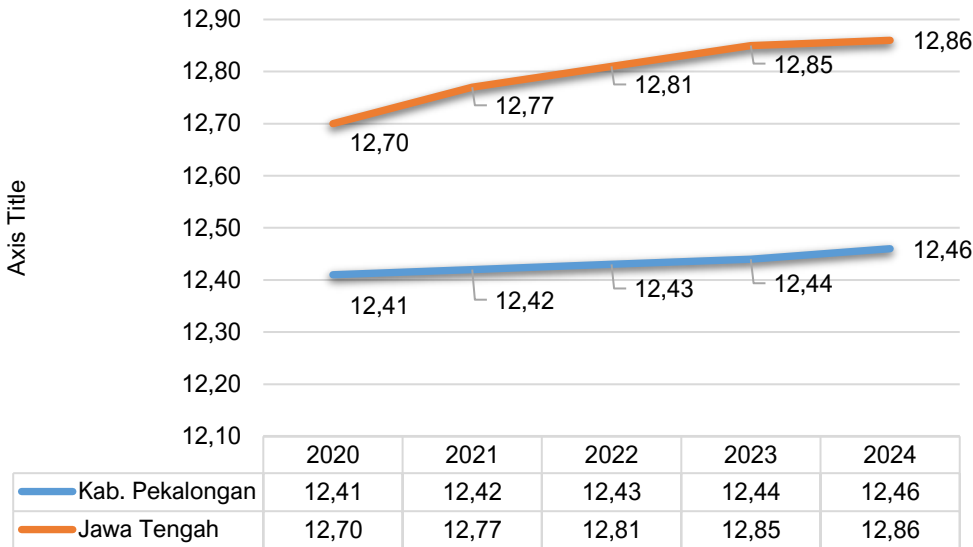
Gambar 2.62. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2024

Dari gambar diatas, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan pada 2024 sebesar 7,48 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 7,08 tahun, Kabupaten Pemalang sebesar 6,56 tahun, dan Kabupaten Tegal sebesar 7,36 tahun dan lebih rendah dengan Kota Pekalongan sebesar 9,34 tahun.



2). Harapan Lama Sekolah

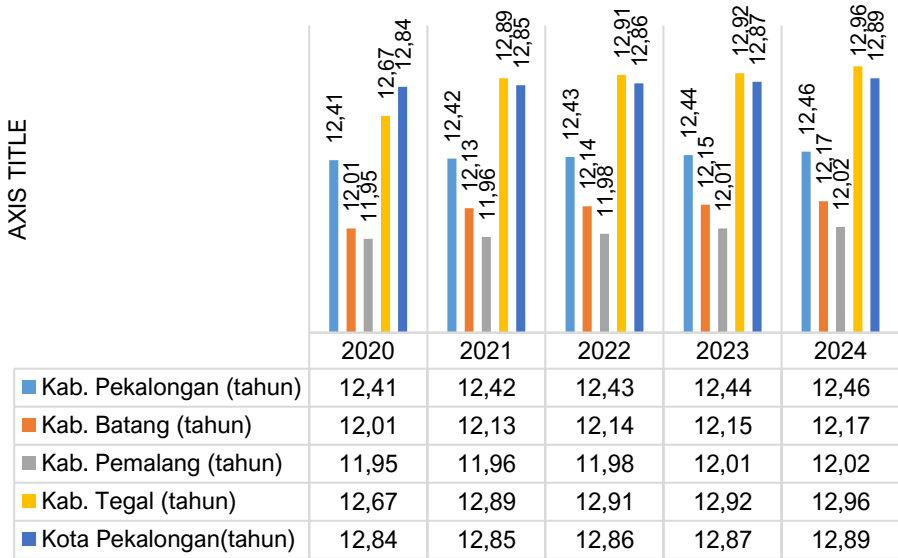
Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.63. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Pekalongan meningkat sebesar 12,43 tahun di Tahun 2022 menjadi 12,44 tahun di Tahun 2023. Namun demikian rata-rata capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan masih lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,85 tahun. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2025

Gambar 2.64. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020-2024



Dari tabel dan gambar diatas, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan pada 2024 sebesar 12,46 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 12,17 tahun dan Kabupaten Pemalang sebesar 12,02 tahun dan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Tegal sebesar 12,96 tahun dan Kota Pekalongan sebesar 12,89 tahun.

3). Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan sensorik dan motorik serta penanaman karakter pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyediaan pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu poin tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Target Agenda Pendidikan 2030 untuk jenjang PAUD adalah memastikan seluruh anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses perkembangan, perawatan dan pendidikan pra-SD (PAUD) yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar.

Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK/Taman Kanak-Kanak) Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 sejumlah 354 unit yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.44.
Jumlah PAUD bentuk pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah TK		Jumlah Siswa		Guru
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bojong	-	24	-	1.379	70
Buaran	1	17	15	983	41
Doro	1	23	34	1.495	67
Kajen	2	30	217	1.461	86
Kandangserang	-	11	-	602	30
Karanganyar	1	20	79	1.024	50
Karangdadap	-	9	-	457	21
Kedungwuni	1	38	44	2.287	121
Kesesi	1	32	19	1.033	52
Lebakbarang	-	2	-	37	3
Paningsgaran	-	7	-	248	12
Petungkriyono	-	3	-	39	3
Siwalan	-	16	-	590	27
Sragi	1	20	25	1.323	66
Talun	-	17	-	658	31
Tirto	-	24	-	1.845	83
Wiradesa	1	20	96	1.167	82
Wonokerto	-	15	-	753	45
Wonopringgo	-	17	-	1.169	55
Jumlah Total 2024	9	345	529	18.550	945
2023	9	336		18.968	1.014

Sumber : DINDIKBUD Kab. Pekalongan, 2024

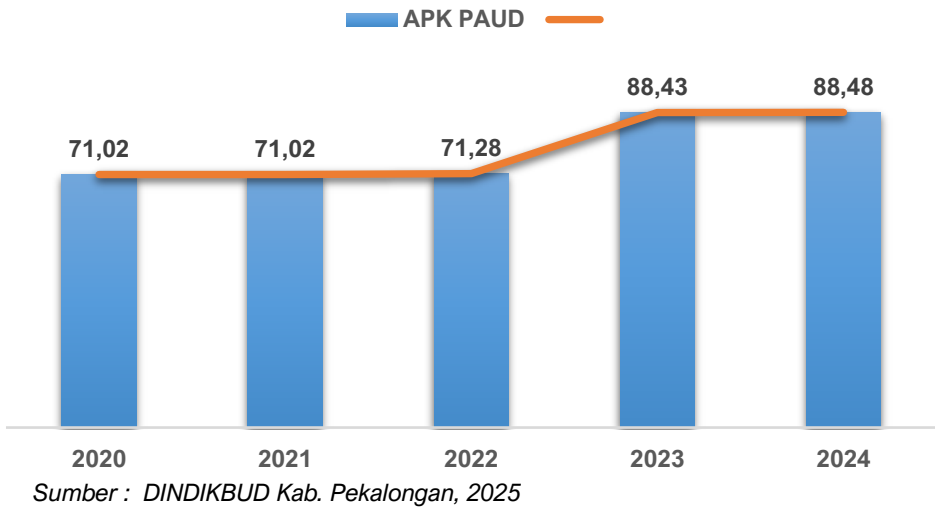
Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah satuan pendidikan anak usia dini Kabupaten Pekalongan dari 354 lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut:
(1) Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri : 9 unit



(2) Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta : 345 Lembaga

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak/TK Kabupaten Pekalongan sebanyak 945 orang. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu adanya Pengembangan menyeluruh yang meliputi aspek pengasuhan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan. Pengembangan menyeluruh tersebut akan dapat dicapai secara optimal melalui pemberian layanan PAUD yang bermutu dan berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase anak usia 5 - 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di PAUD menjadi salah satu indikator SPM yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Adapun perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD usia 5-6 tahun Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2.65. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD usia 5-6 tahun
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

4). Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Secara rinci APS Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.45.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
APS Kab. Pekalongan						
1	SD/MI (7-12 tahun)	99,99	99,96	98,68	99,99	-
2	SLTP/MTs (13-15 tahun)	91,45	94,83	89,79	92,57	-
3.	SMA/SMK/MA(16-18 tahun)	66,69	66,11	66,78	65,62	-
APS Provinsi Jawa Tengah						
1	SD/MI (7-12 tahun)	99,73	99,66	99,58	99,57	99,57
2	SLTP/MTs (13-15 tahun)	96,37	96,84	96,77	97,08	97,12



No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
3.	SMA/SMK/MA(16-18 tahun)	70,14	70,79	70,82	70,87	71,60

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dari tabel diatas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI cenderung meningkat. Pada tahun 2023 terdapat 99,99 persen penduduk telah bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI. Kondisi tersebut menunjukan pada tahun 2023 masih ada sekitar kurang dari 1 persen anak berumur 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/MI baik di lingkungan Kabupaten Pekalongan maupun di luar wilayah Kabupaten Pekalongan. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah APS SD/MI Kabupaten Pekalongan diatas rata-rata.

Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/MTs tahun 2023 sebesar 92,57 persen, di bawah rata-rata APS Provinsi Jawa Tengah. Masih terdapat penduduk 7,43 persen penduduk usia 13-15 tahun yang tidak menempuh pendidikan pada SMP/MTs manapun baik di lingkungan Kabupaten Pekalongan maupun di luar wilayah Kabupaten Pekalongan.

Selanjutnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK cenderung mengalami penurunan dengan capaian dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sebesar 65,62 persen sehingga masih ada 34,38 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA baik di lingkungan Kabupaten Pekalongan maupun di luar wilayah Kabupaten Pekalongan.

5). **Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi**

Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.46.
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Tidak mempunyai ijazah	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)				Total
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTS/ Paket B	SMA/SMK/M A/Paket C	Diploma/ Universitas	
2020	19,68	34,34	22,63	18,70	4,65	100,00
2021	18,93	33,38	22,66	19,25	5,78	100,00
2022	16,97	32,18	24,71	19,74	6,39	100,00
2023	16,97	31,60	25,79	19,52	6,12	100,00
2024	15,90	33,70	24,07	19,65	6,68	100,00
Rata-Rata	17,69	33,04	23,97	19,37	5,92	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024

Dari tabel di atas, persentase penduduk umur 15 Tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Pekalongan sepanjang tahun 2020-2024 rata-rata didominasi lulusan SD/MI sebanyak 33,04 persen, SMP/MTS/Paket B sebesar 23,97 persen,



SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 19,37 persen, Tidak mempunyai ijazah sebesar 17,69 persen dan lulusan diploma/universitas sebesar 5,92 persen.

6). **Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)**

a) **Literasi Membaca SD/Sederajat dan SMP/Sederajat**

Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan **sudah “mencapai kompetensi minimum”** jika **paling sedikit 75% peserta didik** pada satuan pendidikan tersebut memiliki **level hasil belajar minimal “cakap”** sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan

Formulasi Perhitungan : Jumlah peserta didik dengan kemampuan literasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%

Tabel 2.47.
Indeks Literasi Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI (7-12 tahun)	N/A	N/A	N/A	68,56	79,27 Baik
2	SLTP/MTs (13-15 tahun)	N/A	N/A	N/A	69,76	79,75 Baik

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan; 2024

b) **Numerasi SD/Sederajat dan SMP/Sederajat**

Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan **sudah “mencapai kompetensi minimum”** jika **paling sedikit 75% peserta didik** pada satuan pendidikan tersebut memiliki **level hasil belajar minimal “cakap”** sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan

Formulasi Perhitungan : Jumlah peserta didik dengan kemampuan numerasi sesuai kewenangan kabupaten/kota yang memiliki capaian asesmen nasional mencapai standar kompetensi minimum untuk **numerasi** DIBAGI Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen nasional di kabupaten/kota DIKALI 100%

Tabel 2.48.
Indeks Numerasi Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI (7-12 tahun)	N/A	N/A	N/A	53,18	70,87 Baik
2	SLTP/MTs (13-15 tahun)	N/A	N/A	N/A	48,00	73,14 Baik

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan; 2024



d. **Perlindungan Sosial yang Adaptif**

Kondisi perlindungan sosial menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.

1). **Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional**

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.49.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	62,29	60,27	56,38	55,89	58,13
2	BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI)	0,68	0,37	12,42	13,88	13,22
3	Jamkesda	0,04	0,24	2,17	0,31	-
4	Asuransi Swasta	0,37	0,95	-	0,09	-
5	Perusahaan/Kantor	36,69	38,39	0,69	1,36	0,84
	Jumlah Total	100,07	100,22	71,66	71,53	72,19

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024

Dari tabel di atas Rata-rata Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar 72,19% sedikit lebih besar dari Tahun 2023 sebesar 71,53% yang mencerminkan beberapa hal penting antara lain

- 1) Akses Pelayanan Kesehatan : cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan;
- 2) Kesadaran Masyarakat : cakupan yang tinggi mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- 2) Komitmen pemerintah daerah: Cakupan yang tinggi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional;
- 3) Pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*: cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*, yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

2). **Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja



Tabel 2.50.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jaminan Pensiun/Veteran	5,95	3,56	3,26	4,18	-
2	Jaminan Hari Tua	4,64	3,98	2,60	3,72	-
3	Asuransi Kecelakaan Kerja	5,99	4,05	3,54	5,13	-
4	Jaminan/Asuransi Kematian	4,37	3,29	3,04	3,31	-
5	Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	2,24	1,10	1,71	1,47	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen) 2024

Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.

e. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa yang dapat dijelaskan melalui indikator sebagai berikut.

1). Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan

Cakupan CB dan WBTB yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan yang dilestarikan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (CB). Indikator ini menggambarkan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Pekalongan beserta nilai pentingnya; Indikator ini juga merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya; dengan Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif". Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan sebesar 1,80 persen (3 dari 161 CB dan WBTB) di Tahun 2024

2). Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir

Cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. Indikator ini menggambarkan sejauh mana para pelaku seni di Kabupaten Pekalongan dapat menjadikan kegiatan seni budaya sebagai salah satu sumber pendapatan/kesejahteraan. Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Ekonomi Budaya dan Dimensi Ekspresi Budaya dengan Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif". Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir sebesar 0,44 persen di Tahun 2024



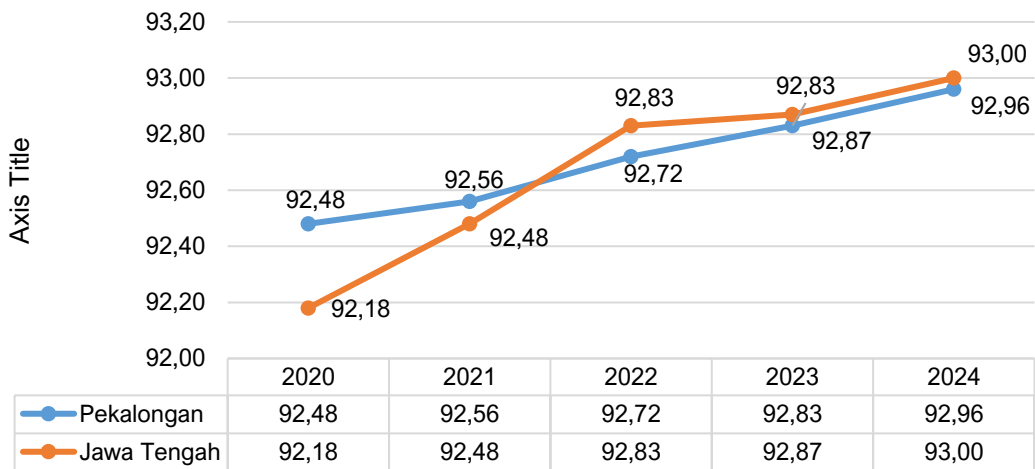
f. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Merupakan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan

1). Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tercapai apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki berada pada angka 100. Angka tersebut ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung peningkatan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan.

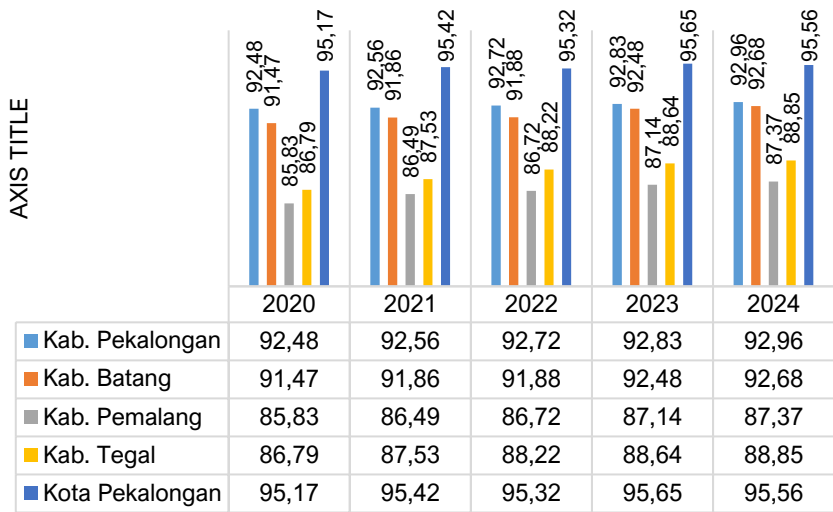
Perbandingan IPG Kabupaten Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.66. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar diatas, capaian IPG Kabupaten Pekalongan capaian rata-rata di atas Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.



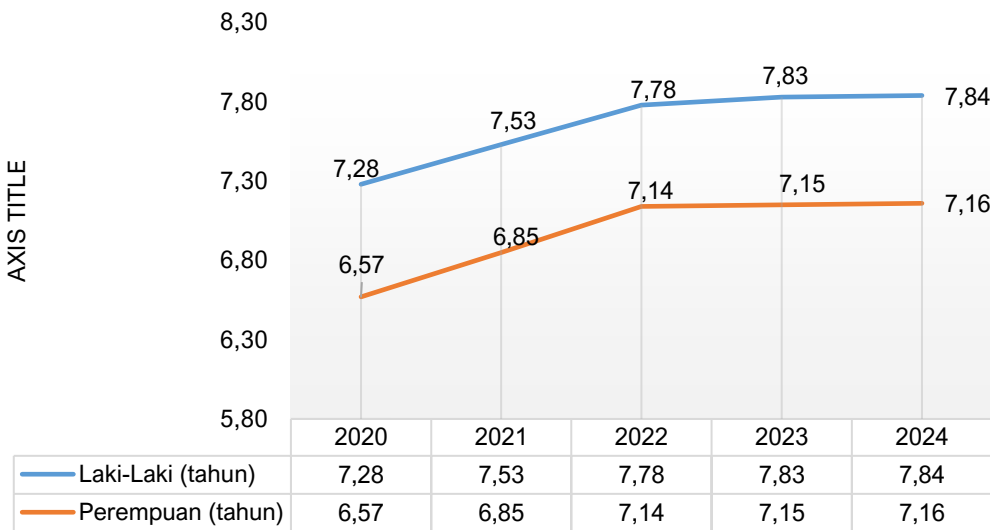
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.67. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan tahun 2024 sebesar 92,96 lebih baik dari Kabupaten Batang sebesar 92,68, Kabupaten Pemalang sebesar 87,37, Kabupaten Tegal 88,85 dan di bawah Kota Pekalongan sebesar 95,56. Adapun faktor-faktor pembentuk IPG di Kabupaten Pekalongan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin

Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin, dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki selama kurun waktu tahun 2020-2024 lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2024 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk laki-laki sebesar 7,84 tahun sedangkan perempuan sebesar 7,16 tahun. Tentunya perlu ada peningkatan partisipasi pendidikan penduduk perempuan agar tercipta kesetaraan lama sekolah. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.68. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2020-2024

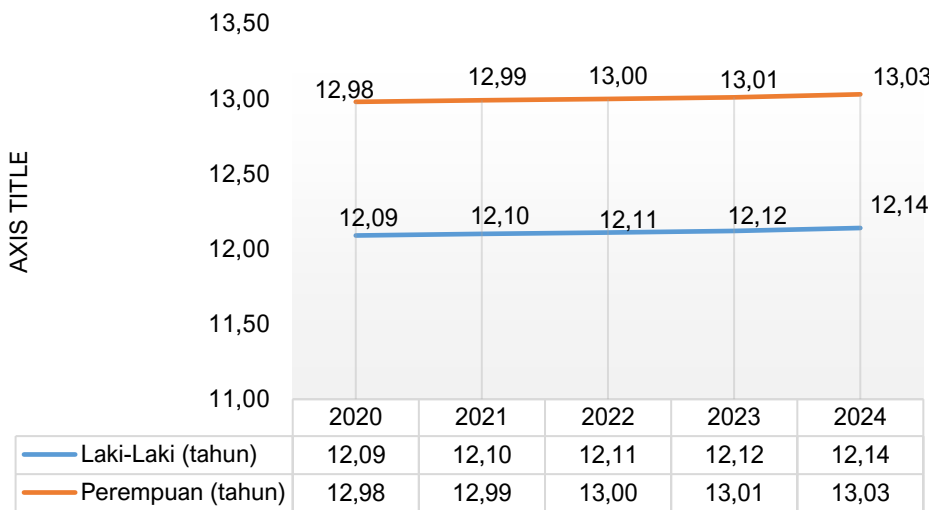
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan lebih rendah daripada laki-laki dikarenakan antara lain masih melekatnya budaya patriarki (menempatkan kedudukan/hak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan) termasuk hak mendapatkan pendidikan formal, serta masih dijumpainya



pernikahan usia anak di beberapa daerah yang mengakibatkan putus sekolah pada anak perempuan.

b). Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin

Kondisi Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 untuk penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2024 Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan sebesar 13,03 tahun, sedangkan laki-laki sebesar 12,14 tahun. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

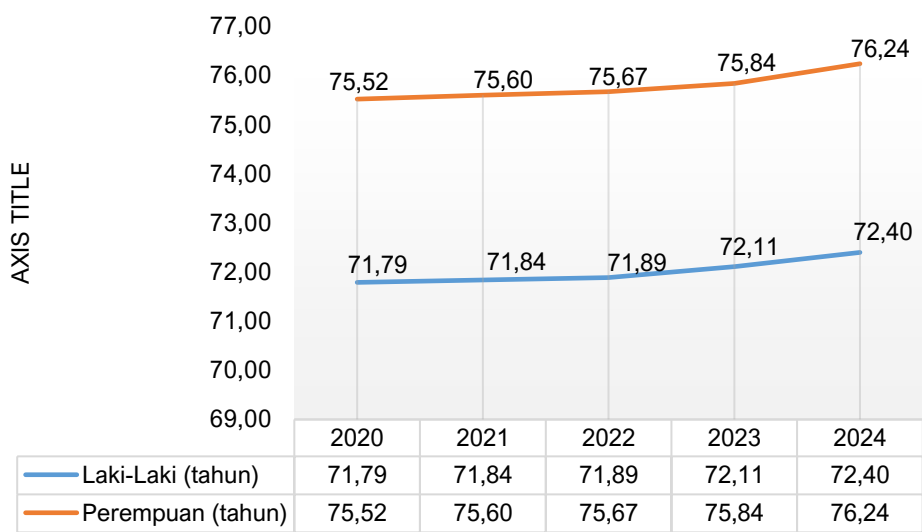


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.69. Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin.
Kabupaten Pekalongan 2020-2024

c). Umur Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin

Capaian Umur Harapan Hidup (UHH), perempuan dari tahun 2020-2024 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH) Laki-laki. Pada Tahun 2020 UHH perempuan sebesar 75,52 tahun naik menjadi 76,24 tahun pada tahun 2024. Sedangkan UHH laki-laki pada tahun 2020 sebesar 71,79 tahun naik menjadi 72,40 tahun pada tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

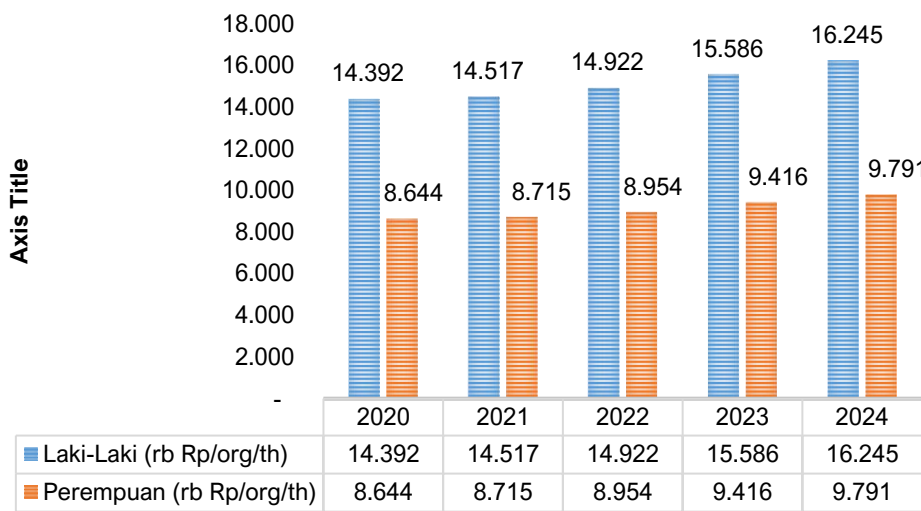
Gambar 2.70. Umur Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin
Kabupaten Pekalongan 2020-2024



d). **Pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin**

Capaian pengeluaran perkapita yang disesuaikan dari Tahun 2020-2024 untuk penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pengeluaran perkapita penduduk laki-laki meningkat dari sebesar 14.392 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2020 menjadi 16.245 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2024. Sementara itu pengeluaran perkapita penduduk perempuan naik dari sebesar 8.644 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2020 menjadi 9.791 ribu rupiah/orang/tahun di tahun 2024.

Ketimpangan pengeluaran perkapita yang disesuaikan antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh kompetensi perempuan yang masih rendah dan akses ekonomi terhadap perempuan masih terbatas, sehingga masih belum bisa bersaing dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.71. Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan 2020-2024

2). **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Komponen pembentuk IDG tahun 2020-2024 di Kabupaten Pekalongan antara lain : **keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja**. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

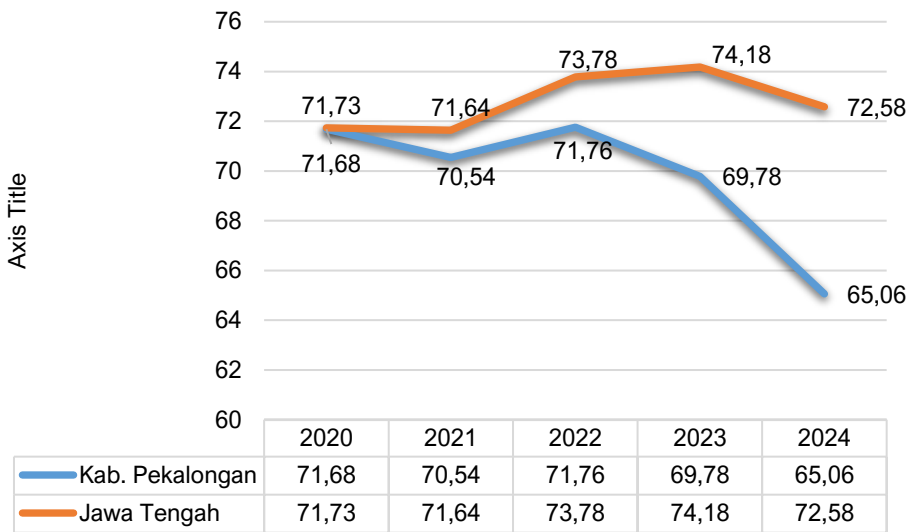
Tabel 2.51.
Komponen Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1	[IDG] Keterlibatan perempuan di Parlemen	27,91	26,67	26,67	25,00	17,78
2	[IDG] Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	50,65	49,29	48,03	54,99	53,20
3	[IDG] Sumbangan Pendapatan Perempuan	26,29	25,79	25,84	25,82	26,12

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024



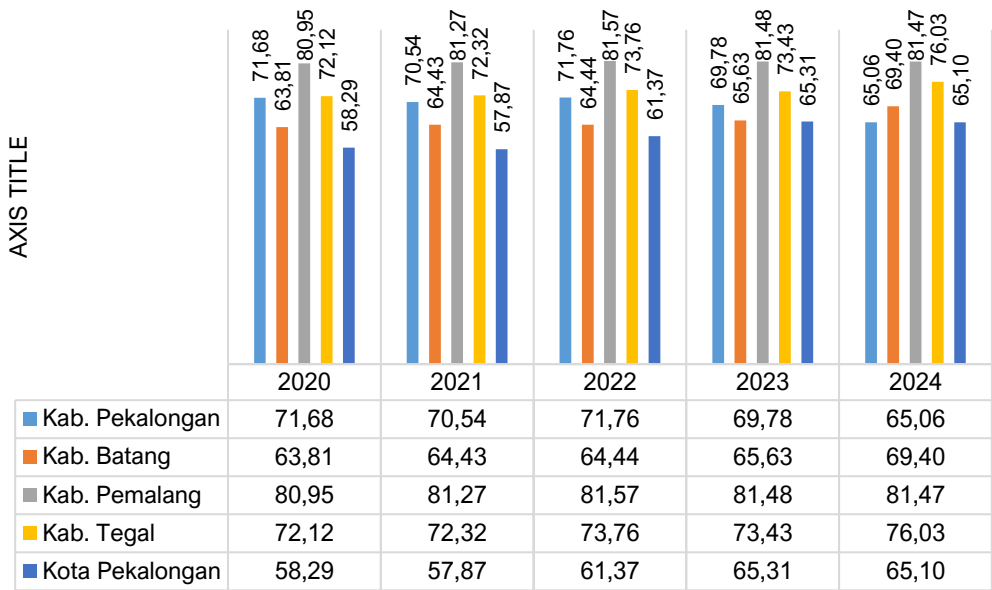
Komponen pembentuk IDG rata-rata turun di tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sehingga menyebabkan IDG Kabupaten Pekalongan turun dari 69,78 di tahun 2023 menjadi 65,06 di Tahun 2024. Tantangan utama masalah gender di beberapa tahun kedepan adalah masih berkuat pada budaya patriarki yang masih kental, membuat perempuan sulit untuk berpartisipasi secara bebas. Rata-rata capaian IDG Kabupaten Pekalongan masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.72. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten Pekalongan ke depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian ke depan adalah masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), kurangnya peran serta perempuan khususnya di bidang politik, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.73. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020-2024

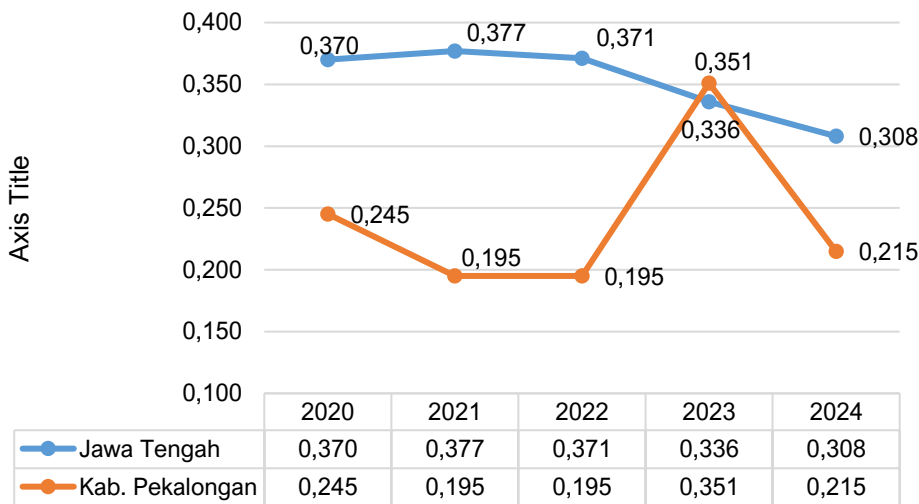


Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan tahun 2024 lebih rendah dari Kabupaten Batang sebesar 69,40, Kabupaten Pemalang sebesar 81,47, Kabupaten Tegal sebesar 76,03 dan dan Kota Pekalongan sebesar 65,10.

3). Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kesetaraan gender menjadi bagian dari target pembangunan di banyak negara, terutama yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya yang optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan menemukan solusi perbaikannya. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan dalam gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah; 2025

Gambar 2.74. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Dari gambar di atas, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Ini mengindikasikan, ketimpangan peran laki-laki dan perempuan yang semakin renah. IKG Kabupaten Pekalongan rata-rata di bawah capaian IKG Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan data BPS Jateng, IKG Kabupaten Pekalongan pada 2024 tercatat 0,215, lebih rendah dibandingkan 2023 yang mencapai 0,315. Hal tersebut karena adanya penurunan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas Kesehatan yang. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut.



Tabel 2.52.
**Perkembangan Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi Kabupaten
Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jawa Tengah					
	MHPK20	0,254	0,267	0,264	0,260	0,249
	MTF	0,041	0,042	0,042	0,027	0.018
2.	Kab. Pekalongan					
	MHPK20	0,262	0,277	0,286	0,277	0,272
	MTF	0,011	0,004	0,000	0,035	0,000

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah; 2024
Ket :
▪ MHPK20 (Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun);
▪ MTF (Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang saat kelahiran hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20) fluktuatif dari 0,262 pada 2020 menjadi 0,272 pada 2024. Sedangkan Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan dari 0,011 di Tahun 2020 menjadi 0,000 di Tahun 2024.

Selanjutnya dapat dijelaskan perkembangan indikator dimensi pasar tenaga kerja Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.53.
**Perkembangan Indikator Dimensi Pasar Tenaga Kerja Kabupaten
Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jawa Tengah					
	TPAK Laki-Laki	81,68	81,94	83,74	84,52	85,66
	TPAK Perempuan	57,54	57,58	58,31	58,92	61,82
2.	Kab. Pekalongan					
	TPAK Laki-Laki	85,21	84,94	83,10	84,29	87,33
	TPAK Perempuan	57,63	58,33	58,01	56,27	65,13

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pada dimensi pasar tenaga kerja, direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tercatat, selama 2020-2024 TPAK laki-laki dan perempuan cenderung fluktuatif. TPAK laki-laki pada 2020 sebesar 85,21 persen menjadi 87,33 persen pada 2024. Sementara itu, TPAK perempuan di 2020 sebesar 57,63 persen naik menjadi 65,13 persen pada 2024.

Selanjutnya dapat dijelaskan perkembangan indikator dimensi pemberdayaan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 sebagai berikut.



Tabel 2.54.
**Perkembangan Indikator Dimensi Pemberdayaan Kabupaten Pekalongan
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

No.	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jawa Tengah					
	Persentase Keterwakilan di Legislatif Menurut Jenis Kelamin					
	▪ Laki-Laki	81,20	81,67	80,00	79,83	82,35
	▪ Perempuan	18,80	18,33	20,00	20,17	17,65
	Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas Menurut Jenis Kelamin					
	▪ Laki-Laki	32,85	32,26	34,14	34,82	35,72
2.	▪ Perempuan	26,97	26,82	28,79	29,20	29,61
	Kab. Pekalongan					
	Persentase Keterwakilan di Legislatif Menurut Jenis Kelamin					
	▪ Laki-Laki	72,09	73,33	73,33	75,00	82,22
	▪ Perempuan	27,91	26,67	26,67	25,00	17,78
	Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas Menurut Jenis Kelamin					
	▪ Laki-Laki	21,39	25,43	25,51	26,83	27,40
	▪ Perempuan	19,48	21,61	21,94	22,31	22,37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 202422,37

Dari tabel di atas, perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan dua indikator. Pertama, persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas Menurut Jenis Kelamin yaitu perempuan meningkat dari 22,31 persen pada 2023 menjadi 22,37 persen pada 2024. Sedangkan persentase laki-laki meningkat dari 26,83 persen di tahun 2023 menjadi 27,40 persen pada 2024. Sedangkan proporsi keterwakilan perempuan di parlemen mengalami penurunan pada tahun 2024.

4). Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

iBangga berdasarkan data BKKBN merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.

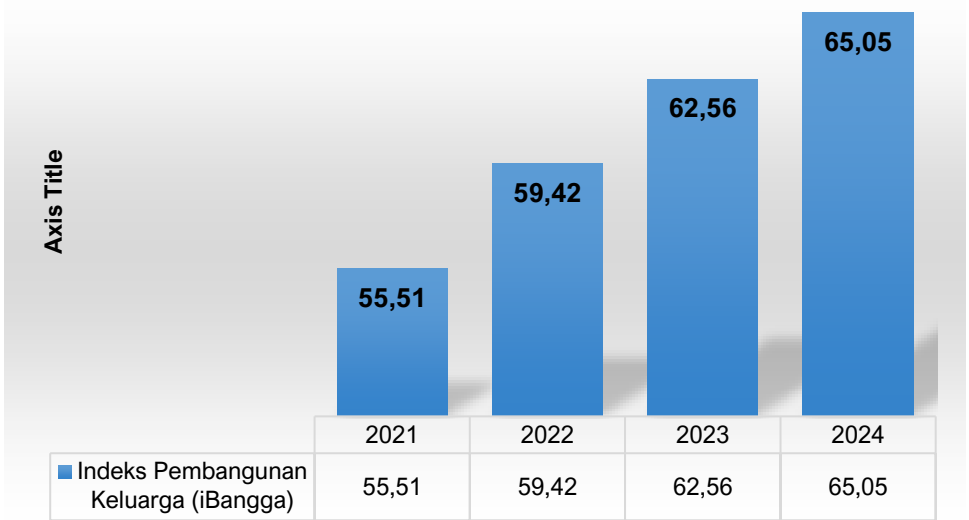
Penghitungan iBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Langkah langkah penghitungan iBangga:

- 1. menghitung nilai agregasi masing masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota;
- 2. menghitung skor disetiap dimensi;
- 3. menghitung iBangga.

Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- 1. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
- 2. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70;
- 3. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Pekalongan **pada 2024**, sebesar **62,05 (Cukup Baik)**. Angka tersebut berada di atas target 56,29. Indeks tersebut ditopang oleh dimensi kemandirian, kebahagiaan, dan ketentraman keluarga. Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap Program Bangga Kencana dan Upaya Percepatan Penurunan Stunting. Perkembangan iBangga Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); 2025

Gambar 2.75. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021-2024

3. Aspek Daya Saing Daerah

a. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1). Angka Beban Ketergantungan

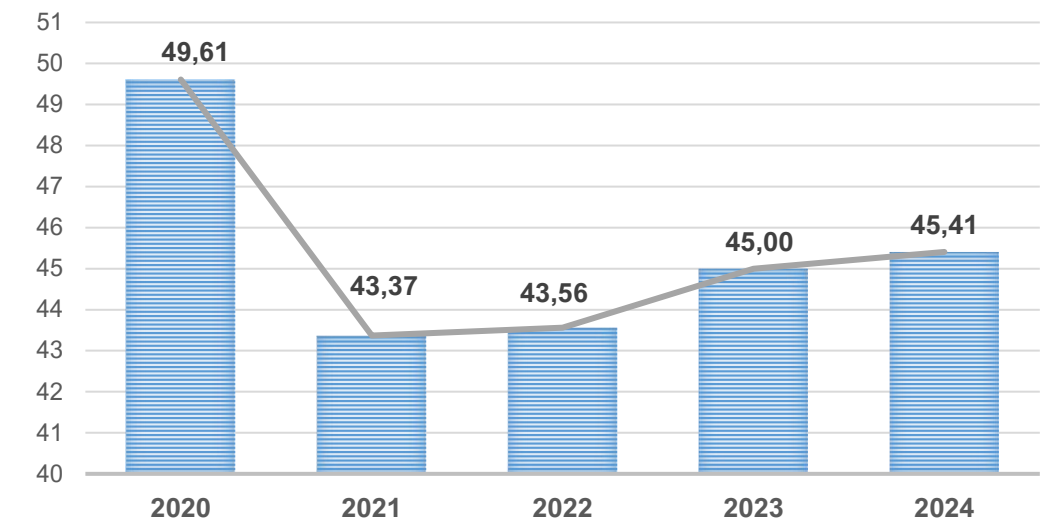
Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Selama periode 2020-2024 berdasarkan data BPS, angka beban ketergantungan di Kabupaten Pekalongan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024 angka beban ketergantungan Kabupaten Pekalongan sebesar 45,41 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 46 orang penduduk belum produktif atau sudah tidak produktif. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut.

Tabel 2.55.
Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Usia Bukan Produktif		Usia Produktif	Dependency Ratio (DR) (%)
		0-14 th	>65 th	15-64 th	
1.	2020	236.880	56.974	592.343	49,61
2.	2021	233.759	61.656	681.089	43,37
3.	2022	233.971	65.362	687.122	43,56
4.	2023	162.698	73.035	771.651	45,00
5.	2024	241.393	76.828	700.785	45,41

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan. 2025



Sumber : BPS Kab. Pekalongan Tahun 2025

Gambar 2.76. *Dependency Ratio* Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Dari tabel dan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2024 menunjukkan jumlah kelompok **usia produktif (15-64 tahun)** di Kabupaten Pekalongan sebanyak **700.785 jiwa**, sedangkan kelompok **usia non produktif** sebanyak **318.221 jiwa** yang terdiri dari **0-14 tahun** sebanyak **241.393 jiwa** dan **65+ tahun** sebesar **76.828 jiwa**. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56.
Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	Jumlah Total
1.	0-4	43.040	41.095	84.135	241.393
2.	5-9	41.055	38.987	80.042	
3.	10-14	39.614	37.602	77.216	
4.	15-19	39.532	36.871	76.403	
5.	20-24	40.252	38.443	78.695	700.785
6.	25-29	43.752	40.965	84.717	
7.	30-34	44.933	40.698	85.631	
8.	35-39	42.075	38.209	80.284	
9.	40-44	37.650	35.511	73.161	
10.	45-49	33.535	33.260	66.795	
11.	50-54	29.429	29.573	59.002	
12.	55-59	25.589	26.613	52.202	
13.	60-64	21.657	22.238	43.895	
14.	65-69	15.826	16.904	32.730	76.828
15.	70-74	10.194	11.612	21.806	
16.	70+	9.551	12.741	22.292	
	Jumlah 2024	511.671	495.713	1.019.006	

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2025

Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang positif karena hal tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan karena jika penduduk usia tua tersebut semakin banyak maka akan semakin meningkatkan angka beban ketergantungan.



b. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

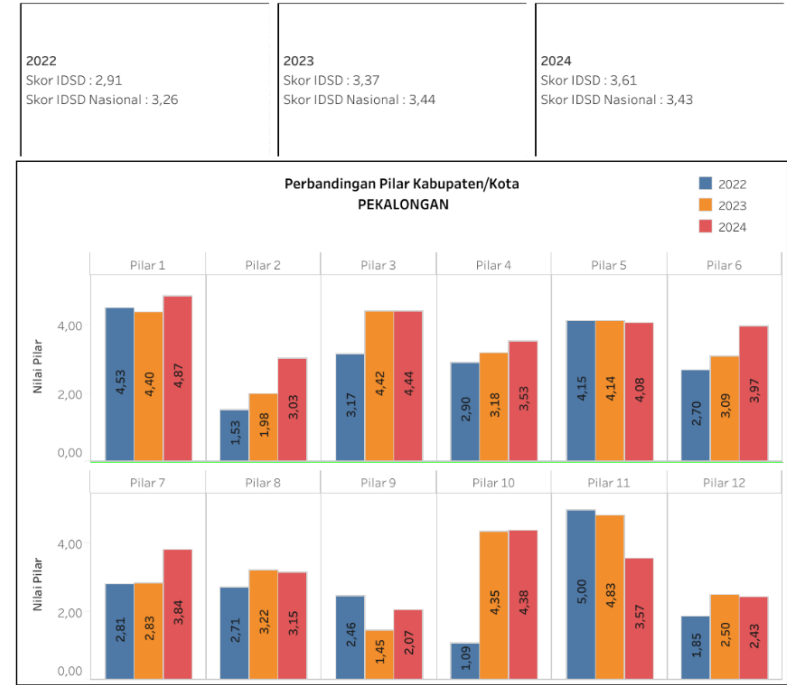
1). Kapabilitas Inovasi

Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), **Kapabilitas Inovasi** merupakan indikator pembentuk **Pilar 12** dari **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2023 sebagai salah satu instrumen yang mengukur produktivitas daerah-daerah di seluruh Indonesia. IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten /kota yang dilakukan BRIN dengan update data dari walidata kementerian dan lembaga pusat. Pengukurannya menggunakan konsep dan metode pengukuran yang mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index (GCI)* dari *World Economic Forum (WEF)* dengan penyesuaian sesuai konteks daerah di Indonesia.

Komponen IDSD 2023 terdiri dari 4 Komponen yang dibagi menjadi 12 pilar. Masing-masing pilar terbagi atas sejumlah indikator, dengan total indikator sebanyak 63 untuk Provinsi, dan 48 untuk Kabupaten/ Kota.

Kapabilitas Inovasi level Kabupaten/Kota antara lain keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merk dagang. Kapabilitas inovasi menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan proses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi.

Bapperida Kabupaten Pekalongan menunjukkan komitmennya dalam memanfaatkan data IDSD sebagai rujukan penting dalam perumusan kebijakan. Adapun skor IDSD Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar **3,61**, naik dari skor tahun 2023 yang lalu,**3,37**. Sedangkan tahun 2024 IDSD Nasional sebesar 3,43. **Kapabilitas Inovasi (Pilar 12)** sedikit turun dari **2,50** di Tahun 2023 menjadi **2,43** di Tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025

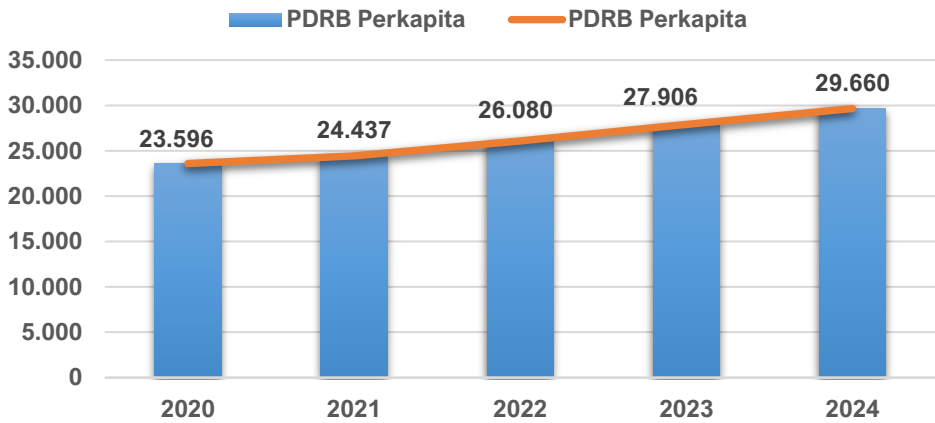
Gambar 2.77. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2024



2). PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi di daerah tersebut. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun.

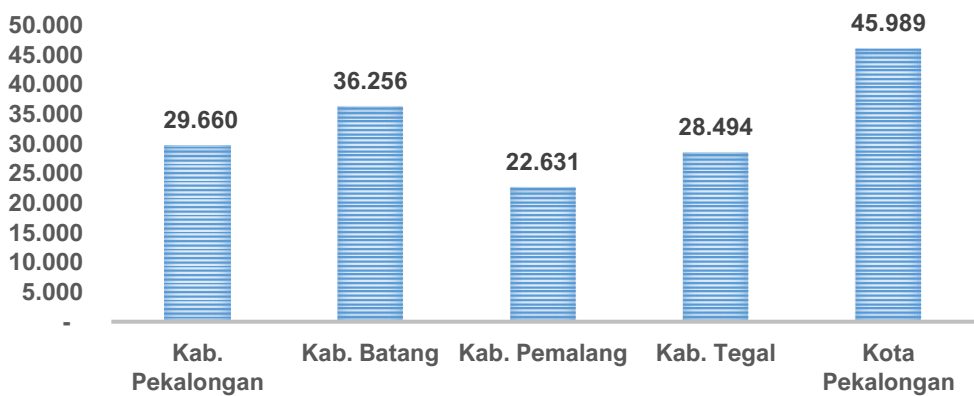
Nilai PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan dari tahun 2020-2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2024 PDRB per kapita tercatat sebesar 29,66 juta rupiah mengalami kenaikan dari 27,91 juta rupiah di tahun 2023. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah; 2025 *angka sementara; **angka sangat sementara

Gambar 2.78. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Sedangkan capaian PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah; 2025 *angka sementara *angka sangat sementara

Gambar 2.79. PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2024

Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar pada tahun 2024, PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan mencapai 29,66 juta rupiah lebih baik dari Kabupaten Pemalang sebesar 22,63 juta rupiah dan Kabupaten Tegal sebesar 28,49 juta rupiah, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Batang sebesar 36,26 juta rupiah dan Kota Pekalongan sebesar 45,99 juta rupiah

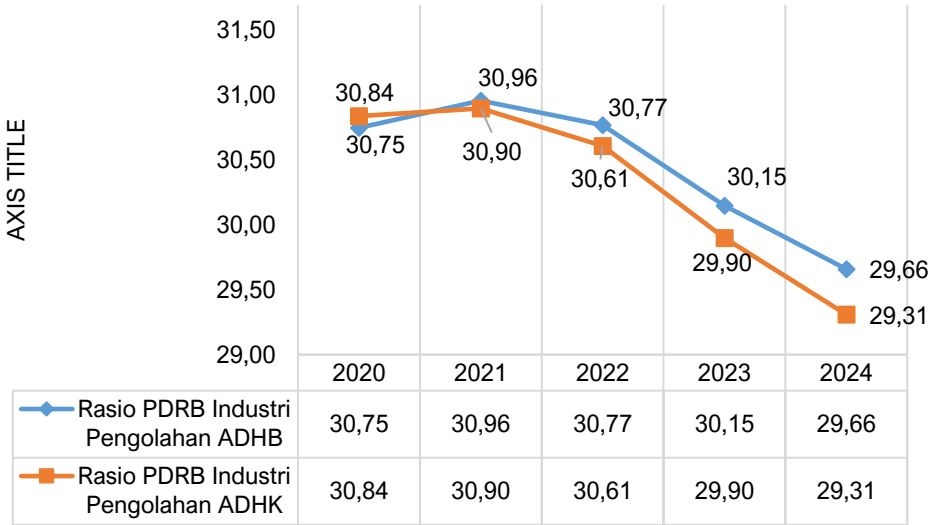


3). Rasio PDRB Industri Pengolahan

Berdasarkan data BPS, Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.

Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Pekalongan mempunyai peranan yang sangat penting dalam struktur perekonomian Kabupaten Pekalongan dengan pertumbuhan mencapai 2,70 persen di Tahun 2023. Kabupaten Pekalongan sebagai sentra industri kain batik, memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB ADHB, yaitu sebesar 30,15 persen di Tahun 2023 angka ini menurun dari 31,07 persen di tahun 2019. Sedangkan Rasio PDRB Industri Pengolahan ADHK sebesar 29,90 di Tahun 2023 juga menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 31,49.

Selengkapnya Rasio PDRB Industri Pengolahan ADHB dan ADHK Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan; 2025

Gambar 2.80. Rasio PDRB Industri Pengolahan ADHB dan ADHK Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

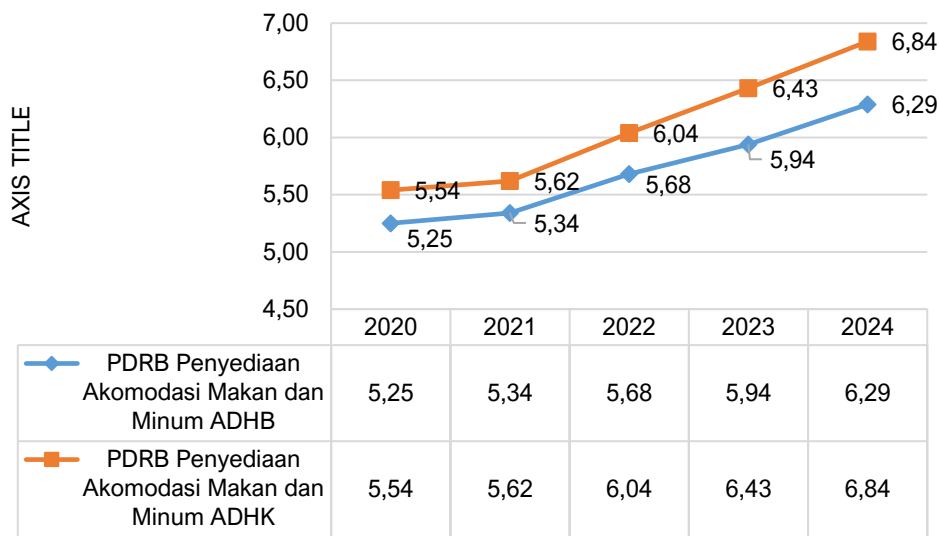
4). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Berdasarkan data BPS, Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum adalah persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi : penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB, *ceteris paribus*-. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum di Kabupaten Pekalongan merupakan **sektor tertinggi** penyumbang angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar **11,80 persen** sedikit melambat bila dibandingkan tahun 2023 sebesar **11,88** persen. Beberapa faktor penyebab adalah merebaknya bisnis makanan dan penyediaan akomodasi di Kabupaten Pekalongan. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ADHB sebesar 6,29 di Tahun 2024 naik dibandingkan tahun 2020 sebesar 5,25. Sedangkan



Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ADHK sebesar 6,84 di Tahun 2024 naik dibandingkan tahun 2020 sebesar 5,54. Selengkapnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ADHB dan ADHK Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan; 2025

Gambar 2.81. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ADHB dan ADHK Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

5). Rasio Kewirausahaan Daerah

Berdasarkan data Sakernas BPS, Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Pekalongan ditargetnya untuk **Tahun 2025** sebesar **4,66**.

6). Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Berdasarkan (1)Volume usaha koperasi daerah: Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi dan UKM; dan (2) PDRB : PDRB Seri 2010, BPS, Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Formulasi Perhitungan : (Volume Usaha Koperasi Daerah/PDRB ADHB)x100%

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Tahun 2024 sebesar 0,94 lebih besar dari tahun 2020 sebesar 0,97. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah



tersebut. Selengkapnya Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.57.
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Volume Koperasi	Juta Rupiah	179.498,00	179.498,00	134.980,07	196.932,90	266.578,01
2	PDRB Menurut harga berlaku	Juta Rupiah	22.803.192,93	24.030.302,70	25.998.888,90	28.112.002,07	28.386.771,51
3	PDRB Menurut harga konstan	Juta Rupiah	16.047.511,77	16.615.065,66	17.463.415,80	18.361.079,36	19.441.348,36
4	Persentase Volume Koperasi terhadap PDRB berlaku	Persen	0,79	0,75	0,52	0,70	0,94

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan; 2025

7). Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 779,30 ribu orang, naik sebanyak 9,81 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 595,24 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 184,07 orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 575,60 ribu orang penduduk bekerja dan 19,64 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah Angkatan kerja meningkat sebanyak 53,05 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 51,01 ribu orang, sementara jumlah pengangguran bertambah sebanyak 2,04 ribu orang.

Perbandingan antara jumlah penduduk pengangguran dengan seluruh angkatan kerja atau yang disebut sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan yang relatif rendah. Pada tahun 2022, TPT Kabupaten Pekalongan sebesar 3,23 persen, naik tipis di tahun 2023 menjadi 3,25 persen dan yang terakhir naik menjadi 3,30 persen di tahun 2024. Pada periode yang sama, TPT menurut jenis kelamin mengalami fluktuasi. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Pekalongan Agustus 2022–Agustus 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58.
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Pekalongan
Agustus 2022–Agustus 2024

No	Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2023–Ags 2024
		ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang
1.	Penduduk Usia Kerja (PUK)	686,27	769,49	779,30	9,81
2.	Angkatan Kerja	483,10	542,19	595,24	53,05
	• Bekerja	467,51	524,58	575,60	51,01
	• Pengangguran	15,59	17,61	19,64	2,04



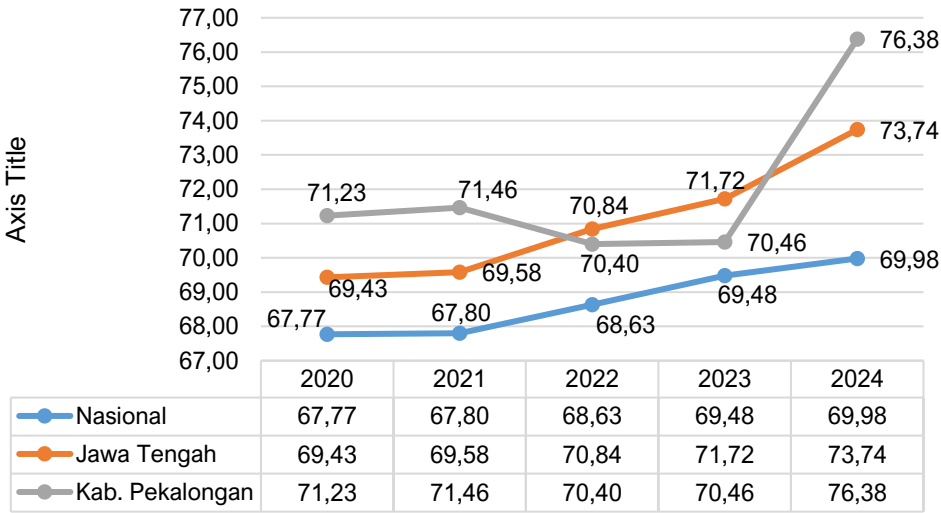
No	Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2023–Ags 2024
		ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang
3.	Bukan Angkatan Kerja	203,17	227,30	184,07	-43,24
		persen	persen	persen	Persen poin
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,23	3,25	3,30	0,05
	• Laki-Laki	3,95	3,55	3,95*	0,40
	• Perempuan	2,21	2,78	2,49	-0,29
		persen	persen	persen	Persen poin
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,40	70,46	76,38	5,92
	• Laki-Laki	83,10	84,29	87,33	3,04
	• Perempuan	58,01	56,27	65,13	8,86

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas); 2020-2024
Catatan: *) Relative Standard Error (RSE) sebesar 25,20%, yang berarti nilai estimasi masih dapat digunakan namun perlu kehati-hatian.
RSE menunjukkan seberapa besar presisi nilai yang diestimasi dengan nilai yang sebenarnya (populasi)

8). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sejak Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 76,38 persen, naik 5,92 persen poin dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Secara absolut, jumlah penduduk bukan angkatan kerja mengalami penurunan sebanyak 43,24 ribu orang.

Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kab. Pekalongan, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas); 2020-2024

Gambar 2.82. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, TPAK Kabupaten Pekalongan pada 2024 sebesar 76,38 persen turun dibandingkan dengan TPAK 2023 sebesar 70,46 persen. Hal ini mengindikasikan Semakin naik TPAK menunjukkan bahwa semakin naik pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.



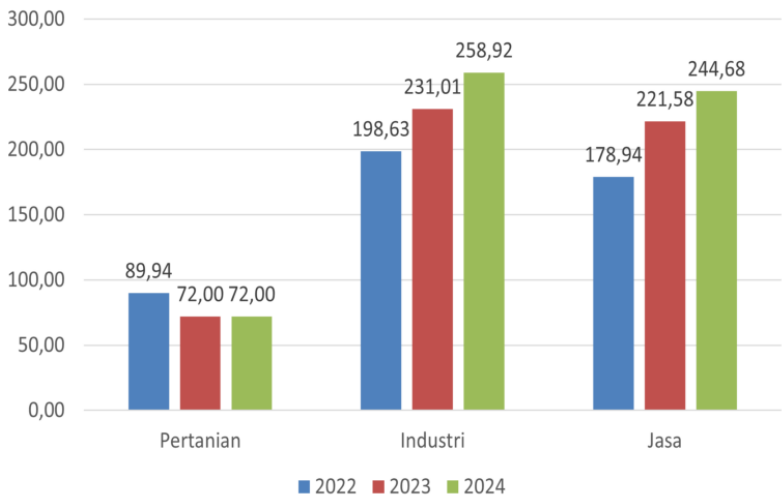
a). Karakteristik Penduduk Bekerja

Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan usaha dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

(1). Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan hasil Sakernas tiga tahun terakhir, industri menjadi lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak. Penyerapan tenaga kerja yang besar di sektor industri sejalan dengan kontribusi sektor industri pengolahan yang besar terhadap ekonomi Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, lapangan usaha pertanian konsisten menjadi lapangan usaha dengan jumlah penduduk bekerja paling sedikit.

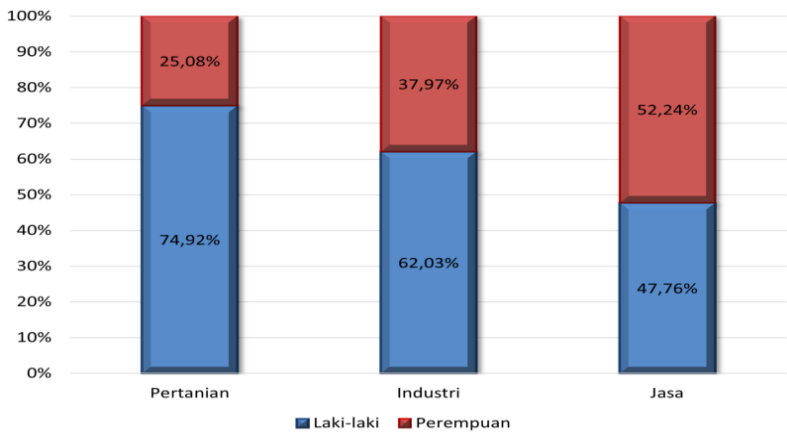
Dilihat dari kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja di lapangan usaha pertanian. Pada tahun 2022, pekerja sektor pertanian tercatat sebesar 89,94 ribu orang. Namun, pada 2023 dan 2024, angkanya menurun cukup drastis menjadi 72,00 ribu orang. Sementara itu, lapangan usaha industri dan jasa justru terus mengalami peningkatan. Dimana pekerja sektor industri mengalami peningkatan yang signifikan dari 198,63 ribu orang pada 2022 menjadi 231,01 ribu pada 2023 dan naik kembali menjadi 258,92 ribu orang pada 2024. Selanjutnya, sektor jasa menunjukkan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor jasa , meningkat dari 178,94 ribu orang pada 2022 menjadi 221,58 ribu pada 2023, kemudian mencapai 244,68 ribu pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa juga menjadi bagian penting dalam ekonomi Kabupaten Pekalongan dan berkontribusi besar terhadap peluang kerja dan aktivitas ekonomi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kab. Pekalongan, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas); 2020-2024

Gambar 2.83. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Agustus 2022 – Agustus 2024 (ribu orang)

Persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin, terlihat bahwa jumlah pekerja laki-laki di sektor pertanian hampir tiga kali lipat jumlah pekerja perempuan. Artinya, keterlibatan pekerja perempuan pada sektor pertanian tergolong rendah. Sementara itu, 37,97 persen pekerja sektor industri merupakan pekerja perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Pola yang berbeda justru terdapat pada sektor jasa, meski tipis, perempuan mendominasi sebesar 52,24 persen dari total pekerja sektor jasa di Kabupaten Pekalongan. Sektor jasa meliputi lapangan usaha perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa informasi dan telekomunikasi, keuangan, kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintah, kesenian dan jasa lainnya



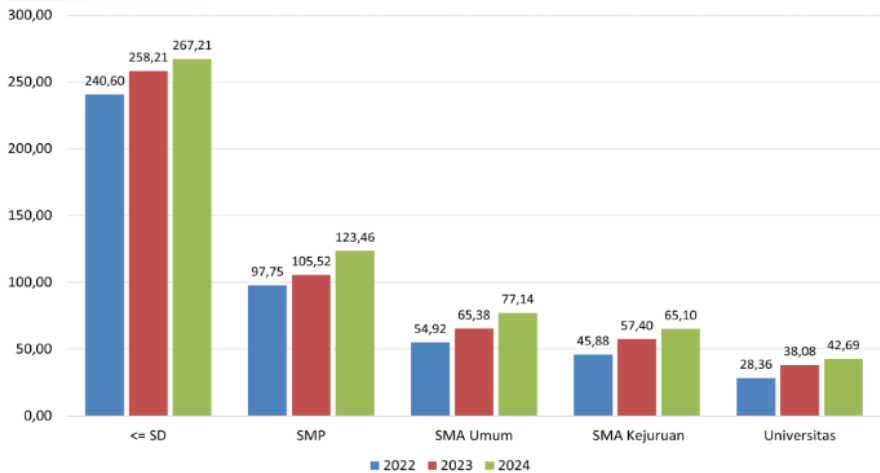
Sumber : BPS Kab. Pekalongan, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas); 2020-2024

Gambar 2.84. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Agustus 2024 (persen)

(2). Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pada tahun 2022-2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) dan secara berturut-turut diikuti oleh kategori pekerja lulusan SMP, SMA umum, SMA Kejuruan dan Universitas (Diploma dan Sarjana). Jumlah pekerja dengan pendidikan SD ke bawah menunjukkan peningkatan, berturut-turut dari 240,60 ribu pada 2022 menjadi 258,21 ribu pada 2023 dan mencapai 267,21 ribu pada 2024. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih berasal dari kelompok pendidikan dasar, yang mencerminkan tantangan dalam upaya peningkatan pendidikan tenaga kerja.

Tidak hanya kategori pendidikan dasar, peningkatan jumlah tenaga kerja tersebar secara merata pada seluruh jenjang pendidikan. Terlihat dari jumlah tenaga kerja dengan Pendidikan SMP yang juga mengalami peningkatan dari 97,75 ribu pada 2022 menjadi 105,52 ribu pada 2023 dan kemudian meningkat lebih lanjut menjadi 123,46 ribu pada 2024. Jumlah pekerja dari latar belakang SMA Kejuruan meningkat dari 45,88 ribu pada 2022 menjadi 57,40 ribu pada 2023 dan mencapai 65,10 ribu pada 2024. Pekerja dengan latar belakang pendidikan universitas pun menunjukkan peningkatan, dari 28,36 ribu pada 2022, menjadi 38,08 ribu pada 2023, dan mencapai 42,69 ribu pada 2024.



Sumber : BPS Kab. Pekalongan, Sakernas; 2020-2024

Gambar 2.85. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2022 – Agustus 2024 (ribu orang)



c. Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi, penerapan transisi energi.

Ekonomi hijau dapat didukung dengan energi terbarukan melalui berbagai upaya, termasuk pengembangan sumber energi bersih, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan efisiensi energi. Indonesia, misalnya, berkomitmen untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dan mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060. Kabupaten Pekalongan menunjukkan komitmen terhadap pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui keberadaan berbagai infrastruktur EBT yang cukup beragam. Infrastruktur yang paling mendominasi adalah PLTS SHS (Solar Home System) sebanyak 408 unit dengan kapasitas 20 kWp, menandakan fokus pada pemenuhan energi listrik rumah tangga di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional. Selain itu, terdapat 300 unit PJUTS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya) dengan kapasitas 96.000 watt yang mendukung penerangan wilayah publik secara mandiri dan berkelanjutan. Potensi air juga dimanfaatkan melalui PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) sebanyak 3 unit dengan kapasitas 6.990 kW serta PLTMH (Mikrohidro) sebanyak 25 unit berkapasitas 625 kVA.

Pemanfaatan energi surya juga diterapkan melalui PLTS Rooftop sebanyak 4 unit berkapasitas 121 kWp, serta pemanfaatan limbah melalui 4 unit biogas dengan kapasitas 72 m³. Namun demikian, beberapa potensi energi seperti PLTA (skala besar), PLTS *Ground Mounted*, panas bumi, dan PLTSa (berbasis limbah) belum dimanfaatkan, menunjukkan ruang pengembangan yang masih terbuka. Secara keseluruhan, infrastruktur EBT di Kabupaten Pekalongan telah berkembang cukup baik, terutama di sektor energi surya dan hidro skala kecil, namun masih terdapat peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut pada sumber energi terbarukan lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



No.	Infrastruktur EBT	Jumlah Unit	Kapasitas	Satuan
1	Biogas	4	72	m³
2	PLTA	-	-	kW
3	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	3	6990	kW
4	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	25	625	kVa
5	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) <i>Solar Home System (SHS)</i>	408	20	kWp
6	PLTS <i>Ground Mounted</i>	-	-	kWp
7	PLTS Rooftop	4	121	kWp
8	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	300	96000	watt
9	Panas Bumi	-	-	-
10	Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.86. Banyaknya Infrastruktur Energi Baru Terbarukan Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 (PLTM Desa Bantar Kulon, Kec. Lebak Barang)



d. Transformasi Digital

1). Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja.

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 cenderung mengalami kenaikan dari 51,95% di Tahun 2020 meningkat menjadi 64,83% di Tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.87. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

e. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1). Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Berdasarkan BPS, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB.

Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.



Tabel 2.59.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

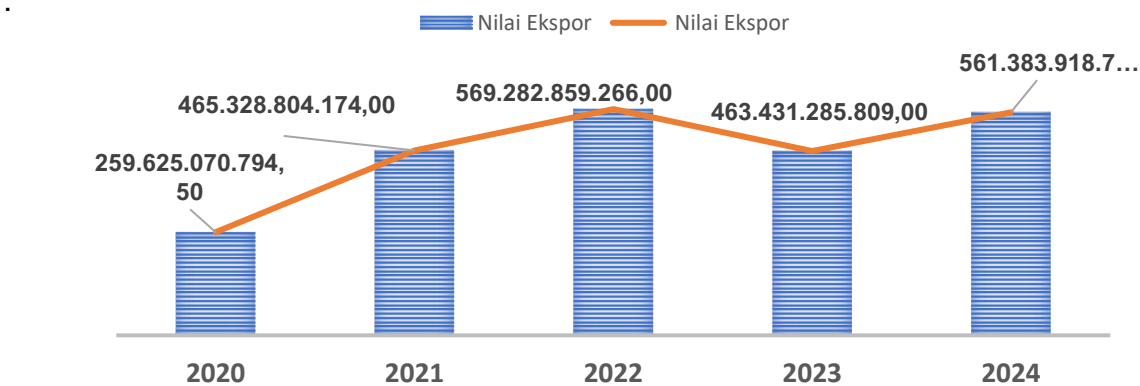
Tahun	PMTB		PDRB		Persentase	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2020	5.237.970,53	3.566.118,69	22.803.190,50	16.047.511,77	22,97	22,22
2021	5.612.050,32	3.784.896,00	24.030.300,26	16.615.065,66	23,35	22,78
2022	6.061.161,91	3.963.763,81	25.962.588,93	17.463.415,80	23,35	22,70
2023	6.731.381,45	4.312.666,77	28.111.688,43	18.360.813,76	23,95	23,49
2024	7.684.363,12	4.677.383,39	30.223.561,01	19.283.063,76	25,43	24,26

Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2025

Dari tabel di atas Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB) meningkat dari 22,97% di Tahun 2020 menjadi 25,43% di Tahun 2024. Sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHK) juga meningkat dari 22,22% di Tahun 2020 menjadi 24,26% di Tahun 2024. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan investasi dalam bentuk aset tetap, seperti bangunan, mesin, dan peralatan, yang digunakan dalam proses produksi. kenaikan PMTB merupakan indikator positif bagi perekonomian karena mencerminkan adanya peningkatan investasi yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing.

2). Ekspor Barang dan Jasa

Jumlah nilai Ekspor Kabupaten Pekalongan dari tahun 2020-2024 fluktuatif. Pada tahun 2024 nilai ekspor di Kabupaten Pekalongan mencapai US\$ 561,38 milyar. Tahun 2022 adalah tahun dimana nilai ekspor berada di titik tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar US\$ 569,28 milyar. Rata-rata nilai ekspor Kabupaten Pekalongan selama 2020-2024 per tahunnya adalah US\$ 351,55 milyar.



Gambar 2.88. Nilai Ekspor Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

f. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1). Persentase Desa Mandiri

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

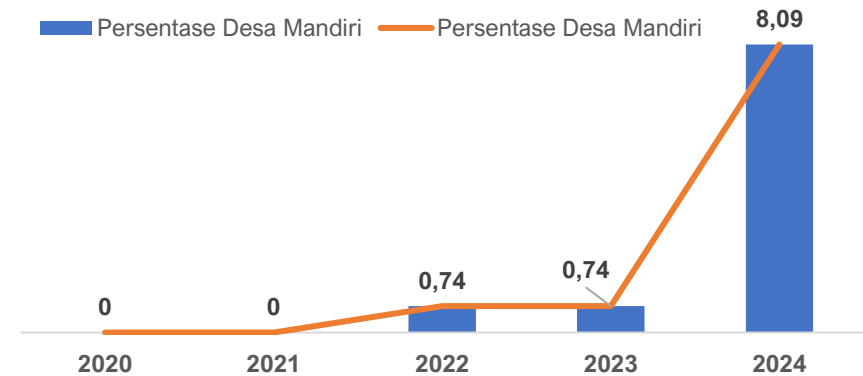


Semakin tingginya jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat pembangunan desa yang semakin baik yang didukung dengan komponen pendukung yang termuat dalam 6 (enam) dimensi pengukurannya. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.60.
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Kondisi Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Desa Mandiri	0	0	2	2	22
2.	Jumlah Desa	272	272	272	272	272
	Persentase Desa Mandiri	0,00	0,00	0,74	0,74	8,09

Sumber Dinas PMD Kab. Pekalongan, 2025



Sumber Dinas PMD Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.89. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Dari tabel dan gambar di atas, jumlah desa mandiri di Kabupaten Pekalongan mengalami kenaikan dari 2 desa di Tahun 2022 menjadi 22 desa di Tahun 2024 dari jumlah total 272 desa. 22 desa mandiri di kabupaten pekalongan meliputi :

Tabel 2.61.
Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

No.	Desa	Kecamatan
1.	Kandangserang	Kandangserang
2.	Paninggaran	Paninggaran
3.	Doro	Doro
4.	Karangsari	Karanganyar
5.	Kulu	Karanganyar
6.	Sinangohprendeng	Kajen
7.	Gandarum	Kajen
8.	Tanjungkulon	Kajen
9.	Tanjungsari	Kajen
10.	Gejlig	Kajen
11.	Kebonagung	Kajen
12.	Kalipancur	Bojong
13.	Sumurjomblangbogo	Bojong
14.	Duwet	Bojong
15.	Bojongminggir	Bojong
16.	Wiroditan	Bojong
17.	Karangsari	Bojong
18.	Wonopringgo	Wonopringgo
19.	Pengadentengah	Wonopringgo
20.	Wonoyoso	Buaran



No.	Desa	Kecamatan
21.	Pakumbulan	Buaran
22.	Kertijayan	Buaran

Sumber Dinas PMD Kab. Pekalongan, 2025

Mulai Tahun 2025 dilaksanakan **transisi** dari penggunaan indikator **Indeks Desa Membangun (IDM)** menjadi **Indeks Desa** sebagai indikator tunggal dalam pengukuran pembangunan desa di Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan data pembangunan desa yang sebelumnya menggunakan beberapa indeks, seperti IDM dan Indeks Pembangunan Desa.

2). **Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi :

- (1) Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- (2) Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

- (1) Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat;
- (2) Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m²;
- (3) Memiliki akses air minum dan sanitasi layak

Formulasi Perhitungan menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).

$$PHLTB \text{ (proksi)} = \frac{JRTHLTB \text{ (proksi)}}{(JRT \times 100)}$$

- PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
- RTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;
- JRT: Jumlah rumah tangga



Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.90. **Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024**



Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak mengalami kenaikan dari **74,49%** di Tahun 2020 menjadi **84,17%** di Tahun 2024. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.

3). **Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota**

Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap merupakan persentase dari panjang jalan kabupaten/kota yang memenuhi kategori **kondisi baik dan sedang** terhadap total panjang jalan kabupaten/kota. Perhitungan kondisi jalan mengacu pada SE Menteri 01/ SE/2023, SE Dirjen No 22/ SE/Db/ 2021, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Provincial/*Kabupaten Road Management System* di Provinsi Jawa Tengah, pengambilan data kondisi jalan dilakukan dengan metode visual dan IRI, analisa hasil penilaian kondisi jalan tersebut diperoleh dari aplikasi PKRMS. Berdasarkan status jalan Kabupaten Pekalongan di tahun 2023 mempunyai 9,20 km Jalan Nasional, 85,75 km jalan provinsi dan 697,90 km jalan kabupaten. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62.
Panjang Jalan Kabupaten Pekalongan berdasarkan
Kewenangan Tahun 2020-2024

Tahun	Kewenangan (Km)			
	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Total
2020	9,20	86,39	669,90	765,49
2021	9,20	84,89	697,90	791,99
2022	9,20	84,89	697,90	791,99
2023	9,20	85,75	697,90	792,85
2024	9,20	85,75	697,90	792,85

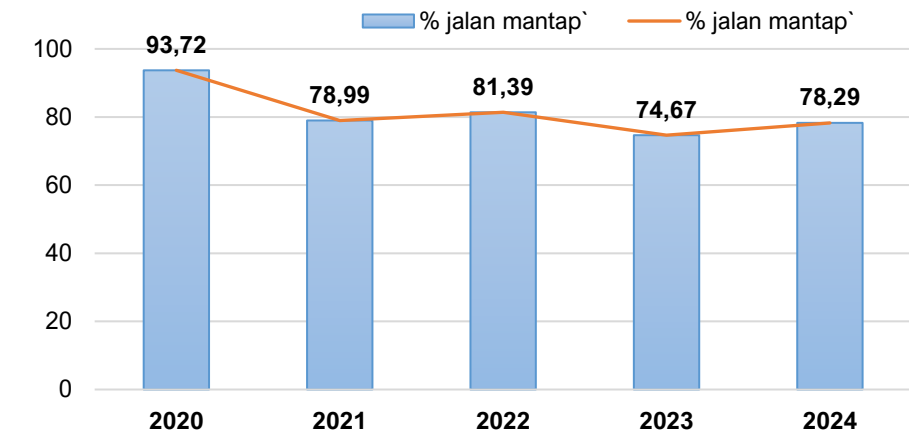
Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan; 2025

Berdasarkan kondisi fisiknya, panjang jalan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 yaitu 313.275 km dalam kondisi baik, 233.091 km kondisi sedang atau sebesar **78,29 persen** atau naik di dibandingkan tahun 2023 dengan panjang jalan yang baik sebesar 288,992 km dan jalan sedang sebesar 232,135 km atau sebesar 74,67 persen dari jumlah total seluruh panjang jalan sebesar 697.896 km. Kenaikan persentase kondisi jalan mantap menunjukkan pembangunan infrastruktur jalan mendapat perhatian yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kondisi Jalan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.63.
Persentase Jalan Mantap Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Kondisi Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Baik (km)	514,548	414,211	432,632	288,992	313,275
2.	Sedang (km)	113,288	137,054	135,383	232,135	233,091
3.	Rusak ringan (km)	13,132	53,154	53,141	79,455	60,573
4.	Rusak Berat (km)	28.927	93,477	76,74	97,314	90,957
	Total (km)	669,895	697,896	697,896	697,896	697,896
	% Jalan Mantap	93,72	78,99	81,39	74,67	78,29

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2025



Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.91. Persentase Jalan Mantap Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Adanya pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Pekalongan difokuskan untuk mendukung program nasional pembangunan jalan tol trans Jawa, yang menghubungkan dua kota terbesar yaitu Jakarta dan Surabaya. Hal ini didukung pula adanya exit toll di Kecamatan Bojong sehingga mempermudah aksesibilitas menuju ibukota Kabupaten Pekalongan di Kecamatan Kajen maupun wilayah lainnya.



Gambar 2.92. Jaringan Jalan Tol Trans Jawa di Wilayah Kabupaten Pekalongan



Gambar 2.93. Exit Tol Bojong Kabupaten Pekalongan



4). Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota.

Pemenuhan minimal perlengkapan jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada jalan kabupaten/kota minimal sebesar 60% dari total kebutuhan ideal untuk masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 (satu) ruas jalan. Jenis dan ruang lingkup rambu, marka, guardrail dan APILL sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Formulasi Perhitungan ;

Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota = $\frac{\text{Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan}}{\text{Jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota}} \times 100\%$

Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 kurang lebih sekitar $(20/697,896 \text{ km}) \times 100 \%$ sehingga capainnya adalah **2,87 %**.

Indikator persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan (fasilitas keselamatan) jalan secara tuntas di 1 ruas jalan untuk setiap jenis perlengkapan jalan yang dimungkinkan berbeda- beda kebutuhannya (jenis dan/atau jumlahnya) pada setiap ruas jalannya.

Hal ini berkontribusi untuk meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menjadi indikator ditingkat provinsi (Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan).

5). Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) untuk daerah irigasi kewenangan kabupaten wajib dilaksanakan setiap tahun, hal ini berdasarkan atas amanat dari Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Sedangkan untuk pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) wajib dilaksanakan setidaknya setiap 5 tahun, hal ini berdasarkan atas amanat dari Permen PUPR Nomor: 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi.

ePAKSI (Eletronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) (merupakan instrumen yang diperlukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas PUTR Kabupaten Pekalongan dalam pengelolaan aset irigasi dan inventarisasi kondisi sistem/jaringan irigasi dimana akan menjadi



dasar dalam penentuan kegiatan perencanaan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi permukaan khususnya pada Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Pekalongan.

Penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi digambarkan dalam indeks sebagai berikut :

Nilai indeks antara : 80 – 100 Kinerja Sangat Baik

Nilai indeks antara : 70 – 79 Kinerja Baik

Nilai indeks antara : 55 – 69 Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian

Nilai indeks antara : < 54 Kinerja Jelek dan Perlu Perhatian.

Indikator ini mengukur kinerja irigasi guna mendukung ketahanan pangan. Formulasi Perhitungan Mengacu ePAKSI Ditjen SDA Kementerian PUPR, penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi maka ditetapkan bobot maksimal penilaian setiap Aspek dan Indikatornya sebagai berikut :

- 1) Aspek Kondisi Prasarana Fisik (bobot maksimal 45)
- 2) Aspek Produktifitas Tanam (bobot maksimal 15)
- 3) Aspek Sarana Penunjang (bobot maksimal 10)
- 4) Aspek Organisasi Personalia (bobot maksimal 15)
- 5) Aspek Dokumentasi (bobot maksimal 5)
- 6) Aspek Kondisi P3A yang mencakup indikator (bobot maksimal 10)

Luas Baku sawah di Kabupaten Pekalongan sebesar 519.266 Ha dengan jumlah daerah irigasi (DI) sebanyak 11.401 buah. Indeks Kinerja Sistem Irigasi daerah irigasi kewenangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar **49,87%** dengan jumlah daerah irigasi kewenangan kabupaten sebesar 339 buah.

g. Stabilitas Ekonomi Makro

1). Return on Aset (ROA) BUMD

Berdasarkan data Laporan Keuangan BUMD serta BPS, *Return On Asset (ROA)* adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset (ROA)* dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.

Formulasi Perhitungan : (Agregat laba bersih seluruh BUMD / Agregat aset seluruh BUMD) x 100%

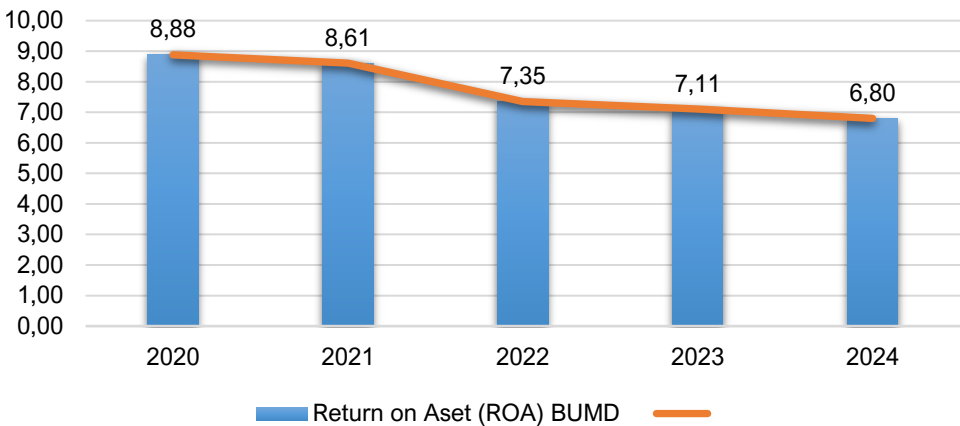
Return on Aset (ROA) BUMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dihitung berdasarkan 1 (satu) BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yaitu PDAM Tirta Kajen.



Tabel 2.64.
Return on Aset (ROA) BUMD
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024*
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Agregat laba bersih BUMD	3.274.521.728	3.663.462.317	3.835.033.247	4.192.927.388	4.369.413.994
2	Aset BUMD	36.890.953.490	42.549.990.095	52.205.969.740	59.002.602.828	64.236.562.901
Return on Aset (ROA) BUMD		8,88	8,61	7,35	7,11	6,80

Sumber : Bag. Perekonomian Setda Kab. Pekalongan, PDAM Tirta Kajen; 2025 *unaudite



Sumber : Bag. Perekonomian Setda Kab. Pekalongan, PDAM Tirta Kajen; 2025 *unaudite

Gambar 2.94. Return on Aset (ROA) BUMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

2). Disparitas Harga

Berdasarkan data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. 13 Komoditas Bapok (Barang Pokok) antara lain beras medium, gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, daging sapi paha belakang, daging ayam ras, telur ayam ras, tepung terigu, kedelai impor, cabe merah keriting, cabe rawit merah, bawang merah, bawang putih impor kating dan ikan kembung.

Disparitas harga Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Tengah tahun 2020-2024 dalam rentang angka ± 10 persen dengan demikian semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten/Kota dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antarwilayah. Selemngkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65.
Disparitas Harga
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Harga komoditas di kabupaten					
	(1). Beras Medium	9.027	9.195	9.291	11.304	13.165
	(2). Gula Pasir	13.612	12.244	13.395	14.381	16.844



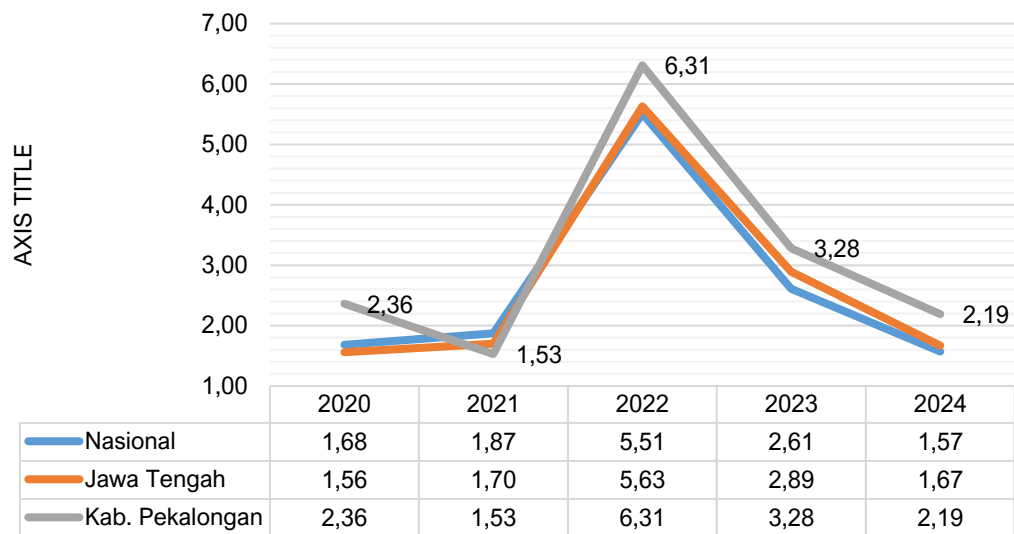
No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	(3). Minyak Goreng Kemasan Sederhana	11.970	15.042	15.022	13.618	15.570
	(4). Daging Sapi Paha Belakang	110.447	112.092	125.602	133.248	137.592
	(5). Daging Ayam Ras	33.826	33.585	37.395	38.115	39.418
	(6). Telur Ayam Ras	22.815	22.053	25.725	27.436	27.108
	(7). Tepung Terigu	8.413	9.138	11.227	12.249	12.302
	(8). Kedelai Impor	8.258	10.222	12.364	11.829	10.116
	(9). Cabe Merah Keriting	27.044	30.877	42.494	39.012	40.903
	(10). Cabe Rawit Merah	30.139	48.006	44.384	47.511	41.988
	(11). Bawang Merah	31.465	25.799	32.533	29.902	31.831
	(12). Bawang Putih Impor Kating	28.635	26.342	27.624	33.138	40.125
	(13). Ikan Kembung	73.181	73.998	73.591	52.536	45.981
2	Harga komoditas di provinsi					
	(1). Beras Medium	9.815	9.516	9.903	11.744	13.093
	(2). Gula Pasir	13.925	12.384	13.529	14.278	16.949
	(3). Minyak Goreng Kemasan Sederhana	12.033	15.179	15.412	14.149	15.820
	(4). Daging Sapi Paha Belakang	115.314	119.075	128.876	132.963	132.062
	(5). Daging Ayam Ras	31.872	33.227	34.921	35.454	35.833
	(6). Telur Ayam Ras	23.226	22.210	25.749	27.657	27.225
	(7). Tepung Terigu	8.469	8.638	10.579	11.688	11.608
	(8). Kedelai Impor	8.305	10.252	12.684	12.922	12.146
	(9). Cabe Merah Keriting	27.094	30.547	43.378	37.435	37.433
	(10). Cabe Rawit Merah	31.060	48.286	46.054	46.617	40.371
	(11). Bawang Merah	32.631	26.802	34.544	31.411	33.005
	(12). Bawang Putih Impor Kating	30.098	27.205	28.572	33.615	41.047
	(13). Ikan Kembung	58.816	65.751	65.957	64.826	61.623
	Disparitas Harga					
	(1). Beras Medium	-8,03	- 3,38	- 6,18	-3,74	0,55
	(2). Gula Pasir	- 2,25	- 1,13	- 0,99	0,72	- 0,62
	(3). Minyak Goreng Kemasan Sederhana	-0,52	- 0,90	-2,53	-3,75	-1,58
	(4). Daging Sapi Paha Belakang	-4,22	-5,86	- 2,54	0,21	4,19
	(5). Daging Ayam Ras	6,13	1,08	7,08	7,50	10,00
	(6). Telur Ayam Ras	-1,77	-0,71	-0,09	-0,80	-0,43
	(7). Tepung Terigu	-0,66	5,79	6,13	4,80	5,98
	(8). Kedelai Impor	-0,57	-0,30	-2,52	-8,45	-16,72
	(9). Cabe Merah Keriting	-0,19	1,08	-2,04	4,21	9,27
	(10). Cabe Rawit Merah	-2,97	-0,58	-3,63	1,92	4,01
	(11). Bawang Merah	-3,57	-3,74	-5,82	-4,80	- 3,56
	(12). Bawang Putih Impor Kating	-4,86	-3,17	- 3,32	-1,42	- 2,24
	(13). Ikan Kembung	24,43	12,54	11,57	-18,96	-25,38
	Rata-rata	0,07	0,06	- 0,38	- 1,74	-1,27

Sumber : sp2kp.kemendag.go.id, sihati (Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi); 2025

3). Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2020-2024 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 3±1 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Kabupaten Pekalongan sepanjang 2024 tercatat mencapai **2,19 persen (data inflasi Kota Tegal)** , lebih rendah dibanding dengan inflasi tahun 2023 yang sebesar 3,28 persen. Kenaikan beberapa komoditas seperti harga beras, cabai merah, rokok kretek filter, cabai rawit dan bawah putih, memberi andil terbesar terhadap inflasi di 2024.

Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.95. Tingkat Inflasi Kabupaten Pekalongan,Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

4). Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Berdasarkan BPS, SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PDRB adalah penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.

Formulasi Perhitungan : (Penerimaan pajak daerah / PDRB) x 100%

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

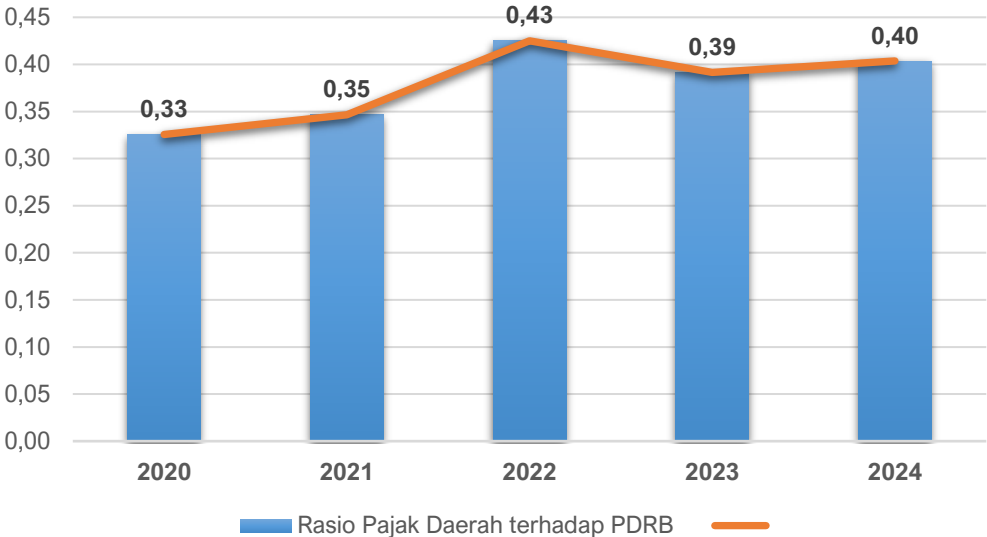
Tabel 2.66.
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022*	2023	2024
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pajak Daerah	74.247,14	83.272,78	110.344,25	110.054,65	121.974,84
2	PDRB ADHB	22.803.190,50	24.030.300,26	25.962.588,93	28.111.688,43	30.223.561,01



No	Indikator	2020	2021	2022*	2023	2024
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		0,33	0,35	0,43	0,39	0,40

Sumber : BPKD; BPS Kab. Pekalongan, 2025



Sumber : BPKD; BPS Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.96. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) tahun 2024 sebesar 0,40 persen naik dari Tahun 2020 sebesar 0,33 persen. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

5). Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Berdasarkan Total DPK pada bank Milik Kabupaten/Kota: Laporan Keuangan (Audited) Perbankan serta PDRB: BPS, Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.

Formulasi Perhitungan : (Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota dibagi PDRB) x 100% dengan meliputi 3 (tiga) bank yaitu :

- 1) PT. Bank Jateng
- 2) PT. BPR BKK Kab. Pekalongan (Perseroda)
- 3) PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)

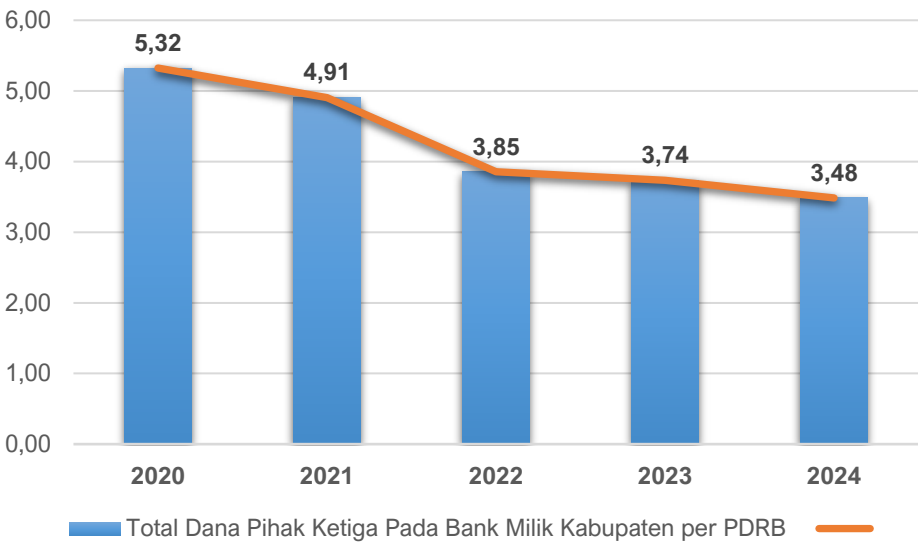


Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Pekalongan per PDRB (%) cenderung mengalami penurunan dari 5,32 persen di Tahun 2020 menjadi 3,48 persen di Tahun 2024. Hal ini menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan pada bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.67.
Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022*	2023	2024
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
1	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten	1.213.883,30	1.178.953,38	1.000.502,62	1.050.268,31	1.053.221,34
2	PDRB ADHB	22.803.190,50	24.030.300,26	25.962.588,93	28.111.688,43	30.223.561,01
Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB		5,32	4,91	3,85	3,74	3,48

Sumber : Bag. Perekonomian Setda; BPS Kab. Pekalongan, 2025



Sumber : Bag. Perekonomian Setda; BPS Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.97. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

6). Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Berdasarkan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota : Laporan Keuangan (Audited) Perbankan serta PDRB: BPS, Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota;

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang



dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

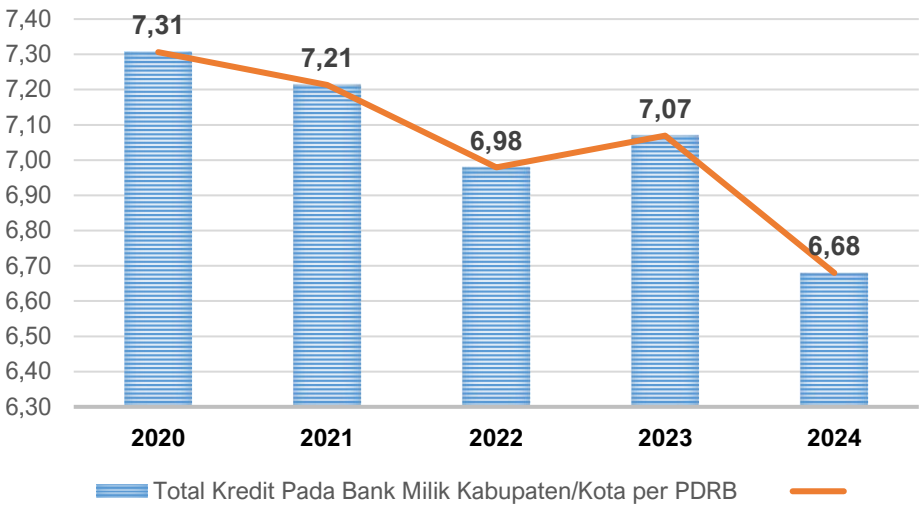
Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.

Formulasi Perhitungan : (Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB) x 100%

Tabel 2.68.
Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022*	2023	2024
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
1	Total Kredit Pada Bank Milik Kab.	1.666.056,64	1.733.274,97	1.811.937,65	1.987.218,33	2.018.900,29
2	PDRB ADHB	22.803.190,50	24.030.300,26	25.962.588,93	28.111.688,43	30.223.561,01
Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB		7,31	7,21	6,98	7,07	6,68

Sumber : Bag. Perekonomian Setda; BPS Kab. Pekalongan, 2025



Sumber : Bag. Perekonomian Setda; BPS Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.98. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Pekalongan per PDRB (%) cenderung mengalami penurunan dari 7,31 persen di Tahun 2020 menjadi 6,68 persen di Tahun 2024. Hal ini depenmenggambarkan semakin rendahnya tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut.



4. Aspek Pelayanan Umum

a. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi yang ada di daerah, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan tahun 2024 adalah 77,03 dengan kategori “BB”. Capaian ini lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 64,80 dengan kategori “B”. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69.
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	64,60	64,91	66,56	64,80	77,03
2.	Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	BB

Sumber :KemenPAN dan RB; 2024

2) Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah Instrumen untuk mengukur Reformasi Hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan system regulasi nasional. Dasar hukum pelaksanaan IRH yaitu :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 4) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;

Sebagai upaya mewujudkan IRH yang semakin baik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota telah menjadikan IRH sebagai salah satu indikator pencapaian dalam program RPJPD Tahun 2025-2045. Selanjutnya diharapkan keseluruhan penilaian IRH di Jawa Tengah baik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat semakin optimal guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya di area perundang-undangan.

Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:

- 1) Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%;



- 2) Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang Peraturan perundang-undangan yang berkualitas, dengan bobot 25%;
- 3) Kualitas re-regulasi atau de-regulasi Peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%;
- 4) Penataan database Peraturan perundang-undangan, dengan bobot 15%.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PPH-OT.03.03-331 tanggal 11 November 2024, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendapatkan **nilai IRH Tahun 2024 sebesar 98,42** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)** naik dibandingkan Tahun 2023 sebesar 56,32 dengan kategori C (Cukup).

Tabel 2.70.
Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	N/A	56.32	98,42
2.	Kategori	N/A	N/A	N/A	C (Cukup)	AA Istimewa

Sumber : Kemenkumham RI; 2025

3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.

Adapun Definisi Operasional (Kepmen PANRB No. 739 Th 2023): Instrumen Evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat) Domain:

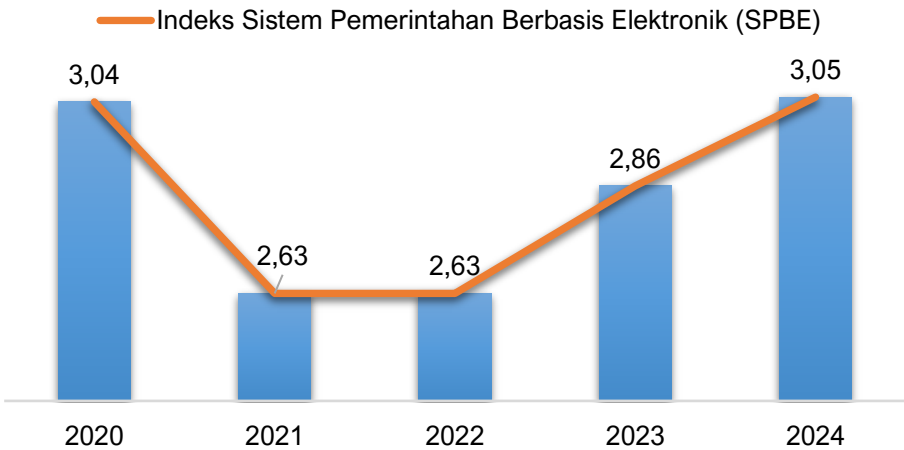
- 1) Domain Kebijakan Internal.
- 2) Domain Tata Kelola SPBE.
- 3) Domain Manajemen SPBE.
- 4) Domain Layanan SPBE.

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.71.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks SPBE	3,04	2,63	2,63	2,86	3,05
2.	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : KemenPAN dan RB RI; 2025



Sumber : KemenPAN dan RB RI; 2025

Gambar 2.99. Indeks SPBE Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Indeks SPBE Kabupaten Pekalongan cenderung naik dari 3,04 di Tahun 2020 menjadi 3,05 di Tahun 2024 dengan rata-rata predikat baik. Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan e Government memang dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sangat komitmen dalam penggunaan e-Government / SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggunakan media sosial, audio-visual dan aplikasi untuk menyapa masyarakat, membangun kesamaan persepsi pembangunan dengan perangkat daerah dan mengkomunikasikan pembangunan dengan masyarakat, memahami permasalahan pembangunan langsung dari masyarakat dan sekaligus eksekusinya, serta pemecahan aduan masalah pembangunan.

4) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Kementerian PANRB secara rutin melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) setiap tahun. Hasil dari PEKPPP ini adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) Instansi Pemerintah, dalam hal ini IPP Pemkab Pekalongan. Unit Lokus Evaluasi (ULE) merupakan Organisasi Pelayanan Publik yang dipilih oleh KemenPANRB untuk menjadi lokus PEKPPP. IPP dari ULE yang dipilih akan mewakili/menjadi IPP Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Tabel 2.72.
Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	3,95	4,13	4,26	3,95	4,29
2.	Kategori	B (Baik)	A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)	B (Baik)	A- (Sangat Baik)

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan; 2025

Pada Tahun 2020 capaian awal IPP sebesar **3,95 (Baik)** pada ULE DPMPTSP Naker dan Disdukcapil. Pada tahun 2021–2022, IPP meningkat menjadi **4,13** dan **4,26 (Sangat Baik/A-)** seiring dengan perbaikan kualitas layanan di DPMPTSP dan Disdukcapil. Sedangkan di Tahun 2023 IPP turun kembali ke **3,95 (Baik)**. Penurunan ini dipengaruhi oleh variasi kualitas pelayanan di ULE (Kecamatan Wiradesa, RSUD Kajen, dan Dinsos), khususnya terkait keterbatasan sarana prasarana, standar pelayanan yang belum merata, serta kapasitas SDM

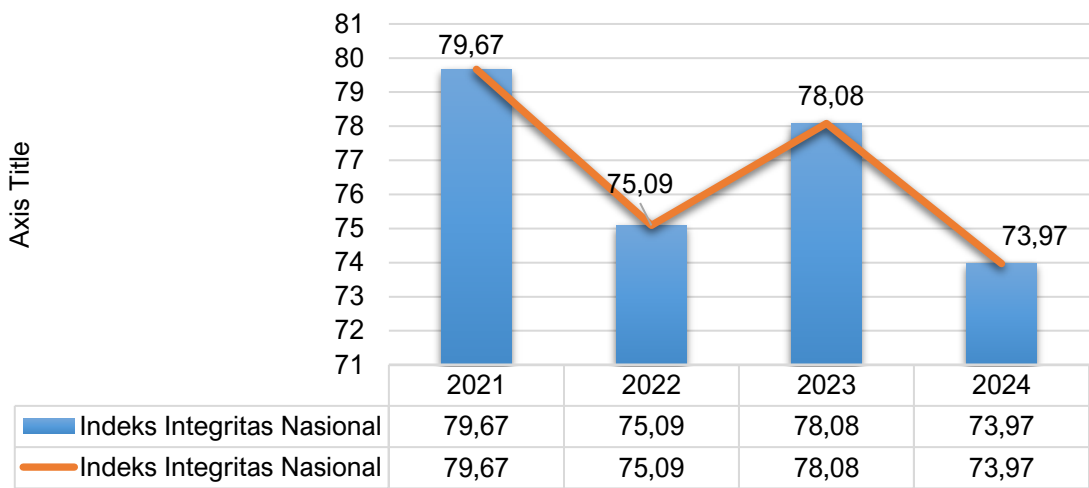


yang belum optimal. Untuk tahun 2024 IPP meningkat signifikan menjadi **4,29 (Sangat Baik/A)**, menunjukkan adanya perbaikan layanan di Disdukcapil, Dinsos, dan RSUD Kaje

5) Indeks Integritas Nasional

Berdasarkan Survey Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indeks Integritas Nasional merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Semakin tinggi nilai Indeks Integritas Nasional maka capaian upaya pencegahan korupsi semakin baik dan risiko korupsi semakin kecil. Begitu pula sebaliknya.

Capaian Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : KPK; 2025

Gambar 2.100. Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024

Hasil SPI dirumuskan dalam bentuk Indeks Integritas Nasional, yang memberikan gambaran umum tingkat integritas di Kabupaten Pekalongan. Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar 73,97 atau turun 4,11 point dari Tahun 2023.

Hasil SPI 2024 diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memitigasi risiko korupsi, tetapi juga untuk memulai dan mendorong partisipasi publik secara langsung dalam pencegahan korupsi. Dengan demikian, hasil SPI dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan, untuk menciptakan pemerintahan dan masyarakat yang bebas dari korupsi.

b. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

1). Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

a). Pendidikan

Dalam upaya mewujudkan keberhasilan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun dan pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM), perlu peningkatan pemerataan akses dan mutu, relevansi serta partisipasi pendidikan di Kabupaten Pekalongan yang dapat digambarkan sebagai berikut :



(1). Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang Pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran Murid usia dini, pendaftaran Murid yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73.
APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No.	Tahun	SD/MI (%)		SMP/MTS (%)		SMA/SMK/MA (%)	
		Kab.	Prov.	Kab.	Prov.	Kab.	Prov
1.	2020	103,89	106,32	99,92	93,21	64,22	86,83
2.	2021	103,89	106,40	99,93	94,00	62,30	86,65
3.	2022	107,31	106,19	99,72	94,05	62,30	86,83
4.	2023	104,49	105,01	98,83	92,80	68,94	87,84
5.	2024	106,16	103,86	92,35	90,89	78,65	88,54

Sumber : BPS Susenas, DINDIKBUD Kab. Pekalongan, 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa akses pemerataan layanan pendidikan yang direpresentasikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTS lebih baik dibandingkan Jawa Tengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2024 pada jenjang pendidikan SD lebih dari 100 persen, yaitu 106,16 persen, hal ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan, semua penduduk yang berusia 7-12 tahun sudah bersekolah dijenjang pendidikan SD/MI. Nilai APK pada jenjang pendidikan SMP Tahun 2024 sebesar 92,35 persen, hal ini menggambarkan secara keseluruhan penduduk yang berusia 13-15 tahun masih belum semuanya bersekolah dijenjang pendidikan SMP/MTS.

Persoalan kesenjangan dan distribusi pemerataan akses layanan pendidikan telah diupayakan untuk diatasi oleh pemerintah, salah satunya melalui zonasi pendidikan. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan, tidak hanya secara distribusi akses namun juga kualitas layanan pendidikan.

(2). Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Tahun 2019-2023, Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan cenderung meningkat. Secara Rinci Angka Partisipasi Murni (APM) pada



semua jenjang pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.74.
APM Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No.	Tahun	SD/MI (%)		SMP/MTS (%)		SMA/SMK/MA (%)	
		Kab	Prov	Kab	Prov	Kab	Prov
1.	2020	93,06	97,70	81,47	80,53	45,91	59,74
2.	2021	93,07	98,22	81,48	80,89	46,14	60,46
3.	2022	96,19	98,39	78,93	81,02	55,22	61,17
4.	2023	97,73	98,46	78,22	81,56	53,41	61,46
5.	2024	98,14	98,39	77,96	81,03	56,14	62,56

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, DINDIKBUD Kab. Pekalongan, 2025

Dari tabel diatas, Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pekalongan untuk jenjang SD/MI Tahun 2024 sebesar 98,14 persen naik dibandingkan tahun 2023 sebesar 97,73 persen. Untuk jenjang APM SMP/MTs Tahun 2024 sebesar 77,96 persen menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 81,56 persen. Untuk jenjang SMA/SMK/MA Tahun 2024 sebesar 56,14 persen naik dibandingkan tahun 2023 sebesar 53,41 persen. Apabila dikaitkan dengan target SDGs dalam bidang pendidikan bahwa seluruh penduduk usia sekolah harus bersekolah (100 persen) maka masih perlu upaya keras untuk mengembalikan penduduk usia sekolah ke bangku sekolah.

(3). Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)

Verifikasi dan validasi (verval) data dari berbagai sumber data, antara lain Basis Data Terpadu (BDT); Data Pokok Pendidikan (Dapodik), *Education Management Information System* (EMIS) dan Kegiatan Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang telah terintegrasi, mengungkap jumlah anak tidak sekolah (ATS) cukup tinggi di Kabupaten Pekalongan yaitu 4.346 orang pada tahun 2019. Dari hasil survei ditemukan beberapa penyebab ATS, diantaranya adalah kemiskinan atau kemampuan ekonomi keluarga yang rendah, pernikahan dini, kondisi anak yang berkebutuhan khusus, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan.

Menyikapi permasalahan ATS, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah meluncurkan **inovasi Gerakan KUDU Sekolah** yang merupakan komitmen pemerintah dalam memperluas keterjangkauan pelayanan dasar, salah satunya akses terhadap Pendidikan. Gerakan KUDU Sekolah adalah Gerakan berbagai elemen masyarakat dan *stakeholder* terkait yang saling bersinergi untuk menurunkan jumlah ATS secara signifikan di Kabupaten Pekalongan. Adapun caranya dengan menggunakan pendekatan kolaborasi pentahelix (Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan masyarakat peduli) guna mengupayakan pengembalian anak usia sekolah yang tidak bersekolah serta Dewasa Tidak Sekolah (DTS) sekaligus memastikan anak yang sudah kembali bersekolah untuk menyelesaikan pendidikannya sampai tuntas wajib belajar 12 tahun melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.

Tujuan dari Gerakan KUDU SEKOLAH antara lain :

- (a) Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar dan menengah berkualitas;
- (b) Menurunkan jumlah ATS di Kabupaten Pekalongan;
- (c) Mendampingi anak yang sudah kembali bersekolah agar menyelesaikan sesuai jenjang



- Pendidikan sampai tuntas wajib belajar 12 tahun; dan
- (d) Menurunkan angka kemiskinan melalui sektor pendidikan.

Sasaran dari Gerakan KUDU SEKOLAH antara lain :

- (a) Anak Putus Sekolah (termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)/Anak Penyandang Disabilitas (APD) usia 7-18 Tahun) yang sudah bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, yaitu SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA terapi *drop out* (berhenti/putus sekolah);
- (b) Anak tidak melanjutkan sekolah (termasuk ABK)/APD usia 7-18 Tahun) yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, yaitu SD/MI, SMP/MTs tetapi tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- (c) Anak yang belum sekolah atau tidak pernah sekolah (termasuk ABK)/APD usia 7-18 Tahun) pada jenjang tertentu, yaitu SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Target dan Capaian Gerakan Kudu Sekolah di Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.75.
Target dan Capaian Jumlah ATS yang dikembalikan ke Sekolah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ATS	4.346	4.463	4.850	4.065	4.307
2.	Target penanganan ATS	680	1.025	2.252	600	650
3.	Capaian Pengembalian ATS	422	604	674	318	650

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2025

Data tersebut diperoleh melalui hasil verifikasi dan validasi secara intensif berdasarkan hasil pelaksanaan Rekonfirmasi pada rangkaian Gerakan KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan. Kegiatan rekonfirmasi tersebut dilaksanakan melalui pendampingan oleh Tim KUDU Sekolah Kecamatan dalam hal ini koordinator kecamatan, didampingi Penilik Pendidikan dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan serta Koordinator/operator ATS di tingkat desa yang terjun langsung secara door to door bertemu dengan Anak Tidak Sekolah dan orangtua yang bersangkutan untuk dibujuk agar kembali ke sekolah yakni baik satuan pendidikan formal maupun non formal.

Adapun pada tahun 2024, target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan selaku leading sector dalam penanganan ATS sebanyak 650 ATS. Jumlah tersebut merupakan target maksimal penerima bantuan stimulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pekalongan yang kemudian dituangkan dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kabupaten Pekalongan tahun 2024.

(4). Capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Untuk capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 rata-rata belum mencapai 100%. Persentase anak usia 5 - 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD mencapai 86,39 persen pada tahun 2024, persentase anak usia 7 - 12 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SD/MI juga mencapai 99,53 persen di tahun 2024, persentase anak usia 13 - 15 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SMP/MTs tahun mencapai 78,40 persen di tahun 2024 dan persentase anak usia 7 - 18 tahun yg sudah taat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan mencapai



24,20 persen di Tahun 2024. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.76.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator Pelayanan Dasar	Target	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase anak usia 5 - 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di PAUD	100,00	100,00	81,50	87,01	88,43	89,78
2.	Persentase anak usia 7 - 12 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SD/MI	100,00	100,00	93,10	99,96	98,68	99,99
3.	Persentase anak usia 13 - 15 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SMP/MTs tahun	100,00	-	81,50	75,33	79,86	79,25
4.	Persentase anak usia 7 - 18 tahun yg sudah taat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan	100,00	100,00	5,40	7,97	10,27	20,35

Sumber : isian data DINDIKBUD Kabupaten Pekalongan, 2025

b). Kesehatan

Kesehatan merupakan sebuah investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat terwujud. Agar tujuan tersebut berjalan optimal, pembangunan kesehatan dimulai dari unit terkecil dalam tatanan masyarakat yaitu keluarga. Tentu saja dalam pelaksanaannya tidak semudah membalikan telapak tangan, banyak tantangan dalam mewujudkannya. Pendekatan siklus hidup yang telah dilakukan selama ini dirasa belum dapat mengetahui secara pasti sumber penyebab permasalahannya. Untuk itu diperlukan pendekatan keluarga yang diinisiasi dengan pemetaan atas permasalahan secara mendalam dari pendekatan siklus hidup melalui kunjungan rumah.

Capaian indikator urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan tergambar pada tabel berikut :

(1). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)

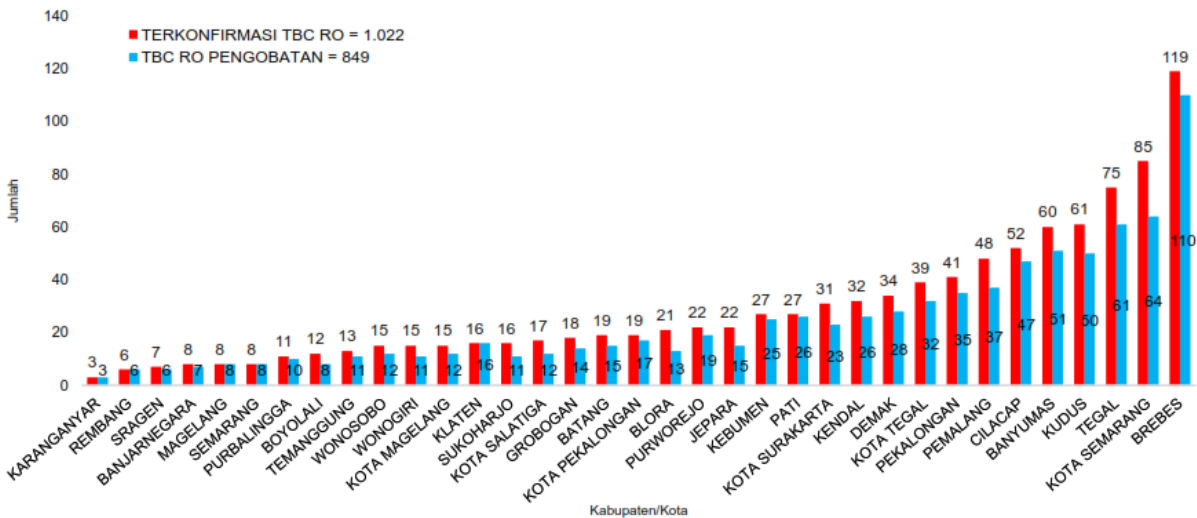
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) adalah persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting:

- (a). Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis;
- (b). Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.



Formulasi perhitungan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu. Jumlah penemuan dan pengobatan kasus TBC RO Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 terkonfirmasi sebesar 41 dan pengobatan sebesar 35 kasus, Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Jateng, 2025

Gambar 2.101. Jumlah Penemuan Kasus TBC Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

Selanjutnya cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77.
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

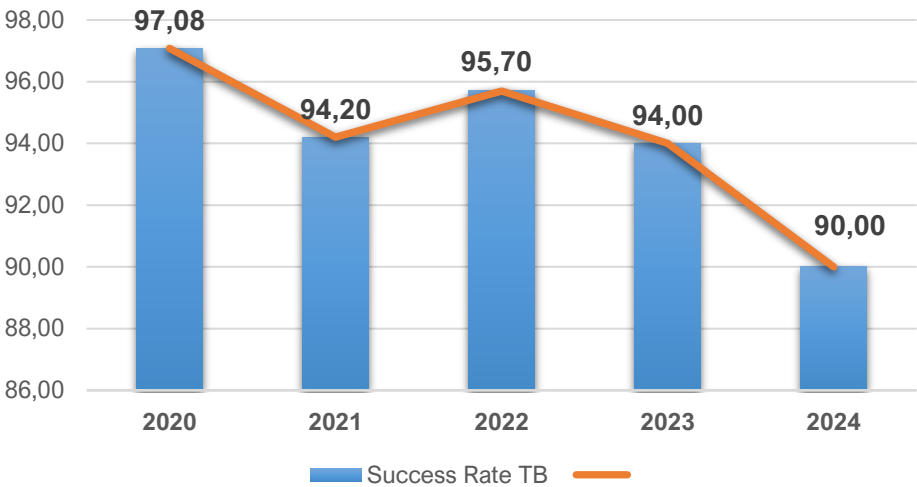
No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Konfirmasi TBC RO	Kasus	21	13	33	36	41
2.	Pengobatan TBC RO	Kasus	18	10	24	30	35

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan; 2025

(2). Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)

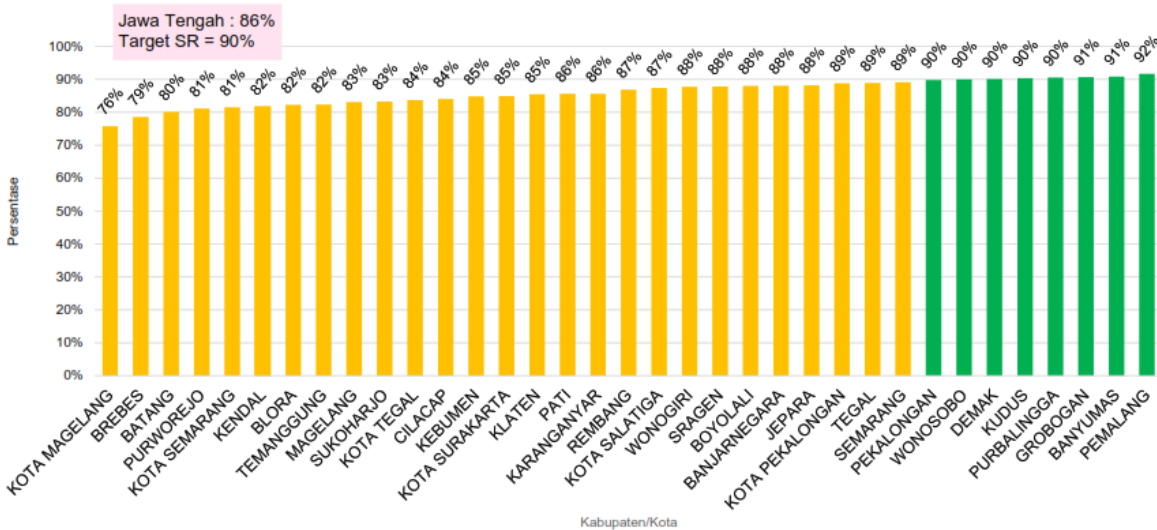
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) adalah persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap. Indikator merupakan indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.

Formulasi perhitungan adalah jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate/SR*) TB Kabupaten Pekalongan di Tahun 2024 sebesar 90,00 persen turun dari 94,00 persen di Tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Jateng, 2025

Gambar 2.102. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024



Sumber : DINKES Kab. Pekalongan dan DINKES Jateng, 2025

Gambar 2.103. Angka Keberhasilan Pengobatan TB (*Succes Rate/SR*) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Provinsi Jateng

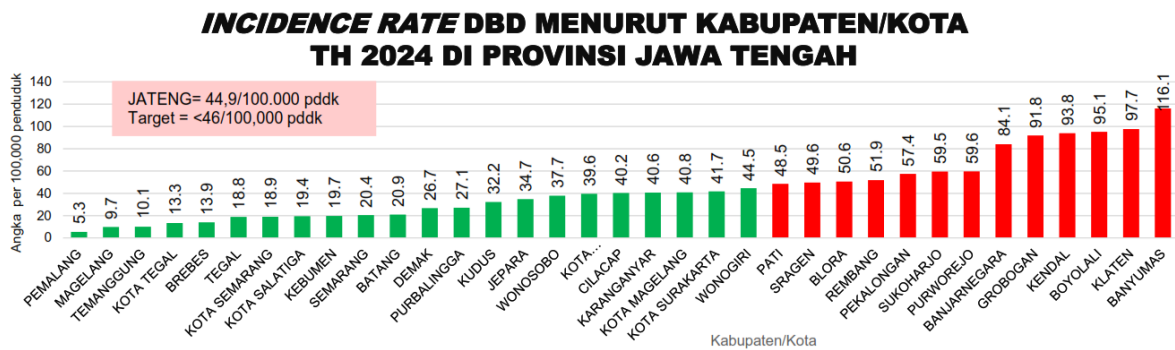
(3). *Incidence Rate Demam Berdarah Dengue (IR DBD)*

Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue per 100,000 penduduk. Angka Kesakitan/Incidence Rate (IR) penyakit DBD di Kabupaten Pekalongan selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi kejadian luar biasa. Pada tahun 2020, Angka kesakitan penyakit DBD sebesar 26,00 per 10.000 penduduk, kemudian mengalami penurunan sebesar 18,02 di Tahun 2021 dan naik tajam sebesar 67,21 per 10.000 penduduk di Tahun 2022 dan kemudian mengalami penurunan di Tahun 2023 sebesar 40,10 per 10.000 penduduk kemudian mengalami kenaikan sebesar 57,40 per 10.000 penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.78. *Incidence Rate (IR) DBD*
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2.	IR DBD	Kasus	26	18,02	67,21	40,10	57,40

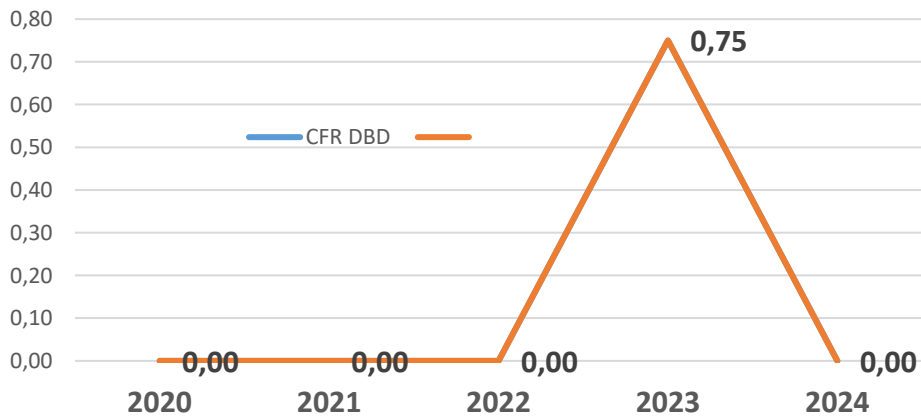
Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan; 2025



Gambar 2.104. Incidence Rate (IR) DBD Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

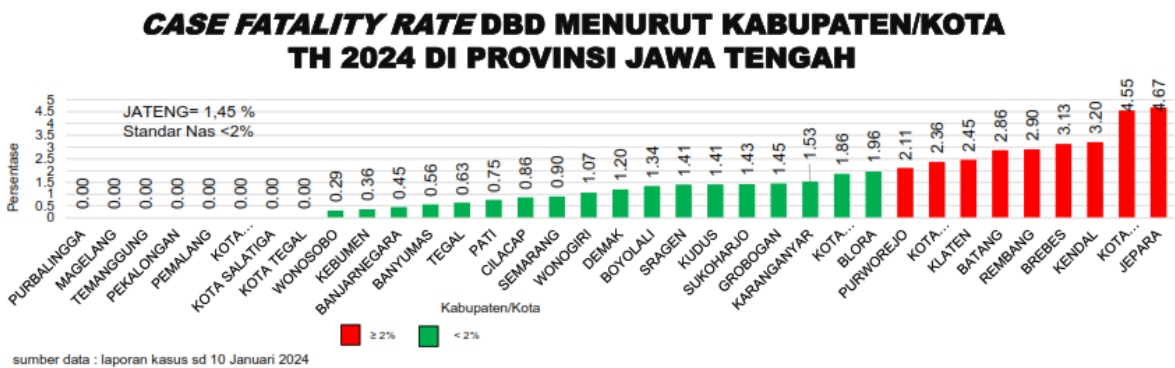
(4). Case Fatality Rate Demam Berdarah Dengue (CFR DBD)

Formulasi perhitungan merupakan jumlah kasus demam berdarah dengue meninggal dibagi jumlah seluruh kasus DBD x 100%. Sedangkan Angka Kematian/Case Fatality Rate (CFR) akibat penyakit DBD masih terjadi, selama 5 tahun terakhir (2020-2024) dengan tidak ada kasus (0,00%) kecuali di Tahun 2023 terjadi peningkatan kasus sebesar 0,75 persen seiring meningkatkan Angka Kesakitan DBD. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DINKES Kab. Pekalongan, DINKES Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.105. Case Fatality Rate Demam Berdarah Dengue (CFR DBD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024



Gambar 2.106. Case Fatality Rate Demam Berdarah Dengue (CFR DBD) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



(5). Rasio Tenaga Medis dan Dokter

Berdasarkan data yang ada rasio tenaga medis sampai dengan tahun 2024 mencapai 3,32 per 1.000 penduduk. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Pekalongan berdasarkan data dimana untuk tahun 2024 terdapat 1 tenaga medis di setiap 434 jiwa penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pekalongan masih kekurangan tenaga kesehatan. Selengkapnya dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.79.
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tenaga Medis (orang)	1.836	1.896	1.030	1.410	2.350
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	968.821	976.504	986.455	1.007.384	1.019.006
	Rasio	1,90	1,94	1,04	1,40	2,31
	Rasio 1 tng medis/ 1.000 pdkk	528	515	958	714	434

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan, 2025

Jumlah dokter di Kabupaten Pekalongan di tahun 2024 sebesar 134 orang. Rasio dokter sebesar 0,132 per 1000 penduduk atau 1 dokter melayani 7.605 penduduk. Kondisi tersebut belum memenuhi kebutuhan yang ideal. Selengkapnya dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.80.
Rasio Dokter per satuan penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter (orang)	135	125	115	102	134
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	968.821	976.504	986.455	1.007.384	1.019.006
	Rasio	0,139	0,128	0,116	0,101	0,132
	Rasio 1 dokter/1.000 pdck	7.176	7.812	8.578	9.876	7.605

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan, 2024

(6). Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh Rumah sakit sebagai sarana rujukan dan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yaitu Puskesmas dan jaringannya, poliklinik. Kabupaten Pekalongan memiliki 5 Rumah Sakit yaitu 3 RSUD dan 2 RS Swasta. RSUD telah mencapai akreditasi dengan 16 pelayanan. Rata-rata perhitungan rasio RS dengan jumlah penduduk baru mencapai 0,005 karena 1 Rumah Sakit melani kurang lebih 203.801 jiwa penduduk. Kondisi tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Selengkapnya dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.81.
Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah RSUD (unit)	2	2	3	3	3
2.	Jumlah RS Swasta (unit)	1	1	1	2	2
	Total RS	3	3	4	5	5
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	968.821	976.504	986.455	1.007.384	1.019.006
	Rasio	0,003	0,003	0,004	0,005	0,005
	Rasio 1 RS/1.000 pddk	322.940	325.501	246.614	201.477	203.801

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan, 2025

(7). Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poliklinik Kesehatan Desa

Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa di Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 cenderung tetap. rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa per 1.000 penduduk pada tahun 2024 adalah 0,23 artinya satu puskesmas melayani 37.741 jiwa. Rasio ini masih dibawah standar Kementerian Kesehatan RI yaitu 1 Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Namun demikian dengan adanya puskesmas pembantu dan poliklinik kesehatan desa dapat membantu melayani kesehatan masyarakat. Dari 27 Puskesmas di Kabupaten Pekalongan, terdapat 26 Puskesmas terakreditasi dan 1 (satu) puskesmas belum terakreditasi yaitu Puskesmas Wonokerto. Selengkapnya dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.82.
Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Puskesmas Induk (unit)	27	27	27	27	27
2.	Jumlah Puskemas Pembantu (unit)	49	49	49	49	49
3.	Jumlah Poliklinik Kesehatan Desa	159	159	159	159	159
4.	Jumlah Penduduk (jiwa)	968.821	976.504	986.455	1.007.384	1.019.006
5.	Rasio	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23
	Rasio 1 Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa /1.000 pddk	35.882	36.167	36.535	37.311	37.741
	Rasio 1 puskesmas/1.000 pddk	4.123	4.155	4.198	4.287	4.336

Sumber : DINKES Kab. Pekalongan, 2025

(8). Capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Sementara itu untuk capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan di Kabupaten Pekalongan rata-rata telah menunjukkan capaian sebesar 100 persen. Perkembangan SPM selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 2.83.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024

No	Indikator Pelayanan Dasar	Target	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	89,28	87,85	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	89,29	89,95	100
3	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	94,91	95,33	100
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	80,30	89,52	100	100
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	99,28	100	100
6	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	74,00	84,79	82,69	82,06
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100	73,80	96,60	86,24	96,31
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	60,30	86,22	85,61	93,72
9	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100	88,90	88,82	92,27	96,52
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100	100	100	100
11	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC yang sesuai	100	88,10	96,53	81,48	85,58
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	100	100

Sumber : isian data DINKES Kabupaten Pekalongan, 2025

c). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 11 sub urusan yaitu 1) sumber daya air (SDA); 2) air minum; 3) persampahan; 4) air limbah; 5) drainase; 6) permukiman; 7) bangunan gedung; 8) penataan bangunan dan lingkungannya; 9) jalan; 10) jasa konstruksi; dan 11) Penataan Ruang. Selanjutnya capaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1). Kondisi Jalan dan Jembatan

Berdasarkan kondisi fisiknya, panjang jalan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 yaitu 313.275 km dalam kondisi baik, 233.091 km kondisi sedang atau sebesar 78,29 persen atau naik di dibandingkan tahun 288,992 km dalam kondisi baik, 232,135 km kondisi sedang atau sebesar 74, 671 persen dari jumlah total seluruh panjang jalan sebesar 697.896 km.



Kondisi jembatan juga tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan jalan, karena jembatan berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuang. Kondisi jembatan dalam kondisi baik mengalami penurunan secara drastis dari 56,82 % di Tahun 2023 menjadi 2,01% di Tahun 2024 akibat putusnya beberapa jembatan di kecamatan wilayah atas seperti Petungkriyono, Lebakbarang dan Kandangserang akibat banjir dan tanah longsor. Perkembangan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.84.
Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

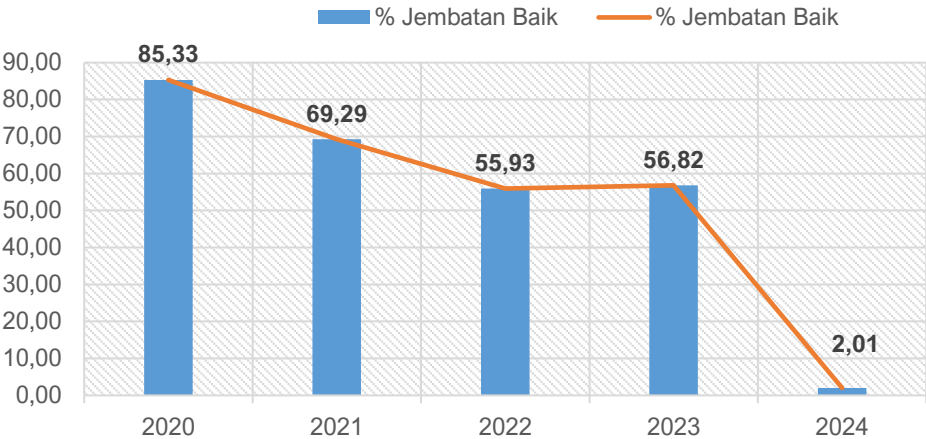
No	Kondisi Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
	Kondisi Jalan					
1.	Baik (km)	514,548	414,211	432,632	288,992	313,275
2.	Sedang (km)	113,288	137,054	135,383	232,135	233,091
3.	Rusak ringan (km)	13,132	53,154	53,141	79,455	60,573
4.	Rusak Berat (km)	28.927	93,477	76,74	97,314	90,957
	Total (km)	669,895	697,896	697,896	697,896	697,896
	% MANTAP (baik dan sedang)	93,72	78,99	81,39	74,67	78,29
	Kondisi Jembatan					
1.	Baik (unit)	314	255	250	254	9
2.	Sedang (unit)	20	12	13	11	381
3.	Rusak ringan (unit)	34	180	184	182	57
4.	Rusak Berat (unit)	0	0	0	0	0
	Total (unit)	368	447	447	447	447
	% Jembatan Baik	85,33	69,29	55,93	56,82	2,01

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2025



Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.107. Persentase Jalan Mantap Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024



Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2025

Gambar 2.108. Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Selanjutnya, jika dilihat dari jenis perkerasan jalan pada tahun 2024 sebanyak 313,275 km merupakan perkerasan jalan aspal, 233,091 km merupakan jalan beton, 60,573 km merupakan perkerasan jalan Telford/Krikil/Urpil dan 90,957 km merupakan jalan paving. Perkembangan kondisi perkerasan jalan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.85.
Kondisi Jalan berdasarkan Jenis Permukaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Jenis Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jalan Aspal (km)	595,368	552,274	565,633	565,633	313,275
2.	Jalan Beton (km)	50,057	52,145	56,654	56,654	233,091
3.	Jalan Telford/Krikil/Urpil (km)	24,47	93,477	75,609	75,609	60,573
5.	Jalan Paving (km)	-	-	-	-	90,957
	Total (km)	669,895	697,892	697,892	697,892	697,892

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2025

Sedangkan prasarana jembatan tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan sejumlah 447 buah, berdasarkan jenis konstruksinya terdapat 73 buah jembatan komposit, 11 buah jembatan busur, 319 buah jembatan beton, 34 buah jembatan plat dan 7 buah jembatan rangka baja, serta 3 buah jembatan gantung, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.86.
Jenis Jembatan berdasarkan Konstruksinya Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Jenis Jembatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Komposit (unit)	42	71	71	72	73
2.	Busur (unit)	2	11	11	11	11
3.	Beton (unit)	295	320	321	320	319
4.	Plat (unit)	23	35	34	34	34
5.	Rangka Baja (unit)	6	7	7	7	7
6.	Gantung (unit)	0	3	3	3	3
	Total (unit)	368	447	447	447	447

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2025



(2). Sumberdaya Air

Pengelolaan sumber daya air terpadu, yang mengacu kepada tiga pilar yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sumberdaya air dapat dimanfaatkan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Kabupaten Pekalongan memanfaatkan sumberdaya air yang ada dalam mendukung pertanian melalui sistem irigasi. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik terus menunjukkan peningkatan di Tahun 2024 dengan mencapai 91,16 persen meningkat dari tahun 2023 sebesar 51,43. Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi, dari 78,50 persen di tahun 2020 meningkat menjadi 99,58 persen di tahun 2024. Perkembangan Layanan Bidang Irigasi Tahun 2020-2024 untuk mendukung pertanian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.87.
Rasio Jaringan Irigasi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Luas Jaringan Irigasi Baik (Ha)	Jaringan Irigasi Baik (Km)	Rasio Jaringan Irigasi	Kenaikan Luas Pertahun (Ha)	Kenaikan Irigasi Baik (Km)
1	2024	11.224,79	410.600	3,658	79,65	8,63
2	2023	11.145,14	401,975	3,607	21,58	5,24
3	2022	11.123,56	396,730	3,567	16,06	11,44
4	2021	11.107,50	385,293	3,469	267,20	3,21
5	2020	11.840,30	382,085	3,525	159,96	9,4485

Keterangan :
Optimum rasio jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan adalah: $(783,32/13818) \times 100 = 5,67$
Panjang saluran Kabupaten Pekalongan : 783,32 km
Luas areal Kabupaten Pekalongan : 13,818 Ha

Tabel 2.88.
Capaian Layanan Bidang Irigasi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi Baik (%)	48,78	49,18	49,38	51,43	91,16
2.	Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi (%)	78,50	80,91	80,60	80,45	99,58

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2024

(3). Drainase

Kondisi drainase di Kabupaten Pekalongan menunjukkan kondisi baik, antara lain capaian persentase drainase kondisi mantap mencapai 44,50 persen tahun 2024, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 39,41 persen. Persentase Drainase (jalan) kondisi baik mengalami peningkatan dari 12,98 persen di tahun 2020 menjadi 19,43 persen di Tahun 2024. Sedangkan persentase penurunan wilayah genangan banjir dan rob mencapai 52,62 persen di tahun 2024



turun dari tahun 2023 sebesar 62,10 pesen. Perkembangan kondisi drainase Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.89.
Kondisi Drainase Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase drainase kondisi mantap	32,45	32,95	38,05	39,41	44,50
2	Persentase Drainase (jalan) kondisi baik (%)	12,98	13,18	15,11	18,79	19,43
3.	Persentase penurunan wilayah genangan banjir dan rob (%)	89,19	81,08	75,44	62,10	52,62

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2024

(4). Air Minum dan Air Limbah (Sanitasi)

Air minum merupakan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya keras mewujudkan 100 persen akses air minum aman dan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Capaian cakupan air minum di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2024 belum dapat mencapai target Nasional yang ditetapkan 100 persen pada tahun 2019, maupun target SDGs tahun 2030. Sementara cakupan pelayanan sanitasi dimana Persentase Penduduk mengakses Air Limbah Domestik telah mencapai target nasional sebesar 100 persen tahun 2024. Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90.
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman (%)	87,83	87,83	84,87	85,00	88,47
2	Persentase Penduduk mengakses Air Limbah Domestik (%)	86,06	90,00	93,00	100,00	100,00

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH dan DPU TARU Kab. Pekalongan, 2024

(5). Penataan Ruang

Penataan Ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang). Kabupaten Pekalongan melakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040. RTRW Daerah digunakan sebagai acuan koordinasi penataan ruang wilayah Daerah, penyusunan rencana pembangunan Daerah, dan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah. Persentase Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Pekalongan tahun 2024 sudah mencapai 99,34 persen. Persentase Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL sebesar 50,00 persen di tahun 2024.

Capaian kinerja Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 2.91.
Capaian Kinerja Penataan Ruang
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan (%)	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL	n/a	14,29	14,29	20,57	27,76
3	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	n/a	10,53	14,29	27,14	99,34

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2025

(6). Capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

Sementara itu untuk capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi menunjukkan peningkatan dari 87,80 tahun 2020 meningkat menjadi 100,00% di tahun 2024, untuk Persentase Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbah nya diolah di IPALD juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 61,20% menjadi 100,00% di tahun 2024. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.92.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)	87,80	88,70	89,60	100,00	100,00
2	Persentase Rumah yang memiliki akses pengolahan, lumpur tinja diolah di IPLT dan air limbah nya diolah di IPALD (%)	61,20	61,70	61,90	100,00	100,00

Sumber : isian data DPU TARU Kab. Pekalongan, 2025 dan https://biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota, diakses tahun 2023

d). Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui beberapa upaya antara lain penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Upaya pengurangan luasan kawasan kumuh dalam periode lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang semakin baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja rasio rumah layak huni di Kabupaten Pekalongan menunjukkan trend yang terus menurun setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir (2019-2023).



Rasio rumah layak huni mengalami kenaikan dari 88,83 persen di Tahun 2020 menjadi 90,38 persen di tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93.
Rekapitulasi Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah (unit)	206.600	206.807	207.377	207.737	208.037
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	23.082	21.956	20.967	20.539	20.018
	Rasio Rumah Layak Huni	88,83	89,38	90,50	90,10	90,38
	Rasio RTLH	11,17	10,62	9,50	9,90	9,62

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan, 2025

Sedangkan penanganan kawasan kumuh dilaksanakan berdasarkan **Keputusan Bupati Pekalongan No. 667/450 Tahun 2021** yang menetapkan luas kawasan kumuh sebesar **344,21 ha**. Luas kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 2020-2024 mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2021 luas kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan sebesar 344,21 Ha (*berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan No. 667/450 Tahun 2021*). Sisa Luas Kawasan Kumuh yang ditangani sampai dengan Tahun 2024 sebesar **213,37 ha (55,63 persen)**. Meskipun mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya, akan tetapi belum memenuhi target 100-0-100 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dimana luas kawasan kumuh ditargetkan 0% ditahun 2019. Selengkapnya capain kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94.
Capaian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan Kumuh (ha)	96,46	344,21¹⁾	321,765	222,87	219,02
2	Kawasan kumuh yang ditangani (ha)	37,21	22,445	32,645	0,82	5,65
3	Sisa Luas Kawasan Kumuh (ha)	59,25	321,756	289,12	222,05	213,37
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani (%)	88,99	6,52	10,15	0,36	2,58
5	Persentase Kawasan kumuh (%)	11,01	93,48	89,85	69,00	55,63

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan, 2025

¹ Luas Kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan No. 667/450 Tahun 2021

Sementara itu pada indikator Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Pekalongan pada indikator Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni selama 5 tahun terakhir telah mencapai 100 persen. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 2.95.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator Pencapaian SPM	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : isian data DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan, 2024, dan https://biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota, diakses tahun 2024

e). Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terbagi menjadi 3 sub urusan, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, dan kebakaran. Terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum, dapat diukur dari terjadinya kasus pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dan juga tingkat penyelesaiannya. Kasus pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Pekalongan jumlahnya mengalami tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah ini juga diiringi dengan meningkatnya penanganan/penyelesaian. Meskipun belum mampu menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran peraturan daerah yang terjadi namun tingkat penyelesaiannya sudah mampu mencapai angka 91,43 persen di tahun 2024.

Tabel 2.96.
Penyelesaian Pelanggaran Perda
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jml Pelanggaran Perda	Jml Penyelesaian	Persentase (%)
1.	2020	70	61	87,14
2.	2021	70	62	88,57
3.	2022	70	62	88,57
4.	2023	66	60	90,90
5.	2024	70	64	91,43

Sumber : SATPOL PP DAN DAMKAR Kab. Pekalongan, 2025

Meningkatnya kemampuan penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Pekalongan, salah satunya didukung oleh semakin meningkatnya kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dimiliki. Jumlah personil Satpol PP yang ada di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 sebanyak 136 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, maka rasionya adalah sebesar 1,33 per 10.000 penduduk. Meskipun demikian, jika dilihat dari kondisi ideal maka rasio Satpol PP di Kabupaten Pekalongan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.97.
Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Satpol PP	Jumlah penduduk	Rasio
1.	2020	128	968.821	1,32
2.	2021	131	976.504	1,34
3.	2022	116	986.455	1,18
4.	2023	135	1.007.384	1,34
5.	2024	136	1.019.006	1,33

Sumber : SATPOL PP DAN DAMKAR Kab. Pekalongan, 2025

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kondusifitas Kabupaten Pekalongan adalah dengan mengoptimalkan kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada. Hal tersebut menjadi salah satu alternatif yang diambil karena keberadaan Linmas yang tersebar di seluruh wilayah, baik Linmas di tingkat Kabupaten bahkan sampai Linmas di tingkat desa. Jumlah anggota Linmas di Kabupaten Pekalongan sampai dengan Tahun 2024 sebesar 6.576 orang dengan rasio 64,53. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan rasio 62,71. Hal tersebut berdampak pada rasio ketersediaan Linmas per satuan penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.98.
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah penduduk	Rasio
1.	2020	5.758	968.821	59,43
2.	2021	6.470	976.504	66,27
3.	2022	6,470	986.455	65,58
4.	2023	6.317	1.007.384	62,71
5.	2024	6.576	1.019.006	64,53

Sumber : SATPOL PP DAN DAMKAR Kab. Pekalongan, 2025

Partisipasi masyarakat juga memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan wilayah yang kondusif. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan penyelenggaraan penjagaan lingkungan secara mandiri dengan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Rata-rata setiap desa di Kabupaten Pekalongan memiliki 5 pos keamanan lingkungan yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan siskamling masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi sebuah potensi yang besar jika dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Jumlah poskamling di Kabupaten Pekalongan dari 1.685 unit di Tahun 2020 mengalami penurunan di tahun 2024 sebanyak 362 unit. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.99.
Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Poskamling	Jml Desa/Kelurahan	Rasio
1.	2020	1.685	285	5,91
2.	2021	1.145	285	4,01
3.	2022	1.145	285	4,01
4.	2023	349	285	1,22
5.	2024	362	285	1,27

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2025

Salah satu bentuk gangguan yang terjadi di Kabupaten Pekalongan adalah adanya kegiatan Kejadian Konflik SARA. Meskipun demikian jumlahnya tidak banyak, yaitu hanya 5 kali kejadian di tahun 2019. Sementara itu untuk tahun 2020-2023 tidak ada kejadian unjuk rasa. Selain itu konflik SARA juga tidak pernah terjadi di Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun terakhir. Selengkapanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100.
Jumlah Kejadian Konflik SARA
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Jumlah Kejadian Konflik SARA	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Politik	0	0	0	0	0
2.	Ekonomi	0	0	0	0	0
3.	Lainnya	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0

Sumber : SATPOL PP DAN DAMKAR, 2024

Selain penegakan aturan hukum daerah, kewenangan lain yang perlu diperhatikan adalah permasalahan penanganan kebakaran. Selama 5 tahun terakhir Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan telah mencapai 100 persen, yang berarti semua kejadian kebakaran telah mampu terlayani oleh unit pemadam kebakaran yang ada. Meskipun demikian hal yang perlu diperhatikan adalah masih rendahnya tingkat waktu tanggap yang dibutuhkan oleh unit pelaksana pelayanan pemadam kebakaran untuk menangani kasus kebakaran. Tahun 2024 tingkat waktu tanggap pemadam kebakaran masih di angka 23,88 persen. Adapun Kinerja Sub-Urusan Kebakaran di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101.
Kinerja Sub-Urusan Kebakaran
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	24,45	25,00	21,95	27,62	23,88

Sumber : SATPOL PP DAN DAMKAR Kab. Pekalongan, 2025



Capaian SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 2.102.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024

No	Indikator Pelayanan Dasar	Target	2021	2022	2023	2024
2023	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan					
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (Indikator SPM Trantibum)	100	100	100	100	100
100	SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebencanaan					
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100
3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100
4.	Persentase (%)layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber : Isian data SATPOL PP DAN DAMKAR, BPBD Kab. Pekalongan, 2025

f). Sosial

Pelaksanaan urusan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah di tingkat kabupaten mencakup 6 sub urusan, yaitu Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan. beberapa kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan dapat diukur kinerjanya berdasarkan capaian di beberapa indikator.

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi masih menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh seluruh tingkat pemerintahan. Di wilayah Kabupaten Pekalongan sendiri, penanganan terhadap PMKS/PPKS yang ada masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih sangat rendahnya capaian kinerja pemberian bantuan maupun pemberdayaan terhadap PMKS yang ada. Meskipun demikian dalam kurun waktu 5 tahun, ada sedikit peningkatan dalam upaya peningkatan pelayanan/penanganan terhadap PMKS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dalam penanganan masalah sosial yang ada di Kabupaten Pekalongan, salah satu fasilitas yang ada adalah panti sosial. Jumlah panti sosial di Kabupaten Pekalongan cukup banyak, yakni 28 unit lembaga yang tersebar di seluruh wilayah. Panti-panti sosial itu terdiri atas panti asuhan, panti khusus/disabilitas dan panti werdha.



Sementara itu untuk persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan menunjukan peningkatan dari 0,19 persen di tahun 2022 menjadi 0,22 persen di tahun 2023. Sedangkan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat rata-rata telah mencapai 100 persen setiap tahunnya. Perkembangan selengkapanya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.103.
Perkembangan Pelayanan Urusan Sosial
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Panti Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan pusat rehabilitasi yang menyediakan sarana, dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	12	12	12	25	28
	▪ Panti asuhan	11	11	11	22	24
	▪ Panti Khusus/Lembaga Kesejahteraan Sosial penyandang Disabilitas	1	1	1	2	1
	▪ Panti Werdha	-	-	-	1	3
2.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	-	1,08	0,19	0,22	1,33
3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Jumlah Puskesmas Ramah Disabilitas	2	2	2	2	2

Sumber: DINSOS dan BPBD Kab. Pekalongan, DINSOS Provinsi Jawa Tengah; 2025

Selain hal tersebut di atas, guna mendukung pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pekalongan meluncurkan **Kartu Disabilitas dan Aplikasi Sosial Peduli** untuk para penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan bertempat di Aula Lantai I Kantor Setda Kabupaten Pekalongan pada tanggal 5 Desember 2022.



Gambar 2.109. Peluncuran Kartu Disabilitas dan Aplikasi Sosial Peduli Tahun 2022

Disabilitas di Kabupaten Pekalongan berjumlah sekitar 9800 orang disabilitas yang terdiri atas berbagai kategori ada disabilitas fisik, sensorik, intelektual dan disabilitas mental. Dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 telah



diundang sekitar 150 orang penyandang disabilitas dari berbagai kategori tersebut dan mewakili seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Peluncuran kartu disabilitas di Kabupaten Pekalongan bermanfaat untuk memberikan para penyandang disabilitas kemudahan mendapatkan pelayanan publik, Kartu disabilitas memberikan para disabilitas pelayanan prioritas di pusat kesehatan, pembuatan KTP, pembuatan akte, maupun yang lainnya agar tidak perlu antri. Jumlah penerbitan kartu sampai dengan 2023 sebanyak **3.694 lembar kartu** yang sudah disampaikan kepada penerima. Fasilitas bagi penyandang disabilitas yang masih sangat terbatas, perlahan akan diperbaiki. Karena jika secara bersamaan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Saat ini baru ada 2 Puskesmas ramah disabilitas yaitu Puskesmas Karanganyar 1 dan Puskesmas Kedungwuni 1.

Pemkab Pekalongan juga meluncurkan Aplikasi Sosial Peduli untuk para disabilitas, Hal ini merupakan langkah awal sekaligus sosialisasi agar para disabilitas yang belum terdaftar bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi ini. Setiap disabilitas kebutuhannya berbeda-beda sesuai kondisinya sehingga nantinya dapat cepat ditanggapi, disikapi, dan cepat diberikan bantuan. Selain indikator-indikator di atas, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga harus melaksanakan pelayanan minimal urusan sosial. Standar pelayanan minimal ini wajib dan harus diberikan kepada kelompok sasaran yang ada. Terdapat 5 indikator standar pelayanan minimal urusan sosial dan pada tahun 2022 indikator tersebut telah mencapai 100 persen. Rata - rata capaian kinerja SPM di bidang urusan sosial secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 2.104.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase (%) Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100,00	100,00	100,00	99,88	100,00
4	Persentase (%) Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	100,00	100,00	95,50	100,00	100,00

Sumber : DINSOS Kabupaten Pekalongan, 2025



2). **Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

a). **Tenaga Kerja**

Kewenangan pemerintah kabupaten terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Selain itu, permasalahan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu permasalahan yang secara bersama-sama perlu ditangani melalui komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs yaitu memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Masalah pokok ketenagakerjaan yang dihadapi adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mengurangi tingkat penangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja adalah melalui pelaksanaan bursa kerja dan penyaluran para pencari kerja ke pasar kerja yang sesuai. Upaya ini cukup berhasil, karena pencari kerja yang ditempatkan mengalami kecenderungan peningkatan peningkatan dari sebesar 68,07 persen pada tahun 2020 menjadi 73,06 persen pada tahun 2023. Permasalahan penempatan tenaga kerja dari program pelatihan juga masih menjadi masalah misalnya pada tahun 2024 hanya 41,66 persen dari peserta pelatihan ketrampilan yang mampu tersalurkan ke pasar kerja. Hal tersebut tentunya harus menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi (sertifikasi).

Selain itu Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD (Unit Layanan Disabilitas) bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten pekalongan di Tahun 2023-2024 rata-rata sebanyak 1-2 orang dimana fasilitasi ini bertujuan untuk memberikan layanan dan fasilitasi bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat memperoleh pekerjaan dan berpartisipasi penuh dalam dunia kerja. Selanjutnya, capaian kinerja Urusan tenaga kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105.
Perkembangan Pelayanan Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

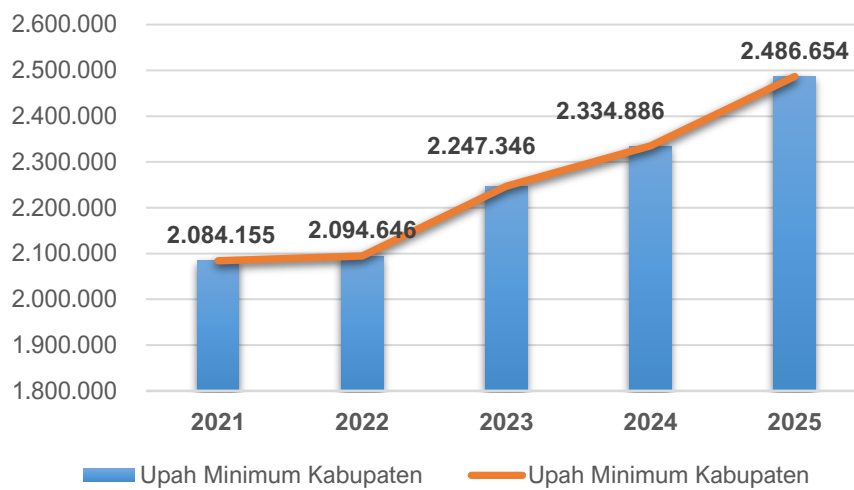
No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar	827	3.746	5.175	4.701	3.704
2.	Jumlah pencari kerja terdaftar (orang)	4.811	5.056	5.130	7.315	3.683
3.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan kerja	1.111	3.631	3.830	5.344	2.308
4.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	23,09	71,82	74,65	73,06	62,67
5.	Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%)	68,07	42,19	57,00	75,16	41,66
6.	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan	-	-	-	1	2

Sumber : DINKOP UKM DAN NAKER Kab. Pekalongan, BPS Provinsi Jawa Tengah; 2025

Selain capaian tersebut di atas, Kebijakan upah minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara maju maupun berkembang. Sasaran dari



kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian kebijakan upah minimum adalah untuk (1)menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan (3)meningkatkan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Pekalongan dari Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2025

Gambar 2.110. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2025

Dari gambar di atas perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terus mengalami perkembangan dari tahun 2020-2024. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti Kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan meningkat dan terbebas dari kemiskinan.

Peran pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Dengan pengertian, pemahaman serta kerjasama dari semua pihak dapat tercapai tujuan Bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari dan pemerintah dapat menjadi stabilitas ekonomi dengan baik.

b). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana termuat dalam UU 23 tahun 2014 memiliki 6 sub urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. 6 sub urusan tersebut adalah:

- 1) Kualitas Hidup Perempuan;
- 2) Perlindungan Perempuan;
- 3) Kualitas Keluarga;
- 4) Sistem Data Gender dan Anak;
- 5) Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
- 6) Perlindungan Khusus Anak

Salah satu indikator yang menggambarkan keberhasilan dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG),



Namun demikian Komponen pembentuk IDG rata-rata turun di tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sehingga menyebabkan IDG Kabupaten Pekalongan turun dari 69,78 di tahun 2023 menjadi 65,06 di Tahun 2024. Tantangan utama masalah gender di beberapa tahun kedepan adalah masih berkuat pada budaya patriarki yang masih kental, membuat perempuan sulit untuk berpartisipasi secara bebas.

Terkait pelayanan terhadap korban kekerasan, saat ini di Kabupaten Pekalongan telah memiliki lembaga konsultasi berupa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A di Kabupaten Pekalongan telah dibentuk sampai tingkat desa/kelurahan, dan saat ini berjumlah sebanyak 179 unit. Pembentukan P2TP2A sampai tingkat desa/kelurahan ini bertujuan untuk mempermudah akses korban kekerasan untuk mendapatkan pelayanan. Sampai tahun 2023, penanganan korban kekerasan sudah mampu mencapai 100%. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan P2TPA, setiap tahun diselenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para petugasnya.

Upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sudah terimplementasi dengan cukup baik. Kondisi tersebut dapat dilihat dari evaluasi Kabupaten Layak Anak yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana Kabupaten Pekalongan memperoleh penghargaan di tingkat madya selama 5 tahun berturut-turut. Meskipun demikian masih ada beberapa klaster pemenuhan hak anak yang perlu ditingkatkan lagi. Adapun Perkembangan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106.
Perkembangan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,48	92,56	92,72	92,83	92,96
2.	[IDG] Indeks Pemberdayaan Gender	71,68	70,54	71,76	69,78	65,06
3.	[IDG] Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	26,29	25,79	25,84	25,82	26,12
4.	[IDG] Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	50,65	49,29	48,03	54,99	53,20
5.	[IDG] Keterlibatan perempuan di Parlemen (%)	27,91	26,67	26,67	25,00	17,78
7.	Indeks Pengarustamaan Gender (PUG)	0,32	0,32	0,32	0,33	0,37
8.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	4,00	3,00	3,00	6,40	6,76
9.	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya

Sumber : DINAS P3A DAN PPKB Kab. Pekalongan; BPS Jawa Tengah, 2025

c). Pangan

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai upaya untuk menyediakan pangan bagi 275,7 juta penduduk Indonesia, sehingga menjadi sumber daya manusia (SDM) yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Komitmen tersebut



sejalan dengan upaya pencapaian tujuan kedua dalam Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SGDs*) yaitu menghilangkan kelaparan (*zero hunger*) pada tahun 2030.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas SDM adalah pemenuhan pangan yang beragam dan terjangkau oleh setiap penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi yang saat ini diukur melalui indikator keragaman konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi komitmen yang perlu diwujudkan sebagaimana amanat Undang-undang Pangan nomor 18/2012 dan Peraturan Pemerintah nomor 17/2015 tentang ketahanan Pangan dan Gizi.

Pencapaian skor PPH konsumsi merupakan indikator kunci yang perlu diukur dan dianalisis untuk mengetahui gambaran pola konsumsi pangan masyarakat yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu di setiap wilayah. Tidak hanya di level pusat namun juga di level provinsi dan kabupaten/kota.

Secara rinci capaian pelayanan urusan pangan Tahun 2020-2024 di Kabupaten Pekalongan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107.
Capaian Pelayanan Urusan Pangan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	2.600	2.180	2.143	2.219	2.156
2.	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)	n/a	103,79	102,00	105,70	102,65
3.	Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	73,20	65,47	67,40	67,10	67,00
4.	Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)	n/a	114,86	118,20	117,80	116,88
5.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,60	92,88	96,40	96,80	95,45

Sumber : Badan Pangan Nasional 2020-2024

Data di atas menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan cukup baik. Pangan yang dikonsumsi rumah tangga terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis dengan satuan yang berbeda, sehingga dilakukan konversi ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama. Selanjutnya dihitung asupan energi menurut kelompok pangan per kapita/hari. Setelah itu dilanjutkan dengan menghitung skor PPH. PPH hasil perhitungan selanjutnya digolongkan berdasarkan empat kategori yaitu sangat kurang (< 55), kurang (55 – 69), cukup (70 – 84) dan baik (>85). Skor PPH pada tahun 2024 sebesar 95,45 termasuk dalam **kategori baik**. Ada sembilan kelompok pangan yang digunakan untuk menghitung PPH yaitu *padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, buah dan sayur serta lain-lain*.

Pangan yang dikonsumsi rumah tangga terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis dengan satuan yang berbeda, sehingga dilakukan konversi ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama. Selanjutnya dihitung asupan energi menurut kelompok pangan per kapita/hari. Standar Kebutuhan energi penduduk sebesar 2.000 kkal per hari dan kebutuhan protein sebesar 52



gram protein per hari. Dengan ketersediaan energi dan protein sebagaimana tersebut dalam tabel di atas, kebutuhan kalori energi dan proten sudah memadai.

Selain itu, untuk mendukung keamanan pangan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah membentuk lumbung pangan untuk menjamin ketersediaan/logistik pangan dan keamanan pangan di Kabupaten Pekalongan. Lumbung pangan dimaksudkan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Jumlah lumbung pangan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2022 sebanyak 14 Desa dari 272 desa yang ada di Kabupaten Pekalongan. Jumlah lumbung pangan tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108.
Jumlah Lumbung Pangan
di Kabupaten Pekalongan dan Tahun Pendiriannya

No	Lokasi	Tahun pendirian	Nama kelompok
1.	Desa Klunjukan Kec. Sragi	2009	LPM Tani Makmur
2.	Desa Jagung Kec. Kesesi	2009	Makmur
3.	Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	2010	Tani Jaya
4.	Desa Werdi Kec. Wonokerto	2010	Sido Makmur
5.	Desa Sumub Lor Kec. Sragi	2011	LPM Sumber Rejeki
6.	Desa Purwodadi Kec. Sragi	2011	LDPM Lancar Tani
7.	Desa Sidosari Kec. Kesesi	2011	Karya Makmur
8.	Desa Tengeng Wetan Kec. Siwalan	2011	Sido Makmur
9.	Desa Pantirejo Kec. Kesesi	2013	Makmur Sejahtera
10.	Desa Blimbing Wuluh Kec. Siwalan	2013	Srikandi
11.	Desa Krandon Kec. Kesesi	2014	Sri Rejeki
12.	Desa Kedungjaran Kec. Sragi	2016	LPM Kedungrejo
13.	Desa Getas Kec. Wonopringgo	2016	Sri Rejeki Jaya
14.	Desa Ketanonageng Kec. Sragi	2019	Gemah Ripah

Sumber : DKPP Kab. Pekalongan, 2023

d). Pertanian

Kewenangan Urusan Pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, 2) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota, 3) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 4) Penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota, 5) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota, 6) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, 7) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, 8) Penerbitan izin membuka tanah, dan 9) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Pelayanan urusan pertanian tahun 2020-2024 dilakukan melalui fasilitasi hak atas tanah dan penyelesaian permasalahan pertanian. Dalam periode tahun tahun 2020-2021 sebesar 100 persen dengan perincian masing -masing yang dilaporkan dan dapat diselesaikan semua.



Sedangkan di tahun 2022 baru tercapai 15 persen dikarenakan terdapat beberapa kasus tanah desa yang prosesnya masih berjalan dan belum selesai sampai akhir tahun, sedangkan di Tahun 2023 -2024 sudah mencapai 100 persen.

Tabel 2.109.
Capaian Pelayanan Urusan Pertanahan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan (%)	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00

Sumber : DPU TARU Kab. Pekalongan, 2024

e). Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 11 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kesebelas sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan 11) Persampahan.

Tabel 2.110.
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,52	65,26	62,75	59,42	60,90
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	43,33	50,00	43,33	33,64	46,36
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	79,57	80,37	84,12	83,98	74,61
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	63,92	57,63	56,55	58,28	60,47
5	Persentase Pengelolaan Sampah	36,55	36,00	35,84	32,95	33,50

Sumber : DINAS PERKIM DAN LH Kab. Pekalongan, 2024

f). Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk, dinyatakan bahwa bagi Penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk tetapi belum melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman. Perkembangan Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik Pemula Bagi Wajib KTP-Elektronik Pemula di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dari 97,17 persen di Tahun 2019 menjadi 98,77 persen di tahun 2023. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan telah berupaya salah satunya memberikan pelayanan jemput bola ke lembaga/sekolah melakukan perekaman bagi peserta didik wajib KTP yang belum melakukan perekaman, namun upaya ini



dirasa belum optimal karena tidak dapat menjangkau Wajib KTP-Elektronik Pemula yang berada di luar lingkungan sekolah. Selain itu penduduk Wajib KTP-Elektronik lainnya yang perlu dijangkau dan difasilitasi kepemilikan KTP-el oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pekalongan, diantaranya seperti Penyandang Disabilitas, Lansia, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kemudian Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran mengalami penurunan dari 100,00 persen di tahun 2020 menjadi 97,50 persen di Tahun 2024. DISDUKCAPIL Kabupaten Pekalongan telah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit dan Tenaga Bidan terkait dengan fasilitasi pelayanan dokumen kependudukan berdasarkan data anak usia 0-5 tahun yang belum terlayani kepemilikan akta kelahiran sebesar 2,50%. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan terobosan yang disebut **“AIDiNo (Alkhamdulillah Dia Nongol)**. Suatu terobosan berupa layanan *3 in 1* bagi keluarga bayi baru lahir untuk mempermudah/mempercepat perolehan dokumen kependudukan, terutama Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak melalui kerja sama dengan 3 RS di wilayah Kabupaten/Kota Pekalongan. Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak (KIA) yang baru dilaksanakan sejak tahun 2018 relatif menurun, yaitu tahun 2020 sebesar 75,18 persen menjadi 58.36 persen di tahun 2024.

Cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Pekalongan tahun 2024 sebesar 2,72 persen. Sedangkan capaian cakupan penerbitan akta kematian di Kabupaten Pekalongan tiap tahun hingga tahun 2024 mencapai 100 persen. Namun sebatas kematian seseorang yang dilaporkan dan tercatat oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pekalongan. DISDUKCAPIL Kabupaten Pekalongan dalam memberikan informasi kependudukan yang *up to date* setiap tahun guna menyediakan Profil Kependudukan dan Pengelolaan Database Kependudukan secara rutin. Secara rinci capaian penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111.
Perkembangan Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakuan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	N/A	N/A	N/A	N/A	2,72
2	Cakupan kepemilikan dok. kependudukan (%)	86,78	97,41	97,99	98,62	98,99
3	Persentase Kepemilikan KTP EL-Pemula Bagi Wajib KTP EL-Pemula (%)	98,66	98,05	97,85	98,77	99,47
4	Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran (%)	100,00	94,20	96,12	97,08	97,50
5	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	100,00	100,00	100,00	99,83	99,36
6	Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	75,18	73,11	62,06	61,46	60,71

Sumber : DISDUKCAPIL Kab. Pekalongan, 2025



g). **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Potret keberhasilan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat diketahui pada Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu **Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan**. Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. IDM merupakan salah satu dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menetapkan Pengalokasian Dana Desa dan Acuan perencanaan Pembangunan Desa dan Perdesaan bagi Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk tahun 2025 terdapat perubahan indikator dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) adalah bagian dari penyederhanaan indikator dan dimensi dalam pengukuran status perkembangan desa. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah evaluasi dan pemantauan perkembangan desa.



Gambar 2.111. Klasifikasi Status Desa

Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pekalongan selama 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami kenaikan dari sebesar 0,6688 di Tahun 2021 menjadi 0,7048 di Tahun 2024 dengan status **BERKEMBANG**. Publikasi IDM mengidentifikasi status desa dalam cakupan survei dengan lima status yakni **Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal**. Dalam publikasi tahun 2024 terdapat ada 30,14 persen desa dengan status Desa Maju, angka tersebut setara dengan 82 desa di Kabupaten Pekalongan. Secara rinci capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.112.
Peringkat Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024

Tahun	Nilai IDM	Status IDM	Peringkat Nasional (Dari 434)	Peringkat Jateng (Dari 29)
2024	0,7048	Berkembang	273	27
2023	0,6781	Berkembang	290	28
2022	0,6746	Berkembang	255	28
2021	0,6688	Berkembang	218	29

Sumber : Dinas PMD Kab. Pekalongan, 2025; *sidesa.jatengprov.go.id* 2025

Tabel 2.113.
Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Desa Membangun	0,6601	0,6668	0,6746	0,6781	0,7048
	• Desa Mandiri	0	0	2	2	22
	• Desa Maju	36	42	47	56	82
	• Desa berkembang	224	223	216	209	168
	• Desa Tertinggal	12	7	7	5	-
	• Desa sangat Tertinggal	-	-	-	-	-
	• Jumlah Total Desa	272	272	272	272	272
2.	Persentase Desa Maju	13,23	15,44	17,28	20,59	30,15

Sumber : Dinas PMD Kab. Pekalongan, 2025; *sidesa.jatengprov.go.id* 2025

Selain hal tersebut, upaya pemberdayaan masyarakat desa dilakukan salah satunya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemanfaatan hasil usaha BUMDes untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Berdasarkan *sidesa.jatengprov.go.id* 2023, di kabupaten Pekalongan di Tahun 2024 terdapat 190 BUMDES dengan rincian berdasarkan kategori : **PERINTIS sebanyak 109 BUMDES, PEMULA sebanyak 55 BUMDES, BERKEMBANG sebanyak 25 BUMDES dan MAJU sebanyak 1 BUMDES.**

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114.
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Klasifikasi BUMDes	135	191	223	247	-
a.	Dasar	63	91	122	126	-
b.	Tumbuh	61	85	90	100	-
c.	Berkembang	5	8	7	15	-
d.	Maju	6	7	4	6	-
2	Jumlah Peningkatan BUMDes					190
a.	Perintis	-	-	-	-	109
b.	Pemula	-	-	-	-	55
c.	Berkembang	-	-	-	-	25
d.	Maju	-	-	-	-	1

Sumber : Dinas PMD Kab. Pekalongan, 2025; *sidesa.jatengprov.go.id* 2025



h). **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana meliputi 3 sub urusan yaitu pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Kewenangan kabupaten/kota berkaitan dengan sub urusan pengendalian penduduk meliputi : 1) Pemaduan dansinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, dan 2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota. Pengendalian penduduk berupa pengaturan kelahiran dengan pengendalian *TFR (Total Fertility Rate)*. Totak Fertility Rate (TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya. TFR di Kabupaten Pekalongan tahun 2024 adalah 2,25 artinya rata rata perempuan di Kabupaten Pekalongan memiliki kemampuan melahirkan diatas 2 anak. Dalam rangka mengendalikan TFR maka perlu dilakukan program pengaturan kelahiran.

Sampai dengan tahun 2024 cakupan peserta KB Aktif mencapai angka 67,18 persen, angka ini cukup baik dibandingkan dengan target nasional (65 persen). Namun demikian dengan capaian *Unmet Need* (persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) mencapai 6,41 persen di Tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 10,33 persen, dengan harapan dengan turunnya *unmet need* dapat menurunkan angka kematian ibu. Oleh karena itu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan konseling dan juga harus ada semacam role model yang akan diikuti oleh masyarakat.

Adapun Perkembangan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115.
Perkembangan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,40	2,40	2,38	2,25	2,25
2.	Cakupan peserta KB aktif (%)	80,42	71,29	74,20	66,42	67,18
3.	Unmet Need	8,68	12,74	10,23	10,33	6,41

Sumber : DINAS P3A DAN PPKB Kab. Pekalongan, 2025

i). **Perhubungan**

Kewenangan urusan perhubungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3) Penerbangan; dan 4) Perkeretapian. Kabupaten Pekalongan hanya melaksanakan sub urusan pertama yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam mendukung pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya (APILL), Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya berupa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) naik dari tahun 2020 sebesar 65,00 persen menjadi sebesar 82,22 persen di tahun 2024. Persentase infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan dalam kondisi baik juga meningkat dari Tahun 2020 sebesar 43,63 persen menjadi 49,74 persen di di Tahun 2024. Persentase Kepemilikan KIR juga meningkat dari Tahun 2020 sebesar 27,77 persen menjadi 76,41 persen di Tahun 2024.

Jumlah terminal tipe C di tahun 2019-2023 sebanyak 5 unit berkurang 1 unit sejak tahun 2016 dari 6 (enam) unit karena pengalihan pengelolaan Terminal Kajen dari Pemerintah Kabupaten



Pekalongan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116.
Perkembangan Pelayanan Perhubungan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya (APILL) (%)	65,00	66,25	74,57	77,97	82,22
2.	Persentase infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan dalam kondisi baik	43,63	44,40	45,13	46,74	49,78
3.	Persentase Kepemilikan KIR	27,77	83,85	84,67	73,00	76,41
4.	Jumlah kendaraan wajib uji kir	4.259	3.563	3.563	3.137	5.618
5.	Jumlah uji kir angkutan umum dan tidak umum	6.106	5.299	5.257	4.468	4.293
6.	Jumlah Terminal Tipe C	5	5	5	5	5
7.	Jumlah Perusahaan Angkutan Penumpang	25	25	27	28	31
8.	Jumlah Armada Angkutan Penumpang (unit)	571	578	581	594	550
9.	Jumlah Perusahaan Angkutan Barang	76	74	83	83	86
10.	Jumlah Armada Angkutan Barang (unit)	3.531	3.066	2.700	2.591	2.064

Sumber : DINHUB Kab. Pekalongan, 2025

j). Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pekalongan sangat erat kaitannya dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Tata Kelola Pemerintahan

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan e Government memang dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sangat komitmen dalam penggunaan e-Government / SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Bupati Pekalongan menggunakan media sosial, audio-visual dan aplikasi untuk menyapa masyarakat, membangun kesamaan persepsi pembangunan dengan perangkat daerah dan mengkomunikasikan pembangunan dengan masyarakat, memahami permasalahan pembangunan langsung dari masyarakat dan sekaligus eksekusinya, serta pemecahan aduan masalah pembangunan. Diskominfo, menjadi perangkat daerah yang dipercaya Bupati dalam mewujudkan pemenuhan persyaratan-persyaratan indikasi SPBE yang baik untuk menunjang kinerjanya.

2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Secara umum, capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.117.
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Kematangan Manajemen Layanan SPBE= INDEKS SPBE	3,04 (Baik)	2,63 (Baik)	2,63 (Baik)	2,86 (Baik)	3,05 (Baik)
2.	Persentase OPD yg memiliki <i>website</i> (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Jumlah sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah berbasis IT (buah)	70	67	55	55	79
4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	5	5	5	5	5
5.	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1

Sumber : DINKOMINFO Kab. Pekalongan, 2025

k). Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana termuat dalam UU 23 tahun 2014 memiliki 8 sub urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. 6 sub urusan tersebut adalah:

- 1) badan hukum koperasi;
- 2) izin usaha simpan pinjam;
- 3) pengawasan dan pemeriksaan;
- 4) penilaian KSP/USP Koperasi;
- 5) pendidikan dan pelatihan perkoperasiaan;
- 6) pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- 7) pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
- 8) Pengembangan UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat melalui pertumbuhan koperasi aktif dan usaha mikro yang cenderung fluktuatif namun mengalami kenaikan dari 0,70 persen di tahun 2019 menjadi 15,58 persen di tahun 2023. Jumlah Koperasi di Kabupaten Pekalongan selalu meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 berjumlah 586 unit dan meningkat menjadi 643 unit di tahun 2023. Sedangkan persentase koperasi yang aktif, mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 66,55 persen menjadi 23,86 persen di tahun 2023. Persentase koperasi sehat mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 30,20 persen menjadi 65,36 persen pada tahun 2023. Hal ini dapat menunjukkan bahwa koperasi semakin bagus dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan usahanya. Jumlah Usaha Kecil Mikro (UKM) binaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana tahun 2019 sebanyak 775 unit menjadi 1.198 unit di tahun 2023.

Kondisi capaian kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah secara rinci dapat dilihat sebagai berikut.



Tabel 2.118.
Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan koperasi aktif dan usaha mikro (%)	-9,74	-4,24	0,30	15,58	3,94
2.	Pertumbuhan koperasi aktif (%)	-10,26	-4,76	0,10	7,75	3,94
3.	Pertumbuhan Usaha mikro (%)	0,52	0,52	0,20	0,18	0,83
4.	Jumlah Koperasi (unit)	623	598	629	643	
5.	Persentase Koperasi Aktif (%)	37,56	21,82	19,21	23,86	26,73
6.	Persentase Koperasi Sehat (%)	35,04	59,60	49,76	65,36	43,10
7.	Jumlah UKM Binaan (unit)	825	899	1.385	1.198	78.865

Sumber : DINKOP UKM DAN NAKER Kab. Pekalongan, 2025

I). Penanaman Modal

Kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat dari capaian jumlah realisasi investasi di Kabupaten Pekalongan, jumlah perusahaan baru yang berinvestasi serta jumlah penyerapan tenaga kerja. Sejak tahun 2019-2023, jumlah nilai investasi berskala nasional naik, untuk PMDN naik dari tahun 2022 sebesar 2.696 milyar menjadi 3.330 milyar di tahun 2023. Nilai investasi Tahun 2022/2023 didapat dari Laporan Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor PMDN berdasarkan OSS Non IUMK sebesar Rp. 1.119.655.170.288,-, Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor PMDN berdasarkan OSS IUMK sebesar Rp. 1.252.730.409.446,-, Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor PMDN berdasarkan OSS LKPM UMK sebesar Rp. 65.7580.923.744,-, Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor PMDN berdasarkan LKPM sebesar Rp. 255.081.653.020,-, Realisasi Investasi Penanaman Modal PMA berdasarkan LKPM sebesar Rp. 2.445.592.868,-, modal 0 sampai 1 milyar yaitu usaha mikro, 1 milyar sampai 5 milyar yaitu usaha kecil, 5 sampai 10 milyar usaha menengah dan 10 milyar ke atas usaha besar.

Jumlah investor tahun 2020 sebesar 210 investor naik di Tahun 2024 sebesar 9.127 investor. Meskipun menunjukkan peningkatan namun inovasi promosi peluang penanaman modal provinsi, penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan, dan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan masih perlu dilakukan peningkatan. Capaian kinerja urusan penanaman modal secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan	89,00	89,67	89,68	91,17	91,66
2.	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (milyar.Rp)	1.173	2.072	2.696	3.330	2.030
3.	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) (investor)	210	5.355	6.346	11.681	9.127

Sumber : DPMPTSP Kab. Pekalongan, 2024



m). **Kepemudaan dan Olahraga**

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memahami kondisi pemuda serta mencerminkan capaian pembangunan pemuda di Indonesia. IPP mengukur berbagai aspek pembangunan pemuda dalam lima domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Secara nasional, IPP Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 mencapai angka 56,33% lebih besar dari tahun 2022 sebesar 62,24.

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan capaian dari **3 (tiga) indikator yang meliputi** : persentase pemuda wirausaha yang dibina, persentase prestasi olahraga tingkat regional, dan nasional dan persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional. Untuk indikator persentase pemuda wirausaha yang dibina tahun 2024 sebesar 5,22 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,76 persen. Persentase Prestasi Olahraga Tingkat regional, dan Nasional tahun 2024 sebesar 70,58 persen sama dibandingkan tahun 2023 sebesar 70,59 persen. Pada tahun 2023 realisasi Persentase Atlet Berprestasi Tingkat regional dan Nasional Tahun 2024 sebesar 74,07 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 48,00 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120.
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	51,37	62,73	62,24	68,28	n/a
2.	Jumlah kwartir ranting yang aktif (unit)	19	19	19	19	19
3.	Persentase pemuda wirausaha yang dibina	-	2,22	2,67	4,76	5,22
4.	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat regional, dan Nasional	-	41,00	44,40	70,59	70,58
5.	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat regional dan Nasional	30,00	33,00	30,00	48,00	74,07
6.	Jumlah organisasi pemuda (unit)	27	27	27	26	26
7.	Jumlah organisasi olahraga (klub)	37	38	38	38	38
8.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (unit)	1	1	1	1	1

Sumber : KEMENPORA; DINPORAPAR Kab. Pekalongan, 2024

n). **Statistik**

Kebijakan Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Landasan hukum tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan tata kelola data untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sehingga dapat mendorong keterbukaan dan transparansi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan.

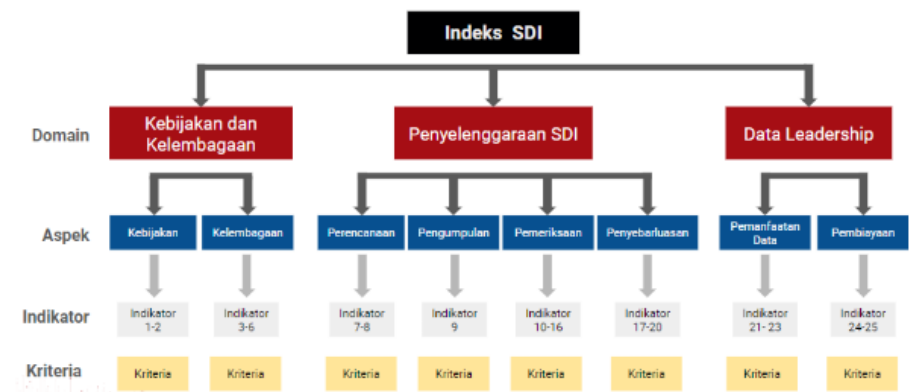
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai langkah strategis dalam mencapai transformasi digital. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, kebutuhan akan data akurat dan



mutakhir menjadi semakin mendesak. Data yang terfragmentasi, tidak seragam, dan sulit diakses menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang efektif. Kondisi data yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan menghambat upaya mencapai keterpaduan informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan.

SDI Kabupaten Pekalongan ditetapkan melalui **Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah** sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola data untuk mendukung oerencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pengendalian pembangunan

Pada tahun 2021 dan 2022 Sekretariat Satu Data Indonesia telah mengadakan Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi internal Sekretariat SDI terhadap hasil asesmen dalam kurun waktu dua tahun, maka asesmen tersebut membutuhkan perincian dan perbaikan metodologi sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk memastikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dapat diterapkan secara optimal di Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahun 2024 Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI yang bertujuan untuk memetakan **penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah pada tahun 2023**.



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI, 2024

Gambar 2.112. Struktur Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI

Penilaian pada Evaluasi Penyelenggaraan SDI mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) Data Leadership dengan rincian struktur penilaian pada Gambar 1. Setiap domain terdiri dari beberapa aspek di mana masing-masing aspek terdiri dari beberapa indikator yang kemudian nilainya akan dihitung agregasinya untuk mendapatkan nilai Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI). Predikat Indeks SDI dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.121.
Predikat Indeks Satu Data Indonesia

Nilai	Predikat
0 - 30	Sangat Kurang
>30 - 50	Kurang
>50 - 70	Cukup
>70 - 90	Baik
>90 - 100	Sangat Baik

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI, 2024



Brrdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2023 Kabupaten Pekalongan memperoleh nilai **59.09** dengan predikat **CUKUP**. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.122.
Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI
Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

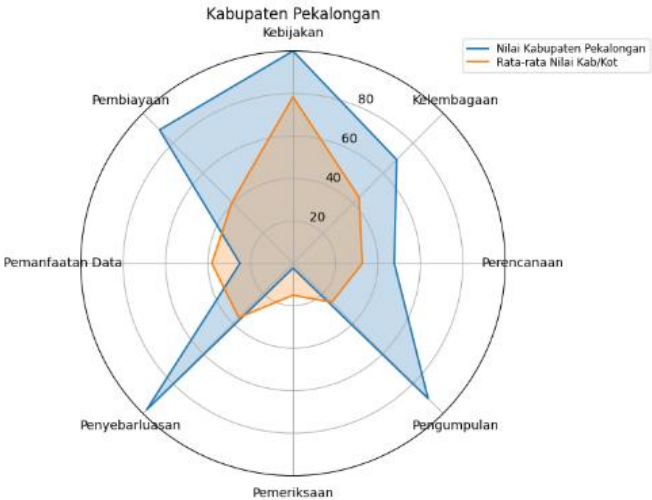
No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	34%	84,54
2	Domain Penyelenggaraan SDI	43%	3,84
3	Domain Data Leadership	23%	50,00
Indeks Satu Data Indonesia			59,09

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI, 2024

Tabel 2.123.
Nilai Indeks Aspek Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek	Bobot	Nilai
1	Aspek Kebijakan	17%	100,00
2	Aspek Kelembagaan	17%	69,08
3	Aspek Perencanaan	11%	47,73
4	Aspek Pengumpulan	6%	90,00
5	Aspek Pemeriksaan	18%	2,22
6	Aspek Penyebarluasan	8%	97,50
7	Aspek Pemanfaatan Data	14%	25,00
8	Aspek Pembiayaan	9%	88,89

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI, 2024



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas RI, 2024

Gambar 2.113. Hasil Penilaian Evaluasi SDI Kab. Pekalongan Tahun 2023

o). Persandian

Tugas persandian daerah adalah menyelenggarakan persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah. Upaya yang yang dilakukan dalam rangka pengamanan tersebut adalah dengan mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian pada semua Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan.



Capaian kinerja urusan Persandian diukur berdasarkan 1 indikator yaitu Tingkat keamanan informasi pemerintah, yang capaiannya sudah sebesar nilai 1. Indeks KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009, yaitu :

- 1) Tata Kelola Keamanan Informasi
- 2) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- 3) Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- 4) Pengelolaan Aset informasi
- 5) Teknologi dan Keamanan Informasi
- 6) Peran TIK

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada urusan persandian Kabupaten Pekalongan.

Tabel 2.124.
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	1	1	1	1	1

Sumber : DINKOMINFO Kab. Pekalongan, 2025

p). Kebudayaan

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Kondisi layanan urusan Kebudayaan di Kabupaten Pekalongan antara lain dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya dijelaskan sebagai berikut.

(1). Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan

Cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa Jawa dan atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekskul kesenian dan atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan. Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota meliputi PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta, Pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.

Guru Lokal Bahasa Daerah adalah Guru S1/D4 dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Daerah/Sastra Jawa. Guru Kesenian adalah Guru dengan kualifikasi pendidikan seni S1/D4



dari perguruan tinggi universitas atau institut kesenian. Kegiatan yang mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra kurikuler.

Indikator tersebut tercapai jika memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan: a) Guru yang mengajar mulok bahasa daerah, b) Guru yang mengajar seni budaya, dan c) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau ekskul). Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif".

Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan di Kabupaten Pekalongan secara umum telah mencapai **100 persen** selama tahun 2020-2024.

(2). Jumlah pengunjung tempat bersejarah

Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan, seperti museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya.

Indikator ini menggambarkan sejauh mana masyarakat mempunyai kepedulian dan mengapresiasi warisan budaya dan sejarah Jawa Tengah. Indikator ini merupakan indikator *proxy* dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya. Tidak ada batasan nilai maksimal terhadap indikator ini, namun tren diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Merupakan indikator "*positif*".

Formulasi Perhitungan Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia di Tahun 2024 sebanyak **8,10 persen** penduduk atau sebanyak ± 62.000 jumlah penduduk

Selain pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, pembangunan budaya juga direalisasikan melalui penyelenggaraan festival dan peristiwa budaya. Jumlah festival dan peristiwa budaya yang diselenggarakan pada periode tahun 2020-2024 tetap namun mengalami peningkatan di Tahun 2024 sebanyak 6 kali. Pembangunan budaya juga direalisasikan melalui pembinaan grup-grup kesenian di Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut sebagai upaya pelestarian budaya melalui pelestarian dan pengembangan kearifan lokal. Selama kurun waktu 2020-2023 jumlah grup kesenian berjumlah 66 grup dan meningkat menjadi 120 grup di tahun 2024. Semuanya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.125.
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk	1 : 10.000	1 : 10.000	1 : 10.000	1 : 10.000	1 : 10.000



No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Persentase keikutsertaan festival seni dan budaya (%)	3	11	11	11	5
4.	Jumlah grup kesenian (unit)	66	66	66	66	120
5.	Jumlah gedung kesenian (unit)	2	2	2	2	2
6.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	1	1	1	1	6
7.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	2	5	2	10	7

Sumber : DINDIKBUD Kab. Pekalongan, 2024

q). Perpustakaan

(1). Tingkat pemanfaatan perpustakaan

Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%. Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (onsite dan online) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan. Jumlah penduduk merupakan rilis BPS pada tahun yang sama. Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah perpustakaan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus

Indikator ini menggambarkan sejauh mana perpustakaan dimanfaatkan oleh penduduk. Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Budaya Literasi. Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif".

Formulasi Perhitungan (Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun baik onsite maupun online/ Jumlah penduduk kabupaten/kota pada tahun yang sama) x 100%

Kinerja urusan perpustakaan dilihat dari jumlah pengunjung pada periode lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah perpustakaan daerah di Kabupaten Pekalongan sebanyak 1 unit, dengan jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2020 sebanyak 14.469 orang mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 menjadi 100.647 orang. Penurunan pengunjung tersebut dikarenakan adanya Covid-19 dan diberlakukannya PPKM, sehingga perpustakaan ditutup dan tidak melakukan pelayanan. Penurunan jumlah pengunjung ini juga disebabkan koleksi buku perpustakaan kurang banyak, banyaknya buku yang tidak dikembalikan dan banyak buku yang rusak, sehingga berpengaruh terhadap penurunan minat baca masyarakat. Dengan demikian, kedepan capaian tersebut masih harus ditingkatkan lagi melalui penambahan dan pemeliharaan buku.

Pada indikator Jumlah perpustakaan desa/Taman Bacaan Masyarakat (TBM) meningkat dari tahun 2019 sebanyak 186 unit menjadi 187 unit di Tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.126.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	-	-	66,65
	• Rasio Pemerataan Layanan Perpustakaan	-	-	-	-	0,5452
	• Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	-	-	-	-	0,4378
	• Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	-	-	-	-	0,2085
	• Tingkat Kunjungan Masyarakat perhari	-	-	-	-	0,4743
	• Rasio Perpustakaan Ber-SNP	-	-	-	-	1
	• Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	-	-	-	-	1
	• Rasio Anggota Perpustakaan	-	-	-	-	1
	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat					84,98
	• Frekuensi Membaca (kali/minggu)					6
	• Durasi Membaca (jam/hari)					02,00-02,59
	• Jumlah Buku yang Dibaca (buku/triwulan)					5-6
	• Frekuensi Akses Internet (kali/minggu)					5-6
	• Durasi Akses Internet (jam/hari)					02,00-02,59
2.	Persentase ketersediaan bahan pustaka	21,45	22,45	23,01	23,65	24,68
3.	Jumlah perpustakaan desa/Taman Bacaan Masyarakat (TBM) (unit)	187	187	187	187	223
4.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	14.469	32.160	24.866	12.835	100.647
5.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	52.778	53.491	53.645	40.648	41.440

Sumber : DINAS ARPUS Kab. Pekalongan, 2025

Untuk meningkatkan kinerja urusan perpustakaan, upaya lain yang perlu ditingkatkan adalah kualitas SDM dalam bidang perpustakaan. Kualitas SDM dilihat dari jumlah pustakawan dan tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat. Pada periode 2019-2023 jumlah pustakawan sebanyak 10 orang, sementara jumlah tenaga teknis relatif sama dalam kurun waktu 2019-2023 yaitu sebanyak 31-32 orang pada. Sedangkan untuk penilai yang memiliki sertifikat sampai dengan tahun 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan memiliki 1 (satu) orang penilai yang bersertifikat.



Tabel 2.127.
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai
yang Memiliki Sertifikat Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2020
1.	Pustakawan (orang)	-	-	1	10	10
2.	Tenaga teknis (orang)	9	9	9	10	10
3.	Penilai yang memiliki sertifikat (orang)	-	-	-	-	1

Sumber : DINAS ARPUS Kab. Pekalongan, 2024

r). Kearsipan

Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai sumber informasi yang akurat, sebagai alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, juga sebagai bukti kinerja organisasi dan aparaturinya, bukti pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga evaluasi kinerja dalam suatu perangkat daerah dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan urusan Kearsipan dilaksanakan melalui pengelolaan arsip secara baku serta penyelamatan arsip/dokumen yang mempunyai nilai guna.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan urusan kearsipan yaitu alih media arsip menjadi arsip digital, pengelolaan arsip dimasing-masing perangkat daerah serta ketersediaan SDM arsiparis dan pengelola arsip yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana dalam penyimpanan arsip juga harus menjadi perhatian. Persentase pengelolaan arsip secara baku meningkat dari tahun 2019 sebesar 60,00 persen menjadi 100,00 persen di tahun 2023.

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku telah mencapai 100 persen dalam periode 2019-2023. Jumlah alih media arsip ke media elektronik tahun 2019 sebanyak 2.207 berkas arsip, naik di tahun 2023 sebanyak 2.318 berkas arsip sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk indikator Jumlah penyelamatan arsip tekstual (dokumen) pada tahun 2019 sebanyak 224.591 dokumen kemudian menurun di tahun 2023 sebesar 2.318 dokumen karena adanya pemusnahan arsip tekstual.

Capaian kinerja kearsipan selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.128.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	66,00
2.	Persentase Jumlah arsip yang diselamatkan (%)	23,60	26,70	36,85	12,67	96,00
3.	Persentase pengelolaan arsip secara baku (%)	60,00	55,56	74,30	100,00	66,00
4.	Jumlah arsip tekstual permanen (berkas)	19.968	22.808	26.248	28.556	28.826
5.	Jumlah penyelamatan arsip tekstual (berkas)	2294	2840	3440	2318	260

Sumber : DINAS ARPUS Kab. Pekalongan, 2025



3). **Urusan Pilihan**

1) **Kelautan dan Perikanan**

Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan: Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya. Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Pekalongan mencakup perikanan tangkap dan budidaya dengan total produksi menunjukkan peningkatan dari sebesar 20.534,13 ton pada tahun 2020 menjadi sebesar 21.885,99 ton pada tahun 2024.

Rata-rata pendapatan nelayan menunjukkan adanya peningkatan dari sebesar Rp 1.403.178 pada tahun 2020 menjadi Rp 2.255.958 di tahun 2024, sedangkan Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan meningkat dari sebesar Rp 2.156.844 di tahun 2020 menjadi Rp 2.309.000 di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Pekalongan. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat konsumsi ikan di masyarakat sebesar 32,87 kg/kap/tahun di Tahun 2024 yang meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 30,91 kg/kap/tahun. Secara rinci capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.129.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap	-	-	1,44	-24,62	26,69	12,85
2.	Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya	-	-	1,50	1,69	1,64	24,00
3.	Perikanan Tangkap (Ikan Laut)	ton	5.381,26	4.797,43	3.534,27	4.546,10	5.619,17
4.	Perikanan Budidaya						
	a. Tambak	ton	6.636,13	6.813,64	6.929,80	6.996,37	7.043,68
	b. Kolam	ton	8.516,74	8.772,25	8.921,37	9.067,77	9.223,14
5.	Rata-rata Pendapatan Nelayan	Rp/bulan	1.403.178	1.456.256	1.916.600	2.298.400	2.255.958
6.	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan	Rp/bulan	2.156.844	2.162.785	2.278.540	2.281.630	2.309.000
7.	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/ th	23,69	24,54	27,84	30,91	32,87

Sumber : DINLUTKAN Kabupaten Pekalongan, 2025

Potensi Perikanan budidaya, luas lahan tambak yang diusahakan pada tahun 2024 seluas 826,60 Ha naik dari tahun 2020 sebesar 567,50 Ha. Sedangkan jumlah pembudidaya tambak tahun 2024 sebesar 876 orang, menurun dari tahun 2020 sebesar 983 orang. Produksi tambak pada tahun 2024 mencapai 7.740,117 ton meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 6.636,13 ton.

Sedangkan untuk budidaya kolam, lahan yang digunakan pada tahun 2024 seluas 86,78 Ha dengan jumlah produksi sebesar 1.483,022 ton, lebih banyak dari tahun 2020 yang mencapai 73,20 ha dengan produksi sebanyak 1.381,31 ton. Jumlah pembudidaya kolam meningkat dari tahun 2020 sebesar 1.674 orang menjadi 1.747 orang di tahun 2024. Sementara itu Produksi



Benih BBI meningkat dari tahun 2020 sebesar 1.286.633 ekor menjadi 1.534.132 ekor di tahun 2024. Secara rinci perkembangan perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.130.
Perkembangan Perikanan Budidaya
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Lahan Tambak	Ha	567,50	589,10	589,10	826,60	826,60
2.	Jumlah Pembudidaya Tambak	Orang	983	876	876	876	876
3.	Produksi Tambak	Ton	6.636,13	6.813,64	6.929,80	6.996,37	7.740,117
4.	Luas Lahan Kolam	Ha	73,20	74,63	75,12	86,78	86,78
5.	Produksi Kolam	Ton	1.381,31	1.409,92	1.432,867	1.457,523	1.483,022
6.	Jumlah Pembudidaya Kolam	Orang	1.674	1.747	1.747	1.747	1.747
7.	Produksi Benih BBI	Ekor	1.286.633	1.311.032	1.374.106	1.445.452	1.534.132

Sumber : DINLUTKAN Kabupaten Pekalongan, 2024

Potensi terkait Produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 sebesar 5.619,17 ton meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 5.381,26 ton. Jumlah produksi ikan di TPI Wonokerto dan TPI Jambean pada tahun 2024 sebesar 3.534,27 ton menurun dibandingkan tahun 2018 sebanyak 4.754,01 ton. Nilai raman TPI Wonokerto dan TPI Jambean tahun 2024 mencapai Rp. 24.485.601 naik dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.16.134.790. Secara rinci perkembangan perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.131.
Perkembangan Perikanan Tangkap
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	5.381,26	4.797,43	3.534,27	4.546,10	5.619,17
2.	Produksi TPI Wonokerto	Ton	2.042,73	1.879,51	533,22	1.398,47	2.784,76
3.	Nilai Raman Lelang TPI Wonokerto	Ribu (Rp)	8.789.488	6.207.252	1.748.405	5.482.100	11.246.322
4.	Produksi TPI Jambean	Ton	1.997,13	2.917,92	3.001,06	3.147,64	2.834,41
5.	Nilai Raman Lelang TPI Jambean	Ribu (Rp)	7.345.302	8.760.393	9.000.978	9.446.428	13.239.279

Sumber : DINLUTKAN Kabupaten Pekalongan, 2024

2) Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki pengaruh besar bagi perekonomian di Kabupaten Pekalongan terutama dalam menggerakkan roda perekonomian karena peranannya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menciptakan lapangan usaha, kesempatan kerja, pendapatan negara serta pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan Objek Daya Tarik Wisata saat ini sangat penting. Empat pilar utama dalam pengembangan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata untuk senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor, sehingga dapat menggambarkan satu bentuk daya tarik yang sinergi dalam menarik wisata, tidak terkecuali



budaya/seni tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan prasarana lebih lanjut.

Kontribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum ADHK Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 terus menunjukkan peningkatan dari 889,41 milyar meningkat menjadi 1,32 triliun di Tahun 2024. Sedangkan Kontribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum ADHB juga menunjukkan peningkatan dari 1,2 triliun di Tahun 2020 menjadi 1,9 triliun di Tahun 2024. Selanjutnya Perkembangan pariwisata di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Jumlah pengunjung dari 3 (tiga) Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yaitu Objek Wisata Linggoasri, Objek Wisata Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggoasri juga terus menurun dari 5 tahun terakhir dari 115.756 orang di Tahun 2020 menjadi 73.611 orang di Tahun 2024. Jika dilihat dari Nilai pendapatan sektor pariwisata menurun dari tahun 2020 sebesar Rp 802,14 juta menjadi sebesar Rp 710,74 juta di tahun 2024. Secara rinci, capaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.132.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No.	Indikator (Ha)	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PDRB Akomodasi Makan dan Minum ADHK (Juta Rp.)	889.405,96	934.326,56	1.054.817,94	1.180.112,78	1.319.310,29
2.	PDRB Akomodasi Makan dan Minum ADHB (Juta Rp.)	1.197.711,76	1.283.038,48	1.474.338,51	1.668.740,07	1.902.280,98
3.	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	115.756	95.427	110.898	91.221	73.611
4.	Nilai pendapatan sektor pariwisata (Rp. /tahun)	802.135.500	701.731.750	967.476.500	824.453.750	710.737.750

Sumber : DINPORAPAR Kab.Pekalongan, 2025

3) Pertanian

Sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam PDRB Kabupaten Pekalongan. Namun demikian kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB ADHK cenderung menurun dari sebesar 14,00 persen pada tahun 2020 menjadi 12,61 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mulai tergantikan sektor-sektor lainnya yang tumbuh di Kabupaten Pekalongan. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) yang cenderung menurun dapat diatasi dengan beberapa upaya. Peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi usaha tani, pengembangan agribisnis, serta perbaikan infrastruktur dan teknologi menjadi kunci untuk menjaga peran penting sektor ini dalam perekonomian.

Produktivitas tanaman pangan utama meliputi padi, jagung dan kedelai menunjukkan peningkatan, namun relatif kecil. Pada tahun 2024 produktivitas padi mencapai 53,29 kuintal per hektar, produktivitas jagung mencapai 53,75 kuintal per hektar; dan produktivitas kedelai sebesar 13,33 kuintal per hektar di Tahun 2022. Produksi komoditas hortikultura menunjukkan



kecenderungan meningkat pada jenis komoditas: durian, pisang, bawang daun dan alpukat. Sementara yang lain cenderung menurun.

Populasi produksi komoditas peternakan di Kabupaten Pekalongan rata-rata menunjukkan peningkatan selama kurun waktu tahun 2020-2024 pada semua jenis komoditas. Populasi sapi potong pada tahun 2024 mencapai 13.823 ekor, kerbau sebanyak 752 ekor, kambing sebanyak 52.054 ekor, domba sebanyak 20.827 ekor, ayam broiler sebanyak 12.260.200 ekor, ayam buras/kampung sebanyak 1.288.451 ekor dan itik sebanyak 189.790 ekor. Untuk produksi daging meningkat dari sebesar 8.970.055 kg pada tahun 2020 menjadi 9.801.322 kg pada tahun 2024. Sementara itu untuk produksi telur, susu dan kulit mengalami peningkatan, pada tahun 2024 produksi telur mencapai 8.844.283 kg, produksi susu sebanyak 317.922 liter dan produksi kulit sebanyak 23.843 lembar.

Secara rinci perkembangan kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.133.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
A.	PERTANIAN						
1.	Rasio PDRB ADHB Sub Sektor Pertanian	Persen	15,75	15,65	14,99	14,82	14,80
2.	Rasio PDRB ADHK 2010 Sub Sektor Pertanian	Persen	14,00	13,90	13,30	12,98	12,61
3.	Persentase produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persen	53,58	53,74	52,68	52,85	53,32
3.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	a. Padi	kuintal/ha	53,02	53,12	52,68	52,92	53,29
	b. Jagung	kuintal/ha	52,15	48,19	53,67	51,29	53,75
	c. Kedelai	kuintal/ha	14,04	12,14	13,33	-	-
3.	Produktivitas komoditas hortikultura						
	a. Durian	Kuintal	105.581	106.221	1.659	221.934	405.728
	b. Mangga	Kuintal	125.874	125.451	124.739	153.129	79.211
	c. Rambutan	Kuintal	56.214	224.500	9.824	28.622	28.536
	d. Pisang	Kuintal	219.965	57.210	226.144	173.943	234.540
	e. Kentang	Kuintal	15.411	16.021	9.824	135.805	126.051
	f. Bawang Daun	Kuintal	4.912	5.141	179	24.171	30.871
	g. Alpukat	Kuintal	5.841	4.784	226.144	8.398	10.065
	h. Manggis	Kuintal	8.714	8.512	7.925	6.851	6.321
	i. Cabe	Kuintal	11.741	12.412	868	13.430	9.093
	j. Jambu Air	Kuintal	12.541	12.875	12.201	11.627	4.174
B.	PERKEBUNAN						
	a. Kelapa	Ton	1.331,64	1.303,00	3.417,72	3.949,37	12.150
	b. Tebu	Kuintal	713.415	958.254	35.382,96	2.098,75	24.168
	c. Cengkeh	Ton	488,13	387,25	502,41	483,20	389,38
	d. Kopi	Ton	658	625	491,42	563,40	556,11
C.	PETERNAKAN						
1.	Populasi Produksi Komoditas Peternakan Utama						
	a. Sapi potong	Ekor	22.650	22.705	20.434	13.697	13.823
	b. Kerbau	Ekor	2.904	2.906	2.877	747	752
	c. Kambing	Ekor	51.112	51.290	51.436	51.490	52.054



No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	d. Domba	Ekor	31.445	31.495	31.507	31.512	20.827
	e. Ayam broiler	Ekor	5.822.750	6.084.500	6.681.950	6.940.898	12.260.200
	f. Ayam Buras/Kampung	Ekor	1.287.030	1.287.470	1.288.406	1.288.451	216.215
	g. Itik	Ekor	189.701	189.725	189.785	189.790	189.790
2.	Produksi Peternakan						
	a. Daging	Kg	8.970.055	9.150.519	9.501.785	9.640.650	9.801.322
	b. Telur	Kg	5.555.093	5.409.412	5.689.975	5.670.450	8.844.283
	c. Susu	Liter	365.094	365.098	226.151	298.837	317.922
	d. Kulit	Lembar	16.680	17.551	19.093	19.121	23.843

Sumber : DKPP Kabupaten Pekalongan, 2025

Selain data di atas, data Jaringan irigasi tersier pertanian dimana merupakan jaringan saluran air yang berfungsi untuk mendistribusikan air dari saluran sekunder ke petak-petak sawah di Kabupaten Pekalongan sampai dengan Tahun 2024 dengan **Total Panjang Jaringan Irigasi Tersier** sebesar 1.555.202 meter dengan rincian **kondisi baik** sebesar 331.858 meter (21,34%); **kondisi rusak** sepanjang **318.000 meter (20,45%)** dan non permanen/tanah sepanjang **905.344 meter (58,21%)**.

4) Perdagangan

Hasil capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perdagangan di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya tingginya sumbangan dari sub sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB maupun ADHK. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Berlaku meningkat dari tahun 2018 sebesar 13,40 persen menjadi 13,75 persen di tahun 2022. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan relatif naik dari tahun 2018 sebesar 14,88 persen menjadi 15,30 persen di tahun 2022.

Perdagangan Export Import merupakan salah satu pemasukan APBN / APBD di Kabupaten Pekalongan. Jumlah nilai Ekspor Kabupaten Pekalongan dari tahun 2020-2024 fluktuatif. Pada tahun 2024 nilai ekspor di Kabupaten Pekalongan mencapai US\$ 569,28 milyar. Tahun 2022 adalah tahun dimana nilai ekspor berada di titik tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar US\$ 569,28 milyar. Rata-rata nilai ekspor Kabupaten Pekalongan selama 2020-2024 per tahunnya adalah US\$ 351,55 milyar.

Secara rinci capaian kinerja urusan perdagangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.134.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB (%)	13,42	13,63	13,77	13,80	13,41
2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK (%)	14,90	15,20	15,30	15,32	14,98
3.	Nilai Ekspor Perdagangan (ribu US\$)	259.625	465.428	569.282	463.431	561.384

Sumber : DINPERINDAG; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025



5) Perindustrian

Penyelenggaraan pemeritahan urusan perindustrian dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan tersebut sebagai berikut.

- 1) Perencanaan Pembangunan Industri
 - Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
- 2) Perizinan
 - Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
 - Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.
 - Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
- 3) Sistem Informasi Industri Nasional
 - Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Kecil dan Izin Perluasannya; IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Capaian penyelenggaraan pemeritahan urusan perindustrian di Kabupaten Pekalongan ditunjukkan dengan 4 indikator. Indikator tersebut, yaitu (1) Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku; (2) Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan; (3) Tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah dan (4) Bidang Industri terdiri dari (a) Jumlah Usaha Industri; (b) Jumlah Tenaga Kerja; (c) Jumlah Investasi; (d) Nilai Produksi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkatan regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah/kabupaten untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Lapangan usaha tersebut salah satunya kategori industri pengolahan.

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi dibidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pekalongan tahun 2023 sebesar 30,15 persen, angka ini sedikit menurun dari tahun 2019 sebesar 31,07 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK 2010) tahun 2023 mencapai sebesar 29,90 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan tahun 2019 sebesar 31,49 persen. Meskipun demikian kategori industri pengolahan merupakan peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Pekalongan.

Dalam proses produksi sektor industri pengolahan belum banyak memanfaatkan teknologi sehingga produk industri yang dihasilkan masih kurang berkembang. Sementara itu beberapa industri mikro kecil masih belum memiliki kapasitas dalam mengakses permodalan dan pemasaran. Peranan sektor industri pengolahan terhadap PDRB sejalan dengan perkembangan tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah tahun 2019-2023 yang mengalami peningkatan tiap tahun, yaitu dari 0,45 persen pada tahun 2022 menjadi 0,50 persen pada tahun 2023.

Adapun indikator capaian pelayanan urusan perindustrian Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 seperti terlihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.135.
Indikator Capaian Pelayanan Urusan Perindustrian
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB	30,75	30,96	30,77	30,15	29,66
2.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHK	30,84	30,90	30,61	29,90	29,31
3.	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	0,60	0,29	0,45	0,50	
4.	Bidang Industri					
	a. Jumlah Perusahaan/Unit Usaha (unit)	13.416	13.465	13.525	13.559	13.600
	b. Jumlah Tenaga Kerja (org)	62.681	62.669	62.831	63.019	63.214

Sumber : BPS Kab. Pekalongan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pekalongan; 2025

Jumlah usaha industri di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 terdiri dari Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan tercatat sebanyak 13.559 usaha, naik dibandingkan tahun 2019 sebanyak 13.336 usaha. Adapun jumlah usaha industri menurut kelompok industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.136.
Jumlah Perusahaan/Unit Usaha Menurut Kelompok Industri
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka					
	a. Skala Besar	10	10	11	11	11
	b. Skala Menengah	242	241	241	241	241
	c. Skala Kecil	6.337	6.341	6.367	6.378	6.388
	d. Skala Rmh Tangga	-	-	-	-	
2	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan					
	a. Skala Besar	-	-	-	-	-
	b. Skala Menengah	5	6	6	6	6
	c. Skala Kecil	6.882	6.867	6.900	6.923	6.954
	d. Skala Rmh Tangga	-	-	-		
	Jumlah					
	a. Skala Besar (unit)	10	10	11	11	11
	b. Skala Menengah	247	247	247	247	247
	c. Skala Kecil	13.159	13.208	13.267	13.301	13.342
	d. Skala Rmh Tangga	-	-	-	-	
	Jumlah Total	13.416	13.465	13.525	13.559	13.600

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pekalongan; 2025

Usaha Industri Kabupaten Pekalongan tahun 2023 sebanyak 13.559 usaha mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 63.019 orang dengan proporsi antara tenaga kerja pada usaha industri skala besar sebanyak 13.976 orang, skala menengah sebanyak 7.916 orang dan skala kecil sebanyak 41.127 orang. Tenaga kerja di usaha industri biasanya merupakan pekerja dibayar dan pekerja tidak dibayar. Tenaga kerja tak dibayar ini termasuk pemilik atau pengusaha itu



sendiri dan pekerja keluarga. Pekerja anak dan pekerja lansia yang bekerja di usaha industri sebagian besar merupakan pekerja yang tidak dibayar yang biasanya merupakan pekerja keluarga yang sifatnya hanya membantu dalam kegiatan produksi suatu usaha.

Tenaga kerja Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka sebagian besar merupakan pekerja dibayar, selebihnya merupakan pekerja tidak dibayar. Sedangkan tenaga kerja Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan relatif lebih besar merupakan pekerja tidak dibayar. Usaha Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan paling banyak menjadi pilihan tenaga kerja perempuan, karena selain membutuhkan keterampilan seorang wanita, usaha industri tersebut juga dapat menjadi pekerjaan sampingan dari mengurus rumah tangga. Tenaga kerja perempuan dalam usaha industri biasanya diasosiasikan dengan pekerjaan domestik di dalam rumah tangga, sedangkan tenaga kerja laki-laki diasosiasikan dengan tugas sebagai pencari nafkah utama di luar rumah. Secara rinci tenaga kerja menurut kelompok industri di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137.
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka					
	a. Skala Besar	14.075	13.976	13.976	13.976	13.976
	b. Skala Menengah	7.903	7.747	7.747	7.747	7.747
	c. Skala Kecil	26.784	26.784	26.886	26.969	27.094
	d. Skala Rmh Tangga	-	-	-	-	-
2	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan					
	a. Skala Besar	-	-	-	-	-
	b. Skala Menengah	144	169	169	169	169
	c. Skala Kecil	13.775	13.993	14.053	14.158	14.238
	d. Skala Rmh Tangga	-	-	-	-	-
	Jumlah					
	a. Skala Besar (orang)	14.075	13.976	13.976	13.976	13.976
	b. Skala Menengah (orang)	8.047	7.916	7.916	7.916	7.916
	c. Skala Kecil (orang)	40.559	40.777	40.939	41.127	41.332
	d. Skala Rmh Tangga(orang)	-	-	-	-	-
	Jumlah Total (orang)	62.681	62.669	62.831	63.019	63.214

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pekalongan; 2025

6) Transmigrasi

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Transmigrasi di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 2) Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan 3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 capaian kinerja urusan Transmigrasi diukur berdasarkan 3 indikator yang telah ditetapkan, yaitu : 1) Persentase pelaksanaan pengiriman calon transmigran ke lokasi transmigrasi; 2) Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi; 3) Jumlah calon transmigran.

Minat masyarakat dalam mengikuti program transmigrasi masih cukup tinggi, dengan harapan dapat mengubah hidup menjadi lebih baik. Akan tetapi jumlah kuota transmigran setiap daerah kuotanya ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Provinsi melalui



APBD Provinsi yang nantinya oleh Provinsi kuota tersebut akan dibagi ke semua daerah. Pada tahun 2020 persentase pelaksanaan pengiriman calon transmigran ke lokasi transmigrasi tahun 2020 sebesar 0,00 persen, tidak ada pemberangkatan transmigrasi karena adanya pandemi COVID-19. Sedangkan jumlah transmigran tahun 2021-2022 yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi UPT Tanjung Buka SP-6 B Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 sebanyak 2 KK berjumlah 6 Jiwa. Namun demikian untuk penempatan transmigrasi berdasarkan alokasi target dari kementerian desa

. Faktor penghambatnya adalah disebabkan masih banyak pilihan lain dalam meningkatkan taraf hidupnya selain transmigrasi, misal berdagang atau buruh serabutan serta adanya persepsi dan informasi yang salah tentang warga transmigrasi yang ditempatkan banyak yang mengalami kesulitan hidup baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun dalam pemasaran hasil pertanian/bercocok tanam di lokasi transmigrasi, dan adanya ketakutan timbulnya konflik antara warga lokal dengan para transmigran. Selengkapnya capain kinerja urusan Transmigrasi tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138.
Indikator Capaian Pelayanan Urusan Transmigrasi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelaksanaan pengiriman calon transmigran ke lokasi transmigrasi (%)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	0	1	1	0	0
3	Jumlah calon transmigran (KK)	12	1	1	0	0

Sumber: DINKOP UKM DAN NAKER Kab. Pekalongan, 2024

4). Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a). Perencanaan

Pada tahun 2024, Kabupaten Pekalongan berhasil mencatatkan capaian yang **CUKUP BAIK** dalam **Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan total nilai sebesar 74,602. Capaian ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- (1). **Indeks Sinergi (20,602)**: Nilai ini mencerminkan adanya kolaborasi yang baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan agar lebih maksimal.
- (2). **Indeks Kualitas Perencanaan (44,00)**: Menggambarkan kualitas dan efektivitas proses perencanaan pembangunan yang dilakukan. Nilai ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah cukup matang dan terstruktur, namun masih perlu penajaman lebih lanjut untuk mencapai standar optimal.
- (3). **Indeks Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja (10,00)**: Menilai sejauh mana perencanaan pembangunan terkait dengan rencana kinerja yang lebih terukur. Nilai ini menunjukkan bahwa keterhubungan antara perencanaan pembangunan dan kinerja masih perlu diperkuat agar dapat menghasilkan output yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menunjukkan kemajuan yang positif dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal peningkatan sinergi antara pihak terkait dan penguatan keterhubungan antara perencanaan pembangunan dengan kinerja yang lebih jelas. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus



meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih optimal di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, untuk memperbaiki kualitas dokumen perencanaan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus fokus pada penyelarasan antara perencanaan daerah dan nasional, memperkuat hubungan antara program dengan sasaran yang jelas dan terukur, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hasil pembangunan yang tercapai akan lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan

Kinerja fungsi penunjang perencanaan di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu tahun 2020-2023 relatif baik, dimana hal tersebut dapat dilihat dari Tingkat Capaian Kinerja pembangunan Daerah mengalami peningkatan dari 75,00 persen di Tahun 2020 menjadi 96,10 persen di Tahun 2024. Disamping itu juga, persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD mencapai 100 persen dalam lima tahun terakhir.

Secara rinci capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139.
Capaian Kinerja Fungsi Perencanaan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Dokumen Perencanaan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	-	-	-	1
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	1	-	-	-
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	2	2	2	2	2
4.	Tingkat Capaian Kinerja pembangunan Daerah	75,00	77,00	90,91	95,69	96,10
5.	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BAPPERIDA Kab. Pekalongan, 2024

b). Keuangan

Kinerja fungsi Penunjang Keuangan selama kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat dari capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Pekalongan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Opini WTP ini diperoleh Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2019-2023 secara berturut-turut.

Kinerja tersebut didukung ketepatan waktu penetapan APBD yang selalu tepat waktu, dan ketepatan waktu perangkat daerah menyerahkan laporan keuangan yang selalu tepat waktu. Kinerja pelayanan bidang keuangan terlihat dari rasio PAD terhadap total penerimaan daerah



tahun 2024 sebesar 17,29 persen lebih kecil dari tahun 2023 sebesar 16,11 persen. Kemudian jumlah barang aset Daerah dari 4.371.887 unit di tahun 2020 menjadi 4.791.514 unit di tahun 2024. Hal ini diikuti dengan nilai aset daerah yang mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar Rp. 4,11 trilyun naik menjadi Rp 5,37 trilyun di tahun 2024.

Secara rinci kinerja terkait keuangan daerah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.140.
Capaian Kinerja Fungsi Keuangan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan keuangan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	95,83
2.	Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah	16,24	16,68	16,53	16,11	17,29
3.	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Jumlah barang Aset Daerah (unit)	4.371.887	4.490.289	4.586.469	4.783.201	4.791.514
5.	Jumlah Nilai Harga Aset Daerah (Rp. juta)	4.114.828	4.452.260	4.728.468	4.948.240	5.369.480

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2025

c). Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diperlukan Aparatur Sipil Negara sebagai unsur aparatur negara yang siap menjadi abdi masyarakat yang memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan. dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jumlah ASN sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 8.891 orang. Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 8.864 orang. Untuk lebih rincinya jumlah ASN per 31 Desember 2024 dijelaskan dalam tabel-tabel berdasarkan data pilah baik berdasarkan golongan dan pendidikan sebagai berikut.

Tabel 2.141.
Nominatif Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Pekalongan
Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2024

No	GOL. RUANG	PNS		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	I/a	3		3
2	I/b	25	2	27
3	I/c	49	10	59
4	I/d	100	5	105
5	II/a	255	213	468
6	II/b	410	160	570
7	II/c	1103	1851	2954



No	GOL. RUANG	PNS		TOTAL
		PRIA	WANITA	
8	II/d	493	629	1122
9	III/a	329	710	1039
10	III/b	495	944	1439
11	III/c	303	283	586
12	III/d	237	213	450
13	IV/a	34	28	62
14	IV/b	1	1	2
15	IV/c	2	3	5
16	IV/d	3		3
17	IV/e	25	2	27
Jumlah		3839	5052	8.891
		Jumlah 2024		8.891
		2023		8.864
		2022		8.882
		2021		8.047
		2020		8.113

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pekalongan, 2025

Tabel 2.142.
Nominatif Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Pendidikan
per 31 Desember 2024

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	D I	3	6	9
2.	D II	31	27	58
3.	D III	318	879	1197
4.	D IV	28	124	152
5.	S1	2311	3651	5962
6.	S2	277	186	463
7.	S3		1	1
8.	SD	28	2	30
9.	SLTA	740	170	910
10.	SLTP	103	6	109
Jumlah Total		3.839	5.052	8.891

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pekalongan; 2025

Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat dari capaian Indeks Sistem Merit yang mengalami kenaikan dari 0,64 di Tahun 2023 menjadi 0,65 di Tahun 2024. Sistem Merit menurut disiplin ilmu merupakan suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang diangkat, ditempatkan, dipromosi dan dipensiunkan sesuai UU yang berlaku. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Capaian Nilai Sistem Merit juga mengalami kenaikan dari 258,50 (baik) di Tahun 2022 menjadi 262,00 (baik) di Tahun 2023. Indeks Profesionalitas ASN juga mengalami kenaikan dari 63,86 di Tahun 2022 menjadi 69,60 di Tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.143.
**Capaian Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Sistem Merit	-	0,47	0,63	0,64	0,65
2.	Nilai Sistem Merit	-	191,50 (Kurang)	258.50 (Baik)	262,00 (baik)	266,50 (Baik)
3.	Indeks Profesionalitas ASN	-	34,51 (rendah)	63.86 (rendah)	69,60 (rendah)	75,25 (Sedang)

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pekalongan, 2025

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pekalongan telah secara konsisten dan komitmen penuh menerapkan sistem merit secara baik dan adil. Bahkan hal itu diakui dan mendapatkan apresiasi ketegori baik dalam acara Anugerah Meritokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Anugerah Meritokrasi merupakan acara penghargaan yang diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit secara baik dan adil.

d). Penelitian dan Pengembangan

Pada pasal 209 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan penelitian dan pengembangan. Dalam pasal 373, pasal 374 dan pasal 388 disebutkan bahwa Kelitbangan sebagai salah satu instrumen pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembinaan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Bapperida Kabupaten Pekalongan sebagai fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan. Bagi pemerintahan daerah, penelitian dan pengembangan itu sendiri hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan (*planning by research*), fungsi formulasi kebijakan (*formulating policy*), dan fungsi kontrol (*controlling*).

Kinerja fungsi penunjang penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu tahun 2018-2022 realisasinya cenderung naik. Hal ini dapat diketahui dari capaian indikator yang ada berupa Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan mengalami kenaikan di Tahun 2023 sebesar 80,00 persen dari 62,50 di Tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144.
**Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020- 2024**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	30,00	30,00	30,00	30,00	50,00

Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2024

Secara khusus, penelitian dan pengembangan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah memiliki fungsi dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan



salah satu strategi utama dalam sistem yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dan telah ditindaklanjuti Pemerintah Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan regulasi dalam pengembangan inovasi di daerah.

Inovasi memiliki peranan penting dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan, terutama tuntutan inovasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Karena itu perlu adanya dorongan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan inovasi sebagai acuan/roadmap sistem inovasi daerah.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebesar **3.632 (sangat Inovatif)**, Tahun 2021 sebesar **52,05 (inovatif)**, Tahun 2022 sebesar **58,19 (inovatif)**, Tahun 2023 sebesar **52,86 (inovatif)** dan Tahun 2024 sebesar **46,66 (inovatif)**. Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 merupakan laporan informasi data inovasi daerah yang telah divalidasi dan dilakukan *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Sientific Modelling Application Research and Training for City-Centered Innovation and Technology (SMART CITY)* Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.

Kapabilitas inovasi menjadi ukuran untuk menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan prosesproses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi. Kapabilitas inovasi Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2024 mencapai 2,43. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145.
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Inovasi daerah	3.632 (sangat inovatif)	52,05 (inovatif)	58,19 (inovatif)	52,86 (inovatif)	46,66 (inovatif)
2	Peringkat Kabupaten se-Indonesia	39	78	40	92	194
3	Kapabilitas Inovasi	-	-	-	2,50	2,43

Sumber : Kemendagri, 2024

e). Sekretariat Daerah

Kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu tahun 2020-2024 secara keseluruhan dapat dilihat dari capaian kinerja Tingkat kematangan Organisasi. Penilaian tingkat kematangan Perangkat Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator merupakan bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi pada 4 (empat) area perubahan. Area perubahan di bidang akuntabilitas diterjemahkan dalam aspek perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, serta pengukuran kinerja. Sedangkan area perubahan di bidang



penataan tata laksana diterjemahkan dalam *variabel standard operasional prosedur*. Area perubahan di bidang penataan sumber daya manusia (SDM) diterjemahkan dalam variabel pendidikan dan pelatihan serta manajemen sumber daya yang terukur. Area perubahan di bidang manajemen perubahan diterjemahkan dalam variabel manajemen risiko, pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan amanah Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dengan menyelenggarakan kegiatan penilaian tingkat kematangan organisasi daerah (KOD) kepada 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil pengolahan data koding penilaian tingkat kematangan seluruh Perangkat Daerah, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Perangkat Daerah telah memiliki tingkat kematangan organisasi pada level sedang, sehingga diperlukan upaya peningkatan kinerja pada aspek tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi melalui perbaikan sistem kerja pada 11 (sebelas) variabel yang digunakan sebagai instrumen penilaian kematangan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah.

Selain itu indikator pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Pekalongan meliputi Capaian Predikat SAKIP, Nilai SAKIP, Kategori Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Indeks RB. Secara keseluruhan, ukuran capaian kinerja pada urusan pemerintahan umum di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.146.
Capaian Kinerja Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Kematangan Organisasi (Kategori)	Sedang	29,07 (sedang)	29,48 (sedang)	36,50 (sedang)	38,66 (sedang)
2.	Predikat SAKIP	B	B	B	B	B
3.	Nilai SAKIP	64,03	64,18	64,33	64,89	65,69
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	B (81,00)	B (81,25)	B (83,00)	B (83,44)	B (83,35)

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, Tingkat Kematangan Organisasi mengalami kenaikan dari 36,50 (sedang) di Tahun 2023 menjadi 38,66 (sedang) di Tahun 2024. Sedangkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 yang dijadikan sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilihat dari sisi kinerjanya masih berada diangka **65,69**, artinya masih berada pada peringkat “**B**”, lebih baik dibanding tahun 2023 yang mendapat predikat “**B**” dengan nilai **64,89**. Penilaian ini menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

f). Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan selama Tahun 2019-2023 dilihat dari Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD Tahun 2023 mencapai 95 persen sama dari Tahun 2022. Selain itu Persentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD mencapai 95 persen sama dari Tahun 2022. Kinerja Penunjang Penunjang Sekretariat DPRD dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 2.147.
Capaian Kinerja Fungsi Sekretariat DPRD
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	94,00	91,00	95,00	95,00	100,00
2.	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	94,00	91,00	95,00	95,00	95,10

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan, 2024

5). Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat

Salah satu unsur dalam rangka menuju sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah adanya sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berabagai program dan kegiaian pembangunan kemasayarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pekalongan antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

Implementasi atas pelaksanaan pengawasan secara umum ditunjukkan dengan banyaknya temuan yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pengawasan tersebut di atas. Berbagai temuan ini disampaikan kepada pemerintah daerah, baik yang sifatnya hanya rekomendasi maupun kondisi dan situasi yang harus ditindaklanjuti dengan perbaikan atau penyesuaian. Mendasarkan pada hasil temuan pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Pekalongan mampu menindaklanjuti hasil temuan BPK dengan baik dibandingkan dengan pelaksanaan tindaklanjut pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun untuk hasil temuan yang ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Pekalongan implementasinya tidak seefektif terhadap tindaklanjut temuan dari BPK. Tindaklanjut temuan inspektorat baik provinsi maupun kabupaten cenderung efektivitasnya menurun ditahun 2022. Dalam hal ini, kepatuhan untuk menindaklanjuti hasil temuan lebih besar pada temuan BPK dibandingkan pada hasil temuan inspektorat.

Di sisi lain, hasil pengawasan memiliki fungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan-perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan kualitas (*Quality Insurence*) agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat tercapai secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari sisi manajerial, pengawasan ini akan memberikan motivasi untuk melakukan perbaikan terhadap kinerja-kinerja yang tidak memuhi target maupun tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Berbagai hasil temuan atas kegiatan pengawasan diharapkan menjadi perhatian bagi penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga dapat mendorong pada perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang lebih akuntabel.



Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengendalian ini pencapaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Pekalongan sampai pada tahun 2022 masih ada pada level 3 atau tahap terdefinisi di mana kondisi tersebut kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal sudah diimplementasikan namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Ke depan masih perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang lebih baik lagi. Capaian indikator pengawasan di Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat melalui indikator yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.148.
Capaian Kinerja Fungsi Fungsi Pengawasan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2 (2,03)	Level 3 (3,183)	Level 3 (Penilaian Mandiri 4,122; Penjaminan Kualitas 3,006)	Level 3 (Penilaian Mandiri 3,62; Penjaminan Kualitas 3,00)
2.	Kapabilitas APIP	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,00)	Level 3 (Penilaian Mandiri 3,18; Penjaminan Kualitas 3,09)	Level 3 (Penilaian Mandiri 3,27; Penjaminan Kualitas 3,09)	Level 3 (Penilaian Mandiri 3,29; Penjaminan Kualitas 3,00)

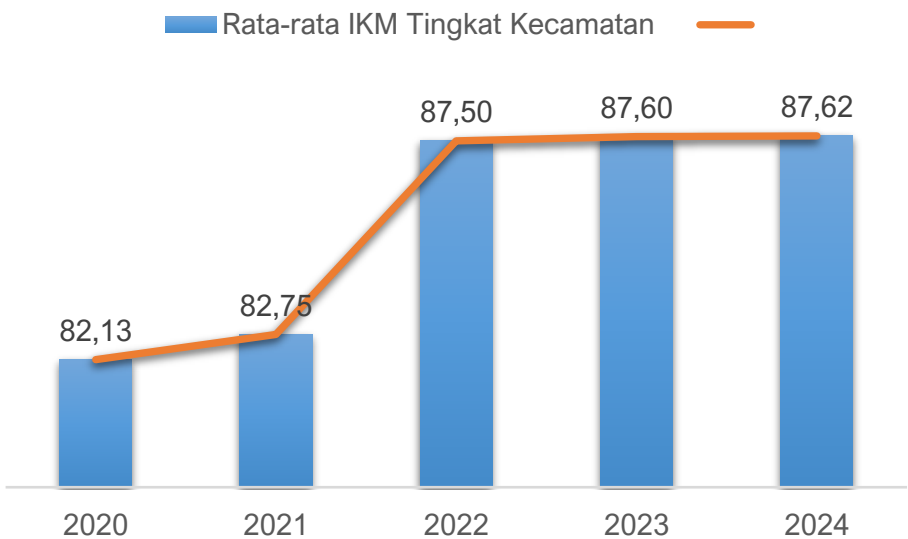
Sumber : INSPEKTORAT Kab. Pekalongan, 2024

6). Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 272 desa, 13 kelurahan, 1.058 dusun, 1.501 RW, dan 4.466 RT. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Setiap unsur di lingkungan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kecamatan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

Kinerja 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Pekalongan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 yaitu rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan Tahun 2020-2024 sebagai berikut.



Gambar 2.114. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Dari gambar diatas, Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan Kabupaten Pekalongan meningkat dari 82,13 persen di Tahun 2020 meningkat menjadi 87,62 persen di Tahun 2024. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang dilaksanakan secara berkala. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

7). Unsur Pemerintahan Umum

a). Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam rangka menjaga NKRI dan kesatuan dan persatuan bangsa serta rasa patriotisme dilakukan pembinaan Wawasan Kebangsaan dengan peserta perwakilan pelajar SMA/SMK di wilayah Kabupaten Pekalongan, serta pengiriman peserta Diklat Bela Negara bekerjasama dengan KODIM Pekalongan. Selain itu juga menyelenggarakan Upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Lahir Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, hari Pahlawan dan Hari Bela Negara.

Pembinaan politik daerah melalui kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk menjaring informasi dari masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). Rapat koordinasi Kominda membahas masalah strategis intelijen terkait masalah politik, keamanan, ketertiban konflik konflik horisontal dan vertikal, konflik agama yang secara riil terjadi di masyarakat dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah di Kabupaten Pekalongan. Koordinasi Intelijen Daerah (KOMINDA) yang membahas masalah strategis terkait hal hal yang berpotensi mengganggu keamanan. Hasil koordinasi digunakan sebagai laporan kepada Bupati selaku Kepala Daerah, Gubernur, Mendagri dan Menhankam untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan.



Pembinaan politik daerah juga dilakukan melalui pembinaan bagi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) sehingga dengan pembinaan ini dapat memantau aktifitas organisasi kemasyarakatan dan mencegah adanya organisasi ekstrem yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat serta mencegah timbulnya terorisme. Untuk menjaga keharmonisan, kerukunan dan saling toleransi, salah satu hal yang dilakukan adalah dengan adanya dialog antar Pemerintah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Didalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pekalongan kegiatannya bukan hanya dialog dengan pemuka agama maupun tokoh agama untuk menyerap aspirasi, sosialisasi, sarasehan akan tetapi juga memberikan pelayanan administrasi berupa pemberian rekomendasi pendirian tempat ibadah selain itu juga melakukan verifikasi bangunan bukan tempat ibadah, tetapi dipergunakan untuk tempat ibadah.



B. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Gambaran Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

Analisis pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan di tingkat lokal. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, adil, dan merata. Undang-Undang ini memberikan kerangka yang lebih jelas dan transparan mengenai pembagian sumber pendapatan antara pusat dan daerah, termasuk Dana Transfer ke Daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Melalui pendekatan berbasis kinerja, daerah didorong untuk meningkatkan kualitas belanja serta memperkuat kapasitas fiskalnya dalam rangka mendukung pelayanan publik yang optimal dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah diawali dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

a. Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Pendapatan daerah merupakan instrumen yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dinilai melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Dengan demikian, efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui belanja daerah tidak terlepas dari kapasitas fiskal yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2024 antara lain:

- 1). Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - a). Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame, termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.



- b). Pembenahan manajemen penerimaan PAD terutama fokus pada pembenahan data wajib pajak dan objek pajak, kemudahan pembayaran pajak berbasis IT (*e-tax*), peningkatan ketaatan wajib pajak, dan peningkatan SDM untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak terutama pemeriksa pajak dan appraisal/penilai objek pajak, termasuk di dalamnya peningkatan basis data pajak dengan menerjunkan petugas lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung;
 - c). Meningkatkan potensi riil penerimaan pajak dan retribusi melalui penyesuaian tarif, kenaikan NJOP pada PBB/BPHTB, penerimaan pajak dan retribusi berbasis realtime, keringanan pajak untuk wajib pajak dengan persyaratan tertentu, reward bagi wajib pajak taat pajak, dsb;
 - d). Membuat kajian potensi riil penerimaan pajak dan retribusi secara berkala sebagai dasar menentukan target/proyeksi PAD;
 - e). Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 2). Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;
- 3). Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil laba deviden kepada Pemda atas Penyertaan Modal perusahaan milik daerah, antara lain dari PDAM, Perusda BPR/BKK, dan PT. Bank Jateng;
- 4). Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 5). Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.149
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 (Rp. 000)

No.		Uraian	Realisasi (Rp.000)					Rata-rata Pertumbuhan
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	1	Pendapatan Asli Daerah	341.901.470	346.599.468	342.971.185	384.481.026	384.822.405	3,13%
1	11	Pendapatan Pajak Daerah	74.247.140	83.272.776	110.344.251	110.054.648	121.974.843	13,81%
1	12	Pendapatan Retribusi Daerah	12.726.931	11.265.027	23.996.597	14.959.490	16.354.387	18,30%
1	13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.124.616	9.314.710	11.047.546	11.051.063	10.773.200	2,03%
1	14	Lain-lain PAD yang Sah	244.802.784	242.746.955	197.582.791	248.415.824	235.719.975	0,29%
1	2	Pendapatan Transfer	1.621.942.167	1.634.957.101	1.721.085.935	1.808.650.871	1.937.371.153	4,57%
1	211	Dana Bagi Hasil	30.732.286	37.991.747	34.090.009	29.916.065	29.249.108	-0,28%
1	212	Dana Alokasi Umum	885.145.414	871.067.401	867.457.562	913.291.118	966.058.394	2,26%
1	213	Dana Alokasi Khusus - Fisik	76.069.525	83.659.881	78.240.636	110.610.428	175.116.704	25,80%
1	214	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	214.968.183	215.317.370	281.628.140	296.645.972	310.743.788	10,26%



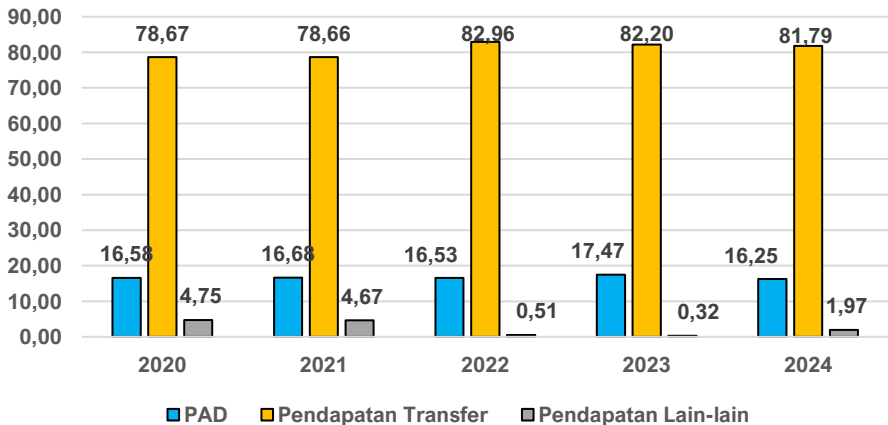
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.		Uraian	Realisasi (Rp.000)					Rata-rata Pertumbuhan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	221	Dana Insentif Daerah	40.927.086	33.289.185	1.482.507	29.255.354	2.815.646	417,20%
1	224	Dana Desa	263.397.106	262.704.272	263.714.049	264.899.843	269.854.578	0,61%
1	231	Pendapatan Bagi Hasil	100.595.200	124.294.980	135.132.754	142.280.182	145.056.178	9,88%
1	232	Bantuan Keuangan Lainnya	10.107.367	6.632.264	59.340.277	21.751.909	38.476.759	193,47%
1	3	Lain-Lain Pendapatan yg Sah	97.954.838	96.986.944	10.566.895	7.100.000	46.609.189	108,39%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH			2.061.798.474	2.078.543.513	2.074.624.015	2.200.231.897	2.368.802.747	3,58%

Sumber : BPKD Kabupaten Pekalongan 2024

Pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan meningkat dari tahun ketahun dari 2,06 triyun di Tahun 2020 menjadi 2,37 trilyun di Tahun 2024. Dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024, pendapatan Kabupaten Pekalongan hanya mengalami penurunan sebesar 0,19 persen pada tahun 2022 sebesar 2,07 trilyun. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 adalah sebesar 3,58 persen. Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,13 persen. komponen pendapatan asli daerah penyumbang pertumbuhan tertinggi adalah retribusi daerah yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,30 persen.

Derajat otonomi fiskal Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun terakhir cenderung stagnan diangka 16-17 persen. Otonomi fiskal Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar 15,64 persen menjadi 17,53 persen pada tahun 2023. Otonomi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan otonomi fiskal pemerintah daerah. Perkembangan Otonomi Fiskal Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Sumber : BPKD Kabupaten Pekalongan 2024

Gambar 2.115. Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024

Dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah, unsur-unsur pendapatan daerah dengan proporsi terbesar dalam kurun waktu 2020-2024 adalah dana transfer dengan kisaran antara 78,66 persen hingga 82,96 persen. Sementara itu pendapatan asli daerah berkisar antara 16,25 persen hingga 17,47 persen. Adapun lain-lain pendapatan yang sah berkisar antara 0,32 persen hingga 4,75 persen. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah



Kabupaten Pekalongan perlu menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dapat meningkat otonomi fiskal dan ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Tahun 2024 rasio ketergantungan keuangan sebesar 81,79 persen menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 82,20 persen. Rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Pekalongan terhadap pemerintah pusat dan provinsi termasuk kategori sangat tinggi dengan rasio diatas 50 persen.

b. Belanja Daerah Tahun 2020-2024

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Pekalongan menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,24 persen dalam kurun waktu tahun 5 tahun terakhir (2020-2024). Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.150
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2020-2024 (Rp. 000)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 (unaudited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	Belanja Operasi	1.422.244.907	1.486.225.964	1.478.715.782	1.527.743.263	1.694.442.248	4,56
211	Belanja Pegawai	934.743.679	963.180.415	930.072.199	940.713.412	996.155.860	1,66
212	Belanja Barang dan Jasa	389.154.355	443.204.514	449.632.590	479.981.844	559.215.566	9,65
215	Belanja Hibah	82.571.723	64.789.644	77.868.233	92.143.456	121.907.157	12,32
216	Belanja Bantuan Sosial	15.775.150	15.051.391	21.142.760	14.904.551	17.163.665	5,38
22	Belanja Modal	239.471.535	208.046.317	261.155.584	266.777.591	331.964.607	9,75
221	Belanja Modal Tanah	2.213.381	1.213.543	0	144.377	7.176.237	1.575,11
222	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.608.029	43.740.312	49.698.790	59.058.939	84.717.124	9,68
223	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.490.710	64.198.123	46.231.133	120.102.251	132.906.096	31,06
224	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	82.899.943	92.894.805	157.902.056	75.139.767	101.984.064	16,34
225	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.259.473	5.999.534	7.323.605	7.208.168	4.533.390	-5,19



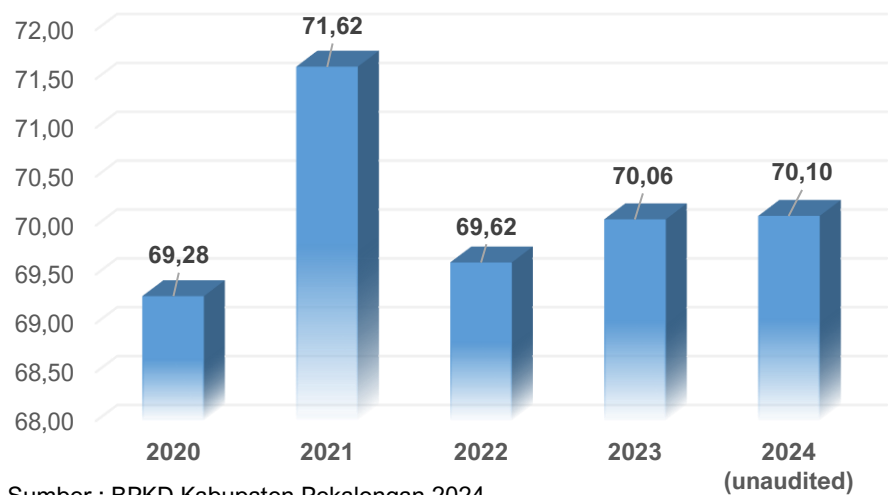
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024 (unaudited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
226	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	5.124.089	647.696	-87,36
23	Belanja tak Terduga	3.892.046	4.681.288	4.262.402	1.268.571	1.547.578	-9,23
231	Belanja Tidak Terduga	3.892.046	4.681.288	4.262.402	1.268.571	1.547.578	-9,23
24	Belanja Transfer	387.409.224	376.089.591	379.820.078	384.774.956	389.324.818	0,14
241	Belanja Tranfer	5.536.295	8.679.399	10.708.399	11.845.113	12.895.413	24,91
2411	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.761.769	7.339.869	8.585.378	9.768.019	10.634.144	23,44
2412	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	774.526	1.339.530	2.123.021	2.077.094	2.261.269	34,54
242	Belanja Tranfer Bantuan Keuangan	381.872.929	367.410.193	369.111.679	372.929.843	376.429.405	-0,34
2421	Transfer Bantuan Keuangan Ke desa	381.872.929	367.410.193	369.111.679	372.929.843	376.429.405	-0,34
2	Jumlah Belanja	2.053.017.712	2.075.043.160	2.123.953.846	2.180.564.382	2.417.279.251	4,24

Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2025

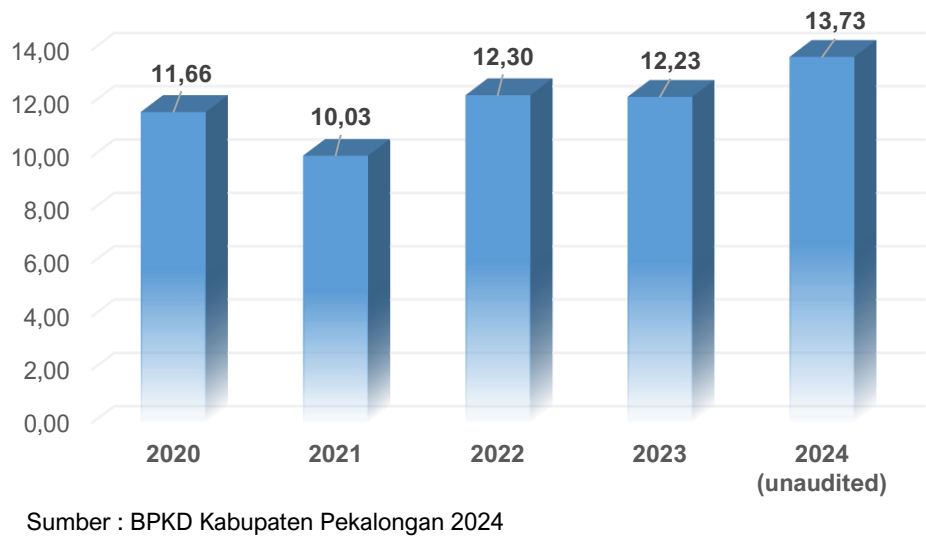
Rata-rata kenaikan belanja Tahun 2020-2024 sebesar 4,24 persen. Persentase kenaikan belanja tertinggi terjadi di tahun 2024 yaitu sebesar 10,86 persen, dan terendah tahun 2021 sebesar 1,07 persen. Komponen Belanja Operasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan fluktuaktif, tertinggi tahun 2024 sebesar 10,91 persen. Selama 5 tahun terakhir rata-rata kenaikan belanja operasi sebesar 4,56 persen. Komponen Belanja Modal juga menunjukkan perkembangan yang fluktuaktif. Pertumbuhan belanja modal tertinggi di tahun 2022 sebesar 25,53 persen. Rata-rata pertumbuhan belanja modal sebesar 9,35 persen.

Jika dilihat rasio Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 berkisar antara 69,28 persen sampai dengan 71,62 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja operasional program dan kegiatan seperti belanja pegawai, belanja barang jasa serta belanja hibah dan bantuan sosial menempati proporsi yang relatif besar. Dari total belanja operasi tersebut belanja pegawai masih menempati proporsi terbesar dengan rata-rata 62,76 persen. Perkembangan selengkapnya rasio Belanja Operasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2.116. Rasio Belanja Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Tahun 2020-2024 (persen)

Sedangkan Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah di Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan fluktuaktif. Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah tahun 2024 sebesar 13,73 persen, naik bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 12,23 persen Perkembangan rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah di Kabupaten Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2.117. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Terhadap Total Belanja Tahun 2020-2024 (persen)

c. Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup :

- 1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
- 2). Pencairan Dana Cadangan.
- 3). Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- 4). Penerimaan Pinjaman Daerah.



- 5). Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
- 6). Penerimaan Piutang Daerah.
- 7). Penerimaan Dana Bergulir.
- 8). Penerimaan Hasil Penarikan.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

- 1). Pembentukan dana cadangan.
- 2). Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Pekalongan menunjukan perkembangan yang fluktuaktif. Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Pekalongan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Penerimaan Piutang Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Data Bergulir.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan fluktuaktif, tertinggi tahun 2021 sebesar Rp. 163,759 milyar, tetapi tahun 2024 turun menjadi Rp. 120.347 milyar. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.151
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pekalongan tahun 2020-2024 Rp. (000)

NO.		U R A I A N	2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	159.978.997	163.759.760	161.260.113	106.680.282	120.347.797
4	11	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	159.978.997	163.759.760	161.260.113	106.680.282	100.347.797
4	12	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	20.000.000
4	13	Penerimaan Kembali Investasi Non permanen lainnya	0	0	0	0	0
		Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
4	2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000	6.000.000	5.250.000	26.000.000	0
4	21	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	20.000.000	0
4	22	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	5.000.000	6.000.000	5.250.000	6.000.000	0
		Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO			154.978.997	157.759.760	156.010.113	80.680.282	120.347.797
SILPA			163.759.760	161.260.113	106.680.282	100.347.797	71.871.293

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2025

Pertumbuhan APBD Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun terakhir (2021-2024) dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.152
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2024

KODE				URAIAN	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				PENDAPATAN DAERAH	0,81	-0,19	6,05	7,66	3,58
1	1			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,37	-1,05	12,10	0,09	3,13
1	1	1		Pajak Daerah	12,16	32,51	-0,26	10,83	13,81
1	1	2		Retribusi Daerah	-11,49	113,02	-37,66	9,32	18,30
1	1	3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	-8,00	18,60	0,03	-2,51	2,03
1	1	4		Lain - lain PAD yang Sah	-0,84	-18,61	25,73	-5,11	0,29
1	2			Pendapatan Transfer	0,80	5,27	5,09	7,12	4,57
1	2	1		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,09	4,42	7,06	9,68	5,31
1	2	1	1	Dana Bagi Hasil	23,62	-10,27	-12,24	-2,23	-0,28
1	2	1	2	Dana Alokasi Umum	-1,59	-0,41	5,28	5,78	2,26
1	2	1	3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	9,98	-6,48	41,37	58,32	25,80
1	2	1	4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0,16	30,80	5,33	4,75	10,26
1	2	2		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-2,74	-10,40	10,92	-7,30	-2,38
1	2	2	1	Dana Insentif Daerah	-18,66	-95,55	1873,37	-90,38	417,20
1	2	2	4	Dana Desa	-0,26	0,38	0,45	1,87	0,61
1	2	3		Pendapatan Transfer Antar Daerah	18,27	48,54	-15,65	11,89	15,76
1	2	3	1	Dana Bagi Hasil	23,56	8,72	5,29	1,95	9,88
1	2	3	2	Bantuan Keuangan Lainnya	-34,38	794,72	-63,34	76,89	193,47
1	3			Lain - lain pendapatan daerah yg sah	-0,99	-89,10	-32,81	556,47	108,39
2				BELANJA DAERAH	1,07	2,36	2,67	10,86	4,24
2	1			Belanja Operasi	4,50	-0,51	3,32	10,91	4,56
2	1	1		Belanja Pegawai	3,04	-3,44	1,14	5,89	1,66
2	1	2		Belanja Barang dan Jasa	13,89	1,45	6,75	16,51	9,65
2	1	5		Belanja Hibah	-21,54	20,19	18,33	32,30	12,32
2	1	6		Belanja Bantuan Sosial	-4,59	40,47	-29,51	15,16	5,38
2	2			Belanja Modal	-13,12	25,53	2,15	24,43	9,75
2	2	1		Belanja Modal Tanah	-45,17	-100,00	0,00	4.870,49	1181,33
2	2	2		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-37,16	13,62	18,83	43,45	9,68
2	2	3		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-18,21	-27,99	159,79	10,66	31,06
2	2	4		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12,06	69,98	-52,41	35,73	16,34
2	2	5		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-4,15	22,07	-1,58	-37,11	-5,19
2	2	6		Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	-87,36	-21,84
2	3			Belanja Tidak Terduga	20,28	-8,95	-70,24	21,99	-9,23
2	3	1		Belanja Tidak Terduga	20,28	-8,95	-70,24	21,99	-9,23
2	4			Belanja Transfer	-2,92	0,99	1,30	1,18	0,14
2	4	1		Belanja Tranfer bagi Hasil Pendapatan	56,77	23,38	10,62	8,87	24,91
2	4	2		Belanja Tranfer Bantuan Keuangan	-3,79	0,46	1,03	0,94	-0,34
				SURPLUS / (DEFISIT)	-60,14	-1.509,28	139,87	-346,48	-444,01
4				PEMBIAYAAN DAERAH	1,79	-1,11	-48,29	49,17	0,39
4	1			Penerimaan Pembiayaan	2,36	-1,53	-33,85	12,81	-5,05
4	1	1	1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	2,36	-1,53	-33,85	-5,94	-9,74
4	1	0	2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00
4	2			Pengeluaran Pembiayaan	20,00	-12,50	395,24	-100,00	75,68
4	2	0	1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
4	2	0	2	Penyertaan Modal Daerah	20,00	-12,50	14,29	-100,00	-19,55
				PEMBIAYAAN NETTO	1,79	-1,11	-48,29	49,17	0,39
				Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-1,53	-33,85	-5,94	-28,38	-17,42

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2025



d. Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Analisis Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Aset pemerintah Kabupaten Pekalongan selama tahun 2020-2024 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 3,87%. Pada tahun 2020, aset yang dimiliki mencapai Rp3.066.064.901.783,00 meningkat menjadi sebesar Rp3.567.174.491.336,00. Keberadaan aset daerah ini memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat.

Kewajiban merupakan sebuah gambaran tentang kondisi utang Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan pihak ketiga. Kewajiban daerah Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun terakhir berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 32,58%. Pada tahun 2024 kewajiban daerah mencapai sebesar Rp73.669.498.353,00, naik sebesar 60,41% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp45.924.521.056,00. Kewajiban daerah sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Jumlah kewajiban jangka panjang sampai tahun 2024 tidak ada atau 0. Sedangkan jumlah kewajiban jangka pendek terbesar adalah utang belanja . Pada tahun 2024 kewajiban jangka pendek pada utang belanja sebesar Rp30.350.131.591,00..

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam lima tahun terakhir, ekuitas dana di Kabupaten Pekalongan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3,79%. Dilihat dari besarnya, ekuitas dana Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp3.493.484.343.150,00, meningkat sebesar 5,46% dibandingkan kondisi tahun 2023 sebesar Rp3.312.625.598.697,00. Gambaran kondisi neraca daerah pada tabel dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio, di mana terdapat 2 jenis Rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas.

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas Kabupaten Pekalongan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.153
Rasio Likuiditas Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

Rasio	Rumus		Tahun 2024
Rasio Lancar	Aset Lancar	196.437.796.860	
	Kewajiban Jangka Panjang	0	
Quick Ratio	Aset Lancar – Persediaan	147.275.515.067	2,00
	Kewajiban Jangka Pendek	73.669.498.353	
Rasio total hutang terhadap total aset	Total Hutang	73.669.498.353	0,02
	Total Aset	3.567.174.491.336	

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2025



Berdasarkan tabel di atas, nilai rasio perhitungan dengan analisis rasio lancar pada tahun 2024 sangat besar, hal inikarenakan Kabupaten Pekalongan tidak memiliki kewajiban jangka panjang Kondisi tersebut menunjukkan rasio lancar Kabupaten Pekalongan termasuk kategori baik. Nilai rasio pada perhitungan *Quick Ratio* sebesar 2%, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Pekalongan dalam kondisi baik. Sementara itu, kondisi rasio total hutang terhadap total aset berdasarkan perhitungan menunjukan angka sebesar 0,02 termasuk sangat kecil. Dengan demikian, kondisi kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

Rasio Solvabilitas atau disebut juga Ratio Leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas Kabupaten Pekalongan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.154
Rasio Solvabilitas Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

Rasio	Rumus		Tahun 2024
Rasio Kewajiban terhadap Aset	<u>Kewajiban</u> Aset	$\frac{73.669.498.353}{3.567.174.491.336}$	0,02
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	<u>Kewajiban</u> Ekuitas	$\frac{73.669.498.353}{3.493.484.343.150}$	0,02

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, rasio kewajiban terhadap aset di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 sangat rendah hanya 0,02%. Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. Sementara itu pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga rendah, yaitu sebesar 0,02%, yang menunjukkan bahwa nilai total utang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pekalongan



Tabel 2.155
Neraca Kabupaten Pekalongan 2020-2024 (Rp.)

Kode Neraca	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET	3.066.064.901.783	3.140.697.646.889	3.212.211.226.631	3.358.550.119.754	3.567.174.491.336
11	ASET LANCAR	252.945.695.665	261.666.653.697	193.109.299.765	206.590.870.565	196.437.796.860
111	Kas dan Setara Kas	163.759.759.877	161.260.112.627	106.680.281.662	100.347.796.505	71.882.028.522
1111	Kas di Kas Daerah	20.755.929.781	78.506.043.188	73.533.456.730	75.795.632.539	62.615.572.289
1112	Kas di Bendahara Penerimaan	18.192.115	4.753.500	2.055.700	25.570.775	0
1113	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	98.945.400	0	72.232.617
1114	Kas di BLUD	140.490.859.278	82.283.601.761	32.728.237.273	24.318.086.857	8.957.316.533
1115	Kas Dana BOS	0	0	0	191.404.934	219.805.683
1116	Kas Lainnya	2.494.778.703	465.714.178	317.586.559	17.101.400	17.101.400
112	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0
1121	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0
113	Piutang	44.226.448.090	32.714.381.251	40.646.708.907	55.109.091.015	75.069.726.465
1131	Piutang Pajak Netto	9.220.149.748	9.039.604.428	10.421.500.791	15.878.254.132	17.194.308.959
11311	Piutang Pajak Daerah	26.039.176.816	27.310.984.331	30.548.888.715	33.378.940.908	36.160.146.685
11312	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(16.819.027.068)	(18.271.379.903)	(20.127.387.924)	(17.500.686.776)	(18.965.837.726)
1132	Putang Retrbusi Netto	118.677.232	87.131.354	31.471.748	215.778.765	131.055.969
11321	Piutang Retribusi Daerah	119.273.600	87.569.200	31.813.214	220.672.382	160.777.382
11322	Penyisihan Piutang Retribusi	(596.368)	(437.846)	(341.466)	(4.893.617)	(29.721.413)
1133	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	1.800.986.950	2.014.904.274	0	7.734.856.089	0
11331	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.800.986.950	2.014.904.274	0	7.734.856.089	0
1134	Piutang Laiin-lain PAD Netto	17.620.638.959	18.831.184.081	26.460.621.687	26.657.453.696	57.744.361.537
11341	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	22.276.482.914	24.377.714.929	33.008.715.688	34.234.008.202	66.360.567.769
11342	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(4.655.843.954)	(5.546.530.848)	(6.548.094.001)	(7.576.554.507)	(8.616.206.232)



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Kode Neraca	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1135	Piutang Transfer	15.437.895.200	2.737.657.114	3.729.214.682	4.618.848.334	0
11351	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.652.400.845	0	0	0	0
11352	Piutang Transfer Antar Daerah Netto	10.785.494.355	2.737.657.114	3.729.214.682	4.618.848.334	0
113521	Piutang Transfer Antar Daerah	10.785.494.355	2.737.657.114	3.729.214.682	4.618.848.334	0
1137	Piutang Lainnya Netto	28.100.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0
11371	Piutang Lainnya	741.192.500	741.192.500	740.492.500	740.492.500	736.592.500
11372	Penyisihan Piutang Lainnya	(713.092.500)	(737.292.500)	(736.592.500)	(736.592.500)	(736.592.500)
114	Beban Dibayar Dimuka	711.709.046	676.151.901	466.362.666	323.760.080	323.760.080
115	Persediaan	44.247.778.652	67.016.007.919	45.315.946.529	50.810.222.964	49.162.281.794
12	INVESTASI JANGKA PANJANG	74.723.528.152	83.830.396.201	92.377.473.184	97.605.717.936	89.964.892.080
122	Investasi Jangka Panjang Permanen	74.723.528.152	83.830.396.201	92.377.473.184	97.605.717.936	89.964.892.080
1221	Penyertaan Modal	74.723.528.152	83.830.396.201	92.377.473.184	97.605.717.936	89.964.892.080
13	ASET TETAP	2.705.387.574.154	2.766.612.120.683	2.896.379.891.031	2.990.871.116.702	3.244.957.469.408
131	Tanah	884.008.334.706	885.516.603.311	898.094.280.311	898.881.227.311	904.785.114.581
132	Peralatan dan Mesin	690.628.711.811	749.984.462.912	796.024.829.667	826.520.242.221	921.752.628.529
133	Gedung dan Bangunan	1.070.628.219.890	1.123.169.816.585	1.176.475.486.929	1.272.682.108.439	1.496.880.016.951
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.460.940.763.021	1.544.993.361.873	1.697.722.371.923	1.767.635.088.901	1.871.152.801.389
135	Aset Tetap Lainnya	134.865.754.052	143.243.113.119	150.284.419.468	162.128.791.101	170.404.904.874
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.026.213.548	3.818.761.090	4.540.620.168	4.611.190.920	4.953.707.480
137	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.540.710.422.875)	(1.684.113.998.208)	(1.826.762.117.435)	(1.941.587.532.190)	(2.124.971.704.396)
14	DANA CADANGAN	0	0	0	20.000.000.000	0
15	ASET LAINNYA	33.008.103.812	28.588.476.307	30.344.562.651	43.482.414.551	35.814.332.989
151	Tagihan Jangka Panjang	153.050.000	153.050.000	153.050.000	153.050.000	135.000.000
1512	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	153.050.000	153.050.000	153.050.000	153.050.000	135.000.000
152	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	979.000.000	979.000.000	979.000.000	0	0
1521	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	979.000.000	979.000.000	979.000.000	0	0
153	Aset Tidak Berwujud Netto	1.470.600.106	1.931.806.853	2.029.032.212	4.098.230.809	2.818.778.334
1531	Aset Tidak Berwujud	7.612.287.036	8.980.015.836	10.508.159.206	15.090.769.506	15.743.465.046



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Kode Neraca	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1532	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.141.686.931)	(7.048.208.983)	(8.479.126.994)	(10.992.538.697)	(12.924.686.712)
154	Aset Lain-lain Netto	30.405.453.707	25.524.619.454	27.183.480.440	39.231.133.743	32.860.554.655
1541	Aset Lain-lain	61.975.088.442	47.888.606.822	48.376.363.971	78.245.975.529	71.887.216.107
1542	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(31.569.634.736)	(22.363.987.368)	(21.192.883.532)	(39.014.841.787)	(39.026.661.452)
2	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.066.064.901.783	3.140.697.646.889	3.212.211.226.631	3.358.550.119.754	3.567.153.841.503
21	KEWAJIBAN	54.362.781.581	20.070.938.664	19.453.536.690	45.924.521.056	73.669.498.353
211	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	54.362.781.581	20.070.938.664	19.453.536.690	45.924.521.056	73.669.498.353
2113	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0	0	13.405.336.278	29.266.830.561	42.586.659.994
2115	Pendapatan Diterima Dimuka	611.251.405	765.652.931	1.003.227.710	732.267.471	732.706.768
2116	Utang Belanja	35.232.348.799	6.713.033.845	5.044.972.702	15.925.423.024	30.350.131.591
2117	Utang BLUD	18.519.181.377	12.592.251.888			
22	EKUITAS	3.011.702.120.202	3.120.626.708.224	3.192.757.689.941	3.312.625.598.697	3.493.484.343.150
221	Ekuitas	3.011.702.120.202	3.120.626.708.224	3.192.757.689.941	3.312.625.598.697	3.493.484.343.150
2211	Ekuitas	3.011.702.120.202	3.120.626.708.224	3.192.757.689.941	3.312.625.598.697	3.493.484.343.150

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2025



2. Arah Kebijakan dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2029

a. Analisis Belanja Tahun 2020-2024

1). Analisis Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Pekalongan relatif besar, yaitu mencapai Rp 934.743.678.617,- pada tahun 2020, dan pada tahun 2024 sebesar Rp 996.155.860,266,-. Perkembangan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.156
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 Rp. (000)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belanja Pegawai	934.743.679	963.180.415	930.072.199	940.713.412	996.155.860,27
Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran pembiayaan)	2.058.017.712	2.081.043.160	2.129.203.846	2.206.564.382	2.417.279.250,74
Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	45,42	46,28	43,68	42,63	41,21

Dibandingkan dengan total pengeluaran (belanja dan pengeluaran pembiayaan), proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai 45,42 persen pada tahun 2020 dan cenderung menurun sampai dengan tahun 2024 sebesar 41,21 persen.

2). Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medisserta belanja sejenis lainnya. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Pekalongan yaitu untuk belanja pegawai dengan kecenderungan menurun dari sebesar Rp 996.238.927 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 966.713.412 pada tahun 2023. Perkembangan pengeluaran wajib dan mengikat secara prioritas utama di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.157
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023 (Rp.000)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belanja					
• Belanja Pegawai	986.238.927	934.743.679	963.180.415	930.072.199	940.713.412
• Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan					
• Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo					20.000.000
• penyertaan modal daerah;	10.000.000	5.000.000	6.000.000	5.250.000	6.000.000
TOTAL	996.238.927	939.743.679	969.180.415	935.322.199	966.713.412

Berdasarkan data diatas, selanjutnya dilakukan perhitungan proyeksi untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.158
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib
dan Mengikat Secara Prioritas Utama Kabupaten Pekalongan
Tahun 2024-2029 (Rp.000)

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belanja					
• Belanja Pegawai	1.068.654.899	1.083.371.271	1.100.316.529	1.116.896.323	1.135.967.875
• Belanja Bunga	0	0	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan					
• Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0	0	0	0	0
• Penyertaan Modal Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
TOTAL	1.078.654.899	1.093.371.271	1.110.316.529	1.126.896.323	1.145.967.875

b. Analisis Pembiayaan Tahun 2020-2024

Analisis pembiayaan dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Pada tahun 2020 terdapat surplus sebesar Rp. 3.780.763.000,- kemudian pada tahun 2022 defisit Rp. 54.579.831.000 dan tahun 2024 defisit sebesar Rp. 48.476.504.000, selengkapnya pada tabel berikut ini.



Tabel 2.159
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pekalongan
Tahun 2019-2023 (Rp.000)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Realisasi Pendapatan daerah	2.061.798.474	2.078.543.513	2.074.624.015	2.200.231.897	2.368.802.747
<i>Dikurangi realisasi:</i>					
Belanja Daerah	2.053.017.712	2.075.043.160	2.123.953.846	2.180.564.382	2.417.279.251
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000	6.000.000	5.250.000	26.000.000	0
Defisit/surplus	3.780.763	-2.499.647	-54.579.831	-6.332.485	-48.476.504

Penerimaan pembiayaan daerah sebagai sumber penutup defisit riil terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.160
Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2024 (Rp.000)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	163.759.760	161.260.113	106.680.282	100.347.797	71.871.293
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	20.000.000

c. Proyeksi Keuangan Daerah 2026-2030

Proyeksi APBD Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

- a. Kondisi perekonomian nasional dan daerah berada pada pertumbuhan yang tinggi dengan laju inflasi pada angka yang stabil;
- b. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan seiring dengan perbaikan pengelolaan pajak, peningkatan kinerja pengelolaan BUMD dan peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;
- c. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB guna meningkatkan pendapatan daerah.
- d. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain non-ABPD seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan pinjaman daerah.
- e. Pinjaman daerah dianggarkan pada tahun 2026 untuk penyelesaian relokasi pembangunan RSUD Kraton di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa dan pembayaran pinjaman dilaksanakan mulai tahun 2027 sampai dengan 2030
- f. Pembentukan dana cadangan untuk Pilkada serentak direncanakan pada Tahun 2027-2028 dan pencairan dilaksanakan pada Tahun 2029.

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.161
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2026-2030 (Rp.000)

KODE				URAIAN	Baseline		PROYEKSI TAHUN				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1				PENDAPATAN DAERAH							
1	1			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	384.822.405	547.105.785	672.510.458	637.624.659	663.694.805	690.815.452	718.975.882
1	1	1		Pajak Daerah	121.974.843	214.750.000	216.180.270	227.828.275	236.941.406	246.419.062	256.275.825
1	1	2		Retribusi Daerah	16.354.387	299.473.825	423.232.264	372.629.500	387.534.680	403.036.067	419.157.510
1	1	3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	10.773.200	11.369.279	10.585.243	13.679.339	14.321.921	14.969.717	15.568.506
1	1	4		Lain - lain PAD yang Sah	235.719.975	21.512.681	22.512.681	23.487.545	24.896.798	26.390.606	27.974.042
1	2			Pendapatan Transfer	1.937.371.155	1.739.427.691	1.729.224.490	1.804.952.981	1.839.100.029	1.876.142.632	1.943.868.482
1	2	1		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.481.167.994	1.348.362.163	1.348.758.883	1.398.088.404	1.424.098.162	1.452.840.728	1.512.100.539
1	2	1	1	Dana Bagi Hasil	29.249.108	32.327.113	32.327.113	34.266.740	36.322.744	38.502.109	40.812.235
1	2	1	2	Dana Alokasi Umum	966.058.394	956.836.116	956.836.116	983.616.515	992.027.299	1.002.405.726	1.042.501.955
1	2	1	3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	175.116.704	9.711.463	9.711.463	16.738.179	17.742.470	18.807.018	19.935.439
1	2	1	4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	310.743.788	349.487.471	349.884.191	363.466.970	378.005.649	393.125.875	408.850.910
1	2	2		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	272.670.224	270.618.776	270.618.776	281.551.775	287.182.810	292.926.466	298.784.996
1	2	2	1	Dana Insentif Daerah	2.815.646	7.151.300	7.151.300	7.440.213	7.589.017	7.740.797	7.895.613
1	2	2	4	Dana Desa	269.854.578	263.467.476	263.467.476	274.111.562	279.593.793	285.185.669	290.889.383
1	2	3		Pendapatan Transfer Antar Daerah	183.532.937	120.446.752	109.846.831	125.312.802	127.819.057	130.375.438	132.982.947
1	2	3	1	Dana Bagi Hasil	145.056.178	91.867.275	109.182.831	95.578.714	97.490.287	99.440.093	101.428.895
1	2	3	2	Bantuan Keuangan Lainnya	38.476.759	28.579.477	664.000	29.734.088	30.328.770	30.935.345	31.554.052
1	3			Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	46.609.189	55.750.000	0	0	0	0	0
1	3	1		Pendapatan Hibah	1.314.000	0	0	0	0	0	0



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

KODE				URAIAN	Baseline		PROYEKSI TAHUN				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	3	3		Pendapatan Lainnya	45.295.189	55.750.000	0	0	0		0
				JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.368.802.749	2.342.283.476	2.401.734.948	2.442.577.640	2.502.794.834	2.566.958.084	2.662.844.364
2				BELANJA DAERAH							
2	1			Belanja Operasi	1.694.442.248	1.731.280.481	1.768.439.829	1.768.198.430	1.789.471.742	1.834.815.628	1.883.503.593
2	1	1		Belanja Pegawai	996.155.860	1.068.654.899	1.083.371.271	1.084.316.529	1.087.245.535	1.089.614.114	1.091.516.216
2	1	2		Belanja Barang dan Jasa	559.215.566	584.804.493	605.301.941	602.121.119	614.898.359	652.009.114	678.571.947
2	1	5		Belanja Hibah	121.907.157	67.886.604	69.583.769	71.323.364	73.871.059	78.580.348	93.445.678
2	1	6		Belanja Bantuan Sosial	17.163.665	9.934.485	10.182.847	10.437.418	13.456.789	14.612.052	19.969.752
2	2			Belanja Modal	331.964.607	231.607.891	323.959.517	239.557.945	269.324.937	310.724.568	335.442.752
2	2	1		Belanja Modal Tanah	7.176.237	0	0	0	0	0	0
2	2	2		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.717.124	54.513.493	59.876.332	57.273.240	63.305.536	76.573.580	87.677.015
2	2	3		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.906.096	108.296.422	190.003.831	110.003.831	120.223.862	120.939.868	125.527.460
2	2	4		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.984.064	58.618.690	62.645.585	61.586.261	74.058.187	95.104.948	100.456.785
2	2	5		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.533.390	9.448.066	10.684.268	9.926.375	10.950.376	17.300.459	20.957.041
2	2	6		Belanja Modal Aset Lainnya	647.696	731.220	749.501	768.238	786.976	805.713	824.451
2	3			Belanja Tidak Terduga	1.547.578	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2	3	1		Belanja Tidak Terduga	1.547.578	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2	4			Belanja Transfer	389.324.818	394.095.104	403.335.603	408.821.265	417.998.156	425.417.888	427.898.020
2	4	1		Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	12.895.413	22.597.628	22.550.690	23.741.633	24.635.588	26.648.869	27.837.476
2	4	2		Belanja Bantuan Keuangan	376.429.405	371.497.476	380.784.913	385.079.632	393.362.568	398.769.019	400.060.544
				JUMLAH BELANJA DAERAH	2.417.279.251	2.362.983.476	2.501.734.948	2.422.577.640	2.482.794.835	2.576.958.084	2.652.844.365
				SURPLUS / (DEFISIT) BELANJA DAERAH	-48.476.502	-20.700.000	-100.000.000	20.000.000	20.000.000	-10.000.000	10.000.000
4				PEMBIAYAAN DAERAH							
4	1			Penerimaan Pembiayaan							



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

KODE				URAIAN	Baseline		PROYEKSI TAHUN				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	1	1	1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	100.347.797	20.700.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4	1	1	2	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0
	1	1	3	Pinjaman Daerah dari LKB	0	0	80.000.000	0	0	0	0
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	120.347.797	20.700.000	100.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	20.000.000
4	2			Pengeluaran Pembiayaan							
4	2	0	1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
4	2	0	2	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	2	0	3	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
				JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	-	40.000.000	40.000.000	30.000.000	30.000.000
				PEMBIAYAAN NETTO	120.347.797	20.700.000	100.000.000	-20.000.000	-20.000.000	10.000.000	-10.000.000
				Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	71.871.295	0	0	0	0	0	0



C. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan dalam periode 2025-2030 merupakan hasil analisis gambaran umum daerah Kabupaten Pekalongan yang mencakup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah selama lima tahun. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan yang sifatnya lintas sektor atau *crosscutting*, makro, dan menjadi kewenangan tingkat daerah. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan yang masih relevan dalam periode 2025-2030 dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Aspek Geografi dan Demografi

Dari hasil gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografi dan demografi yang telah disajikan pada bab sebelumnya, diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai berikut

1). Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

Kebutuhan akan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas penduduk sejalan dengan jumlah penduduk yang juga semakin meningkat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan. Status daya dukung air Kabupaten Pekalongan tahun 2022 masih dalam kondisi **surplus**, dengan nilai Daya Dukung Air sebesar 884.176.589,38 m³. Namun demikian dalam beberapa wilayah terdapat kondisi **defisit** diantaranya Kecamatan Bojong, Doro dan Sragi.

Indikator lain yang juga dapat menggambarkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di mana IKLH Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 sebesar 60,90 di bawah IKLH Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 69,46.

Di sisi lain, beberapa tekanan lingkungan di Kabupaten Pekalongan antara lain seperti perubahan tata guna lahan yang menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati, peningkatan produksi limbah domestik padat (sampah) dan cair dengan masih terbatasnya kapasitas pengelolaannya, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan antara lain masih rendahnya pengawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola sampah. Indeks Kualitas Air Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 46,36 di bawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 52,03. Sedangkan pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2020-2024 rata-rata hanya sekitar 30-36 persen setiap tahun, sehingga rata-rata sampah yang tidak dikelola berkisar 50-60 persen setiap tahunnya



Dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Kabupaten Pekalongan, terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim terjadi sebagai dampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK.

2). Belum optimalnya ketahanan pangan

Permasalahan dari aspek geografi lainnya adalah terkait dengan ketahanan pangan. Hasil identifikasi permasalahan ketahanan pangan antara lain yaitu belum optimalnya penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi; pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan; pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman; diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal; sistem rantai pasok pangan; jaminan keamanan dan mutu pangan; riset, inovasi, dan teknologi pangan; pengendalian harga bahan pangan; serta peran serta masyarakat untuk penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; dan pencegahan pemborosan pangan (*food waste*). Selain itu, terdapat kecenderungan penurunan daya dukung pangan yang akan mempengaruhi kecukupan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masa yang akan datang. Prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Pekalongan memiliki kecenderungan turun dari **8,89** persen pada tahun 2019 menjadi **6,73** persen pada tahun 2023. Artinya hingga tahun 2023, masih terdapat **6,73** persen penduduk yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

3). Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana

Selain lingkungan hidup, kondisi geografi juga mempengaruhi kondisi kebencanaan. Gambaran kebencanaan ditunjukkan dari indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) yang dari tahun ke tahun IRB Kabupaten Pekalongan sebesar **149,83** pada tahun 2023 atau dalam **kategori tinggi** nomor 3 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ancaman bencana yang sering terjadi diantaranya ***banjir/rob, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan***. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana.

Tata kelola kebencanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana juga masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Perencanaan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system/EWS*), literasi masyarakat tentang kebencanaan, serta kapasitas lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah masih perlu ditingkatkan.



4). Meningkatnya sebaran dan pertumbuhan penduduk

Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebanyak **1.019.006** jiwa dengan persentase 50,80 persen penduduk laki-laki dan 49,20 persen penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 103,26 yang berarti ada 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Dengan kata lain, penduduk laki-laki di Kabupaten Pekalongan tercatat lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan juga mengalami peningkatan. Dengan luas wilayah sekitar 836,13 Km², kepadatan penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 mencapai 1.219 jiwa/Km². Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (1205 jiwa/Km²). Artinya dalam setahun ada pertambahan jumlah penduduk tiap Km² sebanyak 14 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kepadatan penduduk dan jumlah rumah tangga di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan meliputi sebagai berikut.

a. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat dari kemiskinan. Cukup tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada Maret 2024 tercatat sebesar 8,95 persen menurun dibandingkan Tahun 2023. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan nasional (9,03%) dan di bawah Provinsi Jawa Tengah (10,47%).

Selain tingkat kemiskinan, masih cukup tingginya angka pengangguran dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar **3,30%** menunjukkan sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya namun capaian ini di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah (**4,78%**) dan nasional (**4,91%**). Hal ini seiring lesunya industri tekstil, tergerus kinerja ekspor yang menurun, sementara impor ke pasar domestik membeludak. Penurunan kinerja ekspor disebabkan sejumlah faktor, mulai dari kondisi permintaan pasar global yang kurang baik, persaingan yang semakin ketat dengan China, hingga konflik geopolitik di Timur Tengah.

b. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat perannya sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Pekalongan selain memastikan tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi, juga memperhatikan kualitas layanan dasar sehingga tercapai manusia Kabupaten Pekalongan yang maju dan semakin sejahtera.



Namun demikian kualitas hidup SDM Kabupaten Pekalongan masih perlu ditingkatkan mengingat penyediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat belum merata dan inklusif, terutama kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 sebesar **71,95** yang masih di bawah angka IPM Jawa Tengah sebesar **73,87** dan IPM Nasional yang sebesar **75,02**.

Kualitas pendidikan masyarakat ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah yang capaiannya masih di bawah nasional. Rata-rata lama bersekolah di Kabupaten Pekalongan yang masih rendah diperkuat dengan masih dijumpainya **Anak Tidak Sekolah (ATS)** yang mencapai **4.307 anak**. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2024 sebesar **12,46 tahun** yang masih di bawah Provinsi Jawa Tengah (**12,86 tahun**) disebabkan masih belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Pekalongan, ditandai dengan masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, adanya kesenjangan layanan pendidikan, dan kurangnya mutu pendidikan.

Permasalahan kesehatan mengalami perubahan pola ke arah semakin kompleks sebagai akibat adanya pengaruh perubahan lingkungan dan perilaku. **Usia Harapan Hidup (UHH)** penduduk Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sebesar **73,69 tahun** menjadi **74,25 tahun** di Tahun 2024, namun belum diimbangi dengan peningkatan usia harapan sehat. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar **160** per 100.000 kelahiran hidup (**18 kasus**) pada tahun 2024. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 dengan jumlah kasus **118 kasus**.

Pada aspek gizi, beban ganda masalah kelebihan dan kekurangan gizi (*underweight, wasting, stunting, overweight*), pengetahuan dan perilaku pemenuhan kebutuhan gizi, serta ketahanan pangan pada level keluarga masih menjadi faktor determinan yang mempengaruhi status gizi masyarakat. Jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2024 sebesar 357 kasus naik dari Tahun 2023 sebesar 98 kasus. Masih tingginya kemiskinan, fasilitas kesehatan yang terbebani, rantai pasokan makanan yang terganggu dan kurangnya pendapatan merupakan faktor penyebab kasus gizi buruk di Kabupaten Pekalongan. Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih yang mengakibatkan kemampuan masyarakat mengakses asupan makanan syarat gizi masih rendah serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih sehat. Sedangkan dari data Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (**e-PPGM**), prevalensi stunting di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 ada pada angka **9,25%** atau turun 2,05 point dibandingkan Tahun 2023. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan bahwa pada tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Pekalongan juga naik sebanyak 5,10% poin dibanding tahun 2022 dari **23,50%** menjadi **28,60%**.



c. Aspek Daya Saing Daerah

a. Belum optimalnya daya saing dan produktivitas perekonomian daerah

Perekonomian Kabupaten Pekalongan masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Perekonomian Kabupaten Pekalongan dipengaruhi oleh pertumbuhan beberapa faktor, antara lain : (1)*Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum*; (2)*Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib*; (3)*Informasi dan Komunikasi*; (4)*Jasa perusahaan* dan (5)*Jasa Pendidikan*. Upaya kedepan Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian dalam arti luas termasuk pangan, industri pengolahan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata), kemudahan investasi, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa, serta wilayah yang kondusif.

Tantangan ke depan adalah mewujudkan perekonomian daerah dengan produktivitas tinggi secara berkelanjutan. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antarmasyarakat dan antarwilayah. Kondisi tersebut adalah dalam upaya meningkatkan nilai PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar **29,66 juta rupiah** dibawah Provinsi Jawa Tengah sebesar **47,97 juta rupiah** dan jauh dibawah PDRB per kapita nasional yang sebesar **78,61 juta rupiah**.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu ditangani, terutama terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

b. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan perekonomian daerah

Permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut.

1) Sektor industri pengolahan

Sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan Kabupaten Pekalongan sebesar **29,31 persen** terhadap PDRB. Beberapa permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi kinerja sektor industri pengolahan antara lain belum optimalnya produktivitas industri, terutama industri kecil dan menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri. Faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya kapasitas industri kecil dan menengah untuk mampu menghasilkan produk nilai tambah tinggi, pengembangan industri, kapasitas industri berbahan baku lokal, integrasi rantai pasok antarindustri, kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan, digitalisasi industri pengolahan serta masih rendahnya kepedulian akan



prinsip keberlanjutan dalam industri. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh belum optimalnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri pengolahan, infrastruktur pendukung industri pengolahan, keterjangkauan teknologi ramah lingkungan, iklim usaha yang kondusif dan iklim kemitraan, serta penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru.

2) Sektor Perdagangan

Sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan kedua Kabupaten Pekalongan sebesar **1489 persen** terhadap PDRB. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor perdagangan ini, antara lain belum optimalnya ekspor unggulan daerah, standarisasi produk-produk unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan, iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, serta sistem distribusi produk perdagangan.

3) Sektor pertanian

Pertanian merupakan sektor unggulan ketiga Kabupaten Pekalongan yang mampu berkontribusi sebesar **13,56 persen** terhadap PDRB. Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan diantaranya belum optimalnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, modernisasi pertanian, integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian, pengelolaan pertanian secara mandiri dan keterjangkauan biaya produksi pertanian, pengembangan pertanian berbasis korporasi, serta kapasitas dan kompetensi pelaku usaha sektor pertanian. Selain itu permasalahan lain adalah masih tingginya alih fungsi lahan dan rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian. Terkait permasalahan sumber daya air, berdasarkan data Provinsi, di Kabupaten Pekalongan, jaringan irigasi tersier nonpermanen masih cukup panjang yaitu sekitar 58,21%. sehingga menjadi perhatian khusus untuk dapat melakukan rehabilitasi serta pemeliharaan jaringan irigasi sebagai dukungan dalam upaya meningkatkan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan yang ditargetnya rata-rata sekitar ± 300 meter dalam kurun waktu 2026-2020.

4) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor lain yang menjadi unggulan perekonomian Kabupaten Pekalongan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar **6,84 persen**. Perekonomian Kabupaten Pekalongan sebagian besar didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan salah satu industri yang berkembang pesat adalah industri makanan dan minuman. Pertumbuhan penjualan didorong oleh peningkatan pendapatan pribadi dan peningkatan pengeluaran untuk makanan dan minuman, terutama dari meningkatnya jumlah konsumen kelas menengah

Industri makan minum dapat menjadi subsektor dengan kontribusi PDRB terbesar. dan dapat terus berkembang pesat karena beberapa faktor, di antaranya adalah jumlah penduduk yang besar dengan kebutuhan yang sangat besar pula, serta daya beli yang tinggi dan selain itu sudah mulai terbentuk skala usaha yang terlibat dalam ekosistem industri makan minum,



ditambah dengan era baru teknologi yang bisa menjadikan tulang punggung perkembangan ekonomi dan daya saing negara.

Tantangan industri makan minum antara lain kemampuan daya beli masyarakat, pemerataan pangan yang belum merata dan kualitas hasil pengolahan pangan. Selain itu masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang aman, sehat, bergizi dalam sistem pangan yang berkelanjutan.

5) Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan Kabupaten Pekalongan dalam menyokong perekonomian daerah. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. Namun, kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan asli daerah dan pada PDRB belum optimal. Nilai pendapatan sektor pariwisata menurun dari tahun 2020 sebesar Rp **802,14** juta menjadi sebesar Rp **710,74** juta di tahun 2024. Jumlah pengunjung dari 3 (tiga) Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yaitu Objek Wisata Linggoasri, Objek Wisata Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggoasri juga terus menurun dari 5 tahun terakhir dari **115.756** orang di Tahun 2020 menjadi **73.611** orang di Tahun 2024

Kondisi belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah maupun PDRB disebabkan beberapa permasalahan, antara lain, kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara masih belum optimal, rata-rata lama menginap wisatawan relatif rendah dan masih rendahnya pengeluaran wisatawan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum optimalnya promosi pariwisata, kondisi destinasi wisata termasuk kondisi sarana prasarana destinasi wisata, diversifikasi daya tarik pariwisata, infrastruktur konektivitas antardestinas wisata, integrasi antardestinas wisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata.

c. Rendahnya daya saing tenaga kerja

Pembangunan ketenagakerjaan yang berdaya saing mencakup kualitas tenaga kerja yang unggul, tingkat produktivitas tenaga kerja yang tinggi, kesempatan kerja yang terbuka luas, hingga adanya perlindungan tenaga kerja. Beberapa faktor penyebab rendahnya daya saing tenaga kerja antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan, belum optimalnya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, yang disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi, keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi, sistem perlindungan tenaga kerja, industri masih bersifat padat karya (belum padat modal/teknologi tinggi), iklim ketenagakerjaan termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, serta informasi pasar kerja.



d. Belum optimalnya riset dan inovasi

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Namun demikian, kondisi saat ini riset dan inovasi belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Beberapa penyebabnya antara lain :

- Keterbatasan anggaran untuk riset dan pengembangan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi inovasi;
- Budaya organisasi yang kurang mendukung, seperti enggan menutup program yang kurang berhasil atau adanya ketergantungan pada figur tertentu, sehingga dapat menghalangi munculnya perbaikan dan inovasi baru. secara berkelanjutan;
- Kurangnya hilirisasi inovasi. Meskipun banyak inovasi yang telah dikembangkan, tapi pemanfaatannya masih belum optimal di tingkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

e. Ketimpangan ekonomi antarwilayah

Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Kabupaten Pekalongan masih terjadi. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh faktor geografis dan demografis, belum meratanya penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, belum meratanya penyediaan prasarana dan sarana pendukung ekonomi, belum optimalnya konektivitas antarwilayah, dan belum optimalnya tingkat kemandirian desa yang sebesar **8,09 persen** di Tahun 2024. Permasalahan lainnya antara lain adalah tingkat produktivitas ekonomi antarwilayah perkotaan dan perdesaan yang masih belum merata yang disebabkan beberapa faktor antara lain terkait potensi daerah sebagai sektor unggulan daerah yang belum dioptimalkan, serta ketersediaan SDM berkualitas yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perdesaan khususnya, keterbatasan ketersediaan sarpras pendukung ekonomi, minimnya riset dan inovasi pengembangan produk, keterbatasan akses terhadap permodalan, serta belum optimalnya peran lembaga ekonomi desa menjadi faktor-faktor yang menghambat perkembangan desa dalam upaya pemerataan pembangunan perekonomian perdesaan dan perkotaan.

f. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah

Ketersediaan prasarana sarana menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan prasarana sarana adalah masih belum meratanya jaringan jalan di Kabupaten Pekalongan, belum optimalnya kualitas jalan utamanya jalan kabupaten yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak. Berdasarkan kondisi fisiknya, kondisi jalan mantap (baik dan sedang sebesar **78,29 persen** di Tahun 2024 sehingga masih ada **21,71 persen** permukaan jalan dalam kondisi rusak baik ringan maupun berat. Selain itu masih terdapat titik rawan longsor di ruas-ruas jalan kabupaten maupun provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana.



Kualitas pelayanan transportasi juga masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan keselamatan dan kelancaran perjalanan transportasi (utamanya pada ruas jalan strategis pendukung jaringan distribusi logistik), peningkatan kualitas layanan angkutan umum (jangkauan wilayah dan kapasitas layanan), dan peningkatan pelayanan di simpul transportasi (utamanya kualitas kondisi fisik, pemenuhan utilitas dan persebaran terminal) serta integrasi antarmoda dalam rangka meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Hal lain yang masih perlu dikembangkan terkait peningkatan kelembagaan pengelolaan transportasi yang berbasis kewilayahan dan penataan sistem logistik yang lebih efisien.

Permasalahan lainnya dalam penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air yang disebabkan masih kurangnya sarana tampungan air baku. Air baku selain dimanfaatkan untuk penyediaan air minum dan pertanian juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata). Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat juga masih perlu didorong untuk ditingkatkan seperti pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, serta penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.

d. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan berdasarkan aspek pelayanan umum di Kabupaten Pekalongan adalah **belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas**. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pengawasan dan Pengendalian serta manajemen ASN berbasis Sistem Merit Kabupaten Pekalongan yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya namun dampak terhadap kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah belum meningkat signifikan. Selain itu, perbaikan integritas ASN dan organisasi masih sangat perlu ditingkatkan mengingat hasil Survey Penilaian Integritas dalam kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Indeks Integritas Nasional Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebesar **73,97** atau turun 4,11 point dari Tahun 2023. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi di Pemerintah Kabupaten Pekalongan sehingga membantu memperbaiki pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintahan, serta memastikan pelayanan publik yang lebih efisien dan bebas dari penyalahgunaan.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi mencakup kelembagaan yang kurang efisien dan tidak adaptif disebabkan lemahnya peran evaluasi kelembagaan, proses bisnis organisasi yang tidak efektif, perencanaan belum sepenuhnya sinergi dan selaras, belum sepenuhnya berbasis kinerja, risiko dan riset serta penjenjangan kinerja organisasi tidak efisien, serta penetapan indikator yang belum sepenuhnya **SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu)**. Selain itu, kualitas kebijakan yang dihasilkan belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya pemanfaatan riset dan data dalam perumusan kebijakan serta masih ditemukan regulasi yang tumpang



tindih. Selain itu, pemerintah belum mengoptimalkan ruang kolaborasi dengan menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan periode 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.162
Permasalahan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030

No	Aspek	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
1	Aspek Geografi dan Demografi	a. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan b. Belum optimalnya ketahanan pangan c. Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana d. Meningkatnya sebaran dan pertumbuhan penduduk
2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	a. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat b. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
3.	Aspek Daya Saing Daerah	a. Belum optimalnya daya saing dan produktivitas perekonomian daerah b. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan perekonomian daerah • Sektor industri pengolahan • Sektor Perdagangan • Sektor pertanian • Sektor Pariwisata c. Rendahnya daya saing tenaga kerja d. Belum optimalnya riset dan inovasi e. Ketimpangan ekonomi antarwilayah f. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah
4	Aspek Pelayanan Umum	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas

Sumber : Analisis Penyusun; 2025

2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah Kabupaten Pekalongan diidentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, berbagai isu strategis global, nasional, maupun daerah yang tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan, serta potensi yang dimiliki Kabupaten Pekalongan yang menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah lima tahun ke depan



Tabel 2.163
Analisis Isu Strategis Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJMD 2025-2029	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			ISU GLOBAL	ISU NASIONAL (RPJPN)	ISU RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2025-2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Potensi Wilayah darat, pesisir dan pegunungan 2. Unggulan sektor industri kecil menengah (batik, jeans, sarung); pertanian dan perdagangan 3. Sektor jasa pendidikan dan pesantren (kota santri)	1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan 2. Belum optimalnya ketahanan pangan 3. Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana 4. Meningkatnya sebaran dan pertumbuhan penduduk 5. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat 6. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 7. Belum optimalnya daya saing dan produktivitas perekonomian daerah	1. Kerentanan masyarakat miskin akibat belum meratanya akses terhadap perlindungan sosial, pendidikan dan Kesehatan 2. Pencemaran lingkungan, resiko bencana dan terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung akses terhadap air bersih, hunian dan sanitasi 3. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi akibat kualitas tenaga kerja, penurunan kontribusi pariwisata, dan industry manufaktur 4. Ancaman terhadap ekosistem alam, kerusakan lingkungan, dan keberlanjutan	1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan Kota dan Permukiman 11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 12. Perubahan iklim 13. Sumberdaya kelautan 14. Ekosistem daratan 15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 16. Kemitraan global	1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya 2. integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi 3. Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan,	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan 4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana 6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat 8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	1. Optimalisasi potensi ekonomi lokal didukung pengembangan sektor industri kreatif, pariwisata, dan UMKM untuk meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan 2. Pembangunan Kualitas Sumberdaya Manusia, Penguatan kohesi sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang merata serta inklusif 3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana 4. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata 5. Reformasi birokrasi, pelayanan publik dan pemanfaatan IPTEK



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJMD 2025-2029	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			ISU GLOBAL	ISU NASIONAL (RPJPN)	ISU RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2025-2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	8. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan perekonomian daerah 9. Rendahnya daya saing tenaga kerja 10. Belum optimalnya riset dan inovasi 11. Ketimpangan ekonomi antarwilayah 12. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah 13. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas	sumber daya alam termasuk Kawasan pesisir 5. Perwujudan kelembagaan yang akuntabel dan keadilan yang merata berbasis kesetaraan gender		dan perlindungan sosial 4. Isu tata Kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas 5. Isu supremasi hukum , demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh 6. Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi 7. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan, penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas		

Sumber : Analisis Penyusun; 2025



Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka **isu strategis daerah** Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Optimalisasi potensi ekonomi lokal didukung pengembangan sektor industri kreatif, pariwisata, dan UMKM untuk meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan

Optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui pengembangan sektor industri kreatif, pariwisata, dan UMKM merupakan strategi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 mencapai 5,02 persen, lebih besar dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,95 persen dan sama dengan nasional sebesar 5,02 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya optimalisasi masih perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dan memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Pengembangan sektor UMKM di Kabupaten Pekalongan menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Jumlah Usaha Kecil Mikro (UKM) binaan mengalami peningkatan signifikan dari 825 unit pada tahun 2020 menjadi 78.865 unit di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya serius dari pemerintah daerah untuk mendukung pelaku usaha kecil dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Dengan memperkuat UMKM, Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sektor pariwisata di Kabupaten Pekalongan juga memiliki potensi besar yang perlu terus dikembangkan. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 73.611 orang dari 91.221 orang di tahun 2023, nilai pendapatan sektor pariwisata juga menurun dari Rp 824,45 juta pada tahun 2023 menjadi Rp 710.737 juta di tahun 2024. Pengelolaan objek wisata seperti Objek Wisata Linggoasri, Objek Wisata Pantai Depok, dan Bumi Perkemahan Linggoasri oleh pemerintah daerah merupakan langkah positif, namun perlu diikuti dengan pengembangan dan promosi yang lebih intensif untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pekalongan juga cukup signifikan meskipun mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2024, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB mencapai 29,66 persen, sedikit turun dari 30,75 persen pada tahun 2020. Sementara itu, kontribusi terhadap PDRB ADHK 2010 sebesar 29,31 persen pada tahun 2024 juga lebih kecil dibandingkan dengan 30,84 persen pada tahun 2020. Meskipun demikian, sektor ini masih memegang peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pekalongan, sehingga optimalisasi dan inovasi dalam industri pengolahan tetap menjadi prioritas.

Secara keseluruhan, optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui pengembangan sektor industri kreatif, pariwisata, dan UMKM merupakan langkah strategis yang perlu terus diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dengan meningkatkan dukungan terhadap sektor-sektor



ini, diharapkan daya saing daerah dapat meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan dapat lebih sejajar dengan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

b. Pembangunan Kualitas Sumberdaya Manusia, Penguatan kohesi sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang merata serta inklusif

Pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Pekalongan merupakan upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan inklusif. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 tercatat sebesar **8,95 persen** menurun dibandingkan Tahun 2023. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan nasional (9,03 persen) dan di bawah Provinsi Jawa Tengah (10,47 persen). Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, namun masih perlu diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar masyarakat dapat lebih mandiri dan produktif.

Penguatan kohesi sosial juga menjadi faktor kunci dalam pembangunan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima bantuan sosial dari pemerintah menunjukkan peningkatan dari 0,22 persen pada tahun 2023 menjadi 1,33 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam memberikan dukungan kepada kelompok rentan. Meskipun menunjukkan peningkatan namun persentase Masyarakat yang memperoleh bantuan sosial dari pemerintah masih relative kecil. Penguatan kohesi sosial diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 mencapai angka 71,95, namun masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. IPM yang lebih rendah ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Upaya-upaya peningkatan kualitas SDM harus difokuskan pada penyediaan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik serta peluang kerja yang lebih banyak dan berkualitas.

Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia menunjukkan bahwa 40 persen penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 menerima 20,71 persen dari total pendapatan. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 24,10 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang masih perlu diperbaiki. Program-program ekonomi inklusif yang dapat meningkatkan pendapatan kelompok berpendapatan rendah perlu terus dikembangkan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Secara keseluruhan, pembangunan kualitas SDM, penguatan kohesi sosial, dan peningkatan kualitas hidup yang merata dan inklusif adalah hal yang sangat penting untuk mencapai



kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Meskipun telah ada berbagai pencapaian positif seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan penerima bantuan sosial, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, termasuk peningkatan IPM dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, Kabupaten Pekalongan dapat mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

c. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan menjadi semakin mendesak dengan adanya penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 62,52 pada tahun 2020 menjadi 60,90 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa berbagai aspek lingkungan seperti kualitas air, udara, dan tutupan lahan belum dikelola secara optimal. Kualitas air, misalnya, capaian cenderung stagnan dengan indeks 40-50 pada tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan kualitas air masih belum memberikan hasil yang signifikan.

Kualitas udara di Kabupaten Pekalongan juga menunjukkan penurunan dari 79,57 pada tahun 2020 menjadi 74,61 pada tahun 2024. Adanya penurunan ini memberikan petunjuk bahwa pengelolaan udara bersih belum berjalan secara optimal untuk memastikan kualitas udara tetap terjaga. Sebaliknya, kualitas tutupan lahan mengalami penurunan signifikan dari indeks 63,92 pada tahun 2020 menjadi 60,47 pada tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya deforestasi atau perubahan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan.

Kabupaten Pekalongan juga menghadapi tantangan besar terkait adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana. Indeks risiko bencana pada tahun 2023 mencapai 149,83, termasuk dalam kelas risiko tinggi, dan menempatkan Kabupaten Pekalongan di posisi keempat dari 35 kabupaten/kota dengan risiko bencana tertinggi di Jawa Tengah. Tingginya risiko bencana ini memerlukan strategi mitigasi dan adaptasi yang komprehensif untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan infrastruktur terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

Curah hujan yang lebih rendah selama periode Juni-September 2023, dengan jumlah tidak lebih dari 150 mm, juga memperburuk ketersediaan air di Kabupaten Pekalongan. Kekurangan air selama musim kemarau ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga pada sektor pertanian yang merupakan salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya konservasi air dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien serta penerapan teknologi pengolahan air yang inovatif.

Secara keseluruhan, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan ketahanan terhadap bencana memerlukan perhatian serius di Kabupaten Pekalongan. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan tingginya risiko bencana menuntut tindakan yang lebih tegas dan terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai



pemangku kepentingan. Hanya dengan demikian, Kabupaten Pekalongan dapat memastikan keberlanjutan lingkungannya serta meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman lingkungan dan bencana.

d. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata

Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata di Kabupaten Pekalongan menghadapi berbagai tantangan signifikan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu isu utama adalah masih tingginya kerusakan jalan di wilayah ini. Pada tahun 2024, kondisi jalan yang rusak dan rusak berat mencapai 21,71 persen, menunjukkan perlunya perbaikan dan pemeliharaan yang lebih intensif untuk memastikan aksesibilitas dan konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain jalan, kerusakan jembatan juga menjadi masalah serius dengan persentase kerusakan mencapai 97,99 persen pada tahun 2024 baik kerusakan sedang dan ringan. Kerusakan ini sebagian besar disebabkan oleh usia jembatan yang tua serta kondisi cuaca ekstrem yang mempercepat degradasi struktur jembatan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi yang signifikan dalam pembangunan dan perbaikan jembatan, serta penerapan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan daya tahan jembatan terhadap cuaca ekstrem.

Pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan juga masih belum optimal. Pada tahun 2024, cakupan pelayanan air minum layak dan aman mencapai 88,47 persen, jauh di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 100 persen. Keterbatasan akses terhadap air minum bersih ini mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan kesehatan mereka. Untuk mencapai target nasional, pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur air minum dan memperluas jangkauan layanan agar semua warga dapat menikmati akses air bersih.

Kualitas bangunan irigasi di Kabupaten Pekalongan masih ada sekitar 8,84 persen pada tahun 2024 dalam kondisi kurang baik. Sistem irigasi yang tidak optimal berdampak langsung pada produktivitas pertanian, yang merupakan sektor penting bagi perekonomian daerah. Untuk itu, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi harus menjadi prioritas agar dapat mendukung peningkatan hasil pertanian dan kesejahteraan petani.

Penanganan banjir dan rob di Kabupaten Pekalongan juga belum optimal, meskipun telah ada beberapa upaya yang dilakukan. Pada tahun 2024, persentase penurunan wilayah genangan banjir dan rob mencapai 52,62 persen, namun masih banyak wilayah yang rentan terhadap bencana ini. Penanganan yang lebih komprehensif dan integratif diperlukan untuk mengurangi risiko banjir dan rob secara signifikan. Selain itu, penyediaan keselamatan sarana perhubungan juga belum maksimal, dengan hanya 49,78 persen infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik di Tahun 2024. Upaya peningkatan keselamatan dan kualitas sarana perhubungan harus terus ditingkatkan untuk memastikan mobilitas dan keamanan masyarakat dalam berkendara.



Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata di Kabupaten Pekalongan memerlukan perhatian yang lebih serius dan investasi yang lebih besar. Dengan meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur jalan, jembatan, air minum, irigasi, serta penanganan banjir dan rob, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

e. Reformasi birokrasi, pelayanan publik dan pemanfaatan IPTEK

Reformasi birokrasi di Kabupaten Pekalongan menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Salah satu isu utama adalah belum optimalnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kompetensi ASN yang belum memadai menghambat pelaksanaan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik secara optimal. Upaya peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas agar mampu mendukung transformasi birokrasi yang lebih responsif dan profesional.

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Pekalongan juga belum mencapai potensi optimalnya. Tingkat Maturitas SPIP yang berada pada level 3 menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan prosedur pengendalian internal telah diterapkan, evaluasi atas pengendalian intern masih dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam proses pengawasan dan evaluasi. Untuk mencapai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel, perlu dilakukan perbaikan dalam dokumentasi dan evaluasi pengendalian internal, sehingga dapat mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2023 adalah 64,80 dengan kategori "B", mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 66,56 dengan kategori yang sama. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya reformasi birokrasi masih perlu ditingkatkan secara konsisten. Peningkatan indeks ini sangat bergantung pada peningkatan kompetensi ASN, optimalisasi SPIP, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik. Tanpa adanya peningkatan signifikan dalam faktor-faktor tersebut, reformasi birokrasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Belum optimalnya penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga menjadi tantangan besar. Tingkat Kematangan Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 sebesar 3,05 naik dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 2,86, menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam penerapan teknologi informasi. Peningkatan pemanfaatan IPTEK melalui SPBE yang lebih efektif dan audit TIK yang komprehensif diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan pemanfaatan IPTEK di Kabupaten Pekalongan memerlukan upaya yang lebih terfokus dan terkoordinasi.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Peningkatan kompetensi ASN, optimalisasi implementasi SPIP, peningkatan indeks reformasi birokrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik harus menjadi prioritas utama. Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Pekalongan dapat mencapai transformasi birokrasi yang lebih responsif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Ndeks BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan 2025-2029 merupakan langkah strategis untuk menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD menjadi elemen fundamental yang menentukan arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Visi daerah mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, sementara misi berisi langkah-langkah strategis untuk mencapai visi tersebut. Dalam lingkup yang lebih terukur, tujuan dirancang untuk mendukung implementasi misi, dan sasaran pembangunan diarahkan sebagai indikator capaian yang dapat dievaluasi secara sistematis.

Vsi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah harus disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi internal dan eksternal wilayah. Selain itu, dokumen ini harus konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional. Sehingga RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025-2029 tidak hanya menjadi panduan bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjamin sinergi antara pembangunan nasional dan daerah

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Tahap pertama (2025-2029): Penguatan Fondasi Transformasi. Transformasi sosial dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi ekonomi difokuskan pada hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti dan penerapan manajemen risiko, pelayanan publik berbasis TI, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

1. Visi, Misi dan Sasaran RPJMN 2025-2029

a. Visi RPJMN 2025-2029



Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 yaitu :

“BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.



Pencapaian Visi Presiden dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita) yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) dan 320 program kerja.

Dalam menyongsong masa transisi pemerintahan, pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan kebijakan melalui **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**.

Inmendagri terkait Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 digunakan **sebagai acuan** bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029, meliputi : (1) penjelasan tahapan penyusunan; (2) penjelasan tata cara; (3) pembaharuan sistematika dan penjelasan substansi; (4) jadwal dan *timeline* ; dan (5) hal lain yang belum diatur/dijelaskan regulasi sebelumnya (*periodesasi, penyelarasan, kinerja, cascading dll*).

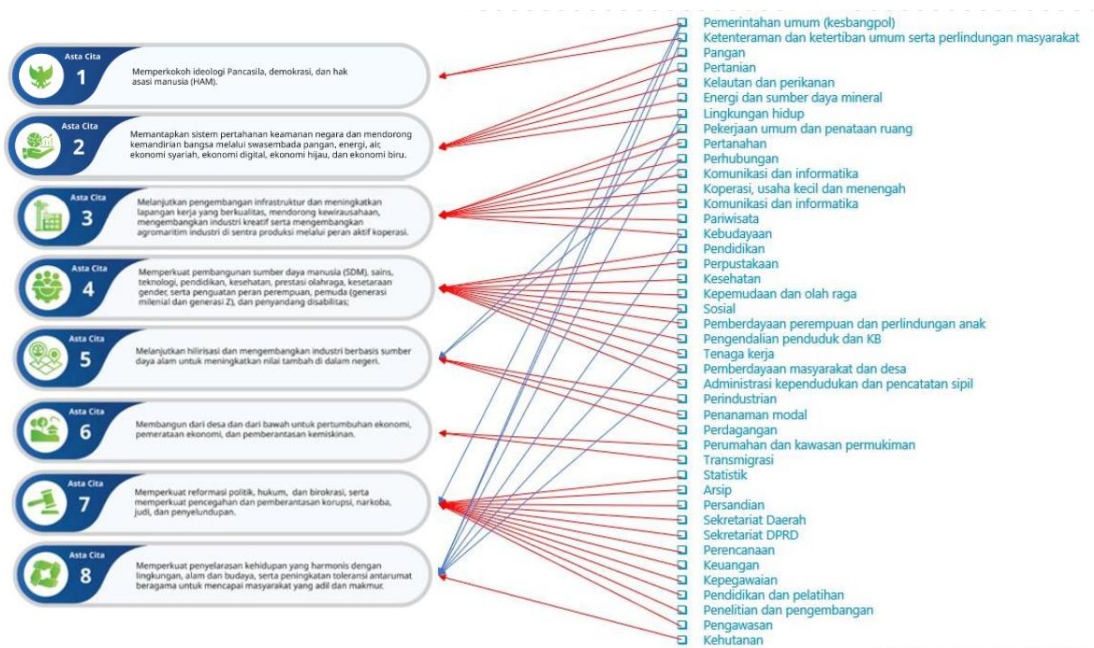
Terbitnya Inmendagri juga sebagai upaya menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menekankan pendekatan **manajemen strategik, logic model, berfikir sistem, dan sistem dinamik**.

b. Misi RPJMN 2025-2029

Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi **Prioritas Nasional** dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah 2025-2029



Gambar 3.1. Asta Cita RPJMN 2025-2029



Gambar 3.2. Pemetaan Asta Cita ke dalam Penyelenggaraan Urusan



c. 17 Program Prioritas RPJMN 2025-2029

- 1). Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
- 2). Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
- 3). Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
- 4). Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- 5). Pemberantasan kemiskinan;
- 6). Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
- 7). Menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
- 8). Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi;
- 9). Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
- 10). Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
- 11). Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
- 12). Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
- 13). Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
- 14). Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
- 15). Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
- 16). Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah;
- 17). Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

d. 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*)



Gambar 3.3. 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*)

e. Sasaran Utama Pembangunan Nasional

RPJMN 2025 – 2029 menekankan pada **TRISULA PEMBANGUNAN (1)Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan, (2)Penurunan Kemiskinan dan (3)Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas** yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2025-2029 ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2045 agar kinerja



pembangunan menjadi terukur, ditetapkan target tahun 2029 untuk setiap sasaran utama pembangunan.

(1) Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju

- GNI per kapita meningkat menjadi 7.400 - 8.240 USD
- Kontribusi PDB Maritim 9,10%
- Kontribusi PDB Manufaktur 21,90%

Strategi Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8%

- Peningkatan Produktivitas Pertanian menuju Swasembada Pangan
- Industrialisasi (hilirisasi): padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan
- Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau
- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
- Transformasi Digital
- Investasi : *Foreign Direct Investment(FDI)* berorientasi ekspor dan Investasi non APBN
- Belanja negara untuk produktivitas:
 - Makan Bergizi Gratis,
 - Pembangunan 3 juta rumah,
 - Lumbung Pangan Nasional dan Desa,
 - Sekolah Unggul,
 - Hilirisasi Lanjutan–EV, dan lain-lain
- Deregulasi Perizinan serta Kebijakan Fiskal dan Moneter pro-Growth

(2) Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

- 4,50-5,00% (tingkat kemiskinan ekstrim 0% di tahun kedua)
- Rasio gini 0,372-0,375
- Kontribusi PDRB KTI 23,30%

Strategi Penghapusan Kemiskinan

- Perlindungan sosial yang terintegrasi
- Pemberdayaan masyarakat
- Peningkatan infrastruktur dan layanan dasar, pendidikan serta kesehatan

(3) Kepemimpinan dan Pengaruh Dunia Meningkat

Global Power Indeks berada di ranking 29

(4) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,59

Strategi Peningkatan SDM

- Pemberian Makan Bergizi
- Penuntasan TBC
- Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
- Layanan Kesehatan Terintegrasi
- Perbaikan Kualitas dan Kesejahteraan Guru

(5) Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*

- Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 62,37%
- Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat 77,20



Gambar 3.4. Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2029

f. Program Strategis Nasional (PSN)

PSN merupakan proyek prioritas terpilih yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian sasaran RPJMN, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

- Berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
- Berkontribusi signifikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Berkontribusi signifikan pada penurunan kemiskinan
- Mendorong pemerataan pembangunan

Program makan bergizi gratis adalah salah satu proyek strategis nasional. Dampak program makan bergizi gratis dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,86% di tahun pertama RPJMN 2025-2029. Selain itu program makan bergizi gratis akan mendorong permintaan baru diantaranya (1)menumbuhkan desa swasembada pangan, energi dan air; (2) Mendorong ekonomi lokal: desa, kabupaten, kota dan provinsi.

g. Sasaran dan Tema Kewilayahan

Peran Provinsi dalam pencapaian jangka menengah wilayah untuk mengurangi kesenjangan dilaksanakan melalui dukungan intervensi yang menjadi kewenangan daerah untuk mendukung target pembangunan nasional seperti TRISULA PEMBANGUNAN, 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat, tetap menjaga kesinambungan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 melalui berbagai perspektif pembangunan kewilayahan.



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas; 2024

Gambar 3.5. Tema Pembangunan Wilayah Pulau/Kepulauan RPJMN 2025-2029



2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2030. Penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk “**NGOPENI. NGLAKONI. Jateng**”. Filosofi tersebut diartikan sebagai berikut :

- **Ngopeni** bermakna **melayani masyarakat** dan memelihara capaian pembangunan yang telah diwujudkan oleh para pemimpin terdahulu.
- **Nglakoni** bermakna **melaksanakan komitmen** dengan penuh tanggung jawab, menyelesaikan masalah, dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.
- **Ngopeni-Nglakoni Jateng** menjadi Perwujudan Semangat Pimpinan Daerah yang menginspirasi pada seluruh Penyelenggara Pemerintahan untuk **RESPONSIF, PEDULI** mencurahkan perhatiannya untuk memelihara dan merawat, dan tidak segan melakukan tindakan **POSITIF** sebagai perwujudan komitmen dan tanggung jawab untuk **Jawa Tengah Maju, Berwibawa dan Berkelanjutan dengan semangat kolaboratif dan responsif**.

a. Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Dengan landasan filosofis tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

“JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Makna dari visi tersebut diuraikan sebagai berikut :

- **MAJU.** Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kontributor perekonomian nasional yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman, dan Responsif terhadap Lingkungan serta sebagai episentrum lumbung pangan, industri nasional dan magnet perkembangan budaya dan kerukunan umat beragama di Nusantara.
- **BERKELANJUTAN.** Melanjutkan dan Meningkatkan Pembangunan Jawa Tengah yang sudah berjalan dengan baik, melakukan **Integrasi Program** antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, serta melakukan Kolaborasi pembangunan daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa. Indonesia Emas 2045
- **INDONESIA EMAS 2045.** Kontribusi Provinsi Jawa Tengah sebagai Episentrum Pembangunan Sumber Daya Manusia Nasional menuju bonus demografi pada tahun 2045, yang menjadi sumber inspirasi bagi dunia dengan generasi yang cerdas serta Ekonomi yang tumbuh berkembang.

b. Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

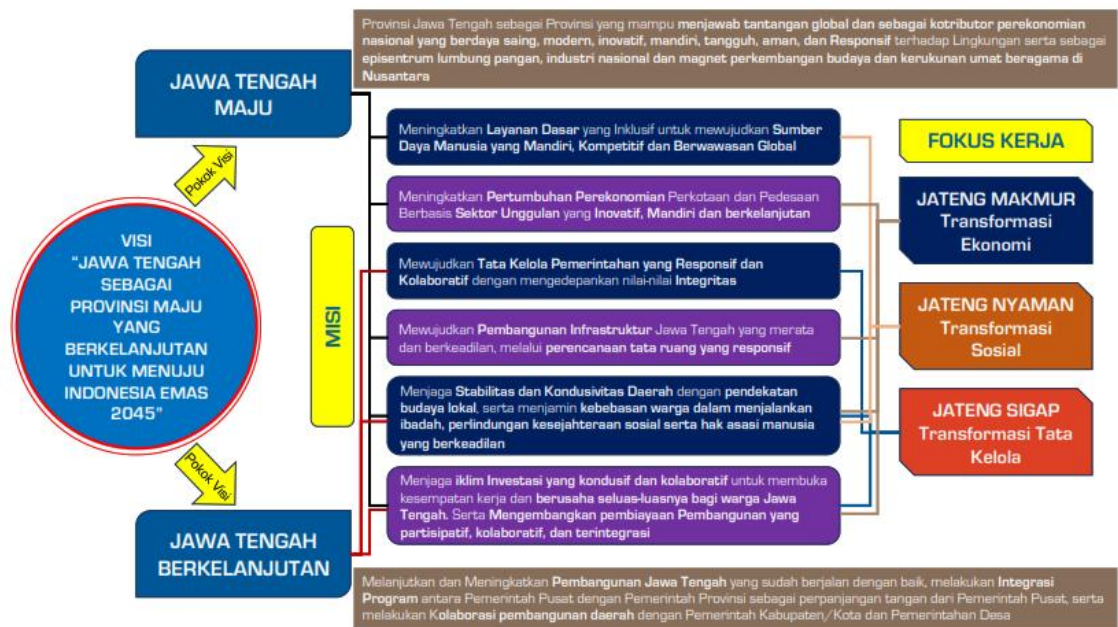
- 1). Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global.
- 2). Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan.
- 3). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas.
- 4). Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif.
- 5). Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan.



- 6). Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dilaksanakan dengan **tiga fokus kerja** yaitu:

- **JATENG SIGAP!**
Merupakan upaya Pemerintah dalam menghadirkan Pemerintahan yang Responsif dalam menjawab kebutuhan Masyarakat Jawa Tengah. Melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang dapat diwujudkan dengan Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat.
- **JATENG MAKMUR!**
Merupakan langkah Pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah melalui Transformasi Ekonomi yang tidak hanya berfokus pada Perekonomian Perkotaan juga Pedesaan, Perencanaan Tata Ruang yang responsif, dengan mengoptimalkan Pemerintahan Partisipatif, Kolaboratif dan Integratif serta dukungan Iklim Investasi.
- **JATENG NYAMAN!**
Menjadi komitmen Pemerintah dalam menghadirkan Transformasi Sosial yang tercermin melalui terwujudnya Stabilitas, Kondusivitas, serta Kenyamanan dalam berkehidupan melalui peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif, pengembangan budaya lokal, aman & nyaman dalam beribadah serta perlindungan terhadap HAM untuk Kualitas SDM Jawa Tengah yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.



Sumber : Rancangan Perda RPJMD Prov. Jawa Tengah 2025-2029

Gambar 3.6. Keterkaitan Visi dan Pokok Visi, Misi, dan Fokus Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

Perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 berdasarkan penjabaran pokok-pokok visi, misi dan fokus kerja pembangunan daerah secara teknokratik digambarkan dalam *logframe* atau kerangka berpikir sebagai berikut. Perwujudan Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan untuk mendukung Indonesia Emas 2045, didukung dengan tiga pilar pembangunan daerah yaitu:

- 1) transformasi ekonomi, dengan terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan;
- 2) transformasi sosial, dengan terwujudnya sumber daya manusia Jawa Tengah berdaya saing dan berkarakter;



- 3) transformasi tata kelola, dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis.

c. Tujuan dan Sasaran RPJMD Jawa Tengah 2025-2029

Penerjemahan visi dan misi daerah menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 -2029 dirumuskan melalui logframe pembangunan daerah Jawa Tengah sebagai berikut



Sumber : Rancangan Perda RPJMD Prov. Jawa Tengah 2025-2029

Gambar 3.7. Logframe Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 berdasarkan logframe tersebut diukur dengan indikator kinerja pembangunan daerah yaitu sebagai berikut:

- Jateng MAJU BERKELANJUTAN, diukur dengan indikator Angka Kemiskinan, PDRB per Kapita, dan Indeks Reformasi Birokrasi;
- Jateng SIGAP (Transformasi Tata Kelola), diukur dengan indikator Indeks Integritas Nasional, Indeks Demokrasi Nasional, dan Otonomi Fiskal Daerah;
- Jateng MAKMUR (Transformasi Ekonomi), diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- Jateng NYAMAN (Transformasi Sosial), diukur dengan indikator Indeks Modal Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Berdasarkan seluruh penjelasan visi, misi, fokus kerja, sampai dengan logframe pembangunan daerah sesuai dengan blue print perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini yang kemudian akan dirumuskan lebih lanjut dalam strategi dan arah kebijakan sampai dengan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam pembangunan daerah Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah **“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan”**. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan transformasi ekonomi berbasis lingkungan dan transformasi sosial merupakan penerjemahan dari perwujudan Jawa Tengah yang Maju. Tujuan ini dapat diartikan bahwa Provinsi Jawa Tengah yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kontributor perekonomian yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman dan responsif terhadap lingkungan. Selain itu, tujuan juga diarahkan untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai episentrum lumbung pangan, industri nasional dan magnet perkembangan budaya dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, didukung dengan tata kelola pemerintahan berkelanjutan dan meningkatkan pembangunan yang sudah berjalan dengan baik, melakukan integrasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah



pusat di daerah, serta melakukan kolaborasi pembangunan daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Guna mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah selama tahun 2025-2029 digunakan indikator kinerja yaitu **Angka Kemiskinan** dan **PDRB per kapita** dan **Indeks Reformasi Birokrasi**. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan **SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH** yang akan diwujudkan sebagai berikut.

Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan daerah, sasaran pertama yang ingin diwujudkan adalah tata kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif sebagai bagian dari transformasi tata kelola di Jawa Tengah. Upaya transformasi tata kelola merupakan arus utama dalam rangka mendorong penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang adaptif, yaitu pemerintahan yang senantiasa mampu menyesuaikan dalam menghadapi gejolak maupun perubahan yang seringkali terjadi lebih cepat melalui regulasi adaptif dan tidak tumpang tindih, sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan yang kompeten dan profesional, budaya kerja efektif dan efisien, didukung dengan digitalisasi dan pengawasan pengendalian berbasis risiko yang independen.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. *Willingness to pay* masyarakat dalam membayar pajak yang semakin tinggi akan mendorong investasi menjadi semakin besar sehingga mendorong peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, pemerintahan berintegritas dan kolaboratif akan mampu menyesuaikan strategi fiskal dengan dinamika kondisi perekonomian sehingga menghasilkan kapasitas fiskal yang memadai. Dengan kapasitas fiskal yang kuat, daerah memiliki cukup kemampuan untuk melaksanakan program pembangunan yang tepat sasaran, menyediakan layanan publik yang optimal, dan menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan **tiga indikator kinerja** yaitu **Indeks Integritas Nasional**, **Indeks Demokrasi Indonesia**, dan **Otonomi Fiskal Daerah**.

Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berbasis Lingkungan

Pencapaian sasaran pembangunan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan diarahkan dengan fokus pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah didukung dengan produktivitas sumber daya manusia, digitalisasi, serta berbasis riset dan inovasi. Sejalan dengan peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan tersebut, investasi yang berkualitas diarahkan pada sektor dan aktivitas produktif dengan dampak *multiplier* yang besar terhadap perekonomian. Pengembangan investasi berdasarkan keunggulan daerah diharapkan memiliki *backward* dan *forward linkage* dalam menciptakan nilai tambah serta menjadi bagian rantai pasok domestik yang kuat.

Selain itu juga didorong untuk pengembangan ekonomi kreatif, penguatan ekonomi dan keuangan syariah, serta mulai menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi sampai ke generasi berikutnya. Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut fokus pada pengembangan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru; transformasi digital; integrasi ekonomi domestik dan global; serta perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta didukung dengan pembangunan infrastruktur (jalan, energi, listrik, air) yang merata dan berwawasan lingkungan.

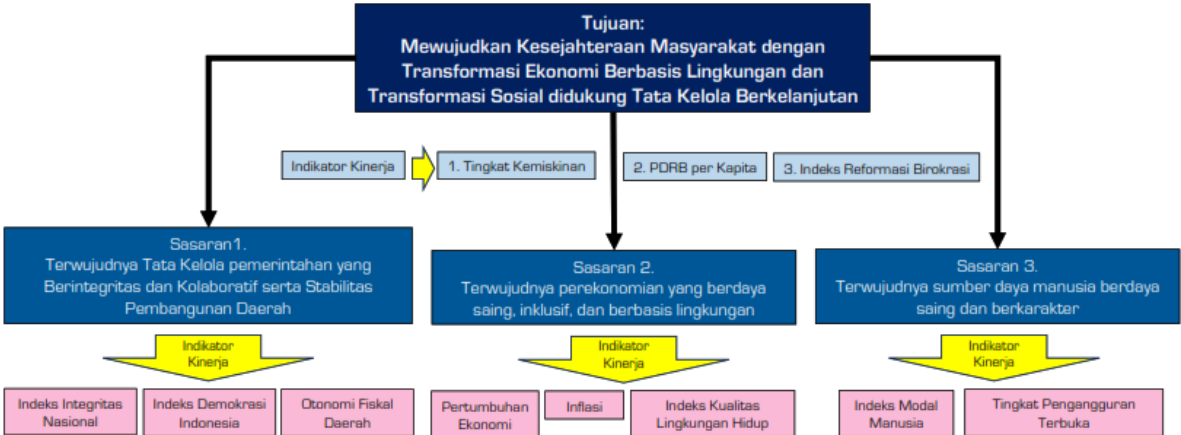


Perekonomian daerah yang berbasis lingkungan harus didukung dengan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia menjadi salah satu kondisi kinerja yang harus diwujudkan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai modal dasar proses pembangunan hanya dapat terwujud apabila ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan **tiga indikator kinerja** yaitu **Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**.

Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter

Pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut diarahkan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut antara lain fokus pada kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas secara inklusif, perlindungan sosial yang adaptif, pembangunan keluarga, pengurangan ketimpangan gender, serta pengurangan pengangguran. Selain itu, mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter dilakukan dengan upaya memperkuat ketahanan budaya yang terinternalisasi dalam pribadi masyarakat Jawa Tengah dan memajukan kebudayaan di Jawa Tengah sebagai jati diri atau karakter masyarakat Jawa Tengah. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan **dua indikator kinerja** yaitu **Indeks Modal Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka**.

Berikut gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029



Sumber : Rancangan Perda RPJMD Prov. Jawa Tengah 2025-2029

**Gambar 3.8. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029**

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

a. Visi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2024. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin diraih atau diwujudkan (*desired future*) selama masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka telah pula dirumuskan misi, tujuan dan sasaran beserta indikator-indikatornya yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dari visi yang ingin dicapai.



Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan visi Bupati dan wakil Bupati pekalongan terpilih tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“KABUPATEN PEKALONGAN YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”

Rumusan visi tersebut merupakan kumpulan dari beberapa frase yang perlu dijabarkan kembali sehingga dapat diketahui maknanya. Penjabaran frase ini berguna untuk memberikan batasan mengenai kondisi yang ingin dicapai oleh visi tersebut. Penjabaran dari masing-masing frase visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

▪ KABUPATEN PEKALONGAN

Kabupaten Pekalongan meliputi seluruh administrasi wilayah dan semua warganya yang berada di dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 beserta dengan segala isinya termasuk manusia yang menjadi warganya.

▪ MAJU

Maju yang dimaksud dalam Visi Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan merujuk pada peningkatan daya saing daerah melalui penguatan pada empat pilar utama Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan dan tata kelola, serta infrastruktur dan lingkungan. Kemajuan ini mencerminkan perkembangan masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam berbagai aspek kehidupan yang berbudaya dan berlandaskan kearifan lokal.

Dalam pilar infrastruktur dan lingkungan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas penting. Jalan yang baik mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menurunkan biaya logistik. Hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperkuat akses pasar bagi produk unggulan seperti hasil pertanian, kerajinan, dan UMKM Kabupaten Pekalongan.

Pilar sosial merupakan fondasi utama dalam membangun daya saing daerah yang berkelanjutan. Penguatan pilar ini mencakup beberapa aspek utama yaitu 1) Akses pendidikan yang merata dan berkualitas menjadi prioritas utama untuk menciptakan SDM yang unggul, 2) peningkatan kesehatan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, 3) Pembangunan sosial diarahkan untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, 4) penguatan nilai-nilai sosial dan pelestarian budaya lokal, 5) Pemerataan pembangunan antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan sosial, dan 6) Perlindungan sosial melalui program jaminan sosial, bantuan langsung, dan subsidi kebutuhan dasar.

Pilar ekonomi diperkuat melalui pengembangan teknologi digital untuk mendukung sektor usaha kecil dan menengah. Pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial memungkinkan pelaku UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke tingkat nasional dan internasional. Program literasi digital menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing masyarakat dan produktivitas ekonomi.

Sedangkan dalam pilar kelembagaan dan tata kelola, Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya menciptakan sistem pelayanan publik yang transparan dan efisien melalui e-government dan layanan perizinan online. Hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.



Pengembangan teknologi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Pekalongan yang maju dan berdaya saing. Di era digital saat ini, penerapan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien. Sistem layanan publik berbasis digital, seperti e-government dan pelayanan perizinan online, diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dengan cepat dan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

Teknologi juga berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat seperti membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka melalui platform e-commerce dan media sosial. Dengan akses teknologi yang lebih luas, pelaku usaha kecil dan menengah dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke tingkat nasional dan internasional. Pelatihan literasi digital bagi masyarakat terus digalakkan untuk memastikan bahwa semua kalangan, termasuk generasi muda dan pelaku usaha, mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Pengembangan teknologi juga diterapkan dalam sektor pendidikan sebagai upaya membentuk SDM unggul di Kabupaten Pekalongan seperti dalam proses belajar-mengajar memungkinkan para siswa dan guru mengakses berbagai sumber pengetahuan yang lebih luas. Dengan penguasaan teknologi sejak dini, generasi muda diharapkan mampu bersaing di era globalisasi yang terus berkembang. Ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang tidak hanya menitikberatkan pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan masa depan.

▪ ADIL

Adil dimaknai sebagai keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak atas kompensasi, hak hidup layak, hak menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan. Adil juga mencerminkan adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Keadilan di Kabupaten Pekalongan, keadilan diwujudkan melalui pemerataan pembangunan yang mencakup seluruh wilayah geografis baik pesisir, perkotaan, dan pegunungan yang masing-masing memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang unik. Adil yang dimaksud dalam Visi Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan merujuk pada penurunan rasio gini dan mendorong percepatan keadilan gender dalam Pembangunan.

Dalam rangka menurunkan Rasio Gini dan mengurangi ketimpangan antarwilayah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerapkan strategi pembangunan berbasis kebutuhan dan potensi lokal. Pada wilayah pesisir, pembangunan difokuskan pada penguatan infrastruktur mitigasi bencana untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi akibat abrasi dan banjir rob. Pada wilayah perkotaan, perbaikan transportasi publik, pengelolaan limbah, dan peningkatan fasilitas umum diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk yang padat. Sementara itu, pembangunan wilayah pegunungan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas, layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan digital, demi menciptakan keseimbangan pembangunan dan memastikan bahwa masyarakat di seluruh wilayah dapat mengakses sumberdaya pembangunan.

Keadilan juga mencakup keadilan gender sebagai bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dari pembangunan. Dalam sektor ekonomi, pemberdayaan perempuan dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan dukungan pemasaran digital, terutama di sektor UMKM batik yang banyak dikelola oleh



perempuan. Ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkecil kesenjangan gender dalam pendapatan.

Dalam bidang pendidikan dan kepemimpinan, kebijakan afirmatif diterapkan untuk memastikan anak-anak perempuan memiliki akses pendidikan hingga jenjang tinggi tanpa hambatan budaya atau ekonomi. Beasiswa dan program literasi gender terus dikembangkan, seiring dengan upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan, organisasi masyarakat, dan lembaga desa. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai IPG Kabupaten Pekalongan secara signifikan, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan.

Keadilan dalam pembangunan bukan hanya tentang kesetaraan antarwilayah, tetapi juga menyasar pemerataan antarindividu dan antarjenis kelamin. Ini sejalan dengan visi daerah yang menempatkan masyarakat sebagai pusat Pembangunan adil, setara, dan inklusif.

▪ SEJAHTERA

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sejahtera menggambarkan kondisi di mana seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan terpenuhi kebutuhannya baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Sejahtera berarti tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal (*no one left behind*), adanya akses yang adil ke sumber daya, pekerjaan yang layak, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi terus diupayakan melalui implementasi berbagai program pemberdayaan masyarakat. Selain penguatan ekonomi, kesejahteraan sosial juga menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah terus mendorong akses yang adil terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan layak. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di berbagai wilayah, termasuk puskesmas dan rumah sakit ramah disabilitas dengan fasilitas yang lebih baik, bertujuan memastikan setiap warga mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan masyarakat miskin juga terus diperluas agar mereka tidak tertinggal dalam arus pembangunan.

Penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Pekalongan. Pemerintah daerah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dalam mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja lokal. Kawasan industri yang dikembangkan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan menjadi salah satu solusi untuk menyerap tenaga kerja, terutama bagi generasi muda.

Pengentasan kemiskinan menjadi agenda prioritas dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan memastikan bahwa masyarakat miskin tidak hanya menerima bantuan jangka pendek, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin menjadi wujud nyata dari upaya menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah kabupaten.

Kesejahteraan di Kabupaten Pekalongan tidak hanya diukur dari indikator ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup yang lebih baik. Kehidupan sosial yang harmonis, kelestarian budaya lokal, dan pelestarian lingkungan menjadi bagian penting dalam menciptakan kebahagiaan dan kepuasan hidup masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip *no one left behind*, Pemerintah daerah terus berkomitmen membangun daerah yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga



sejahtera secara menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat.

Sejahtera menunjuk pada kondisi manusia yang makmur, sehat, dan damai. Makna sejahtera mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Sejahtera berarti tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal (*no one left behind*), dengan akses yang adil terhadap sumber daya, pekerjaan layak, serta perlindungan sosial yang menyeluruh bagi kelompok rentan. Upaya menurunkan angka kemiskinan, khususnya kelompok masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem sebagaimana ditetapkan oleh Bank Dunia (USD 1,9 per hari), dan mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan, terutama pada kelompok pendapatan terendah 40 persen (*bottom 40%*).

Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Fokus pembangunan diarahkan untuk menjamin bahwa distribusi pertumbuhan ekonomi benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok atas.

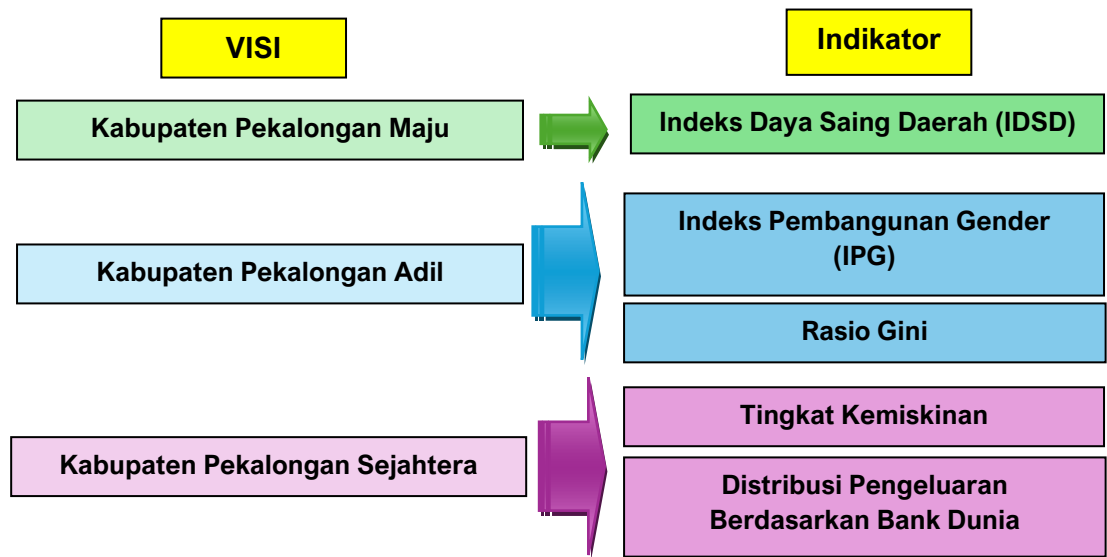
Peningkatan kesejahteraan sosial diwujudkan melalui perluasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan hunian yang layak. Fasilitas layanan kesehatan diperkuat, termasuk pembangunan puskesmas yang lebih merata dan rumah sakit dengan akses inklusif bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga memperluas cakupan program perlindungan sosial, termasuk bantuan pangan, jaminan kesehatan, dan perlindungan lansia dan penyandang disabilitas, untuk meminimalisasi risiko jatuhnya kelompok rentan ke dalam kemiskinan kronis.

Dalam rangka mendorong mobilitas ekonomi vertikal, penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas utama. Melalui kemitraan dengan sektor swasta, investasi diarahkan pada sektor padat karya. Kawasan industri ramah lingkungan menjadi alternatif strategis untuk menyerap tenaga kerja lokal, khususnya generasi muda yang berada pada risiko menganggur atau bekerja informal.

Program pengentasan kemiskinan dirancang tidak hanya sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan jangka panjang. Pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan peningkatan keterampilan kerja menjadi salah satu dari upaya menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan pendekatan yang diusung Bank Dunia, yaitu peningkatan kesejahteraan melalui perlindungan sosial produktif dan pembangunan ekonomi inklusif.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kualitas hidup. Kehidupan sosial yang harmonis, pelestarian budaya lokal, dan perlindungan lingkungan menjadi unsur penting dalam mewujudkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan semangat inklusivitas dan prinsip *no one left behind*, Kabupaten Pekalongan berkomitmen membangun wilayah yang maju secara ekonomi sekaligus sejahtera secara menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat.

Visi pembangunan Kabupaten Pekalongan diukur dengan indikator seperti dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 3.9. Indikator Visi Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

b. Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada makna visi pembangunan Kabupaten Pekalongan, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 sebagaimana berikut:

- 1). **Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan.**
- 2). **Menuntaskan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas.**
- 3). **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan UMKM yang Berdaya Saing.**
- 4). **Memperkuat Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.**
- 5). **Menguatkan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani.**

Penjelasan masing-masing misi dapat diuraikan sebagai berikut :

MISI 1 Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan

a) SDM yang cerdas, sehat, produktif, dan inovatif

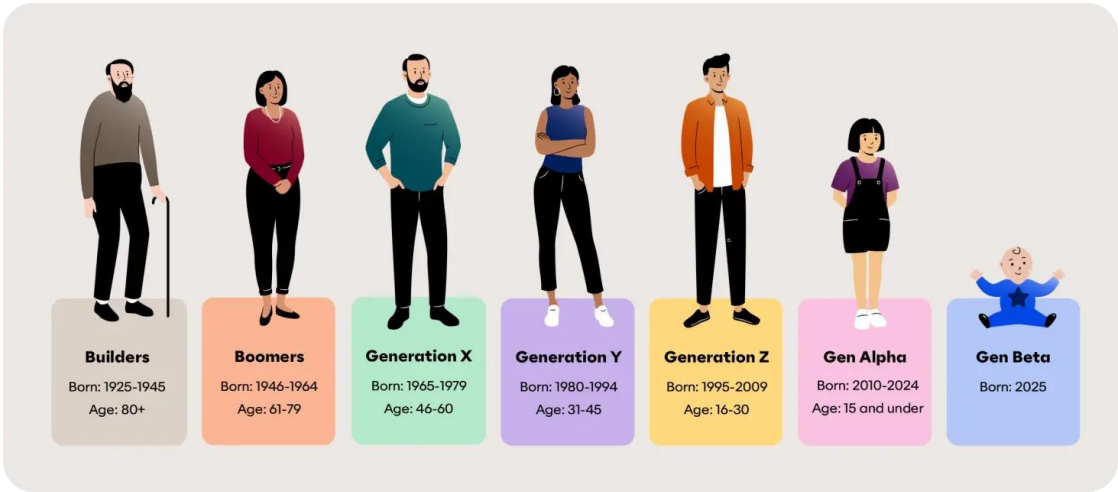
Memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan, sejalan dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang memprioritaskan penguatan SDM sebagai salah satu fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan SDM tidak hanya mencakup peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, tetapi juga penguatan kapasitas generasi muda, pemanfaatan sains dan teknologi, serta pemberdayaan kelompok rentan. Kabupaten Pekalongan harus menyiapkan SDM yang cerdas, sehat, produktif, dan inovatif agar mampu bersaing di era globalisasi dan revolusi teknologi, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi, digitalisasi, dan tantangan pasar tenaga kerja.



Pengembangan SDM di Kabupaten Pekalongan juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dalam Rancangan Awal RPJMN Tahun Tahun 2025-2029 yaitu memperkuat pembangunan sumberdaya manusias (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesertaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) serta penyandang disabilitas. Misi pertama dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan menjadi penting mengingat potensi demografi yang didominasi oleh generasi X (milenial) dan generasi Z, harus diarahkan menjadi sumber daya produktif dan inovatif. Pembangunan SDM yang unggul akan memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan global, termasuk transformasi digital dan perubahan struktur ekonomi di era industri 5.0.

b) Akses pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua kelompok masyarakat

Dalam bidang pendidikan, Kabupaten Pekalongan akan mendorong penguatan akses dan kualitas pendidikan formal serta vokasi yang berbasis teknologi dan inovasi. Pendidikan vokasi menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi generasi muda. Hal ini harus disertai dengan peningkatan penguasaan sains, teknologi, dan keterampilan digital, agar generasi X (milenial) dan Z memiliki daya saing tinggi di pasar tenaga kerja domestik maupun global. Selain itu, perhatian terhadap penyandang disabilitas menjadi prioritas dengan memastikan akses pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua kelompok masyarakat.



Gambar 3.10. Pembagian Generasi

c) Pelayanan kesehatan berkualitas

Dalam bidang kesehatan, penguatan kualitas layanan kesehatan dasar dan peningkatan fasilitas kesehatan akan menjadi agenda utama. Pembangunan layanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Upaya pencegahan stunting, peningkatan gizi masyarakat, dan promosi pola hidup sehat menjadi prioritas melalui program edukasi dan intervensi berbasis komunitas. Selain itu, pemberian makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil akan dioptimalkan guna mendukung tumbuh kembang yang optimal dan mencegah malnutrisi. Pemeriksaan kesehatan gratis juga akan diselenggarakan secara berkala untuk mendeteksi dini penyakit sekaligus mendorong percepatan penuntasan kasus TBC melalui pengobatan yang terpadu dan berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan fasilitas rumah sakit yang lengkap, modern, dan merata akan terus diupayakan untuk



memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, sehingga terwujud masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Selain itu, pengembangan prestasi olahraga di Kabupaten Pekalongan harus menjadi prioritas untuk membangun generasi yang sehat, dan berkarakter. Dukungan terhadap atlet daerah, sarana olahraga, dan pembinaan berjenjang akan menjadi kunci dalam melahirkan prestasi yang dapat membanggakan daerah di tingkat nasional dan internasional.

d) Penguatan peran perempuan, kesetaraan gender, serta pemuda

Selanjutnya, misi ini juga mencakup penguatan peran perempuan, kesetaraan gender, serta pemuda sebagai agen perubahan. Penguatan peran perempuan akan diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi, sosial, dan politik, sehingga mereka memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan daerah. Selain itu, pemuda, khususnya generasi X (milenial) dan Z, didorong untuk menjadi inovator, wirausahawan muda, serta pemimpin masa depan dengan pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga harus memastikan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan, baik melalui peningkatan keterampilan kerja, penyediaan lapangan kerja inklusif, maupun layanan publik yang ramah disabilitas. Dengan sinergi kebijakan yang inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan, misi ini diharapkan dapat menciptakan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan masa depan serta mendukung terwujudnya Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera

MISI 2 Menuntaskan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas

a) Pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas berkelanjutan

Menuntaskan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas di Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur yang baik menjadi prasyarat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan, dengan memastikan seluruh wilayah memiliki akses jalan yang layak, jembatan yang kokoh, serta fasilitas publik yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat. Pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Infrastruktur akan diarahkan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pusat ekonomi yang sudah ada. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mengembangkan perdagangan, industri dan pariwisata berbasis potensi lokal, yang didukung oleh infrastruktur yang terintegrasi yang diharapkan tercipta pusat-pusat ekonomi baru yang dapat mendorong pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas berwawasan lingkungan.

b) Penanganan sampah terpadu

Dalam penanganan sampah Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan penguatan pengelolaan persampahan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Ini merupakan langkah strategis



Kabupaten Pekalongan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. Pengelolaan ini mencakup seluruh rantai aktivitas, mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah di sumber (rumah tangga, pelaku usaha, dan institusi), hingga proses pengangkutan, pengolahan, dan penanganan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Setiap elemen masyarakat memiliki tanggung jawab aktif dalam pengelolaan sampah. Masyarakat sebagai produsen sampah melakukan pemilahan dan pengurangan, pemerintah menyediakan fasilitas dan kebijakan pendukung, dan sektor swasta dapat berperan dalam inovasi teknologi serta daur ulang. Pendekatan pengelolaan sampah ini tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui pemanfaatan ulang dan daur ulang.

Tantangan pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan, masih cukup kompleks akibat pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola persampahan yang mengintegrasikan pendekatan hulu dan hilir, melalui edukasi publik, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penyediaan infrastruktur yang memadai seperti bank sampah, TPS 3R, serta revitalisasi TPA.

c) Akses terhadap hunian yang layak dan berkualitas

Dalam mendukung akses terhadap hunian yang layak dan berkualitas, pemerintah akan mendorong penyediaan rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi generasi X (milenial), generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan rumah murah ini tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti akses air bersih, dan fasilitas sanitasi yang sehat. Dengan demikian, generasi muda dan MBR dapat memiliki hunian yang aman dan nyaman, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Selain itu, pengembangan kawasan permukiman yang tertata dengan baik akan menciptakan lingkungan hunian yang lebih sehat.

d) Pembangunan dan perbaikan sarana serta prasarana transportasi darat

Pembangunan dan perbaikan sarana serta prasarana transportasi darat akan menjadi prioritas untuk mendukung konektivitas antarwilayah. Sarana serta prasarana transportasi yang memadai akan memastikan akses yang lebih cepat, murah, dan aman, baik untuk aktivitas ekonomi maupun kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, pembangunan jaringan transportasi yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat ekonomi yang sudah ada akan mendukung produktivitas daerah, menarik investasi, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

MISI 3 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN UMKM YANG BERDAYA SAING

a) Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing Kabupaten Pekalongan dilakukan untuk menciptakan pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan melalui optimalisasi potensi lokal dan penguatan sektor ekonomi produktif. Ekonomi inklusif memastikan setiap lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Pemberdayaan UMKM akan difokuskan pada peningkatan akses permodalan, pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran. Dengan dukungan infrastruktur ekonomi dan pelatihan, UMKM diharapkan dapat tumbuh lebih



berdaya saing, membuka lapangan kerja baru, dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi inklusif juga akan diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan membangun kolaborasi antara pelaku UMKM, sektor swasta, dan lembaga keuangan untuk mendorong inovasi dan ekspansi usaha. Dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kearifan lokal akan terus ditingkatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi daerah

b) Produktivitas sektor pertanian dan pangan

Pada sektor pertanian dan pangan, peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kabupaten Pekalongan, dengan potensi pertanian yang melimpah, akan mengembangkan sistem pertanian berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan guna meningkatkan hasil produksi serta efisiensi petani. Pemerintah akan mendukung petani melalui penyediaan sarana produksi pertanian, seperti benih unggul, pupuk, dan alat-alat pertanian, serta memperbaiki infrastruktur irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, penguatan sektor pangan melalui diversifikasi produk olahan akan menciptakan nilai tambah ekonomi dan peluang usaha baru bagi masyarakat. Dengan demikian, sektor pertanian dan pangan akan menjadi salah satu pilar utama dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

c) Pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan akan berjalan seiring dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mendorong program ekonomi produktif berbasis potensi lokal dengan melibatkan kelompok masyarakat miskin sebagai penerima manfaat langsung. Hal ini dilakukan melalui program padat karya, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan perempuan dalam usaha ekonomi kreatif. Selain itu, akses terhadap permodalan dan pasar akan diperluas untuk memastikan kelompok rentan dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi. Pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, khususnya untuk keluarga miskin, menjadi prioritas untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Melalui pelatihan vokasi, pemberian akses modal usaha, dan pendampingan kewirausahaan, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri secara ekonomi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga akan mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga sosial untuk memperluas peluang kerja serta menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang peningkatan pendapatan dan taraf hidup yang lebih baik.

MISI 4 Memperkuat Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

a) Keseimbangan ekosistem dalam menghadapi ancaman perubahan iklim

Memperkuat ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan untuk mengantisipasi risiko bencana serta memastikan keseimbangan ekosistem dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, Kabupaten Pekalongan perlu membangun ekosistem yang tangguh



dan adaptif melalui tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, salah satunya adalah pengelolaan air tanah. Perubahan iklim menyebabkan naiknya muka air laut, peningkatan suhu, serta ketidakpastian curah hujan memperbesar risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir rob, kekeringan, dan penurunan muka tanah. Pengambilan air tanah secara tidak terkendali dapat memperparah kondisi tersebut karena menyebabkan ketidakseimbangan tekanan geologis dan mempercepat intrusi air laut. Pengelolaan air tanah yang baik menjadi bagian integral dari strategi mitigasi risiko bencana sekaligus menjaga fungsi ekologis wilayah, terutama di kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Kelestarian sumber daya air menjadi aspek utama dalam strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Air tanah yang terus-menerus diambil tanpa upaya konservasi akan menyebabkan berkurangnya cadangan air bersih yang dibutuhkan untuk jangka panjang. Penggunaan air tanah yang berlebihan juga mengganggu keseimbangan antara kebutuhan manusia dan fungsi ekologis lingkungan, seperti kelangsungan vegetasi dan habitat mikroorganisme yang bergantung pada kelembapan tanah.

Intrusi air laut merupakan dampak langsung dari eksploitasi air tanah yang berlebihan, terutama di kawasan pesisir utara Kabupaten Pekalongan. Ketika tekanan air tanah menurun, air laut dapat masuk ke lapisan akuifer dan mencemari sumber air tawar, sehingga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan kebutuhan air bersih dari sumur-sumur dangkal. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu produktivitas sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan air tawar. Upaya pengendalian eksploitasi air tanah harus menjadi bagian dari tata kelola lingkungan yang terintegrasi, disertai dengan kebijakan zonasi pemanfaatan air tanah dan edukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi air. Eksploitasi air tanah juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang krusial. Ketika sumber air tanah tercemar atau mengering, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak paling terdampak karena keterbatasan akses terhadap air bersih alternatif. Hal ini dapat memicu ketimpangan sosial, konflik sumber daya, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Keseimbangan ekosistem menjadi fondasi penting dalam menghadapi ancaman perubahan iklim di Kabupaten Pekalongan. Intervensi pengelolaan RTH dan Konservasi Daratan diarahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak hanya pada aspek estetika dan rekreasi, tetapi juga memperkuat daya dukung lingkungan melalui peningkatan kapasitas lahan sebagai kawasan resapan air dan pengendali suhu mikro. Dalam rangka adaptasi perubahan iklim, RTH harus dirancang sebagai bagian dari infrastruktur hijau kota yang berfungsi ekologis, sosial, dan ekonomis, termasuk dalam mitigasi risiko banjir dan kekeringan yang makin sering terjadi akibat ketidakstabilan iklim.

Lebih dari sekadar ruang publik, RTH diupayakan menjadi site keanekaragaman hayati *biodiversity-friendly green space* yang mendukung kelestarian flora dan fauna lokal. Keberadaan vegetasi asli dan sistem lanskap alami di RTH dapat menciptakan habitat yang ramah bagi spesies lokal serta menjaga siklus ekologis yang penting bagi kestabilan lingkungan.

Perencanaan dan pengembangan RTH di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip ekologis dan berbasis data biodiversitas agar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem. Penambahan fungsi edukasi dan konservasi di dalam RTH juga menjadi nilai tambah yang dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain penguatan RTH, sinergisitas Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rehabilitasi



Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti DAS Kupang, sangat krusial untuk memulihkan daya dukung lingkungan. DAS yang rusak berkontribusi besar terhadap degradasi lahan, sedimentasi, dan banjir di hilir, serta mempercepat kerusakan ekosistem secara keseluruhan. Intervensi berbasis kewenangan daerah perlu difokuskan pada konservasi lereng, penghijauan bantaran sungai, serta pengendalian tata guna lahan di sekitar DAS. Upaya ini memerlukan kolaborasi lintas sektor serta pendekatan partisipatif masyarakat untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.

b) Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pengelolaan lingkungan hidup juga akan diarahkan pada upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan. Langkah ini mencakup pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, peningkatan penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan sampah melalui sistem reduce, reuse, recycle (3R). Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mendorong masyarakat dan sektor industri untuk berpartisipasi aktif dalam pengurangan emisi melalui inovasi teknologi ramah lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Secara khusus, sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang emisi GRK juga menjadi perhatian penting. Upaya pengurangan emisi dilakukan melalui penerapan pertanian organik, penggunaan UPPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik), serta pengelolaan lahan sawah yang ramah iklim guna menurunkan emisi metana (CH₄).

Selain itu, pengembangan teknologi biogas berbasis methane capture menjadi solusi energi alternatif yang berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi dari limbah ternak. Penggunaan feed suplemen pada pakan sapi juga diupayakan untuk mengurangi produksi metana dari sektor peternakan. Langkah-langkah tersebut tidak hanya membantu mengurangi jejak karbon sektor pertanian, tetapi juga membuka peluang ekonomi sirkular di tingkat lokal, terutama melalui pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi dan pupuk. Dalam membangun ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan memperkuat edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya menjaga lingkungan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi bencana. Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, dunia usaha, dan akademisi juga akan ditingkatkan untuk mengembangkan inovasi dan solusi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

MISI 5 Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani

a) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui digitalisasi layanan. Reformasi birokrasi juga akan terus diperkuat dengan penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta penerapan standar pelayanan publik yang berfokus pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Peningkatan kualitas layanan publik juga akan berfokus pada pembangunan budaya kerja yang berintegritas, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Aparatur pemerintah akan terus didorong untuk mengembangkan budaya melayani. Pelayanan berbasis teknologi, akan terus dioptimalkan guna memangkas birokrasi yang rumit dan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta pelaku usaha.

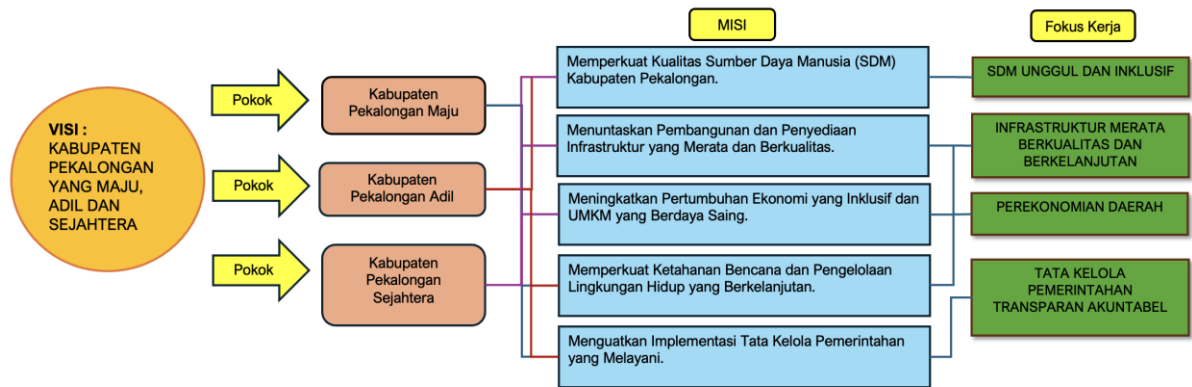


b) Penguatan tata kelola pemerintahan

Selanjutnya, penguatan tata kelola pemerintahan juga diwujudkan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta perencanaan pembangunan daerah. Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur pemerintahan akan ditingkatkan, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani, sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat akan terus diperkuat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan membangun mekanisme kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk menciptakan solusi inovatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah. Selain itu, penguatan peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat juga menjadi perhatian penting. Kapasitas aparatur desa akan ditingkatkan agar lebih profesional dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta memaksimalkan potensi lokal untuk mendukung pembangunan di tingkat desa.

Penerjemahan visi dan misi daerah menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 -2029 dirumuskan melalui logframe pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut



Gambar 3.11. Keterkaitan Visi dan Pokok Visi, Misi, dan Fokus Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029

c. Keterkaitan Visi Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Keterkaitan Visi Misi RPJMD 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD 2025-2045

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi **tahap pertama** penjabaran RPJPD 2025-2045 untuk mewujudkan **Perkuatan Fondasi Transformasi**. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045 menyebutkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pekalongan adalah **Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, Bermartabat dan Berkelanjutan**. Visi tersebut menjadi salah satu pedoman dalam merumuskan visi jangka menengah Kabupaten Pekalongan.

Keselarasannya antara visi jangka panjang dengan visi jangka menengah dapat dilihat dalam gambar berikut.



Tabel 3.1.
Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang

RPJMD 2025-2029		RPJPD 2025-2045	
VISI		VISI	
Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil dan Sejahtera		Kabupaten Pekalongan Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berkelanjutan	
No	Misi	No	Misi
1	Memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan.	1	Transformasi sosial menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat
		5	Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi secara berkelanjutan
2	Menuntaskan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas.	6	Mewujudkan pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah
		7	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing.	2	Transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan
		4	Memastikan ketenteraman ketertiban dan kondusifitas wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi substansial serta menjaga stabilitas ekonomi makro
4	Memperkuat ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	7	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
		8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah
5	Menguatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani.	3	Transformasi tata kelola guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan
		8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

2). Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan dengan Visi Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan hendaknya dapat mendukung upaya pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu perlu dipastikan adanya keselaran antara misi pembangunan Kabupaten Pekalongan dengan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan misi pembangunan nasional dalam RPJMN.



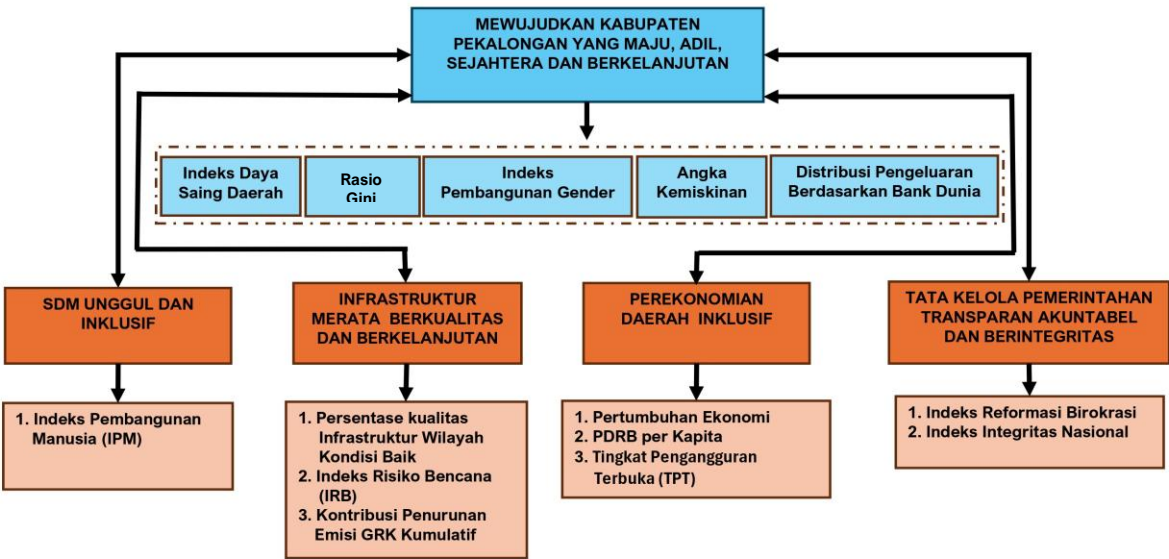
Tabel 3.2.
Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan dengan
RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN

RPJMN 2025-2029	RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029
Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Misi 1: Memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan.	Misi 1 : Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global.
Asta Cita 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Misi 2: Menuntaskan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas.	Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan.
Asta Cita 4: Memperkuat Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan Penyandang Disabilitas	Misi 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan UMKM yang berdaya saing.	Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas.
Asta Cita 5: Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam, untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Misi 4: Memperkuat ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Misi 4 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif
Asta Cita 6: Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Misi 5: Menguatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani.	Misi 5 : Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan.
Asta Cita 7: Memperkuat reformasi Politik Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		Misi 6 : Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.
Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur		

Sumber : Bapperida Kabupaten Pekalongan; 2025

d. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

Penerjemahan visi dan misi daerah menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 - 2029 dirumuskan melalui logframe pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut



Gambar 3.12. Logframe Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan logframe pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 - 2029, maka ditetapkan **1 tujuan** dan **4 (empat) sasaran** yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan

Sasaran 1 : Meningkatnya SDM Kabupaten Pekalongan yang Unggul dan Inklusif, diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran 2 : Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap resiko bencana, diukur dengan indikator sebagai berikut :

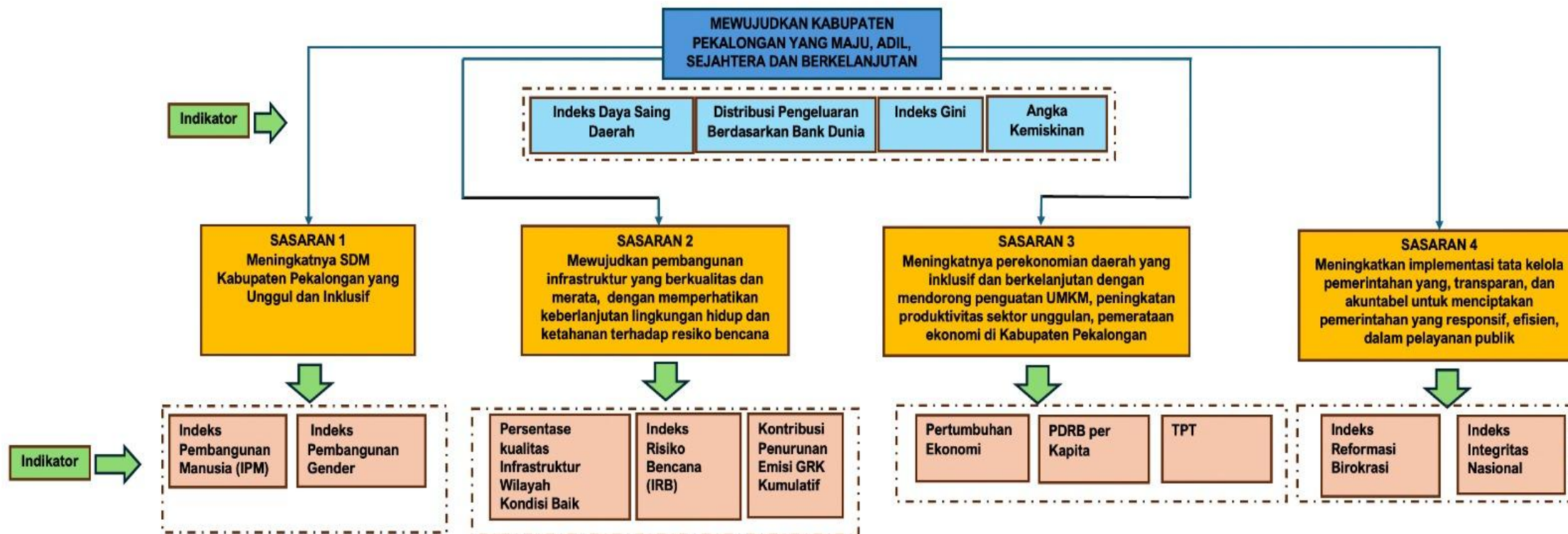
- 1. Persentase kualitas Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik
- 2. Indeks Risiko Bencana (IRB)
- 3. Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Sasaran 3 : Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan, diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1. Pertumbuhan Ekonomi
- 2. PDRB per Kapita
- 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sasaran 4 : Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik, diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1. Indeks Reformasi Birokrasi
- 2. Indeks Integritas Nasional



Gambar 3.13. Cascading Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 - 2029



Tabel 3.3.
Sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025-2029

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD		Satuan	OPD Penanggung Jawab Urusan
Meningkatnya SDM Kabupaten Pekalongan yang Unggul dan Inklusif		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	Pemerintah Daerah
Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap resiko bencana		Persentase kualitas infrastruktur wilayah kondisi baik	%	Pemerintah Daerah
	IUP.48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	Pemerintah Daerah
	IUP.49	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCOzeq	Pemerintah Daerah
Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan		Pertumbuhan Ekonomi	%	Pemerintah Daerah
	IUP.55	PDRB per kapita	(Rp. Juta)	Pemerintah Daerah
	IUP.36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Pemerintah Daerah
Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan public	IUP.50	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Pemerintah Daerah
	IUP.54	Indeks Integritas Nasional	Indeks	Pemerintah Daerah

Sumber : Bapperida Kab. Pekalongan; data diolah; 2025



Tabel 3.4.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

VISI : KABUPATEN PEKALONGAN YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan				Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,61	3,66	3,71	3,76	3,81	3,86	3,91	3,91	Pemerintah Daerah
			IUP.1	Tingkat Kemiskinan	%	8,95	9,15-8,00	8,09-7,98	8,00-7,60	7,84-6,80	7,40-6,40	6,97-6,00	6,97-6,00	Pemerintah Daerah
			IUP.56	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Bank Dunia	%	20,43	31,68	33,19	34,71	36,22	37,74	39,25	39,25	Pemerintah Daerah
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,96	92,98	93,00	93,10	93,18	93,20	93,22	93,22	Pemerintah Daerah
				Rasio Gini	Indeks	0,327	0,306	0,285	0,264	0,242	0,221	0,200	0,200	Pemerintah Daerah
	Meningkatnya SDM Kabupaten Pekalongan yang Unggul dan Inklusif			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,95	72,70	73,00	73,20	73,40	73,60	73,80	73,80	Pemerintah Daerah
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata	IUP.4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,25	74,50	74,69	74,91	75,12	75,37	75,72	75,72	Kesehatan
		Meningkatkan aksesibilitas dan distribusi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	IUP.2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	5,54	5,30	5,20	4,81	4,32	3,78	3,07	3,07	Pangan
		Meningkatkan	IUP.12	Harapan Lama Sekolah	Angka	12,46	13,20	13,35	13,50	13,64	13,79	13,94	13,94	Pendidikan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		akses dan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing	IUP.11	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Angka	7,48	7,50	7,52	7,55	7,84	8,12	8,41	8,41	Pendidikan
		Meningkatkan pembangunan literasi masyarakat		IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat)	Nilai	66,65	66,70	66,75	66,80	66,90	70,00	70,10	70,10	Perpustakaan
		Meningkatkan daya saing kepemudaan dan olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	65,00	65,10	65,20	65,30	65,40	65,50	65,60	65,60	Kepemudaan Dan Olahraga
				Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	%	n/a	n/a	0,362	0,379	0,383	0,385	0,393	0,393	Kepemudaan Dan Olahraga
		Meningkatkan pelestarian seni dan budaya daerah	IUP.16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	1,80	18,27	19,03	19,80	20,56	21,32	22,08	22,08	Kebudayaan
		Meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	IUP.22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,215	0,18-0,17	0,17-0,16	0,16-0,15	0,15-0,15	0,15-0,14	0,14-0,13	0,14-0,13	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
				Indeks Perlindungan Anak	Indeks	64,31 (2023)	64,80	65,00	65,00	65,25	65,25	65,50	65,50	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;
		Meningkatkan kualitas pengendalian kependudukan dan keluarga berencana didukung dengan data administrasi yang valid untuk mendukung kinerja sasaran pembangunan		Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,25	2,17	2,16	2,16	2,15	2,15	2,15	2,15	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			IUP.21	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	65,05	63,93-66,01	66,57 - 66,62	67,33 - 67,41	68,1 - 68,19	68,86 - 68,98	69,62 - 69,77	69,62 - 69,77	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	98,99	99,113	99,117	99,122	99,127	99,132	99,137	99,137	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan Ketahanan terhadap resiko bencana			Persentase kualitas infrastruktur wilayah kondisi baik	%	n/a	70,20	72,60	72,90	73,40	73,90	75,00	75,00	Pemerintah Daerah
			IUP.48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	131,25	130,00-125,00	125,61 - 124,16	123,95 - 122,07	122,3 - 119,99	120,64 - 117,91	118,98 - 115,83	118,98 - 115,83	Pemerintah Daerah
			IUP.49	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCOzeq	21.317,24	854.836,43	1.608.653,70	3.058.615,03	4.508.576,36	5.958.537,69	7.408.499,02	7.408.499,02	Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Keberkelanjuta n penanganan infrastruktur wilayah		Persentase sarana dan prasarana wilayah kondisi baik	%	83,08	83,18	83,36	83,53	83,77	83,95	84,07	84,07	Pekerjaan Umum
		Tersediannya kebutuhan tanah untuk menunjang pembangunan daerah		Persentase kebutuhan tanah yang tersedia untuk penunjang pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanahan
		Meningkatkan kualitas penataan perumahan dan kawasan permukiman	IUP.40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	0,00	63,45	63,86	64,29	64,74	65,21	65,23	65,23	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur transportasi		Persentase kualitas layanan perhubungan	%	72,96	73,62	74,24	74,80	75,34	75,89	76,46	76,46	Perhubungan
		Meningkatkan Ketangguhan menghadapi risiko bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	0,73	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Meningkatkan pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	IUP.46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	60,90	70,96	71,01	71,05	71,10	71,14	71,19	71,19	Lingkungan Hidup
Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan				Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,10-5,30	5,60-5,85	6,10-6,97	6,60-7,60	7,00-8,00	7,40-8,40	7,40-8,40	Pemerintah Daerah
			IUP.55	PDRB per kapita	(Rp. Juta)	29,66	29,97-30,18	35,59-37,03	41,20-43,88	46,82-50,73	52,44-57,57	58,06-64,42	58,06-64,42	Pemerintah Daerah
			IUP.36	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,30	3,10-2,78	3,05-2,75	2,98-2,66	2,92-2,61	2,87-2,55	2,81-2,50	2,81-2,50	Pemerintah Daerah
	Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan		IUP.23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	29,31	30,57	30,65	30,75	30,80	30,83	30,84	30,84	Perindustrian
			IUP.24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	6,84	6,03	6,21	6,39	6,57	6,75	6,93	6,93	Pariwisata
			IUP.27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,94	1,18	1,44	1,71	1,97	2,23	2,49	2,49	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	14,98	15,15	15,26	15,30	15,33	15,37	15,40	15,40	Perdagangan
				Rasio PDRB Sub Sektor Pertanian	%	14,80	14,90	15,10	15,22	15,28	15,30	15,37	15,37	Pertanian
				Rasio PDRB Sub Sektor Perikanan	Ton	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,93	Kelautan Dan Perikanan
			IUP.26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	n/a	4,66	5,03	5,40	5,77	6,14	6,51	6,51	Koperasi UKM
	Meningkatkan nilai investasi untuk mendukung pertumbuhan													



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		ekonomi daerah.												
			IUP.30	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	25,43	25,17	25,58	25,99	26,4	26,81	27,23	27,23	Penanaman Modal
		Meningkatkan peran desa sebagai pendorong perekonomian daerah		Indeks Desa	Indeks	0,7048	0,7242	0,7300	0,7350	0,7400	0,7450	0,7500	0,7500	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban wilayah	IUP.20	Jumlah kejadian Konflik SARA	kali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kesatuan Bangsa dan Poliiik
				Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas	Indeks	n/a	61,01	61,01	62,20	65,00	69,14	71,14	71,14	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
		Meningkatkan peran lembaga keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan ekonomi lokal dan pengembangan sektor produktif.		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,84	3,92	3,95	3,99	4,03	4,07	4,09	4,09	Sekretariat Daerah
		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat.		Rasio Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB dibagi Jumlah Tenaga Kerja)	Rasio	n/a	52,61	52,65	52,70	52,75	52,80	52,85	52,85	Tenaga Kerja
		Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat		Indeks Kesejahteraan sosial (Ikesos)	Indeks	56,62	56,70	56,80	56,90	57,00	57,10	57,20	57,20	Sosial



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan		Persentase pemenuhan kuota transmigrasi yang diberangkatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Transmigrasi
	Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik		IUP.50	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,03	77,10	77,20	77,30	77,40	77,50	77,60	77,60	Pemerintah Daerah
			IUP.54	Indeks Integritas Nasional	Indeks	73,97	79,71	80,52	81,34	82,15	82,97	83,78	83,78	Pemerintah Daerah
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas	IUP.53	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	Indeks	4,29	4,05	4,10	4,15	4,19	4,24	4,29	4,29	Setda
				Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	B (65,69)	B (66,20)	B (68,10)	BB (70,10)	BB (72,25)	BB (74,50)	BB (75,09)	BB (75,09)	Setda
			IUP.34	Nilai Kapabilitas Inovasi	Nilai	2,43	2,68	2,77	2,86	2,95	3,05	3,14	3,14	Penelitian dan Pengembangan
				Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00	Setwan
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kajen	Indeks	81,39	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	83,50	Kecamatan Kajen
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sragi	Indeks	85,00	85,00	85,05	85,10	85,15	85,20	85,25	85,25	Kecamatan Sragi
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wiradesa	Indeks	84,86	84,87	84,87	84,88	84,89	84,90	84,90	84,90	Kecamatan Wiradesa



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kedungwuni	Indeks	88,10	88,25	88,50	89,00	89,50	90,00	90,50	90,50	Kecamatan Kedungwuni
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buaran	Indeks	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	83,50	Kecamatan Buaran
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tirta	Indeks	81,00	81,00	81,05	81,10	81,15	81,20	81,25	81,25	Kecamatan Tirta
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bojong	Indeks	85,55	85,75	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,00	Kecamatan Bojong
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wonopringgo	Indeks	81,60	81,80	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,00	Kecamatan Wonopringgo
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar	Indeks	77,03	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,00	Kecamatan Karanganyar
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Doro	Indeks	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,00	Kecamatan Doro
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Talun	Indeks	80,50	81,00	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50	82,50	Kecamatan Talun
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lebakbarang	Indeks	83,30	83,30	83,50	83,75	84,00	84,25	84,25	84,25	Kecamatan Lebakbarang
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kandangserang	Indeks	80,43	80,45	80,50	80,55	80,60	80,65	80,70	80,70	Kecamatan Kandangserang
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Paninggaran	Indeks	80,85	80,90	80,95	81,00	81,05	81,10	81,15	81,15	Kecamatan Paninggaran
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kesesi	Indeks	84,97	85,00	85,05	85,10	85,15	85,20	85,25	85,25	Kecamatan Kesesi
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petungkriyono	Indeks	79,50	79,80	80,15	80,40	80,50	80,75	81,30	81,30	Kecamatan Petungkriyono
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wonokerto	Indeks	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,00	Kecamatan Wonokerto



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Siwalan	Indeks	80,50	81,00	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50	82,50	Kecamatan Siwalan
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangdadap	Indeks	80,93	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,00	Kecamatan Karangdadap
		Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemnyelenggaan tata kelola pemerintahan yang bermartabat		Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	n/a	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,60	Komunikasi Dan Informatika
				Indek KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	n/a	584	590	600	620	630	645	645	Persandian
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang didukung dengan ketersediaan data yang valid.		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	74,60	74,60	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	84,00	Perencanaan
				Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,60	2,30	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	2,90	Statistik
				Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori Baik	%	40,00	56,82	63,64	72,73	81,82	86,00	90,41	90,41	Kearsipan
		Meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja Aparatur Sipil Negara secara berkelanjutan guna mendukung terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada		Nilai NSPK Manajemen ASN	Nilai	84,90	85,00	85,10	85,20	85,30	85,40	85,40	85,40	Kepegawaian



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Rumusan Tujuan Renstra PD	Indikator Sasaran RPJMD/ Indikator Tujuan Renstra PD		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab Urusan
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		pelayanan publik.												
		Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	IUP.51	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,42	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	Sekretariat Daerah
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (IKK)	level	3	Level 3 (3,01)	Level 3 (3,01)	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,03)	Level 3 (3,03)	Level 3 (3,03)	Pengawasan
		Meningkatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsive, efisien dalam pelayanan publik		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	73,27	74,00	74,50	75,00	75,50	76,00	76,00	76,00	Keuangan Daerah

Sumber : Bapperida Kab. Pekalongan; data diolah; 2025



B. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan serangkaian rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintahan daerah, strategi merujuk pada perencanaan yang dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik yang optimal, serta pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Strategi ini mencakup penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional yang disesuaikan dengan potensi, tantangan, serta prioritas pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, strategi pemerintahan daerah diarahkan pada pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedangkan dalam Inmendagri nomor 2 tahun 2025, strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya, pentahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas.

Strategi yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut.

- 1. Strategi
 - a. Strategi untuk mewujudkan sasaran 1; Meningkatnya SDM Kabupaten Pekalongan yang Unggul dan Inklusif

Dalam rangka mewujudkan sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memfokuskan pada pembangunan untuk Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata; Meningkatkan aksesibilitas dan distribusi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA); Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing; Meningkatkan daya saing kepemudaan dan olahraga; Meningkatkan pelestarian seni dan budaya daerah; Meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan Meningkatkan kualitas pengendalian kependudukan didukung dengan data administrasi yang valid untuk mendukung kinerja sasaran pembangunan. Strategi pembangunan yang ditetapkan yaitu:

Tabel 3.5.
Strategi untuk Mewujudkan Sasaran 1:
Meningkatnya SDM Kabupaten Pekalongan yang Unggul dan Inklusif

Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata	• Pemerataan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, termasuk pelatihan kompetensi. • Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan modern, termasuk	• Pemerataan akses layanan dasar melalui penambahan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta revitalisasi Posyandu dan Puskesmas. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) secara masif.	• Wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan, wilayah dengan angka stunting dan penyakit tinggi (TBC, DBD, hipertensi, diabetes), serta desa-desa dengan perilaku hidup sehat



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	peralatan medis dan sistem informasi kesehatan. • Pemberdayaan kader kesehatan, pemanfaatan data kependudukan untuk intervensi yang tepat sasaran. • Penguatan kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, LSM, dan tokoh masyarakat melalui pendekatan kemitraan.	• Digitalisasi layanan kesehatan (telemedicine, e-rekam medis), penguatan sistem surveilans penyakit, dan penanganan terpadu PTM serta penyakit menular. • Konsolidasi kualitas layanan kesehatan, penguatan sistem rujukan, dan tata kelola kesehatan daerah yang berbasis kinerja dan kolaborasi multisektor.	yang rendah. • Kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, lansia, disabilitas, dan keluarga miskin.
Meningkatkan aksesibilitas dan distribusi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	• Pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidak potensial, dan potensi lokal untuk diversifikasi pangan lokal • Penguatan SDM penyuluh, petani, dan UMKM pangan • Pemanfaatan teknologi pascapanen dan logistik rantai dingin (cold chain)	• Edukasi B2SA dan penyusunan peta distribusi pangan lokal • Penguatan cadangan pangan desa dan konektivitas distribusi • Digitalisasi sistem distribusi dan informasi pangan	• Daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi • Wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap bahan pangan impor/nonlokal • Kelompok rentan seperti rumah tangga miskin, anak balita, lansia, dan ibu hamil.
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing	• Pemenuhan dan peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi • Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan merata • Pemanfaatan teknologi digital dan platform pembelajaran daring	• Pemenuhan akses pendidikan dasar dan inklusi pendidikan bagi anak-anak usia sekolah • Peningkatan kualitas pembelajaran dan integrasi teknologi pendidikan • Penguatan daya saing lulusan melalui pendidikan vokasi dan karakter	• Daerah dengan angka partisipasi sekolah rendah • Wilayah dengan kesenjangan kualitas antarsekolah • Kelompok rentan: anak miskin, anak penyandang disabilitas, anak putus sekolah, dan anak usia PAUD
	• Penguatan kapasitas pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan melalui	• Revitalisasi dan aktivasi perpustakaan sekolah dan desa • Digitalisasi dan	• Wilayah dengan tingkat literasi rendah dan akses bahan bacaan



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	pelatihan • Pemenuhan koleksi buku cetak dan digital sesuai kebutuhan lokal dan kurikulum • Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan literasi berbasis digital	integrasi layanan literasi dengan sistem pendidikan formal dan nonformal • Perluasan peran perpustakaan sebagai pusat komunitas belajar	terbatas • Sekolah dan desa yang belum memiliki perpustakaan atau memiliki perpustakaan yang belum aktif • Kelompok rentan: anak usia sekolah, perempuan, lansia
Meningkatkan daya saing kepemudaan dan olahraga	• Penguatan kapasitas kepemudaan melalui pelatihan soft skills, kepemimpinan, dan kewirausahaan untuk mendukung daya saing • Peningkatan kualitas pelatih dan pengelola olahraga • Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai	• Pengembangan dan revitalisasi sarana olahraga dan kegiatan kepemudaan di seluruh kecamatan • Penguatan kapasitas atlet dan pemuda dalam kompetisi antar daerah, nasional, dan internasional • Penciptaan ekosistem olahraga yang berkelanjutan dan pemuda berdaya saing global	• Daerah dengan tingkat partisipasi olahraga rendah, kurangnya fasilitas, dan minimnya kegiatan kepemudaan • Kelompok rentan: pemuda kurang mampu, pemuda di daerah terpencil, dan atlet berbakat yang belum terakomodasi
Meningkatkan pelestarian seni dan budaya daerah	• Penguatan kapasitas pelaku seni dan budaya melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan seni tradisional dan modern • Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pengembangan seni dan budaya daerah • Penyusunan database seni dan budaya daerah	• Pemetaan potensi seni dan budaya daerah, serta pengembangan pusat budaya di setiap kecamatan • Penguatan promosi budaya daerah melalui festival dan acara seni daerah • Integrasi seni dan budaya dalam sektor pariwisata dan pendidikan	• Daerah dengan kekayaan seni dan budaya tradisional namun minim apresiasi atau akses ke pasar seni • Kelompok rentan: generasi muda yang kurang mengenal seni dan budaya lokal, pelaku seni tradisional yang belum terdokumentasi
Meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pelatihan bagi	• Pemantapan kebijakan dan penguatan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di level desa dan	• Wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak tinggi • Daerah dengan kesenjangan sosial-



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	kader posyandu, pengelola program perlindungan anak, dan organisasi pemberdayaan perempuan Penguatan akses kepada layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang inklusif	kecamatan - Penguatan lembaga pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat kabupaten dan kecamatan - Penyempurnaan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, perempuan, dan anak	ekonomi yang tinggi dan keluarga yang rentan Kelompok rentan: perempuan, anak, ibu hamil, dan keluarga miskin
Meningkatkan kualitas pengendalian kependudukan didukung dengan data administrasi yang valid untuk mendukung kinerja sasaran pembangunan	- Penguatan kapasitas tenaga penyuluh keluarga berencana dan kader kesehatan dalam memberikan edukasi kepada keluarga terkait pentingnya pengendalian kependudukan melalui program keluarga berencana - Penyediaan sarana pelayanan KB yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	- Penguatan kebijakan pengendalian kependudukan berbasis keluarga berencana di tingkat desa dan kecamatan - Integrasi program KB dengan layanan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB - Pemantapan sistem monitoring dan evaluasi program KB secara nasional dan daerah	- Daerah dengan angka kelahiran tinggi, tingkat kemiskinan tinggi, dan kesenjangan layanan KB - Kelompok rentan: keluarga dengan banyak anak, keluarga miskin, ibu hamil, dan remaja yang membutuhkan akses informasi keluarga berencana
	- Penguatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan data kependudukan seperti petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta pelatihan penggunaan sistem informasi kependudukan berbasis teknologi terbaru - Pengembangan sistem aplikasi untuk pengelolaan data kependudukan yang terintegrasi dan	- Pengembangan dan implementasi sistem data kependudukan yang lebih terintegrasi di tingkat kabupaten dan kecamatan - Pembaruan dan validasi data kependudukan secara berkala menggunakan teknologi untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi kebijakan - Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data kependudukan	- Daerah dengan permasalahan terkait data kependudukan yang tidak valid atau tidak terintegrasi, serta daerah yang kekurangan infrastruktur teknologi dalam pengelolaan data kependudukan - Kelompok rentan yang membutuhkan data valid untuk perencanaan program pembangunan yang



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan	yang tepat untuk perencanaan pembangunan	tepat sasaran

b. Strategi Pembangunan Sasaran 2 Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap resiko bencana

Untuk mewujudkan sasaran kedua ini, pembangunan selama lima tahun ke depan difokuskan pada Meningkatkan keberkelanjutan penanganan infrastruktur wilayah; menyediakan kebutuhan tanah untuk menunjang pembangunan daerah dan mendukung reforma agrarian; Meningkatkan kualitas penataan perumahan dan kawasan permukiman; Meningkatkan konektivitas layanan transportasi; Meningkatkan Ketangguhan menghadapi risiko bencana; serta Meningkatkan pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Rincian strategi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6.
Strategi Pembangunan Sasaran 2 :
Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap resiko bencana

Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Keberkelanjutan penanganan infrastruktur wilayah	• Pemanfaatan anggaran secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, air bersih) • Peningkatan kompetensi teknis SDM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang • Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur	• Pemetaan kebutuhan dan kondisi infrastruktur dasar di seluruh wilayah • Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur berbasis wilayah dan kebutuhan prioritas • Penguatan sistem pemeliharaan infrastruktur dan keberlanjutan tata ruang wilayah berbasis daya dukung lingkungan	• Daerah dengan aksesibilitas rendah terhadap jalan, air bersih, sanitasi, dan irigasi • Kawasan rawan banjir, kekeringan, serta daerah pertumbuhan permukiman yang tidak terencana • Kelompok rentan terdampak: masyarakat miskin, petani, dan masyarakat di daerah tertinggal
Menyediakan kebutuhan tanah untuk menunjang pembangunan daerah	• Pemanfaatan data dan sistem informasi pertanahan serta	• Identifikasi dan inventarisasi tanah yang dapat	• Wilayah perkotaan dan pinggiran kota, kawasan



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
dan mendukung reforma agraria	pemetaan partisipatif untuk identifikasi tanah negara, tanah ulayat, dan tanah terlantar • Penguatan kelembagaan pertanahan daerah dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN • Koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi RTRW dan kebutuhan ruang pembangunan	dimanfaatkan untuk pembangunan dan reforma agraria • Fasilitasi penyediaan tanah melalui pelepasan kawasan, redistribusi, dan legalisasi aset • Penguatan kelembagaan dan sistem pengelolaan tanah berkelanjutan	pembangunan infrastruktur strategis, serta desa-desa prioritas reforma agraria
Meningkatkan kualitas penataan perumahan dan kawasan permukiman	• Penguatan kapasitas SDM perencana dan pelaksana penataan permukiman • Pemanfaatan teknologi informasi (GIS, dashboard kawasan) untuk pemetaan kawasan kumuh dan pengembangan perumahan • Kolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan kawasan perumahan dan permukiman	• Pemetaan kawasan permukiman yang tidak layak huni dan perumahan dengan akses layanan dasar terbatas • Rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan pembangunan perumahan layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan Gen Z • Penguatan sistem pemeliharaan dan pengelolaan permukiman berkelanjutan	• Kawasan padat penduduk, bantaran sungai, daerah rawan bencana, serta kawasan permukiman informal • Kelompok rentan: MBR, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan juga Gen Z
Meningkatkan konektivitas layanan transportasi	• Pemanfaatan anggaran pusat dan daerah secara sinergis untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi • Peningkatan kapasitas SDM transportasi, perencanaan rute, dan pengawasan	• Identifikasi kebutuhan konektivitas antarwilayah dan keterjangkauan moda transportasi • Pengembangan sarana dan prasarana transportasi publik dan perintis, serta perbaikan akses ke wilayah terisolasi • Integrasi moda	• Daerah perdesaan, kawasan pinggiran kota, daerah terisolasi, serta kawasan dengan produktivitas ekonomi namun keterbatasan akses transportasi • Kelompok rentan: pelajar, masyarakat miskin, penyandang



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	layanan Penggunaan teknologi digital untuk manajemen sistem transportasi dan informasi publik	transportasi dan efisiensi jaringan logistik	disabilitas
Meningkatkan Ketangguhan menghadapi risiko bencana	- Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana, termasuk masyarakat siaga bencana - Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem peringatan dini berbasis komunitas - Sinergi pendanaan dari APBD, APBN, CSR, dan sumber lain untuk mitigasi dan respons benca	- Pemetaan wilayah rawan bencana dan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana - Peningkatan infrastruktur mitigasi (tanggul, drainase, jalur evakuasi), serta sosialisasi dan simulasi berkala - Evaluasi dan integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan daera	- Kawasan rawan bencana hidrometeorologi dan geologi - Wilayah padat penduduk, kawasan pemukiman informal, serta pusat aktivitas ekonomi dan layanan publik
Meningkatkan pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	- Pemanfaatan teknologi pemantauan dan pengendalian lingkungan (e-monitoring kualitas air dan udara, SIG untuk tutupan lahan) - Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola lingkungan - Kolaborasi multipihak (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) dalam perlindungan dan rehabilitasi lingkungan	- Pemetaan kondisi lingkungan kritis (lahan kritis, DAS, kawasan tercemar), dan penguatan regulasi pengelolaan lingkungan - Implementasi program konservasi, rehabilitasi, dan pengendalian pencemaran - Evaluasi dan penguatan sistem pengawasan dan insentif lingkungan	- Daerah dengan tingkat pencemaran air, udara, dan tanah tinggi - Kawasan dengan laju deforestasi, alih fungsi lahan, dan degradasi lingkungan yang signifikan - Area dengan kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana ekologis

c. **Strategi Pembangunan Sasaran 3 Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan**

Terdapat beberapa fokus yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mewujudkan sasaran ini. Fokus-fokus tersebut adalah Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing,



inklusif, dan berkelanjutan; Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah; Meningkatkan peran desa sebagai pendorong perekonomian daerah; Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah; Meningkatkan peran lembaga keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan ekonomi lokal dan pengembangan sektor produktif; Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat; Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); serta Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan.

Rincian strategi yang dipilih untuk mewujudkan Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan, yaitu:

Tabel 3.7.
Strategi Pembangunan Sasaran 3 :
Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan

Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	• Pemanfaatan potensi lokal seperti industri batik, konveksi, olahan makanan dan minuman • Penguatan SDM industri melalui pelatihan vokasional dan digitalisasi industri • Sinergi antara pelaku industri, perguruan tinggi, dan lembaga litbang untuk inovasi produk dan efisiensi produksi	• Pemetaan potensi dan hambatan industri pengolahan serta penyusunan roadmap pengembangan industri daerah • Modernisasi alat produksi, fasilitasi sertifikasi produk, dan ekspansi pasar • Penguatan branding industri lokal dan pengembangan klaster industri	• Sentra industri batik dan kerajinan di Kecamatan Buaran, Kedungwuni, Wiradesa • Sentra makanan dan minuman olahan di Kecamatan Sragi dan sekitarnya • Wilayah dengan potensi industri berbasis pertanian dan perikanan
	• Pemanfaatan potensi wisata alam, budaya, dan batik khas Pekalongan sebagai daya tarik utama • Penguatan SDM pelaku pariwisata, komunitas sadar wisata, dan UMKM pendukung sektor wisata • Pengembangan	• Pemetaan potensi wisata unggulan dan perencanaan kawasan wisata tematik • Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pendukung wisata (akses, amenitas, atraksi) • Promosi pariwisata terpadu dan penguatan jejaring pemasaran	• Kawasan wisata alam di Petungkriyono dan sekitarnya • Kawasan wisata pesisir • Sentra wisata budaya dan batik di Pekalongan



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	ekonomi kreatif yang mendukung daya tarik dan aktivitas wisata berbasis masyarakat lokal	serta kerjasama antar daerah dan nasional	
	• Pemanfaatan potensi lokal dalam pengembangan usaha kecil berbasis kerajinan, batik, dan produk olahan pangan • Penguatan kapasitas koperasi dan IKM melalui pelatihan manajerial, digitalisasi usaha, dan peningkatan akses permodalan • Penyediaan akses pasar domestik dan internasional untuk produk lokal	• Pemetaan dan identifikasi potensi produk unggulan daerah untuk IKM dan koperasi • Fasilitasi pembentukan koperasi dan IKM berbasis klaster dan peningkatan kapasitas manajerial • Penguatan ekosistem bisnis IKM dengan pendampingan teknis dan akses pasar yang lebih luas	• Kawasan industri kecil berbasis produk unggulan daerah seperti batik, kerajinan, dan produk olahan pangan • Kecamatan dengan aktivitas ekonomi lokal yang berkembang, seperti Kecamatan Buaran, Kedungwuni, Wiradesa, dan sekitarnya
	• Memanfaatkan potensi lokal seperti batik, pertanian, perikanan, dan kerajinan sebagai basis usaha baru • Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan digital marketing • Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan perluasan akses pasar • Penguatan akses permodalan bagi calon wirausahawan	• Identifikasi potensi kewirausahaan daerah dan pemetaan kelompok sasaran (pemuda, perempuan, masyarakat desa) • Pengembangan inkubator bisnis dan pusat pelatihan wirausaha • Penguatan jejaring wirausaha melalui koperasi, asosiasi usaha, dan digitalisasi ekosistem UMKM	• Kawasan pedesaan dan pinggiran kota dengan potensi kerajinan, pertanian, dan perikanan • Pusat-pusat pendidikan dan pelatihan, serta kawasan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM • Sentra batik dan kawasan perdagangan yang dapat mendukung pertumbuhan usaha kecil
	• Pemanfaatan potensi produk lokal seperti batik, kerajinan, dan olahan pangan sebagai komoditas	• Identifikasi dan pengembangan pasar baru (lokal, nasional, internasional) untuk produk unggulan	• Kawasan pasar tradisional, pasar modern, dan sektor perdagangan produk unggulan



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	unggulan untuk pasar domestik dan internasional • Pengembangan sistem perdagangan digital dan pemasaran produk UMKM berbasis teknologi • Penyediaan akses dan fasilitasi distribusi barang yang efisien	daerah • Penguatan sistem distribusi barang, peningkatan kualitas pelayanan pasar dan fasilitas pendukung • Kolaborasi antar daerah untuk peningkatan perdagangan antar wilayah	daerah (batik, kerajinan, makanan olahan) • Wilayah yang memiliki akses logistik dan transportasi yang baik, seperti wilayah sekitar terminal dan pelabuhan
	• Pemanfaatan potensi pertanian lokal seperti padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan untuk mendukung ketahanan pangan dan ekspor komoditas pertanian • Pengembangan teknologi pertanian berbasis ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya alam • Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan akses pada teknologi pertanian modern	• Pemetaan dan identifikasi komoditas unggulan daerah serta evaluasi sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian • Penyempurnaan sistem irigasi dan pengelolaan lahan pertanian untuk meningkatkan hasil panen • Kolaborasi antar sektor untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan pengolahan hasil pertanian	• Kawasan pertanian pangan di Kecamatan Kedungwuni, Bojong, Kajen, dan Wilayah Pekalongan bagian Selatan yang merupakan sentra pertanian padi, jagung, dan hortikultura • Kawasan yang memiliki potensi pengembangan pertanian berbasis lahan kering dan hortikultura
	• Pemanfaatan potensi perikanan laut dan budidaya perikanan air tawar sebagai komoditas unggulan daerah • Peningkatan kapasitas nelayan dan petani ikan melalui pelatihan teknologi perikanan yang ramah lingkungan dan efisien • Peningkatan kualitas hasil perikanan dengan menerapkan sistem budidaya yang	• Pemetaan potensi perikanan lokal dan penyediaan sarana pendukung seperti sarana pelatihan, serta penguatan kelompok nelayan dan petani ikan • Penyempurnaan infrastruktur perikanan (perahu, alat tangkap, sarana pengolahan hasil perikanan) • Penguatan jaringan pemasaran produk perikanan lokal secara regional dan internasional	• Kawasan pesisir yang memiliki potensi perikanan laut dan kawasan budidaya perikanan air tawar di kecamatan yang memiliki lahan luas untuk budidaya ikan • Kawasan dengan potensi pengolahan produk perikanan berbasis industri kecil dan menengah



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	berkelanjutan		
Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	• Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di BUMD melalui pelatihan dan pengembangan manajerial serta teknis • Penguatan sistem pengelolaan BUMD yang lebih transparan dan akuntabel, dengan penerapan teknologi informasi untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja BUMD secara berkala • Penyediaan sumber daya modal untuk mendukung ekspansi dan inovasi usaha	• Penilaian kinerja BUMD yang ada dan identifikasi bidang usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut • Penguatan infrastruktur dan modal untuk BUMD yang berpotensi berkembang, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih efisien • Kolaborasi antar BUMD untuk mengoptimalkan layanan publik dan diversifikasi usaha	• BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan • Kawasan yang mendukung ekspansi dan diversifikasi usaha BUMD, seperti pusat-pusat bisnis dan kawasan industri kecil
	• Pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah seperti industri batik, pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif • Penyederhanaan prosedur perizinan dan penguatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) • Penguatan ketersediaan data potensi investasi dan promosi digital	• Peningkatan kualitas layanan investasi dan penyusunan profil potensi investasi daerah berbasis sektor unggulan • Promosi investasi secara aktif melalui event nasional/internasional dan media digital • Penguatan kerja sama dengan investor dan dunia usaha	• Kawasan potensial industri (misalnya Sragi dan sekitarnya), sentra produksi batik, kawasan pelabuhan/perikanan, dan area dengan infrastruktur penunjang • Wilayah potensial untuk pengembangan kawasan ekonomi baru
Meningkatkan peran desa sebagai pendorong perekonomian daerah	• Pemanfaatan potensi ekonomi lokal desa (pertanian, perikanan, kerajinan, wisata desa, dan produk unggulan lainnya) • Penguatan kapasitas kelembagaan desa, BUMDes, dan pelaku	• Pemetaan potensi ekonomi desa dan penguatan kelembagaan ekonomi desa (BUMDes, kelompok usaha desa) • Pengembangan unit usaha BUMDes dan sinergi dengan UMKM	• Desa-desa yang memiliki potensi sektor unggulan seperti batik, agroindustri, wisata alam, dan perikanan tangkap • Desa-desa yang telah memiliki atau



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	usaha mikro desa • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan ekonomi desa berbasis potensi dan inovasi lokal	desa serta jejaring kemitraan pasar • Integrasi peran desa dalam rantai ekonomi daerah dan perluasan kerja sama antardesa dan swasta	berpotensi membentuk BUMDes dengan unit usaha produktif
Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban wilayah	• Memaksimalkan peran forum-forum kewaspadaan dini, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga adat dalam pencegahan konflik • Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat dalam deteksi dan respon dini terhadap potensi konflik • Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan dan pelaporan potensi konflik	• Pemetaan wilayah rawan konflik sosial dan peningkatan literasi sosial masyarakat • Pengembangan sistem deteksi dini dan pembentukan jejaring mediasi berbasis masyarakat • Integrasi sistem kewaspadaan dini dengan kebijakan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap potensi konflik •	• Wilayah dengan potensi konflik karena isu sosial, ekonomi, keagamaan, atau batas wilayah • Komunitas yang rentan terhadap provokasi atau disinformasi • Kawasan dengan tingkat kesenjangan sosial tinggi atau akses layanan dasar yang belum merata
	• Penguatan kapasitas dan peran Satpol PP dan Damkar dalam penegakan perda dan pelayanan tanggap darurat kebakaran • Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan gangguan ketertiban dan kebakaran • Peningkatan peran masyarakat dan relawan dalam menjaga ketenteraman lingkungan dan penanggulangan dini	• Penguatan kelembagaan dan infrastruktur dasar Satpol PP dan Damkar • Pembentukan sistem pemantauan dan pelaporan gangguan ketertiban dan kebakaran secara real-time • Integrasi sistem penanganan ketertiban umum dan kebakaran dengan sistem perlindungan masyarakat lainnya	• Area publik rawan kerumunan dan konflik (pasar, alun-alun, pusat kegiatan masyarakat) • Kawasan padat permukiman dengan risiko kebakaran tinggi • Kawasan industri rumahan dan perdagangan yang belum dilengkapi sarpras pencegahan kebakaran



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	kebakaran		
Meningkatkan peran lembaga keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan ekonomi lokal dan pengembangan sektor produktif.	• Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola lembaga keuangan daerah (Bank Daerah, BPR, BUMDes Bersama, Koperasi Simpan Pinjam, dll.) • Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung layanan keuangan yang inklusif dan efisien • Sinergi antara lembaga keuangan daerah dengan sektor UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, dan industri kreatif daerah sebagai sektor produktif utama	• Pemetaan potensi sektor produktif dan aksesibilitas pembiayaan daerah • Peningkatan kapasitas manajerial dan digitalisasi lembaga keuangan daerah serta penyesuaian regulasi daerah yang mendukung pembiayaan inklusif • Penguatan ekosistem pembiayaan berbasis kemitraan sektor produktif, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah	• Wilayah dengan potensi sektor unggulan seperti batik, pertanian, perikanan, industri rumahan, dan pariwisata • Sentra-sentra UMKM dan koperasi yang membutuhkan akses pembiayaan • Kawasan pedesaan yang belum terjangkau lembaga keuangan formal
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat.	• Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri • Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan swasta • Sinergi dunia pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) • Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelatihan daring dan sistem informasi pasar kerja	• Identifikasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja dan revitalisasi pelatihan vokasi • Perluasan jangkauan pelatihan kerja dan sertifikasi tenaga kerja di sektor prioritas • Penguatan ekosistem kerja produktif melalui kemitraan antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan pelaku usaha	• Wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka tinggi dan sektor informal dominan • Kawasan industri, sentra UMKM, dan wilayah pesisir • Daerah dengan potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata yang membutuhkan tenaga kerja terampil
Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	• Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kesejahteraan sosial • Pemanfaatan data	• 2026–2027: Pemetaan dan validasi PPKS serta wilayah kantong kemiskinan • Peningkatan kapasitas	• Wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem atau rentan sosial tinggi • Komunitas marginal:



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara akurat dan terkini • Sinergi antar sektor (sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan) dalam penanganan PPKS dan pengurangan kesenjangan pendapatan • Optimalisasi laboratorium kemiskinan	ekonomi keluarga PPKS dan penguatan jejaring perlindungan sosial • Penguatan sistem perlindungan sosial terintegrasi dan inklusif untuk mendorong kemandirian sosial ekonomi	lansia terlantar, anak terlantar, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya • Daerah dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi atau minim akses terhadap layanan sosial dasar
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan	• Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat transmigrasi melalui sosialisasi terpadu • Optimalisasi peran dinas teknis, tokoh masyarakat, dan perangkat desa dalam menjaring calon transmigran • Penyelarasan kebutuhan transmigrasi dengan potensi SDM lokal dan kuota yang tersedia dari pemerintah pusat	• Sosialisasi intensif program transmigrasi dan penjaringan peserta sesuai kuota • Peningkatan pelatihan dan pembekalan keterampilan bagi calon transmigran • Evaluasi dan penguatan model transmigrasi berbasis keluarga produktif serta jejaring ekonomi antarwilayah	• Wilayah dengan angka kemiskinan tinggi dan lahan terbatas • Daerah dengan potensi ketenagakerjaan tinggi namun minim peluang usaha • Wilayah yang menjadi sumber transmigran sesuai dengan prioritas nasional dan kesiapan masyarakat Wilayah dengan angka kemiskinan tinggi dan lahan terbatas • Daerah dengan potensi ketenagakerjaan tinggi namun minim peluang usaha

d. Strategi Pembangunan Sasaran 4 Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik

Sasaran ini diarahkan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas; Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemnyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bermartabat; Meningkatkan kualitas



perencanaan pembangunan daerah yang didukung dengan ketersediaan data yang valid; Meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja Aparatur Sipil Negara secara berkelanjutan guna mendukung terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik; Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan barang milik pemerintah daerah; dan Meningkatkan peran kecamatan dalam mendukung pembangunan dan pembinaan desa.

Rumusan strategi yang untuk mencapai target kinerja sasaran Meningkatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8.
Strategi Pembangunan Sasaran 4 :
Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik

Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas	• Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN pelayanan publik melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelayanan prima • Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik (smart service) • Optimalisasi Unit Pelayanan Publik dan pelayanan keliling untuk menjangkau wilayah terpencil • Peningkatan budaya kerja berorientasi pelayanan	• Pemetaan kualitas dan persepsi layanan publik, penyusunan standar pelayanan minimal dan SOP layanan berbasis kebutuhan masyarakat • Digitalisasi dan integrasi sistem layanan antar perangkat daerah • Inovasi pelayanan publik berbasis masyarakat dan pemantapan zona integritas menuju WBK/WBBM	• Perangkat daerah yang langsung bersentuhan dengan layanan publik (Disdukcapil, DPMPSTSP, Dinsos, Dinkes, Disdik, dan kecamatan, dll) • Wilayah yang belum terjangkau layanan digital dan wilayah dengan pengaduan publik tinggi • Layanan yang berdampak langsung pada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak, dan masyarakat miskin
	• Peningkatan kapasitas ASN perencana dan pelaksana program melalui pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) • Penguatan sistem pengukuran kinerja	• Pemetaan kelemahan dalam penerapan akuntabilitas kinerja dan pelatihan dasar • Pendampingan penyusunan perjanjian kinerja dan penyelarasan indikator sasaran dan program	• Perangkat daerah dengan nilai SAKIP rendah atau belum mencapai kategori BB • Perangkat daerah dengan output program tidak sejalan dengan



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	berbasis hasil (outcome-based) • Optimalisasi peran inspektorat, Bappeda, dan Bagian Organisasi dalam pembinaan kinerja • Pemanfaatan aplikasi e-kinerja, e-SAKIP, dan sistem evaluasi berbasis teknologi informasi	• Penguatan manajemen kinerja berbasis reward and punishment serta peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	indikator kinerja • OPD pengelola program prioritas daerah dan nasional
	• Peningkatan kapasitas SDM ASN dan perangkat desa melalui pelatihan inovasi • Penguatan kelembagaan inovasi daerah seperti Kelompok Inovasi, Tim Inovasi Daerah, dan laboratorium inovasi • Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengembangan dan replikasi inovasi • Penguatan budaya kerja inovatif di kalangan birokrasi dan masyarakat	• Pemetaan potensi inovasi dan indeks inovasi daerah • Peningkatan kapasitas dan kelembagaan inovasi serta pengembangan bank data inovasi • Replikasi inovasi terbaik dan integrasi dalam kebijakan dan anggaran daerah	• OPD dengan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan perencanaan pembangunan • Pemerintah desa/kelurahan yang memiliki potensi inovasi pelayanan publik • Sektor prioritas daerah seperti pendidikan, UMKM, pengentasan kemiskinan, pelayanan publik, dan pengelolaan lingkungan
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemnyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bermartabat	• Peningkatan kapasitas ASN dalam penguasaan teknologi informasi dan manajemen digitalisasi pemerintahan • Penguatan infrastruktur TIK daerah (jaringan internet, server, keamanan siber) • Pemanfaatan SDM TIK lokal dan	• Identifikasi kebutuhan dan kondisi infrastruktur serta sistem digital di masing-masing OPD • Implementasi sistem informasi terintegrasi dan layanan digital publik • Integrasi penuh layanan digital antarsektor dan penguatan manajemen keamanan data serta	• OPD penyedia layanan publik • OPD pengelola data dan informasi daerah seperti Diskominfo dan Bappeda



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	kolaborasi dengan penyedia layanan digital • Pengembangan regulasi dan SOP layanan berbasis digital	interoperabilitas sistem	
	• Peningkatan kapasitas SDM TIK daerah melalui pelatihan keamanan siber dan manajemen risiko digital • Penguatan kelembagaan pengelola keamanan informasi daerah • Pemanfaatan teknologi enkripsi, firewall, dan sistem deteksi dini gangguan keamanan • Penyusunan regulasi teknis dan SOP pengamanan data pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	• Audit awal keamanan sistem informasi OPD dan pemetaan risiko kebocoran data • Pengembangan kebijakan dan sistem perlindungan data secara teknis dan manajerial • Implementasi sistem keamanan berlapis dan integrasi sistem pengamanan lintas sektor	• OPD penyedia layanan digital publik • Infrastruktur pusat data dan layanan digital pemerintah kabupaten • Sistem SPBE yang menangani data sensitif seperti kependudukan, keuangan, pendidikan, kesehatan
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang didukung dengan ketersediaan data yang valid.	• Peningkatan kapasitas SDM perencana daerah dalam pendekatan partisipatif dan teknis perencanaan berbasis data • Penguatan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau partisipasi masyarakat secara luas • Pemanfaatan forum-forum lokal seperti musrenbang desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten secara	• Evaluasi sistem perencanaan daerah dan partisipasi masyarakat yang berjalan saat ini • Penguatan sistem integrasi aspirasi masyarakat dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD) • Implementasi penuh sistem perencanaan berbasis bukti dan partisipatif secara digital dan tatap muka	• Desa/kelurahan dan kecamatan yang partisipasi masyarakatnya masih rendah • Forum koordinasi antar OPD, Bapperida, dan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan dokumen perencanaan



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	lebih inklusif dan transparan		
	• Peningkatan kapasitas SDM pengelola data statistik sektoral di tiap OPD • Penguatan koordinasi dan peran Forum Satu Data Daerah • Penyediaan sistem digitalisasi dan interoperabilitas antar sumber data sektoral • Optimalisasi kerja sama dengan BPS sebagai pembina data statistik daerah	• Pemetaan kondisi eksisting statistik sektoral dan identifikasi data prioritas pembangunan • Penguatan integrasi data lintas sektor dan validasi data statistik prioritas • Implementasi penuh sistem statistik sektoral terstandar dan terbuka bagi publik dan pembuat kebijakan	• OPD pengelola data sektoral • Data terkait indikator RPJMD, SDGs, dan pembangunan daerah lainnya • Forum Satu Data dan tim walidata daerah
	• Peningkatan kapasitas SDM kearsipan pada OPD dan desa/kelurahan • Penyediaan sarana dan prasarana arsip, termasuk arsip elektronik • Penguatan kelembagaan Dinas Kearsipan dan perpustakaan sebagai pembina arsip daerah • Penerapan standar nasional kearsipan dalam pengelolaan arsip aktif, inaktif, dan statis	• Penataan kelembagaan dan penilaian kondisi arsip di seluruh OPD dan unit kerja • Implementasi sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis, baik fisik maupun digital • Optimalisasi layanan arsip digital dan pemanfaatannya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	• OPD strategis penghasil arsip penting (Bappeda, BKAD, Inspektorat, DPMPTSP, Sekretariat Daerah, dan lainnya) • Desa/kelurahan dengan kelemahan pengelolaan arsip • Layanan publik berbasis dokumen resmi dan elektronik
Meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja Aparatur Sipil Negara secara berkelanjutan guna mendukung terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.	• Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN berbasis analisis jabatan dan beban kerja • Penguatan kompetensi ASN melalui pelatihan, diklat, dan coaching berbasis kebutuhan kinerja	• Pemetaan kompetensi ASN, evaluasi kebutuhan pelatihan, dan integrasi sistem informasi kepegawaian • Pelaksanaan pelatihan dan coaching terpadu, penguatan sistem merit dan evaluasi kinerja individu • Optimalisasi manajemen talenta dan	• Seluruh ASN Pemkab Pekalongan, khususnya OPD strategis dan pelayanan publik • BKPSDM sebagai leading sector pembinaan ASN • OPD yang memiliki beban kerja tinggi dan pelayanan



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	• Pengembangan sistem merit dan manajemen talenta • Penegakan disiplin dan penguatan budaya kerja berintegritas dan profesional	reward system berbasis kinerja	langsung kepada masyarakat
Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	• Peningkatan kapasitas aparatur pengawas internal (APIP) dan penguatan integritas pejabat pengawas di tingkat OPD • Penerapan standar pengendalian risiko berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem pengawasan lainnya • Penyusunan pedoman dan SOP pengendalian berbasis risiko di semua sektor	• Penilaian kondisi eksisting indeks reformasi hukum, maturitas SPIP, dan manajemen risiko di OPD • Implementasi penguatan sistem pengendalian internal berbasis risiko dengan pencapaian target nilai maturitas SPIP dan reformasi hukum yang lebih baik • Optimalisasi pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif dan akuntabel dalam pelayanan publik	• OPD yang mengelola anggaran publik besar dan kritikal (Bappeda, Dinas Keuangan, Inspektorat, BPKAD, dll) • Semua OPD yang melaksanakan program pembangunan dengan potensi resiko tinggi (pembangunan fisik, distribusi bantuan sosial, dll) • Tim pengawasan internal (APIP) di kabupaten Pekalongan
Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan barang milik pemerintah daerah	• Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah melalui pelatihan teknis dan sertifikasi • Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah secara terintegrasi (e-budgeting, e-planning, e-audit) • Peningkatan pemungutan dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) • Penguatan kelembagaan pengelolaan barang	• Evaluasi sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini, termasuk PAD, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan aset • Implementasi penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta pengelolaan aset berbasis neraca • Konsolidasi dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien	• BPKAD, Bappeda, OPD pemungut PAD, dan unit pengelola BMD • Kecamatan dan desa yang berkontribusi terhadap belanja langsung dan pengelolaan aset desa • Badan usaha milik daerah dan mitra swasta yang terkait dengan sumber PAD dan pembiayaan



Fokus Pembangunan	Strategi Pembangunan		
	Optimalisasi Sumberdaya	Penahapan Pembangunan	Lokus dan Fokus Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)
	milik daerah (BMD) berbasis data dan regulasi		
Meningkatkan peran kecamatan dalam mendukung pembangunan dan pembinaan desa	• Peningkatan kompetensi aparatur kecamatan dan desa melalui pelatihan pelayanan publik dan manajemen administrasi pemerintahan • Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi publik (e-governance) untuk mempercepat pelayanan dan transparansi • Peningkatan sinergi antara kecamatan, desa, dan OPD terkait untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan	• Penilaian kondisi eksisting kualitas pelayanan publik di kecamatan dan desa, termasuk infrastruktur, sistem administrasi, dan partisipasi masyarakat • Implementasi program pelatihan aparatur kecamatan dan desa, penerapan teknologi dalam pelayanan administrasi, serta penyusunan rencana penguatan kapasitas desa • Evaluasi dan penyempurnaan sistem pelayanan publik di kecamatan dengan memperhatikan kualitas dan partisipasi masyarakat	• Semua kecamatan dan desa di Kabupaten Pekalongan, dengan fokus pada kecamatan dan desa yang memiliki tingkat kebutuhan pelayanan yang tinggi dan masalah administratif yang kompleks • OPD terkait dengan pembangunan desa, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

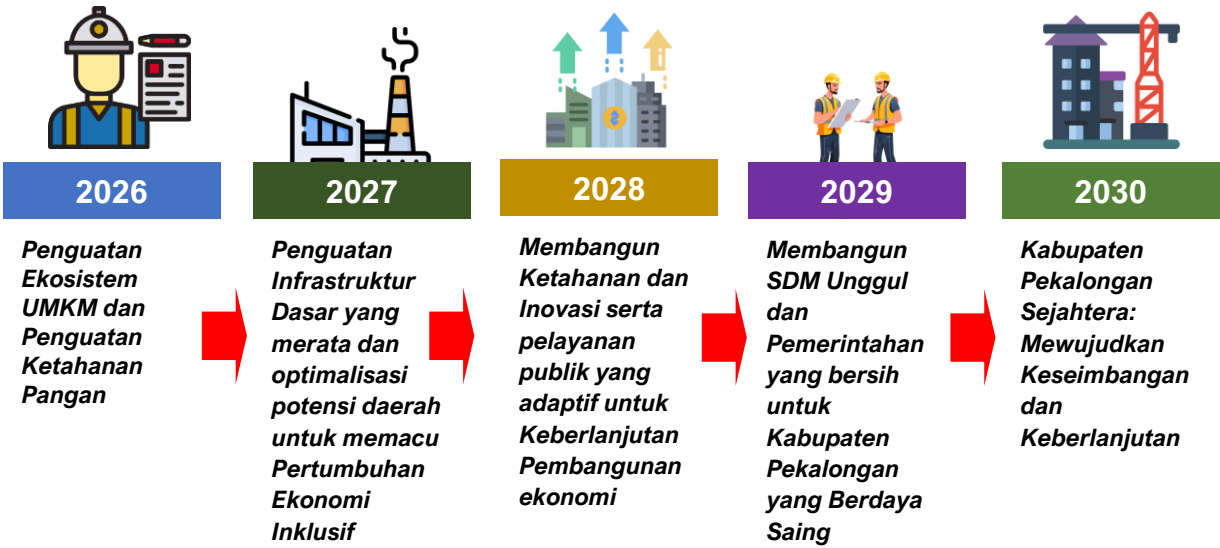
2. Tahapan dan Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Meskipun RPJMD Kabupaten Pekalongan secara perodesasi adalah Tahun 2025-2029, namun implementasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebenarnya dimulai tahun 2026 sampai tahun 2030. Artinya adalah, RPJMD Kabupaten Pekalongan akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan tahunan dalam hal ini adalah RKPD Tahun 2026 (transisi dari RPJMD periode 2021-2026), RKPD Tahun 2027, RKPD Tahun 2028, RKPD tahun 2029, dan RKPD Tahun 2030 (transisi dengan RPJMD periode 2030-2034). Untuk mengakomodir pelaksanaan perencanaan tahunan tersebut, dalam dokumen RPJMD ditetapkan arah kebijakan pembangunan daerah di tiap tahun selama periode tersebut.



Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tahunan sejak tahun 2026 hingga tahun 2030. Pada masing-masing tema/fokus disusun prioritas pembangunan yang akan ditangani.



Gambar 3.14. Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2026-2030

Berikut adalah penjelasan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan periode 2026-2030.

a. Kebijakan Prioritas Tahun 2026

Tahun 2026 menjadi tahun penting bagi Kabupaten Pekalongan, karena menandai awal pelaksanaan RPJMD periode 2025-2029 sekaligus masa transisi dari pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Oleh karena itu kebijakan yang diambil harus bisa mengakomodir apa yang menjadi cita-cita di tahun 2026 dari kedua periode RPJMD tersebut. Tema pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2026 adalah “**Penguatan Ekosistem UMKM dan Penguatan Ketahanan Pangan**”.

Tahun 2026 menjadi tahun penting bagi Kabupaten Pekalongan karena berperan sebagai jembatan strategis antara akhir pelaksanaan RPJMD 2021–2026 dan awal implementasi RPJMD 2025–2029. Tahun ini merupakan fase transisi yang krusial, di mana arah kebijakan pembangunan harus mampu menjaga kesinambungan terhadap capaian-capaian sebelumnya, sekaligus membuka fondasi kuat bagi pencapaian visi baru ke depan. Tema pembangunan di tahun 2026 yang diusung, yaitu “**Penguatan Ekosistem UMKM dan Penguatan Ketahanan Pangan**”, mencerminkan respons terhadap kebutuhan nyata masyarakat sekaligus upaya akseleratif untuk memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis masyarakat.

Penguatan ekosistem UMKM difokuskan pada peningkatan daya saing, akses pembiayaan, digitalisasi, serta kemitraan usaha yang berkelanjutan, sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Sementara itu, ketahanan pangan diarahkan pada upaya diversifikasi sumber pangan, penguatan cadangan pangan lokal, dan peningkatan kapasitas produksi berbasis potensi wilayah. Keduanya menjadi simpul strategis yang tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga menciptakan daya tahan sosial dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan tantangan perubahan iklim. Tahun 2026 juga akan dimanfaatkan untuk mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat guna memastikan efektivitas implementasi program prioritas daerah.



Arah kebijakan prioritas Kabupaten Pekalongan Tahun 2026, yang merupakan rangkaian kerja strategis dan selaras dengan tema pembangunan “Penguatan Ekosistem UMKM dan Penguatan Ketahanan Pangan”, serta mencerminkan kesinambungan dan transisi dari dua periode RPJMD (2021–2026 dan 2025–2029), yaitu:

1. Pengembangan platform digital UMKM lokal
2. Pelatihan literasi digital, manajemen keuangan, dan sertifikasi produk
3. Inovasi produk berbasis kearifan lokal dan permintaan pasar
4. Penguatan sinergi dengan perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan mikro
5. Peningkatan efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
6. Pendirian Dana Bergulir Daerah untuk UMKM
7. Fasilitasi kerja sama antara UMKM dan industri besar (kemitraan hulu-hilir)
8. Penguatan jejaring pasar lokal, nasional, dan ekspor
9. Pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok pengadaan barang/jasa pemerintah
10. Peningkatan produksi pangan non-beras: hortikultura, umbi-umbian, dan pangan lokal lainnya
11. Revitalisasi lahan tidur dan pemanfaatan pekarangan rumah
12. Penerapan teknologi tepat guna dalam budidaya dan panen
13. Pembentukan lumbung pangan desa dan sistem cadangan pangan pemerintah daerah
14. Penguatan sistem logistik dan distribusi pangan antarwilayah
15. Pengendalian fluktuasi harga melalui intervensi pasar
16. Peningkatan akses asuransi usaha tani dan nelayan
17. Subsidi input pertanian, irigasi, dan peralatan pascapanen
18. Peningkatan kapasitas kelompok tani dan nelayan
19. Pengembangan klaster ekonomi berbasis wilayah (klaster UMKM pangan, klaster industri kreatif, dsb.)
20. Penyusunan roadmap penguatan ekosistem ekonomi lokal
21. Pemutakhiran basis data UMKM dan petani/nelayan sebagai dasar intervensi sektoral
22. Perbaikan akses jalan produksi dan transportasi logistik UMKM dan pertanian
23. Penyediaan sentra produksi dan pasar rakyat yang representatif
24. Penyediaan infrastruktur air baku dan irigasi pendukung ketahanan pangan
25. Pelatihan vokasi untuk wirausaha baru, generasi muda, dan perempuan
26. Penguatan kelembagaan koperasi dan BUMDes sebagai mitra pemberdayaan ekonomi lokal
27. Penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha
28. Kolaborasi program CSR dengan prioritas UMKM dan pangan
29. Peningkatan peran komunitas dan lembaga sosial dalam pemberdayaan ekonomi rakyat
30. Penajaman fokus program dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah
31. Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi berbasis kinerja
32. Integrasi sistem informasi daerah untuk mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat

Tahun 2026 akan menjadi tonggak penentu arah pembangunan Kabupaten Pekalongan. Kebijakan prioritas yang disusun tidak hanya bersifat responsif terhadap kebutuhan jangka pendek, tetapi juga strategis dalam membuka jalan bagi transformasi ekonomi berbasis kerakyatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

b. Kebijakan Prioritas Tahun 2027

Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025–2029 yang menjadi fase akselerasi dan konsolidasi program-program prioritas untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah secara signifikan. Tema pembangunan yang diusung pada tahun ini adalah ***“Penguatan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Optimalisasi Potensi***



Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Tema ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tidak hanya membangun fondasi fisik, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Penguatan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama, meliputi perbaikan dan pembangunan jaringan jalan, penguatan infrastruktur air bersih dan sanitasi, revitalisasi sarana pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur digital di wilayah pedesaan. Upaya ini bertujuan memperluas akses layanan dasar serta mendorong konektivitas antarwilayah, yang menjadi landasan penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Pada saat yang sama, optimalisasi potensi daerah diarahkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan daerah secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Selain pariwisata dan ekonomi syariah yang menjadi perhatian utama, pemerintah daerah juga memperkuat sektor industri kreatif, pertanian modern, perikanan tangkap dan budidaya, serta pengolahan hasil pertanian dan kelautan. Di sektor pariwisata, dilakukan peningkatan kualitas destinasi berbasis budaya, alam, dan sejarah, serta dukungan promosi dan pemasaran digital. Ekonomi syariah dikembangkan melalui penguatan UMKM syariah, koperasi pesantren, keuangan mikro syariah, dan peningkatan literasi ekonomi umat.

Sektor pertanian dan perikanan juga menjadi tumpuan strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, dengan pendekatan hilirisasi, mekanisasi, dan pemanfaatan teknologi. Dukungan terhadap UMKM dan IKM terus diperluas, termasuk kemudahan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan integrasi dalam rantai nilai industri lokal.

Dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan inklusif, tahun 2027 diarahkan menjadi momentum bagi transformasi ekonomi Kabupaten Pekalongan yang tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga merata secara kualitas. Melalui kolaborasi antarsektor dan melibatkan aktif masyarakat, pemerintah daerah bertekad membangun struktur ekonomi yang tangguh, adaptif, dan berkeadilan.

Tahun 2027 diarahkan sebagai periode akselerasi dan konsolidasi terhadap program-program prioritas pembangunan yang telah diletakkan fondasinya pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, arah kebijakan di tahun ini difokuskan untuk mempercepat transformasi struktural dan memperkuat daya saing daerah dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Berikut arah kebijakan prioritas yang akan dijalankan:

1. Melanjutkan dan mempercepat pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Mendorong konektivitas antarwilayah terutama kawasan tertinggal, pinggiran, dan perdesaan melalui peningkatan akses transportasi dan digitalisasi wilayah.
3. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
4. Perluasan jaringan internet di wilayah-wilayah belum terlayani secara optimal untuk mendorong transformasi digital desa dan pelayanan publik berbasis teknologi.
5. Penerapan smart system dalam pelayanan pemerintahan, UMKM, pendidikan, dan pengelolaan potensi daerah.
6. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan melalui mekanisasi, hilirisasi, dan adopsi teknologi tepat guna.
7. Penguatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui fasilitasi legalitas, pelatihan, inkubasi bisnis, dan integrasi dengan pasar digital dan global.
8. Revitalisasi dan pengembangan kawasan sentra produksi serta kawasan ekonomi berbasis komunitas.



9. Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya, sejarah, dan alam dengan pendekatan community-based tourism dan dukungan infrastruktur serta SDM pariwisata.
10. Penguatan ekosistem ekonomi syariah dengan membangun kolaborasi antara UMKM syariah, pesantren, koperasi syariah, dan lembaga keuangan syariah.
11. Peningkatan literasi dan akses masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.
12. Mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media dalam pengelolaan potensi daerah.
13. Penguatan peran BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi lokal sebagai motor penggerak ekonomi inklusif.
14. Penguatan regulasi dan insentif daerah untuk mempercepat investasi dan inovasi pembangunan.
15. Memastikan pemerataan hasil pembangunan dengan menjangkau kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui program padat karya, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial ekonomi.
16. Mengintegrasikan pendekatan gender, penyandang disabilitas, dan pengarusutamaan anak dan pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Dengan arah kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menargetkan tahun 2027 sebagai momen penting untuk menegaskan keberhasilan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, namun juga menciptakan pemerataan, daya saing, dan ketangguhan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

c. Kebijakan Prioritas Tahun 2028

Tahun 2028 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025–2029, sekaligus menjadi titik strategis untuk memastikan keberlanjutan arah pembangunan yang telah dirintis sejak awal periode. Tema pembangunan yang diusung pada tahun ini adalah **“Membangun Ketahanan dan Inovasi serta Pelayanan Publik yang Adaptif untuk Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi.”** Tema ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam memperkuat fondasi pembangunan jangka menengah dan panjang melalui ketahanan, inovasi, dan tata kelola yang responsif terhadap perubahan.

Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan ketahanan daerah, baik dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun kelembagaan. Ketahanan sosial dikembangkan melalui penguatan jaminan sosial, ketahanan keluarga, dan penanggulangan kemiskinan. Ketahanan ekonomi dibangun dengan memperkuat struktur ekonomi lokal yang berbasis potensi daerah, memperluas akses pasar, dan mendukung transformasi digital UMKM. Sementara itu, ketahanan lingkungan menjadi prioritas melalui peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana.

Inovasi menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong peningkatan kapasitas inovasi di seluruh sektor, termasuk mendorong budaya riset dan pengembangan teknologi tepat guna, inovasi sosial di tingkat desa, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik dan sistem perencanaan pembangunan.

Di bidang pelayanan publik, transformasi dilakukan secara sistemik melalui digitalisasi layanan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan penguatan tata kelola berbasis data. Pelayanan publik diarahkan untuk menjadi lebih cepat, mudah diakses, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal.



Dalam konteks keberlanjutan pembangunan ekonomi, sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi syariah, dan industri kreatif terus diperkuat dengan pendekatan yang inovatif dan adaptif. Dukungan terhadap kemitraan swasta dan masyarakat juga diperluas melalui skema pembiayaan kreatif, inkubasi usaha, dan kolaborasi multistakeholder.

Dengan mengusung semangat inovasi dan adaptasi, pembangunan tahun 2028 diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih resilien, tangguh terhadap guncangan eksternal, serta mampu memastikan keberlanjutan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tahun ini menjadi tonggak penting dalam menjaga konsistensi pembangunan menuju visi Kabupaten Pekalongan yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Rumusan arah kebijakan prioritas Tahun 2028 untuk Kabupaten Pekalongan yang merupakan rangkaian kerja dan selaras dengan strategi RPJMD 2025–2029, dengan memperhatikan tema tahun tersebut yaitu “Membangun Ketahanan dan Inovasi serta Pelayanan Publik yang Adaptif untuk Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi”:

1. Memperluas cakupan dan efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga rentan.
2. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, koperasi, dan usaha mikro berbasis potensi lokal.
3. Menumbuhkan ketahanan ekonomi desa melalui diversifikasi usaha dan akses permodalan.
4. Memperkuat jaring pengaman sosial melalui integrasi data kemiskinan dan layanan sosial berbasis teknologi.
5. Meningkatkan konservasi lingkungan dan rehabilitasi lahan kritis serta daerah aliran sungai.
6. Mendorong pengelolaan sampah berbasis komunitas dan pengembangan energi terbarukan skala lokal.
7. Memperkuat sistem peringatan dini dan manajemen risiko bencana yang terintegrasi dan partisipatif.
8. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi dengan lembaga riset, universitas, dan sektor swasta.
10. Mendorong desa dan kelurahan inovatif dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan solusi lokal.
11. Membangun pusat inovasi dan inkubator kewirausahaan untuk sektor unggulan daerah.
12. Meningkatkan literasi digital bagi pelaku usaha dan masyarakat desa.
13. Memperluas digitalisasi layanan publik, termasuk layanan kependudukan, perizinan, pendidikan, dan kesehatan.
14. Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan, manajemen kinerja, dan budaya pelayanan.
15. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis data dan keterbukaan informasi.
16. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kecepatan respons pelayanan publik, terutama untuk kelompok rentan.
17. Mengembangkan pertanian dan perikanan modern berbasis teknologi, mekanisasi, dan hilirisasi.
18. Memperkuat pariwisata berbasis budaya, sejarah, dan ekowisata dengan digitalisasi promosi.
19. Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui UMKM syariah, pesantren produktif, dan literasi ekonomi umat.
20. Meningkatkan daya saing industri kreatif lokal dengan dukungan pelatihan, akses pasar, dan inkubasi usaha.
21. Mengembangkan skema pembiayaan kreatif dan investasi sosial untuk pembangunan daerah.



22. Mendorong keterlibatan sektor swasta dan komunitas dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
23. Memperkuat peran forum-forum kolaboratif lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah.
24. Menumbuhkan budaya gotong royong dan solidaritas sosial dalam pembangunan.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat daya lenting (resilience) dan daya adaptasi Kabupaten Pekalongan dalam menghadapi tantangan global dan lokal, serta memastikan bahwa pembangunan yang telah dirintis sejak 2025 dapat dilanjutkan secara berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

d. Kebijakan Prioritas Tahun 2029

Tahun 2029 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan 2025–2029, sekaligus menjadi fase konsolidasi dan penguatan terhadap seluruh capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan mengusung tema **“Membangun SDM Unggul dan Pemerintahan yang Bersih untuk Kabupaten Pekalongan yang Berdaya Saing,”** pembangunan tahun ini diarahkan untuk memperkuat fondasi daya saing daerah melalui dua pilar utama: pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan reformasi tata kelola pemerintahan.

Fokus pembangunan pada sektor SDM diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pemerintah daerah memperkuat sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja, termasuk memperluas akses pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis industri lokal. Di sisi lain, penguatan sektor kesehatan juga menjadi perhatian, terutama dalam menjamin kualitas layanan dasar, mendorong perilaku hidup bersih dan sehat, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat.

Pilar kedua adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk memperkuat sistem birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan publik melalui penerapan digitalisasi layanan, peningkatan integritas aparatur, serta penguatan pengawasan dan partisipasi masyarakat. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Meskipun SDM dan tata kelola menjadi fokus utama, pembangunan di sektor-sektor strategis lainnya tetap dilanjutkan secara sinergis. Infrastruktur dasar terus diperkuat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung produktivitas ekonomi. Sektor ekonomi, khususnya penguatan UMKM, pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan ekonomi syariah tetap menjadi prioritas guna memperluas basis ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, perhatian terhadap lingkungan hidup juga ditingkatkan melalui penguatan pengelolaan sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, dan pelestarian ekosistem.

Dengan mengintegrasikan pembangunan SDM, tata kelola pemerintahan, serta sektor strategis lainnya, tahun 2029 diharapkan menjadi tahun penguatan daya saing Kabupaten Pekalongan secara menyeluruh. Pembangunan diarahkan tidak hanya untuk menjawab tantangan saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Berikut adalah rumusan Arah Kebijakan Prioritas Tahun 2029 Kabupaten Pekalongan, selaras dengan tema **“Membangun SDM Unggul dan Pemerintahan yang Bersih untuk Kabupaten Pekalongan yang Berdaya Saing”**. Tahun ini merupakan fase konsolidasi dan penguatan



terhadap seluruh capaian pembangunan RPJMD 2025–2029. Arah Kebijakan Prioritas Kabupaten Pekalongan Tahun 2029, antara lain:

1. Penguatan kurikulum vokasional sesuai kebutuhan dunia kerja lokal dan industri kreatif
2. Penyediaan layanan pendidikan di daerah dengan angka partisipasi sekolah rendah, terutama untuk PAUD, SD, dan SMP dengan penguatan digitalisasi pendidikan.
3. Pengembangan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus di setiap kecamatan.
4. Pemberian beasiswa daerah berbasis kebutuhan dan prestasi bagi siswa miskin dan berprestasi
5. Pencegahan dan penanganan ATS sebagai bagian dari pencapaian WAJAR 13 Tahun
6. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS
7. Kemitraan sekolah, BLK, dan pelaku usaha untuk pelatihan dan pemagangan
8. Perluasan cakupan jaminan kesehatan masyarakat dan revitalisasi layanan Puskesmas
9. Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta gerakan masyarakat hidup sehat
10. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan layanan kesehatan berbasis digital
11. Integrasi layanan gizi dengan program pendidikan dan jaminan sosial keluarga miskin.
12. Perluasan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita berbasis Posyandu Plus.
13. Pemanfaatan telemedicine untuk layanan kesehatan jarak jauh, terutama di wilayah pesisir dan pegunungan.
14. Fasilitasi integrasi pembiayaan PBI (Penerima Bantuan Iuran) untuk keluarga miskin dan renta
15. Pemberdayaan perempuan dan keluarga miskin melalui pelatihan dan akses ekonomi
16. Penguatan sistem perlindungan anak dan kelompok rentan berbasis data
17. Integrasi layanan perlindungan sosial dengan program ketahanan keluarga
18. Implementasi sistem merit dalam manajemen ASN dan penguatan budaya kerja berintegritas
19. Pelatihan kepemimpinan adaptif dan berbasis pelayanan publik
20. Reformasi birokrasi berbasis hasil dan manajemen kinerja yang terukur
21. Pengembangan layanan publik berbasis digital yang terintegrasi antar-OPD
22. Perluasan akses dan kemudahan layanan melalui platform daring dan pelayanan terpadu
23. Penguatan keamanan data dan sistem informasi pemerintahan berbasis satu data daerah
24. Mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik
25. Pelibatan aktif masyarakat dalam musrenbang, monitoring, dan evaluasi pembangunan
26. Penguatan fungsi pengawasan internal (Inspektorat) dan eksternal berbasis audit kinerja
27. Integrasi UMKM dalam rantai pasok lokal dan digitalisasi pemasaran
28. Perluasan akses pembiayaan, pendampingan bisnis, dan pembentukan koperasi produktif
29. Penguatan ekonomi syariah dan ekonomi pesantren berbasis komunitas
30. Pemeliharaan infrastruktur jalan produksi, irigasi, sanitasi, dan pasar rakyat
31. Penguatan konektivitas antarwilayah melalui sistem transportasi publik dan logistik
32. Integrasi infrastruktur digital di sentra ekonomi dan kawasan perdesaan
33. Hilirisasi hasil pertanian dan perikanan melalui industri kecil berbasis desa
34. Penguatan promosi pariwisata budaya dan alam berbasis ekonomi kreatif
35. Pembentukan kawasan kreatif dan penguatan jejaring pelaku ekonomi lokal
36. Pengawasan pemanfaatan lahan sesuai daya dukung dan RTRW
37. Pemberdayaan masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi lingkungan
38. Penguatan infrastruktur tahan bencana dan sistem peringatan dini
39. Edukasi masyarakat dan sekolah siaga bencana
40. Inovasi pengelolaan limbah dan pengembangan energi alternatif di kawasan padat



Dengan arah kebijakan prioritas ini, Tahun 2029 menjadi momen konsolidasi menuju keberlanjutan pembangunan dan penyiapan pondasi RPJPD Kabupaten Pekalongan 2025–2045. Penguatan SDM dan pemerintahan yang bersih diharapkan akan meningkatkan daya saing daerah secara komprehensif—ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan.

e. Kebijakan Prioritas Tahun 2030

Tahun 2030 menjadi momentum strategis dan penentu arah masa depan Kabupaten Pekalongan. Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2025–2029 sekaligus menjadi masa transisi menuju RPJMD periode berikutnya (2030–2034), pembangunan daerah diarahkan untuk melakukan konsolidasi capaian, evaluasi kebijakan, dan perencanaan lanjutan yang berorientasi pada keberlanjutan. Tema pembangunan yang diusung pada tahun ini adalah “Kabupaten Pekalongan Sejahtera: Mewujudkan Keseimbangan dan Keberlanjutan,” yang mencerminkan upaya integratif dalam menjaga harmoni antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan demi tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pada aspek pembangunan sosial, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pendekatan inklusif, partisipatif, dan berbasis komunitas, serta memperluas akses layanan yang merata dan berkualitas hingga ke wilayah pelosok.

Di bidang ekonomi, strategi diarahkan pada pemantapan struktur ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Penguatan ekosistem UMKM, pengembangan sektor unggulan seperti pertanian berbasis teknologi, industri kreatif, pariwisata berkelanjutan, serta ekonomi syariah terus diperkuat agar mampu menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahun ini juga menjadi tonggak bagi pelaksanaan kebijakan ekonomi hijau yang mendorong efisiensi sumber daya dan keberlanjutan investasi.

Sementara itu, dalam dimensi lingkungan, pembangunan difokuskan pada konservasi sumber daya alam, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta pemantapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Langkah-langkah konkret seperti pengelolaan sampah terpadu, pelestarian daerah aliran sungai (DAS), dan penghijauan kawasan kritis menjadi bagian dari strategi pembangunan yang ramah lingkungan.

Sebagai tahun transisi, 2030 juga menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian visi dan misi RPJMD 2025–2029. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan RPJMD 2030–2034 yang lebih adaptif terhadap tantangan masa depan, termasuk perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, transformasi ekonomi digital, serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Rumusan Arah Kebijakan Prioritas Tahun 2030 Kabupaten Pekalongan, yang merupakan tahun strategis penutup RPJMD 2025–2029 sekaligus masa transisi menuju RPJMD berikutnya (2030–2034). Selaras dengan tema pembangunan tahun ini, yaitu “Kabupaten Pekalongan Sejahtera: Mewujudkan Keseimbangan dan Keberlanjutan”, arah kebijakan disusun dengan pendekatan konsolidatif, evaluatif, dan transformatif:

1. Penjaminan kualitas dan keterjangkauan layanan pendidikan dan kesehatan hingga wilayah tertinggal.
2. Penuntasan pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan di daerah dengan akses rendah.
3. Revitalisasi Posyandu Plus, PAUD Terpadu, dan Sekolah Inklusi berbasis komunitas.



4. Program intensif untuk perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan disabilitas berbasis keluarga.
5. Penguatan integrasi layanan sosial, pendidikan, dan ekonomi untuk keluarga miskin.
6. Peningkatan cakupan jaminan sosial daerah (Jamkesda, bantuan layanan dasar).
7. Penguatan pendidikan kejar paket, pelatihan vokasi, dan life skills masyarakat.
8. Kolaborasi multisektor dalam peningkatan status gizi, angka harapan hidup, dan kualitas pendidikan.
9. Pemantapan pertanian berbasis teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
10. Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya berbasis kearifan lokal.
11. Penguatan ekosistem industri kreatif dan UMKM digital.
12. Penerapan prinsip ekonomi sirkular di sektor UMKM dan pengelolaan limbah produksi.
13. Pengembangan investasi hijau (green investment) dan energi terbarukan skala lokal.
14. Penguatan sistem insentif daerah untuk usaha ramah lingkungan dan inklusif.
15. Pengembangan koperasi pesantren, UMKM halal, dan keuangan mikro syariah.
16. Revitalisasi destinasi wisata berbasis budaya, sejarah, dan konservasi alam.
17. Peningkatan literasi wisata dan ekonomi kreatif bagi komunitas lokal.
18. Program pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS), hutan rakyat, dan kawasan mangrove.
19. Penataan kawasan rawan longsor, banjir, dan abrasi melalui pendekatan berbasis mitigasi risiko.
20. Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) skala kecamatan.
21. Implementasi sistem pengelolaan limbah berbasis rumah tangga dan industri kecil.
22. Penyesuaian tata ruang berbasis risiko iklim dan pengurangan emisi karbon.
23. Edukasi publik dan komunitas adaptif terhadap perubahan iklim dan kebencanaan.
24. Pelaksanaan evaluasi tematik antarbidang untuk mengukur keberhasilan visi dan misi daerah.
25. Pemetaan kebijakan yang terbukti efektif untuk direplikasi atau dikembangkan di periode selanjutnya.
26. Proyeksi arah pembangunan daerah berbasis data dan trend global–nasional (ekonomi digital, AI, geopolitik).
27. Pelibatan multipihak (akademisi, swasta, masyarakat) dalam proses perumusan RPJMD baru.
28. Penyempurnaan sistem satu data daerah untuk mendukung perencanaan berbasis bukti.
29. Peningkatan kapasitas Bappeda dan OPD dalam penyusunan rencana strategis berbasis indikator SDGs.

Tahun 2030 bukan hanya penutup periode, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju transformasi jangka menengah baru yang lebih progresif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menyiapkan kebijakan pembangunan yang adaptif, Kabupaten Pekalongan diarahkan menjadi daerah yang sejahtera, resilien, dan inklusif untuk semua warganya.

Selain berpedoman pada arah kebijakan prioritas sesuai tahapan Pembangunan dari tahun 2026-2030, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah merancang arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan urusan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keterpaduan antara arah kebijakan prioritas tahunan yang disusun berdasarkan tahapan pembangunan jangka menengah, dengan arah kebijakan pembangunan sektoral yang merepresentasikan mandat teknis dan fungsional masing-masing perangkat daerah. Arah kebijakan prioritas tahunan bertindak sebagai penjabaran tema dan strategi pembangunan yang bersifat lintas sektor, berfungsi mengarahkan konsolidasi program dan kegiatan agar selaras dengan tujuan pembangunan pada setiap fase RPJMD. Di sisi lain,



arah kebijakan sektoral menjadi landasan implementatif yang memastikan fokus pembangunan di bidang-bidang pemerintahan sesuai kewenangan tetap terjaga secara konsisten dan profesional.

Keterpaduan keduanya menjadi sangat penting agar kebijakan yang diambil setiap tahun tidak bersifat parsial atau sektoral semata, tetapi mendukung *“ekosistem pembangunan yang holistik”*—menggabungkan visi makro pembangunan dengan intervensi mikro teknis yang relevan. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus senantiasa mempertimbangkan sinkronisasi antara target strategis tahunan dan prioritas sektoral, termasuk harmonisasi sumber daya, penentuan lokus, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan daerah akan berjalan secara terarah, terpadu, dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan nyata masyarakat dari waktu ke waktu.

Arah kebijakan pembangunan sektoral sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.



Tabel 3.9.
Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Sektoral

No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
1	Terwujudnya Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, dan Sejahtera	Meningkatnya SDM Kabupaten Pekalongan yang Unggul dan Inklusif	• Memperluas fasilitas kesehatan di wilayah terpencil dan meningkatkan layanan berbasis teknologi/digital services. • Meningkatkan pemerataan dan kompetensi tenaga kesehatan dan melengkapi fasilitas dengan peralatan medis modern. • Fasilitasi dan penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. • Edukasi pola hidup sehat, kampanye vaksinasi, dan peningkatan sanitasi melalui PHBS. • Pengendalian penyakit menular (TB, malaria, DBD) dan penanganan penyakit tidak menular. • Kerja sama lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan pemerintah provinsi dan pusat. • Optimalisasi anggaran kesehatan, pengelolaan dana yang transparan, dan perbaikan tata kelola data kesehatan guna mendukung pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat	Kesehatan
			• Meningkatkan produksi pangan lokal dengan teknologi ramah lingkungan, dukungan sarana produksi, dan cadangan pangan daerah. • Memperbaiki jaringan distribusi dan infrastruktur transportasi untuk mendukung akses pangan ke seluruh wilayah • Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). • Memperketat pengawasan mutu pangan dan mendukung penerapan standar keamanan oleh pelaku usaha • Membangun kemitraan lintas sektor dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pangan. • Mengembangkan sistem digital untuk memantau ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan secara berkelanjutan.	Pangan



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			• Memastikan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki akses ke pendidikan berkualitas, pemenuhan akses dan mutu layanan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal. • Mengintegrasikan pelatihan soft skills dan penguatan pendidikan karakter dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan/potensi lokal, serta dukungan vokasional melalui identifikasi dan pemetaan potensi lokal daerah • Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan termasuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan manajemen pendidikan. • Mengembangkan kompetensi guru termasuk pengasuh pondok pesantren melalui pelatihan, sertifikasi, dan program pengembangan profesional berkelanjutan. • Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan penguasaan keterampilan sesuai perkembangan jaman. • Menanamkan nilai-nilai moral, budaya, dan kemandirian melalui program pendidikan karakter. • Membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan yang mendukung proses pembelajaran optimal. • Menjalin kerja sama lintas sektor dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. • Mengembangkan program vokasi yang relevan dengan potensi unggulan daerah. • Memberikan dukungan beasiswa, bantuan pendidikan, dan program kesehatan (penyediaan makanan bergizi) untuk peserta didik. • Mengoptimalkan peran pendidikan nonformal seperti Pondok Pesantren, PKBM, kursus, dan pelatihan keterampilan untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) .	Pendidikan
			• Membangun dan mengembangkan fasilitas literasi, seperti perpustakaan modern dan taman baca, yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. • Meluncurkan kampanye literasi secara luas melalui kegiatan berbasis komunitas, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan minat baca dan tulis.	Perpustakaan



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			• Mengadakan pelatihan literasi digital dan menyediakan akses internet di pusat literasi untuk mendukung pemanfaatan teknologi secara bijak. • Modernisasi perpustakaan dengan fasilitas teknologi dan program interaktif, serta penyediaan perpustakaan keliling untuk menjangkau masyarakat yang jauh letak geografisnya.	
			• Menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar dan teknologi, serta menyediakan program pendidikan vokasi dan sertifikasi. • Memperkuat organisasi pemuda untuk menjadi motor penggerak pembangunan daerah, serta melibatkan pemuda dalam kegiatan sosial dan ekonomi. • Memberikan dukungan dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, menciptakan inkubator bisnis dan ruang kreatif, serta menyelenggarakan kompetisi kewirausahaan untuk mengasah kreativitas pemuda. • Mengembangkan keterampilan digital pemuda dengan menyediakan pelatihan di bidang teknologi, seperti coding dan pemasaran digital, serta mendorong inovasi berbasis teknologi. • Membangun dan merehabilitasi fasilitas olahraga yang representatif untuk mendukung pelatihan dan pertandingan atlet, seperti stadion, pusat pelatihan, dan arena olahraga multi-fungsi. • Menyediakan program pembinaan yang berkelanjutan untuk atlet berbakat di berbagai cabang olahraga, baik melalui pelatihan intensif maupun kompetisi reguler. • Mendorong olahraga sebagai budaya sehat dengan menyediakan fasilitas dan program yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, seperti olahraga rekreasi, dan program olahraga pendidikan/sekolah. • Mengadakan event olahraga yang berkala dan berjenjang, seperti kejuaraan lokal, nasional, dan internasional, untuk mengasah kemampuan atlet serta meningkatkan daya saing.	Kepemudaan dan Olahraga



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			• Melakukan pendataan komprehensif terhadap seni, budaya, tradisi, dan adat istiadat lokal untuk memastikan pelestarian dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. • Menyediakan program pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku seni dan budaya untuk mendorong regenerasi dan pengembangan kapasitas mereka. • Membangun dan mengelola pusat kegiatan seni budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat edukasi, pelatihan, dan pertunjukan seni. • Mengadakan event seni dan budaya secara rutin untuk meningkatkan apresiasi masyarakat, menarik wisatawan, dan mempromosikan warisan budaya lokal. • Memastikan tradisi dan adat istiadat dijaga dan diwariskan melalui kegiatan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat lokal. • Memasukkan seni dan budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal untuk menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. • Memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang berjasa dalam melestarikan dan mengembangkan seni serta budaya lokal. • Mengintegrasikan seni dan budaya ke dalam strategi pariwisata daerah untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional.	Kebudayaan
			• Mengembangkan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal dengan memastikan keterlibatan setara antara perempuan dan laki-laki. • Memperkuat kebijakan untuk perlindungan perempuan dan anak, termasuk sistem pengawasan kekerasan berbasis masyarakat. • Mendukung perempuan melalui bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan koperasi berbasis UMKM lokal. • Mengkampanyekan kesetaraan gender, pencegahan pernikahan dini, dan kekerasan melalui tokoh masyarakat dan media lokal. • Meningkatkan akses kesehatan reproduksi, gizi keluarga, dan sanitasi di puskesmas dan posyandu. • Optimalisasi peran keluarga dalam mewujudkan nilai-nilai moral dan karakter bagi anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			• Mengaktifkan PUSPAGA dan membangun rumah aman bagi korban kekerasan. • Mengedukasi masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan melatih orang tua dalam pengasuhan berbasis kearifan lokal. • Mendorong laki-laki sebagai mitra dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. • Mendorong pengembangan DRPPA di desa-desa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan anak.	
			• Meningkatkan upaya penyuluhan dan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya program keluarga berencana (KB), untuk memastikan pemahaman yang lebih luas dan partisipasi aktif masyarakat. • Memperluas akses terhadap layanan KB yang berkualitas dan ramah, dengan menyediakan fasilitas pelayanan KB di setiap tingkat pemerintahan, dari desa hingga kecamatan, serta memastikan bahwa berbagai metode kontrasepsi tersedia sesuai dengan kebutuhan dan pilihan keluarga. • Membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur efektivitas program KB, menggunakan data yang valid dan terpercaya untuk mengidentifikasi keberhasilan serta area yang membutuhkan perbaikan atau intervensi tambahan. • Mengintegrasikan program keluarga berencana dengan program kesehatan ibu dan anak, serta program kesehatan lainnya yang relevan, untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan kesehatan masyarakat. • Memperkuat pengelolaan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi, sehingga memudahkan pemetaan kebutuhan program KB serta memungkinkan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. • Meningkatkan kapasitas petugas KB melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, guna memastikan mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, serta	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			keahlian yang dibutuhkan untuk memberikan layanan yang efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat.	
			• Menyediakan layanan administrasi kependudukan berbasis online dan mobile untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat proses pengurusan dokumen. • Mengembangkan dan menerapkan sistem digitalisasi yang terintegrasi untuk mengelola data kependudukan secara efektif, meminimalkan duplikasi data, dan meningkatkan kemudahan akses antarinstansi terkait. • Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data kependudukan secara berkala, serta memastikan akurasi melalui koordinasi lintas sektor dan optimalisasi pemanfaatan teknologi.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan Ketahanan terhadap resiko bencana	• Menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang mengintegrasikan sektor jalan, irigasi, drainase, dan sumber daya air dengan pendekatan berbasis wilayah untuk memastikan pembangunan yang saling mendukung dan berkelanjutan. • Menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur di daerah dengan akses terbatas, serta melakukan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. • Menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur, seperti penggunaan material yang berkelanjutan, serta sistem drainase dan pengelolaan air yang efisien untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. • Mengoptimalkan penggunaan lahan dengan memastikan penyediaan lahan yang sesuai dengan peruntukannya, serta mempermudah proses perizinan dan pengadaan lahan untuk mendukung kelancaran proyek infrastruktur. • Menyelaraskan semua program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan keselarasan antara rencana jangka panjang dan pembangunan infrastruktur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			• Mengembangkan sistem informasi dan basis data pertanahan daerah melalui pemetaan partisipatif dan identifikasi tanah negara, serta tanah terlantar. • Mendorong penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan reforma agraria melalui pelepasan kawasan, redistribusi tanah, dan legalisasi aset masyarakat. • Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan instansi terkait untuk integrasi kebutuhan ruang pembangunan dengan RTRW. • Meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanahan di daerah dalam pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan dan berkeadilan. • Memprioritaskan intervensi di wilayah perkotaan dan pinggiran kota, kawasan strategis pembangunan infrastruktur, serta desa-desa prioritas reforma agraria.	Pertanahan
			• Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, pengembang, dan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi MBR dan Gen Z, termasuk program subsidi perumahan dan skema kredit mikro. • Mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar di kawasan permukiman, seperti pembangunan akses jalan, instalasi air bersih, sanitasi, dan penyediaan listrik. • Mengintegrasikan program pembangunan infrastruktur dengan program peningkatan kualitas lingkungan agar tercipta kawasan permukiman yang sehat dan layak huni. • Mengembangkan program-program yang melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan kawasan kumuh, seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan pemberian bantuan langsung untuk perbaikan rumah atau fasilitas umum.	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			• Membangun terminal, halte, dan fasilitas parkir modern yang terintegrasi dengan sistem transportasi umum. • Mengembangkan program transportasi perintis untuk menjangkau wilayah pedesaan dan pelosok. • Meningkatkan kualitas armada transportasi umum dan menambah frekuensi layanan	Perhubungan



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan merata. • Menetapkan standar keselamatan transportasi, memperkuat pengawasan operasional, dan melakukan pelatihan keselamatan bagi pengemudi dan pengguna jalan. • Menerapkan sistem e-ticketing dan aplikasi informasi transportasi untuk memudahkan akses dan kenyamanan pengguna. • Mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan moda transportasi.	
			• Mengembangkan kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana yang berbasis data risiko, dengan memperhatikan potensi lokal dan kerentanan wilayah. • Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi peralatan tanggap darurat, serta memperkuat koordinasi lintas instansi dan sektor dalam penanganan bencana. • Mengembangkan dan memperluas cakupan sistem peringatan dini yang berbasis teknologi untuk memberikan informasi cepat dan akurat kepada masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. • Melaksanakan program edukasi dan pelatihan kebencanaan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. • Menyusun mekanisme penanganan pascabencana yang terintegrasi, meliputi pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur, dengan melibatkan berbagai pihak secara kolaboratif.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Bencana)
			• Menyusun dan memperkuat kebijakan serta regulasi yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk penerapan sanksi bagi pelanggar aturan lingkungan. • Mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle), termasuk pengadaan fasilitas pendukung dan peningkatan partisipasi masyarakat. • Mengintegrasikan upaya konservasi daerah aliran sungai (DAS), rehabilitasi hutan lindung, serta pembangunan infrastruktur pengelolaan air bersih dan limbah cair. • Memperkuat program rehabilitasi hutan, mangrove, dan ekosistem alami lainnya untuk	Lingkungan Hidup



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. • Melaksanakan program edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan yang melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren, dan komunitas lokal. • Membangun sistem pemantauan berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan aktivitas yang berpotensi merusaknya. • Mengembangkan strategi mitigasi perubahan iklim, termasuk penurunan emisi karbon, pengelolaan risiko bencana, dan peningkatan adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.	
		Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan	• Meningkatkan pemanfaatan potensi unggulan daerah seperti industri batik, konveksi, serta makanan dan minuman melalui pengembangan klaster industri berbasis wilayah. • Memperkuat kapasitas SDM industri melalui pelatihan vokasional, digitalisasi proses produksi, serta penguasaan standar mutu dan pemasaran digital. • Mendorong kemitraan dan sinergi antara pelaku industri, perguruan tinggi, dan lembaga litbang untuk mendukung inovasi produk, efisiensi produksi, dan hilirisasi industri lokal. • Menyusun roadmap pengembangan industri daerah melalui pemetaan potensi, tantangan, dan kebutuhan modernisasi teknologi produksi. • Memfasilitasi sertifikasi produk, legalitas usaha, dan ekspansi akses pasar baik regional maupun nasional, termasuk branding produk unggulan lokal. • Mengembangkan dan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan industri lokal di sentra batik (Buaran, Kedungwuni, Wiradesa), makanan dan minuman olahan (Sragi), serta wilayah dengan potensi industri berbasis pertanian dan perikanan.	Perindustrian
			• Mendorong pemanfaatan potensi wisata unggulan daerah seperti wisata alam Petungkriyono, wisata pesisir, serta wisata budaya dan batik khas Pekalongan sebagai daya tarik utama. • Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan bagi pelaku wisata, penguatan komunitas sadar wisata, dan pengembangan UMKM pendukung sektor wisata. • Mengembangkan kawasan wisata tematik dan berbasis masyarakat lokal yang	Pariwisata



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			terintegrasi dengan potensi ekonomi kreatif, seni budaya, dan produk lokal. • Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur wisata, termasuk aksesibilitas, amenitas (fasilitas), dan atraksi yang mendukung pengalaman wisata yang nyaman dan aman. • Melakukan promosi pariwisata secara terpadu melalui branding destinasi, digital marketing, serta perluasan jejaring kerjasama promosi antar daerah dan nasional. • Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan melalui model ekowisata dan pengelolaan berbasis komunitas.	
			• Mengoptimalkan potensi lokal dalam pengembangan usaha kecil dan IKM di sektor kerajinan, batik, dan produk olahan pangan yang menjadi unggulan daerah. • Meningkatkan kapasitas koperasi dan pelaku IKM melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, digitalisasi bisnis, dan literasi keuangan. • Mendorong pembentukan dan penguatan koperasi serta IKM berbasis klaster untuk meningkatkan efisiensi produksi, daya saing, dan skala usaha. • Meningkatkan akses permodalan melalui fasilitasi pembiayaan dari perbankan, lembaga keuangan mikro, dan program pemerintah. • Meningkatkan daya saing produk lokal melalui sertifikasi, pengemasan, dan inovasi produk, serta peningkatan kualitas produksi sesuai standar pasar. • Memperluas akses pasar domestik dan internasional dengan penguatan promosi, keikutsertaan dalam pameran, dan integrasi dalam ekosistem e-commerce serta marketplace. • Mendorong pendampingan teknis dan pembentukan ekosistem bisnis yang kondusif bagi pengembangan IKM di kawasan sentra industri lokal seperti Buaran, Kedungwuni, dan Wiradesa.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			• Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal unggulan seperti batik, kerajinan, dan olahan pangan melalui promosi, branding, dan sertifikasi produk. • Mendorong digitalisasi sistem perdagangan UMKM dan IKM, termasuk penguatan	Perdagangan



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			kapasitas pelaku usaha dalam memanfaatkan platform e-commerce dan pemasaran digital. • Mengembangkan sistem distribusi barang yang efisien, mencakup infrastruktur logistik, fasilitas pergudangan, dan kemitraan dengan penyedia jasa distribusi. • Memperkuat peran pasar tradisional dan pasar modern sebagai sarana perdagangan produk lokal, termasuk melalui revitalisasi fasilitas pasar dan peningkatan manajemen pelayanan. • Menjalin kolaborasi antar daerah untuk memperluas perdagangan lintas wilayah dan integrasi produk lokal ke dalam rantai pasok regional dan nasional. • Mengembangkan strategi ekspor produk unggulan daerah, termasuk melalui pelatihan ekspor, fasilitasi sertifikasi ekspor, dan promosi di pasar internasional. • Meningkatkan keterhubungan wilayah pemasaran dengan kawasan transportasi strategis, seperti terminal dan pelabuhan, untuk mendukung efisiensi distribusi dan aksesibilitas.	
			• Pengembangan komoditas unggulan pertanian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian berbasis wilayah. • Penerapan teknologi pertanian yang efisien dan ramah lingkungan, termasuk pertanian presisi, pupuk hayati, sistem irigasi hemat air, dan alat mesin pertanian (alsintan) modern. • Regenerasi petani dan peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan petani melalui pelatihan, sekolah lapang, dan pendampingan teknis berbasis kebutuhan spesifik lokal. • Penguatan sistem irigasi dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan, terutama di kawasan sentra pertanian seperti Kedungwuni, Bojong, Kajen, dan wilayah selatan Kabupaten Pekalongan. • Pengembangan sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian, termasuk infrastruktur pascapanen, pengemasan, dan akses ke pasar digital serta ekspor. • Mendorong kolaborasi antara petani, pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta	Pertanian



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			dalam riset, pengolahan hasil pertanian, dan peningkatan nilai tambah produk. • Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan krisis pangan melalui diversifikasi tanaman, penguatan cadangan pangan lokal, dan sistem peringatan dini pertanian.	
			• Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan laut dan perikanan budidaya air tawar sebagai komoditas unggulan daerah dengan pendekatan berbasis wilayah dan ekosistem. • Peningkatan kapasitas dan profesionalisme nelayan serta petani ikan melalui pelatihan teknologi tangkap, budidaya, dan pengolahan yang ramah lingkungan dan efisien. • Penguatan kelompok usaha nelayan dan pembudidaya ikan sebagai basis kelembagaan ekonomi perikanan rakyat. • Pengembangan dan penyempurnaan infrastruktur perikanan, termasuk perahu, alat tangkap modern, tempat pelelangan ikan (TPI), kolam budidaya, dan sarana pengolahan hasil perikanan. • Pengembangan sistem budidaya perikanan berkelanjutan dan berbasis teknologi, termasuk penggunaan pakan alami, sistem resirkulasi, dan teknologi pemantauan kualitas air. • Peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui fasilitasi pengolahan hasil perikanan, sertifikasi mutu, kemasan produk, dan inovasi olahan. • Penguatan akses pasar produk perikanan lokal, baik melalui pasar regional, digitalisasi perdagangan, maupun peluang ekspor ke pasar internasional. • Peningkatan kolaborasi multipihak antara pemerintah, BUMDes, koperasi, UMKM, dan pelaku industri untuk mendukung ekosistem ekonomi perikanan daerah.	Kelautan dan Perikanan
			• Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia BUMD, khususnya di bidang manajerial, keuangan, pemasaran, dan teknologi, melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi. • Penguatan tata kelola BUMD yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan penerapan prinsip good corporate governance (GCG).	Sekretariat Daerah



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			• Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital monitoring untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas kinerja BUMD. • Penyusunan dan penyempurnaan SOP serta indikator kinerja utama (KPI) untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja usaha BUMD secara sistematis. • Peningkatan permodalan dan dukungan infrastruktur bagi BUMD potensial melalui penyertaan modal daerah yang selektif dan berbasis kajian kelayakan usaha. • Diversifikasi bidang usaha BUMD yang prospektif, sesuai dengan potensi daerah, seperti pengelolaan air bersih, energi terbarukan, perdagangan produk unggulan daerah, atau logistik. • Penguatan kolaborasi antar-BUMD dan dengan pelaku usaha lainnya untuk memperluas skala usaha, berbagi sumber daya, dan mengoptimalkan pelayanan publik. • Pemantapan peran BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah dan penyedia layanan publik, yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).	
			• Optimalisasi potensi sektor unggulan daerah seperti industri batik, pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif melalui pengembangan sektor-sektor yang saling mendukung dan berbasis pada keunggulan lokal. • Penyederhanaan prosedur perizinan dan reformasi birokrasi, dengan memperkuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memudahkan proses investasi dan perizinan usaha. • Penguatan ketersediaan data potensi investasi daerah, termasuk pembuatan profil investasi berbasis sektor unggulan, yang dapat diakses oleh calon investor melalui platform digital. • Promosi investasi yang lebih aktif dan terarah, dengan mengikuti event-event investasi baik secara nasional maupun regional dan memanfaatkan media digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. • Penyusunan program prioritas sektor unggulan yang dapat dijadikan acuan bagi investor yang berbasis keberlanjutan dan ramah lingkungan.	Penanaman Modal



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			• Peningkatan kualitas pelayanan investasi, termasuk pemberian insentif kepada investor yang berkontribusi pada pengembangan sektor-sektor unggulan daerah. • Penguatan kemitraan dengan investor dan dunia usaha melalui penyediaan akses yang mudah terhadap informasi pasar, perizinan, dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Pekalongan. • Pengembangan kawasan industri dan ekonomi berbasis sektor unggulan, dengan memperhatikan pengembangan infrastruktur yang mendukung seperti pusat logistik, dan kawasan ekonomi yang memadai.	
			• Menyusun kebijakan yang fokus pada pemberian pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada masyarakat desa, terutama dalam bidang pertanian, industri kreatif, kewirausahaan, dan teknologi. • Menyediakan akses kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa untuk mendapatkan fasilitas pelatihan, modal usaha, serta pembinaan dalam aspek manajerial dan pemasaran. • Membangun dan meningkatkan infrastruktur desa yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi, seperti akses jalan yang memadai, fasilitas pasar desa, serta infrastruktur pendukung sektor pertanian dan pariwisata. • Mendorong setiap desa untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan berdasarkan kekhasan lokalnya. • Mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di desa. • Menyusun kebijakan untuk memperkuat organisasi desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. • Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah Kabupaten Pekalongan, pemerintah desa, dan sektor swasta untuk mendukung pembangunan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			• Memaksimalkan peran forum-forum kewaspadaan dini (termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan lainnya) dalam upaya pencegahan konflik sosial dengan mengembangkan mekanisme komunikasi yang efektif dan inklusif. • Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat dalam deteksi dan respon dini terhadap potensi konflik, melalui pelatihan dan simulasi penanganan situasi konflik secara terkoordinasi. • Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan pelaporan potensi konflik secara real-time, serta membangun sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan isu-isu yang berpotensi menyebabkan konflik. • Pemetaan wilayah rawan konflik sosial dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik seperti isu sosial, ekonomi, keagamaan, atau batas wilayah, serta menilai potensi dampaknya terhadap masyarakat. • Peningkatan literasi sosial masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang keragaman, toleransi, dan nilai-nilai sosial yang mendukung keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. • Pengembangan sistem deteksi dini berbasis masyarakat, dengan membentuk jejaring mediasi yang dapat mendeteksi permasalahan secara lokal dan memberi solusi sebelum konflik berkembang menjadi lebih besar. • Integrasi sistem kewaspadaan dini dengan kebijakan pembangunan yang inklusif, memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan tidak hanya menciptakan kesejahteraan, tetapi juga mencegah kesenjangan sosial dan potensi konflik. • Penguatan kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat sipil dalam memfasilitasi mediasi konflik, dengan memperkenalkan mekanisme mediasi berbasis kearifan lokal dan prosedur yang disepakati bersama.	Kesatuan Bangsa dan Politik
			• Penguatan kelembagaan dan infrastruktur dasar Satpol PP dan Damkar, dengan peningkatan kapasitas personel dan peralatan yang diperlukan untuk respons cepat terhadap gangguan ketertiban dan kebakaran, termasuk penyediaan alat pemadam	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			kebakaran dan sistem komunikasi yang lebih efektif. • Pembangunan dan implementasi sistem pemantauan serta pelaporan gangguan ketertiban dan kebakaran secara real-time, melalui teknologi informasi yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan peristiwa atau potensi gangguan ketertiban dan kebakaran, serta menyediakan respons cepat dan terkoordinasi dari Satpol PP dan Damkar. • Integrasi sistem penanganan ketertiban umum dan kebakaran dengan sistem perlindungan masyarakat lainnya, seperti sistem peringatan dini bencana, pengelolaan ruang publik, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalkan dampak dari gangguan ketertiban dan kejadian kebakaran. • Peningkatan peran masyarakat dan relawan dalam menjaga ketenteraman lingkungan dengan pembentukan dan pelatihan kelompok relawan yang dapat membantu Satpol PP dan Damkar dalam penanganan dini gangguan ketertiban umum dan kebakaran, serta mendukung upaya mitigasi bencana kebakaran di wilayah masing-masing. • Penguatan sistem edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kebakaran, pengelolaan ketertiban umum, dan cara-cara penanggulangan awal, termasuk melalui kampanye dan pelatihan kepada masyarakat terkait penggunaan alat pemadam kebakaran sederhana dan penanganan konflik di area publik. • Fasilitasi dan pengembangan sistem pelaporan gangguan ketertiban dan kebakaran berbasis teknologi, seperti aplikasi mobile dan platform online yang memungkinkan masyarakat untuk segera melaporkan insiden atau potensi risiko kebakaran serta gangguan ketertiban secara langsung kepada petugas terkait. • Penyediaan infrastruktur pencegahan kebakaran di kawasan rawan, seperti pasar, alun-alun, dan permukiman padat yang rentan terhadap kebakaran, dengan memastikan adanya fasilitas pemadam kebakaran yang memadai serta sistem pemantauan dan pelaporan yang cepat dan efisien.	Masyarakat
			• Mendorong kehadiran bank, koperasi, agen laku pandai, dan fintech di wilayah terpencil	Sekretariat Daerah



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			serta mendukung layanan keuangan digital. • Melaksanakan edukasi keuangan untuk masyarakat, khususnya UMKM, pelajar, petani, perempuan, dan kelompok rentan. • Memperluas akses pembiayaan (KUR, ultra mikro, pembiayaan syariah) dan membina kelayakan usaha masyarakat. • Mendukung pemanfaatan fintech dan peningkatan literasi digital masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan. • Memperkuat peran TPAKD, BUMDes, koperasi, dan sinergi lintas sektor dalam mendorong inklusi keuangan. • Mengembangkan sistem pemantauan IAKD dan pemetaan capaian akses keuangan hingga tingkat desa.	
			• Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan institusi pelatihan vokasional untuk merancang dan menyelenggarakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar kerja. • Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk pengelola UMKM di bidang manajerial, pemasaran, dan keuangan, serta memfasilitasi akses pembiayaan dengan bunga rendah untuk memperkuat kapasitas UMKM dalam menciptakan lapangan kerja. • Menyusun kebijakan insentif bagi investor yang berencana berinvestasi di sektor manufaktur dan pengolahan produk lokal, yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. • Penguatan aksesibilitas bagi kelompok rentan (disabilitas) dalam memperoleh peluang kerja di sektor formal. • Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja. • Mendorong kerja sama dengan lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren untuk memperbarui kurikulum dengan pendekatan berbasis keterampilan, serta meningkatkan program magang di perusahaan untuk memberikan pengalaman langsung kepada	Tenaga Kerja



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			pelajar, santri dan mahasiswa, sehingga mereka lebih siap menghadapi dunia kerja. • Mengembangkan platform digital untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi lowongan pekerjaan di Kabupaten Pekalongan, serta menyelenggarakan job fair rutin dan bekerja sama dengan lembaga penyedia tenaga kerja untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. • Membentuk inkubator bisnis untuk memberikan fasilitas dan pendampingan bagi wirausahawan baru, serta menyediakan pelatihan kewirausahaan yang fokus pada pengembangan ide bisnis dan akses pasar bagi pemuda dan masyarakat yang ingin memulai usaha. • Memperkenalkan teknologi pertanian dan perikanan modern kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas, serta menyediakan pelatihan tentang teknik pertanian dan perikanan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan.	
			• Memperbaiki sistem pemetaan dan pendataan untuk mengidentifikasi PPKS secara akurat dan tepat sasaran, sehingga program penanganan dapat lebih efektif. • Meningkatkan kapasitas LKS dalam memberikan pelayanan sosial yang komprehensif dan mendukung proses rehabilitasi sosial bagi PPKS. • Mengembangkan dan memperluas program rehabilitasi sosial serta perlindungan jaminan sosial yang inklusif, untuk memenuhi hak-hak dasar PPKS. • Menyediakan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan peluang kerja, untuk meningkatkan kesejahteraan PPKS. • Menjamin PPKS memperoleh akses yang mudah dan merata terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak. • Mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung PPKS melalui program keluarga dan komunitas peduli, untuk memperkuat jaringan sosial di sekitar mereka.	Sosial
			• Pemetaan calon peserta transmigran potensial • Peningkatan kapasitas calon transmigran	Transmigrasi
		Meningkatnya implementasi	• Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN dalam Pelayanan Publik, melalui pelatihan	Sekretariat Daerah



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
		tata kelola pemerintahan yang, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik	berbasis kompetensi dan pelayanan prima untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Penekanan pada peningkatan keterampilan interpersonal, etika pelayanan, serta penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. • Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik (Smart Service), dengan mengintegrasikan sistem layanan publik berbasis digital yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pelayanan berbasis aplikasi digital, e-Government, dan portal layanan publik menjadi bagian dari strategi utama. • Optimalisasi Unit Pelayanan Publik (UPP) dan Layanan Keliling, guna menjangkau wilayah terpencil dan memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan. Pelayanan keliling harus dapat mencakup layanan administratif dan sosial, serta dilengkapi dengan fasilitas digital untuk mempermudah proses layanan. • Peningkatan Budaya Kerja ASN yang Berorientasi Pelayanan, melalui penyusunan budaya kerja yang mendukung pelayanan masyarakat yang efisien, cepat, ramah, dan transparan. Pembentukan zona integritas menuju WBK/WBBM sebagai landasan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan akuntabel. • Pemetaan Kualitas dan Persepsi Layanan Publik, dengan melakukan survei rutin dan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Hasil dari pemetaan ini akan digunakan untuk penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP pelayanan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat. • Digitalisasi dan Integrasi Sistem Layanan Antar Perangkat Daerah, melalui integrasi sistem layanan antar perangkat daerah untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat dan terkoordinasi. Data yang dihasilkan dari berbagai sektor akan terhubung dalam sistem informasi yang dapat mempermudah analisis, pengambilan keputusan, serta mempercepat proses layanan publik. • Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam	



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			perencanaan dan evaluasi layanan publik. Penyusunan kebijakan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat dan pengembangan model pelayanan inovatif yang dapat diterapkan di tingkat daerah, termasuk penggunaan platform teknologi untuk mendengarkan dan merespons pengaduan masyarakat. • Peningkatan Akses Layanan untuk Kelompok Rentan, dengan memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak, dan masyarakat miskin, melalui penyusunan layanan yang lebih inklusif dan aksesibel. Hal ini dapat mencakup penyediaan layanan khusus, fasilitas tambahan, serta pelatihan bagi petugas layanan untuk menghadapi tantangan yang ada.	
			• Peningkatan Kapasitas ASN dalam Pengelolaan Kinerja Pemerintah, khususnya bagi perencana dan pelaksana program di setiap OPD, melalui pelatihan teknis dan praktis terkait SAKIP, penyusunan perjanjian kinerja, cascading indikator, serta penggunaan aplikasi e-Kinerja dan e-SAKIP. • Penguatan Sistem Pengukuran Kinerja yang Berbasis Hasil (Outcome-Based), dengan menekankan pentingnya keselarasan antara sasaran strategis daerah, indikator kinerja, dan program kegiatan. Fokus pada pencapaian dampak nyata (outcome) bagi masyarakat, bukan hanya output administratif. • Optimalisasi Peran Inspektorat, Bappeda, dan Bagian Organisasi, sebagai pembina dan pengawas sistem kinerja, dengan memberikan pendampingan intensif, reviu berkala atas kesesuaian indikator kinerja, serta rekomendasi strategis berbasis hasil evaluasi. • Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah (e-Kinerja dan e-SAKIP) secara maksimal, guna meningkatkan akurasi pelaporan, efektivitas pemantauan, dan efisiensi proses evaluasi kinerja. Sistem ini juga harus mampu mengintegrasikan data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. • Pemetaan dan Pendampingan bagi Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai SAKIP Rendah, dengan fokus pada perangkat daerah yang output-nya tidak sejalan dengan indikator kinerja, atau yang belum mencapai kategori BB dalam evaluasi SAKIP. Upaya ini	Sekretariat Daerah



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			termasuk mentoring teknis serta reformulasi indikator dan target kinerja. • Penyusunan dan Penyelarasan Perjanjian Kinerja di Semua Tingkatan, mulai dari kepala perangkat daerah hingga pelaksana teknis, guna menjamin adanya alur logis dari tujuan strategis hingga hasil yang diharapkan di lapangan. • Penguatan Sistem Manajemen Kinerja yang Inklusif dan Berbasis Insentif, melalui penerapan sistem reward and punishment berdasarkan capaian kinerja, serta peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrumen evaluatif dan pertanggungjawaban publik. • Integrasi Evaluasi Kinerja dengan Perencanaan dan Anggaran, untuk memastikan bahwa hasil evaluasi benar-benar dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD, renja OPD, dan pengalokasian anggaran, sehingga kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran.	
			• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia ASN dan Perangkat Desa, melalui pelatihan inovasi, manajemen perubahan, dan penerapan teknologi untuk menghasilkan solusi kreatif terhadap permasalahan pelayanan publik dan pembangunan desa. • Penguatan Kelembagaan Inovasi Daerah, seperti Kelompok Inovasi, Tim Inovasi Daerah (TID), dan laboratorium inovasi di tingkat OPD maupun desa, sebagai motor penggerak identifikasi, pengembangan, dan inkubasi inovasi daerah secara sistematis. • Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi, baik dalam pengumpulan data, diseminasi inovasi, maupun replikasi praktik baik melalui platform bank data inovasi dan dashboard pemantauan inovasi berbasis digital. • Penumbuhan dan Penguatan Budaya Inovatif di Lingkungan Pemerintahan dan Masyarakat, dengan memberikan ruang bagi inisiatif kreatif, memperkuat kompetisi inovasi antar perangkat daerah dan desa, serta mendorong kolaborasi lintas sektor. • Pemetaan Potensi Inovasi dan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah, guna mengukur daya saing dan kapasitas inovatif masing-masing perangkat daerah dan desa sebagai dasar perencanaan dan intervensi pembangunan berbasis inovasi. • Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Inovasi, melalui pembentukan bank	Penelitian dan Pengembangan



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			data inovasi daerah, pendampingan teknis terhadap OPD dan desa inovatif, serta integrasi inovasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, Renja OPD, RKP Desa). • Replikasi dan Scaling-Up Inovasi Terbaik, yang telah terbukti efektif, efisien, dan memberikan dampak signifikan, terutama pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan. • Integrasi Inovasi ke dalam Kebijakan Pembangunan Daerah, agar inovasi tidak hanya menjadi proyek percontohan, tetapi menjadi bagian integral dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan.	
			• Peningkatan Kompetensi ASN dalam Teknologi Informasi dan Manajemen Digital, melalui pelatihan teknis, sertifikasi digital, dan pengembangan kemampuan adaptif terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). • Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Daerah, termasuk perluasan akses internet, pengadaan server lokal/terpusat, pengamanan jaringan, serta sistem backup yang andal. • Pemanfaatan SDM TIK Lokal dan Kemitraan Strategis, dengan melibatkan talenta digital lokal, komunitas teknologi, dan penyedia layanan digital swasta dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem digital pemerintah. • Pengembangan Regulasi dan SOP Layanan Digital, untuk memastikan standarisasi proses, kepastian hukum, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber dalam seluruh aktivitas digital pemerintahan. • Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur dan Sistem Digital Tiap OPD, untuk memetakan kesenjangan digital dan menyusun roadmap transformasi digital berdasarkan tingkat kesiapan dan urgensi layanan publik. • Implementasi Sistem Informasi Terintegrasi dan Layanan Digital Publik, yang ramah pengguna, terhubung lintas sektor, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, transparan, dan akuntabel.	Komunikasi dan informatika



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			- Integrasi Penuh Layanan Digital Antarsektor, dengan penguatan interoperabilitas data dan sistem informasi antar OPD melalui dashboard terintegrasi dan pusat data daerah (data center). - Penguatan Manajemen Keamanan Data dan Sistem, melalui pengembangan sistem enkripsi, kontrol akses, audit digital berkala, serta penguatan tata kelola data yang inklusif dan aman.	
			- Peningkatan Kapasitas SDM TIK Daerah dalam keamanan siber dan manajemen risiko digital melalui pelatihan teknis, simulasi penanganan insiden siber, dan sertifikasi profesional keamanan informasi. - Penguatan Kelembagaan Keamanan Informasi Daerah, termasuk pembentukan unit kerja khusus pengelola keamanan data di lingkup Diskominfo atau lintas OPD serta pengembangan sistem koordinasi keamanan siber daerah. - Audit Keamanan Sistem Informasi dan Pemetaan Risiko, untuk mengetahui kerentanan pada infrastruktur digital OPD serta menyusun langkah mitigasi dan penguatan sistem. - Penyusunan Regulasi Teknis dan SOP Pengamanan Data, termasuk protokol pengelolaan insiden siber, tata kelola data sensitif, serta pengamanan data pada layanan publik berbasis elektronik. - Pengembangan Kebijakan Perlindungan Data secara Teknis dan Manajerial, dengan memperkuat tata kelola SPBE berbasis prinsip keamanan, privasi, dan transparansi. - Implementasi Sistem Keamanan Berlapis dan Terintegrasi, mencakup penggunaan autentikasi ganda, segmentasi jaringan, serta pembaruan sistem keamanan secara berkala untuk seluruh sistem layanan publik digital. - Integrasi Sistem Pengamanan Lintas Sektor, dengan menyinergikan sistem keamanan antar OPD, serta kerja sama dengan instansi pusat (BSrE, BSSN) dalam pengawasan dan penanganan keamanan siber.	Persandian
			Peningkatan Kapasitas SDM Perencana Daerah dalam pendekatan teknokratis dan partisipatif, termasuk pelatihan tentang metode pengumpulan data, analisis kebutuhan	Perencanaan



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			masyarakat, serta pemanfaatan aplikasi perencanaan digital. • Optimalisasi Teknologi Informasi dan Platform Digital, untuk menjangkau partisipasi masyarakat secara luas dan transparan, baik melalui e-musrenbang, survei online, maupun media sosial resmi pemerintah daerah. • Penguatan Forum-Forum Partisipatif Daerah, seperti musrenbang desa, kelurahan, dan kecamatan agar lebih inklusif, responsif terhadap kelompok rentan, serta terdokumentasi secara sistematis. • Evaluasi dan Perbaikan Mekanisme Perencanaan yang Berjalan, guna mengidentifikasi kelemahan partisipasi dan keterpaduan perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up) dan sebaliknya (top-down). • Integrasi Aspirasi Masyarakat ke Dokumen Perencanaan Strategis, seperti RPJMD, RKPD, Renstra OPD, melalui sistem yang memungkinkan penelusuran (traceability) usulan masyarakat hingga tingkat penganggaran. • Implementasi Sistem Perencanaan Berbasis Bukti (evidence-based planning) dan partisipatif, yang menggabungkan data statistik, data spasial, dan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. • Penguatan Forum Koordinasi Antara OPD, Bapperida, dan pokok-pokok pikiran DPRD, untuk memastikan keterpaduan visi, program prioritas, dan pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. • Pemberdayaan Wilayah dengan Partisipasi Rendah, melalui program khusus fasilitasi musrenbang dan literasi perencanaan bagi masyarakat serta tokoh lokal.	
			• Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Data Statistik di OPD, melalui pelatihan teknis pengelolaan, validasi, dan analisis data statistik sektoral sesuai prinsip Satu Data Indonesia. • Penguatan Fungsi dan Koordinasi Forum Satu Data Daerah (FSDD), termasuk pelibatan aktif walidata utama (Bappeda), walidata pendukung (OPD), serta pembina data (BPS) dalam penyusunan metadata dan tata kelola data.	Statistik



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			• Penyediaan Sistem Digitalisasi dan Interoperabilitas Data, untuk memastikan pertukaran data antar OPD berjalan otomatis, akurat, dan dapat dimanfaatkan lintas sektor. • Pemutakhiran dan Validasi Data Statistik Prioritas, terutama data yang digunakan untuk pengukuran kinerja RPJMD, SDGs, serta indikator pembangunan strategis daerah lainnya. • Pemetaan Kondisi Eksisting Statistik Sektoral, guna mengidentifikasi gap data, kualitas, dan kelengkapan, serta menentukan data prioritas pembangunan yang harus tersedia dan mutakhir. • Optimalisasi Kolaborasi dengan BPS, dalam peran sebagai pembina data statistik daerah untuk memastikan standar pengumpulan dan penyajian data sesuai dengan prinsip statistik resmi. • Implementasi Sistem Statistik Terstandar dan Terbuka, dengan portal data yang mudah diakses oleh pembuat kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya. • Integrasi Data Lintas Sektor Secara Bertahap, untuk menciptakan sistem informasi daerah yang saling terhubung dan mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan secara efisien dan tepat sasaran.	
			• Merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan arsip sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan lokal. • Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem kearsipan elektronik untuk mempermudah akses, penyimpanan, dan pengelolaan arsip secara digital. • Memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparatur yang bertanggung jawab di bidang kearsipan agar kompeten dalam mengelola arsip modern. • Membangun dan menyediakan infrastruktur fisik maupun teknologi yang mendukung penyimpanan dan pengelolaan arsip secara aman dan efisien. • Menghubungkan data arsip dengan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan untuk mendukung kebijakan berbasis data yang valid.	Kearsipan



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			• Menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan arsip, termasuk pengelolaan arsip vital, retensi arsip, dan pemusnahan arsip sesuai prosedur.	
			• Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan kepemimpinan aparatur. • Menerapkan sistem penilaian kinerja yang transparan, berbasis indikator yang terukur, dan berorientasi pada hasil kerja. • Memastikan proses rekrutmen dan seleksi aparatur dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi. • Membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, etika, dan profesionalisme di lingkungan aparatur. • Mengembangkan rencana karir yang terstruktur dan adil untuk mendorong motivasi dan loyalitas aparatur. • Melatih aparatur dalam menghadapi dinamika perubahan untuk mendukung keberhasilan program pembangunan daerah. • Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pengelolaan SDM aparatur untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program pengembangan.	• Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			• Memperkuat peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. • Mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengawasan. • Mendorong keterlibatan masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang transparan dan partisipasi aktif dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan publik. • Memastikan setiap unit kerja memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah dan mengurangi risiko penyimpangan. • Memberikan pelatihan dan pendidikan khusus bagi aparatur pengawasan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas mereka dalam menjalankan tugas pengawasan. • Mengedukasi aparatur pemerintah tentang pentingnya pengawasan dan tanggung jawab	• Pengawasan • Sekretariat DPRD



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			mereka dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. • Memberikan sanksi yang tegas, adil, dan transparan terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan. • Memperat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses perumusan kebijakan.	
			• Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah untuk mendukung pelayanan yang berkualitas melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan dan sertifikasi sesuai standar nasional, guna memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran, belanja, dan asset. • Mendorong penerapan dan integrasi sistem e-planning, e-budgeting, e-audit, serta sistem informasi manajemen aset untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. • Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, termasuk melalui inovasi layanan, digitalisasi pemungutan, penguatan basis data wajib pajak/retribusi, dan sinergi dengan BUMD serta mitra swasta untuk meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan. • Mengembangkan kelembagaan pengelolaan BMD yang berbasis pada data akurat dan regulasi yang jelas, serta memperkuat sistem informasi manajemen aset untuk mendukung pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara produktif. • Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan aset daerah saat ini untuk merumuskan langkah perbaikan struktural dan sistemik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. • Mendorong perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan hasil (output-outcome) sebagai bagian dari reformasi manajemen keuangan publik, termasuk pencatatan aset berbasis neraca untuk mendukung akuntabilitas fiskal daerah. • Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan, akuntabel, dan efisien melalui kolaborasi antarlembaga seperti BPKAD, Bappeda, OPD pemungut PAD, unit pengelola BMD, serta pelibatan kecamatan, desa, BUMD, dan mitra	Keuangan



No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
			swasta secara sinergis.	
			• Meningkatkan kapasitas SDM kecamatan dan desa melalui pelatihan pelayanan publik, manajemen administrasi pemerintahan, serta penguatan etika birokrasi. • Mendorong transformasi digital layanan publik kecamatan dan desa melalui penerapan teknologi informasi (e-governance) untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. • Membangun mekanisme koordinasi dan sinergi antara kecamatan, desa, dan OPD terkait untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. • Melakukan penilaian berkala terhadap kualitas pelayanan publik di kecamatan dan desa, termasuk aspek infrastruktur, sistem administrasi, serta tingkat partisipasi masyarakat. • Menyusun dan melaksanakan rencana penguatan kapasitas kecamatan dan desa berbasis data dan kebutuhan aktual, serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pelayanan	Kecamatan

Sumber : Analisis Penyusun; 2025



3. Program Pembangunan Daerah

(1). Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Pekalongan

Program pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan disusun dengan mendasarkan pada program unggulan dan prioritas pembangunan yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Periode 2025-2030 dan penjabaran dari tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi. Berikut program unggulan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029.

(1). Program Hilirisasi dan Penguatan Sektor Unggulan (Pemberdayaan UMKM, petani, buruh dan nelayan yang maju dan mandiri)

- **Pengembangan Industri Hilir Pertanian dan Perikanan:** Membangun atau mengembangkan pusat pengolahan produk pertanian dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional.
- **Pemberdayaan UMKM dan Penguatan Sektor Kreatif:** Menyediakan program pelatihan dan pendampingan untuk UMKM dalam bidang produksi, manajemen, dan pemasaran, serta mendorong sektor industri kreatif melalui inkubator bisnis dan akses permodalan.
- **Pusat Riset dan Inovasi Daerah:** Membentuk pusat riset yang berfokus pada inovasi teknologi tepat guna di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

(2). Program Ketahanan dan Stabilitas Daerah

- **Penguatan Sistem Keamanan dan Ketertiban:** Mengembangkan sistem keamanan terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk pemasangan CCTV di area strategis dan pengembangan aplikasi keamanan untuk masyarakat.
- **Penguatan Sistem Sosial dan Ekonomi:** Membangun pusat kesejahteraan sosial untuk menangani kasus-kasus sosial, seperti kemiskinan ekstrem.
- **Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah:** Optimalisasi penerimaan daerah melalui peningkatan kualitas layanan perpajakan dan retribusi, serta penguatan kerjasama dengan sektor swasta.

(3). Program Pemenuhan Akses Dasar dan Peningkatan Kualitas Hidup

- **Program Kesehatan Universal:** Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan daerah dan membangun pusat kesehatan di wilayah terpencil.
- **Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi:** Meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui pemenuhan sarpras sesuai standar, pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pendidik, serta menyediakan program pendidikan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja lokal.
- **Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja:** meningkatkan kualitas pencari kerja dan tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan, pendampingan dan fasilitasi uji sertifikasi dan kompetensi

(4). Program Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- **Penguatan Kerukunan dan Ketahanan Keluarga:** Mengadakan program dialog antar umat beragama secara rutin, serta menyediakan layanan konseling keluarga untuk memperkuat ketahanan keluarga.



- **Inklusi Sosial dan Pengarusutamaan Gender:** Meluncurkan kampanye kesetaraan gender di tempat kerja dan menyediakan fasilitas inklusif di area publik, termasuk akses bagi penyandang disabilitas.
- (5). **Program Penguatan Mitigasi Bencana:** dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas seluruh komponen masyarakat, penyediaan dokumen kebencanaan yang valid dan akurat, penguatan infrastruktur tahan bencana, dan pengembangan *early warning system*.
- (6). **Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan**
- **Infrastruktur hijau:** pembangunan fasilitas umum dan transportasi yang ramah lingkungan, seperti jalan dengan sistem drainase alami, jalur hijau, dan transportasi publik berbasis energi terbarukan.
 - **Pengelolaan Sumber Daya Alam Terpadu:** pengaturan penggunaan lahan, pengelolaan air, dan pengelolaan sumber daya melalui pendekatan berbasis komunitas.
 - **Kabupaten Pekalongan Bebas Sampah :** program pengelolaan limbah komprehensif yang mencakup pengurangan sampah, pemilahan di sumber, daur ulang, dan pengolahan limbah berteknologi tinggi. Pemerintah daerah akan membangun fasilitas pengolahan sampah modern serta mempromosikan budaya "*Reduce, Reuse, Recycle*" (3R) di masyarakat.
 - **Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan:** Pemerintah daerah akan mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) yang ramah lingkungan, serta menarik investasi yang mempromosikan teknologi hijau.
- (7). **Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkelanjutan**
- **Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan:** Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan dengan standar ramah lingkungan, serta memperkuat sistem irigasi dan pengelolaan sumber daya air, pemenuhan air minum aman dan layak serta peningkatan akses air limbah.
 - **Penanganan Bencana dan Permukiman Kumuh:** Membangun rumah tahan bencana untuk masyarakat terdampak dan melaksanakan program revitalisasi permukiman kumuh dengan pendekatan partisipatif.
 - **Pengelolaan Sampah dan Air Limbah:** Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu dan air limbah domestik di setiap kecamatan, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
- (8). **Program Pembangunan Wilayah yang Serasi dan Berkeadilan**
- **Penyusunan Tata Ruang Wilayah:** Mempercepat penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memastikan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.
 - **Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kota:** Mengembangkan infrastruktur yang mendukung keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan pedesaan, dengan fokus pada fasilitas umum dan layanan dasar.
 - **Pemenuhan Akses Dasar:** Mengimplementasikan program air minum bersih dan sanitasi di seluruh desa, serta membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (9). **Program Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik**
- **Penataan dan Penguatan Regulasi:** Menyusun regulasi yang jelas dan transparan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif.



- **Peningkatan Kualitas ASN:** Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, serta menerapkan sistem evaluasi kinerja yang berbasis hasil.
- **Digitalisasi Pelayanan Publik:** Mengimplementasikan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi, seperti *e-government* dan layanan satu pintu online, untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Program unggulan yang ada tersebut perlu dipetakan ke dalam program nomenklatur supaya dapat terintegrasi ke dalam proses perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Pemetaan program unggulan tersebut ke dalam program nomenklatur yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran		Outcome	Program Prioritas (sesuai Permendagri 90/2019)	Program Unggulan Kepala Daerah
Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, dan Sejahtera	a.	Meningkatnya SDM Kabupaten Pekalongan yang Unggul dan Inklusif	Meningkatnya ketersediaan dan kompetensi tenaga kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Pemenuhan Akses Dasar dan Peningkatan Kualitas Hidup (Program Kesehatan Universal)
			Meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta ketahanan pangan rumah tangga.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Meningkatnya akses, mutu, dan tata kelola layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pemenuhan Akses Dasar dan Peningkatan Kualitas Hidup (Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi)
			Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
			Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran		Outcome	Program Prioritas (sesuai Permendagri 90/2019)	Program Unggulan Kepala Daerah
			Meningkatnya prestasi, partisipasi, dan budaya olahraga di masyarakat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (Inklusi Sosial dan Pengarusutamaan Gender)
			Meningkatnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah secara berkelanjutan	Program Pengembangan Kebudayaan	
			Terlestarikannya cagar budaya sebagai warisan sejarah dan identitas daerah	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Meningkatnya implementasi PUG dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (Inklusi Sosial dan Pengarusutamaan Gender)
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.	Program Perlindungan Perempuan	
			Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.	Program Perlindungan Khusus Anak	
			Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan penduduk secara menyeluruh dan berkelanjutan	Program Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dll)	Program Pencatatan Sipil	
	b.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap resiko bencana	Meningkatnya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air secara berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkelanjutan (Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan)
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan air minum yang aman, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
	Meningkatnya cakupan dan kualitas pengelolaan air limbah domestik		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pembangunan Wilayah yang	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran		Outcome	Program Prioritas (sesuai Permendagri 90/2019)	Program Unggulan Kepala Daerah
			Meningkatnya kapasitas sistem drainase jalan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Serasi dan Berkeadilan (Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kota) Program Pembangunan Wilayah yang Serasi dan Berkeadilan (Pemenuhan Akses Dasar)
			Meningkatnya kualitas jaringan jalan untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan wilayah.	Program Penyelenggaraan Jalan	
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
			Meningkatnya kualitas penataan ruang wilayah.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Pembangunan Wilayah yang Serasi dan Berkeadilan (Penyusunan Tata Ruang Wilayah)
			Meningkatnya kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkelanjutan (Penanganan Bencana dan Permukiman Kumuh)
			Meningkatnya RTKH yang ditangani	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan (Infrastruktur hijau) Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan (Pengelolaan Sumber Daya Alam Terpadu)
			Meningkatnya pengelolaan sampah dari sumber hingga ke TPA.	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan (Kabupaten Pekalongan Bebas Sampah)
			Meningkatnya pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang aman, terkendali, dan sesuai dengan standar lingkungan.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkelanjutan (Pengelolaan Sampah dan Air Limbah)
	c.	Meningkatnya perekonomian daerah	Tersusunnya perencanaan	Program Perencanaan Dan Pembangunan	Program Hilirisasi dan Penguatan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas (sesuai Permendagri 90/2019)	Program Unggulan Kepala Daerah
	yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan	pembangunan industri yang terarah dan mendorong pertumbuhan industri berdaya saing.	Industri	Sektor Unggulan (Pengembangan Industri Hilir Pertanian dan Perikanan)
		Meningkatnya kualitas dan daya saing destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
		Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata yang efektif dan terintegrasi.	Program Pemasaran Pariwisata	
		Meningkatnya kemandirian koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Program Hilirisasi dan Penguatan Sektor Unggulan (Pemberdayaan UMKM dan Penguatan Sektor Kreatif)
		Meningkatnya kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
		Meningkatnya akses pasar, pembiayaan, teknologi, dan inovasi bagi UMKM dalam rangka peningkatan produktivitas	Program Pengembangan UMKM	
		Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan efisiensi sistem logistik perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Meningkatnya penggunaan dan daya saing produk dalam negeri di pasar domestik.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana produksi pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Hilirisasi dan Penguatan Sektor Unggulan (Pengembangan Industri Hilir Pertanian dan Perikanan)
		Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi dan inovasi pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	
		Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Meningkatnya nilai tambah dan akses pasar hasil perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Meningkatnya jejaring kerja sama antar-desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran		Outcome	Program Prioritas (sesuai Permendagri 90/2019)	Program Unggulan Kepala Daerah
			dan pihak lain dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.		
			Meningkatnya daya tarik daerah sebagai lokasi investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Ketahanan dan Stabilitas Daerah (Penguatan Sistem Keamanan dan Ketertiban)
			Meningkatnya minat dan realisasi investasi di daerah	Program Promosi Penanaman Modal	
			Meningkatnya rasa aman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pemenuhan Akses Dasar dan Peningkatan Kualitas Hidup (Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja)
			Meningkatnya kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya pemulihan dan fungsi sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan untuk hidup mandiri.	Program Rehabilitasi Sosial	Program Ketahanan dan Stabilitas Daerah (Penguatan Sistem Sosial dan Ekonomi)
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
	d.	Meningkatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik	Tersedianya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik (Penataan dan Penguatan Regulasi)
			Meningkatnya kapasitas riset dan inovasi daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan yang adaptif dan solutif	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Program Hilirisasi dan Penguatan Sektor Unggulan (Pusat Riset dan Inovasi Daerah)
			Meningkatnya diseminasi informasi yang akurat, transparan, dan inklusif	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
			Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui pengembangan dan pemanfaatan aplikasi informatika yang terpadu dan andal.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas (sesuai Permendagri 90/2019)	Program Unggulan Kepala Daerah
		daerah yang terukur dan berorientasi hasil		
		Meningkatnya sinergi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Tersedianya data dan statistik sektoral untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Meningkatnya tertib arsip dinamis dan statis dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Program Pengelolaan Arsip	
		Meningkatnya profesionalisme, kompetensi, dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Kepegawaian Daerah	Program Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik (Peningkatan Kualitas ASN)
		Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		Tersusunnya kebijakan internal serta meningkatnya kapasitas perangkat daerah melalui pendampingan dan asistensi yang berkelanjutan.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
		Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Meningkatnya tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah secara legal dan efisien	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Ketahanan dan Stabilitas Daerah (Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah)
		Meningkatnya kapasitas dan optimalisasi pendapatan daerah yang mendukung kemandirian fiskal.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	



Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas (sesuai Permendagri 90/2019)	Program Unggulan Kepala Daerah
		responsif, transparan, dan akuntabel.		
		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

Sumber : Analisis Penyusun; 2025

Selain program unggulan, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan selama periode RPJMD ini. Kegiatan prioritas ini meliputi:

(1). Ruas tuntas jalan Kabupaten Pekalongan

Pembangunan dan peningkatan ruas jalan di Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu prioritas strategis untuk mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah. **Program Ruas Jalan Tuntas** merupakan upaya konkret pemerintah daerah dalam memastikan konektivitas antarwilayah dapat berjalan optimal dengan kondisi jalan yang layak, aman, dan berkualitas. Melalui program ini, perbaikan jalan rusak, pelebaran jalan strategis, dan pembangunan akses baru ke wilayah-wilayah terpencil terus ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke pusat-pusat pelayanan publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.

Program Ruas Jalan Tuntas bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Pekalongan. Banyak daerah perbukitan dan pedesaan yang selama ini terkendala akses jalan, sehingga menghambat perkembangan potensi ekonomi lokal. Dengan membangun infrastruktur jalan yang memadai, pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat mendorong efisiensi distribusi hasil pertanian dan membuka peluang wisata di destinasi-destinasi yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan, sekaligus memacu pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah secara berkelanjutan.

(2). Kesehatan gratis bagi semua Kabupaten Pekalongan

Penyediaan layanan kesehatan gratis bagi semua Masyarakat Kabupaten Pekalongan merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. **Program Kersehatan Gratis Bagi Semua** ini dirancang untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti keluarga miskin, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak, memiliki akses yang mudah ke layanan kesehatan berkualitas. Layanan kesehatan gratis mencakup pemeriksaan kesehatan dasar, pengobatan penyakit ringan hingga kronis, imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta penanganan gawat darurat. **Program Kersehatan Gratis Bagi Semua** ini juga mencakup pembebasan biaya di fasilitas kesehatan pemerintah, seperti puskesmas dan rumah sakit daerah, sehingga tidak ada yang merasa terbebani secara finansial untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.



Program Kesehatan Gratis Bagi Semua ini juga menjadi upaya strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pekalongan secara menyeluruh. Selain layanan kuratif, program ini didukung oleh upaya preventif dan promotif, seperti edukasi kesehatan, penyuluhan pola hidup sehat, dan pencegahan penyakit menular serta tidak menular. Fokus khusus diberikan pada pengurangan angka stunting melalui pemberian makanan tambahan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil, serta peningkatan gizi masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga mengoptimalkan kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala di tingkat desa, dengan melibatkan tenaga kesehatan profesional dan memanfaatkan teknologi kesehatan yang modern. Selain itu, **Program Kesehatan Gratis Bagi Semua** ini juga melibatkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan bagi yang memerlukan rujukan ke rumah sakit tingkat lanjut.

(3). Pendidikan untuk semua sekolah negeri dan swasta

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua anak, baik di sekolah negeri maupun swasta. **Program Pendidikan untuk Semua** dirancang untuk memastikan bahwa setiap siswa, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, dapat mengakses pendidikan berkualitas. Melalui **Program Pendidikan untuk Semua** Pemerintah Kabupaten Pekalongan memberikan dukungan berupa subsidi pendidikan, beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta pengadaan fasilitas belajar yang memadai di seluruh sekolah negeri dan swasta.

Selain itu, pendidikan untuk semua juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam proses belajar. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas mendapatkan akses pendidikan yang setara melalui penyediaan sekolah inklusi dan pelatihan khusus bagi tenaga pendidik. Sekolah swasta yang berperan penting dalam mendukung pemerataan pendidikan juga diberikan perhatian melalui bantuan operasional sekolah, peningkatan kapasitas guru, dan pengawasan standar mutu pendidikan.

(4). Penanganan rob di wilayah pesisir

Penanganan rob di wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan menjadi prioritas mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Rob, atau banjir akibat naiknya permukaan air laut, sering melanda wilayah ini, terutama saat pasang laut tinggi. Pemerintah daerah bersama berbagai pihak telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi masalah ini, seperti pembangunan tanggul laut, peningkatan sistem drainase, serta rehabilitasi dan restorasi ekosistem mangrove. Selain itu, masyarakat juga diajak berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan ikut menanam mangrove untuk memperkuat pertahanan alami pesisir.

(5). Pemberdayaan UMKM, petani, buruh dan nelayan yang maju dan mandiri

Dalam lima tahun ke depan, Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk memberdayakan UMKM, petani, buruh, dan nelayan. Dukungan terhadap UMKM akan difokuskan pada pelatihan, akses permodalan, dan digitalisasi, sehingga pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, kemitraan dengan lembaga keuangan dan perusahaan besar akan diperkuat untuk menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Bagi petani dan nelayan, pemberdayaan akan dilakukan melalui peningkatan teknologi produksi, akses terhadap alat modern, serta penguatan koperasi dan kelompok usaha. Program seperti *smart farming* dan alat tangkap ramah lingkungan akan diterapkan untuk meningkatkan hasil produksi, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan menambah nilai produk lokal.



(6). Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah

Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bojonglarang di Kabupaten Pekalongan saat ini telah mengalami kelebihan kapasitas (*overload*). Tumpukan sampah yang melebihi kapasitas ini menimbulkan permasalahan lingkungan serius, yang berpotensi menjadi gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, revitalisasi TPA menjadi prioritas utama dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka pengurangan sampah di Kabupaten Pekalongan juga akan dilakukan percepatan pengurangan sampah dari sumbernya melalui penerapan konsep *3R (Reduce, Reuse, Recycle)*. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha dalam memilah sampah akan menjadi bagian penting dari upaya ini. Selain itu, pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi alternatif, akan diupayakan untuk menambah nilai ekonomis dari sampah yang diolah di TPA.

(7). Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menginisiasi program Kartu Disabilitas dan Aplikasi Sosial Peduli sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Program ini bertujuan untuk memberikan identitas resmi bagi penyandang disabilitas sekaligus mempermudah akses mereka terhadap layanan publik secara inklusif. Dengan kepemilikan Kartu Disabilitas, individu penyandang disabilitas mendapatkan prioritas dalam berbagai layanan administrasi dan sosial, seperti pelayanan kesehatan, pembuatan dokumen kependudukan, serta akses terhadap program bantuan sosial yang tersedia.

Selain itu, Aplikasi Sosial Peduli dikembangkan guna memperkuat sistem pendataan dan registrasi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan. Melalui aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas secara lebih akurat, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran. Sosialisasi aplikasi ini menjadi aspek penting dalam implementasi program, guna memastikan bahwa seluruh penyandang disabilitas di wilayah tersebut dapat mengakses layanan yang telah disediakan secara optimal.

(8). Pengembangan wilayah industri untuk peningkatan investasi

Dalam upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Pekalongan berencana mengembangkan wilayah industri secara signifikan dalam lima tahun ke depan. Kawasan ini dirancang untuk menarik investor lokal dan asing. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan akan memberikan berbagai insentif dan kemudahan perizinan bagi para investor untuk mendorong realisasi investasi. Dengan strategi ini, diharapkan dalam lima tahun ke depan, Kabupaten Pekalongan dapat menjadi pusat industri yang kompetitif, menarik investasi yang substansial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(2). Integrasi Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Jawa Tengah, Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan kebijakan 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis. Penyelarasan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.11.
Integrasi Program Prioritas Provinsi dalam Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Pekalongan

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/ Aksi/Taktis		Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)		(3)
Indeks Reformasi Birokrasi			
	PP.	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas
	PI.	Integrasi Aplikasi pelayanan ke dalam Jateng Ngopeni	Implementasi Sistem Informasi Terintegrasi dan Layanan Digital Publik, yang ramah pengguna, terhubung lintas sektor, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, transparan, dan akuntabel
	PI.	Smart Response diwujudkan dengan Call Center 24 jam “Jateng Nglakoni”	
	PI.	Kantor Gubernur Rumah Rakyat	-
	PI.	Digitalisasi Manajemen Arsip	Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem kearsipan elektronik untuk mempermudah akses, penyimpanan, dan pengelolaan arsip secara digital.
	PA.	Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah	-
	PA.	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Memperkuat kebijakan untuk perlindungan perempuan dan anak, termasuk sistem pengawasan kekerasan berbasis masyarakat
	PA.	Pengembangan sister province	-
	PA.	Membentuk satuan tugas pengamanan data digital “Cyber Security Jawa Tengah” dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK	Penguatan Kelembagaan Keamanan Informasi Daerah, termasuk pembentukan unit kerja khusus pengelola keamanan data di lingkup Diskominfo atau lintas OPD serta pengembangan sistem koordinasi keamanan siber daerah
	PA.	Program Kerjasama Forkopimda	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pemerintahan
	PT.	Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima.	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah untuk mendukung pelayanan yang berkualitas melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan dan sertifikasi sesuai standar nasional, guna memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran, belanja, dan asset.
	PT.	Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah.	Penguatan kelembagaan dan infrastruktur dasar Satpol PP dan Damkar, dengan peningkatan kapasitas personel dan peralatan yang diperlukan untuk respons



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/ Aksi/Taktis		Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)		(3)
			cepat terhadap gangguan ketertiban dan kebakaran, termasuk penyediaan alat pemadam kebakaran dan sistem komunikasi yang lebih efektif.
	PT.	Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalinnya Partisipasi berbasis Hexahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media, dan lembaga keuangan).	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penjaminan kredit nasional untuk memastikan terlaksananya program penjaminan yang efektif dan efisien.
	PT.	Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah.	Penumbuhan dan Penguatan Budaya Inovatif di Lingkungan Pemerintahan dan Masyarakat, dengan memberikan ruang bagi inisiatif kreatif, memperkuat kompetisi inovasi antar perangkat daerah dan desa, serta mendorong kolaborasi lintas sektor.
Indeks Integritas Nasional			
	PI.	Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Peningkatan Budaya Kerja ASN yang Berorientasi Pelayanan, melalui penyusunan budaya kerja yang mendukung pelayanan masyarakat yang efisien, cepat, ramah, dan transparan. Pembentukan zona integritas menuju WBK/WBBM sebagai landasan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan akuntabel.
	PI.	Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa	Memperkuat peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
	PA.	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	Menedukasi aparatur pemerintah tentang pentingnya pengawasan dan tanggung jawab mereka dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
	PA.	Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C.	-
Otonomi Fiskal Daerah			
	PI.	Riset Potensi Daerah secara berkala berbasis Potensi Wilayah.	Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, termasuk melalui inovasi layanan, digitalisasi pemungutan, penguatan basis data wajib pajak/retribusi, dan sinergi dengan BUMD serta mitra swasta untuk meningkatkan pendapatan daerah secara
	PA.	Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal.	



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/ Aksi/Taktis		Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)		(3)
			berkelanjutan
	PA.	Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD.	Penguatan tata kelola BUMD yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan penerapan prinsip good corporate governance (GCG).
	PT.	Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima.	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah untuk mendukung pelayanan yang berkualitas melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan dan sertifikasi sesuai standar nasional, guna memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran, belanja, dan asset
Pertumbuhan Ekonomi			
	PP.	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim.	Mendorong pemanfaatan potensi wisata unggulan daerah seperti wisata alam Petungkriyono, wisata pesisir, serta wisata budaya dan batik khas Pekalongan sebagai daya tarik utama.
	PP.	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri.	Mengembangkan sistem distribusi barang yang efisien, mencakup infrastruktur logistik, fasilitas pergudangan, dan kemitraan dengan penyedia jasa distribusi.
	PP.	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja.	Mendorong kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memperbarui kurikulum dengan pendekatan berbasis keterampilan, serta meningkatkan program magang di perusahaan untuk memberikan pengalaman langsung kepada pelajar dan mahasiswa, sehingga mereka lebih siap menghadapi dunia kerja.
	PI.	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Menyusun dan melaksanakan rencana penguatan kapasitas kecamatan dan desa berbasis data dan kebutuhan aktual, serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pelayanan
	PI.	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Mendorong pemanfaatan potensi wisata unggulan daerah seperti wisata alam Petungkriyono, wisata pesisir, serta wisata budaya dan batik khas Pekalongan sebagai daya tarik utama.
	PI.	Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah	
	PI.	Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening	
	PI.	Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa	-



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/ Aksi/Taktis		Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)		(3)
	PI.	Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal	Membangun dan mengelola pusat kegiatan seni budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat edukasi, pelatihan, dan pertunjukan seni.
	PA.	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Meningkatkan daya saing produk lokal melalui sertifikasi, pengemasan, dan inovasi produk, serta peningkatan kualitas produksi sesuai standar pasar
	PA.	Pemenuhan dan Peningkatan akses internet di desa (102 desa blankspot)	Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Daerah, termasuk perluasan akses internet, pengadaan server lokal/terpusat, pengamanan jaringan, serta sistem backup yang andal.
	PA.	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Meningkatkan akses permodalan melalui fasilitasi pembiayaan dari perbankan, lembaga keuangan mikro, dan program pemerintah
	PA.	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter	Menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang mengintegrasikan sektor jalan, irigasi, drainase, dan sumber daya air dengan pendekatan berbasis wilayah untuk memastikan pembangunan yang saling mendukung dan berkelanjutan
	PA.	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)	Membangun terminal, halte, dan fasilitas parkir modern yang terintegrasi dengan sistem transportasi umum
	PA.	Memastikan Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi	
	PA.	Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global	-
	PA.	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api	Membangun terminal, halte, dan fasilitas parkir modern yang terintegrasi dengan sistem transportasi umum.
	PA.	Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, pengembang, dan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi MBR dan Gen Z, termasuk program subsidi perumahan dan skema kredit mikro



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/ Aksi/Taktis		Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)		(3)
	PA.	Mendorong Pengembangan Kawasan Industri berorientasi lingkungan (industri hijau)	Menyusun roadmap pengembangan industri daerah melalui pemetaan potensi, tantangan, dan kebutuhan modernisasi teknologi produksi
	PA.	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung Potensi Ekonomi Sungai lainnya	-
	PA.	Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	Pengembangan komoditas unggulan pertanian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian berbasis wilayah
	PA.	Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian	Penerapan teknologi pertanian yang efisien dan ramah lingkungan, termasuk pertanian presisi, pupuk hayati, sistem irigasi hemat air, dan alat mesin pertanian (alsintan) modern
	PA.	Pendirian Koperasi Buruh	Mendorong pembentukan dan penguatan koperasi serta IKM berbasis klaster untuk meningkatkan efisiensi produksi, daya saing, dan skala usaha
	PA.	Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora	Mengadakan event seni dan budaya secara rutin untuk meningkatkan apresiasi masyarakat, menarik wisatawan, dan mempromosikan warisan budaya lokal
	PA.	Event olahraga memancing terbesar di Asia	Mengadakan event olahraga yang berkala dan berjenjang, seperti kejuaraan lokal, nasional, dan internasional, untuk mengasah kemampuan atlet serta meningkatkan daya saing
	PA.	Mendukung dan menjadikan Kegiatan Tarkam (Pertandingan Antar Kampung) masuk ke dalam Kalender Olahraga Provinsi	
	PA.	Pengembangan Investasi berbasis Padat Modal Infrastruktur Padat Karya	Penyusunan program prioritas sektor unggulan yang dapat dijadikan acuan bagi investor, serta menyiapkan paket-paket investasi yang menarik, berbasis keberlanjutan dan ramah lingkungan
	PA.	Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa	Pengembangan komoditas unggulan pertanian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian berbasis wilayah
	PA.	Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional	-
	PA.	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Menyediakan akses kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa untuk mendapatkan fasilitas pelatihan, modal usaha, serta pembinaan dalam aspek manajerial dan pemasaran
	PA.	Mendorong Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Budaya di	-



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/ Aksi/Taktis		Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)		(3)
		wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan kebumen) dengan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa	
	PA.	Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah	-
	PA.	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Menyusun roadmap pengembangan industri daerah melalui pemetaan potensi, tantangan, dan kebutuhan modernisasi teknologi produksi
	PA.	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan bagi pelaku wisata, penguatan komunitas sadar wisata, dan pengembangan UMKM pendukung sektor wisata
	PT.	Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi	Melaksanakan program edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan yang melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren, dan komunitas lokal.
	PT.	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	• Penguatan akses pasar produk perikanan lokal, baik melalui pasar regional, digitalisasi perdagangan, maupun peluang ekspor ke pasar internasional • Regenerasi petani dan peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan petani melalui pelatihan, sekolah lapang, dan pendampingan teknis berbasis kebutuhan spesifik lokal
	PT.	BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap BUMDes di Jateng)	Menyediakan akses kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa untuk mendapatkan fasilitas pelatihan, modal usaha, serta pembinaan dalam aspek manajerial dan pemasaran
	PT.	Revitalisasi embung	Menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang mengintegrasikan sektor jalan, irigasi, drainase, dan sumber daya air dengan pendekatan berbasis wilayah untuk memastikan pembangunan yang saling mendukung dan berkelanjutan.
	PT.	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Menyusun roadmap pengembangan industri daerah melalui pemetaan potensi, tantangan, dan kebutuhan modernisasi teknologi produksi.
	PT.	Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan	Penerapan teknologi pertanian yang efisien dan ramah lingkungan, termasuk pertanian presisi, pupuk hayati, sistem



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/ Aksi/Taktis		Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)		(3)
			irigasi hemat air, dan alat mesin pertanian (alsintan) modern.
	PT.	Revitalisasi Pasar Tradisional yang terintegrasi berbasis Digital	Memperkuat peran pasar tradisional dan pasar modern sebagai sarana perdagangan produk lokal, termasuk melalui revitalisasi fasilitas pasar dan peningkatan manajemen pelayanan.
	PT.	Penguatan dan Pembinaan E-Sport Jawa Tengah	Menyediakan program pembinaan yang berkelanjutan untuk atlet berbakat di berbagai cabang olahraga, baik melalui pelatihan intensif maupun kompetisi reguler.
	PT.	Penyediaan benih yang berkualitas	Penerapan teknologi pertanian yang efisien dan ramah lingkungan, termasuk pertanian presisi, pupuk hayati, sistem irigasi hemat air, dan alat mesin pertanian (alsintan) modern.
	PT.	Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian	
	PT.	Regulasi Pengembangan kawasan industri	Menyusun roadmap pengembangan industri daerah melalui pemetaan potensi, tantangan, dan kebutuhan modernisasi teknologi produksi.
	PT.	Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta Dunia Usaha	Penyederhanaan prosedur perizinan dan reformasi birokrasi, dengan memperkuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memudahkan proses investasi dan perizinan usaha.
	PT.	Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket-marketplace) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (E-Commerce).	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia BUMD, khususnya di bidang manajerial, keuangan, pemasaran, dan teknologi, melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi.
	PT.	Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Dunia Usaha dalam pembinaan olahraga, seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program “PERUSAHAAN ASUH”.	Menyediakan program pembinaan yang berkelanjutan untuk atlet berbakat di berbagai cabang olahraga, baik melalui pelatihan intensif maupun kompetisi reguler.
Tingkat Pengangguran Terbuka			
	PP.	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan institusi pelatihan vokasional untuk merancang dan menyelenggarakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar kerja
	PA.	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan	Mengoptimalkan peran pendidikan nonformal seperti Pondok Pesantren, PKBM, kursus, dan pelatihan keterampilan.



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/ Aksi/Taktis		Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)		(3)
		swasta	
	PA.	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan institusi pelatihan vokasional untuk merancang dan menyelenggarakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar kerja.
	PA.	Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja	Mendorong kerja sama dengan lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren untuk memperbarui kurikulum dengan pendekatan berbasis keterampilan, serta meningkatkan program magang di perusahaan untuk memberikan pengalaman langsung kepada pelajar, santri dan mahasiswa, sehingga mereka lebih siap menghadapi dunia kerja.
	PA.	Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sosial	Melaksanakan program edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan yang melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren, dan komunitas lokal.
	PT.	Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)	Mendorong kerja sama dengan lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren untuk memperbarui kurikulum dengan pendekatan berbasis keterampilan, serta meningkatkan program magang di perusahaan untuk memberikan pengalaman langsung kepada pelajar, santri dan mahasiswa, sehingga mereka lebih siap menghadapi dunia kerja.
	PT.	Perlindungan Hak Buruh melalui Fasilitasi Peraturan Gubernur tentang Payung Hukum Ketenagakerjaan	Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.
	PT.	Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas	Penguatan aksesibilitas bagi kelompok rentan (disabilitas) dalam memperoleh peluang kerja di sektor formal.
	PT.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Penguatan kelompok usaha nelayan dan pembudidaya ikan sebagai basis kelembagaan ekonomi perikanan rakyat.
Indeks Demokrasi Indonesia			
	PP.	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan.	Peningkatan literasi sosial masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang keragaman, toleransi, dan nilai-nilai sosial



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/ Aksi/Taktis		Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)		(3)
			yang mendukung keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
	PA.	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan.	Mendorong pengembangan DRPPA di desa-desa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan anak.
	PA.	Mengusulkan Lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO	-
	PA.	Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Menanamkan nilai-nilai moral, budaya, dan kemandirian melalui program pendidikan karakter.
	PA.	Penguatan dan Promosi Moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri.	Peningkatan literasi sosial masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang keragaman, toleransi, dan nilai-nilai sosial yang mendukung keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
	PA.	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan.	Memaksimalkan peran forum-forum kewaspadaan dini (termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan lainnya) dalam upaya pencegahan konflik sosial dengan mengembangkan mekanisme komunikasi yang efektif dan inklusif.
	PT.	Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan.	Mengkampanyekan kesetaraan gender, pencegahan pernikahan dini, dan kekerasan melalui tokoh masyarakat dan media lokal.
	PT.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya.	Membangun dan mengelola pusat kegiatan seni budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat edukasi, pelatihan, dan pertunjukan seni.
Indeks Modal Manusia			
	PP.	Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren	Mengoptimalkan peran pendidikan nonformal seperti Pondok Pesantren, PKBM, kursus, dan pelatihan keterampilan.
	PP.	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Optimalisasi anggaran kesehatan, pengelolaan dana yang transparan, dan perbaikan tata kelola data kesehatan guna mendukung pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
	PP.	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan Kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan	Mengembangkan kompetensi guru termasuk pengasuh pondok pesantren melalui pelatihan, sertifikasi, dan program pengembangan profesional berkelanjutan



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/ Aksi/Taktis		Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)		(3)
		luar negeri bagi yang berprestasi.	
	PI.	Percepatan penanganan stunting melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil.	Fasilitasi dan penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
	PI.	Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran, Akses Internet).	Memberikan dukungan beasiswa, bantuan pendidikan, dan program kesehatan (penyediaan makanan bergizi) untuk peserta didik.
	PA.	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Memperluas fasilitas kesehatan di wilayah terpencil dan meningkatkan layanan berbasis teknologi/digital services.
	PA.	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Meningkatkan pemerataan dan kompetensi tenaga kesehatan dan melengkapi fasilitas dengan peralatan medis modern.
	PA.	Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di rumah sakit	Memperluas fasilitas kesehatan di wilayah terpencil dan meningkatkan layanan berbasis teknologi/digital services.
	PA.	BOSDa Madrasah Aliyah	Memberikan dukungan beasiswa, bantuan pendidikan, dan program kesehatan (penyediaan makanan bergizi) untuk peserta didik.
	PA.	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	Menjalin kerja sama lintas sektor dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
	PA.	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Menyediakan program pembinaan yang berkelanjutan untuk atlet berbakat di berbagai cabang olahraga, baik melalui pelatihan intensif maupun kompetisi reguler.
	PA.	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Memastikan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki akses ke pendidikan berkualitas.
	PT.	Pap smear gratis (skrining Ca serviks)	Pengendalian penyakit menular (TB, malaria, DBD) dan penanganan penyakit tidak menular.
	PT.	Peningkatan operasional kader Posyandu	Kerja sama lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan pemerintah provinsi dan pusat.
	PT.	Peningkatan kualitas hidup lansia	Edukasi pola hidup sehat, kampanye vaksinasi, dan peningkatan sanitasi melalui PHBS.
	PT.	Mendukung Jawa Tengah bebas Peredaran Narkoba.	Peningkatan literasi sosial masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang keragaman, toleransi, dan nilai-nilai sosial yang mendukung keharmonisan dalam



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/ Aksi/Taktis		Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)		(3)
			kehidupan bermasyarakat.
	PT.	Pelindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah.	Kerja sama lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan pemerintah provinsi dan pusat.
	PT.	Penanganan Bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah Zero <i>Bullying</i> melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.	Menanamkan nilai-nilai moral, budaya, dan kemandirian melalui program pendidikan karakter.
	PT.	Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa.	Memastikan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki akses ke pendidikan berkualitas.
	PT.	Cek kesehatan gratis.	Optimalisasi anggaran kesehatan, pengelolaan dana yang transparan, dan perbaikan tata kelola data kesehatan guna mendukung pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Angka Kemiskinan			
	PP.	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.	Membangun dan meningkatkan infrastruktur desa yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi, seperti akses jalan yang memadai, fasilitas pasar desa, serta infrastruktur pendukung sektor pertanian dan pariwisata.
	PP.	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional.	• Mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar di kawasan permukiman, seperti pembangunan akses jalan, instalasi air bersih, sanitasi, dan penyediaan listrik. • Membangun dan merehabilitasi fasilitas olahraga yang representatif untuk mendukung pelatihan dan pertandingan atlet, seperti stadion, pusat pelatihan, dan arena olahraga multi-fungsi.
	Pl.	Peningkatan Bantuan Keuangan Desa.	Menyusun kebijakan untuk memperkuat organisasi desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.
	Pl.	Jambanisasi 100%.	Mengintegrasikan program pembangunan infrastruktur dengan program peningkatan kualitas lingkungan agar tercipta kawasan permukiman yang sehat dan layak huni.



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/ Aksi/Taktis		Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)		(3)
	Pl.	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari.	Pengembangan sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian, termasuk infrastruktur pascapanen, pengemasan, dan akses ke pasar digital serta ekspor.
	Pl.	Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida.	Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan krisis pangan melalui diversifikasi tanaman, penguatan cadangan pangan lokal, dan sistem peringatan dini pertanian.
	PA.	Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir.	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, pengembang, dan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi MBR dan Gen Z, termasuk program subsidi perumahan dan skema kredit mikro.
	PA.	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional.	Pengembangan dan penyempurnaan infrastruktur perikanan, termasuk perahu, alat tangkap modern, tempat pelelangan ikan (TPI), kolam budidaya, dan sarana pengolahan hasil perikanan.
	PA.	Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati).	-
	PA.	Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	Meningkatkan akses permodalan melalui fasilitasi pembiayaan dari perbankan, lembaga keuangan mikro, dan program pemerintah.
	PA.	Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp.1000 untuk Buruh, Lansia, Veteran, dan Pelajar.	Menerapkan sistem e-ticketing dan aplikasi informasi transportasi untuk memudahkan akses dan kenyamanan pengguna.
	PA.	Petani milenial gajian.	Regenerasi petani dan peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan petani melalui pelatihan, sekolah lapang, dan pendampingan teknis berbasis kebutuhan spesifik lokal.
	PA.	Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah	-
	PA.	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Mengembangkan dan memperluas cakupan sistem peringatan dini yang berbasis teknologi untuk memberikan informasi cepat dan akurat kepada masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
	PT.	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Mengembangkan dan memperluas program rehabilitasi sosial serta perlindungan jaminan sosial yang inklusif, untuk memenuhi hak-hak dasar PPKS



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/ Aksi/Taktis		Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)		(3)
			Menyediakan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan peluang kerja, untuk meningkatkan kesejahteraan PPKS
	PT.	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya.	Mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di desa.
	PT.	Mendorong Pembangunan SPAM Regional dan SPAM Industri untuk Penyediaan Air Bersih.	Menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang mengintegrasikan sektor jalan, irigasi, drainase, dan sumber daya air dengan pendekatan berbasis wilayah untuk memastikan pembangunan yang saling mendukung dan berkelanjutan.
	PT.	Pendidikan Perubahan Iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren.	Melaksanakan program edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan yang melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren, dan komunitas lokal.
	PT.	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat.	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi peralatan tanggap darurat, serta memperkuat koordinasi lintas instansi dan sektor dalam penanganan bencana.
	PT.	Penataan Drainase dan Pengendalian Banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan dan Kabupaten Demak.	Menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang mengintegrasikan sektor jalan, irigasi, drainase, dan sumber daya air dengan pendekatan berbasis wilayah untuk memastikan pembangunan yang saling mendukung dan berkelanjutan.
	PT.	Fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta.	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, pengembang, dan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi MBR dan Gen Z, termasuk program subsidi perumahan dan skema kredit mikro.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
	PP.	Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai	Menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang mengintegrasikan sektor jalan, irigasi, drainase, dan sumber daya air dengan pendekatan berbasis wilayah untuk memastikan pembangunan yang saling mendukung dan berkelanjutan.
	PI.	Mendorong Pembangunan Sistem Desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi Suplai Air Bersih dan mengatasi Dampak Eksploitasi Air Tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang).	



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Program Prioritas/Intervensi/ Aksi/Taktis		Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)		(3)
	PA.	Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali.	
	PA.	Mendorong pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah).	
	PA.	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa.	Memperkuat program rehabilitasi hutan, mangrove, dan ekosistem alami lainnya untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.
	PT.	Menghadirkan Infrastruktur yang carbon neutral.	Mengembangkan strategi mitigasi perubahan iklim, termasuk penurunan emisi karbon, pengelolaan risiko bencana, dan peningkatan adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
	PT.	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional.	Mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis pendekatan 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>), termasuk pengadaan fasilitas pendukung dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Inflasi			
	PT.	Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok.	Mengembangkan sistem distribusi barang yang efisien, mencakup infrastruktur logistik, fasilitas pergudangan, dan kemitraan dengan penyedia jasa distribusi.
	PT.	Subsidi Pangan Murah.	Membangun kemitraan lintas sektor dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pangan.
PDRB per Kapita			
	PI	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru.	Membangun terminal, halte, dan fasilitas parkir modern yang terintegrasi dengan sistem transportasi umum.

Provinsi Jawa Tengah juga juga menghimbau Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan dukungan program/kegiatan Gubernur pada 35 program delegasi provinsi ke kabupaten/kota sebagai berikut :



Tabel 3.12.
**Integrasi 35 Program Delegasi Provinsi ke dalam Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Pekalongan**

No	Program Delegasi	Dukungan Arah Kebijakan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)	(3)
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan <i>sport center</i>).	Menyusun dan melaksanakan rencana penguatan kapasitas kecamatan dan desa berbasis data dan kebutuhan aktual, serta melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pelayanan.
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional.	• Mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar di kawasan permukiman, seperti pembangunan akses jalan, instalasi air bersih, sanitasi, dan penyediaan listrik • Membangun dan merehabilitasi fasilitas olahraga yang representatif untuk mendukung pelatihan dan pertandingan atlet, seperti stadion, pusat pelatihan, dan arena olahraga multi-fungsi.
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK.	Menedukasi aparatur pemerintah tentang pentingnya pengawasan dan tanggung jawab mereka dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa.	Memperluas fasilitas kesehatan di wilayah terpencil dan meningkatkan layanan berbasis teknologi/digital services.
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila.	Penguatan kelompok usaha nelayan dan pembudidaya ikan sebagai basis kelembagaan ekonomi perikanan rakyat.
6	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta.	Menjalin kerja sama lintas sektor dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan.	Mendorong pengembangan DRPPA di desa-desa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan anak.
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru.	Mendorong pemanfaatan potensi wisata unggulan daerah seperti wisata alam Petungkriyono, wisata pesisir, serta wisata budaya dan batik khas Pekalongan sebagai daya tarik utama.
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng).	Menyediakan akses kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa untuk mendapatkan fasilitas pelatihan, modal usaha, serta pembinaan dalam aspek manajerial dan pemasaran



No	Program Delegasi	Dukungan Arah Kebijakan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)	(3)
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi peralatan tanggap darurat, serta memperkuat koordinasi lintas instansi dan sektor dalam penanganan bencana
11	Cek Kesehatan Gratis	Optimalisasi anggaran kesehatan, pengelolaan dana yang transparan, dan perbaikan tata kelola data kesehatan guna mendukung pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Meningkatkan pemerataan dan kompetensi tenaga kesehatan dan melengkapi fasilitas dengan peralatan medis modern
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, adaptif dan berintegritas
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Memperkuat kebijakan untuk perlindungan perempuan dan anak, termasuk sistem pengawasan kekerasan berbasis masyarakat
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Membangun terminal, halte, dan fasilitas parkir modern yang terintegrasi dengan sistem transportasi umum
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	• Mengembangkan dan memperluas program rehabilitasi sosial serta perlindungan jaminan sosial yang inklusif, untuk memenuhi hak-hak dasar PPKS • Menyediakan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan peluang kerja, untuk meningkatkan kesejahteraan PPKS
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim.	Mendorong pemanfaatan potensi wisata unggulan daerah seperti wisata alam Petungkriyono, wisata pesisir, serta wisata budaya dan batik khas Pekalongan sebagai daya tarik utama.
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis.	Meningkatkan daya saing produk lokal melalui sertifikasi, pengemasan, dan inovasi produk, serta peningkatan kualitas produksi sesuai standar pasar.
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan.	Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan institusi pelatihan vokasional untuk merancang dan menyelenggarakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar kerja.



No	Program Delegasi	Dukungan Arah Kebijakan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)	(3)
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.	Membangun dan meningkatkan infrastruktur desa yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi, seperti akses jalan yang memadai, fasilitas pasar desa, serta infrastruktur pendukung sektor pertanian dan pariwisata.
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya.	Mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di desa.
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani Perempuan.	• Penguatan akses pasar produk perikanan lokal, baik melalui pasar regional, digitalisasi perdagangan, maupun peluang ekspor ke pasar internasional. • Regenerasi petani dan peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan petani melalui pelatihan, sekolah lapang, dan pendampingan teknis berbasis kebutuhan spesifik lokal.
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata.	Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan bagi pelaku wisata, penguatan komunitas sadar wisata, dan pengembangan UMKM pendukung sektor wisata.
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM.	Meningkatkan akses permodalan melalui fasilitasi pembiayaan dari perbankan, lembaga keuangan mikro, dan program pemerintah.
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau.	Menyusun roadmap pengembangan industri daerah melalui pemetaan potensi, tantangan, dan kebutuhan modernisasi teknologi produksi.
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa.	Memperkuat program rehabilitasi hutan, mangrove, dan ekosistem alami lainnya untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan.	Peningkatan literasi sosial masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang keragaman, toleransi, dan nilai-nilai sosial yang mendukung keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan.	Memaksimalkan peran forum-forum kewaspadaan dini (termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan lainnya) dalam upaya pencegahan konflik sosial dengan mengembangkan mekanisme komunikasi yang efektif dan inklusif.



No	Program Delegasi	Dukungan Arah Kebijakan Kabupaten Pekalongan
(1)	(2)	(3)
29	Peningkatan operasional kader Posyandu.	Kerja sama lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan pemerintah provinsi dan pusat.
30	Peningkatan kualitas hidup lansia.	Edukasi pola hidup sehat, kampanye vaksinasi, dan peningkatan sanitasi melalui PHBS.
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja.	Mendorong kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memperbarui kurikulum dengan pendekatan berbasis keterampilan, serta meningkatkan program magang di perusahaan untuk memberikan pengalaman langsung kepada pelajar dan mahasiswa, sehingga mereka lebih siap menghadapi dunia kerja.
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa.	Menyediakan akses kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa untuk mendapatkan fasilitas pelatihan, modal usaha, serta pembinaan dalam aspek manajerial dan pemasaran.
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga.	Menyediakan program pembinaan yang berkelanjutan untuk atlet berbakat di berbagai cabang olahraga, baik melalui pelatihan intensif maupun kompetisi reguler.
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Memastikan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki akses ke pendidikan berkualitas.
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.	Mengembangkan dan memperluas cakupan sistem peringatan dini yang berbasis teknologi untuk memberikan informasi cepat dan akurat kepada masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

a. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Pembangunan wilayah Jawa Tengah tahun 2025–2029 yang terbagi dalam sepuluh wilayah pengembangan diarahkan dengan kebijakan umum **"Pengembangan Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis Wilayah Pengembangan"**. Kebijakan tersebut juga dalam rangka untuk peningkatan perekonomian daerah Jawa Tengah serta memberikan kontribusi untuk perwujudan Indonesia Emas 2045. Pengembangan episentrum pertumbuhan ekonomi baru Jawa Tengah berbasis 10 wilayah pengembangan atau 10 titik aglomerasi Jawa Tengah merupakan implementasi atau penjabaran langsung dari RPJMD Tahun 2025-2029 pada Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan; Misi 4 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang



responsif; dan Misi 6 Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru juga merupakan bagian dari “Fokus Kerja Jateng Makmur”, dimana merupakan salah satu langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah melalui Transformasi Ekonomi yang berfokus pada: Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan; Perencanaan Tata Ruang yang responsif dengan mengoptimalkan Pemerintahan Partisipatif, Kolaboratif dan Integratif serta dukungan Iklim Investasi.

Penjabaran pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru melalui Pengembangan Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Wilayah Pengembangan (WP) meliputi Program Unggulan dan Program Strategis

Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi adalah program lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kewenangan di setiap WP yang dinilai paling prioritas dan siap menjadi penggerak percepatan pertumbuhan ekonomi secara jangka menengah ditingkat Jawa Tengah dan/atau Nasional.

Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi merupakan pendamping Program Unggulan yang juga berpotensi sebagai penggerak perekonomian ditingkat WP dan/atau lintas WP. Beberapa pertimbangan dalam menentukan Program Unggulan dan Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi di setiap WP adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan keberlanjutan program-program yang sudah dilakukan utamanya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah;
- 2) Mempedomani RTRW dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Mempedomani Arah Pembangunan Kewilayahan sebagaimana RPJMN Tahun 2025–2029 (Lampiran IV);
- 4) Memperhatikan Visi, Misi, Fokus Kerja, Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Prioritas, Program Intervensi, Program Aksi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2025–2029;
- 5) Mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 6) Memperhitungkan potensi lokal unggulan per WP yang dapat berdampak positif pada sektor lain, mempunyai rantai nilai (*value chain*) panjang dan paling tinggi pertambahan nilainya (*value added*).

Program Unggulan dan Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi di masing-masing WP khususnya di **WP Petanglong** adalah :

Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai kawasan industri manufaktur berteknologi tinggi.

Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:

- Pengembangan shopping tourism, pariwisata alam, budayadan ekonomi kreatif
- Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, teh, kerbau, kambing, itik, ayam buras, dan perikanan tangkap)



Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola implementasi kebijakan "Pengembangan Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis Wilayah Pengembangan" di 10 wilayah pengembangan/wilayah aglomerasi tersebut, maka akan dibentuk kelembagaan pengelolaan 10 wilayah aglomerasi. Kebijakan pembentukan kelembagaan pengelolaan 10 wilayah aglomerasi ini juga merupakan bagian dari **136 Program Daerah** yang menjadi arahan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu "Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah". Kelembagaan Badan Aglomerasi untuk pengelolaan 10 WP ini diarahkan memiliki tugas dan fungsi untuk:

- 1) menjamin sinkronisasi kebijakan dan pembangunan lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu wilayah pengembangan;
- 2) melakukan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dalam satu wilayah pengembangan dalam mengimplementasikan program unggulan dan program strategis dalam satu wilayah pengembangan yang telah ditetapkan;
- 3) melakukan koordinasi dan fasilitasi kerja sama antara pemerintah kabupaten/kota dalam satu wilayah pengembangan dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pihak lainnya dalam mengoptimalkan implementasi program unggulan dan program strategis dalam satu wilayah pengembangan.

Pembentukan Badan Aglomerasi Jawa Tengah ini akan diatur dalam kebijakan dan regulasi lebih lanjut. Selanjutnya arahan kebijakan per wilayah pengembangan secara rinci diuraikan sebagai berikut.

b. Arah Kebijakan WP Petanglong

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Petanglong, berikut adalah indikasi kebutuhan rencana program unggulan dan program strategis selama lima tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut.

1) Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai Kawasan Industri Manufaktur Berteknologi Tinggi

- a) Mendorong pengembangan wilayah dan prasarana Kawasan Industri Terpadu Batang dengan daerah sekitarnya;
- b) Mendorong pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;
- c) Mendorong pengembangan pelabuhan umum;
- d) Mendorong percepatan investasi di KITB melalui upaya promosi dan kemudahan perizinan;
- e) Mendorong penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
- f) Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan prakerja dengan membangun link and match SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;
- g) Mendorong pengembangan SPAM industri;
- h) Mendorong inisiasi pengembangan dan penguatan sistem perkotaan berorientasi transit (TOD) yang menggabungkan sistem transportasi umum yang terkoneksi dengan KITB dan dengan kawasan pariwisata;
- i) Mendorong pengembangan layanan angkutan umum perkeretaapian (jarak jauh dan komuter) yang terintegrasi dengan KITB;



- j) Inisiasi proses rencana penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) dengan peningkatan peran dan keterlibatan pemerintahan kabupaten/kota di WP Petanglong yang terintegrasi dengan KITB dan moda transportasi lainnya;
- k) Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi terminal tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Banyuputih Batang sebagai simpul rencana layanan Trans Jateng Petanglong;
- l) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Banyuputih-Plantungan;
- m) Mendorong perencanaan tata ruang serta tata bangunan dan lingkungan yang baik utamanya pada kawasan penyangga KIT Batang untuk mengantisipasi *urban sprawl* serta kekumuhan;
- n) Mendorong pemenuhan RTH kawasan industri;
- o) Kajian evaluasi zona konservasi pada cekungan air tanah Subah dan Pekalongan-Pemalang.

2) Pengembangan Shopping Tourism, Pariwisata Alam, Budaya dan Ekonomi Kreatif

a) Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:

- (1). Penanganan ruas jalan provinsi diantaranya ruas Wiradesa-Kajen-Kalibening dan Wonotunggal-Surjo;
- (2). Upaya mendorong peningkatan aksesibilitas koridor pariwisata Bandar-Dieng;
- (3). Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Kajen-Wonotunggal-Surjo;

b) Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:

- (1). Upaya mendorong kerja sama antardaerah dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata;
- (2). Upaya menciptakan brand wisata belanja;
- (3). Penyusunan basis data industri lokal yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata belanja;
- (4). Upaya mendorong pengembangan kawasan tematik sebagai Lokasi belanja yang representatif, kreatif dan inovatif;
- (5). Mendorong pengembangan pasar-pasar tradisional sebagai destinasi wisata belanja;
- (6). Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
- (7). Pengembangan kampung/desa wisata utamanya pada koridor Bandar-Dieng serta Linggoasri-Petungkriyono dan sekitarnya;
- (8). Fasilitasi pengembangan berbagai even kebudayaan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain syawalan, balon festival, festival kesenian;
- (9). Upaya mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya internasional melalui kerja sama dengan diaspora untuk budaya lokal di level global;
- (10). Bimbingan teknik produksi dan pengelolaan usaha bagi wirausaha baru industri komoditas;
- (11). Upaya mendorong peningkatan Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) yang berbasis potensi lokal pariwisata yang didukung sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan serta mendorong pembentukan PKP baru sebagai pusat pertumbuhan perdesaan.



3) Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: padi, teh, kerbau, kambing, itik, ayam buras, dan perikanan tangkap)

a) Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:

- (1). Upaya mendorong pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang perlindungan lahan pertanian serta pelaksanaan reforma agrarian dengan penataan aset dan akses;
- (2). Upaya mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas jalur distribusi pertanian yang didominasi ruas jalan kabupaten dan desa;
- (3). Upaya mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam peningkatan hasil panen melalui implementasi Riset Inovasi Teknologi (RIT) di sektor pertanian;
- (4). Pengembangan pelabuhan perikanan;
- (5). Upaya mendorong peningkatan perikanan tangkap melalui pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut;
- (6). Upaya mendorong pengembangan agropolitan untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas agro unggulan didukung fasilitasi penyediaan prasarana sarana; peningkatan kompetensi; korporasi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; pengembangan minapolitan untuk mendorong produksi dan hilirisasi komoditas perikanan tangkap didukung pengembangan Pelabuhan perikanan, bantuan prasarana sarana penangkapan ikan, fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan;
- (7). Fasilitasi prasarana sarana di daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- (8). Upaya mendorong peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) dan pengembangan kawasan peternakan;
- (9). Peningkatan sistem irigasi melalui rehabilitasi daerah irigasi Sudikampir;
- (10). Upaya mendorong rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain di DI Comal, DI Kupang Krompeng, DI Sragi, dan DI Kaliwadas;
- (11). Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya mendorong pembangunan Waduk Kedunglanggar, Wonotunggal, Gondang Hilir, Karanggondang, Kradegan, Sidoharjo, Mesoyi, Wonodadi dan Candi;

b) Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:

- (1). Upaya mendorong pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
- (2). Upaya mendorong penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian;
- (3). Upaya mendorong pemasaran dan branding produk;
- (4). Pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan (perikanan tangkap);
- (5). Fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan;
- (6). Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama lima tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Petanglong, antara lain sebagai berikut.



1) Lingkup Sosial dan Kependudukan

- a) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR, Gen Z dan Milenial bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan swasta, serta penyediaan rumah apung/adaptif banjir di pesisir utara Pekalongan;
- b) Pengembangan layanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya pada RSUD Kraton;
- c) Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi yang menasar kelompok usia sekolah, usia produktif, dan lanjut usia (lansia) sejalan dengan pembudayaan hidup sehat serta perlu diperkuat dengan penekanan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak; upaya promotif preventif ini harus didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif; sedangkan dalam rangka penuntasan stunting diarahkan pada aspek pencegahan untuk memastikan anak yang sehat tidak menjadi *stunting*;
- d) Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri termasuk penguatan ekosistem pendukung;
- e) Mendorong pemenuhan puskesmas terutama di daerah terisolir di Kabupaten Pekalongan dan Batang;
- f) Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi local dan mendorong sekolah inklusif;
- g) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas serta mendorong sekolah inklusif di Tingkat kecamatan.

2) Lingkup Perekonomian

- a) Mendorong kerja sama antardaerah dalam pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan;
- b) Mendorong revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
- c) Pengembangan kawasan pertumbuhan pada simpul-simpul transportasi.

3) Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

- a) Mendorong keterpaduan pengembangan permukiman perkotaan Kota Pekalongan dan kabupaten di sekitarnya diantaranya melalui optimalisasi persebaran dan pertumbuhan kawasan PKW dan PKL yang persebarannya cukup merata untuk mengurangi ketimpangan wilayah;
- b) Mendorong kerja sama antardaerah dalam hal:
 - (1). koordinasi dan pengelolaan pengembangan kawasan permukiman di perbatasan kabupaten/kota;
 - (2). penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;
 - (3). penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekalongan dengan kabupaten lain yang berbatasan;
 - (4). penanganan bencana dan kawasan terdampak rob;
- c) Mendorong pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan banjir rob serta peningkatan pengamanan pesisir utara Petanglong secara berkelanjutan;
- d) Mendorong pengembangan dan penyelesaian sistem pengendali banjir di Pekalongan;
- e) Mendorong rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir;



- f) Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan pengelolaan limbah industri/kerajinan batik;
- g) Mendorong dan memfasilitasi perencanaan dan persiapan Pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya;
- h) Mendorong pembangunan waduk sumber air baku SPAM Regional Petanglong;
- i) Pengembangan SPAM Regional Petanglong;
- j) Mendorong dan fasilitasi rencana pembangunan TPST Regional Petanglong, serta pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
- k) Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
- l) Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan untuk pemulihan kapasitas daya dukung DAS khususnya di catchment area, terutama pada DAS Comal, DAS Sragi, DAS Sengkarang dan DAS Kupang;
- m) Mendorong sinergi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan maupun pemulihan area bernilai keanekaragaman hayati dan/atau jasa ekosistem tinggi;
- n) Mendorong pemanfaatan sumber daya hayati (bioprospeksi) dan jasa ekosistem secara adil serta berkelanjutan;
- o) Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi pegunungan Dieng dan rehabilitasi kawasan pesisir utara (Ujungnegoro);
- p) Mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana salah satunya dengan penuntasan penanganan jalan evakuasi;
- q) Mendorong pembangunan pipa gas bumi Cirebon–Semarang;
- r) Mendorong transformasi sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, penerapan jaringan cerdas (smart grid), adopsi teknologi penyimpanan energi, pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk pemantauan real-time, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik guna meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan keberlanjutan pasokan energi.

Dengan rencana program unggulan dan program strategis yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan WP Petanglong akan mencapai target indikator kinerja makro dalam lima tahun sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.13.
Target Kinerja Makro WP Petanglong

Tahun	Batang	Pekalongan	Kota Pekalongan	Batang	Pekalongan	Kota Pekalongan
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				Tingkat Kemiskinan (%)		
2026	5,54-5,10	3,05-2,75	4,91-4,40	8,30-8,21	8,09-7,98	6,50-6,14
2027	5,41-5,11	2,98-2,68	4,63-4,33	7,55-7,44	8,28-7,20	6,06-5,64
2028	5,38-5,08	2,93-2,63	4,56-4,26	7,15-7,03	7,84-6,80	5,74-5,33
2029	5,28-4,98	2,88-2,58	4,49-4,19	6,75-6,62	7,41-6,40	5,42-5,02
2030	5,15-4,85	2,83-2,53	4,42-4,12	6,36-6,20	6,97-6,00	5,10-4,70
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				Pertumbuhan Ekonomi (%)		
2026	71,20	73,00	78,21	6,35-6,50	5,30-6,00	5,70-6,20
2027	71,79	73,61	78,62	7,30-7,87	6,10-6,97	6,20-7,20
2028	72,37	74,21	79,03	7,70-8,23	6,60-7,60	6,70-7,70
2029	72,96	74,82	79,44	7,80-8,20	7,00-8,00	7,10-8,10
2030	73,54	75,43	79,85	7,90-8,40	7,40-8,40	7,60-8,36

Sumber: Perda RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029



WP PETANGLONG

PROGRAM UNGGULAN PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI

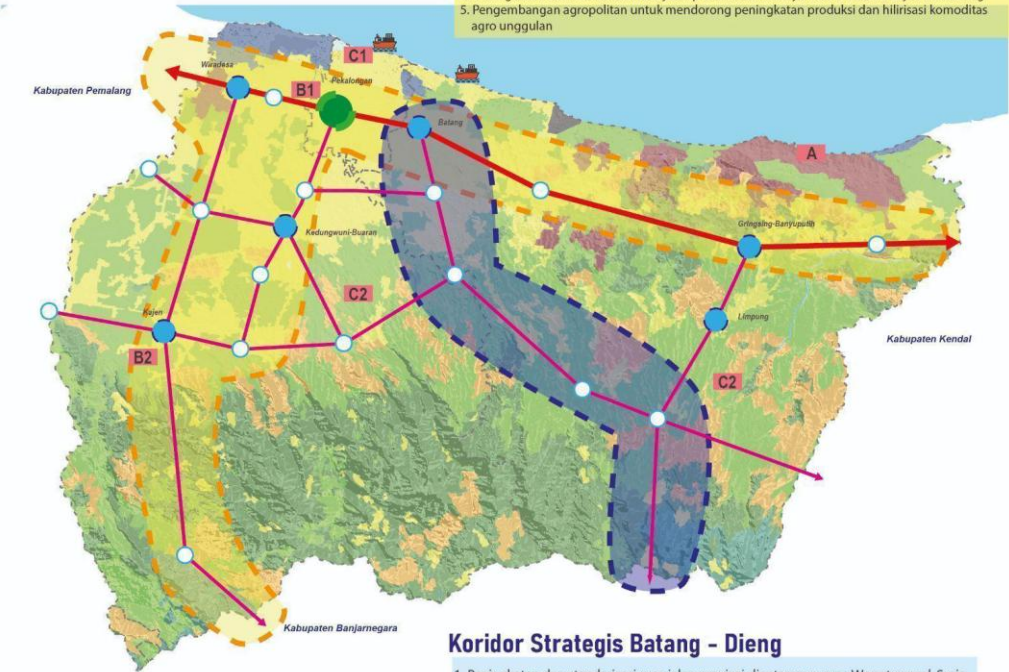
Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai Kawasan Industri Manufaktur Berteknologi Tinggi

PROGRAM STRATEGIS PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI

- 1. Pengembangan Shopping Tourism, Pariwisata Alam, Budaya dan Ekonomi Kreatif
- 2. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, teh dan perikanan tangkap)

Koridor Strategis Kajan - Wiradesa -Pekalongan -Batang

- 1. Mendorong percepatan investasi di KITB melalui upaya promosi dan kemudahan perizinan
- 2. Mendorong pengembangan SPAM Petanglong dan SPAM Industri
- 3. Mendorong inisiasi pengembangan dan penguatan sistem perkotaan berorientasi transit (TOD) yang menggabungkan sistem transportasi berbasis rel dengan penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Petanglong yang terkoneksi dengan KITB dan dengan kawasan pariwisata
- 4. Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya: ruas Wiradesa-Kajan-Kalibening
- 5. Pengembangan agropolitan untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas agro unggulan



Koridor Strategis Batang - Dieng

- 1. Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya: ruas Wonotunggal-Surjo
- 2. Mendorong peningkatan aksesibilitas koridor pariwisata Bandar-Dieng dan Pengembangan Pariwisata berbasis alam
- 3. Pengembangan agropolitan untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas agro unggulan

Keterangan

PKW	Perumahan
PKL	Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Perumahan	Perkebunan
Pelabuhan	Pertanian
	Kawasan Hutan Produksi
	Kawasan Konservasi
	Kawasan Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya
A. Industri	B. Pariwisata
Kawasan Industri Batang	Shopping Tourism - Kota Pekalongan
	Desa Wisata ; Linggoasri - Petungkriyono
C. Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Pertanian	
Komoditas Perikanan Tangkap Kota Pekalongan dan kabupaten Batang	
Kawasan Komoditas Unggulan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang	

Sumber : Perda RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Gambar 3.15. Arah Kebijakan WP Petanglong



c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Pekalongan

Pada saat ini sedang dilakukan Peninjauan Kembali (PK) RTRW pada **Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040** mendapatkan beberapa temuan yang menjadi rekomendasi untuk dilakukan peninjauan kembali. Dalam Dokumen Peninjauan Kembali (PK) RTRW menjabarkan dinamika dan temuan RTRW yang lama antara lain :

1). Ketidaksesuaian Pemanfaatan Lahan

Terdapat 1.668,25 Ha lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun. Dari total tersebut, 858,88 Ha merupakan ketidaksesuaian pada kawasan lindung sempadan sungai yang berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sementara itu terdapat 181,20 Ha pada kawasan tanaman pangan yang memiliki potensi mengakibatkan alih fungsi lahan produktif.

2). Pertimbangan Kawasan Risiko Bencana (Longsor dan Banjir)

Terdapat 10.305,84 Ha lahan yang berada pada kawasan resiko bencana longsor tingkat tinggi dan 1.477,45 Ha lahan yang berada pada kawasan risiko banjir tingkat tinggi. Hal tersebut memiliki potensi mempengaruhi efektivitas, efisiensi dan keberlangsungan aktivitas budidaya pada kawasan tersebut khususnya industri yang menjadi salah satu kawasan yang terkena bencana.

3). Kawasan Peruntukan Industri berada pada Kawasan Banjir Rob

Adanya kawasan peruntukan Industri terutama di Kecamatan Siwalan yang tidak lagi memiliki potensi kelayakan untuk pengembangan industri karena terkena rob atau telah ditetapkan sebagai LSD.

4). Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi

Dipilihnya Kabupaten Pekalongan terutama Kecamatan Kajen, Bojong dan Karanganyar sebagai lokasi pengembangan pendidikan tinggi seperti UIN Gus Dur, Kampus UNDIP PSDKU Pekalongan dan STIKES.

5). Perkembangan Kawasan Perkotaan

Adanya perbedaan deliniasi permukiman dengan kondisi eksisting di lapangan terutama pada kawasan perkotaan.

6). Ketercapaian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)

Berdasarkan persentase ketercapaian SPPR pada 5 tahun pertama adalah sebagai berikut:

- a). Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah 100%;
- b). Perwujudan Struktur Ruang 66,27%;
- c). Perwujudan Pola Ruang 60,64%;
- d). Perwujudan Kawasan Strategis 35,48%

7). Ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan

Adanya ketidaksesuaian pengaturan baik pada terminologi, cakupan dan jenis pengaturan antara Perda 3 Tahun 2020 dengan PP 21 Tahun 2021 dan Permen ATR BPN 11 Tahun 2021. Berdasarkan hasil temuan dan dinamika yang terjadi melalui Surat Keputusan Kementerian ATR/BPN Nomor P.01/1052-200/IV/2024 terkait Rekomendasi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah pada poin 7 (tujuh) memutuskan bahwa: Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 dapat dilakukan revisi dengan pencabutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kajian kebijakan yang telah dilakukan dalam penyusunan memperlihatkan arah pembangunan dari segi spasial dan pembangunan daerah. Dalam perencanaan tata ruang wilayah perlu melakukan sinkronisasi kesesuaian perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi sehingga terjadi keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Arah kebijakan regional Kabupaten Pekalongan dalam perencanaan rencana pembangunan dan rencana tata ruang berfokus pada kawasan industri dan pertanian. Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat berkontribusi dalam ketersediaan lumbung pangan di kawasan petanglong. Selain itu dalam pengembangan regional Petanglong terdapat KITB yang akan berdampak banyak terhadap pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan sebagai *hinterland* KITB tentu akan terdampak secara percepatan pertumbuhan demografi. Pengembangan transportasi dalam mendukung logistik dan pekerja perlu diperhatikan dan mendukung pergerakan menuju pusat-pusat perkotaan regional.

Pembangunan wilayah tentunya perlu berkesinambungan antara ketersediaan lahan pangan dengan pembangunan perumahan, industri dan lainnya. Pengembangan pertanian dengan meningkatkan produktivitas perlu didukung dengan penentuan lokasi lahan pangan yang ideal untuk dikembangkan. Lahan-lahan yang kurang ideal dikembangkan untuk pertanian dapat diarahkan sebagai kawasan terbangun.

Pengembangan kawasan juga perlu memperhatikan adanya risiko bencana. Kabupaten Pekalongan setidaknya memiliki risiko bencana alam yang setiap tahunnya terjadi. Bencana alam seperti Rob, banjir, cuaca ekstrim dan longsor perlu menjadi pertimbangan pembangunan wilayah. Kesenambungan pembangunan dengan kelestarian alam akan menciptakan tata ruang yang berkelanjutan.

d. Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Pekalongan

Perkembangan wilayah sangat berpengaruh dari pertumbuhan perkotaan di sebuah wilayah. Perkembangan perkotaan ditandai dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga perkembangan permukiman berkembang dengan cepat. Prasarana menjadi hal dasar yang harus dipenuhi dalam pengembangan wilayah. Prasarana jaringan jalan menjadi kerangka perkotaan sehingga memudahkan dalam terjadinya pergerakan manusia dan barang. Jaringan jalan dengan kelas semakin tinggi memiliki kecenderungan terdapat percepatan pengembangan wilayah karena memiliki lokasi strategis yang dilewati oleh berbagai macam kendaraan. Jaringan jalan utama menjadi kerangka kota utama sebuah wilayah sehingga sarana skala kabupaten dapat berkembang di sekitarnya. Terbangunnya sarana tentunya akan mengembangkan lengan-lengan jaringan jalan penghubung yang berkembang semakin cepat untuk pemanfaatan lainnya seperti permukiman dan sarana skala lokal.

Hasil analisis Materi Teknis RTRW Kabupaten Pekalongan menghasilkan pusat perkotaan Kabupaten Pekalongan berada di Kecamatan Buaran-Kedungwuni, kemudian perkotaan kecil yang melayani wilayah sekitarnya berada di Kecamatan Kajen, Wiradesa, Kesesi dan Doro. Sementara untuk Kecamatan bagian selatan memiliki fungsi pelayanan lokal yang melayani skala kecamatan. Kecamatan lainnya memiliki sistem perkotaan pedesaan yang dilayani oleh perkotaan utama dan kecil. Namun secara administrasi kewilayahan Kecamatan Kajen memiliki keistimewaan yaitu ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Pekalongan sehingga pusat



perkotaan Kabupaten Pekalongan dipusatkan di Kecamatan Kajen. Sehingga Buaran-Kedungwuni menjadi perkotaan kecil.

1). Konsep Struktur Ruang

(a). Konsep Jaringan Jalan

Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah yang strategis dari sisi jaringan jalan. Hal ini dibuktikan dengan dilewatinya jaringan jalan arteri primer (Pantura), Jalan bebas hambatan (exit toll) dan Jalan kolektor primer. Saat ini perkembangan perkotaan Kabupaten Pekalongan berpusat di wilayah utara dan barat yang berbatasan langsung dengan Kota Pekalongan. Kota Pekalongan saat ini memiliki perkembangan yang pesat dengan permasalahan banjir dan rob dan terbatasnya wilayah pengembangan. Hal ini membuat Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Pekalongan menjadi padat karena secara langsung menjadi hinterland Kota Pekalongan.

Kabupaten Pekalongan dalam upaya pemerataan pembangunan wilayah maka perlu merencanakan jaringan jalan yang akan mendorong percepatan pertumbuhan. Perekonomian Kabupaten Pekalongan didukung oleh 3 sektor terbesar yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan ecer serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Sehingga rencana pengembangan jaringan jalan Kabupaten Pekalongan harus mendorong kegiatan perekonomian.

(b). Konsep Sistem Jaringan Transportasi

Jaringan moda transportasi merupakan prasarana yang membantu pergerakan manusia dan barang. Kabupaten Pekalongan dalam rencana jaringan moda transportasi masih berupa transportasi darat. Kabupaten Pekalongan sudah memiliki 9 trayek. Kabupaten Pekalongan tergabung dalam kawasan aglomerasi Petanglong. Kawasan petanglong memiliki rencana aglomerasi jaringan transportasi berupa BRT Trans Jateng dan feeder untuk menghubungkan menuju simpul transportasi

(c). Konsep Sistem Jaringan Drainase

Rencana jaringan drainase yang baik dapat membantu mengurangi risiko banjir dan memastikan kelancaran pengelolaan air di suatu daerah.

(d). Konsep Sistem Jaringan Air Minum

Sistem jaringan air minum Kabupaten Pekalongan direncanakan terhubung menggunakan sistem perpipaan. Sistem perpipaan permukiman perkotaan direncanakan dikelola oleh PDAM, Pada kawasan yang tidak terjangkau direncanakan menggunakan sistem pamsimas yang nantinya dikelola oleh masyarakat.

(e). Konsep Jaringan Sumber daya air

Pemanfaatan sumber daya air Kabupaten Pekalongan diarahkan menggunakan sumber air permukaan. Kabupaten Pekalongan memiliki sumber dan jaringan air permukaan diantaranya mata air, Embung dan Irigasi.



(f). Konsep Sistem Jaringan Persampahan

Permasalahan persampahan di Kabupaten Pekalongan yaitu berupa lokasi relokasi TPA yang belum terealisasi. Kendala pemindahan TPA dikarenakan sulitnya mendapatkan izin dari masyarakat disekitar rencana relokasi TPA. Sistem pengolahan sampah di kabupaten Pekalongan masih sangat kurang solutif dalam mengatasi pengurangan sampah. Sistem open dumping pada TPA dan pengumpulan sampah pada TPS diperparah dengan belum adanya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Tentu hal ini menjadi pekerjaan pemerintah daerah dalam merencanakan sistem persampahan yang dapat menjadi solusi teratasinya sampah di Kabupaten Pekalongan.

Rencana tata ruang Kabupaten Pekalongan mengarahkan pengolahan sampah mulai dari skala perkotaan. Setiap perkotaan disediakan TPS3R yang nantinya akan dikelola secara swadaya oleh KSM. Pendanaan pembangunan diharapkan dilakukan oleh pemerintah namun dalam pelaksanaannya diharapkan KSM dapat mengelola sistem persampahannya. Sistem TPS3R digunakan untuk menekan sisa residu sampah yang tidak dapat diolah sehingga hanya dapat dibuang ke TPA. Residu yang dibuang ke TPA diharapkan hanya < 15%.

Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah pegunungan yang berkarakter pedesaan. Pengangkutan sampah pada 4 kecamatan di bagian selatan memiliki tantangan yang sangat berat. Hal ini dikarenakan sistem permukiman yang terpencar, jarak yang jauh apabila dilakukan pengangkutan ke TPA dan budaya pengolahan sampah masih dilakukan pembakaran atau penguburan. Karakteristik tersebut membuat perencanaan sistem persampahan di wilayah pegunungan diarahkan membangun TPS3R secara terpadu yang dimanfaatkan dalam wilayah kecamatan.

Mekanisme TPA diarahkan menjadi sistem sanitary landfill. Sanitary landfill merupakan metode pembuangan sampah yang dilakukan secara terencana, dengan tujuan untuk mengelola limbah secara aman. Sampah yang dibuang melalui sistem ini ditampung, diolah, dan ditutup dengan cara yang mencegah pencemaran tanah, air, dan udara. TPA Kabupaten Pekalongan direncanakan relokasi pada desa Kalijoyo dengan luas 5 Ha.

(g). Konsep Sistem Jaringan Limbah

Perencanaan jaringan air limbah dibagi menjadi 3 sumber yaitu rumah tangga, Industri dan rumah sakit. Jaringan air limbah rumah tangga direncanakan pada wilayah yang memiliki kepadatan permukiman atau wilayah yang teridentifikasi kumuh sehingga sulit dalam membangun septic tank individu. Jaringan air limbah industri direncanakan pada seluruh industri dan kawasan KPI di Kabupaten Pekalongan. Jaringan air limbah rumah sakit tergolong pada jenis limbah bahan beracun, berbahaya sehingga seluruh rumah sakit dan sarana kesehatan yang menimbulkan limbah infeksius harus memiliki IPAL B3.

(h). Konsep Sistem Jaringan Listrik

Rencana sistem jaringan listrik mengikuti rencana nasional dan rencana provinsi. Kabupaten Pekalongan pada sistem jaringan listrik dilewati oleh SUTET dan SUTT.



(i). Konsep Sistem Jaringan Telekomunikasi

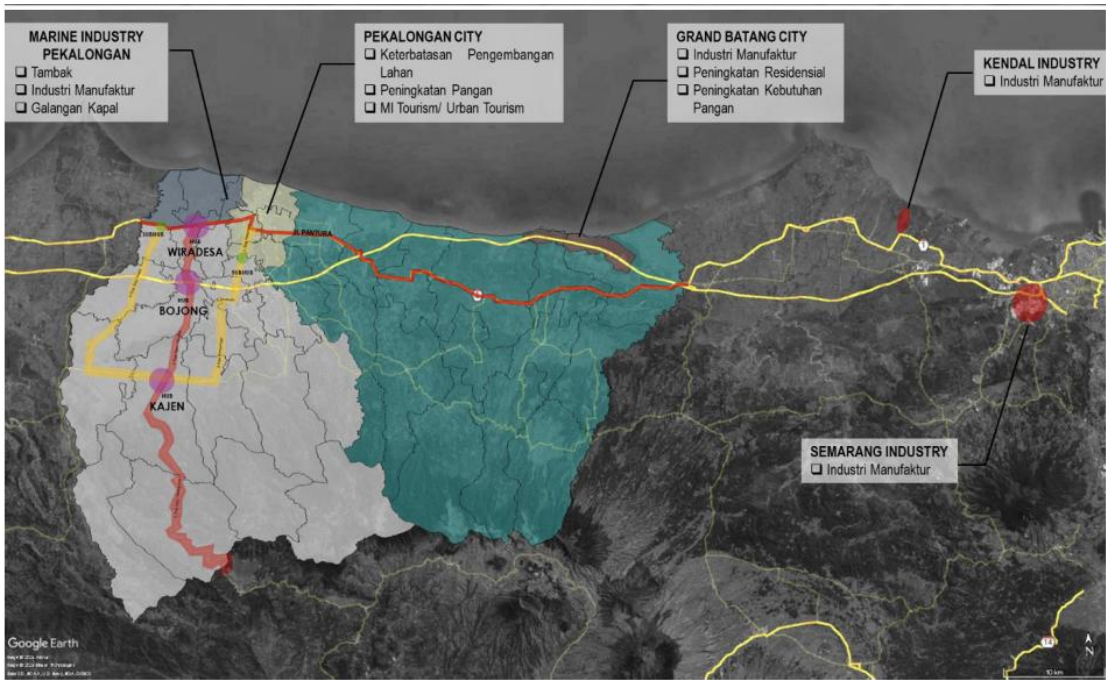
Jaringan telekomunikasi terbagi menjadi 2 yaitu jenis kabel dan nirkabel. Jaringan kabel dimanfaatkan pada kawasan yang sudah terstruktur dengan kepadatan permukiman atau pada kawasan perkotaan sehingga memungkinkan dibangunnya jaringan kabel. Sedangkan jaringan nirkabel merupakan jaringan yang memanfaatkan sinyal yang dipancarkan oleh pemancar berupa receiver maupun satelit.

Rencana pengembangan jaringan kabel di Kabupaten Pekalongan berada di seluruh perkotaan di Kabupaten Pekalongan. Jaringan nirkabel direncanakan 6 lokasi pada 4 Kecamatan yaitu petungkriyono, Kandangserang, Lebakbarang dan Paninggaran

2). Konsep Pola Ruang

Pola ruang merupakan gambaran pemanfaatan ruang di 20 tahun mendatang. Pola ruang memperhatikan beberapa aspek diantaranya yaitu penggunaan lahan, jaringan prasarana, dan kawasan risiko bencana alam. Secara jaringan prasarana transportasi Kabupaten Pekalongan tergolong pada kawasan berkembang. Kabupaten Pekalongan secara regional berada dekat dengan kabupaten/ kota yang memiliki potensi pengembangan yang pesat terutama pengembangan perdagangan jasa dan industri.

Kawasan Petanglong saat ini berkembang KITB yang menjadi kawasan industri terbesar di Jawa Tengah. Kota Pekalongan sebagai pusat kegiatan wilayah memiliki wilayah pengembangan yang semakin terbatas dengan tantangan iklim berupa banjir rob yang semakin parah. Adanya 2 isu strategis tersebut mendorong Kabupaten Pekalongan untuk bersiap dalam menata ruang untuk pengembangan wilayah. Kabupaten Pekalongan perlu menentukan arah pengembangan penataan ruang sebagai sikap dalam pengembangan wilayah

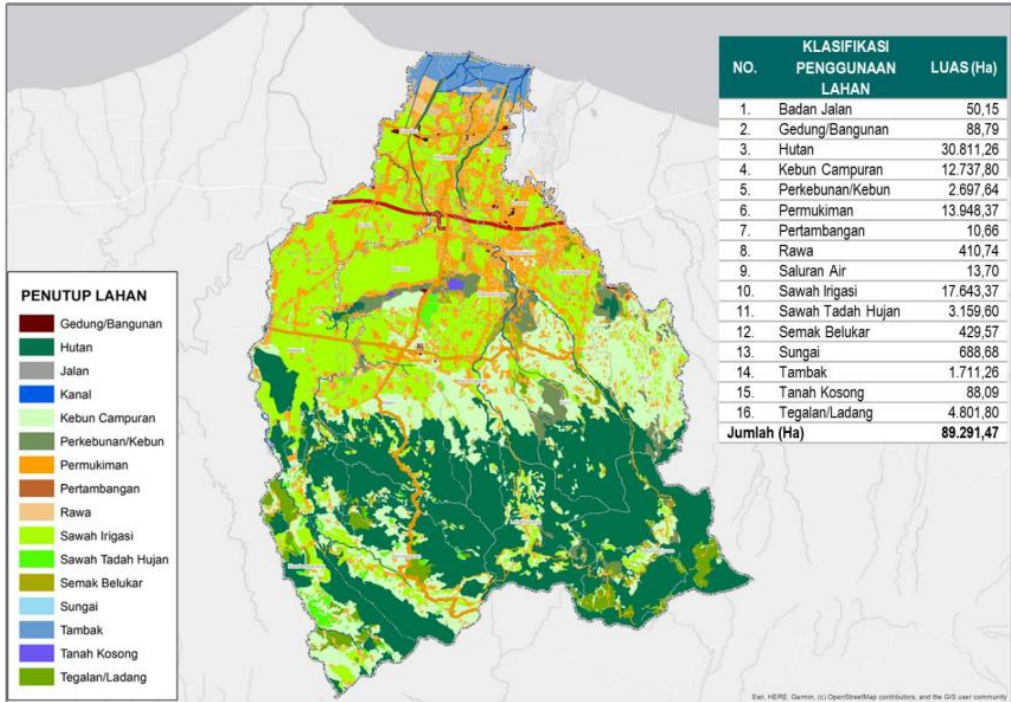


Sumber : Analisis Materi Teknis RTRW Kabupaten Pekalongan; 2024

Gambar 3.16. Konsep Pola Ruang WP Petanglong

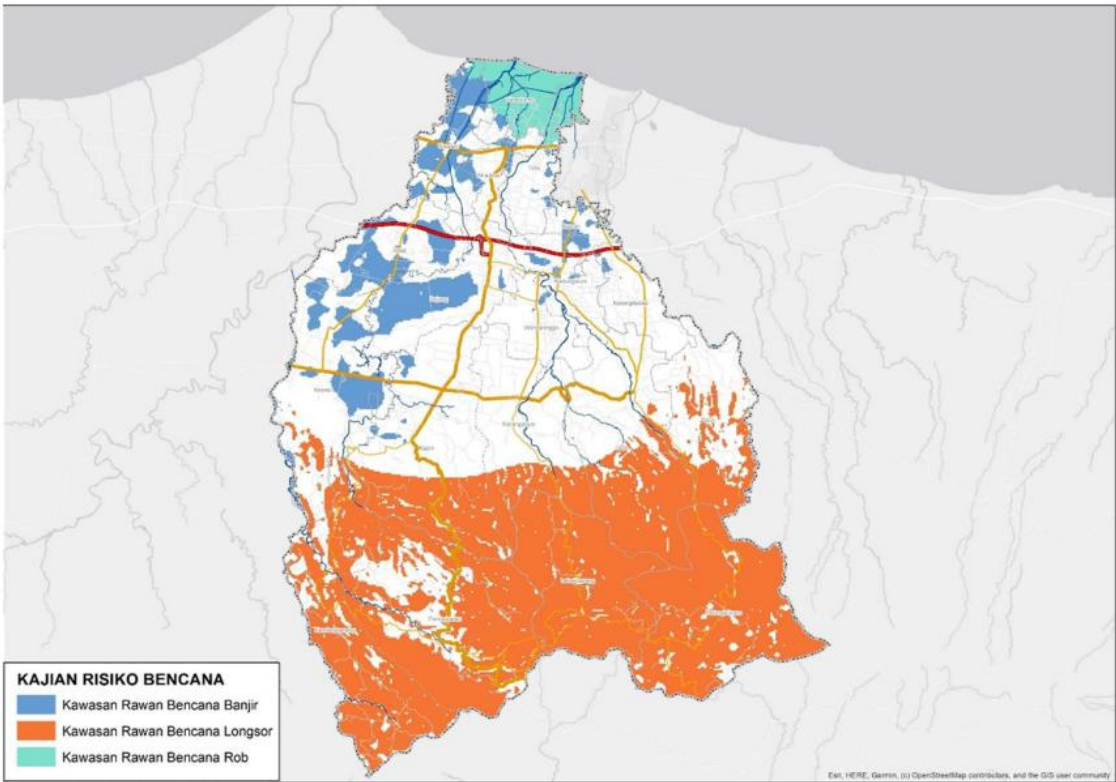


Kabupaten Pekalongan secara wilayah memiliki pemanfaatan ruang yang didominasi oleh kawasan non terbangun. Kawasan hutan merupakan pemanfaatan ruang yang mendominasi penggunaan lahan di Kabupaten Pekalongan. Secara tantangan iklim Kabupaten Pekalongan memiliki risiko bencana beragam yaitu banjir, rob, tanah longsor, kekeringan dan angin puting beliu



Sumber : Analisis Materi Teknis RTRW Kabupaten Pekalongan; 2024

Gambar 3.17. Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan 2024



Sumber : Analisis Materi Teknis RTRW Kabupaten Pekalongan; 2024

Gambar 3.18. Kawasan Risiko Bencana Kabupaten Pekalongan

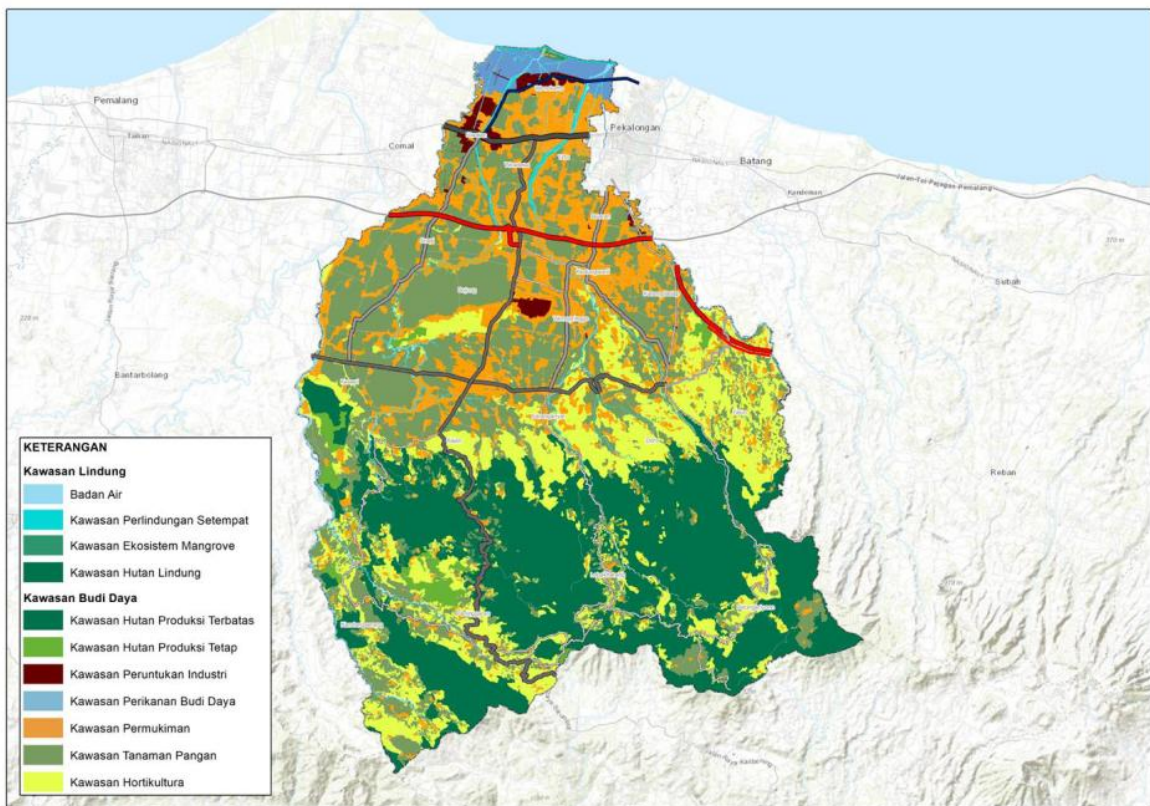


(a). Konsep Kawasan Pengembangan Terbatas

Merencanakan pola ruang memperhatikan beberapa aspek penentuan kawasan pengembangan dan kawasan dengan pengembangan terbatas. Pengembangan kawasan terbatas mempertimbangkan kawasan lindung, kawasan hutan dan lahan pangan. Kawasan lindung terdiri dari sempadan, mangrove dan hutan lindung. Hasil overlay analisis lahan pengembangan didapati Kabupaten Pekalongan didominasi oleh lahan terbatas seluas 50.037 Ha sedangkan kawasan pengembangan hanya seluas 38.965 Ha.

(b). Konsep Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan adalah area yang digunakan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral dan energi. Biasanya, kawasan ini mencakup tambang terbuka, tambang bawah tanah, dan fasilitas pendukung seperti pengolahan mineral dan transportasi.



Sumber : Analisis Materi Teknis RTRW Kabupaten Pekalongan; 2024

Gambar 3.19. Konsep Pola Ruang Kabupaten Pekalongan

e. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pekalongan berdasarkan RPJMN Tahun 2025- 2029

Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang :

- 1). Pengembangan dan Penataan Kawasan perkotaan Pekalongan-Batang antara lain melalui :
 - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu



- Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
- 2). Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
 - 3). Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Pekalongan-Batang (PHTC)
 - 4). Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kraton Kab. Pekalongan (PHTC)
 - 5). Pembangunan TPST Regional Pekalongan-Batang
 - 6). Pengembangan SPAM Regional Pekalongan-Batang
 - 7). Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Pekalongan dan pembangunan pengaman pantai pesisir Pekalongan-Batang
 - 8). Pengembangan koridor industri Batang (sektor industri prioritas: industri mesin dan perlengkapan, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri semikonduktor, hilirisasi nikel)
 - 9). Pengembangan KIT Batang, termasuk infrastruktur pendukungnya seperti jalan, sistem penyediaan air baku dan air minum, telekomunikasi, dry port, pelabuhan, dsb.
 - 10). Pembangunan pipa gas bumi Cirebon–Semarang
 - 11). Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta–Surabaya
 - 12). Pengembangan kota agropolitan Pekalongan

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pekalongan tahun 2025-2029 didukung dengan program perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Bab VI Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan **RKPD Tahun 2030** yang akan menjadi tanggung jawab **Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan periode 2030-2034**.

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 - 2030 dijabarkan dalam **6 (enam)** urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, **18 (delapan belas)** urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, **6 (enam)** urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, **6 (enam)** unsur penunjang urusan pemerintahan, **1 (satu)** unsur pengawasan urusan pemerintahan, **1 (satu)** unsur kewilayahan dan **1 (satu)** unsur pemerintahan umum. Selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan PAUD, pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada pengembangan kurikulum adaptif berbasis karakter, soft skill dan potensi lokal melalui penyusunan dan implementasi kurikulum muatan lokal pilihan.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini pada pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan berbasis data dan analisis dalam bentuk rekomendasi teknis.

e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas bahasa dan sastra melalui penelitian, pembakuan, dan pengembangan materi pembelajaran.



2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, peningkatan kemitraan dengan perguruan tinggi untuk penanganan kesehatan prioritas dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

b. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pembinaan pengawasan industri farmasi.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif serta pelaksanaan program pemeriksaan spesialis keliling (spelling) di Masyarakat.

d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan mutu fasilitas pelayanan Kesehatan lanjutan dan primer sesuai standar; deteksi dini bagi ibu hamil, bayi baru lahir, usia remaja, usia produktif dan lansia; peningkatan posyandu siklus hidup yang aktif; pemberian PMT bagi balita *wasting*, *underweight*, *stunting* dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK); pemberian suplemen bagi ibu hamil anemia dan lansia; peningkatan implementasi kesehatan kerja di sektor formal dan informal; pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi balita, anak usia sekolah, usia dewasa dan lansia; deteksi dini penyakit tidak menular prioritas (hipertensi, diabetes melitus, kanker); skrining narkoba untuk pengemudi, anak sekolah, dan ASN Pemerintah Kabupaten Pekalongan; peningkatan penemuan dan pengobatan penyakit menular (TB, HIV, Malaria); pengawasan kualitas air dan udara; peningkatan implementasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 pilar; pengadaan obat, BHP, BMHP di RSUD/Puskesmas milik Dinas Kesehatan; pengintegrasian sistem kesehatan nasional; peningkatan cakupan imunisasi lengkap 14 antigen dan imunisasi rutin lengkap; peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan pembiayaan kesehatan; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana, serta pengembangan sarana dan prasarana di RSUD/Puskesmas milik Dinas Kesehatan.



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder kewenangan Kabupaten Pekalongan serta pengelolaan bangunan pengaman wilayah sungai. Pengelolaan sistem irigasi ditujukan untuk penyediaan air irigasi untuk mendukung produksi pangan. Pengelolaan bangunan pengaman wilayah sungai terutama untuk pengendalian dan perlindungan/pengamanan infrastruktur dan permukiman sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana banjir dan tanah longsor.

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk peningkatan akses air minum bagi rumah tangga di Kabupaten Pekalongan, terutama air minum perpipaan baik pedesaan maupun perkotaan guna pemenuhan layanan dasar air minum.

c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penyediaan prasarana dan sarana persampahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan persampahan.

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik (SPALD) untuk peningkatan akses air limbah bagi rumah tangga di Kabupaten Pekalongan, terutama pelayanan air limbah (individu dan komunal) dan layanan lumpur tinja, sebagai upaya pemenuhan layanan dasar air limbah.

e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota untuk penyehatan lingkungan, pencegahan timbulnya genangan dan atau banjir, serta pengamanan infrastruktur jalan. Pengelolaan dan pengembangan sistem dilaksanakan melalui perencanaan, pembangunan, serta operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan dan lingkungan.

f. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan antara lain melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan, serta rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung milik pemerintah untuk meningkatkan keandalan dan kelayakan bangunan, dan mendukung pelayanan publik.

g. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Kabupaten/Kota, melalui penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan, dan penataan bangunan dan lingkungan.



h. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, terutama jalan dan jembatan penghubung pusat kegiatan masyarakat, penghubung obyek wisata, penghubung pada fasilitas sosial/fasilitas umum, serta penghubung antar wilayah.

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada pembinaan SDM jasa konstruksi melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian tata ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal perumahan, meliputi antara lain pendataan, sosialisasi dan persiapan, pembangunan dan rehabilitasi, serta distribusi dan serah terima penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten/kota

c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana sarana utilitas umum perumahan.

e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan Kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi serta upaya pembinaan dan pengendalian program.



5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada peningkatan keterjangkauan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran.

c. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan Pencegahan Mitigasi Bencana, Penanganan Bencana dan pengoptimalan Sistem Penanggulangan Bencana.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS).

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada optimalisasi dalam penanganan rehabilitasi sosial untuk PPKS. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, terlantar, dan gelandangan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada optimalisasi perlindungan jaminan sosial untuk PPKS.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada optimalisasi penanganan Korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan makam pahlawan.



B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Program ini dilakukan untuk mendukung tersedianya informasi yang dibutuhkan dan mendukung penurunan pengangguran.

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. Program ini dilakukan untuk mendukung peningkatan SDM tenaga kerja.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada meningkatnya kesempatan kerja di Kabupaten Pekalongan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase lowongan kerja yang terpenuhi

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada optimalnya kerjasama kelembagaan Tripartit dan Bipartit. Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten; dan pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.



f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada pengoptimalan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan cadangan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja peningkatan jumlah sarana prasarana pendukung pengelolaan cadangan pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada upaya untuk lancarnya akses pangan bagi daerah rawan pangan di Kabupaten Pekalongan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pengawasan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan lingkup kabupaten/kota.

b. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee

Program ini diarahkan pada upaya untuk menyediakan ganti kerugian yang adil dan layak kepada pemilik tanah yang terdampak Pembangunan.

c. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada upaya untuk mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara optimal, seimbang, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD),



serta fasilitasi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi Pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada Lokasi super prioritas kerentanan iklim.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan Ruang Terbuka Hijau/RTH.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan pengelolaan limbah B3

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL-UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup/DELH, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan untuk memberikan apresiasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan dan fasilitasi sarpras pengelolaan sampah kepada kelompok masyarakat.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan pencatatan sipil.



c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan data kependudukan yang efektif dan efisien serta bisa menjadi dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada pengelolaan data kependudukan secara efisien, memastikan validitas data, serta menggunakan data kependudukan secara efektif untuk mendukung pengambilan Keputusan dan perumusan kebijakan oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat

b. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Program ini diarahkan pada optimalisasi kerjasama antar desa yang dapat meningkatkan ekonomi di Masyarakat.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada optimalisasi tata kelola administrasi pemerintah desa melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan asset desa, peningkatan kapasitas aparatur desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antarsektor, serta pengembangan BUMDes dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kesertaan KB.



c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga; serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota, penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota, pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan data center.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan *smart city*.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi dan memberikan izin usaha simpan pinjam kepada koperasi guna memastikan bahwa koperasi simpan pinjam memiliki legalitas dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan peningkatan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Kabupaten Pekalongan.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan untuk untuk menilai tingkat kesehatan KSP/USP berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.



d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antarkoperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

g. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Kabupaten Pekalongan dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, serta peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pelayanan

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.



13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**
Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.
- b. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**
Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.
- c. **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**
Program ini diarahkan pada peningkatan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Pekalongan.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, yang diarahkan pada perwujudan big data melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi digital yang dimiliki oleh pemerintah baik yang ada di aplikasi maupun yang ada di pusat data.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. **Program Pengembangan Kebudayaan**
Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan.
- b. **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**
Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian kepada masyarakat berupa fasilitasi ruang ekspresi budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesenian.
- c. **Program Pembinaan Sejarah**
Program ini diarahkan pada pelestarian sejarah lokal.
- d. **Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**
Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. **Program Pembinaan Perpustakaan**



Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Kabupaten Pekalongan.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Kabupaten Pekalongan.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pengelolaan arsip sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).

b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan Arsip.

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini diarahkan untuk mengatur akses dan penggunaan arsip, khususnya arsip yang bersifat tertutup atau memiliki keterbatasan akses. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa arsip hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak dan untuk kepentingan yang sesuai, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkandung dalam arsip.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pekalongan.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pekalongan.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan guna menjaga kelestarian ekosistem perikanan.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada meningkatnya produksi olahan hasil perikanan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:



a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten; kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten sebagai upaya peningkatan kunjungan wisatawan.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata ke dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penguatan promosi dan fasilitasi event.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui antara lain pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada penguatan intensifikasi produksi komoditas pangan pertanian untuk peningkatan produktivitas

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengembangan prasarana utama dalam produksi pertanian di Kabupaten Pekalongan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada upaya pengendalian dan pemantauan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk menjamin menurunnya angka kejadian penyakit hewan dan keamanan produk hasil hewan.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih; serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan SDM penyuluh. Program ini juga diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak.

4. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:



a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan bisnis yang terkait dengan *Online Single Submission (OSS)*.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini berfokus pada upaya mengoptimalkan dan meningkatkan jumlah dan kualitas sarana distribusi perdagangan terutama pasar yang berada di Kabupaten Pekalongan.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini difokuskan untuk terwujudnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Pekalongan.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada upaya pembinaan pelaku usaha ekspor komoditas unggulan di Kabupaten Pekalongan.

e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program ini mendukung terwujudnya standardisasi produk dan perlindungan konsumen terutama terkait dengan alat ukur takar timbang.

f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk-produk yang diproduksi di dalam negeri. Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diharapkan mampu mendorong produktivitas sektor industri melalui pengembangan SDM, sarana prasarana dan perluasan pasar produk hasil industri. Program ini diarahkan pada penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri di Kabupaten Pekalongan melalui peningkatan SDM industri melalui pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran online/offline dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi IKM.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada upaya pengendalian izin usaha industri sehingga perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional sehingga dapat diperoleh data industri yang handal dan berkualitas.

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**, yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerjasama



pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada Fasilitasi dan kebijakan pelaksanaan Otonomi Daerah dan kelancaran pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah, kewilayahan, kerjasama daerah dan keagamaan.

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada fasilitasi dan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam rangka menyelesaikan permasalahan perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan administrasi dan pelayanan kedinasan pimpinan daerah

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Program ini diarahkan pada kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerjasama daerah

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang perekonomian dan SDA; keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan



perencanaan kinerja lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyusunan dokumen manajemen kas, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD, pengamanan aset, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada optimalisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**, yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui Upaya pengadaan sesuai kebutuhan, pengembangan kompetensi ASN selaras dengan tujuan pembangunan daerah, promosi dan mutasi berdasarkan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel, pemberhentian ASN, serta menyediakan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN termasuk pemerintah desa ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian Dan Pengembangan

Rencana program prioritas pada unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pengembangan riset.



b. Program Riset Dan Inovasi Daerah

Program ini diarahkan diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerjasama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan di **Inspektorat Daerah** yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja pengawasan terhadap tata kelola, kepatuhan dan efektivitas tindak lanjut pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait Reformasi Birokrasi, Manajemen Risiko, penguatan integritas serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

G. Unsur Kewilayahan

Rencana program prioritas pada unsur kewilayahan di **19 (Sembilan belas) Kecamatan** yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada aktivitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada koordinasi penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan nasional, penanganan konflik sosial, serta koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di daerah

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyusunan administrasi pemerintah desa dan disiplin aparaturnya pemerintah desa.



H. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum (Kesatuan Bangsa Dan Politik) yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada upaya memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan guna meningkatkan kenyamanan, toleransi dan kerukunan hidup berbangsa dan beragama di masyarakat.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada upaya menumbuhkan kembangkan etika dan budaya politik serta kesadaran berdemokrasi masyarakat melalui pendidikan politik dengan melibatkan peran para *stakeholder*.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi dan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam meminimalisasi konflik dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

Indikasi rencana program prioritas beserta rincian kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Anggaran											Target akhir Periode RPJMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
						2024	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							495.510		415.707		425.816		441.966		454.982			
1.01.	PENDIDIKAN							210.042		210.240		215.466		223.638		230.223			
	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya akses, mutu, dan tata kelola layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	204.863	100,00	204.934	100,00	210.028	100,00	217.994	100,00	224.413	100,00	Kab Pekalongan	Pendidikan
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK)	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK)	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan	
			IUP.14. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	88,60	91,46	91,89		92,31		92,74		93,17		93,60		93,60	Kab Pekalongan	
	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan IPTEK.	Persentase muatan kurikulum yang dikembangkan	%		100,00	100,00	0	100,00	75	100,00	77	100,00	80	100,00	82	100,00	Kab Pekalongan	
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.	Persentase Guru Layak Mengajar	%		88,00	88,50	5.000	89,00	5.002	89,50	5.126	90,00	5.320	90,50	5.477	90,50	Kab Pekalongan	
			IUP.15. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%		60-65	60-65		60-65		60-65		60-65		65-70	65-70	65-70	Kab Pekalongan	
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya kepatuhan dan tata kelola lembaga pendidikan	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP)	%	100,00	100,00	100,00	0	100,00	50	100,00	51	100,00	53	100,00	55	100,00	Kab Pekalongan	
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Meningkatnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan bahasa dan sastra daerah dan nasional pada satuan pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa	%	100,00	100,00	100,00	179	100,00	179	100,00	183	100,00	190	100,00	196	100,00	Kab Pekalongan	
1.02.	KESEHATAN							200.966		121.035		124.044		128.749		132.540			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan dan kompetensi tenaga kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	0,00	2,70	2,97	1.009	3,19	1.009	3,51	1.034	3,86	1.073	4,24	1.105	4,24	Kab Pekalongan	Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya ketersediaan, keamanan, mutu, dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman yang memenuhi standar.	Cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	348	100,00	348	100,00	357	100,00	370	100,00	381	100,00	Kab Pekalongan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	-	52,63	68,42	316	78,95	316	89,47	324	94,74	337	100,00	347	100,00	Kab Pekalongan	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.	Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar	%		56,48	58,60	199.293	60,35	119.362	62,11	122.329	63,86	126.968	67,37	130.707	67,37	Kab Pekalongan	
			Jumlah kematian balita	kasus	211,00	204,00	201,00		198,00		195,00		192,00		189,00	189,00	189,00	Kab Pekalongan	
			Persentase Puskesmas dengan wilayah kerjanya memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%	-	7,69	15,38		23,07		30,76		38,46		46,15	46,15	46,15	Kab Pekalongan	
			Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	%	-	65,00	70,00		75,00		80,00		85,00		85,00	85,00	85,00	Kab Pekalongan	
			Pemeriksaan ANC 6 kali selama masa kehamilan	%	-	80,00	82,00		85,00		86,00		90,00		90,00	90,00	90,00	Kab Pekalongan	
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	-	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	80,00	80,00	Kab Pekalongan	
			Angka populasi bebas penyakit menular	%	-	90,00	90,00		91,00		92,00		93,00		95,00	95,00	95,00	Kab Pekalongan	
			Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	-	80,00	80,10		80,20		80,30		80,40		80,50	80,50	80,50	Kab Pekalongan	
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							66.826		66.749		68.184		70.770		72.855			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air secara berkelanjutan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi ((Sumber : IKK)	rasio	3,658	3,677	3,695	19.023	3,713	19.030	3,732	19.453	3,750	20.190	3,768	20.786	3,768	Kab Pekalongan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Anggaran											Target akhir Periode RPJMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan	
						2024	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
							Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
			Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir diwilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (IKK)	rasio	0	82,15	83,50		84,51		85,18		85,85		86,83		86,83	Kab Pekalongan		
			Rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi,dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan Kabupaten/Kota (IKK)	rasio	77,42	79,54	81,65		83,76		85,87		87,99		90,10		90,10	Kab Pekalongan		
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses air minum layak bagi penduduk	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (IKK)	%	88,47	88,62	88,78	3.950	88,93	3.951	89,06	4.050	89,24	4.203	89,39	4.327	89,39	Kab Pekalongan		
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terpenuhinya sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase TPA/TPST terbangun	%	67,82	68	68,15	100	68,30	7.000	68,45		68,6		68,75		68,75	Kab Pekalongan		
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya cakupan dan kualitas pengelolaan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK)	%	62,21	62,35	62,50	1.315	62,66	1.315	62,80	1.348	62,86	1.399	63,11	1.440	63,11	Kab Pekalongan		
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kapasitas sistem drainase jalan	Persentase Drainase (jalan) kondisi baik	%	44,5	44,54	44,58	3.014	55,62	3.015	44,66	3.090	44,7	3.207	44,74	3.301	44,74	Kab Pekalongan		
	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang aman, fungsional, dan sesuai dengan kaidah tata bangunan	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	4.550	100,00	2.552	100,00	2.615	100,00	2.714	100,00	2.794	100,00	Kab Pekalongan		
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Meningkatnya penataan kawasan dan lingkungan yang sesuai dengan RTBL	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	22,22	33,34	44,45	1.278	55,55	1.278	66,67	3.310	77,78	3.435	100	3.536	100	Kab Pekalongan		
	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya kualitas jaringan jalan untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan wilayah	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten (IKK)	%	78,29	78,69	79,09	33.142	79,49	28.153	79,89	33.853	80,29	35.137	80,69	36.171	76,54	Kab Pekalongan		
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kualitas pelaku jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan infrastruktur	Tingkat kemantapan Jembatan	%	87.248	87.248	87.695		88.142		89.036		89.483		89.589		89.589	Kab Pekalongan		
			Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (IKK)	%	33,15	39,67	46,19	135	52,72	135	59,24	138	65,76	144	72,28	148	72,28	Kab Pekalongan		
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (IKK)	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan		
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penataan ruang wilayah	Persentase Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL	%	27,76	28,57	42,85	320	42,85	320	57,14	328	57,14	341	71,43	351	71,43	Kab Pekalongan		
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							10.135		10.139		10.391		10.785		11.102				
	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi program	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	2.030	100,00	2.031	100,00	2.081	100,00	2.160	100,00	2.224	100,00	Kab Pekalongan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan		
	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (IKK)	%	0	2,10	2,15	5.800	2,20	5.802	2,25	5.946	2,30	6.172	2,35	6.354	2,35	Kab Pekalongan		
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya RTLH yang ditangani	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (IKK)	%	3,62	3,08	3,20	1.600	3,39	1.601	3,50	1.640	3,62	1.703	3,72	1.753	3,72	Kab Pekalongan		
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam mendukung hunian yang layak.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	685	100,00	685	100,00	702	100,00	729	100,00	750	100,00	Kab Pekalongan		
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya mutu layanan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah pengembang yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi	Jml	12,00	12,00	12,00	20	12,00	20	12,00	21	12,00	21	12,00	22	12,00	Kab Pekalongan		
1.05.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							4.721		4.723		4.840		5.024		5.172				
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya rasa aman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	2.730	100,00	2.730	100,00	2.798	100,00	2.904	100,00	2.990	100,00	Kab Pekalongan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan	serta Perlindungan Masyarakat	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penvelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan dan kecepatan respon dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (IKK)	%	23,88	24,00	24,25	355	24,50	355	24,75	364	25,00	378	25,25	389	25,25	Kab Pekalongan		
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (IKK)	menit	27,00	27,00	27,00		27,00		27,00		27,00		27,00		27,00	Kab Pekalongan		
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban non Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan		
	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui upaya mitigasi,	Persentase Warga NegaraYang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	1.637	100,00	1.637	100,00	1.678	100,00	1.742	100,00	1.793	100,00	Kab Pekalongan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
					2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target			
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
		kesiapsiagaan, dan penanganan darurat bencana yang terintegrasi.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Kab Pekalongan	
			Persentase Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang disusun	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Kab Pekalongan	
1.06.	SOSIAL							2.821		2.821		2.892		3.001		3.090				
	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya kualitas PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	%	31,19	32,00	32,50	430	33,00	430	33,50	441	34,00	458	34,50	471	34,50	Kab Pekalongan	Sosial	
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya perlindungan dan pemulihan hak-hak sosial warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	8	100,00	8	100,00	8	100,00	9	100,00	9	100,00	Kab Pekalongan		
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pemulihan dan fungsi sosial individu, keluarga, dan kelompok rentan untuk hidup mandiri.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	%	100,00	100,00	100,00	398	100,00	398	100,00	408	100,00	423	100,00	435	100,00	Kab Pekalongan		
			Persentase Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diluar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terlayani (%)	%	-	30,00	32,00		34,00		36,00		38,00		40,00		40,00	Kab Pekalongan		
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	Persentase Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Fakir Miskin yang Tergraduasi	%	-	0,70	2,07	1.370	4,15	1.370	6,22	1.405	8,29	1.458	10,37	1.501	10,37	Kab Pekalongan		
	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya kapasitas tanggap darurat dan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	365	100,00	365	100,00	374	100,00	388	100,00	400	100,00	Kab Pekalongan		
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terpenuhinya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan yang sesuai dengan standar	%	100,00	100,00	100,00	250	100,00	250	100,00	256	100,00	266	100,00	274	100,00	Kab Pekalongan		
2.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							86.841		86.917		89.077		92.455		95.178				
2.01.	TENAGA KERJA							2.198		2.199		2.254		2.339		2.408				
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan tenaga kerja yang efektif.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	35	100,00	35	100,00	36	100,00	37	100,00	38	100,00	Kab Pekalongan	Tenaga Kerja	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK)	%		30,00	31,00	1.674	32,00	1.674	33,00	1.716	34,00	1.781	35,00	1.833	35,00	Kab Pekalongan		
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (IKK)	%		40,41	40,52		40,65		40,70		40,75		40,80		40,80	Kab Pekalongan		
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	%		20,22	20,44	165	20,66	165	20,77	169	20,88	176	20,88	181		Kab Pekalongan		
	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya kualitas hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.	IUP.38. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan *)	%	27,52	100,00	27,60	325	27,65	325	27,70	333	27,75	346	27,80	356	27,80	Kab Pekalongan		
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK)	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan		
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							532		532		545		566		583				
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya implementasi PUG dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Persentase Anggaran responsif gender (ARG) dalam belanja langsung APBD (IKK)	%	6,76	6,76	6,77	100	6,78	100	6,79	103	6,80	106	6,82	110	6,82	Kab Pekalongan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (IKK)	Rasio	15,00	15,00	14,73	305	14,46	305	14,18	313	13,92	325	13,64	334	13,64	Kab Pekalongan		
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan kesejahteraan sosial.	Tingkat pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan anak sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	Kab Pekalongan		
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tersedianya data terpilah dan sistem informasi gender dan anak yang akurat dan dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan.	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	100,00	100,00	100,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	Kab Pekalongan		
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi.	Persentase hak-hak anak yang telah diimplementasikan	%	40,00	50,00	60,00	21	70,00	21	80,00	22	90,00	22	100,00	23	100,00	Kab Pekalongan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
						2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
								Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	101	100,00	101	100,00	104	100,00	107	100,00	111	100,00	Kab Pekalongan		
2.03.	PANGAN							613		614		629		653		672				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan akses sumber daya pangan lokal yang mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan daerah.	Persentase Cadangan Pangan (IKK)	%	2,08	100,00	100,00	0	100,00	50	100,00	51	100,00	53	100,00	55	100,00	Kab Pekalongan	Pangan	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta ketahanan pangan rumah tangga.	Konsumsi energi perkapita	(Kkal/kap/hari)	2.156,00	2.100,00	2.100,00	578	2.100,00	529	2.100,00	542	2.100,00	562	2.100,00	579	2.100,00	Kab Pekalongan		
			Konsumsi protein perkapita	(Kkal/kap/hari)	66,62	57,00	57,00		57,00		57,00		57,00		57,00		57,00	Kab Pekalongan		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat	Rasio ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan /beras	%	350,00	350,00	360,00	25	370,00	25	380,00	26	390,00	27	400,00	27	400,00	Kab Pekalongan		
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan dan hewan yang dikonsumsi masyarakat.	Persentase pangan segar yang aman yang aman di konsumsi	id	79,05	80,00	81,00	10	82,00	10	83,00	10	84,00	11	85,00	11	85,00	Kab Pekalongan		
2.04.	PERTANAHAN							120		120		123		128		131				
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya kepastian hukum dan penyelesaian konflik atas tanah garapan secara adil dan damai.	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	20	100,00	20	100,00	21	100,00	21	100,00	22	100,00	Kab Pekalongan	Pertanahan	
	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Meningkatnya pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah	Persentase ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	25	100,00	25	100,00	26	100,00	27	100,00	27	100,00	Kab Pekalongan		
	Program Penatagunaan Tanah	Tertatanya penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	75	100,00	75	100,00	77	100,00	80	100,00	82	100,00			
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP							14.242		14.247		14.601		15.155		15.601				
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	30	100,00	30	100,00	31	100,00	32	100,00	33	100,00	Kab Pekalongan	Lingkungan Hidup	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. persentase Dokumen Hasil Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	%	-	100,00	100,00	925	100,00	925	100,00	948	100,00	984	100,00	1.013	100,00	Kab Pekalongan		
			2. persentase Peningkatan Luas Pemulihan Kerusakan Lingkungan yang ditangani	%	-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Havati (Kehati)	Terlestarikannya keanekaragaman hayati sebagai bagian dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	Presentase RTH dan Taman Kehati lainnya dalam kondisi baik	%	-	67,00	72,00	475	75,00	475	79,00	487	82,00	505	85,00	520	85,00	Kab Pekalongan		
			Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan kehati (perencanaan, penilaian dan evaluasi kehati)	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang aman, terkendali, dan sesuai dengan standar lingkungan.	Persentase pelaku usaha dan/atau Kegiatan yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	-	83,00	84,00	85	85,00	85	86,00	87	87,00	90	88,00	93	88,00	Kab Pekalongan		
	Program Pembiayaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kegiatan terhadap perizinan lingkungan hidup dan ketentuan PPLH.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (IKK)	%	-	100,00	90,00	55	80,00	55	70,00	56	60,00	59	50,00	60	50,00	Kab Pekalongan		
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	80	100,00	80	100,00	82	100,00	85	100,00	88	100,00	Kab Pekalongan		
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya motivasi dan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui sistem penghargaan lingkungan hidup.	Jumlah Lembaga dan/atau Perorangan yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	Lembaga/ Perorangan	26,00	19,00	13,00	20	13,00	20	13,00	21	13,00	21	13,00	22	13,00	Kab Pekalongan		
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya responsivitas dan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait isu lingkungan hidup secara cepat dan tepat.	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	15	100,00	15	100,00	15	100,00	16	100,00	16	100,00	Kab Pekalongan		
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan sampah dari sumber hinga ke TPA.	IUP.47. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	4,01	12,83	16,20	12.557	20,70	12.561	24,10	12.874	28,30	13.362	30,00	13.755	30,00	Kab Pekalongan		
			Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (IKK)	%	33,50	46,58	49,95		54,45		57,85		62,05		63,75		63,75	Kab Pekalongan		
2.06.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							228		228		233		242		249				
	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan penduduk secara menyeluruh dan berkelanjutan.	Persentase Perekaman KTP Elektronik (IKK)	%	99,99	99,991	99,992	56	99,993	56	99,994	58	99,995	60	99,996	62	99,996	Kab Pekalongan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK)	%	60,71	60,75	60,80		60,85		60,90		60,95		61,00		61,00	Kab Pekalongan		
	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dll)	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	100,00	100,00	100,00	81	100,00	81	100,00	83	100,00	86	100,00	89	100,00	Kab Pekalongan		
			Persentase kepemilikan akta kelahiran (IKK)	%	97,50	97,51	97,52		97,53		97,54		97,55		97,56		97,56	Kab Pekalongan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
						2024	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan yang andal, terintegrasi, dan mudah diakses untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK)	perangkat daerah	-	1,00	2,00	76	3,00	76	4,00	78	5,00	81	6,00	84	6,00	Kab Pekalongan		
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya data dan profil kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan berbasis data.	Cakupan penerbitan profil kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	14	100,00	14	100,00	14	100,00	15	100,00	15	100,00	Kab Pekalongan		
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							6.902		6.905		7.076		7.345		7.561				
	Program Penataan Desa	Tertatanya wilayah administrasi desa s sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase desa yang difasilitasi dalam kegiatan penataan desa	%	-	17,65	39,71	1.960	47,06	1.961	55,51	2.009	62,50	2.086	69,49	2.147	69,49	Kab Pekalongan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya jejaring kerja sama antar-desa dan pihak lain dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasama desa	%	18,01	19,85	23,53	30	27,21	30	30,88	31	34,56	32	38,24	33	38,24	Kab Pekalongan		
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pelayanan publik.	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan dan administrasi pemerintahan desa yang baik	%	-	30,00	34,00	4.512	38,00	4.514	42,00	4.626	46,00	4.802	50,00	4.943	50,00	Kab Pekalongan		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya peran dan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	%	1,52	4,79	8,28	400	11,78	400	15,28	410	18,62	426	21,66	438	21,66	Kab Pekalongan		
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							12.438		12.443		12.752		13.236		13.625				
	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri	%	7,40	7,50	8,00	110	8,50	110	9,00	113	9,50	117	10,00	120	10,00	Kab Pekalongan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Indeks pembangunan berwawasan kependudukan	Skala	66,00	67,00	68,00		69,00		70,00		71,00		72,00		72,00			
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan program KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (IKK)	%	67,00	62,10	62,20	6.263	62,30	6.265	62,40	6.420	62,50	6.664	62,60	6.860	62,60	Kab Pekalongan		
			Persentase Kehamilan tidak diinginkan	%	18,00	17,40	16,70		16,10		15,60		15,00		14,50		14,50			
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Meningkatnya ketahanan, kemandirian, dan kesejahteraan keluarga melalui lembaga ketahanan keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	37,13	37,18	37,20	6.066	37,25	6.068	37,50	6.219	37,75	6.455	38,00	6.645	38,00	Kab Pekalongan		
			Indeks Lansia Berdaya	Indeks	56,2	56,6	57,00		57,4	-	57,8		58,2		58,6		58,6	Kab Pekalongan		
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	%	85,7	86,2	86,6		87,1		87,5		88,00		88,5		88,5	Kab Pekalongan		
2.09.	PERHUBUNGAN							39.009		39.023		39.993		41.509		42.732				
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kelancaran, keselamatan, dan keteraturan lalu lintas serta kualitas pelayanan angkutan jalan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.	Persentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik	%	73,17	73,67	74,17	39.009	74,67	39.023	75,17	39.993	75,67	41.509	76,17	42.732	76,17	Kab Pekalongan	Perhubungan	
			Persentase kepemilikan KIR	%	76,41	77,00	78,00		79,00		80,00		81,00		82,00		82,00			
			Persentase angkutan umum dalam kondisi baik	%	69,30	70,18	70,55		70,72		70,85		71,00		71,20		71,20	Kab Pekalongan		
			Rasio Penanganan Daerah Rawan kecelakaan (DRK)	angka	0,03	0,08	0,13		0,17		0,21		0,25		0,29		0,29	Kab Pekalongan		
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							1.600		1.601		1.640		1.703		1.753				
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya diseminasi informasi yang akurat, transparan, dan inklusif	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	65,00	70,00	75,00	1.100	80,00	1.100	85,00	1.128	90,00	1.171	95,00	1.205	100,00	Kab Pekalongan	Komunikasi dan Informatika	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui pengembangan dan pemanfaatan aplikasi informatika yang teroadu dan andal.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100,00	100,00	100,00	500	100,00	500	100,00	513	100,00	532	100,00	548	100,00	Kab Pekalongan		
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	22,00	23,00	24,00		25,00		26,00		27,00		28,00		28,00	Kab Pekalongan		
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							882		927		950		986		1.015				
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnyalegalitas usaha simpan pinjam koperasi	Persentase fasilitas penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	%	100,00	100,00	100,00	0	100,00	25	100,00	26	100,00	27	100,00	27	100,00	Kab Pekalongan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap prinsip tata kelola yang sehat dan regulasi yang berlaku.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	%	100,00	100,00	100,00	60	100,00	40	100,00	41	100,00	43	100,00	44	100,00	Kab Pekalongan		
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya kinerja dan keberlanjutan usaha KSP/USP koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	0	100,00	10	100,00	10	100,00	11	100,00	11	100,00	Kab Pekalongan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Anggaran											Target akhir Periode RPJMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan		
						2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Target	
							Target	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkeroperasian	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam pengelolaan usaha	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	100,00	100,00	100,00	0	100,00	50	100,00	51	100,00	53	100,00	55	100,00	Kab Pekalongan			
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya kemandirian koperasi	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	%		50,00	55,00	36	60,00	36	65,00	37	70,00	38	75,00	39	75,00	Kab Pekalongan			
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (IKK)	%		20,00	22,00	707	25,00	687	28,00	704	30,00	731	35,00	753	35,00	Kab Pekalongan			
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya akses pasar, pembiayaan, teknologi, dan inovasi bagi UMKM dalam rangka peningkatan produktivitas	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%		50,00	55,00	79	60,00	79	65,00	80	70,00	84	75,00	86	75,00	Kab Pekalongan			
2.12.	PENANAMAN MODAL							405		405		415		431		444					
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya daya tarik daerah sebagai lokasi investasi	Persentase pemutakhiran data potensi invesatasi	%	0	0	4,54	65	8,33	65	11,53	67	15,38	69	19,23	71	19,23	Kab Pekalongan	Penanaman Modal		
	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya minat dan realisasi investasi di daerah	Persentase promosi di kab pekalongan	%	100,00	100,00	100,00	15	100,00	15	100,00	15	100,00	16	100,00	16	100,00	Kab Pekalongan			
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas dan kecepatan pelayanan perizinan penanaman modal yang terintegrasi dan berbasis elektronik.	persentase ijin yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	145	100,00	145	100,00	149	100,00	154	100,00	159	100,00	Kab Pekalongan			
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha/investor sesuai ketentuan perizinan dan rencana investasi yang telah ditetapkan.	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	%	47,12	47,27	47,33	80	47,47	80	47,57	82	47,73	85	47,73	88	47,73	Kab Pekalongan			
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya data dan sistem informasi penanaman modal yang akurat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.	Persentase layanan Informasi pelayanan publik yang terintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00	103	100,00	106	100,00	110	100,00	Kab Pekalongan			
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							3.505		3.506		3.593		3.730		3.839					
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan daya saing pemuda dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (IKK)	%	5,22	5,24	5,28	705	5,30	705	5,32	723	5,35	750	5,38	772	5,38	Kab Pekalongan	Kepemudaan dan Olahraga		
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (IKK)	%	7,50	7,55	7,60		7,65		7,70		7,75		7,80		7,80	Kab Pekalongan			
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya prestasi, partisipasi, dan budaya olahraga di masyarakat	Peningkatan Prestasi Olahraga (IKK)	%	37,71	38,00	40,00	2.400	42,00	2.401	45,00	2.461	48,00	2.554	48,00	2.629	48,00	Kab Pekalongan			
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kepramukaan	Persentase kwartir ranting yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	400	100,00	400	100,00	410	100,00	426	100,00	438	100,00	Kab Pekalongan			
2.14.	STATISTIK							300		300		308		319		329					
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Tersedianya data dan statistik sektoral untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	300	100,00	300	100,00	308	100,00	319	100,00	329	100,00	Kab Pekalongan	Statistik		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan			
2.15.	PERSANDIAN							300		300		308		319		329					
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah (IKK)	nilai	II	I	I	300	I	300	I	308	II	319	II	329	II	Kab Pekalongan	Persandian		
2.16.	KEBUDAYAAN							2.008		2.008		2.058		2.136		2.199					
	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah secara berkelanjutan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	100,00	100,00	100,00	655	100,00	655	100,00	671	100,00	696	100,00	717	100,00	Kab Pekalongan	Kebudayaan		
			Terlestarikannya Cagar Budaya (IKK)	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan			
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya eksistensi dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional daerah	Cakupan gelar seni budaya	%	100,00	100,00	100,00	950	100,00	950	100,00	974	100,00	1.011	100,00	1.041	100,00	Kab Pekalongan			
	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap sejarah dan jati diri bangsa	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	100,00	100,00	100,00	253	100,00	253	100,00	259	100,00	269	100,00	277	100,00	Kab Pekalongan			
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya cagar budaya sebagai warisan sejarah dan identitas daerah	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	%	100,00	100,00	100,00	150	100,00	150	100,00	154	100,00	160	100,00	164	100,00	Kab Pekalongan			
2.17.	PERPUSTAKAAN							1.119		1.119		1.147		1.191		1.226					
	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas layanan dan akses masyarakat terhadap perpustakaan sebagai pusat pembelajaran	IUP.19.Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,09	0,09	0,16	1.068	0,30	1.069	0,45	1.095	0,59	1.137	0,73	1.170	0,73	Kab Pekalongan	Perpustakaan		
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Terlestarikannya koleksi nasional dan naskah kuno sebagai warisan budaya dan sumber pengetahuan bangsa	Persentase Perpustakaan yang dibina	%	47,05	47,15	47,15		47,25		47,59		48,13		49,00		49,00				
		Terlestarikannya koleksi nasional dan naskah kuno sebagai warisan budaya dan sumber pengetahuan bangsa	Persentase naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayah nya	%	100,00	100,00	100,00	51	100,00	51	100,00	52	100,00	54	100,00	56	100,00	Kab Pekalongan			
2.18.	KEARSIPAN							440		440		451		468		482					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
						2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tertib arsip dinamis dan statis dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	250	100,00	250	100,00	256	100,00	266	100,00	274	100,00	Kab Pekalongan	Kearsipan	
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Terjaminnya keamanan dan keberlangsungan arsip vital serta arsip statis sebagai memori kolektif bangsa	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	130	100,00	130	100,00	133	100,00	138	100,00	142	100,00	Kab Pekalongan		
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Meningkatnya pemanfaatan arsip oleh publik secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP	%	100,00	100,00	100,00	60	100,00	60	100,00	62	100,00	64	100,00	66	100,00	Kab Pekalongan		
3.	URUSAN PILIHAN							11.933		11.887		12.182		12.644		13.017				
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN							2.987		2.988		3.062		3.178		3.272				
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap	Total Produksi Perikanan (Tangkap) kabupaten/kota (IKK)	Ton	5.983,22	6.067,00	6.152,00	1.086	6.244,00	1.087	6.337,00	1.114	6.443,00	1.156	6.529,00	1.190	6.443,00	Kab Pekalongan	Kelautan dan Perikanan	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan budidaya	Total Produksi Perikanan (Budidaya) kabupaten/kota (IKK)	Ton	9.223,00	9.485,00	9.648,00	1.340	9.817,00	1.341	9.992,00	1.374	10.174,00	1.426	10.362,00	1.468	10.174,00	Kab Pekalongan		
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha/keompok masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	persentase Kelompok Masyarakat Pengawas yang Terbina	%	75,00	87,50	87,50	100	90,00	100	90,00	103	92,50	106	95,00	110	92,50	Kab Pekalongan		
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya nilai tambah dan akses pasar hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan	(kg/kapita/tahun)	33,26	26,18	33,86	460	34,37	460	34,89	472	35,41	489	35,94	504	35,41	Kab Pekalongan		
3.02.	PARIWISATA							1.975		1.976		2.025		2.102		2.163				
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kualitas dan daya saing destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan destinasi wisata	%	30,30	5,00	5,00	1.200	5,00	1.200	5,00	1.230	5,00	1.277	5,00	1.315	5,00	Kab Pekalongan	Pariwisata	
	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata yang efektif dan terintegrasi.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota (IKK)	%	10,71	10,80	10,90	625	11,00	625	11,10	641	11,20	665	11,30	685	11,30	Kab Pekalongan		
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas dan daya saing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Tingkat hunian akomodasi (IKK)	%	n/a	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	Kab Pekalongan		
			Cakupan kelompok usaha Pariwisata dan ekraf yang dibina	%	55,00	55,00	55,00	150	56,00	150	57,00	154	58,00	160	59,00	164	59,00	Kab Pekalongan		
3.03.	PERTANIAN							3.877		3.878		3.975		4.126		4.247				
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana produksi pertanian	Produksi ternak (daging, telur dan susu)	Kg	18.988.961	18.790.233	18.936.447	607	19.084.266	607	19.233.712	622	19.384.803	646	19.537.558	665	19.537.558,00	Kab Pekalongan	Pertanian	
			Produksi produk hortikultura (durian dan alpukat)	Kw/Tahun	230.331,00	230.561,00	230.792,00		231.023,00		231.254,00		231.485,00		231.716,00		231.716,00	Kab Pekalongan		
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun (IKK)	Kw/Ha	53,32	53,46	53,54		53,62		53,70		53,78		53,86		53,86	Kab Pekalongan		
			Produksi GKP UPT	Ton	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	Kab Pekalongan		
			Persentase LKMA PUAP Terdampingi	%	9,88	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan		
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian	Persentase pertumbuhan prasarana pertanian	%	14,74	5,00	5,00	2.236	5,00	2.237	5,00	2.293	5,00	2.379	5,00	2.450	5,00	Kab Pekalongan		
			Luas Tanam Komoditas Pilihan Perkebunan (Tembakau)	Ha	55,00	63,00	68,00		73,00		78,00		83,00		88,00		88,00	Kab Pekalongan		
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya status kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan untuk mendukung ketahanan pangan	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (IKK)	%	29,97	5,00	5,00	218	5,00	218	5,00	223	5,00	231	5,00	238	5,00			
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya mitigasi dan respons terhadap risiko bencana yang mengancam sektor pertanian	Persentase wilayah bebas bencana pertanian	%	96,27	65,00	68,25	120	71,66	120	75,25	123	79,01	128	82,96	131	82,96			
			Komoditas Perkebunan yang disediakan untuk mengantisipasi DPI	Komoditas	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi dan inovasi pertanian	Persentase kelompok tani terbina	%	80,00	81,34	81,84	697	82,34	697	82,84	714	83,34	741	83,84	763	83,84	Kab Pekalongan		
3.04.	KEHUTANAN																			
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																			
3.06.	PERDAGANGAN							2.649		2.600		2.665		2.766		2.847				
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	9	100,00	9	100,00	9	100,00	9	100,00	9	100,00	Kab Pekalongan	Perdagangan	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan efisiensi sistem logistik perdagangan	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan (layak)	%	83,00	83,00	83,00	2.140	91,00	2.091	91,00	2.143	100,00	2.224	100,00	2.289	100,00	Kab Pekalongan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP/JMD	Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RP/JMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan	
						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
						2024	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Terkendalinya harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di masyarakat.	Persentase Agen dan Pasar Rakyat yang dipantau ketersediaan Bapokting IUP.29_Disparitas Harga	%	100,00	100,00	100,00	30	100,00	30	100,00	31	100,00	32	100,00	33	100,00	Kab Pekalongan	
	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya daya saing dan volume ekspor produk unggulan daerah.	Nilai ekspor daerah	ribu US\$	561.384,00	562.000,00	563.000,00	348	564.000,00	348	565.000,00	357	567.000,00	370	567.000,00	381	± 10	Kab Pekalongan	
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan terpenuhinya hak-hak konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UUTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK)	%	71,35	72,20	73,10	105	73,43	105	73,70	108	74,20	112	74,50	115	74,20	Kab Pekalongan	
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan daya saing produk dalam negeri di pasar domestik.	Persentase pelaku usaha potensial ekspor yang mendapatkan fasilitas promosi,pemasaran dan peningkatan pengguna	%		0,17	0,18	18	0,19	18	0,20	18	0,21	19	0,22	19	0,22	Kab Pekalongan	
3.07.	PERINDUSTRIAN						345		345		354		367		378				
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Tersusunnya perencanaan pembangunan industri yang terarah dan mendorong pertumbuhan industri berdaya saing.	persentase Peningkatan nilai produksi IKM	%		0,18	0,20	228	0,21	228	0,22	234	0,23	243	0,24	250	0,25	Kab Pekalongan	Perindustrian
			Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota (IKK)	%	0,50	0,51	0,52		0,53		0,54		0,55		0,56		0,56	Kab Pekalongan	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kepatuhan dan tertib administrasi pelaku usaha industri	persentase pengajuan legalitas usaha IKM (IUI, IPUI, IUKI, IUPKI, Merk,Halal, PIRT) yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	67	100,00	67	100,00	68	100,00	71	100,00	73	100,00	Kab Pekalongan	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK)	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data industri yang akurat dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	50	100,00	50	100,00	51	100,00	53	100,00	55	100,00	Kab Pekalongan	
3.08.	TRANSMIGRASI						100		100		103		106		110				
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kesiapan calon transmigran	Persentase Calon Transmigran Terdaftar yag mendapatkan pembinaan	%	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00	103	100,00	106	100,00	110	100,00	Kab Pekalongan	Transmigrasi
4.	UNSUR PENDUKUNG						29.621		29.631		30.368		31.519		32.448				
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH						8.804		8.807		9.026		9.369		9.644				
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya efektivitas koordinasi urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	7.140	100,00	7.142	100,00	7.320	100,00	7.598	100,00	7.821	100,00	Kab Pekalongan	Sekretariat Daerah
			Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan	
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Bina Mental, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan	Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	%	100,00	100,00	100,00	1.664	100,00	1.665	100,00	1.706	100,00	1.771	100,00	1.823	100,00	Kab Pekalongan	
			Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan	
			Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa (UKPBJ)	Angka	9,00	9,00	9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00	Kab Pekalongan	
4.02.	SEKRETARIAT DPRD						20.817		20.824		21.341		22.151		22.803				
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD	Persentase kelancaran pelaksanaan rapat Paripurna	%	100,00	100,00	100,00	20.817	100,00	20.824	100,00	21.341	100,00	22.151	100,00	22.803	100,00	Kab Pekalongan	Sekretariat DPRD
			Persentase rapat penganggaran yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan	
			Persentase pelaksanaan pengkatan kapasitas DPRD yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Kab Pekalongan	
5.	UNSUR PENUNJANG						410.786		410.850		421.063		437.032		449.902				
5.01.	PERENCANAAN						3.085		3.008		3.082		3.199		3.293				
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang terukur dan berorientasi hasil	Persentase Keselarasan RP/JMD dengan RKPd	%	100,00	100,00	100,00	1.990	100,00	1.913	100,00	1.960	100,00	2.035	100,00	2.094	100,00	Kab Pekalongan	Perencanaan
			Persentase capaian Indikator Sasaran Daerah	%	67,00	60,00	65,00		67,00		70,00		80,00		85,00		85,00	Kab Pekalongan	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya sinergi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	100,00	100,00	1.095	100,00	1.095	100,00	1.122	100,00	1.165	100,00	1.199	100,00	Kab Pekalongan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
					2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		daerah	Persentase ketercapaian indikator kinerja Program pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Kab Pekalongan		
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Kab Pekalongan		
			Persentase ketercapaian indikator kinerja Program pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00			
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Kab Pekalongan		
			Persentase ketercapaian indikator kinerja Program pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Kab Pekalongan		
5.02.	KEUANGAN								405.388	405.529		415.609	431.372		444.075					
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan tepat waktu	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) (IKK)	%	64,34	65,00	65,00	399.646	65,00	399.785	65,00	409.723	65,00	425.262	65,00	437.785	65,00	Kab Pekalongan	Keuangan	
			Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK)	%	1,10	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	Kab Pekalongan		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah secara legal dan efisien	Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	%	20,00	22,50	25,00	2.784	27,50	2.785	30,00	2.854	32,50	2.962	35,00	3.049	35,00	Kab Pekalongan		
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan optimalisasi pendapatan daerah yang mendukung kemandirian fiskal.	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD (IKK)	%	0,86	0,90	0,90	2.958	0,90	2.959	0,90	3.033	0,90	3.148	0,90	3.240	0,90	Kab Pekalongan		
			Rasio PAD (IKK)	%	16,25	17,00	17,00		17,00		17,00		17,00		17,00		17,00	Kab Pekalongan		
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,40	0,68	0,71		0,74		0,77		0,80		0,83		0,83	Kab Pekalongan		
5.03.	KEPEGAWAIAN							1.080	1.080		1.107	1.149		1.183						
	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya profesionalisme, kompetensi, dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan MenegahDasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	76,23	59,00	59,58	1.080	59,78	1.080	60,28	1.107	61,78	1.149	62,28	1.183	62,28	Kab Pekalongan	Kepegawaian	
			Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	14,87	17,92	18,37		18,62		18,87		19,12		19,37		19,37	Kab Pekalongan		
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							500	500		513	532		548						
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif, dan adaptif terhadap perubahan	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	43,03	56,72	56,87	500	57,02	500	57,17	513	57,32	532	57,47	548	57,62	Kab Pekalongan	Pendidikan dan Pelatihan	
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							733	733		751	780		803						
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Tersedianya rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	%	100,00	100,00		0		-		-		-		-		Kab Pekalongan	Penelitian dan Pengembangan	
	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya kapasitas riset dan inová	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	%	n/a	n/a	100,00	733	100,00	733	100,00	751	100,00	780	100,00	803	100,00	Kab Pekalongan		
6.	UNSUR PENGAWASAN							1.520	1.521		1.559	1.618		1.665						
6.01.	INSPEKTORAT							1.520	1.521		1.559	1.618		1.665						
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan	Persentase Rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti	%	93,63	92,00	92,10	1.086	92,20	1.086	92,30	1.113	92,40	1.155	92,50	1.189	92,50	Kab Pekalongan	Pengawasan	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tersusunnya kebijakan internal serta meningkatnya kapasitas perangkat daerah melalui pendampingan dan asistensi yang berkelanjutan.	Persentase OPD yang mendapat nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	%	51,11	60,00	68,89	434	75,56	434	80,00	445	84,44	462	88,89	476	88,89	Kab Pekalongan		
7.	UNSUR KEWILAYAHAN						8.937	11.351	11.385		11.668	12.111		12.468						
7.01.	KECAMATAN KAJEN							986	987		1.011	1.050		1.081						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Kajen	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	730	100	730	100	748	100	777	100	800	100	Kab Pekalongan		
			Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan		
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan transibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	25	100	25	100	26	100	27	100	27	100	Kab Pekalongan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan	
					2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target				
						Target	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					Rp
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas <u>Pembinaan Wawasan Kebangsaan</u>	%	100	100	100	130	100	130	100	134	100	139	100	143	100	Kab Pekalongan			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	100	100	100	103	100	106	100	110	100		Kab Pekalongan			
7.01.	KECAMATAN SRAGI							790		790		810		841		866					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, <u>transparan, dan akuntabel.</u>	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	12	100	12	100	12	100	13	100	13	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Sragi		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis <u>potensi lokal.</u>	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	657	100	657	100	673	100	699	100	719	100	Kab Pekalongan			
			Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan <u>keterlibatan umum</u>	Persentase penanganan gangguan <u>trantibumlinmas di tingkat kecamatan</u>	%	100	100	100	10	100	10	100	10	100	11	100	11	100	Kab Pekalongan			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas <u>Pembinaan Wawasan Kebangsaan</u>	%	100	100	100	91	100	91	100	93	100	97	100	99	100	Kab Pekalongan			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	21	100	21	100	21	100	22	100	23	100	Kab Pekalongan			
	7.01.	KECAMATAN WIRADESA							3.280		3.281		3.363		3.490		3.593				
		Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, <u>transparan, dan akuntabel.</u>	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	60	100	60	100	62	100	64	100	66	100		Kab Pekalongan	Kecamatan Wiradesa
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis <u>potensi lokal.</u>	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	%	100	100	100	3.075	100	3.076	100	3.153	100	3.272	100	3.368	100	Kab Pekalongan			
			Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Meningkatnya kondisi ketentraman dan keterlibatan umum	Persentase Penanganan Gangguan <u>Trantibumlinmas di Tingkat Kecamatan</u>	%	100	100	100	20	100	20	100	21	100	21	100	22	100	Kab Pekalongan			
Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan fasilitas Pembinaan <u>Wawasan Kebangsaan</u>	%	100	100	100	95	100	95	100	97	100	101	100	104	100	Kab Pekalongan			
			Persentase Pelaksanaan Urusan Kepala Daerah yang ditugaskan di tingkat Kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan			
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/ Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang disusun sesuai Standar pelaporan	%	100	100	100	30	100	30	100	31	100	32	100	33	100	Kab Pekalongan			
7.01.	KECAMATAN KEDUNGWUNI							2.098		2.098		2.150		2.232		2.298					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, <u>transparan, dan akuntabel.</u>	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	0	100	60	100	61	100	64	100	66	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Kedungwuni		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis <u>potensi lokal.</u>	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	1.863	100	1.803	100	1.848	100	1.918	100	1.975	100	Kab Pekalongan			
			Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	0	100		100		100		100		100				
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan keterlibatan umum	Persentase penanganan gangguan <u>trantibumlinmas di tingkat kecamatan</u>	%	100	100	100	21	100	21	100	21	100	22	100	23	100	Kab Pekalongan			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas <u>Pembinaan Wawasan Kebangsaan</u>	%	100	100	100	188	100	188	100	193	100	200	100	206	100	Kab Pekalongan			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	26	100	26	100	27	100	28	100	29	100	Kab Pekalongan			
7.01.	KECAMATAN BUARAN							1.940		1.940		1.988		2.064		2.125					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, <u>transparan, dan akuntabel.</u>	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	62	100	62	100	63	100	66	100	67	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Buaran		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Anggaran											Target akhir Periode RPJMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan		
						2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					Tahun 2030	
							Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	1.832	100	1.833	100	1.879	100	1.950	100	2.007	100	Kab Pekalongan			
			Cakupan Sarana dan Prasarana Kelurahan dalam Kondisi Baik	%	100	100	100		100	-	100		100		100		100				
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	6	100	6	100	6	100	7	100	7	100	Kab Pekalongan			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	23	100	23	100	24	100	25	100	26	100	Kab Pekalongan			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	16	100	16	100	16	100	17	100	17	100	Kab Pekalongan			
7.01.	KECAMATAN TIRTO							149		149		153		159		163					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100,00	100	100	47	100	47	100	48	100	50	100	51	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Tirto		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100,00	100	100	47	100	47	100	48	100	50	100	51	100	Kab Pekalongan			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100,00	100	100	7	100	7	100	8	100	8	100	8	100	Kab Pekalongan			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100,00	100	100	30	100	30	100	31	100	32	100	33	100	Kab Pekalongan			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100,00	100	100	18	100	18	100	18	100	19	100	20	100	Kab Pekalongan			
7.01.	KECAMATAN BOJONG							233		233		239		248		255					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	39	100	39	100	40	100	42	100	43	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Bojong		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	100	100	101	100	103	100	107	100	110	100	Kab Pekalongan			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	24	100	24	100	25	100	26	100	27	100	Kab Pekalongan			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	38	100	38	100	39	100	41	100	42	100	Kab Pekalongan			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	31	100	31	100	31	100	33	100	34	100	Kab Pekalongan			
7.01.	KECAMATAN WONOPRINGGO							95		125		128		133		137					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	40	100	40	100	41	100	43	100	44	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Wonopringgo		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	15	100	15	100	15	100	16	100	16	100	Kab Pekalongan			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	10	100	10	100	10	100	11	100	11	100	Kab Pekalongan			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	30	100	30	100	31	100	32	100	33	100	Kab Pekalongan			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	0	100	30	100	31	100	32	100	33	100	Kab Pekalongan			
7.01.	KECAMATAN KARANGANYAR							331		332		340		353		363					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan				
					2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target							
						Target	Target	Rp	145	Target	Rp	145	Target	Rp	149	Target					Rp	154	Target	Rp
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100,00	100	100		145	100		145	100		149	100		159	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Karanganyar			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100,00	100	100		41	100		41	100		42	100		44	100	45		100	Kab Pekalongan	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100,00	100	100		24	100		24	100		25	100		26	100	27		100	Kab Pekalongan	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100,00	100	100		77	100		77	100		79	100		82	100	84		100	Kab Pekalongan	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100,00	100	100		44	100		44	100		45	100		47	100	49		100	Kab Pekalongan	
7.01.	KECAMATAN DORO								136			136			139			145			149			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100		35	100		35	100		35	100		37	100		38	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Doro
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100		40	100		40	100		41	100		43	100		44	100	Kab Pekalongan	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100		20	100		20	100		21	100		21	100		22	100	Kab Pekalongan	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100		20	100		20	100		21	100		21	100		22	100	Kab Pekalongan	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100		21	100		21	100		22	100		22	100		23	100	Kab Pekalongan	
7.01.	KECAMATAN TALUN								96			96			99			103			106			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100		26	100		26	100		27	100		28	100		29	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Talun
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100		35	100		35	100		35	100		37	100		38	100	Kab Pekalongan	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100		3	100		3	100		3	100		3	100		3	100	Kab Pekalongan	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100		30	100		30	100		31	100		32	100		33	100	Kab Pekalongan	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100		3	100		3	100		3	100		3	100		3	100	Kab Pekalongan	
7.01.	KECAMATAN LEBAKBARANG								142			142			146			152			156			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100		40	100		40	100		41	100		43	100		44	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Lebakbarang
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100		48	100		48	100		49	100		51	100		53	100	Kab Pekalongan	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100		8	100		8	100		9	100		9	100		9	100	Kab Pekalongan	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100		30	100		30	100		31	100		32	100		33	100	Kab Pekalongan	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100			100			100			100			100			100	Kab Pekalongan	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100		16	100		16	100		16	100		17	100		17	100	Kab Pekalongan	
7.01.	KECAMATAN KANDANGSERANG								141			141			145			150			155			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100,00	100	100		37	100		37	100		38	100		40	100		41	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Kandangserang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan	
						2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					Target
							Target	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100,00	100	100	33	100	33	100	33	100	35	100	36	100	Kab Pekalongan			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keterlibatan Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan keterlibatan umum	Persentase penanganan gangguan tranribumlinmas di tingkat kecamatan	%	100,00	100	100	14	100	14	100	14	100	15	100	15	100	Kab Pekalongan			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100,00	100	100	38	100	38	100	38	100	40	100	41	100	Kab Pekalongan			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100,00	100	100	20	100	20	100	21	100	21	100	22	100	Kab Pekalongan			
7.01.	KECAMATAN PANINGGARAN							87		87		89		92		95					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100,00	100	100	25	100	25	100	25	100	26	100	27	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Paninggaran		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100,00	100	100	31	100	31	100	31	100	33	100	34	100	Kab Pekalongan			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keterlibatan Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan keterlibatan umum	Persentase penanganan gangguan tranribumlinmas di tingkat kecamatan	%	100,00	100	100	5	100	5	100	5	100	6	100	6	100	Kab Pekalongan			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100,00	100	100	21	100	21	100	21	100	22	100	23	100	Kab Pekalongan			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100,00	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100,00	100	100	5	100	5	100	5	100	6	100	6	100	Kab Pekalongan			
7.01.	KECAMATAN KESESI							156		156		160		166		171					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	39	100	39	100	40	100	41	100	43	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Kesesi		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	50	100	50	100	51	100	53	100	55	100	Kab Pekalongan			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keterlibatan Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan keterlibatan umum	Persentase penanganan gangguan tranribumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	Kab Pekalongan			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	32	100	32	100	33	100	34	100	35	100	Kab Pekalongan			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	25	100	25	100	26	100	27	100	27	100	Kab Pekalongan			
7.01.	KECAMATAN PETUNGKRIYONO							128		128		132		137		141					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	31	100	31	100	32	100	33	100	34	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Petungkriyono		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	33	100	33	100	34	100	35	100	36	100	Kab Pekalongan			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keterlibatan Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan keterlibatan umum	Persentase penanganan gangguan tranribumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	21	100	21	100	22	100	22	100	23	100	Kab Pekalongan			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	25	100	25	100	26	100	27	100	27	100	Kab Pekalongan			
			Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	18	100	18	100	18	100	19	100	19	100	Kab Pekalongan			
7.01.	KECAMATAN WONOKERTO							154		154		158		164		169					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
					2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target			
					Target	Target	Rp	36	Target	Rp	36	Target	Rp	37	Target	Rp	38			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	36	100	36	100	37	100	38	100	39	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Wonokerto	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	46	100	46	100	47	100	49	100	50	100	Kab Pekalongan		
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan transibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	13	100	13	100	14	100	14	100	15	100	Kab Pekalongan		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	38	100	38	100	39	100	41	100	42	100	Kab Pekalongan		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	21	100	21	100	22	100	23	100	23	100	Kab Pekalongan		
7.01.	KECAMATAN SIWALAN							260		260		266		277		285				
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	81	100	81	100	83	100	86	100	89	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Siwalan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	71	100	71	100	72	100	75	100	77	100	Kab Pekalongan		
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan transibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	11	100	11	100	11	100	12	100	12	100	Kab Pekalongan		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	76	100	76	100	78	100	81	100	83	100	Kab Pekalongan		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	21	100	21	100	22	100	23	100	23	100	Kab Pekalongan		
7.01.	KECAMATAN KARANGDADAP							148		148		152		157		162				
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	%	100	100	100	24	100	24	100	25	100	25	100	26	100	Kab Pekalongan	Kecamatan Karangdadap	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100	43	100	43	100	44	100	46	100	47	100	Kab Pekalongan		
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan transibumlinmas di tingkat kecamatan	%	100	100	100	10	100	10	100	10	100	11	100	11	100	Kab Pekalongan		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah secara tertib dan terkoordinasi.	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	48	100	48	100	49	100	51	100	53	100	Kab Pekalongan		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase pelaksanaan urusan Kepala Daerah yang ditugaskan ditingkat Kecamatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	Kab Pekalongan		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.	Persentase Dokumen/Laporan Pembinaan dan Pengawasan Desa yang Disusun Sesuai Standar Pelaporan	%	100	100	100	23	100	23	100	24	100	24	100	25	100	Kab Pekalongan		
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							2.538		2.539		2.602		2.701		2.780				
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							2.538		2.539		2.602		2.701		2.780				
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Persentase masyarakat yang memperoleh Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	%	43,11	4,64	4,64	417	4,66	417	4,67	428	4,68	444	4,69	457	4,69	Kab Pekalongan	Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dan penguatan budaya politik yang sehat dan demokratis.	Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik dan pengembangan Etika Budaya Berpolitik	%	45,00	2,72	3,40	1.690	4,08	1.691	4,76	1.733	5,44	1.798	5,44	1.851	5,44	Kab Pekalongan		
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya peran serta dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg diberdayakan dan mendapatkan pengawasan	%	47,24	10	10	140	10	140	10	144	10	149	10	153	10	Kab Pekalongan		
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap pengaruh negatif yang mengancam stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya daerah.	Persentase masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Ketahanan Bangsa	%	12	1,09	1,09	86	1,12	86	1,14	89	1,17	92	1,20	95	1,20	Kab Pekalongan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Anggaran											Target akhir Periode RPJMD 2025-2029	Fokus/Lokus	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan				
					2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030							
						Target		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan kapasitas daerah dalam mencegah serta menangani potensi konflik sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Pekalongan	%	100	100		204	100		205	100		210	100		218	100		224	100	Kab Pekalongan	
9.	NON URUSAN							1.451.635			1.452.141			1.488.460			1.544.911			1.590.405			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Tingkat Kematangan Organisasi (Setda)	Indeks	Tinggi (38,66)	Tinggi (40,00)	Tinggi (41,00)		Tinggi (43,00)		Tinggi (44,00)		Tinggi (45,00)		Tinggi (47,00)		Tinggi (47,00)		Tinggi (47,00)		Kab Pekalongan	Sekretariat Daerah	
		Meningkatnya dukungan administrasi, keuangan, sarana prasarana, serta sumber daya yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kab Pekalongan	Semua Urusan	
TOTAL								2.501.735			2.422.578			2.482.795			2.576.958			2.652.845			



B. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Di lingkungan pemerintah daerah, perumusan IKU menjadi sangat penting sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan arah pembangunan yang diinginkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, diwajibkan untuk menyusun IKU yang mencerminkan capaian kinerja.

Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.



Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,61	3,66	3,71	3,76	3,81	3,86	3,91	3,91
2.	IUP.1	Tingkat Kemiskinan	%	8,95	9,15-8,00	8,09-7,98	8,00-7,60	7,84-6,80	7,40-6,40	6,97-6,00	6,97-6,00
3.	IUP.56	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Bank Dunia	%	20,43	31,68	33,19	34,71	36,22	37,74	39,25	39,25
4.		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,96	92,98	93,00	93,10	93,18	93,20	93,22	93,22
5.		Rasio Gini	Indeks	0,327	0,306	0,285	0,264	0,242	0,221	0,20	0,20

Sumber : Bapperida, BPS Kab. Pekalongan; data diolah 2025



2. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta IKU PD.

Indikator Kinerja Daerah juga merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Indikator ini dirancang sebagai panduan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks ini, indikator kinerja tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030 tertuang pada tabel berikut.



Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI											
	1. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan											
1.	IUP.3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80,64	82,37	82,64	82,90	83,16	83,41	83,66	83,66	Pangan
2.	IUP.2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	5,54	5,30	5,20	4,81	4,32	3,78	3,07	3,07	Pangan
3.		Konsumsi Listrik Perkapita	Mwh/jiwa	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,57	Pemerintah Daerah
4.	IUP.44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	0,00	80,05-82,25	80,06-83,25	80,07-84,25	80,08-85,25	80,09-86,25	80,10-87,25	80,10-87,25	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Lingkungan Hidup Berkualitas											
5.	IUP.46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	60,90	70,96	71,01	71,05	71,1	71,14	71,19	71,19	Lingkungan Hidup
6.	IUP.43	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,73	64,84	65,80	66,76	67,71	68,67	69,63	69,63	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	IUP.47	Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%		4,01	8,31	12,61	16,91	21,21	25,51	25,51	Lingkungan Hidup
	3. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim											
8.	IUP.49	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCOzeq	21.317,24	854.836,43	1.608.653,70	3.058.615,03	4.508.576,36	5.958.537,69	7.408.499,02	7.408.499,02	Pemerintah Daerah
9.	IUP.48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	131,25	130,00-125,00	125,61 - 124,16	123,95 - 122,07	122,3 - 119,99	120,64 - 117,91	118,98 - 115,83	118,98 - 115,83	Pemerintah Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
B.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
	1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi											
10.		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,10-5,30	5,60-5,85	6,10-6,97	6,60-7,60	7,00-8,00	7,40-8,40	7,40-8,40	Pemerintah Daerah
11.		Kemiskinan Ekstrem	%	0,51	0,510	0,505	0,500	0,495	0,490	0,485	0,485	Pemerintah Daerah
12.	IUP.36	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	3,30	3,1-2,78	3,05-2,75	2,98-2,66	2,92-2,61	2,87-2,55	2,81-2,5	2,81-2,5	Pemerintah Daerah
13.		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,95	72,70	73,00	73,20	73,40	73,60	73,80	73,80	Pemerintah Daerah
	2. Kesehatan Untuk Semua											
14.	IUP.4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka	74,25	74,50	74,69	74,91	75,12	75,37	75,72	75,72	Kesehatan
15.	IUP.6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSGI)	%	19,50	18,00	17,00	16,00	15,00	13,60	13,00	13,00	Kesehatan
16.	IUP.5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	16,00	16,00	16,00	Kesehatan
17.	IUP.7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	85,40	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	Kesehatan
18.	IUP.8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00	Kesehatan
	3. Pendidikan Berkualitas dan Merata											
19.	IUP.10	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	63,82	64,61	65,40	66,18	66,97	67,76	63,82	63,82	Pendidikan
20.	IUP.10	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	56,09	57,42	58,75	60,07	61,40	62,73	56,09	56,09	Pendidikan
21.	IUP.10	Numerasi SD/Sederajat	%	48,44	50,18	51,93	53,67	55,41	57,15	48,44	48,44	Pendidikan
22.	IUP.10	Numerasi SMP/Sederajat	%	32,83	34,86	36,88	38,91	40,93	42,96	32,83	32,83	Pendidikan
23.	IUP.11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Angka	7,48	7,50	7,52	7,55	7,84	8,12	8,41	8,41	Pendidikan
24.	IUP.12	Harapan Lama Sekolah	Angka	12,46	13,20	13,35	13,50	13,64	13,79	13,94	13,94	Pendidikan
25.	IUP.14	Angka Partisipasi Sekolah 5 - 6 tahun	Angka	88,48	88,55	88,63	88,74	88,89	90,12	90,21	90,21	Pendidikan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26.	IUP.13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,68	6,98	7,27	7,55	7,84	8,12	8,41	8,41	Pemerintah daerah
27.	IUP.15	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	n/a	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	65-70	65-70	Pendidikan
28.	IUP.19	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0.09	0.09	0.16	0.30	0.45	0.59	0.73	0.73	Perpustakaan
4. Perlindungan Sosial yang Adaptif												
29.	IUP.9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	72,19	80,00	80,10	80,20	80,30	80,40	80,40	80,40	Kesehatan
30.	IUP.38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tenaga Kerja
5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju												
31.	IUP.16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	1,80	18,27	19,03	19,80	20,56	21,32	22,08	22,08	Kebudayaan
32.	IUP.17	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	orang	62.000	10.0000-200.000	10.0000-200.000	10.0000-200.000	10.0000-200.000	10.0000-200.000	10.0000-200.000	10.0000-200.000	Kebudayaan
33.	IUP.18	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kebudayaan
34.	IUP. 20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif												
35.	IUP.21	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	65,05	63,93-66,01	66,57 - 66,62	67,33 - 67,41	68,1 - 68,19	68,86 - 68,98	69,62 - 69,77	69,62 - 69,77	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
36.	IUP.22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,12	0,18-0,17	0,17-0,16	0,16-0,15	0,15-0,15	0,15-0,14	0,14-0,13	0,14-0,13	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH											
	1. Daya Saing Sumber Daya Manusia.											
37.		Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)	Angka	45,41	45,30	45,20	45,10	44,80	44,70	44,60	44,60	Pemerintah Daerah
	2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi											
38.	IUP.34	Kapabilitas Inovasi	Nilai	2,43	2,68	2,77	2,86	2,95	3,05	3,14	3,14	Penelitian dan Pengembangan
39.	IUP.55	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	29,66	29,97-30,18	35,59-37,03	41,20-43,88	46,82-50,73	52,44-57,57	58,06-64,42	58,06-64,42	Pemerintah Daerah
40.	IUP.23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	29,31	30,57	30,65	30,75	30,80	30,83	30,85	30,85	Perindustrian
41.	IUP.24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	6,84	6,03	6,21	6,39	6,57	6,75	6,93	6,93	Pariwisata
42.	IUP.25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	5	5-10	6-11	7-12	8-13	9-14	10-15	10-15	Pariwisata
43.	IUP.26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	n/a	2,95	3,11	3,19	3,40	3,61	3,69	3,69	Koperasi dan UKM
44.	IUP.27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,94	1,81	1,86	1,89	1,94	2,03	2,04	2,04	Koperasi dan UKM
45.	IUP.37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Angka	65,13	65,10-65,20	65,15-65,25	65,20-65,30	65,25-65,35	65,30-65,40	65,35-65,45	65,40-65,50	Pemerintah Daerah
	3. Transformasi Digital											
46.	IUP.39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	n/a	68,39	68,61	68,84	69,06	69,28	69,50	69,50	Komunikasi dan Informatika
	4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global											
47.	IUP.30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	22,46	25,17	25,58	25,99	26,40	26,81	27,23	27,23	Penanaman Modal
48.		Ekspor Barang dan Jasa	ribu US\$	561,380	562,000	563,000	564,000	565,000	567,000	567,000	567,000	Pemerintah Daerah
	5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi											
49.		Indeks Desa	Indeks	0,7048	0,7242	0,7300	0,7350	0,7400	0,7450	0,7500	0,7500	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
50.	IUP.35	Persentase Desa Mandiri	%	8,09	14,71	15,07	15,44	15,81	16,18	16,54	16,54	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
51.	IUP.40	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	0,00	63,45	63,86	64,29	64,74	65,21	65,23	65,23	Perumahan dan Kawasan Permukiman
52.	IUP.41	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	78,29	74,94	75,34	75,54	75,84	76,14	76,54	76,54	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
53.	IUP.42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota.	%	2,87	74,98	75,73	76,48	77,23	77,98	78,73	878,73	Pemerintah Daerah
54.	IUP.45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks	49,87	49,90	49,92	49,94	49,96	49,98	50,00	50,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Stabilitas Ekonomi Makro												
55.		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,84	3,92	3,95	3,99	4,03	4,07	4,09	4,09	Setda
56.	IUP.29	Disparitas Harga	%	-1,27	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	Pemerintah Daerah
57.		Tingkat inflasi	%	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	Pemerintah Daerah
58.	IUP.28	Return on Aset (ROA) BUMD	%	7,11	7,04	7,09	7,18	7,24	7,30	7,36	7,36	Setda
59.	IUP.31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,40	0,68	0,71	0,74	0,77	0,80	0,83	0,83	Keuangan
60.	IUP.32	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	3,48	3,49	3,50	3,51	3,52	3,53	3,54	3,54	Setda
61.	IUP.33	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	7,10	6,67	6,68	6,69	6,70	6,71	6,72	6,72	Setda
62.		Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,57	Pemerintah Daerah
D.	Aspek Pelayanan Umum											
	Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar											
63.	IUP.50	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,03	77,10	77,20	77,30	77,40	77,50	77,60	77,60	Pemerintah Daerah
64.	IUP.51	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,42	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	Setda



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
65.	IUP.52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,05	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	3,25	Komunikasi dan Informatika
66.	IUP.53	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,29	4,05	4,10	4,15	4,19	4,24	4,29	4,29	Setda
67.	IUP.54	Indeks Integritas Nasional	Indeks	73,97	79,71	80,52	81,34	82,15	82,97	83,78	83,78	Pemerintah Daerah
E.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)											
		Urusan Pendidikan										
68.	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK)	%	89,78	86,39	86,70	86,80	87,90	88,00	89,50	89,50	Pendidikan
69.	1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK)	%	99,99	99,53	99,70	99,80	99,98	99,99	100,00	100,00	Pendidikan
70.	1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK)	%	79,25	78,40	79,76	79,78	79,79	79,80	79,81	79,82	Pendidikan
71.	1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK)	%	20,35	24,20	24,60	24,70	24,80	24,90	25,00	25,00	Pendidikan
		Urusan Kesehatan										
72.	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (IKK)	%	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	Kesehatan
73.	1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
74.	1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
75.	1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
76.	1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
77.	1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
78.	1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
79.	1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (IKK)	%	82,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
80.	1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (IKK)	%	96,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
81.	1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (IKK)	%	93,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
82.	1.b.11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (IKK)	%	96,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
83.	1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
84.	1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (IKK)	%	85,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
85.	1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesehatan
		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
86.	1.c.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (IKK)	%	80,15	82,15	83,50	84,51	85,18	85,85	86,83	86,83	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
87.	1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (IKK)	%	77,43	79,54	81,65	83,76	85,87	87,99	90,10	90,10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
88.	1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (IKK)	rasio	3,658	3,677	3,695	3,713	3,732	3,750	3,768	3,768	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
89.	1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (IKK)	%	88,47	88,62	88,78	88,93	89,06	89,24	89,39	90,01	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
90.	1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK)	%	62,21	62,35	62,50	62,66	62,80	62,86	63,11	63,11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
91.	1.c.5	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
92.	1.c.7	Mengukur tingkat kemandapan jalan (IKK)	%	78,29	78,69	79,09	79,49	79,89	80,29	80,69	76,54	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
93.	1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (IKK)	%	33,15	39,67	46,19	52,72	59,24	65,76	72,28	72,28	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
94.	1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
95.	1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
96.	1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
97.	1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (IKK)	%		2,10	2,15	2,20	2,25	2,30	2,35	2,35	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
98.	1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (IKK)	%	0	3,08	3,20	3,39	3,50	3,62	3,72	3,72	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
99.	1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
100.	1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
101.	1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
102.	1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
103.	1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
104.	1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
105.	1.e.5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (IKK)	%	23,88	24,00	24,25	24,50	24,75	25,00	25,25	25,25	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
106.	1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (IKK)	menit	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Urusan Sosial										
107.	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sosial



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
108.	1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sosial
		Urusan Tenaga Kerja										
109.	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tenaga Kerja
110.	2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK)	%	29,26	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	35,00	Tenaga Kerja
111.	2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (IKK)	%	40,00	40,41	40,52	40,65	40,70	40,75	40,75	40,75	Tenaga Kerja
112.	2.a.4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	%	31,58	20,22	20,44	20,66	20,77	20,88	20,88	20,88	Tenaga Kerja
113.	2.a.5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK)	%	55,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tenaga Kerja
		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
114.	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (IKK)	%	14,21	14,25	14,30	14,35	14,40	14,45	14,50	14,55	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
115.	2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
116.	2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (IKK)	%	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pangan										
117.	2.h.1	Persentase Cadangan Pangan (IKK)	%	2,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pangan
		Urusan Pertanahan										
118.	2.i.1	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanahan
119.	2.i.2	Persentase ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	38,60	38,60	Pertanahan
120.	2.i.3	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pertanahan
		Urusan Lingkungan Hidup										
121.	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota (IKK)	%	60,90	61,00	61,50	62,00	63,00	64,00	65,00	65,00	Lingkungan Hidup
122.	2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (IKK)	%	33,50	34,00	34,50	35,00	35,50	36,00	36,50	36,50	Lingkungan Hidup
123.	2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (IKK)	%	64,71	64,75	65,00	65,25	65,50	65,75	66,00	66,00	Lingkungan Hidup
		Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
124.	2.k.1	Perekaman KTP Elektronik (IKK)	%	99,990	99,991	99,992	99,993	99,994	99,995	99,996	99,996	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
125.	2.k.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK)	%	60,71	60,75	60,80	60,85	60,90	60,95	61,00	61,00	Kependudukan dan Pencatatan Sipil



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
126.	2.k.3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran (IKK)	%	97,50	97,51	97,52	97,53	97,54	97,55	97,56	97,56	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
127.	2.k.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK)	Perangkat daerah	-	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,00	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
128.	2.l.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (IKK)	%	22,01	30,95	4,31	4,50	3,74	3,88	3,00	3,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Urusan Pengendalian Penduduk dan KB										
129.	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total) (IKK)	Angka	2,25	2,17	2,16	2,16	2,15	2,15	2,15	2,15	Pengendalian Penduduk dan KB
130.	2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (IKK)	%	67,00	62,10	62,20	62,30	62,40	62,50	62,60	62,60	Pengendalian Penduduk dan KB
131.	2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,41	6,41	6,35	6,30	6,25	6,20	6,15	6,15	Pengendalian Penduduk dan KB
		Urusan Perhubungan										
132.	2.n.1	Rasio konektivitas (IKK)	Angka	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	Perhubungan
133.	2.n.2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota (IKK)	Angka	0,58	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	Perhubungan
		Urusan Komunikasi dan Informatika										
134.	2.0.1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Komunikasi dan Informatika



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
135.	2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (IKK)	%	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	Komunikasi dan Informatika
136.	2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (IKK)	%	99,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Komunikasi dan Informatika
		Urusan Koperasi dan UMKM										
137.	2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (IKK)	%	53,42	54,00	54,50	55,00	55,50	56,00	56,50	56,50	Koperasi dan UMKM
138.	2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (IKK)	%	88,57	88,60	88,70	88,80	88,90	89,00	89,10	89,10	Koperasi dan UMKM
		Urusan Penanaman Modal										
139.	2.q.	Persentase peningkatan investasi (IKK)	%	-39,03	-26,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Penanaman Modal
		Urusan Kepemudaan dan Olahraga										
140.	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (IKK)	%	5,22	5,24	5,28	5,30	5,32	5,35	5,38	5,38	Kepemudaan dan Olahraga
141.	2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (IKK)	%	100,00	100,00	1.00,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kepemudaan dan Olahraga
142.	2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga (IKK)	%	70,58	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50	73,50	Kepemudaan dan Olahraga
		Urusan Statistik										
143.	2.s.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Statistik



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
144.	2.s.2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Statistik
		Urusan Persandian										
145.	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah (IKK)	%	88,68	88,70	88,75	88,80	88,85	88,90	88,95	88,95	Persandian
		Urusan Kebudayaan										
146.	2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kebudayaan
		Urusan Perpustakaan										
147.	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK)	%	84,98	85,00	85,20	85,40	85,70	85,80	86,00	86,00	Perpustakaan
148.	2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IKK)	%	66,65	66,70	66,75	66,80	66,90	70,00	70,20	70,20	Perpustakaan
		Urusan Kearsipan										
149.	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kearsipan
150.	2.w.2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kearsipan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Urusan Kelautan dan Perikanan										
151.	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap) kabupaten/kota (IKK)	Ton	5.983,22	6.067,00	6.152,00	6.244,00	6.337,00	6.443,00	6.529,00	6.529,00	Kelautan dan Perikanan
152.	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) kabupaten/kota (IKK)	Ton	9.223,00	9.485,00	9.648,00	9.817,00	9.992,00	10.174,00	10.362,00	10.362,00	Kelautan dan Perikanan
		Urusan Pariwisata										
153.	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan (IKK)	%	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,60	Pariwisata
154.	3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	10,71	10,80	10,90	11,00	11,10	11,20	11,30	11,30	Pariwisata
155.	3.b.3	Tingkat hunian akomodasi (IKK)	%	83,28	83,40	83,60	83,80	84,00	84,20	84,40	84,40	Pariwisata
156.	3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku (IKK)	%	6,29	5,66	5,72	5,78	5,85	5,91	5,97	5,97	Pariwisata
157.	3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK)	%	0,180	0,181	0,182	0,183	0,184	0,185	0,186	0,186	Pariwisata
		Urusan Pertanian										
158.	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	53,32	53,46	53,54	53,62	53,70	53,78	53,86	53,86	Pertanian
159.	3.c.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	29,97	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Pertanian
		Urusan Perdagangan										
160.	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perdagangan
161.	3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK)	%	70,91	71,00	71,10	71,20	71,30	71,40	71,50	71,50	Perdagangan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Urusan Perindustrian										
162.	3.g.1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota (IKK)	%	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,56	Perindustrian
163.	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK)	%	97,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perindustrian
164.	3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perindustrian
165.	3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perindustrian
166.	3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perindustrian
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah (Perencanaan dan Keuangan)										
167.	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (IKK)	%	15,92	16,00	16,10	16,20	16,30	16,40	16,50	16,50	Keuangan
168.	4.a.2	Rasio PAD (IKK)	%	16,25	16,50	16,75	17,00	17,25	17,50	17,75	17,75	Keuangan
169.	4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (IKK)	%	3,00	Level 3 (3,01)	Level 3 (3,01)	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,03)	Level 3 (3,03)	Level 3 (3,03)	Pengawasan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
170.	4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (IKK)	%	3,00	Level 3 (3,01)	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,03)	Level 3 (3,04)	Level 3 (3,05)	Level 3 (3,06)	Level 3 (3,06)	Pengawasan
171.	4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) (IKK)	%	64,34	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	Keuangan
172	4.a.6	Opini Laporan Keuangan (IKK)	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)										
173.	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (IKK)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
174.	4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (IKK)	%	76,78	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00	Sekretariat Daerah
175.	4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (IKK)	%	25,89	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	31,00	Sekretariat Daerah
176.	4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (IKK)	%	15,21	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	21,00	Sekretariat Daerah
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)										
177.	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (IKK)	%	76,23	59,00	59,58	59,78	60,28	61,78	62,28	62,28	Pendidikan dan Pelatihan
178.	4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (IKK)	%	14,87	17,92	18,37	18,62	18,87	19,12	19,37	19,37	Pendidikan dan Pelatihan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab Urusan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
179.	4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (IKK)	%	43,03	56,72	56,87	57,02	57,17	57,32	57,47	57,47	Pendidikan dan Pelatihan
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)										
180.	4.d.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK)	%	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Keuangan
181.	4.d.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK)	%	0,86	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	Keuangan
182.	4.d.3	Manajemen Aset	Skor	4	4	4	4	4	4	4	4	Keuangan
183.	4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	Keuangan
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)										
184.		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	99,68	99,70	99,72	99,74	99,76	99,78	99,80	99,80	Keuangan
185.		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Keuangan

Sumber : Bapperida Kab. Pekalongan; data diolah; 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas **Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan periode 2029-2030** yang menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan secara tahunan dalam lima tahun ke depan. RPJMD Tahun 2025-2029 ini juga merupakan penjabaran **tahap pertama** RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045. RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun dengan tetap memperhatikan kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-20245, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan kebijakan lainnya yang berlaku. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan harapan akan dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun ke depan.

Seluruh pihak diharapkan dapat mendukung implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pekalongan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu **“Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil dan Sejahtera”**, yang dijabarkan dalam **4 (empat) sasaran daerah** yaitu: 1).Meningkatnya SDM Kabupaten Pekalongan yang Unggul dan Inklusif, 2).Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap resiko bencana, 3).Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mendorong penguatan UMKM, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pemerataan ekonomi di Kabupaten Pekalongan, 4).Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dalam pelayanan publik.

A. PEDOMAN TRANSISI

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2030–2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2045.

B. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati Pekalongan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan semua pemangku kepentingan agar mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.



3. Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah pada periode yang sama sebagai dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah.
4. RPJMD ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam RKPD tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun.
5. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD dan mewujudkan sinergitas pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD kedalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah.
6. RPJMD ini menjadi dasar bagi DPRD dan masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah.

Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan dapat diwujudkan dengan baik dengan dukungan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, dan peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Kabupaten Pekalongan yang lebih maju, adil dan sejahtera secara berkelanjutan.

Demikian semoga bermanfaat bagi kita bersama.

BUPATI PEKALONGAN
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ADITOMO HERLAM~~B~~BANG, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680517 198903 1 009